

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2011
*(Audited)***

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

INDEKS ISI	
INDEKS ISI	ii
INDEKS TABEL	iii
INDEKS GRAFIK	iv
INDEKS DAFTAR	vi
INDEKS SINGKATAN	viii
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xi
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	xvi
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI APBN	3
II. NERACA	9
III. LAPORAN ARUS KAS	13
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1E
A. PENJELASAN UMUM	17
A.1. DASAR HUKUM	17
A.2. KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	17
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	60
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	64
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN	82
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	82
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN	83
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	105
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	109
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	109
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA	110
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA	170
C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN	191
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	192
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	192
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	195
DAFTAR	215

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

INDEKS TABEL

1.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 – 2011	36
2.	Perkembangan Belanja Negara tahun 2007-2011	51
3.	Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2007-2011	52
4.	Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2007-2011	57
5.	Presentase Anggaran dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2011	58
6.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007-2011	58
7.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2011 dan TA 2010	89
8.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	115
9.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	116
10.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan <i>Promissary Notes</i>	163
11.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	164
12.	Suku Anggaran Lebih TA 2011 dan TA 2010	184
13.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411990 Tahun 2011 dan 2010	170
14.	Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2011	477
15.	Debtswitch Tahun 2011	478
16.	Transaksi Buyback Tahun 2011	478
17.	Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN Tahun 2011	481
18.	Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011	482
19.	Jatuh Tempo SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011	483
20.	Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011	484
21.	Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011	485
22.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011	487
23.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2011	488
24.	Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2011	490
25.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SESM Rupiah per 31 Desember 2011	491
26.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam Rupiah per 31 Desember 2011	493
27.	Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2011	495

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**INDEKS GRAFIK**

1. Sumber-sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011	18
2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2007 – 2011	20
3. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2007-2011	21
4. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2011	21
5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011	22
6. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011	23
7. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2007 – 2011	23
8. Laju Inflasi Tahun 2010 dan 2011	24
9. Andil Inflasi Tahun 2010 dan 2011	25
10. Perbandingan Ekspor Impor Tahun 2010 dan 2011	27
11. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2011	27
12. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2011	30
13. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2011	31
14. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2009-2011	31
15. Cadangan Devisa Triwulanan 2009-2011	32
16. Tren Tax Ratio Tahun 2007-2011	38
17. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011	39
18. Realisasi PNEP Lainnya tahun 2007-2011	40
19. Target dan Realisasi Penerimaan PNEP Tahun 2007-2011	41
20. Target dan Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2007-2011	42
21. KIL Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar	44
22. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	44
23. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2010	46
24. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2011	46
25. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2011	47
26. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2011	47
27. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2011	48
28. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2011	49
29. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2011	49
30. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2011	50
31. Grafik Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2007-2011	52

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

32. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2011	53
33. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011	54
34. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2007-2011	55
35. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2007-2011	56
36. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2007-2011	56
37. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPA TA 2007 - 2011	82
38. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2007 – 2011	83
39. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011	84
40. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011	89
41. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011	90
42. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2011	90
43. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011	95
44. Komposisi Pendapatan BLU TA 2011	107
45. Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit BLU TA 2011	108
46. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Netra pada Neraca Tahun 2007 – 2011	109
47. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	179
48. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	194
49. Struktur Surat Berharga Negara	476
50. Struktur <i>Outstanding</i> ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2011	482
51. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2011	483
52. Tingkat Kupon Seri FR per 31 Desember 2011	484
53. Struktur <i>Outstanding</i> ORI per 31 Desember 2011	486
54. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011	486
55. Struktur <i>Outstanding</i> Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011	487
56. Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011	487
57. Struktur <i>Outstanding</i> VR per 31 Desember 2011	488
58. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2011	489
59. Struktur <i>Outstanding</i> SPN per 31 Desember 2011	489
60. Struktur <i>Outstanding</i> SUP per 31 Desember 2011	490
61. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2011	490
62. Struktur <i>Outstanding</i> Fixed Rate SBSN per 31 Desember 2011	492
63. Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2011	492

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

64. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2011	492
65. Struktur <i>Outstanding</i> SBN Valas per 31 Desember 2011 (dalam rupiah)	494
66. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2011	494
67. Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2011	494
68. Struktur <i>Outstanding</i> SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2011	495

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2011	216
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011	232
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2011	255
4. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2011	325
5. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2011	333
6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2011	338
7. Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2011	339
8. Kas pada K/L per 31 Desember 2011	340
9. Piutang PNBFP per 31 Desember 2011	344
10. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	345
11. Uang Muka Belanja pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	346
12. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi	347
13. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	348
14. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN	351
15. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN	366
16. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional	367
17. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	368
18. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	371
19. Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	372
20. Aset KIKS per 31 Desember 2011	374
21. Aset Eks BPPN yang Dikelola Tim Koordinasi	365
22. Ringkasan Aset Negara yang Dikelola PPA per 31 Desember 2011	386
23. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	388
24. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2011	393
25. Surat Berharga Negara Jangka Pendek Dalam Negeri per 31 Desember 2011	397
26. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2011	398
27. Ikhtisar Laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2011	403
28. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2011	405
29. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan	418
30. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2011	425
31. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010	427
32. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2011	476

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJT	: Badan Penyelur Jarak Tul
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
B POM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perhambatan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Beras Nasional
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Exchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LEMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pelelaksanaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Pemukiman Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PPH	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSD	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SIAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Perintah Kekuasaan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukaan
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganli Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pembebasan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP,TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	83
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	84
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	84
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	85
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	85
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	85
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	87
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	87
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	87
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	88
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	88
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	88
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	91
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	91
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	92
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	92
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	93
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	94
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	94
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	95
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah	95
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	96
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	96
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	96
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	97
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Lunjuri Khusus dan Penyesuaian	97
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Lunjuri Khusus	97
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	97
Catatan	B.2.2.3	Suspensi	98
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	Surplus (Defisit) Anggaran	98
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	99
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	99
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	99

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	99
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	100
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	100
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	101
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	101
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	102
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	102
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	102
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	102
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	102
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	103
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	104
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	104

SILPA (SIKPA)

Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)	104
---------	-------	---	-----

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	105
---------	-----	-------------------------	-----

NERACA**ASET**

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	110
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	110
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya	110
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	111
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	111
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	112
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	113
Catatan	C.2.8	Uang Muka dan Rekening BUN	114
Catatan	C.2.9	Piutang Pajak	114
Catatan	C.2.10	Piutang Bukan Pajak	117
Catatan	C.2.11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	119
Catatan	C.2.12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganli Rugi	119
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	120
Catatan	C.2.14	Uang Muka Belanja	120
Catatan	C.2.15	Piutang dari Kegiatan BLU	121
Catatan	C.2.16	Piutang Lain-lain	125
Catatan	C.2.17	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	125
Catatan	C.2.18	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	125
Catatan	C.2.19	Investasi Jangka Pendek BLU	126
Catatan	C.2.20	Investasi Jangka Pendek Lainnya	126
Catatan	C.2.21	Persediaan	127
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.22	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	128
Catatan	C.2.23	Dana Bergulir	128

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Catatan	C.2.24	Investasi Non Permanen Lainnya	129
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen PMN	130
Catatan	C.2.26	Investasi Permanen BLU	134
Catatan	C.2.27	Investasi Permanen Lainnya	134
Catatan	C.2.28	Aset Tetap	135
Catatan	C.2.29	Aset Lainnya	136
Catatan	C.2.30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	151

KEWAJIBAN

		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.31	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	151
Catatan	C.2.32	Utang Kepada Pihak Ketiga	152
Catatan	C.2.33	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	153
Catatan	C.2.34	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	154
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	155
Catatan	C.2.36	Utang Subsidi	156
Catatan	C.2.37	Utang SEN Jangka Pendek	156
Catatan	C.2.38	Pendapatan Diterima di Muka	156
Catatan	C.2.39	Utang Jangka Pendek Lainnya	156
Catatan	C.2.40	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara	158
Catatan	C.2.41	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	159
Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	160
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	160
Catatan	C.2.44	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	162
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	162
		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.46	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	164
Catatan	C.2.47	SILPA (SILPA) Setelah Penyesuaian	165
Catatan	C.2.48	Dana Lancar Lainnya	166
Catatan	C.2.49	Cadangan Piutang	166
Catatan	C.2.50	Cadangan Persediaan	166
Catatan	C.2.51	Pendapatan yang Ditangguhkan	166
Catatan	C.2.52	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	167
Catatan	C.2.53	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	168
Catatan	C.2.54	Barang/Jasa yang Harus Diterima	168
Catatan	C.2.55	Selisih Kurs Bagian Lancar	168
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.56	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	168
Catatan	C.2.57	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	168
Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	169
Catatan	C.2.59	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	169
Catatan	C.2.60	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	169

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	170
---------	-----	-------------------------	-----

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Catatan	C.4	Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan	191
---------	-----	--	-----

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

LAPORAN ARUS KAS**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	195
Catatan	D.2.2	PNBP	199
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	200
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	201
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	202
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	202
Catatan	D.2.7	Subsidi	203
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	204
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	204
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	204
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	205
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	205
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	205
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	205
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	206
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	206
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	206

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.18	Penjualan Aset	207
Catatan	D.2.19	Belanja Modal	207

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	208
Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	209
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	210
Catatan	D.2.23	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	210
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	211
Catatan	D.2.25	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	211
Catatan	D.2.26	Penerusan Pinjaman	211

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.27	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	212
Catatan	D.2.28	PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto)	213
Catatan	D.2.29	Kiriman Uang (Neto)	213
Catatan	D.2.30	Transito (Neto)	214

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011**

- 01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung Jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
- 02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 – 05 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi -pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
- 03 Dalam Laporan BPK Nomor 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010 karena permasalahan yang berkaitan dengan 1) ketidakjelasan transaksi pengganti atas transaksi pembatalan penerimaan perpajakan (*reversal*), penetapan dan penagihan PBB Migas tidak sesuai UU PBB dan UU Migas, dan penyelesaian PPN melalui Pajak Ditanggung Pemerintah yang tidak sesuai dengan UU PPN; 2) pencatatan Uang Muka BUN yang tidak dapat mengidentifikasi transaksi talangan dan penggantian yang berpengaruh pada pencatatan SAL; 3) permasalahan pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak; dan 4) permasalahan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap.
- Dalam tahun 2011, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan penagihan PBB Migas sesuai UU PBB, perbaikan metodologi rekonsiliasi data dan penelitan atas *reversal* penerimaan perpajakan, penyelesaian PPN atas BBM sehingga sesuai dengan UU dan ketentuan berlaku, pemetaan dan penelusuran data rincian Uang Muka BUN, serta perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.28 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp1.567,97 triliun dan Rp1.184,30 triliun yang merupakan nilai Aset Tetap berdasar Neraca Kementerian Negara/Lembaga (KL) dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan penyusutan. Pemerintah telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal per 31 Desember 2004, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP sebagai berikut: 1) Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP; 2) Aset Tanah Jalan Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum selesai dilakukannya IP dan hasil IP tidak memadai; 3) Aset Tetap hasil IP pada tiga KL senilai Rp3,88 triliun dicatat ganda; 4) pencatatan hasil IP pada 40 KL masih selisih senilai Rp1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 5) Aset Tetap pada 14 KL senilai Rp6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya; dan 6) Pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP.
- 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.29 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp438,63 triliun dan Rp278,20 triliun. Aset Lainnya tersebut termasuk Aset Eks BPPN dengan nilai per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp67,54 triliun dan Rp29,20 triliun. Kenaikan Aset Eks BPPN senilai Rp38,34 triliun berasal dari hasil inventarisasi, perhitungan, dan penilaian yang dilakukan Pemerintah. Pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN tersebut masih mengandung kelemahan yaitu: 1) Pemerintah belum menemukan dokumen *cease* atas Aset Eks BPPN berupa Aset Kredit senilai Rp18,25 triliun; 2) Aset eks BPPN yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) senilai Rp11,18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; 3) Aset Eks BPPN berupa tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) senilai Rp8,68 triliun belum didukung kesepakatan dengan Pemegang Saham; 4) Aset Eks BPPN berupa aset properti sebanyak 917 item belum dinilai; dan 5) Pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Eks BPPN yang berupa piutang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- 06 Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP Aset Tetap serta mencatat Aset Eks BPPN berdasarkan dokumen yang valid dan menyajikannya sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, laporan keuangan yang kami sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 dan 2010 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 07 Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan keputusan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

pelaksanaan APBN TA 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24b/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan Nomor 24c/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA, *u*


Drs. Hadi Poernomo, Ak
Register Negara No. D-786 *file*

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2011 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 - 31 Desember 2011. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.295,00 triliun atau 98,05 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883,72 triliun atau 97,30 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp411,32 triliun atau 99,71 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2011 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp44,50 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2011 sebesar Rp84,40 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2011 adalah sebesar Rp130,95 triliun atau 86,82 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46,55 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)			TA 2010 (<i>Audited</i>)
	Anggaran (UU No. 11/2011)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.189,91	1.210,60	103,48	995,27
Belanja Negara	1.320,75	1.295,00	98,05	1.042,12
Belanja Pemerintah Pusat	908,24	883,72	97,30	697,41
Transfer ke Daerah	412,51	411,32	99,71	344,73
Suspen Belanja Negara	-	(0,05)	-	(0,02)
Surplus (Defisit) Anggaran	(150,84)	(84,40)	55,99	(46,85)
Pembiayaan Neto	150,84	130,95	86,82	91,55
SiLPA (SiKPA)		46,55		44,71

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**2. NERACA**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.023,44 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp266,81 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp750,03 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.567,97 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp438,63 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.947,37 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp246,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.700,93 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.076,07 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40,81 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.035,26 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Aset	3.023,44	2.423,69
Aset Lancar	266,81	254,78
Investasi Jangka Panjang	750,03	706,41
Aset Tetap	1.567,97	1.184,30
Aset Lainnya	438,63	278,20
Kewajiban	1.947,37	1.796,08
Kewajiban Jangka Pendek	246,44	201,34
Kewajiban Jangka Panjang	1.700,93	1.594,74
Ekuitas Dana Neto	1.076,07	627,61
Ekuitas Dana Lancar	40,81	83,46
Ekuitas Dana Investasi	1.035,26	544,15

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp98,98 triliun, sedangkan pada awal tahun 2011 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,03 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 menjadi Rp99,01 triliun.

Selama TA 2011 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp32,78 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp117,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp131,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,31 triliun, penurunan karena penggunaan SAL

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

sebesar Rp40,32 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,29 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 menjadi Rp107,84 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp6,61 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,29 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,25 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,33 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,10 triliun. Selama tahun 2011 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,17 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp121,26 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung *)	98,98	46,06
Koreksi Saldo Awal	0,03	20,99
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	99,01	67,05
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	32,78	33,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(117,62)	(80,04)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	131,39	91,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1,31	2,93
Penggunaan SAL	(40,32)	(17,35)
Penyesuaian Pembukuan	1,29	(1,18)
Kenaikan (Penurunan) Kas	8,83	29,11
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	107,84	96,16

*) Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 sebesar Rp98,98 triliun berasal dari Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU Tahun 2010 sebesar Rp96,16 triliun ditambah dengan Rekening Khusus Rp2,82 triliun.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2011 (Audited)		% Realisasi terhadap Anggaran	TA 2010 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah						
I. Penerimaan Perpajakan						
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1	878.685.216.762.000	873.873.892.389.381	99,45	723.306.668.621.739	
2. Pajak Penghasilan Internasional	B.2.1.1.1	831.745.348.636.000	819.752.426.342.423	98,56	664.392.134.931.281	
3. Pajak Penghasilan Internasional	B.2.1.1.2	46.939.868.126.000	54.121.466.056.958	115,30	28.914.533.690.448	
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	286.567.317.002.000	331.471.821.098.730	115,67	268.941.856.208.841	
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	191.976.022.718.000	213.823.349.552.827	111,38	188.825.442.320.286	
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	29.835.823.000.000	28.163.973.126.600	97,74	30.096.932.694.266	
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	50.339.436.023.000	69.380.502.802.532	137,79	59.428.639.159.020	
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	15.416.035.261.000	20.103.995.586.771	130,41	10.590.842.035.270	
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	4.662.105.506.000	5.253.938.861.304	112,69	3.022.986.560.763	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.169.914.639.272.000	1.210.599.653.359.415	103,48	995.271.511.391.343	
B. Belanja Negara	B.2.2	908.243.422.687.800	883.721.886.196.519	97,30	697.406.380.187.177	
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1					

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -6-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2011 (Audited)		TA 2010 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	184.088.938.020.000	175.737.918.419.015	95,48	148.078.084.098.608
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	142.335.864.901.000	124.639.479.502.304	87,57	97.596.838.399.825
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	144.571.840.017.000	117.854.532.071.332	81,52	80.287.065.695.665
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	108.583.810.504.000	93.281.919.810.888	87,50	88.383.233.764.087
5. Subsidi	B.2.2.1.5	238.486.978.142.000	295.358.229.636.324	123,88	192.707.049.527.199
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.8	426.192.193.000	300.108.798.353	70,42	70.008.777.575
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	77.467.135.177.000	71.104.328.162.347	91,79	68.611.111.986.287
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	14.302.662.733.800	5.465.389.795.958	38,21	21.672.987.947.920
II. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	412.507.891.828.200	411.324.764.631.790	99,71	344.727.611.830.379
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	347.538.605.495.000	347.246.213.954.316	99,92	316.711.293.029.068
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	96.772.082.547.000	96.908.991.961.316	100,14	92.183.491.233.868
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	100,00	203.571.480.627.200
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	25.232.800.900.000	24.803.509.925.000	98,30	20.956.311.168.000
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	64.968.286.333.200	64.078.550.677.474	98,63	28.016.318.801.311
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	10.421.312.993.000	10.421.312.993.000	100,00	9.089.613.680.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	54.547.973.340.200	53.657.237.684.474	98,37	18.918.705.121.311
III. Sisa Pokok Belanja Negara	B.2.2.3	.	(47.504.353.295)		(16.772.272.739)
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	1.320.751.314.516.000	1.294.999.146.475.024	98,05	1.042.117.219.744.817
D. Pembiayaan	B.2.4	(150.836.675.244.000)	(84.399.493.115.609)	55,95	(46.845.708.353.474)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 7.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2011 (Audited)		TA 2010 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)		153.613.307.023.000	148.748.034.850.068	96,83	96.118.516.369.932
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1	40.574.043.832.000	40.319.043.048.000	99,37	22.189.312.607.078
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.1	8.176.680.057.000	8.608.845.485.456	105,29	-
3. Privatisasi dan Penyulatan Asut Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	1.390.680.442.000	1.587.981.517.178	114,91	3.232.148.153.195
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.3	128.653.883.000.000	119.884.385.458.065	94,84	91.102.588.250.248
Penerimaan Surat Berharga Negara	B.2.4.1.4		207.136.113.198.150		187.634.217.942.000
Pengeluaran Surat Berharga Negara	B.2.4.1.5	1.452.125.982.000	187.271.747.737.085		(76.531.619.891.752)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	121.112.428.300.000	819.382.641.833	42,85	393.606.359.471
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.7	(904.000.000.000)	(19.843.883.312.264)	93,04	(19.798.148.000.000)
7. Kewajiban Pinjaman	B.2.4.1.8	(2.617.700.000.000)	(2.617.700.000.000)	100,00	(1.000.000.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.2	(2.776.631.779.000)	(17.799.165.225.648)	641,03	(4.566.504.969.317)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		56.182.884.835.000	33.747.178.723.921	60,07	54.794.790.200.207
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	19.201.800.000.000	15.266.144.513.219	79,50	28.874.844.488.116
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	36.981.084.835.000	18.481.034.210.702	49,87	25.820.145.711.081
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	(11.724.776.614.000)	(4.223.841.471.288)	36,02	(6.728.763.567.688)
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(47.234.740.000.000)	(47.322.502.478.271)	100,19	(50.632.531.581.836)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	150.836.675.244.000	130.948.869.624.420	86,82	91.552.011.490.615
Jumlah Pembiayaan (D.1 + D.11)			46.549.376.508.811		44.706.303.047.141
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D+C)	B.2.5				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -B-

NERACA
(AUDITED)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

II. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam
Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (Audited)	31 Des 2010 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	82.453.918.298.407	82.430.710.192.763
Rekening Kas di KPPI	C.2.2	11.870.856.947.661	9.218.612.887.732
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	6.615.552.720.213	8.539.601.162.693
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.766.875.778.441	8.652.179.999.211
Kas pada BLU	C.2.7	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681
Jumlah Kas dan Bank		121.261.988.260.868	117.332.963.445.378
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	1.408.995.648.910	1.876.259.417.429
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.9	108.063.462.383.641	70.945.271.446.620
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	19.865.890.412.635	9.020.978.486.579
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.11	-	65.404.443
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	60.470.939.992	38.591.410.963
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.13	-	4.842.752.393.007
Uang Muka Belanja	C.2.14	1.279.165.315.147	614.122.632.355
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.15	1.216.391.989.142	1.121.930.274.893
Piutang Lain-lain	C.2.16	24.977.956.337.945	12.589.892.121.588
Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	C.2.17	4.462.395.347.776	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang	C.2.18	(75.330.131.480.505)	-
Jumlah Piutang (Bersih)		84.615.601.245.772	99.173.594.170.449
Investasi Jangka Pendek			
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.19	170.553.016.059	30.750.000.000
Investasi Jangka Pendek Lainnya	C.2.20	135.839.486.878	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		306.392.502.937	30.750.000.000
Persediaan	C.2.21	59.214.846.453.160	36.366.060.691.005
Jumlah Aset Lancar		266.807.824.111.647	254.779.827.714.288
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.22	-	43.367.037.927.876
Dana Bergulir	C.2.23	8.195.256.111.510	3.891.209.869.656
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.24	4.749.737.167.996	98.464.787.895
Jumlah Investasi Non Permanen		12.944.993.279.506	47.356.712.585.427
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.25	736.991.554.233.014	564.097.107.302.153
Investasi Permanen BLU	C.2.26	6.637.194.500	6.637.194.500
Investasi Permanen Lainnya	C.2.27	87.609.772.784	94.959.618.306.997
Jumlah Investasi Permanen		737.085.801.200.298	659.053.362.803.650
Jumlah Investasi Jangka Panjang		750.030.794.479.804	706.410.075.389.077
Aset Tetap	C.2.28		
Tanah		806.436.356.596.744	565.920.545.473.098
Peralatan dan Mesin		194.852.199.595.042	150.868.673.195.411
Gedung dan Bangunan		152.223.086.918.162	137.042.921.053.205
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		347.164.628.245.235	276.682.171.796.874
Aset Tetap Lainnya		11.517.129.897.802	7.748.128.178.913

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -10-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (Audited)	31 Des 2010 (Audited)
Konstruksi Dalam Pengerjaan		65.780.773.332.765	46.038.727.718.084
Jumlah Aset Tetap		1.567.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585
Aset Lainnya	C.2.29		
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran		1.375.031.741	1.377.894.323
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		249.626.424.418	38.234.179.361
Piutang Jangka Panjang Lainnya		3.737.310.550.736	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		3.988.312.006.895	39.612.173.684
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		212.907.765.825	212.609.665.200
Penerusan Pinjaman		46.540.275.969.109	2.070.158.163.656
Aset Tak Berwujud		12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		37.253.051.374.408	40.987.103.326.394
Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan		19.320.332.310.233	18.459.000.085.715
Dana Penjaminan		75.371.634.076	71.135.792.697
Aset KIKKS		150.508.980.296.216	68.224.330.326.991
Aset Eks BPPN		67.543.984.466.405	29.203.047.197.602
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		14.762.445.010.365	-
Aset Lain-lain		105.892.977.283.250	109.579.037.246.507
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya		(19.970.874.006.883)	-
Jumlah Aset Lainnya		438.634.382.921.494	278.197.482.029.092
JUMLAH ASET		3.023.447.176.108.695	2.423.688.352.538.014
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.31	1.755.574.896.265	1.575.434.547.871
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.32	31.780.634.369.020	31.370.392.714.561
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.33	704.437.258.962	3.547.727.872.825
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.34	106.777.089.896.825	88.286.391.827.798
Utang Biaya Pinjaman	C.2.35	21.924.038.335.465	20.261.543.289.213
Utang Subsidi	C.2.36	29.767.908.969.742	22.161.795.155.886
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.37	39.408.181.897.000	29.235.009.035.000
Pendapatan Diterima di Mula	C.2.38	8.639.914.082.860	119.116.551.668
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.39	5.687.100.837.136	4.786.549.847.266
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		246.444.880.163.115	201.343.960.842.088
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.40	1.095.324.545.750.551	987.172.961.936.007
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.41	11.822.231.724.875	6.389.364.871.001
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.42	877.330.765.232	367.365.935.506
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.43	5.033.082.825.744	3.095.222.852.622
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.103.067.191.068.402	999.024.915.595.136
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.44	571.882.048.619.444	588.983.008.549.466
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.45	26.889.179.304.040	25.726.322.825.757
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		598.771.227.923.484	614.709.331.375.223
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.700.928.418.989.886	1.594.734.246.970.359
JUMLAH KEWAJIBAN		1.947.373.299.153.001	1.798.678.207.812.447
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.46	58.656.722.498.062	52.382.103.135.529
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.47	46.432.649.228.892	46.527.600.199.917
Dana Lancar Lainnya	C.2.48	451.833.801.146	1.540.834.451.110
Cadangan Piutang	C.2.49	84.574.619.543.073	100.141.379.244.383
Cadangan Persediaan	C.2.50	59.214.846.453.160	36.366.060.681.005
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.51	3.810.469.839.673	4.210.269.507.402
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.52	(204.483.864.343.763)	(149.918.772.353.919)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -11-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (Audited)	31 Des 2010 (Audited)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.53	(6.321.674.677.095)	(119.116.551.668)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.54	1.276.453.004.389	614.122.632.355
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.55	(2.798.692.210.245)	(8.282.009.832.937)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		40.813.342.935.893	83.462.571.113.177
Ekuitas Dana Investasi			
Dinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.56	750.030.794.479.804	702.836.007.101.463
Dinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.57	1.567.974.174.587.750	1.184.301.167.405.685
Dinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.58	417.130.365.123.476	246.554.471.882.238
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.59	(1.679.033.615.946.059)	(1.498.908.975.231.842)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.60	(20.841.184.232.370)	(90.635.097.545.054)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.035.200.534.012.601	544.147.573.812.390
EKUITAS DANA NETO		1.076.073.876.947.894	827.610.144.725.567
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.923.447.176.100.695	2.423.888.352.538.014

LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		431.121.712.728.316	354.152.324.675.100
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		277.800.076.679.384	219.538.218.187.355
c. Pajak Bumi dan Bangunan		29.893.184.324.396	28.580.589.978.740
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		(730.151.679)	8.026.429.073.342
e. Cukai		77.010.010.613.795	66.185.922.512.567
f. Pajak Lainnya		3.928.192.148.211	3.371.209.407.180
g. Pajak Perdagangan Internasional		54.121.466.058.958	28.656.900.712.960
Total Penerimaan Perpajakan		873.873.892.399.381	708.491.594.557.244
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		213.823.349.552.827	188.825.442.320.286
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		28.183.973.126.800	30.096.932.684.265
c. PNBP Lainnya		69.228.130.305.985	59.184.782.520.535
d. Penerimaan BLU		20.103.995.586.771	10.590.842.035.270
Total PNBP		331.337.448.572.183	288.677.979.570.356
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	4.258.217.538.874	3.022.986.580.783
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.209.469.558.508.440	980.192.560.688.363
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	175.745.947.140.204	148.072.602.131.332
2. Belanja Barang	D.2.5	124.159.163.392.116	97.597.913.734.089
3. Bunga Utang	D.2.6	93.260.261.464.346	88.381.042.874.663
4. Subsidi	D.2.7	295.358.422.918.324	177.891.875.462.704
5. Belanja Hibah	D.2.8	300.108.798.355	70.009.777.575
6. Bantuan Sosial	D.2.9	71.076.290.233.188	68.595.486.637.272
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	5.484.234.053.592	21.886.884.908.929
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	41.525.561.088.164	45.815.708.635.828
9. Bagi Hasil Cukai	D.2.12	1.408.448.784.184	1.202.111.025.283
10. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.13	53.974.986.297.954	45.185.743.030.483
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	225.533.712.048.000	203.570.976.808.500
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	24.802.229.752.980	20.956.311.188.000
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	10.421.312.993.000	9.099.613.680.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	53.657.183.069.474	18.918.610.308.811
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.176.687.862.019.860	946.994.969.283.449
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		32.781.696.488.577	33.197.591.404.914
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.18	134.372.526.547	263.876.638.486

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -14-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		134.372.526.547	263.876.638.486
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.19	117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(117.624.715.204.186)	(80.043.299.758.387)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.20	249.672.520.403.961	193.449.285.061.884
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.21	33.747.178.723.921	54.794.790.200.206
3. Penerimaan Pengembalian Penunasan Pinjaman	D.2.22	8.608.845.495.456	57.631.783.320
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		292.028.544.623.338	248.301.707.025.210
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.23	89.889.447.737.085	77.531.619.691.752
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.24	47.322.502.478.271	50.632.531.581.836
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.25	19.200.357.712.264	19.799.149.000.000
4. Penunasan Pinjaman	D.2.26	4.223.841.471.298	8.786.395.351.008
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		160.636.149.398.918	156.749.695.624.596
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I - C.II)		131.392.395.224.420	91.552.011.400.614
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	D.2.27	1.081.050.588.567	619.814.108.170
2. PFK Profiancing dan PFK Lainnya (Neto)	D.2.28	-	(34.367.584.001)
3. Kiriman Uang (Neto)	D.2.29	12.817.535.129	2.110.479.145.563
4. Transito (Neto)	D.2.30	219.874.491.857	231.481.078.546
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		1.313.542.615.553	2.927.386.748.278
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		47.862.919.124.364	47.633.689.795.419
Penggunaan SAL		(40.319.043.049.000)	(17.347.948.818.000)
Penyesuaian Pembukaan		1.287.457.711.323	(1.178.259.859.686)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG		98.985.089.736.159	46.062.746.044.414
Koreksi Saldo Awal		26.188.864.543	20.990.525.740.042
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG SETELAH KOREKSI		99.011.278.600.702	67.053.271.784.456
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG		107.842.612.387.387	96.160.754.902.189
Rekening Khusus	C.2.3	-	2.824.334.833.970
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.4	6.615.552.720.213	8.538.801.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.5	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.6	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.7	6.327.755.218.087	8.603.994.085.726
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1	100.924.894.157	53.015.078.502
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	C.2.19	(170.553.016.059)	-
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		121.261.988.260.868	117.332.963.445.378

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -15-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

*Indonesia dan Perekonomian
Global*

Dengan semakin terkoneksiya perekonomian antar negara dan antar kawasan, kinerja perekonomian nasional dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global. Dalam tahun 2011 perekonomian dunia belum menunjukkan perbaikan, bahkan beberapa negara di kawasan Eropa semakin memburuk kondisinya, sehingga merevisi target pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Belum pulihnya kondisi perekonomian kawasan Eropa ditunjukkan oleh masih tingginya angka pengangguran yang mencapai 10,4 persen pada akhir tahun 2011 dan rasio utang terhadap PDB di beberapa negara Eropa semakin meningkat selama tahun 2011. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi negara-negara maju disesuaikan hanya 2,8 persen, negara-negara berkembang 6,4 persen, dan negara-negara ASEAN 5 dapat tumbuh sebesar 4,8 persen.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan volume perdagangan global mencapai 6,9 persen pada tahun 2011 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 7,5 persen. Melemahnya permintaan global menyebabkan ekspor negara-negara kawasan Asia

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

mengalami tekanan sehingga ekspor China menurun 13,4 persen dan ekspor Jepang turun 2,7 persen dari tahun sebelumnya.

Tekanan pada perekonomian Eropa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global juga menyebabkan pergeseran arus modal mengalami penyesuaian. Perbedaan respon kebijakan antar negara-negara maju terkait krisis Eropa mengakibatkan masih derasnya arus modal masuk ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia, terutama dalam bentuk portofolio.

Walaupun terjadi perlambatan ekonomi global di tahun 2011, perekonomian nasional mampu berakselerasi, yang didukung oleh tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Pencapaian ini juga didukung oleh kinerja neraca pembayaran yang surplus. Selain didukung oleh perkembangan ekonomi makro yang cukup baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengamankan pelaksanaan APBN 2011 dengan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat dan memperlancar pelaksanaan belanja negara, maupun mengupayakan pemenuhan sasaran pembiayaan anggaran dengan risiko rendah selama tahun 2011, sehingga realisasi anggaran negara tahun 2011 tetap dapat dijaga pada tingkat yang aman.

Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia 2011

Pada tahun 2011 perekonomian nasional mampu tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN seperti Singapura (6,5 persen), Malaysia dan Vietnam masing-masing tumbuh 5,1 dan 5,7 persen, Thailand (0,5 persen), dan Philipina (3,5 persen).

Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 didorong oleh meningkatnya investasi, ekspor dan konsumsi. Dalam periode tersebut investasi tumbuh 8,8 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen, ekspor tumbuh 13,6 persen, dan impor tumbuh 13,3 persen. Membaiknya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global, masih kuatnya permintaan ekspor komoditas primer, serta diversifikasi pasar ekspor ke negara *emerging market*. Sementara tingginya pertumbuhan investasi terutama didukung oleh investasi langsung (PMA). Konsumsi masyarakat tetap kuat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya belanja pemerintah.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1: Sumber-Sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen oleh BI yang naik menjadi 116,1 pada Oktober 2011. Tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2011. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peran investasi dan ekspor yang meningkat walaupun tingkat ekspor di triwulan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011

Pada tahun 2011 perekonomian nasional mampu tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN seperti Singapura (6,5 persen), Malaysia dan Vietnam masing-masing tumbuh 5,1 dan 5,7 persen, Thailand (0,5 persen), dan Philipina (3,5 persen).

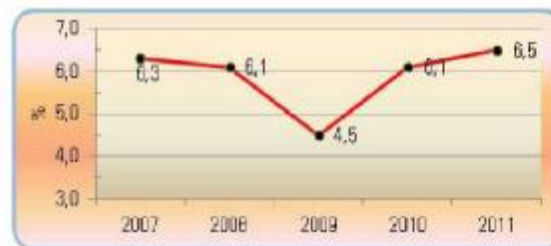
Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 didorong oleh meningkatnya investasi ekspor dan konsumsi. Dalam periode tersebut investasi tumbuh 8,8 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen, ekspor tumbuh 13,6 persen, dan impor tumbuh 13,3 persen. Membaiknya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global, masih kualitas permintaan ekspor komoditas primer, serta diversifikasi pasar ekspor ke negara *emerging market*. Sementara lingkungannya perlambatan investasi terutama didukung oleh investasi langsung (PMA). Konsumsi masyarakat tetap kuat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya belanja pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen oleh BI yang naik menjadi 116,1 pada Oktober 2011. Tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2011. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peran investasi dan ekspor yang meningkat walaupun tingkat ekspor di triwulan terakhir menghadapi tantangan akibat penurunan akselerasi perekonomian global. Sementara itu tingkat pertumbuhan impor melambat walaupun masih tetap pada level yang tinggi. Kinerja ekspor didukung oleh pertumbuhan Industri Pengolahan yang menghasilkan komoditas yang diperdagangkan secara internasional juga ditunjang oleh sektor lainnya seperti sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tingkat pertumbuhan di tahun 2011 ini semakin berkualitas yang diindikasikan salah satunya dengan berkurangnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 6,56 persen dari total jumlah penduduk.

Tren pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011

Selama periode 2007 – 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di atas 6 persen, kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan sebagai dampak dari krisis global tahun 2008-2009. Pada tahun 2007, perekonomian nasional tumbuh sebesar 6,3 persen, kemudian sedikit mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 6,1 persen. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 persen dan di tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 6,1 persen dan 6,5 persen di tahun 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2007 – 2011

PDB atas harga yang berlaku 2011

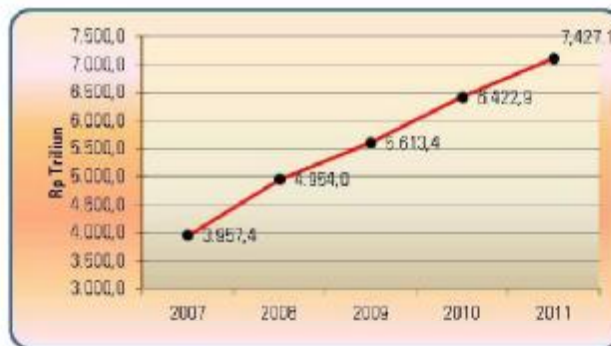
Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha/sector. Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

Walaupun nilai PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 senilai Rp2.463,2 triliun, PDB atas harga berlaku mencapai Rp7.427,1 triliun, lebih besar dari target di APBN-P 2011 sebesar Rp7.227,9 triliun. Nilai PDB harga berlaku tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 13,6 persen dibandingkan tahun 2010 yang mencapai nilai sebesar Rp6.422,9 triliun.

PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku), dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

Apabila dilihat dari trennya, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, nilai PDB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan 87 persen dengan rata-rata pertumbuhan 17,05 persen per tahun. Pada tahun 2007 nilai PDB sebesar Rp3.957,4 triliun kemudian meningkat menjadi Rp4.954,0 triliun pada tahun 2008. Di tahun 2009 PDB tumbuh sebesar Rp3.813,4 triliun, Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010, dan di tahun 2011 PDB Indonesia tumbuh menjadi Rp7.427,1 triliun (lihat Grafik 3).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3: Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2007-2011

Struktur PDB menurut komponen penggunaan

Sementara itu bila dilihat dari struktur PDB menurut penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar, walaupun kontribusinya mengalami penurunan dari 56,7 persen dalam tahun 2010 menjadi 54,6 persen dalam tahun 2011. Peran konsumsi pemerintah relatif turun dari 9,1 persen di tahun 2010 menjadi 9 persen di tahun 2011, begitu juga pembentukan modal tetap bruto/investasi turun dibanding tahun lalu dari sebesar 32,1 persen menjadi 32,0 persen. Komponen ekspor dan impor meningkat dari masing-masing sebesar 24,6 persen dan 22,9 persen menjadi 26,3 persen dan 24,9 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik/BKIP

Grafik 4. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2011

Konsumsi rumah tangga pada 2011 tetap kuat yang didukung oleh meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen, tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah, serta relatif stabilnya rupiah dengan kecenderungan menguat, turut pula mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di tahun 2011. Selain itu rendahnya inflasi dan menurunnya suku bunga kredit juga mendorong meningkatnya pertumbuhan konsumsi. Salah satu indikator yang mendukung akselerasi pertumbuhan konsumsi antara lain penjualan motor dan mobil yang tetap tinggi yaitu sebesar 11,9 persen dan 16,4 persen. Konsumsi pemerintah dalam tahun 2011 tumbuh 3,2 persen yang didukung oleh meningkatnya penyerapan anggaran, terutama belanja yang telah terikat seperti belanja pegawai dan subsidi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Laju Pertumbuhan dan Struktur PDB menurut lapangan usaha

Dari sisi produksi, semua sektor mengalami pertumbuhan. Dua sektor yang padat tenaga kerja yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tumbuh cukup kuat. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (10,7 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (9,2 persen), sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (6,8 persen), serta sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa masing-masing 6,7 persen. Sektor-sektor lainnya tumbuh antara 1,4 persen sampai dengan 6,2 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan subsektor alat angkut, subsektor makanan dan minuman, dan subsektor tekstil. Faktor lain yang ikut mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatnya konsumsi, pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi. Laju pertumbuhan masing-masing sektor dalam membentuk PDB (harga konstan) menurut lapangan usaha terlihat pada Grafik 5.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011

Struktur pembentukan PDB menurut lapangan usaha, dalam tahun 2011 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perikanan, sektor hotel dan restoran, serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan peranan pada beberapa sektor yaitu peran sektor industri pengolahan turun dari 24,8 persen menjadi 24,3 persen, sektor pertanian turun dari 15,3 persen menjadi 14,7 persen, dan sektor konstruksi turun dari 10,3 persen menjadi 10,2 persen. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan peranannya terhadap pembentukan PDB yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang peranan terhadap pembentukan PDB tidak berubah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Rincian kontribusi masing-masing sektor pada pembentukan atau struktur PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2010 dan 2011 terlihat pada Grafik 6.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

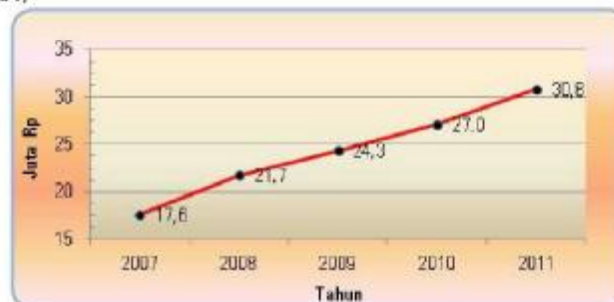


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011

PDB per kapita tahun 2011

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan PDB per kapita. PDB per kapita yang merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 13,8 persen menjadi Rp30,8 juta atau USD3.542,9, dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2010 sebesar Rp27,0 juta atau USD3.004,9 (lihat Grafik 7)



Sumber : Badan Pusat Statistik

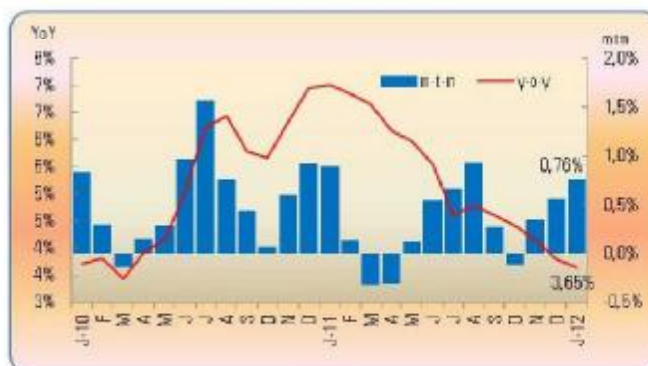
Grafik 7. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2007 – 2011

Inflasi

Stabilitas ekonomi makro tercermin pada tingkat inflasi yang rendah serta stabilnya nilai tukar rupiah. Dalam tahun 2011, laju inflasi dapat dikendalikan pada level yang rendah yaitu 3,79 persen (yoy), dan berada dibawah sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 5,7 persen. Selain itu, inflasi dalam tahun 2011 jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Rendahnya inflasi tersebut bersumber dari terjaganya inflasi inti dan inflasi pangan pada level yang rendah, serta minimalnya inflasi *administered prices*. Dalam tahun 2011, inflasi inti mencapai 4,3 persen (yoy) jauh lebih rendah dari inflasi tahun-tahun sebelumnya sebesar 6,5 persen (yoy). Hal ini dikarenakan menguatnya nilai tukar rupiah serta menurunnya ekspektasi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

inflasi. Sementara rendahnya inflasi pangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi serta stabilisasi harga pangan. Dalam tahun 2011, volume impor bahan pangan khususnya bawang merah, bawang putih, dan kentang meningkat cukup tinggi. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif juga ikut mendorong peningkatan produksi komoditas pangan terutama aneka bumbu-bumbuan seperti cabai dan bawang. Cabai merah yang dalam tahun sebelumnya menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi, dalam tahun 2011 ini harganya relatif terjaga seiring dengan melimpahnya pasokan dari dalam negeri. Terkendalinya inflasi tersebut utamanya didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang semakin baik, yang antara lain dilakukan melalui forum TPI (Tim Pengendalian Inflasi) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).



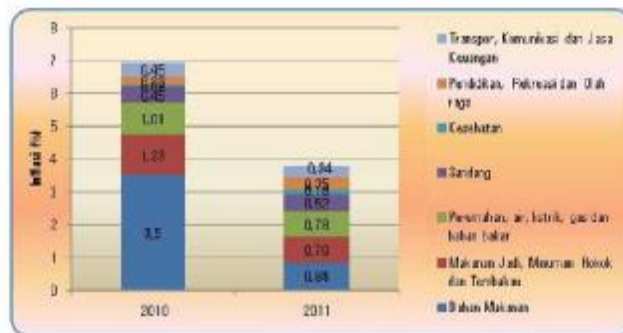
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 8. Laju Inflasi Tahun 2010 dan 2011

Andil inflasi tahun 2011

Sementara itu bila dilihat dari andil/sumbangan inflasi selama tahun 2011 sebesar 3,79 persen, kelompok bahan makanan memberikan andil 0,84 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,78 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,78 persen, kelompok sandang sebesar 0,52 persen, kelompok sandang Rp. 0,18 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,35 persen, serta kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil inflasi sebesar 0,34 persen. Andil inflasi kelompok bahan makanan menurun cukup signifikan dibandingkan andil di tahun 2010 sebesar 3,50 persen.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 9. Andil Inflasi Tahun 2010 dan 2011

Lebih spesifik, jenis barang dan jasa yang berkontribusi utama terhadap inflasi selama tahun 2011 di antaranya adalah harga komoditas beras dan emas perhiasan, sama seperti tahun 2010 serta rokok kretek filter, tarif sewa rumah, tarif angkutan udara, dan ikan segar.

Inflasi di beberapa (66) Kabupaten/kota tahun 2011

Dari survei yang dilakukan oleh BPS terhadap 66 kabupaten/kota, pada bulan Desember 2011 seluruh kabupaten/kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Kupang sebesar 2,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 138,37 dan terendah terjadi di kota Tanjung Pinang sebesar 0,02 persen dengan IHK 129,86. Dari 66 kabupaten/kota basis perhitungan inflasi, 64 kabupaten/kota mencatat inflasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bahkan beberapa daerah di Jawa, Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia mengalami penurunan laju inflasi yang lebih dalam dibandingkan nasional. Faktor koreksi harga yang terjadi pada komoditas bahan makanan berdampak pada meredanya tekanan kenaikan inflasi. Dukungan dari masuknya pasokan pangan dari sumber lainnya yang cenderung meningkat turut mempengaruhi terjaganya pasokan bahan makanan. Selain itu, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut menjaga kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan terutama bahan pangan pokok dan pengendalian inflasi secara keseluruhan.

Boks 1. Penerbitan SPN 3 bulan

SUN seri *variable rate* (VR) adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang memiliki tingkat bunga mengambang yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 yang merupakan bagian program rekapitalisasi perbankan. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya, tingkat bunga yang digunakan mengacu pada hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan.

Namun demikian, kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan derasnya modal asing yang masuk dalam pasar keuangan di Indonesia dan untuk melakukan mitigasi risiko volatilitas nilai tukar dan tingkat bunga, antara lain: (1) secara bertahap BI tidak lagi melakukan lelang SBI 1, 3 dan 6 bulan secara regular (penonaktifan) dan fokus pada penerbitan SBI 9 bulan; (2) penerapan *one-month holding period* atas SBI, yang dilanjutkan dengan *six-month holding period* atas SBI; dan (3) memperkenalkan instrumen moneter jangka pendek yang tidak dapat diperdagangkan berupa *Term Deposit* (TD) dengan tenor tertentu, khusus untuk bank domestik. Akibat penerapan kebijakan tersebut, lelang SBI 3 bulan dihentikan sejak lelang terakhir tanggal 13 Oktober 2010 dengan tingkat bunga SBI 3 bulan sebesar 6,37 persen. Oleh karena itu diperlukan tingkat bunga acuan baru untuk pembayaran kupon *SUN* seri VR sebagai pengganti SBI 3 bulan. Hal ini sesuai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dengan ketentuan dan persyaratan SUN jenis VR sebagai berikut:

1. Apabila selama 6 (enam) bulan kalender berturut-turut tidak terdapat suatu hasil lelang atas Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan, maka penentuan tingkat bunga obligasi didasarkan pada hasil lelang surat utang lain dari Pemerintah dengan jangka waktu 3 bulan (catatan: SPN 3 bulan) dimana sistem pelelangannya setara dengan lelang Sertifikat Bank Indonesia dimaksud.
2. Apabila pelelangan surat utang lainnya dari Pemerintah tersebut tidak dilakukan maka hasil pelelangan Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan yang terakhir digunakan untuk menghitung tingkat bunga obligasi dimaksud.
3. Dasar perhitungan tingkat bunga obligasi tersebut akan diumumkan melalui media elektronik dan media cetak selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum diberlakukannya tingkat bunga obligasi pengganti.

Setelah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, pelaku pasar, serta investor SBN, Pemerintah pada akhirnya menetapkan penggunaan SPN 3 bulan sebagai acuan baru pembayaran bunga SUN jenis VR. Adapun pertimbangan penggunaan SPN 3 bulan adalah:

1. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan SUN jenis VR.
2. Langkah awal untuk mengembangkan pasar SPN jangka pendek (3 bulan).
3. Suku bunga yang terbentuk transparan, akuntabel dan kompetitif.
4. Dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN.
5. Dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti acuan tingkat bunga dalam asumsi makro APBN.

Sumber: *Nota Keuangan RAPBN 2012*

Kinerja SBN

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, namun pasar SBN tetap tumbuh positif. Dengan meredanya sentimen global, mendorong pelaku asing menambah eksposurnya di pasar SBN. Aksi beli asing terutama terjadi pada instrumen SBN jangka pendek dan menengah. Selain didukung oleh faktor makro dan risiko fiskal yang terkendali, minat beli asing juga terkait dengan imbal hasil yang menarik, baik secara nominal maupun riil serta pencapaian *investment grade*. Secara keseluruhan, pergerakan imbal hasil SBN cenderung turun untuk keseluruhan tenor yang mencapai 146 bps menjadi 5,88 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun 2010 sebesar 7,3 persen. Penurunan BI rate sebesar 25 bps pada saat gejolak eksternal mulai mereda turut mendorong penurunan imbal hasil SBN. Secara rata-rata bulanan, imbal hasil SBN selama tahun 2011 untuk tenor jangka pendek, menengah, dan panjang masing-masing turun sebesar 37 bps, 59 bps dan 56 bps. Menurunnya *yield* tersebut berdampak pada kewajiban Pemerintah untuk membayar biaya bunga menjadi lebih rendah dalam penerbitan surat utang yang baru, sehingga mengurangi beban pembayaran bunga pada APBN.

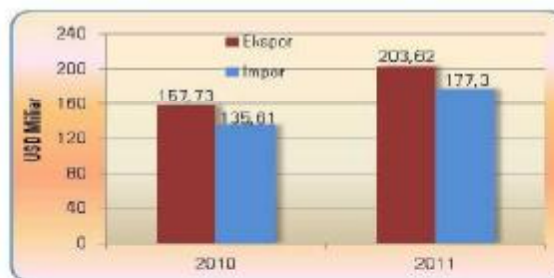
Kinerja ekspor dan impor

Walaupun pada akhir tahun 2011 kinerja ekspor mengalami perlambatan, namun secara keseluruhan ekspor tumbuh 29,0 persen. Peningkatan ekspor ini didukung oleh meningkatnya harga dan permintaan barang primer serta diversifikasi negara tujuan ekspor ke *emerging market*. Komoditi ekspor yang meningkat signifikan antara lain bahan bakar mineral (16,9 persen), lemak dan minyak hewan/nabati (13,4 persen), karet dan barang dari karet (8,9 persen), mesin/peralatan listrik (6,9 persen), dan bijih, kerak, dan abu logam (4,5 persen). Sementara itu, berdasarkan pangsa ekspor terbesar ditujukan ke China (13,3 persen), Jepang (11,3 persen), Amerika Serikat (9,7 persen), India (8,2 persen), dan Singapura (6,9 persen).

Nilai impor tahun 2011 meningkat sebesar 30,69 persen bila dibandingkan dengan impor pada periode yang sama tahun 2010. Komoditi impor yang mengalami peningkatan cukup signifikan antara lain impor mesin dan peralatan mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

kendaraan bermotor dan bagiannya, plastik dan barang dari plastik, serta bahan kimia organik. Peningkatan impor komoditi-komoditi tersebut sejalan dengan meningkatnya kegiatan dalam negeri dan ekspor. Dilihat dari pangsaanya, selama tahun 2011 impor didominasi oleh komoditi-komoditi yang berasal dari China sebesar 18,69 persen, diikuti oleh Jepang sebesar 14,14 persen, Amerika Serikat sebesar 7,81 persen, Singapura sebesar 7,64 persen, Thailand sebesar 7,51 persen, Korea Selatan 5,44 persen, dan Malaysia sebesar 4,22 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 10. Perbandingan Ekspor Impor Tahun 2010 dan 2011

Nilai tukar rupiah

Nilai tukar Rupiah pada semester I 2011 mengalami apresiasi terkait dengan melimpahnya eksekse likuiditas global dan masih menariknya imbal rupiah. Namun pada semester II, apresiasi rupiah tersebut tertahan oleh meningkatnya kebutuhan valas di dalam negeri dan imbas meningkatnya risiko global sebagai akumulasi oleh berlarutnya krisis utang di Eropa, dan melemahnya perekonomian Amerika Serikat. Selama tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 8.742/USD, atau menguat 3,84 persen dibandingkan dengan rata-rata tahun 2010 sebesar Rp9.078/USD. Untuk menjaga keseimbangan pasar domestik, Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas. Membaiknya fundamental ekonomi serta meningkatnya kepercayaan investor global telah memberikan sentimen positif terhadap penguatan rupiah dan inflasi dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 11. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2011

Boks 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Pasal 23B Amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23B Undang Undang Dasar 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri walaupun pengaturan mata uang pernah diatur dalam UUDS tahun 1950. Terkait Mata Uang, diatur tersebar dalam berbagai aturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Negara dengan sistem bank sentral yang independen, penandatanganan mata uang umumnya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan pemerintah. Indonesia menganut sistem perekonomian dimana Bank Sentral bersifat independen, sehingga penandatanganan mata uang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan Bank Sentral. Kemudian penyebutan Republik Indonesia dan penggunaan lambang Negara Indonesia pada Mata Uang, sepatutnya Pemerintah sebagai wakil negara turut menandatangani Mata Uang.

RUU tentang Mata Uang disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 Mei 2011. UU Nomor 7 Tentang Mata Uang mengatur bahwa BI perlu berkoordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Rupiah. Namun aturan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah akan tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan Rupiah, BPK melakukan audit secara periodik paling tidak satu kali dalam satu tahun. Keberadaan UU ini tidak akan memangkas kewajiban utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, misalnya terkait pelemahan atau penguatan. UU tentang Mata Uang juga mengatur bahwa pemberantasan Rupiah palsu akan dilakukan oleh sebuah badan tersendiri. Badan tersebut terdiri atas unsur Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pengaturan macam dan harga mata uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Negara. Penggunaan Rupiah dalam UU ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan mengajak orang/badan menggunakan Rupiah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: NK RAPSIN 2012

Boks 3. Tax Holiday 2011

Kebijakan pemerintah mengenai pemberian *tax holiday* yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 telah ditunggu oleh investor potensial. Fasilitas ini terbatas untuk investasi industri-industri 'pionir' yang meliputi industri metal dasar, industri refinerasi minyak dan turunannya, industri mesin, industri sumber daya yang terbaharukan, serta industri peralatan telekomunikasi.

Kebijakan ini ditujukan untuk perusahaan yang telah didirikan setelah tanggal 15 Agustus 2010

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

(satu tahun sebelum kebijakan ini dikeluarkan) dan total investasi harus melebihi Rp1 triliun dan disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Minimum 10 persen dari investasi ini harus didepositokan di bank di Indonesia dan tidak ditarik sampai produksi secara komersial dimulai.

Adapun fasilitas yang diberikan adalah:

1. Dikecualikan dari pajak penghasilan untuk perusahaan antara 5 sampai dengan 10 tahun sejak produksi secara komersial dimulai.
2. Tambahan insentif akan diberikan selama 2 tahun setelah berakhirnya masa pertama pemberian *tax holiday* dalam bentuk pengurangan 50% pajak penghasilan untuk perusahaan.

Ruang lingkup dari insentif ini dapat diperluas untuk industri lain dan waktu untuk insentif ini masih dapat diperpanjang.

Kondisi domestik dan laju investasi

Kinerja investasi selama tahun 2011 dipertahankan dengan iklim investasi yang kondusif, kuatnya fundamental perekonomian dan optimisme pelaku usaha. Pencapaian tersebut juga didukung oleh makin baiknya pelayanan investasi di daerah dengan semakin banyaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang telah diimplementasikan oleh berbagai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta koordinasi pusat dan daerah yang semakin baik. Kemajuan implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) secara umum memberikan optimisme terhadap kinerja perekonomian domestik ke depan. Implementasi proyek-proyek besar juga memberikan stimulus bagi perekonomian daerah di tengah risiko rambatan dari tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Berbagai proyek infrastruktur, khususnya terkait transportasi, yang telah diinisiasi pada tahun 2011 menunjukkan kuatnya komitmen terhadap pembenahan konektivitas.

Peningkatan realisasi investasi tersebut disamping peningkatan penanaman modal dalam negeri dan pemerataan sebaran wilayah koridor ekonomi juga terdapat hilirisasi atau pengembangan nilai tambah dari kegiatan investasi seperti sektor pertanian dan perkebunan.

Di kuartal keempat tahun 2011, Indonesia mendapatkan *Investment grade* dengan rating BBB- dari *Fitch Rating* yang naik satu peringkat dari sebelumnya BB+, lebih cepat dari ekspektasi. Di awal tahun 2012, lembaga rating lainnya, yaitu *Moody's rating*, menaikkan rating Indonesia dari B41 menjadi BAA3. Kenaikan *Investment grade* ini membuat risiko investasi berkurang dan semakin menarik investor asing ke pasar Indonesia. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain didasarkan pada kinerja perekonomian dan likuiditas eksternal yang lebih kuat, hal ini didukung oleh rasionalisasi publik yang rendah dengan tren yang terus menurun serta kebijakan makro yang berhati-hati. Dengan peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi *Investment Grade* akan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

Selain itu, kinerja investasi didukung juga oleh sumber pembiayaan. Di tahun 2011, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jenis kredit lainnya. Sebagai sumber pembiayaan investasi, masih didukung oleh modal sendiri dan penyisihan laba yang memberikan kontribusi sebesar 65,2 persen. Pertumbuhan investasi masih didominasi oleh investasi bangunan, investasi mesin, dan investasi alat angkut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Indeks Harga Saham
Gabungan

Fundamental makro ekonomi yang kuat berdampak positif terhadap perkembangan pasar saham domestik dan tercapainya *investment grade* juga menciptakan optimisme di pasar saham. Arus modal asing yang masuk ke pasar finansial baik ke pasar saham maupun pasar obligasi terus mengalami peningkatan secara persisten. Kinerja pasar saham domestik mampu tumbuh positif meskipun pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diwarnai oleh beberapa gejolak akibat dari peningkatan risiko eksternal. Kinerja positif IHSG ini terutama selain didukung oleh kondisi makro ekonomi yang kondusif juga didorong oleh kinerja emiten yang stabil serta kebijakan perekonomian yang akomodatif. IHSG pada akhir tahun 2011 ditutup pada level 3.822, meningkat 3,2 persen dari posisi tahun sebelumnya sebesar 3.704. Pencapaian tersebut menempatkan IHSG pada level yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks di negara kawasan setelah Filipina (4,1%).



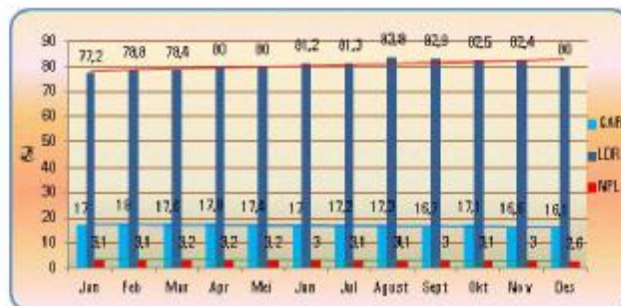
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 12. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2011

Kinerja perbankan

Meskipun terjadi riak di pasar global, stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dan industri perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Hal ini tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) perbankan yang mencapai 16,1 persen pada Desember 2011 dengan rata-rata sebesar 17,25 persen. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) per Desember 2011 mencapai 80,0 persen dengan rata-rata sebesar 80,77 persen, angka ini lebih baik apabila dibandingkan pencapaian tahun 2010 sebesar 77,16 persen. Kemudian untuk rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) terkendali di bawah 5,0 persen yakni berada di kisaran 3,0 persen sampai dengan 3,2 persen dan pada Desember 2011 berada pada level 2,6 persen dengan rata-rata 3,1 persen. Angka ini lebih baik apabila dibandingkan dengan NPL tahun 2010 yang berada di kisaran 2,9 persen sampai dengan 4,0 persen dan pada Desember 2010 berada pada level 2,9 persen dengan rata-rata 3,51 persen. Sementara itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Desember 2011 angka pertumbuhan kredit berada pada level 24,5 persen (yoy), lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya (22,8 persen). Sampai dengan Desember 2011, kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 33,2% (yoy), 21,4% (yoy), dan 24,1% (yoy). Meningkatnya kredit perbankan ini sejalan dengan menurunnya suku bunga kredit modal kerja (KMK) turun menjadi 12,16 persen, kredit investasi (KI) turun menjadi 12,04 persen, dan kredit konsumsi turun menjadi 14,15 persen.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 13. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2011

Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selama tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar meski menghadapi tekanan pada semester kedua. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial seiring dengan masih terjadinya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit di akhir triwulan ketiga yang lebih banyak disebabkan oleh imbas negatif dari pasar utang di Eropa yang memicu sebagian investor asing keluar dari pasar saham dan surat utang negara. Peningkatan volume impor di triwulan terakhir 2011 menambah tekanan terhadap neraca. Akan tetapi kenaikan peringkat Indonesia menjadi *investment grade* dan prospek ekonomi Indonesia yang cukup kuat, turut menahan keluarnya dana asing jangka pendek dan masih meningkatnya aliran FDI (*Foreign Direct Investment*) di triwulan terakhir 2011. Di sisi lain, minat investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi langsung dan pemberian kredit kepada sektor swasta masih tetap tinggi. Level arus masuk modal langsung yang cukup tinggi mampu menahan laju penurunan kinerja transaksi modal dan finansial menjadi tidak terlalu dalam.



Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 14. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan 2009-2011

Cadangan devisa di akhir tahun setara dengan 5,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah

Kinerja perekonomian yang cukup kuat telah menjadi salah satu pendorong kepercayaan investor asing dan derasnya aliran dana internasional ke pasar domestik. Derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia baik investasi portofolio maupun FDI, telah mampu meningkatkan posisi cadangan devisa Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2011, cadangan devisa mencapai USD110,1 miliar atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Cadangan devisa ini secara nominal naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar USD96,2 miliar walaupun menurun dari nominal cadangan devisa pada akhir semester pertama

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

2011 sebesar USD119,66 miliar. Cadangan devisa yang dimiliki tersebut sebagian besar berbentuk surat-surat berharga (*securities*) dan sisanya ditempatkan dalam bentuk *currency and deposits*, *monetary gold* dan *special drawing rights*.



Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 15. Cadangan Devisa Triwulanan 2009-2011

Lifting minyak

Meskipun produksi minyak meningkat setelah selesainya perbaikan beberapa sumur produksi yang sebelumnya mengalami gangguan seperti pada ladang minyak Belisa – Conoco Philips, West Madura – Pertamina EP, dan Blok Mahakam, realisasi lifting minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 sebesar 898 ribu barel per hari, lebih rendah dari target APBN-P 2011 sebesar 945 ribu barel per hari dan juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 954 ribu barel per hari. Penyebab utama tidak tercapainya target lifting dikarenakan antara lain karena penghentian produksi secara tidak terduga (*unplanned shutdown*), penurunan kinerja sumur secara alamiah, serta belum beroperasi sepenuhnya blok migas Cepu seperti yang diharapkan.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak internasional pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2010. [2] Realisasi harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 rata-rata mencapai USD111,5/barel, lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar USD95,0/barel dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2010 yang sebesar USD79,4 per barel. Harga rata-rata ICP di bulan April 2011 mencapai angka tertinggi yaitu USD123,36/barel dan terendah di bulan Januari 2011 sebesar USD97,09/barel. Walaupun lifting minyak tidak dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, peningkatan ICP ini mendukung penerimaan pajak penghasilan migas di tahun 2011.

Rasio utang terhadap PDB

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2011 sebesar 24,6 persen. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 26 persen dan tahun 2009 sebesar 28 persen. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang turut menopang kesinambungan fiskal.

Tema RKP 2011 dan percepatan prioritas pembangunan nasional

APBN 2011 yang disusun sepenuhnya berdasarkan RPJM 2010-2014 dan RKP 2011 menjadi lebih bermakna dikarenakan melanjutkan pelaksanaan reformasi gelombang kedua seiring dengan masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

RKP 2011 disusun dengan tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, peningkatan daya saing perekonomian, serta visi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

misi, agenda, dan prioritas pembangunan. Berkaitan dengan itu, RKP 2011 menetapkan tema "Percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung oleh pematapan tata kelola dan sinergi pusat daerah".

Terkait tema dimaksud, RKP 2011 menetapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan sebagai landasan operasional yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintah yang baik, dan gender. Sejalan dengan itu ditetapkan juga sebelas prioritas pembangunan nasional yang meliputi (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan dan kependudukan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan iklim usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup, (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik, serta (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2011 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dengan tetap fokus kepada tiga sasaran utama yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro job*), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*). Tiga pilar pembangunan tersebut menjadi strategi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang mampu memacu pertumbuhan sektor riil sekaligus menopang pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan upaya untuk mencapai keseimbangan fiskal ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja negara, pengelolaan defisit anggaran melalui pembiayaan yang *managed*, serta penurunan rasio utang secara bertahap.

Beberapa poin penting dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi 2011 dilakukan melalui: (1) peningkatan daya tarik investasi, (2) penguatan daya saing ekspor, (3) revitalisasi industri manufaktur (4) revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, (5) peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, dan (6) peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif. (7) Selain dari itu Pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan harapan akan menjaga sektor riil tetap tumbuh.

Boks 4. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Pemerintah bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan "Not Business as Usual", dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang kongkrit dan terukur. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan adanya MP3EI, diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan, terutama mendorong nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.

MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

MP3EI menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, MP3EI mengembangkan tiga strategi utama yaitu strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, strategi memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara local dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*) serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Terkait penguatan konektivitas nasional, terdapat tiga prinsip. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter moda supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Konektivitas nasional yang lemah bukan hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga akan melemahkan daya saing, yang pada akhirnya menyebabkan penanggulangan kemiskinan berjalan relatif lambat. Penguatan konektivitas nasional diselenggarakan sejalan dengan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada, maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Sehingga kedepannya di setiap wilayah akan dikembangkan produk yang menjadi unggulan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 94 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur telah diground breaking dengan nilai Rp. 490,5 triliun dan 22 peraturan yang sudah diperbaiki. Implementasi MP3EI direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Fase 1 (2011 – 2015), kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya.

Fase 2 (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah.

Fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Bappenas

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

RKP, Kemiskinan dan Pengangguran

Ketiga pilar pembangunan ini (*pro growth, pro job dan pro poor*) merupakan pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan banyak kesempatan kerja sehingga makin banyak keluarga Indonesia yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan keluar dari kemiskinan. Di tahun 2011 Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan program-program perbaikan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa untuk tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 29,89 juta orang (12,36 persen dari total penduduk). Angka ini menurun dibandingkan dengan angka di tahun 2010 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta orang (13,33 persen dari total penduduk). Penurunan ini didukung oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di desa dari 19,93 juta di tahun 2010 menjadi 18,97 juta di tahun 2011. Hal ini menunjukkan berhasilnya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara bertahap, terutama di pedesaan. Penurunan penduduk miskin di pedesaan tersebut berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat pedesaan sebagaimana terlihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks NTP menunjukkan daya tukar dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP meningkat dari 102,75 pada tahun 2010 menjadi 105,75 pada Desember 2011.

Dalam hal program pengurangan pengangguran, prosentase tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,14 persen (8,32 juta orang) di periode Agustus 2010 menjadi 6,56 persen (7,70 juta orang) pada periode yang sama di 2011. Tingkat pengangguran ini jauh berkurang dari presentase tingkat pengangguran terbuka di tahun 2007 (9,11 persen).

KOMPOSISI REALISASI APBN TAHUN ANGGARAN 2011

Realisasi konsumsi pemerintah di tahun 2011 tercapai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sampai dengan akhir Desember 2011, belanja pemerintah mencapai 98,05 persen lebih tinggi dari penyarapan di tahun 2010 sebesar 92,5 persen. Belanja mengikat seperti belanja pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga tetap memperhatikan daya serap yang tinggi. Di tahun 2011, beban fiskal dalam bentuk subsidi melebihi pagu anggaran, hal ini disebabkan oleh peningkatan harga ICP dan peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi akibat belum diterapkannya pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Secara nominal, total realisasi belanja pemerintah mencapai Rp1.295 triliun, lebih tinggi 24,26 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.042,1 triliun.

Sedangkan untuk defisit anggaran, yang dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp150,8 triliun (2,09 persen terhadap PDB), realisasinya mencapai Rp84,40 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN-P 2011 tersebut terutama berkaitan dengan terlampainya target pendapatan negara dan hibah, dan realisasi belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pagunya.

1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,91 triliun. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan Rp215,3 triliun (21,64 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp995,27 triliun.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) pendapatan negara dan hibah cenderung mengalami peningkatan (lihat tabel 1). Kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi yang baik selama 5 tahun terakhir dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,7 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 38,68 persen sebelum mengalami penurunan 13,53 persen di tahun berikutnya.

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 – 2011
(triliun Rupiah)

Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	604,08	707,81	884,98	881,60	871,00	848,76	882,40	886,27	1.160,91	1.210,60
1. Penerimaan Perpajakan	482,01	490,99	609,23	656,70	651,95	619,92	743,33	723,31	878,68	873,97
a. Pajak Dalam Negeri	474,55	470,05	580,25	622,36	631,93	601,25	720,76	694,39	831,74	818,75
b. Pajak Perdagangan Internasional	17,46	20,94	28,98	34,34	20,02	18,67	22,56	28,91	46,94	54,12
2. PNBP	198,25	215,12	282,81	320,60	218,04	227,17	247,18	268,94	286,96	331,47
a. Penerimaan SDA	115,05	132,89	192,79	224,48	138,85	138,96	164,73	168,83	191,99	213,82
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	21,80	23,22	31,24	29,08	28,61	26,05	29,50	30,10	28,84	28,18
c. PNBP Lainnya	47,71	42,88	58,78	63,32	44,88	53,80	43,46	59,43	50,34	69,36
d. Pendapatan BLU	-	2,13	-	3,73	5,88	8,37	9,49	10,59	15,42	20,10
3. Hibah	3,82	1,70	2,95	2,30	1,01	1,67	1,90	3,02	4,66	5,25

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Peningkatan realisasi pendapatan negara terutama didorong oleh dipertahankannya pertumbuhan ekonomi nasional serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perpajakan dalam negeri, perpajakan perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan terbesar.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011

Di tahun 2011 perpajakan tetap menunjukkan sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp873,87 triliun (99,45 persen dari sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp878,69 triliun), atau naik sebesar Rp150,6 triliun (20,82 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp723,3 triliun.

Membaiknya kondisi perekonomian domestik yang didukung dengan penerapan beberapa kebijakan perpajakan serta kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berdampak pada meningkatnya tingkat penerimaan negara. Dari sektor perpajakan semua komponen penerimaan mencatat perbaikan. PPh dan PPN mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini didukung juga oleh penggalan potensi perpajakan baik melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan juga terjadi pada pajak perdagangan internasional yaitu bea masuk dan bea keluar seiring dengan kenaikan realisasi impor dan penyesuaian tarif bea masuk. Selain itu, meningkatnya rata-rata harga minyak mentah dari USD79,4 per barel pada tahun 2010 menjadi USD111,5 per barel pada tahun 2011 mendorong peningkatan pendapatan pajak penghasilan migas.

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Kebijakan umum di bidang perpajakan

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan secara konsisten. Secara umum, kebijakan perpajakan ditujukan untuk optimalisasi penerimaan melalui upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan, termasuk di dalamnya kepastian dan cukai. Upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan: (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalan potensi.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan di tahun 2011, Pemerintah melanjutkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (a) penggalan potensi perpajakan, termasuk Sensus Pajak Nasional (SPN); (b) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (c) penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (d) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepastian dan cukai; (e) perbaikan sistem informasi; (f) konsistensi pelaksanaan Road Map Cukai Hasil Tembakau; dan (g) pemberian insentif perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Dalam upaya mendukung dunia usaha dan sektor-sektor tertentu yang bersifat strategis, Pemerintah memberikan insentif berupa pajak ditanggung Pemerintah (DTP) atau PPh, PPN dan bea masuk guna mendorong investasi dan kegiatan dunia usaha serta stabilisasi harga di dalam negeri. Insentif PPh DTP di antaranya ditujukan untuk pengembangan usaha penanaman modal di dalam negeri. Insentif PPh DTP di antaranya ditujukan untuk pengembangan usaha panas bumi (*geothermal*), dan untuk menarik investor asing yang akan berinvestasi pada obligasi Pemerintah. Sedangkan fasilitas PPN DTP ditujukan untuk menarik investasi di sektor eksplorasi migas, maupun untuk mengurangi beban masyarakat terkait dengan pemberian fasilitas PPN DTP untuk BBM bersubsidi. Namun dalam perkembangannya, sesuai dengan rekomendasi BPK dan persetujuan DPR RI, pemberian fasilitas dalam bentuk PPN DTP dihapuskan sejak pertengahan tahun 2011. Sementara itu, insentif berupa bea masuk DTP diberikan untuk industri-industri yang mempunyai kriteria tertentu: (a) memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen; (b) meningkatkan daya saing; (c) meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan (d) meningkatkan pendapatan negara.

Pada bulan Agustus 2011, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa *tax holiday* bagi industri pionir melalui pemberian PMK Nomor 130/PMK.011/2011 dan pada bulan Desember 2011 Pemerintah juga menambahkan alternatif fasilitas pajak selain *tax holiday*, dengan diterbitkannya PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga pangan yang terjadi sejak awal tahun, Pemerintah telah berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, di antaranya berupa kebijakan penyesuaian 57 pos tarif bea masuk atas biji gandum, bahan baku ternak, pupuk, produk pangan dan bahan baku pangan menjadi nol persen. Selain itu dalam upaya meningkatkan daya saing dan melindungi industri dalam negeri, Pemerintah telah memberikan insentif bea masuk berupa penyesuaian 190 pos tarif bea masuk atas bahan baku industri tertentu, jasa pelayaran, dan industri perfilman.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Boks 5. Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak adalah kegiatan penyisiran dan pencacahan terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka ekstensifikasi (menjaring wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum dipajaki) serta intensifikasi (optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki). Kegiatan Sensus Pajak ini merupakan perluasan/pengembangan ke arah yang lebih komprehensif dari kegiatan *canvassing* pajak yang telah dilakukan DJP selama ini.

LATAR BELAKANG

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia (wajib pajak orang pribadi maupun badan) yang melaporkan SPT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan populasi orang pribadi maupun badan usaha.

HASIL YANG AKAN DICAPAI

1. Perluasan basis pajak (WP dan objek pajak).
2. Peningkatan penerimaan pajak.
3. Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.
4. Pemutakhiran dan pertukaran data WP.

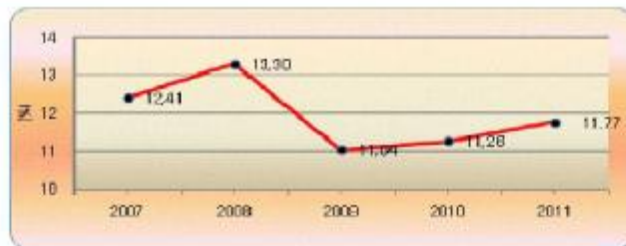
SASARAN

1. Yang belum ber-NPWP, diberikan NPWP.
2. Yang belum menyerahkan SPT, dihimbau untuk menyerahkan SPT (membayar pajak).
3. Yang sudah membayar namun belum optimal, agar membayar sesuai dengan ketentuan.
4. Memperluas basis pemajakan (semua lapisan kelompok dan bidang usaha).

Tax ratio

Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tahun 2011 mencapai 11,77 persen mengalami Peningkatan jika dibanding tahun 2010 sebesar 11,26 persen dan tahun 2009 sebesar 11,04 persen. Kenaikan *tax ratio* di tahun 2011 ini didukung oleh realisasi penerimaan PPh Non-migas mencapai Rp354,68 triliun atau 96,7 persen dari target APBN-P sebesar Rp366,75 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp298,17 triliun, kinerja penerimaan PPh Non-Migas tahun 2011 tersebut lebih tinggi sebesar Rp56,5 triliun (18,95 persen). Sedangkan untuk penerimaan PPN, realisasi mencapai Rp277,80 triliun atau 93,08 persen dari target APBN-P 2011 sebesar Rp298,44 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp230,6 triliun, kinerja penerimaan PPN tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp47,2 triliun (20,47 persen). Kenaikan *tax ratio* juga ditunjang oleh realisasi penerimaan cukai yang mencapai Rp77,01 triliun (113,1 persen dari target), pajak perdagangan internasional Rp54,12 triliun (115,3 persen dari target), PBB Rp29,89 triliun (102,8 persen dari target), dan pajak lainnya Rp3,9 triliun (93,9 persen dari target).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

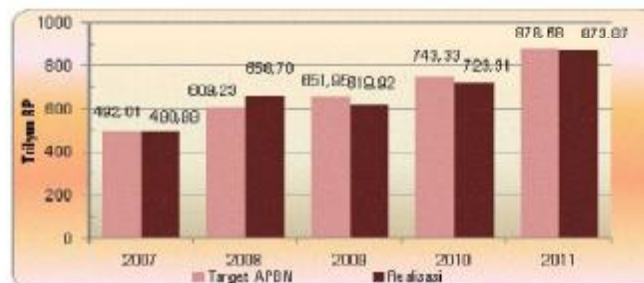


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 16. Tren Tax Ratio Tahun 2007-2011

Tren realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, sedikit mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp873,87 triliun atau meningkat sebesar 77,98 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007 yang sebesar Rp490,99 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 108,12 persen akan tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi menjadi sebesar 95,09 persen. Di tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan realisasi penerimaan perpajakan menjadi 97,3 persen, dan di tahun 2011 meningkat menjadi 99,45 persen. Target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007-2011 dapat dilihat pada grafik 17.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 17. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011

Realisasi PNBPN tahun 2011

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp331,47 triliun (115,67 persen dari sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp286,57 triliun). Jumlah ini naik Rp62,5 triliun (23,25 persen) dari realisasi PNBPN tahun 2010 sebesar Rp268,94 triliun. Pencapaian realisasi PNBPN yang cukup signifikan tersebut, terutama berkaitan dengan terlampauinya sasaran hampir semua jenis PNBPN, baik yang berasal dari sumber daya alam (SDA) migas dan non-migas, maupun PNBPN lainnya.

Nilai realisasi PNBPN tahun 2011 tersebut berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp213,82 triliun yang merupakan sumber utama penerimaan PNBPN, realisasi penerimaan laba BUMN senilai Rp28,18 triliun, realisasi PNBPN lainnya sebesar Rp69,37 triliun dan realisasi

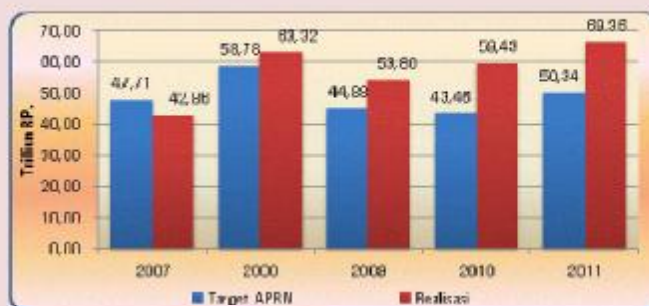
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pendapatan BLU sebesar Rp20,10 triliun.

Realisasi PNBП tersebut adalah hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PNBП tahun 2011 diantaranya (1) peningkatan sumber daya alam yang didukung insentif fiskal; (2) pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan pada PNBП K/L; dan (4) melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBП pada K/L (lihat tabel 1).

Boks 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2007, pada umumnya PNBП lainnya cenderung berfluktuasi (lihat Grafik 18). Tren peningkatan semenjak tahun 2009 mencerminkan kontribusi keberhasilan kebijakan-kebijakan Pemerintah menyangkut PNBП, juga mengindikasikan masih terdapatnya potensi PNBП lainnya yang dapat terus ditingkatkan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 18. Realisasi PNBП Lainnya tahun 2007-2011

PNBP lainnya terdiri atas: (1) pendapatan penjualan dan sewa; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; dan (8) pendapatan lain-lain. Pengelolaan atas sumber PNBП lainnya tersebut dilaksanakan oleh K/L terkait, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi PNBП lainnya dari K/L antara lain: (1) jumlah objek pengenaan PNBП; (2) tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah; (3) kualitas pelayanan yang diberikan dan administrasi pengelolaan PNBП yang secara tidak langsung meningkatkan jumlah objek pengenaan; dan (4) upaya optimalisasi yang dapat dilakukan, melalui peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Selama tahun 2007-2011, PNBП lainnya, yang sebagian besar merupakan bagian dari kelompok penerimaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,97 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 47,73 persen. Selama kurun waktu tersebut, secara khusus Pemerintah melakukan optimalisasi PNBП lainnya melalui (1) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBП pada masing-masing K/L; (2) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBП pada K/L; dan (3) peningkatan akurasi target dan penyusunan pagu penggunaan PNBП dari K/L yang realistis serta

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pelaporannya.

Di tahun 2011 target PNBPN lainnya yang tercantum dalam APBN-P tahun 2011 sejumlah Rp50,34 triliun dengan realisasi senilai Rp69,36 triliun (137,8 persen). Realisasi PNBPN lainnya pada tahun 2011 ini didominasi oleh realisasi pendapatan jasa yang mencapai Rp26,63 triliun, pendapatan penjualan dan sewa yang mencapai Rp21,65 triliun, pendapatan bunga sebesar Rp4,9 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp11,56 triliun. Keempat sumber penerimaan PNBPN lainnya ini berkontribusi sebesar 93,34 persen dari total penerimaan PNBPN lainnya.

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2011 dan 2012/Kementerian Keuangan

Tren realisasi PNBPN selama 5 tahun terakhir

Dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan PNBPN, selama tahun 2007-2011 secara umum realisasi penerimaan PNBPN melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PNBPN meningkat menjadi 108,51 persen dari pagu sebesar Rp198,25 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 113,36 persen dari pagu sebesar Rp282,81 triliun, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi penerimaan PNBPN menjadi sebesar 104,19 persen dari pagu sebesar Rp218,04 triliun. Kemudian untuk tahun 2010 realisasi penerimaan PNBPN kembali meningkat menjadi 108,80 persen dari pagu sebesar Rp247,18 triliun. Sedangkan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 115,67 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp331,47 triliun. Sebagai kontributor terbesar untuk penerimaan PNBPN, SDA migas menjadi faktor penting yang menentukan naik turunnya penerimaan PNBPN. Tren peningkatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor, seperti (a) jumlah rata-rata lifting minyak bumi harian, (b) peningkatan ICP, dan (c) penguatan nilai rupiah.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 19. Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2007-2011

Realisasi hibah tahun 2011

Komitmen akan kesediaan negara atau lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia adalah penentu besarnya penerimaan hibah. Di samping itu penerimaan hibah harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Indonesia dengan pihak donor. Realisasi penerimaan hibah di tahun 2011 mencapai Rp5,25 triliun yang berarti mencapai 112,6 persen dari sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp4,66 triliun, atau naik 73,8 persen dari realisasi hibah tahun 2010 sebesar Rp3,0 triliun. Lebih tingginya realisasi penerimaan hibah juga dikarenakan semakin baiknya mekanisme pelaporan dan pengesahan hibah-hibah langsung kepada K/L.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tren realisasi penerimaan hibah 2007-2011

Selama tahun 2007-2011 realisasi penerimaan hibah secara nominal dan tingkat pencapaian targetnya mengalami fluktuasi. Setelah realisasi turun menjadi Rp1,70 triliun (44,50 persen) di tahun 2007, realisasi hibah meningkat menjadi Rp2,30 triliun (77,97 persen) pada tahun 2008. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan hibah kembali mengalami penurunan menjadi Rp1,67 triliun (165,35 persen), dan naik kembali pada 2010 menjadi sebesar Rp3,02 triliun (112,86 persen) selanjutnya di tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp5,25 triliun (112,66 persen). Di samping komitmen dari pemberi bantuan terutama terkait perubahan iklim (*climate change*), faktor yang mendorong meningkatnya realisasi penerimaan hibah antara lain bersumber dari penerapan kebijakan Pemerintah tentang sistem akuntansi hibah yang mewajibkan semua penerimaan hibah dicatat dalam APBN.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 20. Target dan Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2007-2011

2. BELANJA NEGARA

Hubungan belanja negara dengan kondisi eksternal

Target maupun realisasi belanja negara memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkait dengan ekonomi makro seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar Rupiah, dan perkembangan tingkat suku bunga, juga banyak ditentukan oleh kebijakan di bidang pembelanjaan yang diambil oleh Pemerintah. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi, Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat ekspansif dengan meningkatkan volume belanja khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sedangkan dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat tingginya permintaan agregat, Pemerintah akan meluncurkan kebijakan kontraktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sangat berperan dalam stabilisasi bagi perekonomian atau menjadi *counter cyclical* yang efektif dalam meredam gejala ekonomi.

Realisasi belanja negara tahun 2011

Dalam tahun 2011, realisasi belanja negara mencapai Rp1.295,00 triliun, atau 98,05 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,75 triliun. Jumlah tersebut naik Rp252,9 triliun atau 24,26 persen dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.042,12 triliun.

Belanja Pemerintah menurut organisasi

Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh masing-masing K/L yang merupakan entitas pengelola anggaran Pemerintah. Eksekusi belanja Pemerintah pusat menurut organisasi tersebut

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Sesuai dengan prinsip *let the managers manage*, setelah reformasi manajemen keuangan negara, setiap K/L bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi anggaran belanja yang dikelolanya.

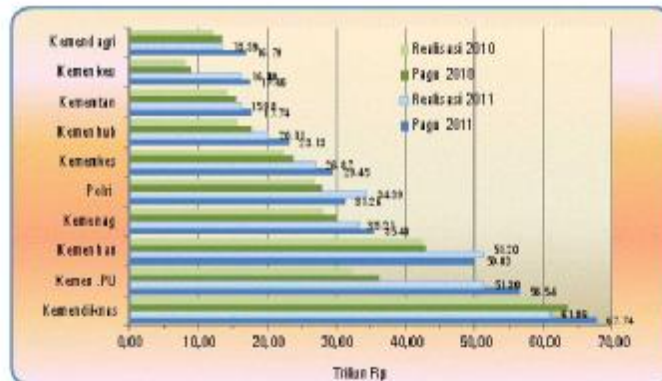
10 K/L yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2011

Dalam melaksanakan ketiga pilar pembangunan (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan, anggaran dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga. Adapun sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah:

- 1). Kementerian Pendidikan Nasional alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp67,74 triliun – (14,68 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,14 persen atau Rp61,06 triliun
- 2). Kementerian Pekerjaan Umum alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp56,54 triliun (12,25 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,73 persen atau Rp51,30 triliun
- 3). Kementerian Pertahanan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp50,03 triliun (10,84 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 102,34 persen atau Rp51,20 triliun
- 4). Kementerian Agama alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp35,40 triliun (7,67 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 93,81 persen atau Rp33,21 triliun
- 5). Kepolisian Negara Republik Indonesia alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp31,26 triliun (6,77 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 110,01 persen atau Rp34,39 triliun
- 6). Kementerian Kesehatan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp29,45 triliun (6,38 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 91,24 persen atau Rp26,87 triliun
- 7). Kementerian Perhubungan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp23,13 triliun (5,01 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 96,94 persen atau Rp22,41 triliun
- 8). Kementerian Pertanian alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp17,74 triliun (3,78 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,06 persen atau Rp15,98 triliun
- 9). Kementerian Keuangan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp17,46 triliun (3,84 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 92,21 persen atau Rp16,1 triliun
- 10). Kementerian Dalam Negeri alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp16,79 triliun (3,63 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 79,73 persen atau Rp13,39 triliun.

Kementerian Pendidikan Nasional tetap merupakan kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, walaupun untuk peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah di tahun sebelumnya ada di peringkat ketiga setelah Kementerian Pertahanan. Grafik K/L yang menerima alokasi anggaran belanja terbesar menurut organisasi dapat dilihat pada grafik 21.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

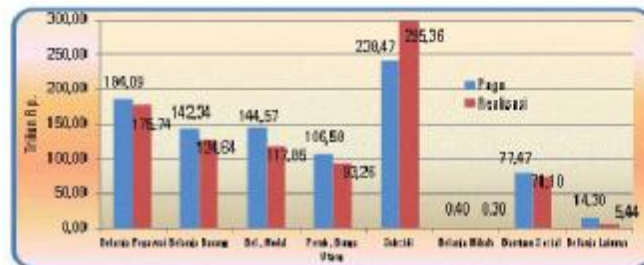


Sumber: LKRI

Grafik 21. K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp883,72 triliun, atau secara nominal naik sebesar Rp186,3 triliun (26,7 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp697,4 triliun. Realisasi tersebut menunjukkan daya serap anggaran sebesar 97,30 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp908,2 triliun. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp175,74 triliun (85,46 persen dari target) (lihat grafik 22). Sedangkan realisasi belanja barang Rp124,64 triliun (87,57 persen dari pagu). Realisasi belanja modal Rp117,85 triliun (81,52 persen dari pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2010 (84,5 persen terhadap pagu). Hal ini antara lain berkaitan dengan kebijakan optimalisasi dan efisiensi terhadap pembangunan gedung kantor; rendahnya realisasi penyerapan pinjaman luar negeri dan adanya reorganisasi di beberapa KL.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 22 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sedangkan realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp93,26 triliun (87,5 persen dari pagu) antara lain berkaitan dengan lebih rendahnya tingkat bunga SPN 3 bulan, penghematan beban bunga akibat pengurangan target penerbitan SBN dan lebih rendahnya penarikan pinjaman luar negeri.

Terkait subsidi, realisasi subsidi mencapai Rp295,36 triliun (123,86 persen dari pagu) atau naik Rp102,7 triliun dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp192,7 triliun, terutama berkaitan dengan lebih tingginya beban subsidi listrik dan subsidi BBM serta subsidi pangan. Hal ini terutama

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

disebabkan oleh lebih tingginya realisasi ICP (USD111,6 per barel) dibandingkan dengan asumsi APBN-P 2011 (USD95,0 per barel), tidak terpenuhinya rencana penggunaan energi input subsidi listrik dan adanya tambahan raskin ke-13.

Realisasi bantuan sosial mencapai Rp71,10 triliun (91,79 persen dari pagu) terutama berkaitan dengan tidak terealisasinya kegiatan PNPB mandiri dan pembatalan kegiatan yang tidak prioritas. Sedangkan realisasi belanja lain-lain mencapai Rp5,47 triliun (38,21 persen terhadap pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp21,7 triliun (65,8 persen terhadap pagu). Hal ini antara lain berkaitan dengan tidak terserapnya cadangan anggaran risiko fiskal, lebih rendahnya penyerapan cadangan anggaran keperluan mendesak dan belanja penunjang serta dilakukannya realokasi anggaran dari bagian anggaran (BA) belanja lainnya ke BA belanja subsidi dan BA K/L.

Secara persentase, kontribusi belanja Pemerintah Pusat terbesar berdasarkan klasifikasi ekonomi selama tahun 2011 adalah realisasi belanja subsidi sebesar 33,42 persen (lebih besar dibandingkan proporsi di tahun 2010 sebesar 27,63 persen) diikuti oleh realisasi belanja pegawai sebesar 19,89 persen, diikuti dengan belanja barang sebesar 14,10 persen, belanja modal sebesar 13,34 persen. Sedangkan belanja pembayaran bunga utang sebesar 10,55 persen, belanja bantuan sosial sebesar 8,05 persen, belanja lain-lain sebesar 0,62 persen dan belanja hibah 0,03 persen dari total belanja. Persentase belanja lain-lain semakin berkurang dari 3,11 persen di tahun sebelumnya menjadi 0,62 persen dikarenakan antara lain banyaknya belanja lainnya yang dapat reklasifikasi.

Tren realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama 5 tahun terakhir

Sejak tahun 2007, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja bersifat mengikat, yakni belanja pegawai, transfer ke daerah, subsidi, dan pembayaran bunga, rata-rata mencapai 73,55 persen dari total belanja Pemerintah Pusat. Di tahun 2011 khususnya belanja mengikat tersebut mencapai 75,34 persen dari total belanja Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya merupakan realisasi belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. Besarnya kontribusi realisasi belanja dimaksud menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, belanja Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengeluaran-pengeluaran yang bersifat belum mengikat terbatas. Dengan keterbatasan dimaksud Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan *quality of spending* agar tepat sasaran dan juga memperluas ruang gerak (*fiscal space*) Pemerintah dalam rangka melakukan intervensi fiskal, yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara.

Boks 7. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2011

Kecenderungan peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi yakni pada sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya dibarengi dengan pola penyerapan dana yang responsif terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran. Salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja negara adalah kesiapan K/L dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta kesiapan dalam menyediakan berbagai dokumen pencairan.

Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja K/L.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2010

Dari grafik di atas belanja negara yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan September dan meningkat tajam kembali dari bulan November dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp290,643 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp107,92 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2011

Belanja pegawai pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp175,74 triliun atau 95,46 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp184,09 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp27,7 triliun atau 18,68 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp148,08 triliun. Hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja pegawai tahun 2011 di antaranya adalah adanya penghematan cadangan anggaran pegawai baru, honorarium dan vakasi, serta belum terserapnya anggaran remunerasi K/L. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2011 tren belanja pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli dan Agustus 2011 mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara serta pembayaran gaji bulan September dilakukan di bulan Agustus dikarenakan libur cuti bersama terkait hari raya dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp23,22 triliun dan 21,64 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 25. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2011

Pagu belanja barang pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp142,34 triliun atau meningkat sebesar Rp29,75 triliun atau 26,42 persen dibanding pagu tahun 2010 sebesar Rp112,59 triliun. Belanja barang terealisasi sebesar Rp124,64 triliun atau 87,57 persen dari pagu, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang terealisasi sebesar Rp97,60 triliun. Adapun tren belanja barang pada tahun 2011 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp0,92 triliun, lebih rendah dari realisasi periode sebelumnya Rp0,74 triliun. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp38,66 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi Desember tahun sebelumnya sebesar Rp25,63 triliun. Rendahnya tingkat serapan belanja barang ditengarai masih terkait dengan kesiapan K/L dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2011

Alokasi anggaran belanja modal pada tahun 2011 sebesar Rp144,57 triliun yang berarti naik tajam sebesar Rp49,55 triliun atau 52,15 persen dibanding pagu tahun 2010 sebesar Rp95,02 triliun. Adapun realisasi belanja modal tahun 2011 sebesar Rp117,85 triliun atau 81,52 persen dari pagunya, lebih rendah dari penyerapan tahun sebelumnya sebesar 84,50 persen. Secara umum tren realisasi belanja modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja barang yakni

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,59 triliun, relatif tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp50,97 triliun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi Desember 2010 sebesar Rp32,63 triliun. Rata-rata realisasi bulanan di tahun 2011 sebesar Rp9,96, sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya sebesar Rp6,69 triliun. Rendahnya tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2011 terjadi antara lain karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan/proyek yang terkendala iklim/cuaca, bencana alam dan masalah dalam pengadaan/pembebasan lahan, serta penghematan anggaran dari pelaksanaan tender.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 27. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2011

Pagu belanja subsidi pada tahun 2011 senilai Rp238,47 triliun atau meningkat sebesar Rp37,21 triliun (18,49 persen) dibanding yang dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp201,26 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp295,36 triliun atau 123,86 persen dari pagu APBN-P 2011 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp102,7 triliun atau 53,27 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp192,71 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2011 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terealisasi pada bulan Maret dan kemudian turun sampai bulan Juni serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp94,46 triliun atau 39,61 persen dari total pagu. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar Rp0,07 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp94,46 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp24,61 triliun. Realisasi subsidi melampaui pagu terutama terkait dengan lebih tingginya beban subsidi energi, terutama dengan naiknya harga ICP di akhir periode, dan subsidi non-energi yang diakibatkan antara lain oleh tambahan subsidi kewajiban pelayanan umum (*public service obligation/PSO*) dan tambahan subsidi pajak.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 28. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2011

Pada tahun 2011 belanja bantuan sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp77,47 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp6,30 triliun atau 8,85 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp71,17 triliun. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp71,10 triliun atau 91,79 persen dari pagu APBN-P 2011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,49 triliun atau 3,63 persen dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp68,61 triliun. Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2011, penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,01 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp23,47 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp5,93 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 29. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2011

Alokasi anggaran belanja pembayaran bunga utang pada tahun 2011 mencapai Rp106,58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,93 triliun atau 0,88 persen bila dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp105,65 triliun. Realisasi belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp93,26 triliun atau 87,50 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4,9 triliun atau 5,52 persen dibanding realisasi tahun 2010 yang mencapai Rp88,38 triliun. Peningkatan besaran pembayaran bunga utang seiring dengan peningkatan *outstanding* utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

peningkatan. Realisasi pembayaran bunga utang tahun 2011 berfluktuasi dengan rata-rata bulanan sebesar Rp7,77 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 30. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2011

Pada tahun 2011 belanja lain-lain mendapatkan alokasi sebesar Rp14,30 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp18,62 triliun atau 56,56 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp32,92 triliun. Belanja lain-lain terealisasi sebesar Rp5,47 triliun atau 38,21 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2011 atau mengalami penurunan sebesar Rp16,2 triliun atau 74,78 persen dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp21,67 triliun. Tren penyerapan belanja lain-lain sepanjang tahun 2011 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,04 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp1,52 triliun. Secara rata-rata penyerapan belanja lain-lain per bulan selama tahun 2011 adalah sebesar Rp0,45 triliun. Secara nominal rendahnya realisasi anggaran belanja lain-lain tahun 2011 dibanding realisasi tahun 2010 disebabkan antara lain karena telah direalokasikannya beberapa pos anggaran dari belanja lain-lain ke belanja K/L, seperti pendanaan untuk biaya pemungutan PBB, anggaran beberapa komite/lembaga dan sebagian belanja penunjang.

Kontribusi belanja Pemerintah dan Belanja Modal terhadap perekonomian

Sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda yang dituangkan dalam besaran dan kebijakan alokasi belanja negara memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka baik pagu maupun realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2011 diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut. Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk melakukan stimulus bagi perekonomian terutama melalui belanja negara, dengan rata-rata kontribusi 17,88 persen terhadap PDB di lima tahun terakhir. Kebijakan fiskal yang ekspansif bagi perekonomian terlihat dari perkembangan realisasi belanja negara dan defisit (lihat tabel 2).

Realisasi belanja negara tahun 2007 sebesar Rp757,65 triliun atau sekitar 19,15 persen PDB. . Sementara itu, pada tahun 2008, realisasi belanja negara menjadi 19,90 persen PDB, secara nominal meningkat sebesar 30,10 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun 2007. Kemudian belanja negara tahun 2009 (16,70 persen PDB) turun sebesar 4,90 persen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dibanding tahun sebelumnya dan meningkat di tahun 2010 sebesar 11,17 persen (16,23 persen PDB). Di tahun 2011, realisasi belanja naik 24,27 persen menjadi Rp1.295,00 triliun (17,4 persen PDB) yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat Rp883,72 triliun (11,9 persen PDB), dan transfer ke daerah mencapai Rp411,32 triliun (5,5 persen PDB.)

Kontribusi pos belanja modal dalam APBN memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor riil terutama melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Secara nominal realisasi belanja modal tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, [tetapi rasio belanja modal terhadap PDB mengalami penurunan walaupun kembali naik di tahun 2011]. Keterbatasan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal seiring dengan semakin sempitnya ruang gerak yang dimiliki Pemerintah terkait dengan *fiscal space*. *Fiscal space* terhadap PDB selama periode 2007-2011 berturut-turut adalah 5,48 persen, 4,93 persen, 5,17 persen, 4,86 persen, dan 5,14 persen. Sedangkan rasio realisasi belanja modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2007-2011 adalah 1,62 persen, 1,47 persen, 1,35 persen, 1,25 persen, dan 1,63 persen. Walaupun secara nominal realisasi belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, namun secara rata-rata rasio belanja modal terhadap PDB telah mencapai sekitar 1,46 persen.

Tabel 2. Perkembangan Belanja Negara tahun 2007-2011
(triliun Rupiah)

Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Negara	757,85	19,15	985,73	19,90	937,98	16,70	1.042,12	16,23	1.295,00	17,4
Belanja Pemerintah Pusat	504,62	12,75	683,36	14,00	628,81	11,20	697,41	10,86	883,72	11,9
Transfer ke Daerah	253,26	6,40	292,43	5,90	308,58	5,50	344,73	5,37	411,32	5,5
Suspensi	(0,24)	(0,01)	(0,06)	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)	0,00	(0,05)	0,01
Surplus/Defisit	(49,84)	(1,26)	(4,12)	(0,08)	(88,62)	(1,58)	(46,85)	(0,73)	(84,38)	(1,1)
Belanja Modal	84,29	1,62	72,77	1,47	75,87	1,35	80,29	1,25	117,85	1,6
PDB	3.957,4		4.954		5.613,4		6.422,9		7.427,1	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Boks 8. Fiscal Space

Fiscal space secara umum merupakan ketersediaan alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu tanpa mengakibatkan permasalahan terhadap kesinambungan posisi keuangan Pemerintah. Dalam konteks APBN, fiscal space dihitung dari pengurangan total anggaran belanja dengan jumlah belanja yang telah terikat, seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Fiscal space berguna untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran negara pada belanja-belanja yang bersifat belum terikat seperti pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perluasan fiscal space antara lain dapat ditempuh dengan: (1) meningkatkan pendapatan negara; (2) menajamkan prioritas belanja negara antara lain melalui pemotongan belanja negara yang bukan prioritas, penurunan belanja subsidi dan penyesuaian berkala pembayaran bunga utang; dan (3) meningkatkan efisiensi melalui peningkatan good governance dan pemberantasan korupsi.

Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar realisasi belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja terikat. Anggaran belanja terikat selama kurun waktu 2007-2011 menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata sebesar 13,32 persen terhadap PDB, yang berturut-turut mulai dari tahun 2007 adalah Rp535,66 triliun (13,54 persen terhadap PDB), Rp745,15 triliun (15,04

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

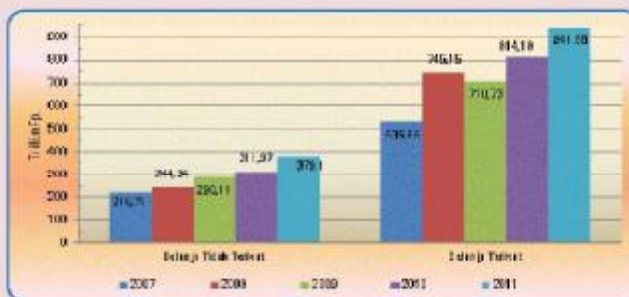
persen terhadap PDB), Rp710,73 triliun (12,66 persen terhadap PDB), Rp814,18 triliun (12,68 persen terhadap PDB), dan Rp.941,65 triliun (12,68 persen terhadap PDB). Secara nominal, anggaran belanja terikat pada tahun 2011 meningkat tajam sebesar lebih dari 75 persen dibanding nominal tahun 2007. Sedangkan fiscal space selama kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan, pada tahun 2007 sebesar Rp216,71 triliun, kemudian pada tahun 2008 menjadi Rp244,34 triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp290,11 triliun, pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp311,97 triliun, dan di tahun 2011 meningkat menjadi Rp379,1 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa tren fiscal space terhadap PDB, sepanjang periode 2007-2011 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata 5,11 persen terhadap PDB dan di tahun 2011 rasio mencapai 5,10 persen.

Mencermati masih terbatasnya space yang dimiliki, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dari belanja negara (*quality of spending*). Diharapkan melalui kualitas belanja negara yang memadai, maka instrumen fiskal menjadi lebih efektif yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2007-2011

No	Uraian	Pagu TA 2007 (Rp triliun)	Pagu TA 2008 (Rp triliun)	Pagu TA 2009 (Rp triliun)	Pagu TA 2010 (Rp triliun)	Pagu TA 2011 (Rp triliun)
1.	Total Belanja Negara	752,37	905,49	1.000,64	1.126,15	1.320,75
2.	Total Belanja Terikat (Non-discretionary spending)	535,66	745,15	710,73	814,18	941,65
	a. Belanja Pegawai	92,84	123,94	133,71	162,66	194,09
	b. Belanja Pembayaran Bunga	63,55	94,79	109,59	105,65	105,59
	c. Belanja Subsidi	105,07	234,40	159,12	201,26	236,47
	d. Transfer ke Daerah	254,20	292,42	309,31	344,61	412,51
3.	Total Belanja Negara – Total Belanja Terikat	216,71	244,34	290,11	311,97	379,1
4.	Rasio Belanja Terikat terhadap Total Belanja Negara	71,20	75,31	71,01	72,30	71,30
5.	Rasio Belanja Tidak Terikat terhadap Total Belanja Negara	26,90	24,69	26,99	27,70	26,70
6.	Pendapatan Domestik Bruto/PDB (triliun Rupiah)	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9	7.427,1
7.	Rasio Belanja Terikat terhadap PDB (%)	13,54	15,04	12,66	12,68	12,68
8.	Rasio Belanja Tidak Terikat (Fiscal Space) terhadap PDB (%)	5,48	4,93	5,17	4,86	5,10

Sumber : Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 31. Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2007-2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Realisasi transfer ke daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal telah memasuki dasawarsa yang kedua. Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi vertical dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan naiknya pendapatan negara.

Realisasi transfer ke daerah dalam tahun 2011 mencapai Rp411,3 triliun (99,7 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun), atau naik Rp66,6 triliun (19,36 persen) dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp344,7 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan, dana Otsus dan penyesuaian. Realisasi dana Perimbangan sebesar Rp347,25 triliun atau hampir sama dengan pagu APBN-P 2011 sebesar Rp347,5 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan sedikit lebih rendahnya realisasi DAK berkenaan dengan adanya beberapa daerah yang tidak memenuhi persyaratan sedangkan realisasi DAU sesuai dengan pagu, sementara realisasi DBH sedikit di atas pagu.

Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar Rp64,1 triliun atau 98,6 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp64,97 triliun. Realisasi otsus sesuai pagu, selisih terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi dana penyesuaian, khususnya dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID), dan bantuan operasional sekolah (BOS).



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 32. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2011

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktuasi sepanjang tahun 2011. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp37,66 triliun atau 10,84 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi dengan kenaikan di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan tertinggi sebesar Rp47,28 triliun atau 13,61 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp347,25 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp28,94 triliun, lebih besar dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp26,39 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 33. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011

Untuk penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mulai direalisasikan di bulan Februari, di tahun 2011 dapat direalisasikan mulai awal tahun. Penyerapan tertinggi ada di bulan Juli (Rp9,86 triliun), September (Rp10,07 triliun), dan Desember (Rp10,64 triliun). Secara nominal, dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp5,34 triliun. Dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp64,08 triliun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp28,02 triliun.

3. PEMBIAYAAN

Dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap deficit APBN

Peningkatan deficit fiskal utamanya merupakan implikasi dari kebijakan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun kebijakan fiskal ekspansif memiliki kecenderungan terjadinya deficit, Pemerintah terus berupaya menjaga deficit fiskal pada tingkat yang relatif rendah. Di samping itu, upaya perhitungan besaran dan realisasi deficit ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makroekonomi seperti inflasi. Defisit yang meningkat juga diseimbangkan dengan kebijakan di bidang pendapatan yang mengupayakan peningkatan pendapatan negara terutama yang berasal dari dalam negeri. Defisit anggaran meningkat secara tajam di tahun 2007 antara lain terkait erat dengan meningkatnya harga-harga komoditas internasional terutama harga minyak dunia yang mengakibatkan meningkatnya beban subsidi Pemerintah. Stimulus fiskal Pemerintah diberikan dalam bentuk (1) insentif perpajakan; (2) optimalisasi belanja negara untuk pembangunan; (3) pengalokasian belanja negara dalam rangka meningkatkan *purchasing power* dari masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan (4) dukungan Pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui *Public-Private Partnership* (PPP).

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan terus digali untuk menutup deficit anggaran. Sumber pembiayaan itu sendiri berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah menekankan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan APBN. Adapun sumber pembiayaan luar negeri juga digali dengan memperhatikan dan mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan (*debt sustainability*).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan pembiayaan dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan utang dan non utang. Pada tahun 2011 sumber pembiayaan didominasi oleh sumber pembiayaan utang yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan non utang yang antara

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

lain dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sumber yang berasal dari utang, Pemerintah menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen utama.

Realisasi pembiayaan APBN

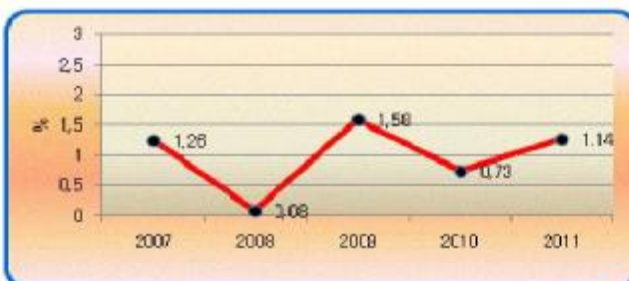
Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2011 mencapai Rp130,95 triliun, lebih rendah Rp19,88 triliun (**13,18 persen**) dari target APBN-P 2011 sebesar Rp150,8 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp148,75 triliun, lebih rendah Rp4,86 triliun (3,16 persen) dari target APBN-P 2011 sebesar Rp153,6 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh pengurangan target penerbitan SBN neto sebesar Rp19,15 triliun, lebih rendahnya penarikan pinjaman dalam negeri, dan tidak ada realisasi untuk kewajiban penjaminan.

Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp17,80 triliun, turun Rp15,02 triliun dari target APBN-P 2011 sebesar negatif Rp2,78 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan pembatalan penarikan pinjaman program Low Carbon and Resilient Development Program, lebih rendahnya penarikan pinjaman proyek, dan lebih rendahnya penarikan penerusan pinjaman.

Selain itu di tahun 2011 Pemerintah juga berusaha mengurangi jumlah pinjaman luar negerinya dengan cara melakukan debt swap, seperti realisasi pengalihan pinjaman untuk proyek Junior Secondary Education (23 juta Euro), Housing and Settlement (1,8 juta euro dan USD7,5 juta), Debt2Health (AUD7,5 juta), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (10 juta Euro), dan Tropical Forest Conservation (USD6,4 juta).

Rasio defisit terhadap PDB

Rasio defisit terhadap PDB menunjukkan salah satu indikator kesinambungan fiskal. Selama tahun 2007-2011 rasio tersebut berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 0,96 persen. Rasio defisit terhadap PDB berfluktuatif dengan defisit terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp4,12 triliun atau 0,08 persen terhadap PDB atau 4,36 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp94,50 triliun, sedangkan defisit tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp88,62 triliun atau 1,58 persen terhadap PDB atau 68,25 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp129,84 triliun. Untuk tahun 2011 rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,14 persen.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

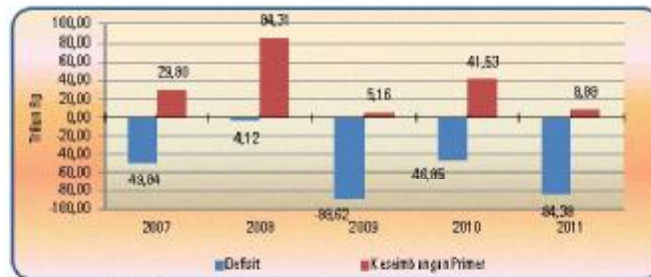
Grafik 34. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2007-2011

Keseimbangan primer

Keseimbangan primer diperoleh dari pendapatan termasuk hibah dikurangi dengan pengeluaran yang tidak memiliki komponen bunga (pinjaman neto). Pada tahun 2011, keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp8,88 triliun yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang berada pada posisi Rp41,53 triliun. Perubahan ini dipengaruhi antara lain oleh naiknya

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pembayaran kewajiban bunga utang dan membesarnya defisit anggaran. Pembayaran bunga utang pada tahun 2011 sebesar Rp93,26 triliun yang berarti mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp88,38 triliun. Sementara itu, defisit anggaran pada tahun 2011 berada pada level Rp84,38 triliun yang lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp46,77 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 35. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2007-2011

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SIKPA/SILPA

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SILPA (selisih lebih pembiayaan anggaran)/SIKPA (selisih kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran pemerintah pusat menghasilkan SILPA. SILPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SILPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SILPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2007 realisasi APBN mengalami SIKPA sebesar Rp7,39 triliun, sedangkan SILPA tahun 2008 sebesar Rp79,95 triliun. SILPA tersebut menjadi SAL tahun 2008 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2009 yakni terutama terkait dengan PNPB. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SILPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SILPA sebesar Rp44,71 triliun. Untuk tahun 2011 jumlah SILPA berkurang menjadi Rp46,55 triliun. Selama tahun 2007 - 2011, SILPA rata-rata sebesar Rp37,56 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 36. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2007-2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Suspen

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah, diperlukan keandalan data dan informasi yang antara lain tercermin dari besaran nilai suspen. Suspen merupakan selisih pencatatan transaksi keuangan antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan walaupun mekanisme saling uji (*check and balance*) terus diupayakan. Pada tahun 2011 nilai suspen berada pada posisi negatif Rp47,50 miliar atau sebesar 0,0037 persen dari total realisasi belanja negara.

Boks 9. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2007-2011

APBN sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, digunakan Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan APBN dapat mempengaruhi kondisi perekonomian melalui peran strategis yang dimiliki berupa kebijakan yang bersifat ekspansif pada saat ekonomi lesu ataupun kontraktif pada saat ekonomi sedang *overheating*. Besaran dan alokasi pada APBN berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil, sektor moneter, dan sektor lainnya. Kebijakan anggaran pada sisi penerimaan bertujuan untuk mendorong aktivitas perekonomian melalui kebijakan perpajakan, sedangkan yang dilakukan dari sisi belanja diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Implikasi besaran APBN utamanya terhadap sektor riil dapat diketahui terutama dari dua komponen yakni konsumsi Pemerintah dan pembentukan modal domestik bruto. Pada tahun 2011, komponen konsumsi Pemerintah berada di level Rp588,08 triliun atau 7,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan 16,16 persen dari realisasi konsumsi Pemerintah tahun 2010. Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp202,171 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB yang bersumber dari realisasi belanja modal Pemerintah Pusat yang mencapai Rp117,85 triliun (1,6 persen PDB) dan realisasi belanja modal dari anggaran yang ditransfer ke daerah sebesar Rp84,32 triliun (1,1 persen PDB). Dengan demikian, dampak APBN TA 2011 terhadap sektor riil mencapai Rp790,26 triliun atau sebesar 10,64 persen dari PDB, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 10,2 persen dari PDB.

Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2011 sebesar 32 persen atau Rp2.378,3 triliun, hal ini berarti kontribusi Pemerintah dalam membentuk PDB adalah sebesar 2,7 persen atau sebesar Rp202,17 triliun dan selebihnya sebesar Rp2.176,13 triliun disumbang oleh sektor swasta.

Tabel 4. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2007-2011

Rincian	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	Real (Rp triliun)	% terhadap PDB	Real (Rp triliun)	% terhadap PDB	Real (Rp triliun)	% terhadap PDB	Real (Rp triliun)	% terhadap PDB	Real (Rp triliun)	% terhadap PDB
1. Konsumsi Pemerintah (ab)	330,22	7,7	362,30	7,3	463,09	8,2	505,40	7,9	588,08	7,9
a. Belanja Barang & Jasa	327,62	6,3	360,51	6,0	464,13	8,8	541,41	6,4	632,62	6,8
Belanja Pegawai	90,31	2,0	112,85	2,3	127,67	2,3	149,06	2,2	175,74	2,4
Belanja Barang	92,93	1,9	56,36	1,1	80,67	1,4	87,60	1,0	124,64	1,3
Belanja Poin Daerah	109,01	4,3	107,36	4,0	246,80	4,4	274,06	4,5	323,00	4,4
Belanja Lainnya	15,59	0,4	30,35	0,6	38,33	0,7	21,87	0,3	5,44	0,07
b. Pendapatan Barang & Jasa	21,40	0,0	33,93	0,7	31,09	0,6	39,01	0,5	44,74	0,6
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,96	3,2	167,81	3,4	137,99	2,6	160,66	2,4	202,17	2,7
Pemerintah Pusat	64,13	1,6	72,77	1,5	75,87	1,4	60,29	1,0	117,66	1,6
Pemerintah Daerah	81,37	2,1	95,04	1,9	61,72	1,1	70,67	1,1	84,92	1,1
Jumlah 1 dan 2	492,07	11,4	530,80	10,7	600,84	10,7	667,38	10,2	790,26	10,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 5. Presentase Anggaran Dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2011

Uraian	2011			
	APBN-P	persen thd PDB	Realisasi	persen thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1.169,91	16,9	1.210,60	16,3
1. Penerimaan Perpajakan	878,89	11,8	873,87	11,8
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831,75	11,2	818,75	11,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46,94	0,6	54,12	0,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	288,57	3,9	331,47	4,5
a. Penerimaan SDA	191,98	2,6	213,83	2,9
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	28,84	0,4	28,18	0,4
c. Pendapatan PMBP lainnya	50,34	0,7	89,37	0,9
d. Pendapatan BLU	15,42	0,2	20,10	0,3
3. Penerimaan Hibah	4,86	0,1	5,25	0,07
Belanja Negara	1.320,75	17,8	1.284,98	17,4
1. Belanja Pemerintah Pusat	908,24	12,2	883,72	11,9
a. Belanja Pegawai	184,09	2,5	175,74	2,4
b. Belanja Barang	142,34	1,9	124,64	1,7
c. Belanja Modal	144,57	1,9	117,86	1,6
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	105,58	1,4	93,26	1,3
e. Belanja Subsidi	238,47	3,2	295,36	4,0
f. Belanja Hibah	0,43	0,01	0,30	0,004
g. Belanja Bantuan Sosial	77,47	1,1	71,10	1,0
h. Belanja Lain-lain	14,30	0,2	5,47	0,1
2. Transfer ke Daerah	412,51	5,6	411,32	5,5
a. Dana Perimbangan	347,54	4,7	347,25	4,7
i. Dana Bagi Hasil	95,77	1,3	95,91	1,3
ii. Dana Alokasi Umum	225,53	3,0	225,53	3,0
iii. Dana Alokasi Khusus	25,23	0,3	24,80	0,3
b. Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64,97	0,9	64,08	0,9
i. Dana Otonomi Khusus	10,42	0,1	10,42	0,1
ii. Dana Penyesuaian	54,55	0,7	53,66	0,7
Défisit Anggaran	(150,84)	(2,0)	(84,40)	(1,1)
Pembiayaan	150,84	2,0	130,95	1,8

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Tabel 6
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007-2011

No	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	Ket
1	Milai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	1.964,0	2.082,1	2.177,0	2.310,7	2.463,2	(1)
2	Milai PDB Harga yang Beraku (Rp Triliun)	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9	7.427,1	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	16,4	21,7	24,3	27,0	30,8	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	6,3	6,1	4,5	6,1	6,5	(1)
5	Inflasi (%)	6,6	11,1	2,76	6,96	3,79	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	113,9	136,6	116,49	157,73	203,62	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD miliar)	81,9	107,8	97,47	129,68	162,02	(1)
8	Total impor (USD miliar)	74,4	126,8	96,86	135,61	177,30	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	52,5	98,3	77,87	108,24	136,61	(1)
10	Cadangan Devisa USD Miliar, akhir tahun	55,9	51,6	65,1	96,2	110,1	(2)
11	Rupiah/USD	9.419,0	10.950	10.400	9.678	8.775	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	707,81	961,60	848,76	995,27	1.210,60	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	757,65	965,73	937,36	1.042,12	1.294,98	(4)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	(49,84)	(4,12)	(68,82)	(46,95)	(84,36)	(4)
15	Utang Beredar (Rp Triliun)						
	a. Asli Sengit (M1)	460,8	466,4	506,06	518,45	613,49	(2)
	b. Asli Lunas (M2)	1.866,1	1.693,9	1.695,06	2.209,02	2.707,81	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	787,1	1.319,7	1.408,67	1.796,0	2.117,96	(2)
17	Suku Bunga (% per tahun)						
	a. SBI 1 bulan	8,75	8,2	6,48	6,32		(2)
	b. SBI 3 bulan		10,75	6,59	6,57		(2)
	c. Deposito 1 bulan	8,96	8,2	6,87	6,78	6,35	(2)
	d. Kredit Modal Kerja	15,1	15,2	13,69	12,03	12,16	(2)
	e. Kredit Investasi	15,1	14,4	12,96	12,28	12,04	(2)
18	IHSGBEJ	1.805,5	1.365,0	2.534,0	3.704	3.822	(2)
19	Harga Minyak (USD/Barrel)	72,3	96,13	61,5	79,4	111,5	(5)
20	Ufing Minyak (Barrel/hari)	909	931	952	954	898	(3)
21	Rasio Utang terhadap PDR (DSR, %)	36,0	33	28	28	25,4	(3)

Keterangan:

Sumber :

- (1) Badan Pusat Statistik
- (2) Bank Indonesia
- (3) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
- (4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
- (5) Kementerian ESUM

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Untuk LKPP Tahun 2011, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup, meliputi:

Daftar entitas pelaporan
keuangan tingkat
kementerian
negara/lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2011	2010
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Devan Perwajaban Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	36
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.602	802
5	BA 006	Kepulauan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	17	17
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	763	750
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	142	142
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	256	244
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	753	756
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.067	1.069
12	BA 018	Kementerian Pertanian	2.733	1.967
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	109	176
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	93	92
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	680	676
16	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	366	377
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.185	446
18	BA 025	Kementerian Agama	6.961	4.381
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.009	802
20	BA 027	Kementerian Sosial	284	206
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	403	366
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	745	698
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.024	1.072
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Pertahanan	2	1
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1
27	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	210	88
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	11
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	48	48
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	36	44
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7
33	BA 048	Kementerian Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	1
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Devan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	484	484
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	1
39	BA 056	Badan Pertahanan Nasional	461	460
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	35	34
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	59

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Saldo	
			2011	2010
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.133	1.072
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	39	39
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39	39
46	BA 066	Badan Matematika Nasional	74	11
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	40	175
48	BA 069	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	187
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	531	532
52	BA 077	Majelis Kehormatan	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	22
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	19	19
58	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	4
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	13	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	34	33
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31	31
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	311	165
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	42	40
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 095	Devan Perwakolan Daerah	2	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24	24
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	25	25
76	BA 108	Komisi Pengawas Perseroan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Sumatera *)	1	-
78	BA 110	Ombudsman RI *)	1	-
79	BA 111	Badan Nasional Pengabdian Masyarakat *)	32	-
80	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.01	Pengelolaan Utang **)	1	1
	BA 999.02	Hibah **)	1	2
	BA 999.03	Investasi Pemerintah **)	4	1
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman **)	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah **)	3	3
	BA 999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain **)	-	127
	BA 999.07	Belanja Subsidi **)	15	7
	BA 999.08	Belanja Lain-lain **)	160	864
	BA 999.99	Transaksi Khusus **)	-	-
	BA 999.-	Badan Lainnya	-	-
		Jumlah Saldo	25.143	20.248

*) Bagian Anggaran tersebut baru terbentuk sejak tahun anggaran 2011

**) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBN.

LKPP Tahun 2011 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

- transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi Pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI); dan
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2011 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- Unit Badan Lainnya yang belum menyajikan/menyampaikan laporan keuangan.

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

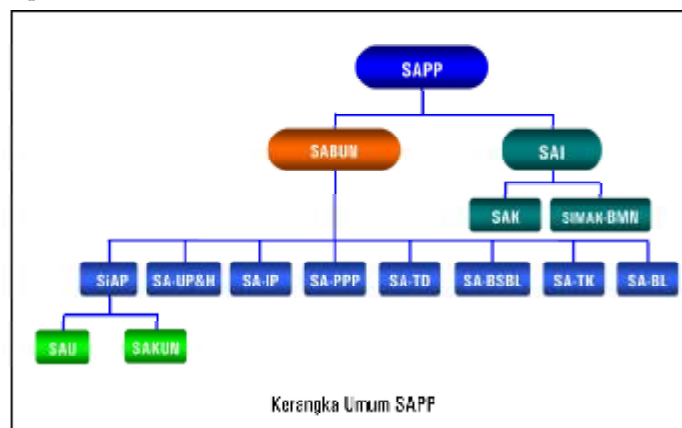
Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPPI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Penyusunan Anggaran) sampai tingkat K/L (Penyusunan Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menyebutkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SIAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Pinjaman (SA-PP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSEL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SIAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca atas transaksi Utang Pemerintah, Hibah, Penerimaan Pinjaman, Investasi/Penyertaan Modal, Transfer ke Daerah, Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

diagram di bawah ini.



SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan KIL dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

 - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

APBN TA 2011 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang nili masuk ke Kas Negara atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.

- Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai "Suspen."
- Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang nili masuk ke atau keluar dari Kas Negara.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh K/L dan Neraca LKBBUN. Neraca LKBBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU diturunkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAL.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2011 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411080, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 608.000111980, rekening SAL, dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SIP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II (Pernyataan SAP (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2011 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, dana lancar BLU, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Termasuk dalam Kas Lainnya dan Setara Kas adalah rekening cadangan subsidi/PSD dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disetorkan ke kas negara.
- Kas pada BLU yang disajikan merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas di BLU yang merupakan dana kelulaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan peragihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun 2011 ini telah menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja.
Piutang macet K/L yang dialihkan peragihannya kepada Kementerian Keuangan pada LKPP Tahun 2011 disajikan dalam kelompok piutang awalnya (sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya) dengan penyisihan 100%, sedangkan pada LKPP Tahun 2010 disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain.
- Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam, Tempat Simpan Pinjam (USP/TPSP), atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIPI) yang telah diinvestasikan.

Dana kelalaian BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelalaian BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada perusahaan negara yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan).
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang disalurkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Acara Transfer Operasi (BASTO). Metode penatalan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil *review* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- PMN pada BHMN Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor) disajikan sebesar kekayaan bersih (ekuitas) PTN tersebut posisi per 31 Desember 2010 dikurangi dengan kas yang telah disahkan sebagai pendapatan tahun anggaran 2011 pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Provisionary Notes*. Di sisi lain, *Provisionary Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.
- Pada LKPP Tahun 2010, investasi pada badan-badan lainnya yang tidak termasuk perusahaan negara, seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ditrut Asahan, Ditrut Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Pada LKPP Tahun 2011, investasi pada BI dan LPS disajikan sebagai bagian dari Investasi Permanen PMN, sedangkan investasi pada Ditrut Asahan, Ditrut Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran direklasifikasi sebagai bagian dari Aset Lainnya.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2011 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penyusutan, serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. Penerapan penyusutan aset tetap akan dilaksanakan mulai pelaporan keuangan tahun 2013. Untuk tahun 2011, penyusutan aset tetap dilaksanakan untuk satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU yang telah melaksanakan sistem

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Nilai perolehan, penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap pada satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diungkapkan dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).
- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSD rekening cadangan Dana Bagi Hasil rekening dana rehabilitasi, Dana Abadi Umum, Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan kas besi perwakilkan RI di luar negeri, serta dana lain yang sejenis. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada rekening cadangan subsidi/PSD dan rekening cadangan Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2011 disajikan sebesar dana cadangan yang sampai dengan akhir Februari 2012 telah disalurkan kepada pihak ketiga/pemerintah daerah. Sementara itu, rekening cadangan subsidi/PSD dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disetorkan ke kas negara disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas dengan akun lawan Pendapatan yang Ditangguhkan.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

manfaat jangka panjang, serta hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

- Aset KKKS dan Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) pada LKPP Tahun 2010 disajikan pada kelompok Aset Lain-lain, sedangkan pada LKPP Tahun 2011 disajikan terpisah dari Aset Lain-lain.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah, dan dapat diyakini keberadaan dan keandalan nilainya. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih less dikurangi kewajiban. Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran IKPAI, seperti Otorita Batam, maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Pada LKPP Tahun 2010, nilai kekayaan bersih (ekuitas) pada Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai Investasi Pamanan Lainnya.

- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemilraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dibenteng dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum dipulihkan/diinvestasikan, seluruh piutang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang. Pada LKPP Tahun 2010, penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP tahun 2009 dan setelah tahun 2009 disajikan sebagai Aset Lainnya, sedangkan penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009 disajikan sebagai Investasi Non Permanen. Pada LKPP Tahun 2011, termasuk dalam kelompok Penerusan Pinjaman adalah reklasifikasi Rekening

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) dari Investasi Jangka Panjang.

- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 pada LKPP tahun sebelumnya disajikan sebagai Dana Bergulir, dan pada LKPP Tahun 2011 disajikan sebagai Aset Lainnya.
- TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2011 disajikan sebagai bagian lancar.

- **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau proramngan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*in arrears*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) herjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bonds** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi 31 Desember 2011, terdapat 2 seri ZC dengan *outsanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Zero Coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBID1
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

(sebelumnya 2018).

- **SU 007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang bernominal mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penubuhan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada akhir tahun 2011, terdapat 11 seri *fixed rate* SBSN dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12%. Selain itu terdapat 7 seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 8,00%

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesungguhnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penikilan karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability (unfunded liability)* berupa kewajiban pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Past service liability* terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Pruyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pencahapan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembelasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan penanaman kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah seperti dana Bapertarum, serta dana yang akan diserahkan kepada pihak ketiga seperti dana rekening cadangan Dana Bagi Hasil dan rekening cadangan subsidi, mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

Kurs Mata Uang Asing

(8) Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjahatkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, diluluhkan dalam mata uang rupiah dengan menjahatkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Dolar Amerika Serikat (USD)	1	0.009,00	8.201,00
Dolar Australia (AUD)	1	8.202,55	8.172,81
Dolar Kanada (CAD)	1	8.061,30	8.206,87
Franc Swiss (CHF)	1	9.536,07	9.000,14
Yuan China (CNY)	1	1.459,10	1.557,61
Kroner Denmark (DKK)	1	1.579,22	1.606,75
Hong Kong (HKD)	1	11.439,45	11.546,75
Poundsterling Inggris (GBP)	1	13.969,77	13.894,10
Yen Jepang (JPY)	100	11.550,32	11.025,35
Korea Won (KRW)	1	7,84	7,97

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2011 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam valas, bagian lancar penerusan pinjaman dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- kurs transaksi pada saat konversi dikurangi kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi;
- ditambah dengan proporsi akumulasi selisih kurs yang belum terealisasi sampai dengan hari sebelumnya dari mata uang asing yang dikonversi terhadap total mata uang asing.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNEP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Selisih kurs yang belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut disajikan pada Neraca sebagai penambah atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang telah terealisasi.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

- a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.
- b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
 - *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
 - Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2011) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

(9) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah 4 (empat) tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 ini adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK dikurangi dengan aset/kewajiban yang telah diserahkan kepada pihak lain sampai dengan 31 Desember 2011.

(10) Daftar Perubahan Kebijakan Akuntansi

Daftar Perubahan
Kebijakan Akuntansi

Pada LKPP Tahun 2011 terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi dari LKPP Tahun 2010, yaitu:

No.	Kebijakan Akuntansi	LKPP Tahun 2011	LKPP Tahun 2010
1.	Transaksi Pajak Utang-piutang Pemerintah (Pajak PTP) dan Be- Meseuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)	Pendapatan Pajak PTP, Pendapatan BM-DTP, Belanja Subsidi Pajak PTP, dan Belanja Subsidi BM-DTP diapungkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan arus kas	Pencatatan Pajak PTP, Pencatatan BM-DTP, Belanja Subsidi Pajak PTP, dan Belanja Subsidi BM-DTP hanya dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak dicatat pada Laporan arus kas
2.	Transaksi Pencapaian Hibah dalam Bentuk Barang/Lasa	Pendapatan Hibah dan Belanja Barang/Lasa atas pencapaian hibah dalam bentuk barang/lasa dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak dicatat pada Laporan arus kas	Hanya dicatat di Galis
3.	Pengembalian Dana Talangan Kebersihan Uang Muka dari Daerah BUN	Dicatat sebagai Pembiayaan "Penyediaan"	Dicatat sebagai Kiriman Uang Meseuk dari Pemerintah pusat ke BUN
4.	Kas di rekening: * Menteri Keuangan: C.D Jember, Jember Pemerintah untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan dan Pemakaian Kas RPR Nomor 502.0000488C; * Menteri Keuangan Pengalihan untuk BRN (Nomor EC2.0000130D) * rekening Khusus Menteri Keuangan Ekana Pemukiman Saham PT Telkom di Pasar Domestik (Nomor 510.00023998C) * BUN Untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan (Nomor 502.0000298C) * Rekening Depdik U/Pemempungan Hibah Dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta	Disajikan pada Aset lainnya sebagai "Jasa yang Tidak dapat digunakannya"	Disajikan pada Aset lancar sebagai "Aset di Kawasan Pemerintah lainnya"

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

			<p>kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi.</p> <p>Kurs yang belum terealisasi pada tanggal pelaporan dihitung dari perbandingan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan dibandingkan dengan perbandingan kurs tengah BI hari sebelumnya.</p>
14.	Metode perhitungan selisih kurs utang dalam mata uang asing	Lihat Kebijakan Akuntansi Mata Uang Asing	<p>Selisih kurs yang belum terealisasi dihitung dari selisih nilai buku utang pada tanggal pelaporan dengan kurs tengah BI dibandingkan dengan nilai tukar penambsihan dan pengurangan nilai kurs tersebut.</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 atau mencapai 103,48 persen dari target APBN-P TA 2011 sebesar Rp1.169.914.639.272.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp873.873.892.399.381, PNPB sebesar Rp331.471.821.098.730, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.253.939.861.304. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp3.415.120.010.085 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang/jasa/surat berharga) sebesar Rp995.722.324.430.

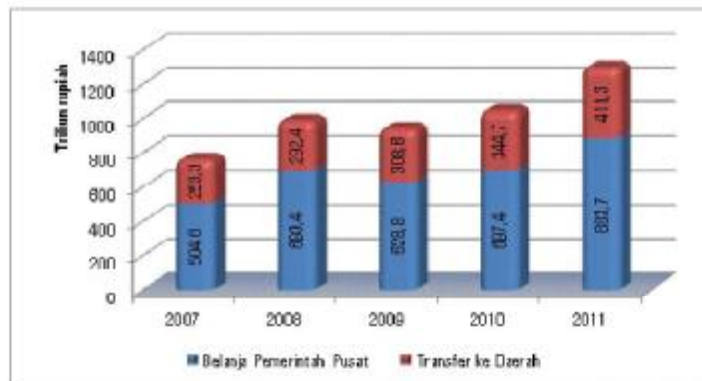
Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 mengalami kenaikan Rp215.328.141.968.072 atau 21,64 persen jika dibandingkan dengan TA 2010. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB sejak TA 2007 terlihat pada Grafik 37.



Grafik 37: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB TA 2007 - 2011

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2011 sebesar Rp1.320.751.314.516.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.042.117.219.744.817. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883.721.886.196.519, Transfer ke Daerah sebesar Rp411.324.764.631.790, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp47.504.353.285. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dan menurut Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2007 dapat dilihat pada Grafik 38.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)



Grafik 38: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2007 - 2011

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.294.999.146.475.024, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2011 sebesar Rp84.399.493.115.609

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2011 adalah sebesar Rp130.948.869.624.420, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp148.748.034.850.068 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.799.165.225.648.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

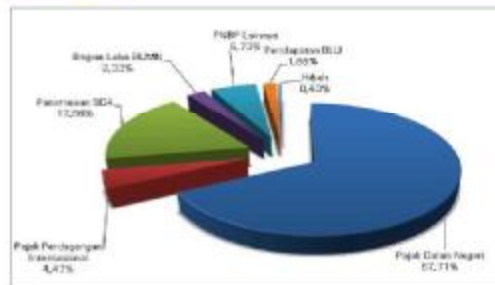
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.210,60 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415, berarti mencapai 103,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.169.914.639.272.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 39.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 39: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan
Rp873,87 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2011 adalah sebesar Rp873.873.892.399.381 atau mencapai 99,45 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp878.685.216.762.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2011 lebih besar Rp150.567.223.777.642 atau 20,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.338.636.314.000, dan Bea Masuk DTP sebesar Rp76.483.696.085.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam
Negeri Rp819,75 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp819.752.426.342.423 atau mencapai 99,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp831.745.348.636.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2011 lebih besar Rp125.360.291.411.132 atau 18,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PPh Migas	73.095.496.754.938	58.872.731.112.807
PPh Nonmigas	354.683.553.082.514	295.268.135.134.989
PPh Fiskal	4.028.576.864	11.458.427.304
PPh Ditanggung Pemerintah	3.338.636.314.000	2.893.212.477.088
PPN dan PPhBM	277.800.076.679.384	230.604.884.967.823
PBB	29.893.164.324.398	28.580.589.978.740
BPHTB	(730.151.679)	8.026.429.073.342
Cukai	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.968.791.246.631
Jumlah	819.752.426.342.423	694.392.134.931.291

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.338.636.314.000 dalam bentuk Subsidi.

Peningkatan Pendapatan Pajak Dalam Negeri disebabkan antara lain oleh kenaikan PPh Migas karena adanya pertumbuhan positif pada penerimaan yang berasal dari penerimaan PPh Minyak Bumi dan Gas Alam berupa kenaikan harga minyak dunia.

Pada TA 2011 tidak terdapat penerimaan BPHTB, karena sejak TA 2011 pemungutan BPHTB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Realisasi negatif atas BPHTB merupakan pengembalian atas BPHTB tahun anggaran sebelumnya.

Kenaikan Pendapatan Cukai pada TA 2011 disebabkan oleh peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Januari 2011 sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, kenaikan juga disebabkan peningkatan efektivitas pengawasan peredaran MMEA melalui pelekatan pita cukai.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp54,12 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 adalah sebesar Rp54.121.466.056.958, atau mencapai 115,30 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp46.939.868.126.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 lebih besar Rp25.206.932.366.510 atau naik 87,18 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	25.265.863.309.375	20.016.826.394.532
Bea Keluar	26.855.602.747.583	6.897.707.295.916
Jumlah	54.121.466.056.958	26.914.533.690.448

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2011, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp76.483.696.085.

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk pada TA 2011 tersebut disebabkan oleh meningkatnya importasi yang ditunjukkan dengan naiknya *Dutiable impor* sebesar USD30,46 miliar atau 27,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana nilai *Dutiable Import* tahun 2011 sebesar USD140,83 miliar sedangkan tahun 2010 sebesar USD110,37 miliar.

Kenaikan Pendapatan Bea Keluar pada TA 2011 disebabkan kenaikan tarif Bea Keluar CPO pada tahun 2011, kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO dan turunannya sebagai dampak meningkatnya harga CPO di pasar internasional, dan kenaikan volume ekspor CPO dan turunannya pada tahun 2011.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp331,47 triliun

Realisasi PNBP TA 2011 adalah sebesar Rp331.471.821.098.730 atau mencapai 115,67 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp286.567.317.002.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2011 lebih besar Rp62.529.964.889.888 atau 23,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp213,82 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2011 adalah sebesar Rp213.823.349.552.827, atau mencapai 111,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp191.976.022.718.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2011 lebih besar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rp44.997.907.232,541 atau 26,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	141.303.483.452.283	111.814.923.202.135
Pendapatan Gas Alam	52.187.085.923.633	40.918.314.502.416
Pendapatan Pertambangan Umum	16.369.789.735.678	12.646.750.881.580
Pendapatan Kehutanan	3.216.476.006.406	3.009.672.120.638
Pendapatan Perikanan	183.802.161.080	91.985.180.732
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	562.702.273.747	343.786.432.785
Jumlah	213.823.349.552.827	168.825.442.328.286

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan Pendapatan Minyak Bumi pada TA 2011 terutama disebabkan oleh naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia, yaitu tahun 2010 rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai USD78,07/barrel sementara pada tahun 2011 harganya naik hingga pada level USD109,94/barrel. Peningkatan Pendapatan Gas Alam pada TA 2011 antara lain disebabkan peningkatan pada penerimaan LNG sebagai akibat kenaikan rata-rata ICP tahun 2011 dari tahun 2010.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 adalah sebesar Rp28.183.973.126.600 atau mencapai 97,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp28.835.823.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 lebih kecil Rp1.912.959.567.665 atau turun 6,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	3.627.944.571.970	3.622.669.340.835
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	24.556.028.554.630	26.474.263.353.430
Jumlah	28.183.973.126.600	30.096.932.694.265

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 tersebut, sebesar 78,50 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	5.623.103.550.000
2	PT PLN	4.545.000.000.000
3	PT Telkom	3.056.196.863.756
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.141.920.001.444
5	PT Freeport Indonesia	1.761.137.250.000
6	PT Bank Mandiri	1.698.383.760.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia	980.580.000.000
8	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	838.674.325.125
9	PT Semen Gresik	751.098.836.530
10	PT Bank Negara Indonesia	738.263.011.873
	Total 10 BUMN	22.124.337.598.728

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp28,18 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

PNBP Lainnya Rp69,36 triliun

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2011 adalah sebesar Rp69.360.502.832.532 atau 137,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp50.339.436.023.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2011 lebih besar Rp9.931.863.673.512 atau naik 16,71 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	21.650.214.589.444	16.498.911.495.199
Pendapatan Jasa	26.634.516.584.922	25.416.545.489.101
Pendapatan Bunga	4.893.238.511.754	7.352.406.187.064
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	240.761.503.805	166.607.987.392
Pendapatan Pendidikan	2.965.915.235.801	2.983.449.553.799
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	92.848.578.390	213.767.299.726
Pendapatan Iuran dan Denda	1.319.106.624.583	704.797.429.654
Pendapatan Lain-lain	11.563.901.203.833	6.092.153.717.133
Jumlah	69.360.502.832.532	59.428.639.159.020

Pendapatan lain-lain dari penerimaan bukan pajak lainnya berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp7.986.815.365.380, pendapatan pelunasan piutang sebesar Rp26.715.895.818, pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp628.093.309.285, pendapatan dari selisih kurs sebesar Rp2.713.540.544.637 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp208.936.088.712.

Pendapatan BLU Rp20,10 triliun

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 adalah sebesar Rp20.103.995.586.771 atau 130,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp15.416.035.261.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2011 lebih besar Rp9.513.153.551.501 atau naik 89,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	17.215.810.979.582	9.509.402.889.281
Pendapatan dan Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	102.760.116.486	85.209.252.626
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	503.261.094.628	312.384.162.750
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.821.832.190.696	9.996.996.304.655
Pendapatan Hibah BLU	167.462.819.227	34.976.353.539
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	647.563.491.201	172.630.678.219
Pendapatan BLU Lainnya	1.467.137.085.647	476.238.698.847
Jumlah	20.103.995.586.771	10.598.842.035.270

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan Pendapatan BLU TA 2011 terutama disebabkan diakuinya pendapatan pada 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai Pendapatan BLU sebesar Rp5.484.567.614.814.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

*Penerimaan Hibah
Rp5,25 triliun*

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp5.253.939.861.304 atau 112,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.662.105.508.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2011 lebih besar Rp2.230.953.300.541 atau naik 73,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2011 termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp552.196.724.430. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

*Belanja Negara
Rp1.294,98 triliun*

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.320.751.314.516.000. Belanja Negara TA 2011 lebih besar Rp252.881.928.730.207 atau naik 24,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp883,70 triliun*

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 adalah sebesar Rp883.721.886.196.519 atau 97,30 persen dari APBN-P sebesar Rp908.243.422.887.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 lebih besar Rp186.315.506.009.342 atau 26,72 persen dari Realisasi TA 2010.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

*Belanja Pemerintah Pusat
menurut Organisasi/BA*

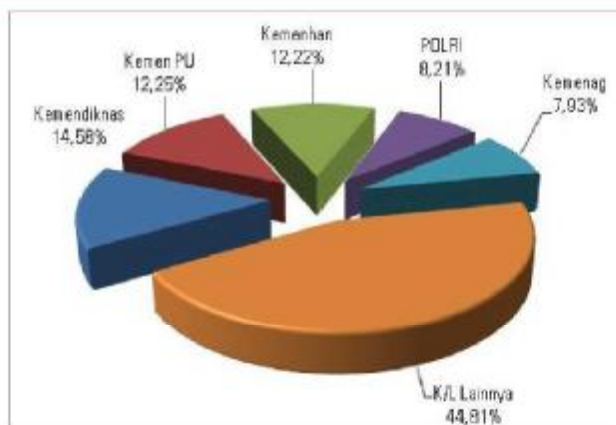
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp464.848.316.511.891 atau 52,60 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp418.873.569.684.629. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp61.060.518.204.464 atau 14,57 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 40.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 40: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

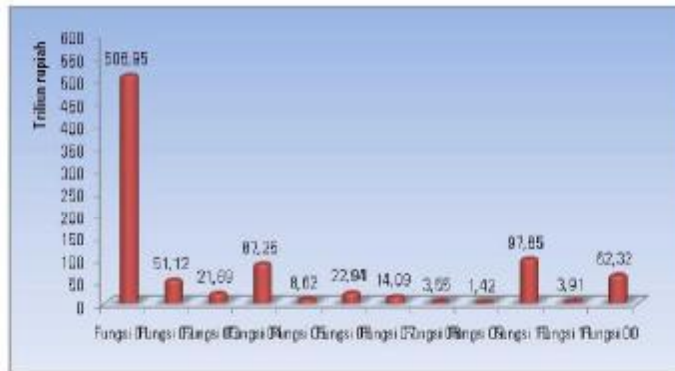
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2011 dan 2010 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.

Tabel 7
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2011 dan TA 2010
(Dalam Rupiah)

Kode	Urutan Fungsi	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
01	Pelayanan Umum	508.945.453.627.554	471.557.571.038.893
02	Pertahanan	91.120.989.252.897	17.060.482.218.813
03	Ketertiban dan Keamanan	21.691.237.866.477	13.636.412.297.266
04	Ekonomi	87.246.181.514.834	92.178.365.068.333
05	Lingkungan Hidup	8.616.096.671.607	6.549.610.980.550
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	22.837.807.929.477	20.053.181.892.237
07	Kesehatan	14.088.799.296.193	18.793.019.106.219
08	Pariwisata dan Budaya	3.553.453.017.267	1.406.681.931.374
09	Agama	1.424.732.819.450	878.756.933.633
10	Pendidikan	97.854.046.504.341	95.818.313.948.039
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	3.506.376.361.026	3.341.614.948.701
00	Tidak ada fungsi	82.337.781.975.878	911.369.617.150
	Total	883.721.886.196.819	697.486.388.187.177

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011 dapat terlihat pada Grafik 41.



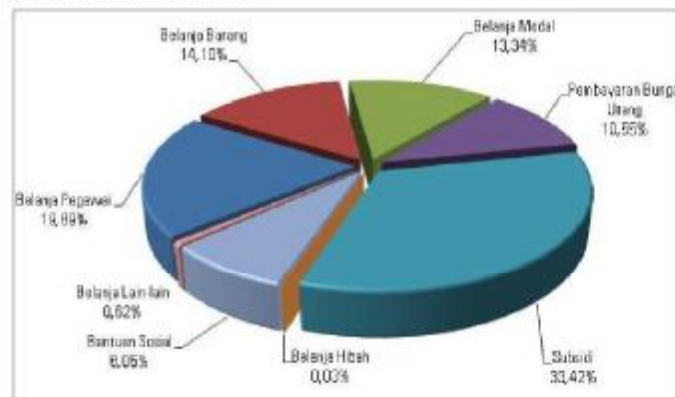
Grafik 41: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 42.



Grafik 42: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp1,75,74 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2011 adalah sebesar Rp175.737.918.419.015 yang berarti 95,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp184.088.939.020.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2011 lebih besar Rp27.659.834.320.406 atau 18,68 persen dari realisasi TA 2010. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.445.102.508.675	42.378.927.317.781
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	40.263.378.647.670	37.026.799.873.139
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	819.043.806.833	727.848.885.884
Belanja Gaji Dokter PTT	771.007.436.015	690.976.740.462
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	248.950.447.822	165.773.820.773
Belanja Honorarium	1.369.522.161.088	1.453.910.313.846
Belanja Lembur	501.542.768.155	468.392.462.505
Belanja Vaksinasi	217.880.587.087	248.540.481.180
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transit	20.337.994.683.749	12.163.454.097.369
Belanja Pensiun dan Uang Tunjangan	59.472.181.551.185	50.605.032.969.737
Belanja Asuransi Kesehatan	2.141.251.233.920	1.816.913.001.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	150.578.864.996	129.299.057.338
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	(374.730.220)	-
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	(39.347.938)	202.215.097.395
Jumlah	175.737.918.419.015	148.078.094.098.609

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp124,64 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2011 adalah sebesar Rp124.639.479.502.304 yang berarti 87,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp142.335.864.901.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2011 lebih besar Rp27.042.641.102.479 atau naik 27,71 persen dari Realisasi TA 2010. Dalam Belanja Barang TA 2011 termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp469.912.832.050. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Barang Operasional	21.729.366.193.581	20.052.908.959.051
Belanja Barang Non Operasional	42.942.839.212.826	31.489.642.277.566
Belanja Barang Penunjang Kegiatan DIK/TP	82.251.235.675	-
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan	2.054.644.291.841	-
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	2.167.190.771	-
Belanja Jasa	16.360.913.536.031	12.122.304.052.583
Belanja Pemeliharaan	9.284.590.642.833	7.809.477.752.715
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.919.945.204.322	16.772.900.020.797
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.719.352.848.549	1.542.375.569.738
Belanja Barang BLU	12.543.409.145.875	7.807.229.767.375
Jumlah	124.639.479.502.304	97.596.838.399.825

Belanja Barang BLU sebesar Rp12.543.409.145.875 terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.336.578.718.401	2.544.506.232.879
Belanja Barang	4.590.288.645.438	2.754.048.722.902
Belanja Jasa	1.498.345.274.987	1.086.257.340.653
Belanja Pemeliharaan	421.634.028.720	299.313.699.206
Belanja Perjalanan	346.829.623.278	175.856.804.442
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.349.732.855.051	947.247.967.293
Jumlah	12.543.408.145.875	7.807.229.767.375

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

R.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp117,85 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2011 adalah sebesar Rp117.854.532.071.332 yang berarti 81,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp144.571.840.017.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2011 lebih besar Rp37.567.466.385.667 atau 46,79 persen dari Realisasi TA 2010. Dalam Belanja Modal TA 2011 tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp82.283.892.380.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.488.566.777.978	1.783.053.775.727
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.946.011.361.882	28.282.275.884.330
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.705.816.487.069	16.553.253.478.159
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.586.433.921.962	30.165.754.367.386
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.342.382.032.693	2.326.404.969.088
Belanja Modal BLU	1.785.321.489.748	1.176.323.230.975
Jumlah	117.854.532.071.332	80.287.085.685.685

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Modal Tanah	80.615.528.743	79.579.479.251
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	802.897.438.638	565.857.865.080
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	707.888.155.393	479.744.809.743
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.102.737.074	14.313.393.755
Belanja Modal Fisik Lainnya	181.836.629.900	36.827.683.186
Jumlah	1.785.321.489.748	1.176.323.230.975

R.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp93,26 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 adalah sebesar Rp93.261.919.810.886 yang berarti 87,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp106.583.810.504.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 lebih besar Rp4.878.686.046.789 atau lebih besar 5,52 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	57.210.827.839.839	54.560.273.882.091
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	25.547.248.269.356	26.212.133.864.479
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	4.788.588.586.200	2.750.865.750.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	514.676.089.450	513.188.205.250
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	3.236.157.587.300	2.073.333.477.100
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	373.805.800.000	177.338.000.000
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	310.812.680.000	737.473.500.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	51.486.819.000	38.988.773.200
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	1.247.388.671.387	1.321.487.211.977
Belanja Pembayaran Biaya Penerimaan Hibah	1.235.358.354	-
Jumlah	93.261.910.910.886	88.383.233.764.097

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp.295,36 triliun

Realisasi Subsidi TA 2011 adalah sebesar Rp295.358.229.636.324 yang berarti 123,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp238.466.978.142.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2011 ini lebih besar Rp102.651.180.109.125 atau 53,27 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Subsidi Premium	78.782.409.098.742	38.137.806.140.188
Subsidi Minyak Solar	53.345.080.871.434	21.851.903.691.510
Subsidi Minyak Tanah	9.441.089.427.448	7.509.557.317.106
Subsidi Epaji	22.582.749.583.351	14.852.055.877.088
Subsidi Pangan	18.539.282.821.000	15.153.810.327.000
Subsidi Listrik	90.447.485.481.331	57.801.820.070.381
Subsidi Benih	86.913.542.095	2.177.487.699.740
Subsidi Pupuk	18.344.587.997.989	18.410.887.781.046
Belanja Subsidi PPh	3.338.838.314.000	2.893.212.477.088
Belanja Subsidi PPM	-	11.066.846.770.468
Belanja Subsidi Pajak Lainnya	-	587.981.830.451
Belanja Subsidi BM	73.117.396.000	257.832.977.488
Belanja Subsidi PT KAI	630.870.912.779	535.000.000.000
Belanja Subsidi PT PELNI	972.752.505.000	600.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	256.844.800.000	175.000.000.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSD Lainnya	73.359.751.500	63.894.220.380
Subsidi Bunga KPR	611.843.137.443	415.988.562.869
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	179.388.458.289	132.058.678.059
Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLSI	10.070.776.218	-
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	74.504.074.566	42.323.334.937
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	624.185.242.803	223.183.797.257
Belanja Subsidi Risk Sharing IKIP dan Energi	-	2.303.401.488
Subsidi Bunga Perusahaan NAD dan Nias	2.760.047.151	3.442.236.780
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	20.080.545.778	3.660.340.105
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	128.971.207	1.186.849
Jumlah	295.358.229.636.324	182.707.048.527.198

Terlampauinya realisasi Belanja Subsidi dari anggaran dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam realisasi subsidi TA 2011 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2011, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSD sebesar Rp8.895.590.963.425. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi subsidi TA 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	33.101.320.803
Subsidi Minyak Tanah	249.585.387.648
Subsidi Minyak Solar	112.845.701.482
Subsidi LPG	348.690.214.595
Subsidi Listrik	284.141.728.597
Subsidi Pupuk	3.344.529.740.510
Subsidi Benih	80.842.298.990
Subsidi PT Pos Indonesia	64.260.500.000
Subsidi PT PELN	136.752.805.000
Subsidi PT KAI	159.902.285.000
Subsidi Pangan	4.100.839.284.800
Jumlah	8.895.598.963.425

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp300,11 miliar

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp300.108.798.353 yang berarti 70,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp426.192.193.000. Realisasi belanja Hibah tersebut terdiri dari:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Local Basic Education Capacity (L-BEC)	45.937.448.826
Air Minum	161.677.000.000
Air Limbah Terpusat	16.030.000.000
Water and Sanitation Program, Sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (Wasap-D)	6.287.150.700
Investment Enhancement Grant (IEG)	43.388.800.400
Mass Rapid Transit (MRT)	6.777.398.429
Pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza	19.999.999.998
Jumlah	300.108.798.353

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp71,10 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 adalah sebesar Rp71.104.328.162.347 yang berarti 91,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp77.467.135.177.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 lebih besar Rp2.493.216.176.060 atau lebih besar 3,63 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	6.246.014.999.528	4.608.123.632.500
Belanja Bantuan Langsung (<i>Block Grant</i>) Sekolah/Lembaga/Guru	32.091.722.341.802	37.805.677.677.587
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.729.510.000	985.937.110.000
Belanja Bantuan Beasiswa	4.685.060.980.695	4.779.029.074.747
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribedetaan	146.890.983.500	79.921.402.400
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	27.931.109.346.822	20.572.423.089.073
Jumlah	71.104.328.162.347	68.611.111.986.297

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Belanja Lain-lain Rp5,44 triliun

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2011 adalah sebesar Rp5.465.369.795.958 yang berarti 38,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp14.302.662.733.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2011 lebih kecil Rp16.207.618.151.962 atau lebih kecil 74,78 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja untuk Rekonstruksi Aceh	-	1.076.511.756
Belanja Kerjasama Teknis Internasional	13.893.595.128	-
Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TMI/Polri	9.778.482.000	-
Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	-	946.476.175.056
Belanja Non Modal-Otonita Batam	557.785.893	845.925.755
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	360.991.025.539	909.200.000.000
Jasa Surveyor	-	232.979.742.237
Jasa Perbendaharaan	199.847.380.770	102.072.122.675
Belanja TVRI	685.547.340.402	571.871.726.475
Belanja RRI	677.104.143.519	558.912.123.288
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	406.145.000.000	358.183.000.000
Belanja Lain-lain	3.111.505.042.707	17.991.370.620.678
Jumlah	5.465.369.795.958	21.672.987.947.920

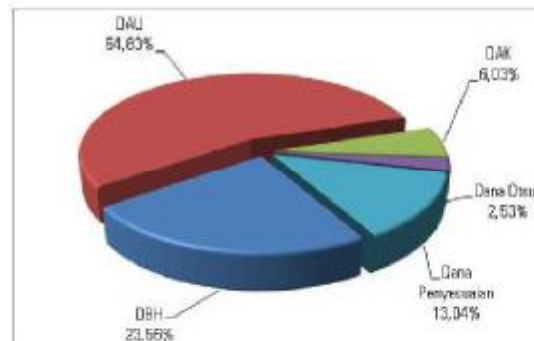
Penurunan realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2011 disebabkan adanya penataan akun-akun pada Belanja Lain-lain sesuai dengan *nature of transaction*-nya, bahwa kegiatan yang tidak memenuhi karakteristik dibiayai dari Belanja Lain-lain harus dianggarkan pada belanja KIL yang bersangkutan.

Transfer ke Daerah Rp411,32 triliun

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 adalah sebesar Rp411.324.764.631.790, yang berarti 99,71 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp412.507.891.828.200. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 ini lebih besar Rp66.597.152.801.411 atau 19,32 persen dari Realisasi TA 2010. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah TA 2011 disajikan pada Grafik 43.



Grafik 43: Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Dana Perimbangan
Rp347,25 triliun

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2011 adalah sebesar Rp347.246.213.954.316 yang berarti 99,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp347.538.605.495.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2011 ini lebih besar Rp30.534.920.925.248 atau 9,64 persen dari realisasi TA 2010. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

DBH Rp96,91 triliun

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2011 adalah sebesar Rp96.908.991.981.316 atau 100,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp96.772.092.547.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2011 ini lebih besar Rp4.725.500.747.448 atau naik 5,13 persen dari realisasi TA 2010. Tertampauinya realisasi DBH dari anggarannya tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan yang melampaui anggarannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp41.525.556.919.178, Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.408.448.704.184 dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp53.974.986.297.954.

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	13.237.326.489.261	10.931.465.581.702
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.281.482.553.025	27.146.941.959.903
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.747.676.892	7.737.248.088.834
Jumlah DBH Pajak	41.525.556.919.178	45.815.655.630.439
DBH Cukai	1.408.448.704.184	1.202.111.025.283
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	20.634.080.735.284	20.567.117.652.257
DBH SDA Gas Bumi	16.672.249.758.993	14.629.244.504.747
DBH SDA Pertambangan Umum	14.488.128.522.475	7.790.420.800.000
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	519.987.115.194	305.837.001.838
DBH SDA Kehutanan	1.512.465.063.891	1.753.104.639.304
DBH SDA Perikanan	138.077.102.117	120.000.000.000
Jumlah DBH SDA	53.974.986.297.954	45.165.724.598.146
Total DBH	96.908.991.981.316	92.183.491.233.868

Dalam realisasi DBH SDA sebesar Rp53.974.986.297.954, terdapat Rp9.899.647.659.901 yang sampai dengan akhir TA 2011 dananya masih tersimpan pada rekening dana cadangan (*escrow account*), karena masih menunggu identifikasi daerah penerima. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

DAU Rp225,53 triliun

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2011 adalah sebesar Rp225.533.712.048.000, atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp225.533.712.048.000. Hal

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

ini berarti realisasi DAU TA 2011 ini lebih besar Rp21.962.221.420.800 atau naik 10,79 persen dari realisasi TA 2010.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

DAK Rp24,80 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 adalah sebesar Rp24.803.509.925.000, atau 98,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp25.232.800.900.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2011 ini lebih besar Rp3.847.198.757.000 atau 18,36 persen dari realisasi TA 2010.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2011, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, serta sarana dan prasarana perdesaan.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp64,08 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2011 adalah sebesar Rp64.078.550.677.474 atau 98,63 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp64.969.286.333.200. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2011 ini lebih besar Rp36.062.231.876.163 atau lebih besar 128,72 persen dari realisasi TA 2010. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp10,42 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 adalah sebesar Rp10.421.312.993.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp10.421.312.993.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2011 ini lebih besar Rp1.321.699.313.000 atau lebih besar 14,52 persen dari realisasi TA 2010.

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Transfer Dana Otsus Untuk NAD	4.510.888.486.500	3.848.806.840.000
Transfer Otsus Untuk Papua	3.957.469.547.550	3.484.864.788.000
Transfer Dana Otsus untuk Papua Barat	1.953.198.948.950	1.754.942.052.000
Jumlah	10.421.312.993.000	8.088.613.680.000

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Rp53,66 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2011 adalah sebesar Rp53.657.237.664.474, yang berarti 98,37 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp54.547.973.340.200. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2011 ini lebih besar Rp34.740.532.563.163 atau lebih besar 183,65 persen dari realisasi TA 2010. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2011 terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Jumlah (Rp)
Dana Penyesuaian Lainnya	78.907.877.152
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	3.678.526.736.060
Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru	18.510.236.637.648
Dana Bantuan Operasional Sekolah	16.329.888.218.250
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	7.535.043.988.000
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.136.834.227.363
Jumlah	53.657.237.684.474

B.2.2.3. Suspen

Suspen minus Rp50,03 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2011 adalah sebesar minus Rp47.504.353.285, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN - K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	175.745.947.140.204	175.737.918.419.015	8.028.721.189
Belanja Barang	124.159.183.392.116	124.169.586.870.254	(10.403.279.138)
Belanja Modal	117.759.087.730.733	117.772.248.178.952	(13.160.448.219)
Pembayaran Bunga Utang	93.280.261.464.346	93.261.919.810.886	(1.658.346.540)
Subsidi	295.358.422.916.324	295.358.228.636.324	193.280.000
Belanja Hibah	300.108.798.355	300.108.798.353	2
Belanja Bantuan Sosial	71.076.280.233.188	71.104.328.182.347	(28.037.929.179)
Belanja Lain-lain	5.464.234.053.592	5.465.389.785.958	(1.135.742.366)
Total	883.123.515.728.636	883.169.689.472.089	(46.173.743.251)
Transfer ke Daerah			
Dana Bagi Hasil	96.908.986.158.302	96.908.991.881.316	4.176.986
Dana Alokasi Umum	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	0
Dana Alokasi Khusus	24.802.228.752.880	24.803.508.925.000	(1.280.172.020)
Dana Otentisi Khusus	10.421.312.993.000	10.421.312.993.000	0
Dana Penyesuaian	53.857.183.089.474	53.857.237.884.474	(54.615.000)
Total	411.323.434.021.756	411.324.764.631.780	(1.330.610.034)
Suspen			(47.504.353.285)

*) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp84,40 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2011 adalah sebesar Rp84.399.493.115.610, yang berarti 55,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp150.836.675.244.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.589.653.359.415	995.271.511.391.343
Belanja Negara	(1.294.989.146.475.020)	(1.042.117.219.744.817)
Defisit Anggaran	(84.399.493.115.605)	(46.845.708.353.474)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pembiayaan (Neto)
Rp130,95 triliun

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2011 adalah sebesar Rp130.948.869.624.420 yang berarti 86,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp150.836.675.244.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Pembiayaan Dalam
Negeri Rp148,75 triliun

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp148.748.034.850.068, yang berarti 96,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp153.613.307.023.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

Rekening Pemerintah
Rp40,32 triliun

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembaliannya dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp40.319.043.049.000, yang berarti 99,37 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp40.574.043.832.000. Rincian pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan dari Rekening SAL	40.319.043.049.000	17.347.946.618.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	-	4.641.365.789.076
Jumlah	40.319.043.049.000	22.189.312.607.076

Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman
Rp8,61 triliun

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2011 adalah sebesar Rp8.608.845.495.456, yang berarti 105,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.176.680.057.000. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	47.857.804.646
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	363.489.013.588
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	6.873.012.881.436
Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	18.872.303.276
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	75.477.991.357
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	479.070.833.171
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	780.965.268.000
Total	8.608.845.495.456

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada LKPP Tahun 2010 sebesar Rp57.631.763.320 disajikan sebagai pengurang dari Penerusan Pinjaman (Pembiayaan Luar Negeri).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pembiayaan Privatisasi
dan Penjualan Aset
Program Restrukturisasi
Rp1,6 triliun

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2011 sebesar Rp1.597.981.517.178 atau 114,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.390.690.442.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Hasil Privatisasi	425.044.145.867
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	330.323.053
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	801.228.042.527
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	371.379.005.731
Jumlah	1.597.981.517.178

Surat Berharga Negara
(Neto) Rp119,86 triliun

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2011 adalah sebesar Rp119.864.365.459.065 atau 94,64 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp126.653.893.000.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	40.000.000.000.000	29.795.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	110.514.000.000.000	84.020.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.817.637.491.000	1.701.033.244.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	22.951.410.000.000	26.986.960.000.000
Imbalan Dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	56.029.850.000	109.996.698.000
Penerbitan/Penjualan SUN Perbendaharaan - DN	1.320.000.000.000	-
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	21.441.988.580.150	25.041.328.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas	9.035.050.295.000	-
Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN	-	-
Total Penerimaan	207.136.113.106.150	167.634.217.942.000
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(38.045.000.000.000)	(24.700.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(42.980.975.945.085)	(40.154.415.022.752)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(4.163.986.000.000)	(7.120.565.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(2.029.197.406.000)	(1.750.849.667.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	(2.350.000.000.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	-	(336.000.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(52.598.386.000)	(119.790.002.000)
Total Pengeluaran	(87.271.747.737.985)	(76.531.619.691.752)
Jumlah SBN (Neto)	119.864.365.459.065	91.102.598.250.248

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pinjaman Dalam Negeri
(Neto) Rp619,38 miliar

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp619.382.641.633, yang berarti 42,65 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar minus Rp1.452.125.992.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN. Pada TA 2011 belum ada pembayaran cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut.

PMN Investasi
Pemerintah Rp19,64 triliun

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp19.643.883.312.264, yang berarti 93,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp21.112.426.300.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2011 adalah:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	9.295.783.312.264	6.039.800.000.000
Investasi Pemerintah	1.000.000.000.000	927.500.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	1.126.500.000.000	-
Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	550.000.000.000	-
Investasi Pemerintah yang dipinjaman kepada BUMN	-	7.500.000.000.000
Dana Bergulir	7.671.600.000.000	5.333.049.000.000
Jumlah	19.643.883.312.264	19.799.149.000.000

PMN untuk BUMN sebesar Rp9.295.783.312.264, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	1.500.000.000.000
Penyertaan pada PT Pupuk Iskandar Muda	1.338.047.600.900
Penyertaan pada PT Sarana Multigraya Finansial	1.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Geo Dipa Energy (Pendapatan Hibah Surat Berharga)	443.526.600.000
Penyertaan pada PT Inhutani I	5.000.000.000
Penyertaan pada PT Dirgantara Indonesia	1.188.496.918.621
Penyertaan pada PT PAL (Persero)	648.330.000.000
Penyertaan pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	561.000.000.000
Penyertaan pada PT Askrindo	800.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jamkrindo	1.200.000.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit SBSN III	100.000.000
Penyertaan pada Lembaga Internasional	611.283.192.842
Jumlah	9.295.783.312.263

Investasi Pemerintah sebesar Rp1.000.000.000.000 dialokasikan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah dan ditujukan untuk mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan lainnya.

Dana Bergulir sebesar Rp7.671.600.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	3.571.600.000.000
BLU LPDB Kementerian Koperasi dan UKM	250.000.000.000
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Kementerian PU	3.850.000.000.000
Jumlah	7.671.600.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan
Kewajiban Penjaminan Rp0
 Pada TA 2011 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp904.000.000.000.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp2,62 triliun
 Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2011 adalah sebesar Rp2.617.700.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.617.700.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)
Pembiayaan LN (Neto) minus Rp1,80 triliun
 Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2011 adalah sebesar minus Rp17.799.165.225.648, yang berarti 641,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp2.776.631.779.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri
Penarikan Pinjaman LN Rp33,75 triliun
 Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp33.747.178.723.921 yang berarti 60,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp56.182.884.835.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program
Penarikan Pinjaman Program Rp15,27 triliun
 Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2011 adalah sebesar Rp15.266.144.513.219, yang berarti 79,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp19.201.800.000.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	873.396.326.700	4.566.102.579.700
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	-	2.708.800.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	10.758.748.187.519	15.338.031.909.416
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	3.634.000.000.000	6.340.810.000.000
Jumlah	15.266.144.513.219	29.974.644.489.116

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp12.802.085.740. Selisih ini disebabkan dan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUM	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari DECF	873.396.325.700	873.396.740.250	(414.950)
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	10.756.748.187.519	10.729.345.687.229	29.402.500.290
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	3.534.090.000.000	3.650.600.000.000	(116.500.000.000)
Jumlah	15.266.144.513.219	15.253.342.427.429	12.802.085.740

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2011 adalah sebesar Rp18.481.034.210.702, yang berarti 49,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp36.981.084.835.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	9.046.106.089.582	13.648.925.389.888
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.246.144.127.735	7.895.835.711.316
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.188.783.993.385	3.872.357.132.656
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	-	203.227.477.230
Jumlah	18.481.034.210.702	25.820.145.711.091

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp41.086.303.118 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUM	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	9.046.106.089.582	9.699.904.555.330	(653.798.465.748)
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.246.144.127.735	4.540.756.344.068	705.387.782.667
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.188.783.993.385	2.486.245.426.970	1.702.538.566.415
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	0	1.713.041.580.418	(1.713.041.580.418)
Jumlah	18.481.034.210.702	18.439.947.907.584	41.086.303.118

Perbedaan penarikan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
NoD 2010 SP3 2011	59.202.012.292
NoD 2011 yang tidak dapat diidentifikasi sehingga tdk diterbitkan Sp3	(13.543.343.534)
SP3 atas WA 2010 belum diterbitkan karena tidak ada DIPA 2011	(4.514.331.266)
Selisih Kurs	(58.034.353)
Total	41.086.303.118

Penarikan Pinjaman
Proyek Rp18,48 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Penerusan Pinjaman
Rp4,22 triliun

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2011 adalah sebesar Rp4.223.841.471.298, yang berarti 36,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp11.724.776.614.000. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(116.927.902.886)	(88.078.795.670)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	-	(8.155.932.230)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(4.106.913.568.432)	(8.238.430.908.741)
Penerusan Pinjaman LN TAYL kepada BUMN	-	(471.729.714.367)
Total	(4.223.841.471.298)	(8.786.395.351.808)

Penerusan Pinjaman TA 2010 di atas tidak termasuk Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada tahun 2010 sebesar Rp57.631.763.320. Penerusan Pinjaman Tahun 2010 yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 adalah sebesar Rp8.728.763.587.688, yang berasal dari Penerusan Pinjaman Rp8.786.395.351.008 dikurangi dengan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp57.631.763.320.

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp47,32 triliun

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2011. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar minus Rp47.322.502.478.271 yang berarti 100,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp47.234.740.000.000

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	391.155.555.858	10.503.057.712
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	9.036.453.328.006	8.950.355.884.638
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	2.275.910.434.365	6.557.480.862.982
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	35.618.983.160.042	35.114.181.976.504
Jumlah	47.322.502.478.271	60.632.631.581.836

SILPA Rp46,57 triliun

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp84.399.493.115.609 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp130.948.869.624.420 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp46.549.376.508.811, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.599.653.359.415	995.271.511.391.343
Belanja Negara	1.294.999.146.475.024	1.042.117.219.744.817
Surplus (Defisit)	(84.399.493.115.609)	(46.845.708.353.474)
Pembiayaan Neto	130.948.869.624.420	91.652.011.400.615
SILPA (SiKPA)	46.549.376.508.811	44.786.303.047.141

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual**

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 47 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2011.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2011 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Ururan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.033.811.543.094	255.207.054.588	8.118.084.292.749
018	Kementerian Pertanian	1.490.874.049.287	8.075.012.950.725	-
019	Kementerian Perindustrian	96.264.273.677	-	-
020	Kementerian ESDM	32.367.349.596	-	-
023	Kementerian Pendidikan Nasional	14.191.386.782.646	41.008.439.950	-
024	Kementerian Kesehatan	582.432.992.437	3.447.961.989.043	-
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transigrasi	207.251.401.688	1.194.553.375.834	-
027	Kementerian Sosial	490.491.171.537	113.964.694.797	-
029	Kementerian Kehutanan	143.578.827.164	1.099.826.462	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	271.323.466.646	693.653.406.668	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	145.906.625.084	1.966.117.430.446	4.740.000.000
040	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	61.504.993.399	166.471.344.156	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	14.823.442.466	-	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	120.516.461.791	-	-
057	Perpustakaan Nasional	122.248.417.243	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.283.983.552	-	-
067	Kementerian PDT	917.934.375	294.176.069.460	-
069	BKRN	11.414.521.815	-	-
090	Kementerian Perdagangan	52.594.426.359	640.465.446.924	-
091	Kementerian Perumahan Rakyat	42.904.672.458	-	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	171.437.223.266	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	7.839.029.561	128.134.934.600	-
	Total	19.291.063.571.121	14.617.626.983.863	8.122.804.292.749

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)**

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamankan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2011, terdapat 124 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU. Seratus dua puluh empat Satker BLU tersebut berasal dari 19 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	2
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	4
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan Nasional	22
8	Kementerian Kesehatan	51
9	Kementerian Agama	12
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3

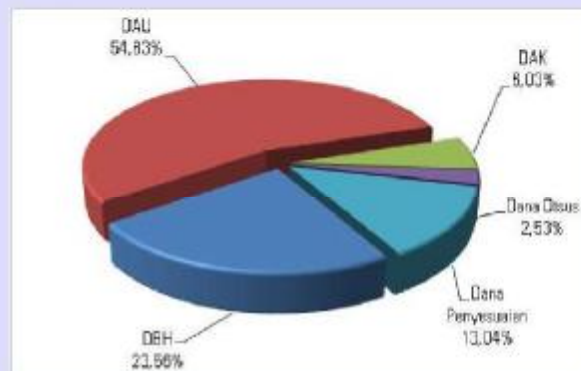
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Pekerjaan Umum	1
13	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
14	Kementerian Koperasi dan UKM	2
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
16	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
17	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
18	Kementerian Perumahan Rakyat	1
19	POLRI	9
Jumlah BLU		124

Ditinjau dari bidang layanan, dari 124 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

- 117 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 2 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
- 5 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

Berdasarkan laporan keuangan 124 BLU, total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp25.603.187.141.683. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 44.



Grafik 44: Komposisi Pendapatan BLU TA 2011

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2011 dapat dilihat pada Grafik 45. (dalam miliar rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

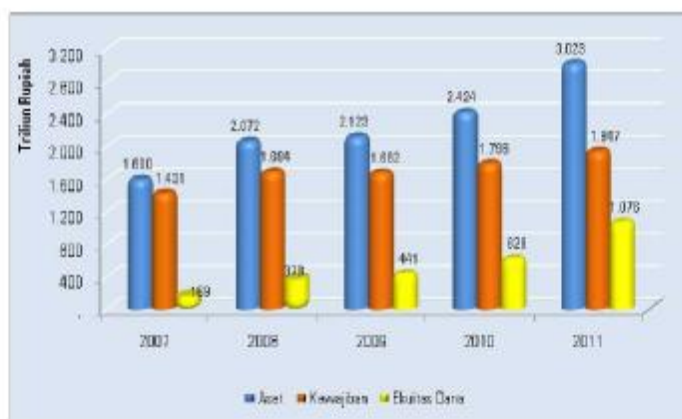
Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Aset Lancar	266.807.824.111.647	254.779.627.714.260
Investasi Jangka Panjang	790.030.794.479.804	706.410.075.389.077
Aset Tetap	1.587.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585
Aset Lainnya	438.634.382.921.494	278.197.482.029.092
Jumlah Aset	3.023.447.176.100.695	2.423.688.352.538.014
Kewajiban Jangka Pendek	246.444.680.163.115	201.343.960.842.088
Kewajiban Jangka Panjang	1.700.928.418.989.886	1.594.734.246.970.359
Jumlah Kewajiban	1.947.373.299.153.001	1.796.078.207.812.447
Ekuitas Dana Lancar	40.813.342.935.093	83.462.571.113.177
Ekuitas Dana Investasi	1.035.260.534.012.601	544.147.573.612.390
Jumlah Ekuitas Dana Neto	1.076.073.876.947.694	627.610.144.725.567
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.023.447.176.100.695	2.423.688.352.538.014

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 46.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 46: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2007 - 2011

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 naik 71,76% persen dari posisi 31 Desember 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**C.2. PENJELASAN PER POS NERACA****C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia**

*Rekening Kas BUN di BI
Rp82,45 triliun*

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp82.453.918.298.407 dan Rp82.430.710.192.763 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Rekening	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
Rekening BUN No. 502.000.000.980	2.381.060.658.852	2.120.438.712.433
Rekening KUN dalam Valuta USD No. 600.502.411.980	8.471.861.156	15.198.974.591
Rekening KUN dalam Valuta YEN No. 600.502.111.980	1.068.162.472.870	.
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah No. 519.000.122.980	4.790.148.872.958	9.320.901.792.905
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD No. 609.001.411.980	23.301.620.998.198	15.965.142.184.422
Rekening Penempatan dalam Valuta YEN No. 609.000.111.980	.	2.300.652.032.330
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah No. 519.000.124.980	8.492.000.706	808.723.757
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD No. 609.022.411.980	.	425.642.836.125
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURD No. 609.000.991.980	.	35.322.305
Rekening SAL No. 500.000.002.980	48.505.945.197.525	49.437.756.699.825
Rekening Khusus	2.390.016.547.054	2.824.334.833.970
Rekening RDI/RPD	.	.
Jumlah	82.453.918.298.407	82.430.710.192.763

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada Daftar 4.

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

*Rekening Kas di KPPN
Rp11,87 triliun*

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp11.870.556.947.661 dan Rp9.218.612.887.732 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 5.

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp6,62 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.615.552.720.213 dan Rp8.539.601.162.593 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Bank	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Bank Indonesia	6.558.844.586.613	7.744.826.703.919
2. Bank Umum	56.708.133.800	794.774.459.674
Jumlah	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rp):

Rekening	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Rekening RDI/RPD	-	106
Rekening Panas Bumi (No. 508.000084980)	197.960.188.008	208.604.971.388
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (No. 600.000411980)	6.237.138.752.226	7.308.488.402.783
Rekening Pemerintah Lain	123.745.646.379	227.733.329.642
Jumlah	6.558.844.586.613	7.744.826.703.919

Pada LKPP Tahun 2010, Rekening RDI/RPD merupakan bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya di BI. Pada LKPP Tahun 2011, Rekening RDI/RPD direklasifikasikan menjadi bagian dari Rekening Kas BUN di Bank Indonesia.

Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada Daftar 6.

Khusus Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp6.237.138.752.226 merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000411.908, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi imutasi arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada Catatan Penting Lainnya.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp56.708.133.800 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa:

- Rekening Intuk Dana Lingkungan (RIDL) sebesar Rp7.113.244.925,59.
- Rekening KUMK sebesar Rp40.775.802.226,33.
- 15 rekening lainnya merupakan rekening pemerintah lainnya sebagai penampung transaksi dari program/kegiatan yang masih berlangsung sebesar Rp6.819.066.447,79.

Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada Daftar 7.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp292,80 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp292.795.937.959 dan Rp518.919.028.152 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada Daftar 8.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp252,90 miliar*

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp252.900.321.124 dan Rp632.344.354.246 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada Daftar 8.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp6,76 triliun*

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.756.875.778.441 dan Rp8.652.179.999.211 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dana lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	2.387.515.283.884	884.910.710.051
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	3.943.049.544.201	7.524.295.136.582
Dana Lancar Lainnya (termasuk hibah langsung K/L)	443.880.153.197	440.323.355.419
Dana Lancar BLU	2.860.797.179	2.860.797.179
Jumlah	6.756.875.778.441	8.652.179.999.211

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. K/L	1.830.725.363.653	1.328.563.654.746
2. BUN	4.926.150.414.788	7.323.616.344.465
Jumlah	6.756.875.778.441	8.652.179.999.211

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada Daftar 8.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp4.926.150.414.788 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bagian Anggaran (BA) 999.03 sebesar Rp1.912.974.670 merupakan kas atas pengembalian program dana bergulir yang saat ini masih tertampung dalam rekening LPT Indak;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.05 sebesar Rp393.906.986.740 merupakan kas yang terdapat pada Rekening Dana Cadangan DBH sebagai sisa atas dana cadangan yang tidak disalurkan ke RKUD, dan telah disetor ke Kas Negara pada akhir Februari 2012;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp1.371.744.022.079 merupakan kas yang terdapat pada Rekening Dana Cadangan PSO/Subsidi sebagai sisa atas dana cadangan yang tidak disalurkan ke pihak ketiga, dan telah disetor ke Kas Negara pada akhir Februari 2012;
4. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp3.158.586.431.299. Kas tersebut sebagian besar merupakan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan disalurkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Instansi yang menangani bencana dalam TA 2011 dan pengembalian belanja tunjangan kinerja dari beberapa K/L serta pendapatan bunga dan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.

C.2.7. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp13,02 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp13.019.388.257.063 dan Rp7.340.595.820.681 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	529.314.721.403	479.821.601.606
2. BLU di Kementerian Keuangan	2.168.961.124.697	1.085.722.227.076
3. BLU di Kementerian Pertanian	3.486.155.684	2.556.669.136
4. BLU di Kementerian Perindustrian	20.011.012.451	15.834.915.124
5. BLU di Kementerian ESDM	18.488.791.552	15.443.187.078
6. BLU di Kementerian Perhubungan	132.850.346.828	93.038.372.556
7. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	4.497.383.942.144	1.161.521.456.378
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.056.474.212.524	872.325.581.499
9. BLU di Kementerian Agama	160.067.061.688	132.236.879.094
10. BLU di Tenaga Kerja dan Transmigrasi	714.874.920	594.424.868
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	311.877.696.631	133.025.374.471
12. BLU di Kementerian Ristek	1.567.736.326	734.444.872
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	222.839.454.802	132.325.739.980
14. BLU di Kementerian Kominfo	3.710.216.950.149	3.083.819.144.970
15. BLU di Kepolisian RI	31.085.827.403	13.845.569.596
16. BLU di BPPT	7.013.147.667	7.949.762.111
17. BLU di LAPAN	1.956.045.700	1.518.809.589
18. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	145.089.354.794	8.281.750.667
Jumlah	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp13.089.016.578.965 (lihat *Catatan D.1*). Dari Kas pada BLU tersebut sebesar Rp170.553.016.059 telah didepositokan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek BLU - lihat *Catatan C.2.19*). Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp100.924.694.157, yaitu berasal dari (Rp13.019.388.257.063 + Rp170.553.016.059 - Rp13.089.016.578.965).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Uang Muka dari
Rekening BUN Rp1,41
triliun

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.408.995.648.910 dan Rp1.876.259.417.429 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut (dalam Rp):

<i>Lender</i>	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. IBRD	434.796.198.957	887.745.480.535
2. ADB	557.243.342.772	361.921.824.683
3. OECF/JBIC	14.116.106.369	36.290.835.084
4. Lainnya	402.840.000.812	590.301.277.127
Jumlah	1.408.995.648.910	1.876.259.417.429

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1.408.995.648.910 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2010 sebesar Rp1.876.259.417.429 ditambah dengan koreksi saldo awal tahun 2011 sebesar Rp445.511.277.373 dikurangi dengan penggunaan Uang Muka dari Rekening BUN selama tahun 2011 sebesar Rp912.775.045.892.

C.2.9. Piutang Pajak

Piutang Pajak
Rp108,06 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp108.063.462.383.641 dan Rp70.945.271.446.620. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah Rp60.246.153.293.302 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp108.063.462.383.641 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.817.309.090.339. Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

<i>Uraian</i>	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	86.901.366.456.341	54.008.060.540.425
Penyisihan	(46.205.692.087.023)	-
Nilai Bersih	40.595.674.369.318	
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	21.262.095.927.300	16.937.210.906.195
Penyisihan	(1.611.617.003.316)	-
Nilai Bersih	19.650.478.923.984	
Piutang Pajak (Bruto)	108.063.462.383.641	70.945.271.446.620
Penyisihan	(47.817.309.090.339)	-
Piutang Pajak (Bersih)	60.246.153.293.302	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp86.801.366.456.341 dan Rp54.008.060.540.425 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2011. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(Dalam Rp)

Piutang Pajak pada
Ditjen Pajak

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.085.087.767.115	1.286.406.447.889
2.	Piutang PPh Pasal 22	466.665.742.712	483.960.766.218
3.	Piutang PPh Pasal 23	1.971.735.365.857	2.203.941.784.322
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.011.913.424.152	1.011.934.207.338
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	14.272.978.070.717	14.375.139.273.281
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.631.091.117.252	1.707.425.467.877
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	517.874.742.847	756.662.431.444
8.	Piutang PPh Dalam Negeri	42.235.408.556.549	13.758.554.551.125
9.	Piutang PPhEM Dalam Negeri	208.754.851.900	279.738.078.188
10.	Piutang PBB Pedesaan	2.401.365.978.918	1.617.432.558.023
11.	Piutang PBB Perkotaan	11.291.484.268.102	9.391.433.663.020
12.	Piutang PBB Perkebunan	384.209.918.227	388.198.560.617
13.	Piutang PBB Kehutanan	630.580.993.822	617.951.905.189
14.	Piutang PBB Pertambangan	5.602.915.905.581	4.029.788.497.473
15.	Piutang BPHTB	-	101.220.473.285
16.	Piutang PTL	691.914.937	2.240.673.780
17.	Piutang Bunga Pengalihan PPh	1.878.827.837.656	2.016.033.203.388
	Jumlah	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Umur Piutang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kurang dari 1 Tahun	19.470.734.026.870	17.268.606.805.698
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	37.888.573.637.081	11.089.759.076.321
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	8.503.983.799.836	7.425.345.018.956
5 Tahun atau Lebih	20.938.074.992.554	18.224.349.638.997
Jumlah	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425

- 1) Dari nilai piutang pajak sebesar Rp86.801.366.456.341 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp46.205.692.087.023. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah deluwarasa pengalihannya sebesar Rp6.217.999.181.660. Selama tahun 2011 atas nilai piutang pajak yang telah deluwarasa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp489.005.652.771. Selama tahun 2011, tidak ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

- 2) Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp43.454.095.270.562.
- 3) Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikawatirkan dari lelang sebesar Rp889.285.399.952 dan dari piutang pajak sebesar Rp1.559.825.874.452. Dari aset wajib pajak tersebut dapat diperhitungkan selbagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak terbayar sebesar Rp237.836.727.323.
2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp21.262.095.827.300 dan Rp16.937.210.906.195 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat ditajikan kas dan belum dilaksanakan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 9.

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Umur Piutang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kurang dari 1 Tahun	19.648.918.985.526	15.549.337.791.645
1 Tahun s.d 2 Tahun	217.266.179.964	156.495.135.015
2 Tahun s.d 3 Tahun	103.555.167.066	409.426.853.939
Di atas 3 Tahun	1.292.355.594.744	821.961.125.596
Jumlah	21.262.095.827.300	16.937.210.906.195

Tabel 9
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai
(Dalam Rp)

*Piutang Pajak pada
Ditjen Bea dan Cukai*

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1	Piutang PPh Pasal 22 Impor	45.892.289.214	57.174.873.158
2	Piutang PPN Dalam Negeri	3.148.910.249.970	2.609.131.603.212
3	Piutang PPN Impor	240.582.578.649	264.640.351.368
4	Piutang PPN Lainnya	13.975.000	24.934.000
5	Piutang PPhBM Impor	26.715.140.404	20.402.870.885
6	Piutang PPhBM Lainnya	-	-
7	Piutang Cukai Hasil Tembakau	15.612.436.025.861	12.646.209.894.700
8	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	889.000.000	-
9	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.108.046.600	2.989.599.180

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

10	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	102.699.902.174	2.899.528.340
11	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	46.830.933.374	1.100.948.557
12	Piutang Bunga Penagihan PPN	9.710.328.332	5.821.080.805
13	Piutang Bunga Penagihan PPhBM	16.882.000	-
14	Piutang Bea Masuk	851.036.853.653	700.809.407.558
15	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	773.536.566.838	445.108.152.433
16	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	173.032.494.314	179.085.323.887
17	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	222.278.975.975	1.623.559.853
18	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	6.238.348.382	33.897.172
19	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	268.539.360	175.305.275
	Jumlah	21.252.096.927.300	16.937.210.896.195

C.2.10. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp19,89 triliun*

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp19.895.890.412.635 dan Rp9.020.978.486.579. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp9.632.493.510.011, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.895.890.412.635 dikurangi penyisihan sebesar Rp10.253.396.902.624. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	13.798.528.306.176	3.442.928.032.948
Penyisihan	(8.935.371.734.586)	-
Nilai Bersih	3.861.154.573.590	
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	6.089.364.104.459	5.578.050.453.631
Penyisihan	(318.025.168.038)	-
Nilai Bersih	5.771.338.936.421	
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	19.895.890.412.635	9.020.978.486.579
Penyisihan	(10.253.396.902.624)	-
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	9.632.493.510.011	

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Daftar 9.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2011 terdiri dari (dalam Rp):

*Piutang Bukan Pajak di
BUN Rp6,09 triliun*

	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Piutang Dividen dan Denda pada BA 999.03:		
Nilai Bruto	54.914.355.161	189.176.874.099
Penyisihan	(51.548.429.777)	-
Nilai Bersih	3.365.925.384	
2. Piutang pada BA 999.07:		
Nilai Bruto	878.939.094.800	960.768.242.278
Penyisihan	(4.394.895.474)	-
Nilai Bersih	874.544.399.326	
3. Piutang pada BA 999.08:		

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Nilai Bruto	7.438.160.200	187.584.222.817
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	7.438.160.200	-
4. Piutang PT PPA pada BA 999.99:		
Nilai Bruto I	2.786.071.531	2.121.512.481
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	2.786.071.531	-
5. Piutang Migas pada BA 998.99:		
Nilai Awal	5.145.286.422.787	4.278.398.501.958
Penyisihan	(262.082.042.787)	-
Nilai Bersih	4.883.204.379.999	-
Piutang PNB (Bruto)	6.088.364.104.458	5.578.050.453.531
Penyisihan	(318.025.168.038)	-
Piutang PNB (Bersih)	5.771.338.936.421	-

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) terdiri dari:

a. Piutang Lancar sebesar Rp3.382.839.582 terdiri dari (dalam Rp):

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (0,5%)	
		Tertagih (0,5%)	Nilai Bersih
1. PT PDI P Batam	85.865.000	429.325	85.435.675
2. PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	28.854.203	134.271	28.719.932
3. PT. Perkebunan Nusantara IX	1.450.120.379	7.250.602	1.442.869.777
4. Perum Perumnas	600.000.000	3.000.000	597.000.000
5. PT. Perkebunan Nusantara II	800.000.000	4.000.000	796.000.000
6. PT Inhutani I	300.000.000	1.500.000	298.500.000
7. PT Inhutani V	120.000.000	600.000	119.400.000
Jumlah	3.382.839.582	16.814.198	3.366.025.384

b. Piutang Macet sebesar Rp1.331.513.579 terdiri dari (dalam Rp):

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	
		Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT Istaka Karya	6.391.154.634	6.391.154.634	-
2. PT. Bina Karya	588.828.403	588.828.403	-
3. PT. Cabi F. Saria	806.746.786	806.746.786	-
4. PT. Industri Senggang Nusantara	19.588.982.144	19.588.982.144	-
Jumlah	51.531.515.579	51.531.515.579	-

2. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) terdiri dari

- Piutang pada Kementerian Keuangan sebesar Rp387.038.918.793 yang merupakan kelebihan pembayaran terhadap subsidi Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2010.
 - Piutang pada Kementerian Pertanian sebesar Rp56.786.969.165 merupakan kelebihan pembayaran subsidi pupuk berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2010 yang berasal dari BUMN Operator Subsidi Pupuk PT Pupuk Iskandar Muda.
 - Piutang pada Perum Bulog sebesar Rp435.113.206.842 merupakan kelebihan pembayaran atas subsidi pangan berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2011.
3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp7.438.160.200 merupakan piutang pada Perum BULOG.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

4. Piutang PT PPA sebesar Rp2.786.071.531 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Saldo Awal (1)	2.121.512.481	6.832.512.481
Koreksi Saldo Awal (2)	755.838	-
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Diversifikasi saham yang dikelola	38.000.000.000	300.000.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	496.040.291	7.752.000.000
Pakek dan Bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Pakek dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	156.974.861.111	116.517.000.000
Redemption Obligasi	-	-
Penjualan dari right saham	-	364.000.000
HPA aset lainnya	-	67.000.000
Jumlah HPA	195.440.901.402	431.332.512.481
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	2.627.252.574	-
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	690.648.836	2.519.000.000
Jumlah Penerimaan (3)	198.758.802.811	433.851.512.481
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat dipotong kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	190.414.395	212.000.000
Imbalan Pengelolaan Aset	50.337.375.238	52.751.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	5.033.737.524	5.273.000.000
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	10.041.430	21.000.000
Biaya aset periode sebelumnya	-	26.026.000.000
Imbalan Kinerja	1.353.997.000	6.868.000.000
PPN Imbalan Kinerja	136.399.790	886.000.000
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penyesuaian khusus	-	-
Jumlah Pengurangan (4)	56.891.895.198	96.117.800.000
HPA yang harus disetor ke Pemerintah (5)=(1)+(2) + (3)-(4)	143.899.105.932	338.734.512.481
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	141.113.034.401	336.613.000.000
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) - (6)	2.786.071.531	2.121.512.481

5. Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Piutang pada PT Pertamina	625.801.393.360	1.316.721.773.272
Piutang Migas Lainnya	4.519.485.029.407	2.962.677.728.686
Piutang Migas (Bruto)	5.145.286.422.767	4.279.399.501.958
Penyisihan	(262.082.042.787)	-
Piutang Migas (Netto)	4.883.204.379.980	-

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp0

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp65.404.443. Pada tahun 2010, Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca yang berada di BAPPENAS dan untuk tahun 2011 seluruhnya sudah dilunasi.

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan
TGR Rp60,47 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp60.470.939.992 dan Rp38.591.410.963 merupakan saldo

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Tagihan TGR pada K/L dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp9.225.983.342 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.470.939.992 dikurangi penyisihan sebesar Rp51.244.956.650.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada **Daftar 10**.

C.2.13. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang

*Bagian Lancar Investasi
Jangka Panjang Rp0*

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp4.842.752.393.007. Saldo per 31 Desember 2010 merupakan bagian lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah (RDI/RPD) dan SLA kepada pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Jangka Panjang RDI/RPD direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (*lihat Catatan C.2.28*), sehingga bagian lancarnya tidak lagi disajikan pada akun Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang, melainkan pada akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman.

C.2.14. Uang Muka Belanja

*Uang Muka Belanja
Rp1,29 triliun*

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.279.165.315.147 dan Rp614.122.632.355 merupakan uang muka dan iatau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Daftar 11**.

C.2.15. Piutang dari Kegiatan BLU

*Piutang dari Kegiatan
BLU Rp1,22 triliun*

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.216.391.989.142 dan Rp1.121.930.274.893. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.016.932.672.808 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.216.391.989.142 dikurangi penyisihan sebesar Rp199.459.316.334. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari piutang kegiatan operasional BLU sebesar Rp1.177.422.667.268, dan non operasional BLU sebesar Rp38.969.321.854.

Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	250.799.471.050	259.176.487.979
2. BLU di Kementerian Keuangan	14.938.119.944	1.800.000
3. BLU di Kementerian Perindustrian	2.465.869.970	1.585.267.809
4. BLU di Kementerian ESDM	14.319.049.849	-
5. BLU di Kementerian Perhubungan	409.502.500	-
6. BLU di Kementerian Diknas	170.476.463.630	42.200.054.389
7. BLU di Kementerian Kesehatan	651.984.000.111	751.575.087.776
8. BLU di Kementerian Agama	1.911.791.625	2.640.363.334

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

9. BLU di Kementerian PU	46.056.787.010	30.669.411.030
10. BLU di Kementerian Ristek	-	92.820.000
11. BLU di Kementerian KUKM	2.298.548.184	586.979.382
12. BLU di Kepolisian RI	13.590.873.945	6.819.067.311
13. BLU di BPPT	5.779.506.330	1.745.454.370
14. BLU di LAPAN	246.647.687	-
15. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	2.154.033.443	7.769.980.831
Jumlah Nilai Bruto	1.177.422.667.288	1.104.842.774.199
Penyisihan	(198.298.929.059)	-
Jumlah Nilai Bersih	979.123.738.229	-

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	13.078.384.966	10.463.985.064
2. BLU di Kementerian Keuangan	22.027.746.408	6.146.237.068
3. BLU di Kementerian Perhubungan	62.895.200	-
4. BLU di Kementerian Kesehatan	3.462.763.610	223.938.493
5. BLU di Kementerian Agama	335.446.062	253.340.069
6. BLU di LAPAN	2.065.608	-
Jumlah Nilai Awal	38.969.321.854	17.087.500.694
Penyisihan	(1.160.387.275)	-
Jumlah Nilai Bersih	37.808.934.579	-

C.2.16. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain Rp24,99 triliun

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp24.977.956.337.945 dan Rp12.589.882.121.588 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7.991.547.100.126 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.977.956.337.945 dikurangi penyisihan sebesar Rp16.986.409.237.819. Piutang Lain-lain terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Piutang di K/L:		
Nilai Bruto	12.678.235.141.724	296.809.311.019
Penyisihan	(6.040.484.808.807)	-
Nilai Bersih	6.637.750.332.917	-
Piutang di BUN:		
Nilai Bruto	12.299.721.196.221	12.293.072.810.569
Penyisihan	(10.945.924.429.012)	-
Nilai Bersih	1.353.796.767.209	-
Nilai Bruto	24.977.956.337.945	12.589.882.121.588
Penyisihan	(16.986.409.237.819)	-
Nilai Bersih	7.991.547.100.126	-

1. Piutang di K/L terdiri dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. BPK	-	408.856
2. Kejaksaan Agung	12.678.235.141.724	267.253.500.095
3. BRR NAD - Nias	-	516.968.200
4. Badan SAR	-	9.038.433.868
Nilai Piutang Bruto	12.678.235.141.724	298.009.311.019
Penyisihan	(6.040.484.808.807)	-
Nilai Piutang Bersih	8.637.750.332.917	-

2. Piutang yang berada di BUN terdiri dari (dalam Rp):

Piutang pada BUN	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
a. Piutang pada BA 999.04		
Nilai Bruto	716.768.609.336	677.748.511.678
Penyisihan	(33.351.180.384)	(53.567.541.188)
Nilai Bersih	683.417.418.942	624.180.970.487
b. Piutang pada BA 999.05		
Nilai Bruto	419.570.214.233	359.541.843.144
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	419.570.214.233	-
c. Piutang pada BA 999.07		
Nilai Bruto	-	171.965.009.662
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	-	-
d. Piutang pada BA 999.08		
Nilai Bruto	174.775.083.008	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	174.775.083.008	-
e. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi		
Nilai Bruto	10.953.656.946.224	11.137.394.987.276
Penyisihan	(10.912.573.238.618)	-
Nilai Bersih	41.083.707.606	-
f. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun		
Nilai Bruto	34.940.343.422	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	34.940.343.422	-
Nilai Piutang Bruto	12.299.721.186.221	12.293.072.810.569
Penyisihan	10.945.924.429.012	-
Nilai Piutang Bersih	1.353.796.767.209	-

a. Piutang Lain-lain pada BA 999.04 per 31 Desember 2011 sebesar Rp716.768.609.336 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

- Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp302.910.522.083 yang merupakan bagian hak tagih pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada 2011. Berdasarkan Perlinjen Perbendaharaan No. 12/PB/2011 mengenai kualitas dan penyisihan piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 (dua belas) bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

atas 12 (dua belas) bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	139.127.816.604
BUMD	109.830.433.263
Pemda	40.842.037.443
Lainnya	13.110.234.773
Nilai Bruto	302.910.522.083
Penyisihan	(31.281.899.956)
Nilai Bersih	271.628.622.125

- Piutang Bunga sebesar Rp341.086.208.549 berdasarkan debitor, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	290.339.333.795
BUMD	24.581.038.281
Pemda	9.703.257.611
Lainnya (<i>Channeling</i> dan KUMK SUP 005)	16.462.578.862
Nilai Bruto	341.086.208.549
Penyisihan	(1.705.431.043)
Nilai Bersih	339.380.777.506

- Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp72.771.878.704.

- b. Piutang Lain-lain pada BA 999.05 sebesar Rp419.570.214.233 terdiri dari piutang lebih sahur DBH Pajak sebesar Rp10.388.396.634, piutang lebih sahur DBH SDA sebesar Rp110.600.169.551, dan piutang atas sisa DPPID yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp298.581.648.048.
- c. Piutang Lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2011 sebesar Rp174.775.083.006 merupakan piutang pada Kementerian Pertanian berupa cadangan benih yang berada di penangkaran yang merupakan nilai stock Cadangan Benih Nasional (CBN) yang sementara digunakan oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) sebanyak 9.334.187 kg dalam 4 (empat) komoditas. Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2010, persediaan di penangkaran dan benih yang rusak dimasukkan di akun Piutang Lain-lain pada Ditjen Tanaman Pangan yang semula disajikan BA 999.07 di ubah menjadi BA 999.08. Nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp171.965.009.662.
- d. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	8.298.437.312.747	8.382.155.353.798
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.655.229.633.477	2.755.229.633.478
Nilai Bruto	10.953.666.946.224	11.137.384.987.276
Penyisihan	(10.912.573.238.618)	-
Nilai Bersih	41.093.707.606	-

- 1). Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Dana BLBI BDL yang di-cessed-kan	11.886.938.781.958	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.166.751)	(140.764.166.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	-
Nilai Bruto	8.288.437.312.747	8.382.155.353.788
Penyisihan	(8.257.343.605.141)	-
Nilai Bersih	41.893.707.606	-

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan dengan, 1 (satu) BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada Daftar 12.

- 2). Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Total dana BLBI BDL yang di-cessed-kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.886.852.865)	(146.886.852.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	-
Nilai Bruto	2.695.229.633.477	2.755.229.633.477
Penyisihan	(2.655.229.633.477)	-
Nilai Bersih	-	-

Seluruh Piutang pada 5 BDL diklasifikasikan pada kelompok dengan kualitas macet, sehingga disisihkan seluruhnya.

- e. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp34.940.343.422 terdiri dari:
- 1). Kelebihan droping ke PT Taspen (Persero) bulan November 2011 ke PT Taspen (Persero) sebesar Rp2.580.094.035 yang terdiri dari belanja PNS Daerah Rp1.813.828.466, TNI/Polri (lama) Rp335.240.048, Hakim Rp50.466.468, Tunjangan veteran Rp277.288.840, dan Tunjangan PKRI/KNIP Rp103.270.213. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negera oleh PT Taspen (Persero) dengan bukti SSBP No. 2/TSP/112011 tanggal 25 Januari 2012.
 - 2). Kelebihan droping ke PT Taspen (Persero) Desember 2011 sebesar Rp5.513.193 yang terdiri dari Hakim Rp1.292.429 dan Tunjangan PKRI/KNIP Rp4.220.764.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Taspen (Persero) dengan bukti SSBP No. 1/TSP/112011 tanggal 4 Januari 2012.

- 3). Kelebihan pencairan iuran asuransi kesehatan veteran non tuwet sebesar Rp22.674.141.694. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Askes (Persero) dengan bukti SSBP No. 1/ASK/0212 tanggal 16 Februari 2012.
- 4). Saldo uang pensiun yang tidak diambil melalui PT Asabri (Persero) untuk bulan Januari s/d Desember 2011 sebesar Rp8.680.594.500.

*Bagian Lancar Penerusan
Pinjaman Rp4,46 triliun*

C.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.462.395.347.776 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2012. Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Jangka Panjang RDI/RPD direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (*lihat Catatan C.2.29.*), sehingga bagian lancarnya disajikan pada akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman. Pada LKPP Tahun 2010, Bagian Lancar Penerusan Pinjaman disajikan pada akun Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.440.083.371.037 yang berasal dari nilai bruto Rp4.462.395.347.776 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.311.976.739, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
BUMN	3.822.754.353.377
BUMD	453.602.028.304
Pemda	76.293.160.709
Lainnya	109.745.805.386
Nilai Bruto	4.462.395.347.776
Penyisihan	(22.311.976.739)
Nilai Bersih	4.440.083.371.037

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Rp75,33 triliun*

C.2.18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp75.330.131.480.506 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Piutang Pajak	47.817.309.090.339
2. Piutang Bukan Pajak	10.253.396.902.624
3. Bagian Lancar TPITGR	51.244.956.660
4. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	22.311.976.739
5. Piutang dari kegiatan BLU	199.459.316.334
6. Piutang Lain-Lain	16.986.409.237.820
Penyisihan Piutang	75.330.131.480.506

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp47.817.309.090.339 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp10.253.396.902.624 dapat dilihat pada **Daftar 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPITGR sebesar Rp51.244.956.650 dapat dilihat pada **Daftar 10**.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman sebesar Rp22.311.976.739 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman pada BA 999.04.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp199.459.316.334 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. BLU di Pemerintahan Negara	16.882.151.896
2. BLU di Kementerian Keuangan	548.625.745
3. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	311.975.577
4. BLU di Kementerian ESDM	2.980.657.533
a. BLU di Kementerian Kehutanan	42.774.146
b. BLU di Kementerian Kelautanian	2.937.883.387
5. BLU di Kementerian Kesehatan	78.368.158.376
6. BLU di BPP	28.897.572
7. BLU di LGD-AN	141.095.848
8. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	10.770.137
Jumlah	199.459.316.334

- B. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Lain-Lain sebesar Rp16.986.409.237.820 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Kejaksaan Agung	6.040.454.895.805
2. BA 999.04	33.351.190.394
3. BA 999.99 – Piutang Bank Dalam Likuidasi	10.912.573.238.619
Jumlah	16.986.409.237.820

*Investasi Jangka Pendek
BLU Rp170,55 miliar*

C.2.19. Investasi Jangka Pendek BLU

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp170.553.016.059 dan Rp30.750.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2011 berupa Deposito berjangka 12 bulan. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada di BLU pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp70.553.016.059 dan BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp100.000.000.000.

C.2.20. Investasi Jangka Pendek Lainnya

*Investasi Jangka Pendek
Lainnya Rp135,84 miliar*

Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp135.839.486.878 dan Rp0. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp135.839.486.878 yang terdapat pada Universitas Indonesia sebesar Rp11.992.500.000, Universitas Gadjah Mada sebesar Rp17.151.108.203, dan Institut Teknologi Bandung Rp106.695.878.675.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Persediaan
Rp59,21 triliun

C.2.21. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp59.214.846.453.160 dan Rp36.366.060.661.005 dan merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Persediaan di K/L	56.048.193.411.852	33.071.754.378.769
Persediaan di BLU	590.795.321.790	457.683.029.189
Persediaan di BUN	2.575.857.719.518	2.836.623.273.047
Jumlah	59.214.846.453.160	36.366.060.661.005

Persediaan di K/L per 31 Desember 2011 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp46.209.249.007.353, POLRI sebesar Rp2.438.560.229.880, Kementerian Perhubungan sebesar Rp749.249.628.830, Kementerian Kesehatan sebesar Rp490.573.034.841, Kementerian Kulatan dan Perikanan sebesar Rp743.794.093.746, BKKBN sebesar Rp666.545.768.411, Komisi Pemilihan Umum Rp485.017.642.483. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 13**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.575.857.719.518 terdiri dari:

- Persediaan pada BA 999.07 sebesar Rp4.841.100.000. Penurunan Persediaan disebabkan mulai tahun 2011 nilai persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di gudang PT Sang Hyang Seri (Pasar) pada Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 999380) BA 999.07 dipindahkan ke Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 999099) BA 999.08.
- Persediaan pada BA 999.08 sebesar Rp2.571.016.619.518, merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca K/L dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yaitu:
 - Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Panum Bulung per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.443.505.411.611, setara dengan Kuantum 378.838.048,31 Kg dikalikan dengan harga perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp6.450/Kg. Sedangkan nilai stock CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Tahun	Kuantum (Kg)	Harga Perolehan per Kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2007	3	4.619,09	-
2	2008	4.301.103,62	4.530,00	19.674.722.438
3	2009	181.913.192,00	5.570,00	1.007.000.000.000
4	2011	125.138.750,69	6.450,00	1.007.000.000.000
Jumlah		378.838.048,31		2.205.707.423.438

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2011 sebesar 235.739.492,66 kg berdasarkan *Delivery Order (DO)* terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 14.767.990,20 Kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2011 sebanyak 221.795.094,46 Kg.

- Persediaan di berbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08 sebesar Rp127.511.207.907.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

RDI/RPD direklasifikasi sebagai bagian Aset Lainnya

C.2.22. Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD)

Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2011 disajikan pada kelompok Aset Lainnya (*lihat Catatan C.2.29.*). Sedangkan saldo per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp43.367.037.927.876, berasal dari nilai bruto Rp43.584.962.741.584 dikurangi penyisihan Rp217.924.813.708.

Dana Bergulir Rp8,19 triliun

C.2.23. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.195.256.111.510 dan Rp3.891.209.869.656 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Perindustrian	-	3.469.232.868
2. Kementerian Kehutanan	4.223.566.054	486.591.360
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	12.206.756.931
4. Kementerian Lingkungan Hidup	49.306.342.015	49.447.128.945
5. Kementerian Koperasi dan UKM	2.050.276.290.128	2.113.145.137.627
6. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	3.872.785.113.151	246.832.814.636
7. Kementerian Pekerjaan Umum	2.218.664.800.164	1.466.642.207.289
Jumlah	8.195.256.111.510	3.891.209.869.656

Dari Dana Bergulir sebesar Rp8.195.256.111.510, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp7.283.444.736.358 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan Kementerian Kehutanan.

Perincian masing-masing dana bergulir adalah:

- Dana bergulir di Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp3.469.232.868. Dana bergulir ini merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag. Pada Tahun 2011, Dana Bergulir di Kementerian Perindustrian direklasifikasi menjadi Aset lain-lain karena sudah tidak memenuhi karakteristik dana bergulir.
- Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.223.566.054 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
- Dana Bergulir di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp12.206.756.931. Dana Bergulir tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang digulirkan melalui koperasi usaha bersama (KUB) pada 13 pelabuhan. Pada Tahun 2011, Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direklasifikasi menjadi Aset lain-lain karena Program penyaluran dana bergulir tersebut sudah berhenti dan dananya tidak digulirkan lagi.
- Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp49.306.342.015 dan Rp49.447.128.945 merupakan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup. Dana ini berasal dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

5. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.050.276.290.126. Dari dana tersebut, dana bergulir sebesar Rp852.505.033.137 merupakan dana pemerintah yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga mengelola dana bergulir yang berasal dari BA 999.03 sebesar Rp1.197.771.256.989 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Nilai yang disajikan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening perguliran dan tagihan yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SA-P). Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar Rp3.085.848.168.850 yang berasal antara lain dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perakuannya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan.

6. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.872.785.113.151 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).
7. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.218.664.800.164 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol.

C.2.24. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp4,75 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp4.749.737.167.996 dan Rp98.464.787.895 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa K/L atau BUN, yaitu (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Kementerian Perindustrian	37.360.370.139	49.464.787.895
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	4.701.776.528.794	49.000.000.000
Perguruan Tinggi Eks BHMN	10.680.269.073	-
Jumlah	4.749.737.167.996	98.464.787.895

Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan 5 (lima) tahun.

Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian investasi non permanen lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Pinjaman kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek rehabilitasi Bendungan Gintung dan Pekerjaan Sipil Bendungan dan Jaringan Irigasi Utama pada Sub Proyek Irigasi Batang Anai	2.000.000.000
Pinjaman kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek pembangunan Jalan dan Jembatan Melintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	2.000.000.000
Pinjaman kepada Demkov Sulawesi Tenggara untuk proyek Pembangunan Rumah Nelayan di Kecamatan (RSJ) di Kabupaten Sula Tenggara	190.000.000.000
Pinjaman kepada Pemkab Nurekha untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di Kota Surenkerta	7.938.848.000
Pinjaman kepada PT PLN (Persero)	1.499.976.528.784
Jumlah	4.771.776.528.784

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp10.580.269.073. Perguruan Tinggi Eks BHMN yang memiliki investasi jangka panjang yang dilaporkan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah:

- Universitas Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.802.144.073 terdiri dari investasi pada obligasi sebesar Rp763.125.000 dan investasi pada reksadana sebesar Rp839.019.073.
- Institut Teknologi Bandung dengan nilai sebesar Rp8.978.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi.

C.2.25. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

PMN Rp736,99 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp736.991.554.233.014 dan Rp564.087.107.302.153 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, Lembaga Internasional, Badan Usaha Lainnya, BI, dan LPS dengan jumlah (dalam Rp):

PMN	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. BUMN	589.766.861.926.137	523.294.056.365.721
2. BHMN	1.168.034.176.846	2.193.481.021.163
3. Non BUMN	4.261.956.608.163	3.969.599.282.340
4. Lembaga Internasional	35.495.913.032.610	34.629.850.632.929
5. Badan Usaha Lainnya	224.634.258	120.000.000
6. Bank Indonesia	89.572.275.000.000	-
7. Lembaga Penjamin Simpanan	16.726.488.855.000	-
Jumlah	736.991.554.233.014	564.087.107.302.153

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)*PMN pada BUMN*

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp589.766.661.926.137 dan Rp523.294.056.365.721 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 tersebut merupakan nilai PMN pada 141 BUMN sebesar Rp573.317.888.010.561 dan 5 BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp16.448.773.915.576. Status laporan keuangan pada 141 BUMN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah
Audited 2011	119	560.647.212.986.595
Unaudited 2011	17	11.103.091.629.773
LK Audited 2010	3	1.630.723.136.336
Unaudited 2010	1	7.247.892.217
Audited 2005	1	(70.387.634.362)
Jumlah	141	573.317.888.010.561

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 14.A.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 24 BUMN dengan nilai sebesar Rp44.364.558.169.478,40.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 termasuk PMN pada 5 BUMN sebesar Rp16.448.773.915.576 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2.195.528.404.151, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp2.508.007.653.072, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp6.963.944.000.000, PT Perjamian Infrastruktur Indonesia sebesar Rp3.703.788.479.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.077.505.379.353. (Daftar 14.B.)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam Daftar 14.A.

PMN pada BHMN

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp1.168.034.176.846 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

BHMN	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	679.080.915.526	1.101.497.542.000
b. Universitas Airlangga	412.443.985.336	1.188.424.915.202
c. BP MIGAS	(123.490.724.016)	(96.441.436.039)
Jumlah	1.168.034.176.846	2.193.481.021.163

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 memuat perubahan PT BHMN menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), namun pelaksanaan pengalihan status tersebut masih memerlukan langkah-langkah, yaitu:

- Penetapan melalui Peraturan Pemerintah mengenai PTN BHMN Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

Penetapan pengalihan seluruh kekayaan masing-masing PTN BHMN menjadi kekayaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

Mengingat pelaksanaan PPK BLU masih memerlukan proses lebih lanjut, maka selama masa transisi nilai PMN pada PTN BHMN tetap disajikan dalam laporan keuangan BA 999.03 sebesar nilai aktiva bersih. Nilai investasi pada IPB dan Unair per 31 Desember 2011 merupakan nilai investasi berdasarkan aktiva bersih (ekuitas) per 31 Desember 2010 setelah ditambah/dikurangi dengan penyesuaian yang diperlukan. Aset dan kewajiban yang diperoleh IPB dan Unair selama tahun 2011 telah disajikan pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp4.261.956.608.163, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2011 disebabkan oleh:

- a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;
- b. Penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Jakarta International Hotel Development, Tbk senilai Rp18.539.927.809, dan penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Kertas Basuki Rachmat senilai Rp2.632.500.000;
- c. Pengurangan persentase kepemilikan Negara pada PT Kertas Padalarang,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

diakibatkan pelaksanaan *debt swap* hutang PT Kertas Padalarang menjadi modal Perum Peruri, sehingga kepemilikan pemerintah pada PT Kertas Padalarang menjadi tendilusi.

- d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 30 Desember 2011 kurs tengah BI adalah USD-Rp9.068, sedangkan per tanggal 31 Desember 2010 adalah USD-Rp8.991. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freaport dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada kedua perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung nilai kepemilikan Pemerintah;
- e. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia. Per tanggal 30 Desember 2011 kurs tengah BI adalah MYR-Rp2.852.925, sedangkan per tanggal 31 Desember 2010 adalah MYR-Rp2.915,85. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu Fertilizer, mengingat nilai kepemilikan Pemerintah disajikan pada mata uang Ringgit Malaysia.

Pada non-BUMN dengan kepemilikan Negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak terpengaruh pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas pada Non-BUMN tersebut dapat dilihat pada Daftar 15.

*Penyertaan pada
Lembaga Internasional*

4. Penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.495.913.032.610 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissary notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2011. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 16.

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.495.913.032.610, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissary notes* sebesar Rp25.928.353.496.005 di antaranya sebesar Rp25.871.090.740.489 kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissary notes* per Lembaga Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	International Monetary Fund	25.871.090.740.489
2.	International Bank for Reconstruction and Development	39.174.191.965
3.	International Development Association	5.173.139.668
4.	Multilateral Investment Guarantee Agency	10.292.343.224
5.	Common Fund for Commodities	2.623.060.659
Jumlah total		25.928.353.496.005

Penyertaan dalam bentuk *Promissary Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan C.2.38 dan Catatan C.2.44.

*PMN pada Badan Usaha
Lainnya*

5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp224.634.258 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas 4 (empat) perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

- I, Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp104.634.258, dan Rp100.000.000.
- PMN pada BI*
6. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp89.572.275.000.000 dan Rp0 (nilai PMN pada Bank Indonesia per 31 Desember 2010 sebesar Rp68.798.801.000.000 dilaporkan sebagai Investasi Permanen Lainnya. *Lihat Catatan C.2.27*). Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
- PMN pada LPS*
7. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp16.726.488.855.000 dan Rp0 (nilai PMN pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2010 sebesar Rp11.298.734.420.000 dilaporkan sebagai Investasi Permanen Lainnya. *Lihat Catatan C.2.27*). Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

C.2.26. Investasi Permanen BLU

*Investasi Permanen BLU
Rp6,64 miliar*

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 yang berjumlah Rp6.637.194.500 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%.

C.2.27. Investasi Permanen Lainnya

*Investasi Permanen
Lainnya Rp87,61 triliun*

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp87.609.772.784 dan Rp84.959.618.306.997 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*). Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp87.609.772.784 merupakan penyertaan atau kepemilikan Perguruan Tinggi Eks. BHMN pada beberapa Perusahaan, yaitu Universitas Gajah Mada sebesar Rp60.556.530.103, Institut Teknologi Bandung sebesar Rp26.465.824.601, dan Universitas Indonesia sebesar Rp587.418.080 (setelah dikurangi hak minoritas sebesar Rp3.690.732).

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp84.959.618.306.997 merupakan investasi pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung, Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran.

Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Permanen Lainnya pada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) direklasifikasi menjadi Investasi Permanen PMN (*Lihat Catatan C.2.25*), sedangkan Investasi Permanen Lainnya pada Taman Mini Indonesia Indah, Otorita

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Asahan, BP Gedung, Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya (*Libat Catatan C.2.29*). Rincian Investasi Permanen Lainnya pada lembaga-lembaga tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Bank Indonesia	-	88.798.801.000.000
2. Otorita Batam	-	14.058.094.887.589
3. LPS	-	11.298.734.420.000
4. Taman Mini Indonesia Indah	-	33.041.277.896
5. Otorita Asahan	-	737.240.235.575
6. BP Gedung Manggala Wanabakti	-	23.634.260.978
7. Yayasan Gedung Veteran	-	10.082.224.959
Jumlah	-	94.959.818.308.997

C.2.28. Aset Tetap

Aset Tetap Rp1.587,97 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.587.974.174.587.750 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (*penyusutan*).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Tanah	806.436.356.598.744	565.920.545.473.098
Peralatan dan Mesin	184.862.199.595.042	150.868.673.195.411
Gedung dan Bangunan	152.223.086.918.162	137.042.921.053.205
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	347.164.628.245.235	276.682.171.786.874
Aset Tetap Lainnya	11.517.129.897.802	7.748.128.179.913
Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.780.773.332.765	46.038.727.718.084
Jumlah	1.587.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp142.559.447.179.471, dengan rincian (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Tanah	108.693.570.123.457	107.957.793.253.986
Peralatan dan Mesin	12.275.080.869.622	8.490.665.409.433
Gedung dan Bangunan	16.538.052.792.384	13.083.319.031.365
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.128.925.602.545	968.311.649.972
Aset Tetap Lainnya	458.589.026.465	429.004.262.220
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.607.228.774.998	2.651.180.143.537
Jumlah	142.559.447.179.471	133.580.273.750.513

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp383.673.007.182.165 atau 32,40% dari nilai per 31 Desember 2010. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp117,85 triliun, koreksi penambahan saldo awal hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada Kementerian

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Pekerjaan Umum berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, koreksi penambahan hasil IP pada Kementerian Perhubungan berupa Tanah dan Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap yang diperoleh dari hibah dan lain-lain.

Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPP merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN, yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Laporan BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perbedaan nilai antara LKKL dengan LBMN disajikan pada Catatan Penting Lainnya.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada Daftar 17.

C.2.29. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp438,63 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp438.634.382.921.494 dan Rp278.197.482.029.092. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 berasal dari nilai bruto sebesar Rp458.605.047.654.502 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.970.874.008.883.

Aset Lainnya terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.375.031.741	1.377.994.323
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	249.626.424.418	38.234.179.361
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.737.310.660.736	-
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	212.907.765.825	212.809.685.200
5. Penerusan Pinjaman	46.540.275.969.109	2.070.168.163.656
6. Aset Tak Berwujud	12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
7. Aset yang Dibatasi Penggunaannya	37.253.051.374.408	40.987.103.326.394
8. Dana Kelolaan BLU	19.320.332.310.233	18.459.000.085.715
9. Dana Penjaminan	75.371.634.076	71.135.792.697
10. Aset KKKS *)	150.508.980.296.216	68.224.330.326.991
11. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi *)	67.543.984.466.405	29.203.047.197.602
12. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	14.762.445.010.365	-
13. Aset Lain-lain	105.992.977.283.250	109.579.037.246.507
Jumlah	458.605.256.930.377	278.197.482.029.092
Penyisihan	(19.970.874.008.883)	-
Nilai Bersih	438.634.382.921.494	-

*) Saldo Aset KKKS dan Aset Eks BPPN per 31 Desember 2010 disajikan pada kelompok Aset Lain-lain

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA Rp1,38 miliar

Saldo TPA per 31 Desember 2011 adalah Rp1.375.031.741, sedangkan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.377.994.323. Saldo per 31 Desember 2011 tersebut berada di Kementerian Kementrian Negara KUKM sebesar Rp1.375.031.741.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan TGR Rp249,63 miliar

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp249.626.424.418 dan Rp38.234.179.361. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp92.616.345.025 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp249.626.424.418 dikurangi penyisihan sebesar Rp157.010.079.393. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada Daftar 18.

3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp3,74 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.737.310.550.736 dan Rp0 merupakan piutang jangka panjang yang berada pada Kementerian Kehutanan dan BA 999.04. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp3.340.385.470.226, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.737.310.550.736 dikurangi penyisihan sebesar Rp396.925.080.510. Pada LKPP Tahun 2010, Piutang Jangka Panjang Lainnya dilaporkan dalam Aset Lain-lain. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya:

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Kementerian Kehutanan	758.821.015.245	-
2. BA BUN 999.04	2.978.489.535.491	-
Nilai Bruto	3.737.310.550.736	-
Penyisihan pada BA 999.04	(396.925.080.510)	-
Nilai Bersih	3.340.385.470.226	-

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut:

- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp758.821.015.245. Nilai tersebut terdiri dari piutang Hutang Tanaman Industri (HTI) yang mendapatkan *reschedule* pembayaran sebesar Rp445.483.161.236 dan yang tidak mendapatkan *reschedule* pembayaran sebesar Rp313.337.854.009. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp376.788.382.412, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp758.821.015.245 dikurangi penyisihan sebesar Rp382.032.632.833.
- Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.978.489.535.491 terdiri dari dalam Rp:

Uraian	Jumlah
1. CJMK	2.929.780.000.000
2. K/PB yang telah Fiskal Nihil	3.100.000.000
3. Dana Induk Unggulan	58.709.535.491
Nilai Bruto	2.978.489.535.491
Penyisihan piutang tidak tertagih	(14.892.447.678)
Nilai Bersih	2.963.597.087.813

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp212,81 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp212.907.765.825 dan Rp212.609.665.200 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Pendidikan Nasional	298.100.625	
2. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	128.962.165.200	128.962.165.200
3. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
Jumlah	212.907.765.825	212.609.665.200

5. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman
Rp46,54 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.540.275.969.109 dan Rp2.070.158.163.656 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Meningkatnya nilai Penerusan Pinjaman tersebut karena adanya reklasifikasi dari Investasi RD/VPD yang pada LKPP Tahun 2010 disajikan pada Investasi Non Permanen. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	44.093.413.855.680
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	1.406.255.914.320
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	422.494.717.139
Penerusan Pinjaman Lainnya	618.111.481.970
Nilai Bruto	46.540.275.969.109
Penyisihan	(232.701.379.846)
Nilai Bersih	46.307.574.589.263

6. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp12,41 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp12.406.618.813.595 dan Rp9.351.448.050.646 merupakan aset yang berupa *software*, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Daftar 19.

7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya Rp37,25
triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp37.253.051.374.408 dan Rp40.987.103.326.394, terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Luar Negeri	325.201.782.094	366.254.294.334
2. Kementerian Pertahanan	5.763.321.157.149	2.549.198.826.943
3. Kementerian ESDM	-	6.225.198.015
4. Kementerian Pendidikan Nasional	266.446.173.044	-
5. Kementerian Kesehatan	2.033.538.302.485	-
6. Kementerian Agama	3.244.412.872.236	2.617.237.058.588
7. Kementerian Kehutanan	60.000.899	5.996.376.112
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	87.114.525.722	87.380.711.730
9. Kementerian Lingkungan Hidup	-	23.480.476.922
10. BUN	25.532.966.580.779	35.331.330.423.750
Jumlah	37.253.051.374.408	40.987.103.326.394

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp325.201.782.094 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/ instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.763.321.157.149 merupakan dana devisa berupa LIC yang belum dicairkan oleh pihak ketiga.
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp266.446.173.044 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga.
4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.033.538.302.465 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2011.
5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp3.244.412.872.236 terdiri dari:
 - a. Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp2.077.597.299.329, merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk permasalahan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji.
 - b. Aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp1.166.815.572.907. BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.
6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp50.000.899 merupakan Deposito Terbeku Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Airan Sungai (KUK-DAS).
7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp87.114.525.722 berupa Dana Penguatan Modal (DPM) dan Dana Ekonomi Produktif (DEP) merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.
8. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp25.532.966.560.779, terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Rekening Retur	-	410.881.635.675
Rekening Cadangan	21.576.465.725.102	31.077.734.977.042
Escrow Bank Mutiara	156.694.824.182	155.364.266.014
Aset Bersih Bepertanum	-	3.551.726.799.482
Rekening Lainnya	149.465.989.003	-
BA 989.03	3.643.972.716.732	-
BA 989.08	6.367.305.761	135.622.745.537
Jumlah	25.532.966.560.779	35.331.330.423.750

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- Saldo Rekening Retur pada akhir tahun 2011 disetorkan ke Kas BUN di BI, sehingga bersaldo nihil per 31 Desember 2011.
- Rekening Cadangan sebesar Rp21.576.465.725.102 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.598
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	7.523.848.941.348	16.787.875.871.035
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	9.505.740.873.181	8.374.050.805.873
Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG	-	1.388.830.389.738
Jumlah	21.576.465.725.102	31.077.734.877.042

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Subsidi Premium	31.869.361.825	2.113.237.391.817
Subsidi Minyak Tanah	238.206.878.879	585.985.914.429
Subsidi Minyak Solar	110.794.727.694	974.288.783.407
Subsidi LPG	348.690.214.595	1.043.741.129.751
Subsidi Lubrik	284.141.728.597	271.474.505.307
Subsidi Pangan	3.880.034.636.700	4.234.526.934.429
Subsidi Benih	38.807.101.708	1.457.523.458.172
Subsidi Pupuk	2.250.517.888.430	5.067.111.125.830
Subsidi Minyak Gerang	-	-
Subsidi PELNI	124.487.848.390	50.000.000.000
Subsidi PT KAI	152.468.542.728	134.350.003.864
Subsidi PT Pas dan Giro	64.260.500.000	43.750.000.000
PSO Perum BULOG	-	14.051.909.276
Subsidi Bunga Kredit Program	-	767.823.194.853
Jumlah	7.523.848.941.348	16.787.875.871.035

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Total rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO adalah sebesar Rp8.895.590.963.425. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp7.523.846.941.346 karena telah disalurkan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Februari 2012, sementara sisanya sebesar Rp1.371.744.022.079 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disetorkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2012.

- Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.505.740.673.161 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rincian Rekening Cadangan DBH yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut

Jenis Transfer	Jumlah (Rp)
1. Dana Cadangan: UH Minyak Bumi 15%	3.177.740.501.674
2. Dana Cadangan: UH Gas Bumi 30%	3.666.364.630.785
3. Dana Cadangan: UH Lahan Tetap	10.290.000.313
4. Dana Cadangan: UH Perakibi	2.572.934.460.656
5. Dana Cadangan: UH Upriver-Downriver	23.157.969.478
6. Dana Cadangan: UH P&JH	114.411.296.936
7. Dana Cadangan: UH Dana Reklamasi	172.430.418.268
8. Dana Cadangan: UH Perikanan	15.348.847.130
Total	8.506.740.673.161

Total Rekening Cadangan DBH adalah sebesar Rp9.899.647.659.901. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp8.505.740.673.161 karena telah disalurkan kepada pemda sampai dengan akhir Februari 2012, sementara sisanya sebesar Rp993.908.986.740 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disalurkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2012.

- c. Rekening *overrow* Bank Mutiara sebesar Rp156.694.824.182 adalah Rekening *overrow* pada rekening No. 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD 17.279.976.20. Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.
- d. Rekening Lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp149.465.989.003 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
1. Waiver Keuangan C.U. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	52.065.362.115
2. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980	0
3. BUN Untuk Obligasi Dim Rangka Penjaminan nomor 502.000002980	83.469.078.439
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Perjualn Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.339.269.845
5. Rekening Depkpu U Penampungan Hibah Dari luar Negeri Dim Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411980	2.572.258.804
Total	149.465.989.003

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

e. Aset Bapertarum tidak disajikan lagi dalam neraca. *Lihat Catatan Penting Lainnya.*

f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 terdiri dari:

- 1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp24.911.006.842,93 yang terdiri atas:
 - Dana pada rekening penampungan anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp452.994.640,06 yang terdiri dari sisa anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp1.933.128,38, dan jasa giro setelah dikurangi administrasi sebesar Rp451.061.511,68.
 - Dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp24.468.012.202,87 yang terdiri dari dana pengembalian dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp24.219.632.050,87, dan dana jasa giro setelah dikurangi administrasi sebesar Rp238.380.152.

Pada LKPP Tahun 2010, dana *Debt Nature Swap* disajikan pada Dana Bergulir. Karena dana tersebut sudah tidak digulirkan kembali maka pada LKPP Tahun 2011 disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

- 2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp3.617.700.000,000 yang merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

Endowment Fund (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada Bagian Anggaran 999.03. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan, dinyatakan bahwa BLU di bidang pendidikan yang mengelola DPPN adalah satuan kerja (satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

Pada LKPP Tahun 2010, dana pengembangan pendidikan nasional ditetapkan sebagai bagian dari Aset Lain-lain. Pada LKPP Tahun 2011, dana pengembangan pendidikan nasional direklasifikasi menjadi Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

- 3) Setoran dividen PT Sarinah sebesar Rp1.361.709.888,90.

Setoran dividen PT Sarinah oleh Bank Mandiri disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya dengan nomor rekening 502.000.002, dimana seharusnya disetorkan ke rekening kas umum negara 502.000.000.980. Berdasarkan hal tersebut, setoran dividen sarinah tersebut tertampung terlebih dahulu pada Rekening Pemerintah Lainnya, dan akan dilaporkan sebagai pendapatan dan dapat digunakan sebagai kas pemerintah setelah dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara.

- g. Dana sebesar Rp6.367.305.761 pada BA 999.08 merupakan dana devisa berupa LIC yang belum dicairkan oleh pihak ketiga pada Kementerian Pertahanan yang sumber dananya berasal dari BA 999.08.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Dana Kelolaan BLU yang
Belum Digulirkan
Rp19,32 triliun

8. Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp19.320.332.310.233 dan Rp18.459.000.085.715 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	10.352.269.122.760	12.878.500.000.000
2. Kementerian Kehutanan	2.010.359.132.948	2.014.116.107.640
3. Kementerian Koperasi dan UKM	644.504.967.842	295.810.000.000
4. Kementerian Perumahan Rakyat	2.381.863.866.849	2.436.216.189.364
5. Kementerian Pekerjaan Umum	3.931.335.199.836	834.357.792.711
Jumlah	19.320.332.310.233	18.459.000.085.715

Dana kelolaan pada masing-masing BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Kelolaan pada Kementerian Keuangan berada di BLU Pusat Investasi Pemerintah yang disimpan pada rekening giro dan deposito, dengan rincian (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	953.471.216
2. Giro di Bank BRI (Geothermal)	500.000.000
3. Giro Dollar AS di Bank BRI*	1.815.651.544
4. Deposito BRI (9 Bilyet)	4.245.000.000.000
5. Deposito Bank Mandiri (5 Bilyet)	2.098.000.000.000
6. Deposito BTN (5 Bilyet)	800.000.000.000
7. Deposito BNI (4 Bilyet)	698.000.000.000
8. Deposito Bank Bukopin (6 Bilyet)	1.215.300.000.000
9. Deposito Bank Sumut (1 Bilyet)	459.300.000.000
10. Deposito Bank B. B. (2 Bilyet)	578.000.000.000
11. Deposito Bank Bukopin Syariah (1 Bilyet)	11.000.000.000
12. Deposito Bank Muamalat (3 Bilyet)	252.000.000.000
13. Deposito Bank Nagari (1 Bilyet)	3.000.000.000
Jumlah	10.352.269.122.760

2. Dana Kelolaan pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.010.359.132.948 berada di BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang disimpan di 1 rekening Bank BRI.
3. Dana Kelolaan pada Kementerian Koperasi UKM berada di BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM. Dana ini terdapat pada 32 rekening giro sebanyak Rp244.504.967.842, dan 3 rekening deposito sebesar Rp400.000.000.000.
4. Dana Kelolaan pada Kementerian Perumahan Rakyat berada di BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dengan sebagai berikut (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. BTN	28.752.277
2. BTN Syariah	7.102.056
3. BUKOPIN	2.288.472
4. Mandiri	1.000.000
5. Bank Riau Kepri	278.732.600
6. Bank Riau Kepri Syariah	1.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

7. Bank Sumut	1.271.785.664
8. Bank Sumut Syariah	350.687.250
9. Bank Kaltim	1.891.413.500
10. Bank Sumsel Babel	103.107.449
11. Bank NTT	88.664.652
12. Bank DIY	51.889.700
13. BNI	196.334.003
14. BUKOPIN	660.000.000
15. BUKOPIN	1.049.220.000.000
16. BTN	404.860.000.000
17. BTN	1.670.000.000
18. BTN	8.870.000.000
19. BTN Syariah	260.790.000.000
20. BNI Syariah	1.460.000.000
21. Mandiri	00.000.000.000
22. Mandiri	50.000.000.000
23. BRI	50.000.000.000
24. Penerimaan dari pengalokasian rekening Cera Kelambaan	34.770.774
Total	2.381.803.888.848

5. Dana Kelolaan pada Kementerian Pekerjaan Umum berada di BLU Bidang Penilaian Sekretariat BPJT. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Penilaian Sekretariat BPJT adalah (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. Giro Bank Mandiri Acc. No. 12810114815183	7.486.448.875
2. Giro BRI Acc. No. 70701133-01-000751-31-3	21.723.446.440
3. Giro BRI Acc. No. 5522522235	11.056.271.431
4. Deposito Bank Mandiri	966.000.000.000
5. Deposito BNI	150.000.000.000
6. Deposito BTN	200.000.000.000
7. Deposito BRI	2.326.000.000.000
8. Deposito BRI Syariah	253.000.000.000
Jumlah	3.931.335.199.836

9. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan
Rp75,37 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp75.371.634.076 dan Rp71.135.792.697 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia.

10. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp150,51
triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp150.508.980.296.216 dan Rp68.224.330.326.991. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2011 tersebut berupa tanah dengan luas 667.919.254 m² sebesar Rp14.362.284.169.984 yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebagai hasil inventarisasi terhadap 44 KKKS, dan aset lain non tanah sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rp136.146.696.126.232 berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian pada 76 KKKS.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2011 disajikan pada **Daftar 20**.

Terdapat aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011, yaitu:

1. Aset sumur yang tidak digunakan sebanyak 623 sumur pada 19 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.119.972.096.205.
2. Aset *Subsequent Expenditure* sebanyak 13.897 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.345.555.350.377.
3. Aset Kondisi Rusak Berat 21.505 item pada 52 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.313.308.913.398.
4. Aset yang dalam proses penghapusan pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura *Offshore* (dh. Kodeco Energy) senilai Rp.927.406.395.
5. Aset Non Tanah sejumlah 368 item pada 5 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.382.453.216.163.
6. Aset perolehan di atas tahun 2011 52 KKKS senilai USD2.383.329.180 belum dimasukkan dalam Neraca.
7. Aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 209 item dengan nilai perolehan negatif sebesar USD24.019.980 yang merupakan koreksi atas nilai perolehan aset.

11. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp67,54 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp67.543.984.466.405 dan Rp29.203.047.197.602 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2011 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Pinjaman yang Diberikan	7.585	35.465.120.480.776
Tagihan PKPS	23	29.606.876.725.368
Aset Non Inti-Properti	1.643	1.981.229.805.153
Aset Non Inti-Inventaris	36.985	12.135.475.108
Penempatan Antar Bank dan Nostro	n.a.	478.622.000.000
Jumlah		67.543.984.466.405

Termasuk di dalam Aset Eks BPPN tersebut adalah tagihan Penyelesaian Kawajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp29.606.876.725.368 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)*, *Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA)*, dan piutang BPPN kepada eks PSP Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan *Bank Take Over* (BTO) II dalam perjanjian Akta Pengakuan Uang (APU).

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 21**.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya
Rp14,76 triliun

12. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp14.762.445.010.365 dan Rp0. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Otorita Batam	13.922.723.215.421	-
2. Taman Mini Indonesia Indah	42.277.377.168	-
3. Otorita Asahan	746.947.319.389	-
4. BP Gedung Manggala Wanabakti	21.352.889.643	-
5. Yayasan Gedung Veteran	11.120.585.877	-
6. Badan Amil Zakat	16.313.704.645	-
7. Badan Wakaf Indonesia	1.709.818.222	-
Jumlah	14.762.445.010.365	-

Pada LKPP Tahun 2010, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran dilaporkan pada Investasi Non Permanen Lainnya. Nilai yang disajikan pada Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya tersebut merupakan nilai ekuitas.

13. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp105,59
triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp105.992.977.283.250 dan Rp109.579.037.246.507 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp86.808.739.814.116, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp105.992.977.283.250 dikurangi penyisihan atas piutang pada BA 999.04 sebesar Rp19.184.237.469.134. Berikut rincian Aset Lain-lain (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. K/L	36.908.907.616.802	56.966.506.583.499
2. BA BUN 999.03	142.127.657.545	1.000.000.000.000
3. BA BUN 999.04	19.419.108.122.985	2.934.591.997.850
4. BA BUN 999.08	46.701.991.689	30.415.353.808
5. BA BUN 999.99	49.476.131.894.229	48.647.523.311.350
Nilai Bruto	105.992.977.283.250	109.579.037.246.507
Penyisihan pada BA 999.04	(19.184.237.469.134)	-
Nilai Bersih	86.808.739.814.116	

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp36.908.907.616.802. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Daftar 19**.
2. Aset lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp142.127.657.545 terdiri dari:
 - a. Piutang PNBP berupa dividen sebesar Rp99.272.957.696.
Piutang Dividen yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun terdiri dari pokok sebesar Rp70.002.808.923 dan denda sebesar 29.270.148.773.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Piutang ini merupakan piutang pada 6 BUMN, yaitu PT Pengelolaan Daerah Industri Batam, PTPN IX, Perum Perumnas, PTPN II, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V.

- b. Reklasifikasi dari dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.206.756.931.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Program PUPTSK tersebut adalah Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI), Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI), Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS), dan Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

- c. Aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp30.647.942.918
Piutang pada Kementerian Perindustrian merupakan piutang atas program dana bergulir yang pengelolannya dilakukan oleh LPT Indag. Sampai dengan 31 Desember 2011, piutang pada LPT Indag yang telah diserahkan kepada KPKML adalah sebesar Rp5.583.933.590 dan yang belum diserahkan ke KPKML adalah sebesar Rp25.064.009.328.

3. Aset Lain-Lain BA BUN 999.04 per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp19.419.108.122.985, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp234.670.653.851 berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.419.108.122.985 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp19.184.237.469.134. Rincian Aset lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut:

- Aset Lainnya RDI sebesar Rp18.462.464.846.746 yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Tunggakan yang akan dilakukakan melalui restrukturisasi dan piutang yang tertunggak lebih dari satu tahun	10.187.767.606.715
2. Tunggakan dalam proses PMU	44.707.776.045
3. Tunggakan macet dari tunggakan B30330-ECL	2.139.723.103.734
4. Tunggakan Eks-Timor Timur	6.306.184
5. Tunggakan koasuransi	11.169.766.338
Nilai Bruto	18.462.464.946.746
Penyisihan	(19.184.237.469.134)
Nilai Bersih	66.205.991.950

- Aset Lainnya Kredit Program Minn Subsidi sebesar Rp936.623.176.238, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. P3 Perencanaan	307.969.001.305
2. UPP Perkotaan	224.568.306.783
3. Pelanggaran	67.279.441.673
4. Kredit Lanjut Pedesaan	2.068.612.500
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000
6. Dana Cadangan Risiko	100.560.171.016
7. Dana Jaminan Ulang	49.624.352.739
8. Dana Kelolaan	4.342.720.062
9. Dana Risiko	15.724.678.088
Nilai Bruto	936.623.176.238
Penyisihan	(768.018.513.945)
Nilai Bersih	168.604.662.293

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 sebesar Rp46.701.991.689 berada di beberapa K/L atau lembaga sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Pertanian	-	550.074.000
2. Kementerian Perhubungan	-	9.403.159.995
3. LPP TVRI	4.129.603.585	343.084.000
4. LPP RRI	26.787.899.211	4.352.223.463
5. Otorita Batam	15.766.812.350	15.766.812.350
6. Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	37.677.543	-
Jumlah	46.701.991.689	30.415.353.808

5. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp49.476.131.894.229, terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. PT PPA (Persero)	2.644.490.527.174	2.614.411.741.232
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.484.449.098.120	1.749.873.770.941
3. Aset eks Pertamina	43.984.876.106.228	44.283.237.799.177
4. Piutang Migas	1.362.316.162.707	-
Jumlah	49.476.131.894.229	48.647.523.311.350

- 1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp2.644.490.527.174 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Daftar 22**.
- 2). Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.484.449.098.120 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mulai aset tersebut selama tahun 2011 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi Kurang		Saldo Akhir	
		Uraian	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	Aset Kredit	294	100.061.417.840	7	34.367	287	100.061.274.281
2	Aset Properti	3.79	1.627.676.051.720	27	236.424.621.164	3.162	1.222.286.632.666
3	Sisal Berharga	0	8.657.242.200	-	-	0	8.657.242.200
4	Aset Seleksi dan Jait	21	22.492.049.067	-	-	21	22.492.049.067
	Jumlah	3.084	1.749.873.770.841	34	266.424.621.221	3.468	1.484.449.098.120

- 3). Aset eks Pertamina sebesar Rp43.984.876.106.228 merupakan nilai aset sebagai akibat penutupan Neraca Pembukuan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas:
- a. Aktiva Tetap LNG BADAQ-Bontang Rp16.302.447.401.562 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembangunan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan *default* atas pembayaran tersebut sangat kecil.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Arun berdasarkan hasil penilaian DJKN per 17 Maret 2011 dan kilang LNG Badak hasil penilaian DJKN per 12 Nopember 2011. Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKML Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana.

- b. Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 1 lokasi dengan nilai sebesar Rp15.379.053.000 di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat yang telah dinilai oleh Tim Penilai DJKN.
- c. Aset Eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001:

Aset Eks PT Pertamina yang tidak disajikan dalam LKPP Tahun 2011 adalah Aset yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001 karena belum dilakukan IP. Terhadap aset ini Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Isu-Isu Penting Pertamina, Pertamina diminta untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tersebut. Hasil inventarisasi dan penilaian aset dimaksud telah dimintakan kepada PT Pertamina dengan surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor 3865/KN/2010 tanggal 1 Juli 2010, namun PT Pertamina belum menyampaikan rincian aset hasil inventarisasi, melainkan masih berupa pengelompokan aset.

Aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tersebut dikenakan sewa karena Pertamina EP dalam hal ini selalu KKKS. Pihak PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 1105/CDD/00/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 mengenai permohonan PT Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas penggunaan BMN berupa aset eks KKKS Pertamina atas sebagian dari BMN senilai Rp16.226.357.000.000 dan kemudian telah disetujui permohonan permohonan sewa tersebut oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang menjelaskan bahwa Pemerintah menyetujui usulan Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas sebagian aset yang digunakan oleh Pertamina EP.

Kemudian berdasarkan surat Nomor S-533/KN/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16.226.357.000.000, dijelaskan bahwa pihak PT Pertamina telah membukukan Beban Sewa atas peralatan yang harus disewa pada Laporan Keuangan Audited PT Pertamina (Persero) tahun 2003 sampai dengan 2009. Namun pihak PT Pertamina sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atas nilai sewa tersebut kepada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

negara, sehingga Pemerintah meminta PT Pertamina untuk dengan segera menyetorkan beban sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang (Kode Akun 423151). Namun pihak Pertamina (Persero) belum dapat melakukan pembayaran karena belum adanya kontrak perjanjian sewa menyewa antara pemerintah dengan Pertamina (Persero). Saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian atas permasalahan ini.

d. Aset Eks PT Pertamina berupa 9 (sembilan) Aset Tetap sebesar Rp395.227.143.177 terdiri dari:

(1). Aset di Jalan Abdul Muis 68:

Menteri Keuangan dengan surat Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 telah memutuskan penggantian sewa atas penggunaan sebagian aset di Jl. Abdul Muis 68 untuk SPBU COCD Pertamina. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga telah menyampaikan surat permintaan kepada PT Pertamina c.q. Pertamina Retail (untuk SPBU COCD Pertamina) dan kantor PT Mitra Tours & Travel sebagai pengguna BMN agar melakukan penyetoran uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara.

(2). BMN lain yang digunakan oleh Pertamina (Bandung, Rawamangun, dsb):

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyampaikan surat permintaan kepada PT Pertamina agar melakukan penyetoran uang sewa BMN ke Rekening Kas Umum Negara sebagai kompensasi atas digunakannya BMN dimaksud dalam kegiatan operasional Pertamina.

(3). Aset di Jalan Teruyung yang digunakan Jakarta Internatunal School (JIS):

Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada JIS nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 bahwa usulan JIS untuk mendapatkan diskon tarif sewa sebesar 80% dari nilai sewa tanah belum dapat disetujui. Sewa BMN yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp118.275.283.825. Pihak JIS hanya bersedia melakukan pembayaran sewa Rp23.655.056.765 sebagai niat baik untuk melanjutkan pemanfaatan BMN tersebut sambil menunggu penetapan tarif definitif. Pada tanggal 4 Oktober 2011, JIS menyampaikan permohonan pembayaran sewa 50% dari tarif PMK 98/2007 dengan pembayaran tahunan. Pada tanggal 11 Januari 2012, Direktorat Jenderal Keuangan Negara menyampaikan usulan penyelesaian:

- Sewa periode 1 Mei 2008 - 30 April 2012, JIS membayar sewa sebesar Rp94.820.227.080 (sesuai 98/PMK.06/2007).
- Dalam hal JIS hanya mampu membayar 50%, sisa tagihan sewa akan diserahkan penagihannya ke PUPN untuk dicicil sesuai kemampuan JIS.
- Sewa 1 Mei 2012 - 30 April 2017, sesuai ketentuan PMK Tarif Sewa, yaitu Tarif 50% untuk Lembaga Pendidikan Asing yang Nirlaba (Revisi RPKM Tarif Sewa sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan).

Terhadap permasalahan ini, Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat kepada Presiden untuk meminta persetujuan pemberian keringanan (dispensasi) tarif sewa BMN oleh JIS.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Aset Eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001 dan berupa 9 (sembilan) Aset Tetap sebesar Rp395.227.143.177 belum dilakukan IP.

- 4). Aset Lain-Lain berupa Piutang Migas sebesar Rp1.362.316.162.707 merupakan piutang jangka panjang yang berasal dari reklasifikasi piutang migas jangka pendek pada satker PNBK Khusus DJA. Aset tersebut berasal dari saldo piutang TPPI tahun 2010 yang direklasifikasi berdasarkan skema pembayaran oleh TPPI melalui cicilan sebesar USD1,5 juta per bulan yang disepakati dalam *Amandement Sales Agreement*.

C.2.30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya
Rp19,97 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp19.970.874.008.883 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	157.010.079.393
2. Penerimaan Pinjaman	232.701.379.846
3. Piutang Jangka Panjang	396.925.080.510
4. Aset Lain-lain	19.184.237.469.134
Jumlah	19.970.874.008.883

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp157.010.079.393 dapat dilihat pada Daftar 18.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerimaan Pinjaman sebesar Rp232.701.379.846 merupakan Penyisihan Penerimaan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang sebesar Rp396.925.080.510 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Kementerian Kehutanan sebesar Rp382.032.632.833 dan pada Piutang Jangka Panjang BA 999.04 sebesar Rp14.892.447.677.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp19.184.237.469.134 merupakan Penyisihan Aset Lain-lain pada BA 999.04.

C.2.31. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp1,76 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.755.574.696.265 dan Rp1.575.434.547.871 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010)	Transaksi Tahun 2011		31 Desember 2011
		Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 10% Gaji PNS	1.205.644.020.549	18.207.157.999.899	18.122.850.021.019	1.390.649.005.229
PFK 2% Gaji Terusan	(3.338.330.078)	4.398.070.716	3.340.112.178	(2.278.071.645)
PFK 2% Iuran (Ias, Praseda)	241.895.007.439	2.187.163.834.328	2.030.704.140.102	318.289.796.054
PFK 2% As. Bekerja/Pekerja PTT	5.298.012.649	11.720.204.894	12.088.157.469	4.021.120.054
PFK 2% Asuransi TM/Polisi	66.802.188	0.248.703.216	0.800.478.090	(563.661.692)
PFK Lain-Lain	28.203.770.468	382.412.080.403	280.709.777.027	29.023.045.836
PFK Bulang	(2.135.080.035)	221.869.624.310	202.894.625.025	17.058.519.295
Jumlah	1.583.884.118.478	19.963.963.398.524	18.832.277.812.757	1.766.674.936.268

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Perbedaan posisi saldo akhir tahun 2010 pada LKPP Tahun 2010 dengan saldo awal tahun 2011 terjadi karena ada koreksi penambahan Penerimaan PFK eks PNS PT KAI sebesar Rp8.449.571.069 dan koreksi PFK Penutupan Rekening sebesar Rp538.

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp31,78 triliun**C.2.32. Utang Kepada Pihak Ketiga**

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp31.780.634.369.020 dan Rp31.370.392.714.561 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
K/L	8.854.090.097.568	2.671.573.478.397
BUN	22.926.544.271.452	28.698.819.236.164
Jumlah	31.780.634.369.020	31.370.392.714.561

- Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp8.854.090.097.568 antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 23**.
- Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp22.926.544.271.452, terdiri dari (dalam Rp):

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
BA 999.05	18.292.725.677.411	15.798.435.847.230
BA 999.06	3.495.984.368.048	8.709.596.834.582
BA 999.99 (Transaksi Khusus)	-	3.551.726.799.482
Utang terkait Retur SP2D	1.137.834.225.993	639.058.754.870
Jumlah	22.926.544.271.452	28.698.819.236.164

- Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada penda penerima sebesar Rp18.292.725.677.411. Dari jumlah utang tersebut, sebesar Rp9.505.740.673.161 merupakan kewajiban terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan yang dananya masih disimpan pada Rekening Cadangan. (*Lihat Catatan C.2.29*)

Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp18.292.725.677.411, adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Kurang Salur DBH BP PBB 2009, 2010, dan 2011	12.085.015.695
2.	Kurang Salur DBH PBB TA 2011	204.829.999.242
3.	Kurang Salur DBH PBB TA 2010	46.952.747.492
4.	Kurang Salur DBH BPHTB TA 2010	230.813.021.056
5.	Kurang Salur DBH CHT 2010	46.726.348.606
6.	Dana Cadangan TA 2011	9.505.740.673.161
7.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Migas	3.837.974.305.181
8.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Pertambangan Umum	700.000.145.345
9.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Kehutanan	24.470.448.544
10.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Panas Bumi	24.569.568.252

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

11.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Perikanan	6.476.333.602
12.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH PPh TA 2008-2010	2.679.054.626.378
13.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH Pajak TA 2011	871.438.363.103
14.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH CHT TA 2011	91.584.683.712
Total		18.292.725.877.811

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.495.984.368.048, diantaranya berupa:

- Utang Kepada Pihak Ketiga pada BNPB sebesar Rp3.156.450.194.500 merupakan dana yang akan disalurkan kepada BPBD atau Instansi yang menangani bencana tahun 2011.
- Utang Kepada Pihak Ketiga pada Sekretariat Negara sebesar Rp339.296.000.000 berupa utang pembayaran termin III dalam rangka pengadaan Pesawat Keproskieren B6J-2.
- Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP TVRI dan LPP RRI sebesar Rp120.128.875 dan Rp104.030.673.
- Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP RRI sebesar Rp14.014.000 merupakan kekurangan rapal beras.

c. Utang pada BA 999.99 (Tanpaaksi Khusus) berada di BAPERTARUM tidak diajukan lagi dalam neraca. *Lihat Catatan Peringat Lainnya.*

d. Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Retur SP2D merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp1.137.834.225.883. Jumlah ini berasal dari Utang s.d Tahun 2010 sebesar Rp228.178.119.185 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp5.156.956.594.762 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp4.247.596.582.982, dan utang kepada pihak ketiga yang disetor ke rekening retur yang berasal dari retur SP2D karena kesalahan nama dan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D sebesar Rp296.095.018. *Catatan D.2.2.* Pada tahun 2010, Utang terkait Retur SP2D terdapat pada Rekening BUN di BI dan Rekening Retur.

C.2.33. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp704.437.258.982 dan Rp3.547.727.872.825 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyeter namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
SPM-OP yang belum diterbitkan SP2D-nya pada Kementerian Keuangan	704.320.853.776	328.105.858.431
Kelebihan atas pembayaran Jasa Navigasi oleh PT Adrial Lines pada Kementerian Perhubungan	116.103.368	-
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Agama	501.818	-
Kelebihan Pendapatan Dividen Interim BUMN (BA 999.03)	-	3.218.622.014.394
Jumlah	704.437.258.982	3.547.727.872.825

Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Rp704,44 miliar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Kelebihan Pendapatan Dividen Interim BUMN (BA 999.03) untuk tahun 2011 disajikan sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
Rp106,78 triliun

C.2.34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp106.777.089.696.825 dan Rp88.286.391.827.798 merupakan utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	48.296.753.806.497	48.875.144.953.748
BA 999.08	-	92.000.000.000
Subtotal	48.296.753.806.497	46.967.144.953.748
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	58.344.807.418.456	41.292.929.030.085
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	136.658.235.872	26.240.423.965
Utang pada PDLRI	70.236.000	77.420.000
Subtotal	58.460.335.890.328	41.319.246.874.050
Jumlah	106.777.089.696.825	88.286.391.827.798

Bagian Lancar Pinjaman pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2010 sebesar Rp92.000.000.000 terdapat pada Sekretariat Negara untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tahun 2011, sehingga saldo per 31 Desember 2011 nihil.

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds dan ORI		
Nominal	27.683.468.000.000	22.570.875.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(87.374.007.000)	(38.046.915.000)
Nilai bersih (nilai buku)	27.616.093.993.000	22.534.828.085.000
II. Variable Rate		
Nominal	4.368.483.000.000	6.031.896.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	4.368.483.000.000	6.031.896.000.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus dimoransi	4.184.803.288.456	3.795.739.945.085
Accrued Interest	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	4.184.803.288.456	3.795.739.945.085
IV. ORI		
Nominal	21.028.495.000.000	8.930.895.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	21.028.495.000.000	8.930.895.000.000
V. ZERO COUPON		
Nominal	1.249.000.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	(100.267.884.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	1.148.732.116.000	-
Total SBN (I + II + III + IV + V)	58.344.807.418.456	41.292.929.030.085

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Catatan:

- Fixed Rate Bond terdiri dari 4 seri Fixed Rate Bond;
- DRI terdiri dari 2 seri, yaitu DR1003 dan DR1004;
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004 dan SU-007

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Daftar 24.A.

Bagian Lancar Pinjaman Dalam Negeri merupakan bagian lancar pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT BNI Persero dan PT BRI Persero dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Bagian Lancar Utang pada POLRI merupakan bagian lancar atas utang terkait perolehan kendaraan pada BLU di POLRI.

C.2.35. Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman
Rp21,92 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp21.924.038.335.465 dan Rp20.261.543.289.213 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	19.275.822.333.294	17.691.280.724.779
Utang Bunga Pinjaman LN	2.648.216.002.171	2.570.262.564.434
Jumlah	21.924.038.335.465	20.261.543.289.213

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

Utang Bunga Obligasi
dan pinjaman dalam
negeri

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp19.275.822.333.294 dan Rp17.691.280.724.779 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Fixed Rate Bonds	13.028.508.588.302	11.903.234.814.209
DRI	180.002.432.786	168.952.890.315
SESN	796.615.838.740	658.482.461.220
Variable Rate Bonds	723.777.587.150	1.041.801.480.732
SUP kepada BI	82.027.721.892	82.972.507.868
SEW Valas	4.163.545.829.445	3.914.879.665.620
Pinjaman Dalam Negeri	1.342.833.980	6.714.714
Jumlah	19.275.822.333.294	17.691.280.724.779

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 24.B.

Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.648.216.002.171 dan Rp2.570.262.564.434 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Bilateral	1.233.987.416.238	1.089.068.332.647
Kredit Komersial	59.850.881.093	57.013.852.710
Kredit Ekspor	394.040.640.847	392.096.139.330
Multilateral	960.337.053.893	1.022.084.139.747
Jumlah	2.648.216.002.171	2.570.262.564.434

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Utang Subsidi Rp29,77 triliun

C.2.36. Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp29.767.908.989.742 dan Rp22.161.795.155.886, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Subsidi PSD yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Pelnr, PT KAL, PT Pos)	4.221.221.030.818	3.899.013.047.361
Utang Subsidi Listrik	12.101.668.183.781	9.298.746.506.021
Utang Subsidi BBM dan LPG	8.966.000.950.449	5.229.785.718.162
Utang Subsidi Pupuk dan Berih	4.077.250.819.181	3.524.396.273.598
Utang Subsidi Bunga Kredit Program KLEB	401.767.308.503	189.883.610.743
Jumlah	29.767.908.989.742	22.161.795.155.886

Dari Utang Subsidi per 31 Desember 2011 sebesar Rp29.767.908.989.742, sebesar Rp8.895.590.963.425 dananya sudah dicairkan dari Kas Negara namun belum dibayarkan dan masih disimpan pada Rekening Cadangan. (Lihat Catatan C.2.29)

Utang SBN Jangka Pendek Rp39,41 triliun

C.2.37. Utang SBN Jangka Pendek

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp39.408.181.897.000 dan Rp29.235.009.035.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sampai akhir tahun 2011, terdapat 17 (tujuh belas) seri SPN dan 2 (dua) SBSN. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam Daftar 25.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp8,64 triliun

C.2.38. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.639.914.082.680 dan Rp119.116.551.668 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2011 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.040.228.256.095 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi.

Termasuk dalam Pendapatan Diterima di Muka adalah penerimaan dividen interim BUMN sebesar Rp2.318.040.768.528, yaitu pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. PT Freaport	1.761.137.250.000
2. PT Soctin Indonesia	101.807.134.500
3. Penunng Pegadalan (Persero)	150.000.000.000
4. PT Bukit Asam (Persero)	154.982.132.750
5. PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	150.104.251.278
Jumlah	2.318.040.768.528

Rncian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Daftar 23.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp5,69 triliun

C.2.39. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

sebesar Rp5.687.100.837.136 dan Rp4.786.549.847.266, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. MA	3.000.000	19.618.900
2. Kementerian Pertahanan	35.170.771.795	5.448.966.363
3. Kementerian Hukum dan HAM	9.578.250	-
4. Kementerian Keuangan	4.155.000	4.155.000
5. Kementerian Pertanian	18.000.000	52.000.000
6. Kementerian Pendidikan Nasional	33.980.928.430	-
7. Kementerian Kesehatan	580.449.931	688.273.071
8. Kementerian Agama	36.373.688	4.042.740
9. Kementerian Kehutanan	-	2.500.000.000
10. Kementerian Pekerjaan Umum	14.766.663.694	10.975.304.123
11. Dewan Ketahanan Nasional	107.425.414	22.006.020
12. Perpustakaan Nasional RI	-	13.654.600
13. BKKBN	10.456.764	-
14. KPU	6.699.188	544.180
15. Kementerian Perumahan Rakyat	1.333.290	-
16. BNP2TKI	-	15.538.380
17. BPLS	29.321.813.475	30.879.257
18. BA 999.03	39.174.191.965	40.000.000.000
19. BA 999.08	-	32.279.789.182
20. BA 999.99	212.347.602.839	-
21. Kewajiban terkait Rekening Migas	5.321.563.393.453	4.694.495.095.450
Jumlah	5.687.100.837.136	4.786.549.847.266

Utang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 merupakan Utang *Promissory Notes* yang terkait dengan pernyataan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca. *Promissory Notes* sebesar Rp39.174.191.965 adalah yang akan dibayarkan kepada *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* pada tahun 2012.

Utang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2011 sebesar Rp212.347.602.839 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. rekening droping penerimaan pers ur ke PT Taspen, November 2011	534.6878.490
2. rekening droping penerimaan pers ur ke PT Taspen, Desember 2011	167.787.041.341
3. nilai jasa/terima yang akan dibayarkan	151.765.876.308
Jumlah	212.347.602.839

Kewajiban terkait Rekening Migas (No.600.000411.980) 31 Desember 2011 sebesar Rp5.321.563.393.453 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411.980 per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.237.138.752.226. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp5.321.563.393.453 dan sisanya sebesar Rp915.575.358.773 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	2.311.480.414.804	1.461.702.617.856
DMD Fee dan Fee lainnya	1.049.837.098.783	379.216.579.858
DMD Fee PT Pertamina EP	811.426.338.364	1.994.285.015.542
Underlying KKKS	574.361.770	6.019.436.827
Reimbursement PPN	957.384.581.751	839.199.801.438
PORD	3.911.179.881	10.005.175.358
Retur atas penyelesaian kewajiban kontraktual pemerintah yang belum dibayarkan kembali	-	4.066.668.771
PBB Migas	186.889.438.000	-
Jumlah	5.321.563.393.453	4.664.485.085.460

Utang Jangka Panjang
DN SBN Rp1.085,32
triliun

C.2.40. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.085.324.545.750.551 dan Rp987.172.961.936.007 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2011 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp889.420.622.052.551 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp195.903.923.698.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rpi):

Jenis SBN	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	448.842.288.000.000	377.152.742.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(4.169.638.225.000)	(5.646.008.628.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	442.672.648.775.000	371.506.733.371.000
II. ORI		
Principle Outstanding	21.989.875.000.000	31.741.370.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	21.989.875.000.000	31.741.370.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
Principle Outstanding	1.263.000.000.000	2.512.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(104.765.143.000)	(373.721.118.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	1.158.234.857.000	2.138.278.881.000
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	130.694.933.000.000	138.763.416.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	130.694.933.000.000	138.763.416.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Principle Outstanding	240.451.634.074.551	244.636.437.364.007
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	240.451.634.074.551	244.636.437.364.007
VI. SBSN		
Principle Outstanding	52.552.970.000.000	38.489.850.000.000
Unamortized Premium (Discount)	300.326.346.000	55.583.479.000
Nilai Bersih (Nilai Buku)	52.853.296.346.000	38.555.433.479.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	889.420.622.052.551	825.341.689.895.007
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
Principles Outstanding	207.278.012.102.053	178.900.327.248.903
Accrued Interest	(11.648.212.102.093)	(14.824.427.246.903)
Net Unamortized Premium (Discount)	274.123.698.000	(144.607.158.000)
Subtotal Obligasi Negara dalam Valas	195.903.923.698.000	161.531.292.841.000
Total SBN Jangka Panjang	1.085.324.545.750.551	987.172.961.936.007

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 34 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2041.
- ORI terdiri dari 3 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2013.
- *Zero Coupon Bonds* terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 dan 2013.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 14 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, *Zero Coupon Bonds*, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007 dan SRB01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).
- Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar *charge* kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.
- SBSN terdiri dari 9 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2013 – 2036, 6 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2012-2021 dan 2 seri Sukuk Ritel (SR-001 dan SR-002) dengan dengan masa jatuh tempo tahun 2013 -2014.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 12 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 2 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 dan 2020, dan 1 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 26.

C.2.41. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp11.822.231.724.875 dan Rp8.389.364.871.001 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 9 Tahun 2007	1.838.443.806.070
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 14 Tahun 2008	2.450.505.392.359
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 9 Tahun 2009	3.024.845.340.493
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No.11 Tahun 2011	3.432.868.853.874
Jumlah	11.822.231.724.875

Nilai *Unfunded Liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspem per 31 Desember 2011. Pemerintah dapat menyesuaikan besaran *Unfunded Liability* tersebut. Pelunasan *Unfunded Liability* akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

- Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Taspem (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
- Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

Utang Kepada Dana
Pensiun dan THT
Rp11,82 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

*Utang Jangka Panjang
DN Perbankan Rp877,33
miliar*

C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp877.330.765.232 dan Rp367.365.935.506. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (BUMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang tersebut adalah pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT. BNI Persero dan PT. BRI Persero dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Perhitungan saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2010 Jangka Panjang	367.365.935.506
Saldo per 31 Desember 2010 Bagian Lancar	26.240.423.965
Total Pinjaman per 31 Desember 2010	393.606.359.471
Penarikan Pinjaman Tahun 2011	619.382.641.633
Pelunasan Tahun 2011	-
Saldo per 31 Desember 2011	1.012.989.001.104
Bagian Lancar (Disajikan pada Kewajiban Jangka Pendek)	(135.658.235.872)
Utang Jangka Panjang	877.330.765.232

C.2.43. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

*Utang Jangka Panjang
DN Lainnya Rp5,03
triliun*

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.033.082.825.744 dan Rp3.095.222.852.822, yang terdiri dari:

Jenis Utang	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.826.956.396.636	2.826.956.396.636
Kewajiban Kontinjensi atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	-
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	294.198.701.949	268.266.455.986
Jumlah	5.033.082.825.744	3.095.222.852.822

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat No. S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.131 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

• Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu akim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLIB) berupa pembiayaan kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 jalur pula dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *chanceking*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *chanceking* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur tegen *chanceking* ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5,00% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP:XY/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.358,79, terdapat pelunasan BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.868.860.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.223.568.235,33. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar RpRp3.659.191.822.314,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp294.198.701.949 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp105.400.185.359, Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp70.531.073.604, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan POLRI sebesar Rp114.352.000.

- Utang pada Kementerian Luar Negeri merupakan sisa cicilan sewa beli yang belum dibayarkan.
- Utang pada Kementerian Pendidikan Nasional merupakan Utang Jangka Panjang pada UI sebesar Rp64.239.125.494 dan ITB sebesar Rp6.291.948.110.
- Utang pada Kementerian Kehutanan merupakan utang yang timbul berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1731K/Pdt/2006 tanggal 29 November 2007 yang memutuskan Tergugat (Menteri Kehutanan) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp118.153.090.986. Putusan tersebut berdasarkan gugatan dari PT Benua Indah yang kepada Menteri Kehutanan yang menerbitkan keputusan penghentian sementara Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- Utang pada POLRI merupakan utang terkait perolehan kendaraan pada BLU di POLRI.

C.2.44. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp571,88
triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp571.982.048.619.444 dan Rp569.983.008.549.466 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Bilateral	306.805.893.874.544	304.131.160.950.816
Multilateral	197.266.978.813.746	192.151.937.241.884
Kredit Ekspor	63.362.838.534.316	69.553.738.449.152
Kredit Komersial	4.526.337.396.838	4.148.171.907.814
Jumlah	571.982.048.619.444	569.983.008.549.466

C.2.45. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp25,88 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp25.889.179.304.040 dan Rp25.726.322.825.757, dengan rincian (dalam Rp):

	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan <i>green aircraft</i> pesawat kepresidenan	0	339.296.000.000
Utang Promissory Notes		
International Monetary Fund	25.871.090.740.489	25.329.806.542.486

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

International Bank for Reconstruction and Development	-	39.174.191.965
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.292.343.224	10.204.946.838
Common Fund for Commodities	2.623.080.659	2.668.004.800
Subtotal Utang Promissory Notes	25.889.179.304,040	25.387.026.825,757
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	25.889.179.304,040	25.726.322.825,757

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan sebesar Rp339.296.000.000 pada tahun 2011 telah direklasifikasi sebagai bagian dari Utang Kepada Pihak Ketiga.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10
Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes
(Dalam Rp Juta)

Posisi Utang Luar negeri,
SBN, dan PN

Jenis Utang	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancer	48.286.753,81	46.875.144,95	1.421.608,86
Utang LN – Jangka Panjang	571.882.046,62	589.983.008,55	1.999.040,07
Utang Bunga LN	2.648.216,00	2.570.262,58	77.953,44
Total Utang LN	622.827.016,43	619.428.416,06	3.498.602,37
Surat Berharga Negara (SBN):			
Bagian Lancer SBN Rupiah	58.344.607,42	41.292.829,03	17.051.678,39
SPN	30.509.891,90	29.235.009,04	1.274.882,86
SBSN Jangka Pendek Rupiah	8.896.290,00	-	8.896.290,00
SBN Jangka Panjang Rupiah	836.567.325,71	786.786.235,82	49.781.090,09
SBN Jangka Panjang Valas	180.887.600,00	155.987.142,84	24.899.457,16
SBSN Jangka Panjang Rupiah	52.853.296,36	38.555.433,48	14.297.862,87
SBSN Jangka Panjang Valas	14.982.200,00	5.844.160,00	9.138.040,00
Utang Bunga SBN	18.275.822,33	17.691.274,01	584.548,32
Total SBN dan Bunga	1.292.079.833,71	1.075.392.174,92	126.686.658,69
Promissory Notes (PN):			
PN Jangka Pendek	39.174,19	40.000,00	(825,71)
PN Jangka Panjang	25.889.179,30	25.387.026,83	502.152,47
Total PN	25.928.353,50	25.427.026,83	501.326,67

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 11
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)
ACU	279.847.434	266.422.922	13.424.512
AOB	109.582.229	144.585.129	(35.002.900)
AUD	351.410.728	291.288.328	60.142.400
CAD	138.742.057	157.186.495	(18.444.438)
CHF	240.740.150	295.245.679	(54.505.529)
CNY	1.550.083.460	1.428.321.707	121.761.773
DKK	42.745.717	51.754.847	(9.009.230)
EUR	4.429.525.292	5.436.029.192	(1.006.503.900)
GBP	363.482.315	456.110.017	(94.617.702)
JPY	2.307.420.817.502	2.603.746.051.062	(296.325.233.560)
KRW	189.956.918.440	191.059.958.110	(1.103.039.670)
KWD	6.766.800	11.538.000	(4.771.200)
SAR	100.075.674	117.640.333	(17.564.659)
SDR	2.144.885.272	2.154.118.494	(9.233.222)
USD	21.811.471.753	22.927.432.636	(1.115.960.883)
WBD	208.130.040	710.368.276	(504.238.236)

C.2.46. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

SAL Setelah
Penyesuaian Rp58,66
triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2011 dan TA 2010 adalah sebesar Rp58.656.722.496.062 dan Rp52.382.103.135.529. SAL TA 2011 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2011 sebesar Rp98.909.703.335.446, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp39.873.345.073, dikurangi penggunaan SAL sebesar Rp40.319.043.049.000, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar Rp26.186.864.543. Pada TA 2011 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah penyesuaian sebesar Rp45.549.376.508.811 dan selisih kurs sebesar Rp235.078.083.137, sehingga SAL per 31 Desember 2011 setelah selisih kurs adalah sebesar Rp105.324.449.807.891. Sementara itu, SAL menurut fisik adalah sebesar Rp105.341.875.060.003, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp17.425.252.112. Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Saldo Anggaran Lebih TA 2011 dan TA 2010

Uraian	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)
Saldo Awal SAL	98.909.703.335.446	86.522.822.425.799
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	39.873.345.073	261.781.092.126
Penggunaan SAL	(40.319.043.049.000)	(117.347.946.616.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	(205.049.095)	7.566.397.318
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	26.554.437.138	112.445.204.316
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L	(180.523.990)	-
Penyesuaian Rekening Khusus	-	2.924.394.833.970
SAL setelah Penyesuaian	58.656.722.496.062	52.382.103.135.529
SILPA (SILPA) Sebelum Penyesuaian	46.549.376.508.811	44.706.302.847.141
Penyesuaian SILPA (SILPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pembayaran Tahun Lalu	(102.294.746.013)	(168.929.200.391)
Penyesuaian Uang Persewaan	(551.052.742)	159.536.526.423
Penyesuaian Rekening Retur	(2.18.316.851)	241.745.689
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	(52.302)	(1.024.816)
Penyesuaian Dana Tabungan (Backlog) U	-	1.839.450.103.855
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Penyesuaian Kas KPPN	2.12.868.914	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Penyesuaian Transfer	4.176.986	-
Penyesuaian Kas pada BLU	(375.080.590)	-
Penyesuaian Kas di BUN	(13.054.014.611)	-
Total Penyesuaian SILPA	(119.727.289.119)	1.821.297.152.776
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian (A)	46.432.649.228.692	46.527.600.199.917
Saldo Akhir SAL	105.889.371.724.754	96.909.703.335.446
Selisih Kurs		
Selisih Kurs s.d. periode sebelumnya	(1.169.106.908.600)	-
Selisih Kurs Kas di BUN	1.374.044.061.456	(1.143.006.103.019)
Selisih Kurs Kas Hibah Sametera	-	(21.203.833.895)
Selisih Kurs Kas Hibah ESSP	-	(4.097.690.894)
Selisih Kurs Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah	29.340.930.289	-
Selisih Kurs	235.676.083.137	(1.195.106.908.600)
Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs	105.324.448.807.891	97.740.596.426.838
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	48.505.945.107.525	48.437.766.698.025
Rekening BUN di BI	31.557.956.553.628	30.168.618.656.666
Rekening KPPN 2/	11.870.556.947.661	9.218.612.467.732
Rekening Khusus	2.390.016.547.054	2.824.334.833.970
Kas di Bendahara Pengeluaran	292.751.782.959	518.914.873.152
Kas pada BLU yang telah Disahkan 3/	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Kas Hibah Langsung KA, yang telah Disahkan 4/	429.120.562.254	48.185.913.465
Total Fisik Kas	108.135.404.176.346	99.504.004.809.311
Penyesuaian Fisik Kas		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Acet Lainnya	69.678.811.915	60.077.629.666
Utang PFK	(1.755.574.896.285)	(1.575.434.547.871)
Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur)	(1.137.834.225.993)	(226.178.119.195)
Total Penyesuaian Fisik Kas	(2.793.529.110.343)	(1.723.524.837.400)
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	105.341.875.066.003	97.780.469.771.911
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	(17.425.252.112)	(39.873.345.673)

Catatan:

- 1). Penyesuaian Uang Muka BUN pada tahun 2011 tidak dilaporkan sebagai penambah/pengurang SILPA karena sudah diakui sebagai pembiayaan.
- 2). Kas di KPPN termasuk kas yang terdapat di rekening penempatan Rp291.857,48 juta.
- 3). Kas BLU sebesar Rp13.089.016.578.965 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan korreksi saldo awal.
- 4). Kas Hibah Langsung KA, yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung KA, dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

C.2.47. SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.432.649.228.692 dan Rp46.527.600.199.917 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2011 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.698.653.359.415	1.016.730.832.888.817
Belanja Negara	1.294.999.146.475.020	1.063.576.541.020.291
Surplus (Defisit)	(84.399.493.115.610)	(46.845.708.353.474)
Pembiayaan Neto	130.948.889.624.420	91.552.011.400.815
SILPA (SIKPA) Sebelum Penyesuaian	46.548.376.608.811	44.706.303.047.141
Penyesuaian SILPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(102.384.748.513)	(169.829.200.391)
Penyesuaian Uang Persediaan	(551.052.742)	1.59.535.528.423
Penyesuaian Rekening Retur	(216.316.651)	241.745.699
Penyesuaian Dana Talangan (Backlog)	-	1.830.450.103.855

SILPA setelah Penyesuaian Rp46,43 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pendapatan Anggaran Lain-lain	(52.302)	(1.024.810)
Penyesuaian Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Penyesuaian Kas KPPN	212.666.914	-
Penyesuaian Transfer	4.176.986	-
Penyesuaian Kas pada BLU	(375.080.600)	-
Penyesuaian Kas di BUN	(13.064.014.611)	-
Total Penyesuaian SILPA	(116.727.260.118)	1.821.297.162.776
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	46.432.648.226.682	46.527.600.199.917

C.2.48. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya
Rp451,83 miliar

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp451.833.601.148 dan Rp1.540.934.451.110, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04)	180.453.779.979	1.022.507.788.422
Investasi Jangka Pendek pada Kem. Pendidikan Nasional	135.839.486.878	-
Kas lainnya setara kas pada Kem. Koperasi dan UKM	2.690.797.179	-
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SILPA	100.924.694.157	55.685.975.681
Investasi Jangka Pendek BLU	-	30.750.000.000
Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *)	12.626.616.173	362.137.441.936
Koreksi akun dana yang digunakan untuk pembayaran utang jangka pendek - Kementerian Koperasi dan UKM	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.03	1.912.974.670	-
Selisih Kas Lebih (Orang) Tahun ini	17.425.252.112	39.873.345.073
Jumlah	451.833.601.148	1.540.934.451.110

Catatan:

*) Kas Hibah Langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara Kas Hibah Langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang disahkan KPPN.

C.2.49. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp84,57 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp84.574.619.543.073 dan Rp100.141.379.244.383 merupakan akun lawan dari Piutang (setelah penyisihan) dikurangi dengan Uang Muka Belanja selain Persekot Gaji, dan ditambah Uang Muka dari Rekening BUN, dan selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas.

C.2.50. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
Rp59,21 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp59.214.846.453.160 dan Rp36.366.060.681.005 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.51. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp 3,01
triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.810.469.839.673 dan Rp4.210.269.507.402 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNEB karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp):

Akun Lawan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas ¹⁾	2.367.515.293.864	684.810.710.051
Rek. Migas No. 600.000411.990	915.575.358.774	2.613.993.307.333
Rek. Penerimaan Panas Bumi	197.960.188.008	208.604.971.388
Aset Lainnya ²⁾	75.158.978.014	70.416.164.384
Setoran dividen PT Sarinah ³⁾	1.361.709.889	-
Jumlah	3.810.489.839.873	4.210.269.507.402

Catatan:

- 1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jass giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. (lihat Catatan C.2.6)
- 2). Merupakan aset lain-lain BLU PIP Kementerian Keuangan berupa bunga deposito 12 bulanan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp1 triliun sebesar Rp70.000.000.000 dan bunga diterima dimuka dari deposito 1 bulanan Rp70 miliar sebesar Rp5.158.978.014.
- 3). Setoran dividen PT Sarinah oleh Bank Mandiri diletakkan ke Rekening Pemerintah Lainnya dengan nomor rekening 502.000.002, di mana seharusnya diletakkan ke Rekening Kas Umum Negara 502.000.000.990. Berdasarkan hal tersebut, setoran dividen Sarinah tersebut tertampung terlebih dahulu pada Rekening Pemerintah Lainnya, dan akan dipergikan sebagai pendapatan dan dapat digunakan sebagai kas pemerintah setelah dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara.

C.2.52. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp204.483.884.343.763 dan minus Rp149.918.772.353.919. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Total Utang Jangka Pendek	246.444.860.163.115	201.343.960.642.088
Dikurangi:		
Utang PFK	(1.755.574.696.268)	(1.575.434.547.871)
Utang karena Kesalahan Penindahbukan Rekening BUM dan Rekening Retur	(1.137.834.225.993)	(639.059.754.879)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(3.943.863.898.201)	(7.530.524.449.577)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migas)	(5.321.963.393.453)	(4.594.495.095.493)
Utang Subsidi yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Subsidi	(7.523.846.941.346)	(16.144.595.658.372)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	(9.505.740.673.161)	(8.378.050.605.673)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Miryak Tanah ke LPG	-	(1.388.930.389.738)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan	-	(3.551.726.799.482)

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp204,48 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Ases Bersih Bepeteran		
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun		
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	(6.321.674.677.095)	(119.116.551.668)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(3.207.294.640.602)	(7.407.254.636.468)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan		
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPH	(1.166.815.572.907)	-
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan		
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada DAU	(2.077.567.290.329)	-
Jumlah	264.483.884.343.783	149.818.772.353.919

C.2.53. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih
Harus Diserahkan minus
Rp5,32 triliun

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp6.321.674.677.095 dan minus Rp119.116.551.668. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka yang sebesar Rp8.639.914.082.690 dikurangi dengan penerimaan dividen interim BUMN sebesar Rp2.318.040.768.528 dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Keuangan (BLU PIP) sebesar Rp198.637.057 berupa kelebihan pembayaran cicilan pinjaman dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

C.2.54. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih
Harus Diterima Rp1,28
miliar

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.276.453.004.389 dan Rp614.122.632.355 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja sebesar Rp1.279.165.315.147 dikurangi Persekot Gaji pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.712.310.768.

C.2.55. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian
Lancar minus Rp2,80
triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp2.798.692.210.245 dan minus Rp8.282.009.832.937 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(3.207.294.640.602)
Selisih kurs atas Rekening BUN di BI dalam valas *)	235.078.083.137
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	173.524.347.220
Jumlah	(2.798.692.210.245)

Catatan:

*) Selisih kurs ini termasuk Selisih Kurs sampai dengan periode sebelumnya (31 Desember 2010) sebesar minus Rp1.189.108.908.608 dan selisih kurs tahun berjalan untuk Rekening KUN sebesar Rp1.374.844.061.458 dan selisih kurs tahun berjalan untuk Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp29.340.930.289.

C.2.56. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka
Panjang Rp750,03 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp750.030.794.479.804 dan Rp702.836.007.101.463

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.567,97 triliun

C.2.57. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.567.974.174.587.750 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp417,13 triliun

C.2.58. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp417.130.365.123.476 dan Rp246.554.471.882.238 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Jumlah tersebut merupakan akun lawan dari Aset Lainnya dikurangi dengan bagian Aset Lainnya yang merupakan kontra akun dari utang, seperti rekening cadangan, dan selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp1.678,03 triliun

C.2.59. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp1.679.033.615.946.059 dan minus Rp1.498.908.975.231.842 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.103.067.191.066.402	899.024.915.695.136
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	597.871.227.923.484	595.709.331.375.223
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(21.894.803.043.827)	(95.825.271.738.517)
Jumlah	1.679.033.615.946.059	1.498.908.975.231.842

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp20,84 triliun

C.2.60. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp20.841.184.232.370 dan minus Rp90.635.097.545.054 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas *)	(21.894.803.043.827)
Selisih kurs pada aset atas Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	1.053.618.811.457
Jumlah	(20.841.184.232.370)

*) Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp33.542.357.145.880 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar Rp11.647.564.102.053.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.237.138.752.226. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening No. 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2011.

Tabel 13
Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2011 dan 2010

URAIAN	31-12-2011 (Audited)		31-12-2010 (Audited)	
	USD	Rp. Juta	USD	Rp. Juta
I. Saldo Awal	812.887.134,11	7.308.483,40	827.826.488,83	8.718.692,28
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag. Penerimaan	10.181.500.011,17	188.180.968,90	15.012.328.196,80	144.250.197,04
2. Restorasi Kers Pembukuan Kredit (Saldo) B.V.	288.772.216,00	2.334.484,48	-	11.312.460,27
3. Restorasi/Pengembalian karnas saldo rekening B.V.	3.333.278,19	29.410,87	-	-
4. Pengembalian Dana Talangan	-	-	-	-
5. Restorasi Perbelanjaan	-	-	714.029.894,89	311.828,38
6. Penerimaan lain-lain	-	-	4.332.818,86	28.644,86
7. Selisih Kurus Pembukuan Kredit (Saldo)	-	8.090.944,39	-	-
Total Penerimaan	13.465.032.801,36	176.981.828,33	16.839.894.022,39	156.904.130,72
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBM/APSD				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemerintah BO II	2.311.783.034,04	20.270.871,77	2.180.328.832,00	19.286.722,82
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & ABT ke Daerah	9.398.470,35	82.348,95	7.719.818,46	69.419,03
c. Pemembekuan ke Pak. Valas (KUM) No. 600.602411980				
• PPh Migas Buns (M 11111)	2.987.607.000,87	25.941.762,13	2.910.288.110,18	22.852.341,00
• PPh Gas Alam (M 1112)	5.378.248.944,17	47.193.704,93	3.987.151.871,40	36.038.390,02
• Pembelian Minyak Bumi (M 11111)	139.810.400,08	1.301.752,20	787.888.890,00	6.952.373,27
• Pembelian Gas Alam (M 12111)	8.995.486.802,78	82.187.086,32	4.028.832.984,06	40.918.314,80
• Pembelian Migas lainnya (M 2139)	5.271.780,82	40.102,47	16.771.794,09	156.037,20
• PPh Pasal 25 (M 11128)	-	-	-	-
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBM/APSD	16.705.949.124,38	146.849.028,77	13.849.028.706,47	129.300.398,42
2. Pengeluaran non APBM/APSD				
a. Pembayaran PPh ke Kontraktor	826.595.060,75	7.533.872,95	805.313.981,18	7.956.317,58
b. Pembayaran DMD Fee (M 1102) ke	1.058.737.748,19	11.985.167,84	882.290.036,40	7.952.400,00
c. Pembayaran Fee Perjanjian Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Persero)	-	-	147.983.894,22	1.324.946,71
d. Pembayaran Fee / Anggaran BP Migas	186.721.823,48	1.385.024,32	120.982.831,27	1.100.415,71
e. Pembayaran Underlying (M 1102)	191.346.921,48	1.490.329,02	124.797.310,19	1.127.942,04
f. Pengembalian Sisa Dana <i>Write & Care</i> kepada PT Pertamina (Persero)	-	-	-	-
Sub Total Pengeluaran non APBM/APSD	2.940.400.541,82	22.395.384,73	2.081.707.786,44	18.803.136,03
3. Koreksi Pembukuan Debit (Saldo)	288.772.216,00	2.334.416,07	713.898.820,09	304.947,21
4. Koreksi Liure Pembukuan Debit	-	6.493.828,17	-	11.880.091,04
5. Pengeluaran lain-lain (Saldo)	831.784,04	5.886,22	1.085.195,00	9.595,40
6. Administrasi Bank (Saldo)	128,00	2,25	94,00	5,99
7. Restorasi/Pengembalian karnas saldo rekening	3.333.278,19	29.408,77	-	-
Total Pengeluaran	19.646.086.664,23	198.183.178,88	16.748.337.342,87	167.314.334,89
IV. Dampak dari Penerimaan (II - III)	(125.848.862,87)	(18.971.348,55)	(114.853.321,48)	(11.412.693,88)
V. Saldo Akhir (I + II - III)	687.038.271,24	6.237.138,75	812.973.167,35	7.306.000,40

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**Penjelasan:**

- a) Rekening valas No.600.000411980 merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.
- b) Koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia
Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD269,772,216.00 atau setara dengan Rp2.334.484.482.709 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda atau koreksi karena kesalahan posting, yang terdiri dari :
- Koreksi atas *double* pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KKKS sebesar US\$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.019.645.141.120.
 - Koreksi pembukuan karena salah posting oleh BI (seharusnya penerimaan ini tidak masuk ke rekening migas No.600.000411980 karena peruntukannya bulanan sebagai penerimaan migas) yaitu sebesar US\$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.181.662.984.
 - Koreksi atas *double* pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran PPh migas bulan Juli 2011 sebesar USD138,007,911.00 atau setara dengan Rp1.180.657.678.605.
- Atas penerimaan-penerimaan tersebut, telah dikoreksi kembali oleh Bank Indonesia dan menjadi koreksi pembukuan debit sebagaimana dijelaskan pada poin e)
- c) Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening
Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening sebesar USD3,333,274.19 atau ekuivalen Rp29.410.874.996 merupakan transaksi retur atas pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas yang disebabkan karena kesalahan rekening pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:
- Retur pembayaran *reimbursement* PPN Migas sebesar USD3,216,764.91 atau setara dengan Rp28.373.689.574.
 - Retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD116,509.28 atau setara dengan Rp1.037.185.422.
- d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/Debit
Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas No.600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
- e) Pembayaran DMO Fee KKKS
Dalam pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD1,356,737,746.19 atau setara dengan Rp11.985.167.638.753.00 termasuk didalamnya pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina (Persero) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD542,582,127.05 atau setara dengan Rp4.729.970.475.662, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Oktober 2010 s.d Maret 2011 sebesar USD366,651,681.41 yang sebagian diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD353,465,153.21, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN No.600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD353,465,153.21 atau setara Rp3.015.057.756.881
 - Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Juli s.d. Oktober

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

2011 sebesar USD296,715,938.72 yang sebagian diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD189,116,973.84, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas No.600.502411990 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD189,116,973.84 atau setara Rp1.714.912.718.781.

f) Koreksi Pembukuan Debit oleh Bank Indonesia

Adalah pembetulan/jurnal koreksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai tindak lanjut atas koreksi pembukuan kredit sebagaimana dimaksud pada poin b) sebesar USD269,772,216.00 ekuivalen Rp2.324.516.072.015 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas *double* pencatatan/ dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KIKS sehingga perlu didebit kembali atas double pencatatan tersebut yaitu sebesar US\$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.012.793.311.884.
- Koreksi pembukuan karena salah posting oleh Bank Indonesia sebesar US\$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.791.295.423.
- Koreksi atas *double* pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran PPh migas bulan Juli 2011 sebesar USD138,007,911.00 atau setara dengan Rp1.180.657.678.605.

g) Pengeluaran Lain-lain

Pengeluaran lain-lain sebesar USD631,784.04 atau setara dengan Rp5.689.215.280 merupakan pengeluaran pemindahbukuan ke rekening Pajak No.600.500411990 sebagai PPh Uplift (MAP 411126) dalam rangka Sunset Policy (Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2006) atas KIKS BUT Pacific Oil and Gas Jambi Merang Ltd.

h) Administrasi Perbankan

Biaya administrasi perbankan sebesar USD129.50 atau setara dengan Rp2.253.645 merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KIKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

i) Saldo Akhir

Saldo akhir sebesar USD687,818,565.53 atau setara dengan Rp6.237.138.752.225 (ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp9.069/USD), termasuk pendapatan yang ditunda sebesar USD100,967,728.14 dan sisanya sebesar USD586,850,837.39 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2011 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2011.

2. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp197.960.188.008 dan Rp208.604.971.388. Rekening Panas Bumi (No. 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

URAIAN		31 Desember 2011	31 Desember 2010
I.	Saldo Awal ¹⁾	208.804.971.388	190.836.788.899
II.	Penerimaan:		
1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	898.462.528.861	803.357.658.926
2.	Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
	Total Penerimaan	898.462.528.861	803.357.658.926
III.	Pengeluaran:		
1.	Pembayaran PBB Panas Bumi	200.894.653.819	180.258.218.624
2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ²⁾	148.910.184.676	261.346.804.029
3.	Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ³⁾	562.702.273.747	343.786.432.764
4.	Pinjaman untuk Dana Tabungan	-	-
5.	Koreksi Pembukuan debit	-	-
	Total Pengeluaran	909.107.312.242	785.391.456.438
IV.	Kesalahan Penutupan (I - III)	(10.644.783.380)	17.986.787.688
V.	Saldo Akhir (I + II)	197.969.188.008	206.804.971.388

Penjelasan:

- 1) Rekening No. 508.000084980 adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.
- 2) Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp148.910.184.676 adalah Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya pada Tahun 2010.
- 3) Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening KUN sebesar Rp562.702.273.747
- 4) Saldo awal sebesar Rp208.804.971.388 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
 - a. Cadangan pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi kepada Pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Hulu Kamboja, Chevron Geothermal Salak, Ltd, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd dan Dayabumi Salak Pratama, Ltd sebesar Rp204.832.699.830
 - b. Cadangan Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy sebesar Rp3.772.271.558. PBB atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Geodipa Energi belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut.
- 5) Saldo akhir sebesar Rp197.969.188.008 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
 - a. Cadangan untuk pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi tahun 2010 dan 2011 kepada pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero), Chevron Geothermal Salak, Ltd, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd sebesar Rp189.874.992.053.
 - b. Cadangan untuk Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp8.085.195.955 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy yang belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut dengan rincian:
 - 1). PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 sebesar Rp3.772.271.558 dan;
 - 2). PBB pertambangan panas bumi Tahun 2011 sebesar Rp4.312.924.397.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**3. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga**

Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui penerbitan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu:

- PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
- PMK Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Kementerian Keuangan melalui Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu:

- a. Mendata rekening-rekening di 76 (K/L) dan BUN yang berjumlah 46.586 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 9.275 rekening, dan yang masih tidak selesai proses pembahasan/penyelesaiannya adalah sebanyak 3.007 rekening .
- b. Rekening operasional K/L (untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti) yang dikelola oleh K/L per 31 Desember 2011 sebanyak 34.304 rekening. Masih terdapat rekening operasional yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Pada tahun 2011, TPRP ditugaskan untuk terus mencari keterangan terhadap rekening operasional K/L yang belum mendapat persetujuan dari BUN.
- c. Terhadap rekening yang dibekukan sebanyak 3.096 rekening, 195 rekening diaktifkan kembali, 1.344 rekening sudah ditutup dan 1.557 rekening yang masih dibekukan karena belum ada klarifikasi dan permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali. Dari rekening yang masih dibekukan diusulkan ditutup. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, Tim akan segera mengusulkan penutupan terhadap rekening yang masih dibekukan dan tidak mendapatkan tanggapan/respons dari K/L sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- d. Rekening yang diinvestigasi 4.774 rekening, 3.921 rekening dinyatakan telah selesai, dan 853 rekening masih dalam proses, karena belum semua APIP K/L telah tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Rekening pada 76 KL akan segera diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Negara (Dit. PKN) - Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang secara struktural bertugas membina dan memonitor ketertiban KL dalam mengelola rekening Pemerintah agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Penertiban Rekening Pemerintah pada TA 2011 dikhususkan untuk perbaikan/*updating* data; Tindak lanjut terhadap rekening-rekening diinvestigasi; Penyusunan daftar rekening yang telah disetujui; Inventarisasi Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN); Percepatan penyelesaian data rekening pada 43 K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI; dan Pengujian/pengkajian ulang rekening-rekening yang telah diberi persetujuan.

Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2011 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen.

4. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2011 telah dibukukan pada LKKL sebesar Rp440.902.630.297.224. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada Daftar 27.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

5. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2011, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp3.025.983.193.491, dengan rincian (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL *)	Data LBMN *)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Tanah	798.895.004.832.352	799.062.941.390.530	(167.936.758.178)
Peralatan dan Mesin	181.679.638.279.745	182.424.429.499.802	(744.791.180.057)
Gedung dan Bangunan	150.137.352.395.416	150.963.232.507.670	(825.880.152.254)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	344.701.632.477.202	346.443.268.369.466	(1.741.635.092.264)
Aset Tetap Lainnya	11.466.797.336.012	11.607.019.663.044	(140.222.545.032)
Konstruksi Dalam Pegejaan	63.692.939.001.971	63.096.864.943.530	596.274.068.441
Jumlah	1.550.573.364.884.708	1.553.599.556.954.060	(3.026.197.469.366)

*) tidak termasuk aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias dan BA BUN.

Penjelasan selisih:

1. Selisih pada Tanah, antara lain:

- Tanah pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp83.763.886.845 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pmda.
- Tanah pada LBMN Bappenas sebesar Rp83.647.500.000 direklasifikasi sebagai Aset Lainnya pada Neraca karena merupakan aset kemitraan.

2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:

- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Kesehatan sebesar Rp596.298.315.540 dicatat sebagai KDP pada Neraca.
- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp148.120.150.190 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pmda.

3. Gedung dan Bangunan, antara lain:

- Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp924.308.143.329 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pmda.
- Gedung dan Bangunan pada Neraca Kementerian Keuangan sebesar Rp92.620.304.120 masih dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya dalam LBMN.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

- Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.081.596.037.491 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pmda.
- Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian ESDM sebesar Rp659.004.283.359 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pmda.

5. Aset Tetap Lainnya, antara lain:

- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp49.369.926.181 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pmda.
- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Keuangan sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rp92.620.304.120 dicatat sebagai Gedung dan Bangunan dalam Neraca.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:

- KDP sebesar Rp596.298.315.540 pada Neraca Kementerian Kesehatan dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada LBMN.
- KDP pada LBMN Kementerian Diknas sebesar Rp154.827.447.604 tidak tercatat pada Neraca.

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK RI, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- b. Kementerian Perhubungan berupa Dua Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Aset bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok:
 - Koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Konvensional sebanyak 27.910 km linier.
 - Arsip Kartografi dan Kearsitekturan sebanyak 110.736 lembar.
 - Arsip Film sebanyak 58.800 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel.
 - Arsip Video sebanyak 30.250 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.369 kaset.
 - Arsip Optical Disc sebanyak 427 keping.
 - Arsip foto sebanyak 341.131 lembar (negatif foto) dan 200.000 lembar (positif foto).
 - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong) dan Patung Kepala Sapi.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:

- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb).
- Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

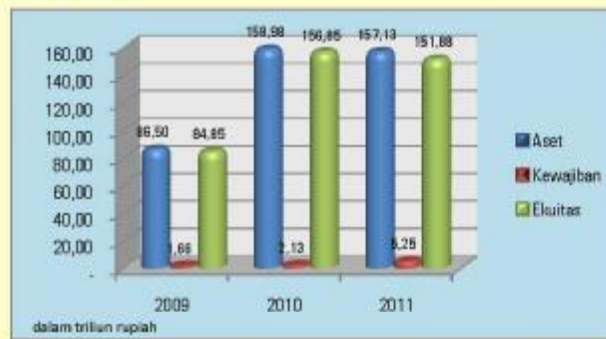
Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budpar sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.

- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.733 eksemplar naskah kuno.
- i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah dengan rincian:
 - Tugu Peringatan sebanyak 1 Unit
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 4 Unit
 - Eksakta sebanyak 13 Unit.
- j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak 5 unit serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - Tugu Peringatan sebanyak 14 unit
 - Bangunan Bersejarah sebanyak 4 unit
 - Aset Eksakta sebanyak 2 unit
 - Aset Non-Eksakta sebanyak 7 unit.

7. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)



Grafik 47: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 28.

8. Penerapan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Layanan Umum

Sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk penerapan penyusutan Aset Tetap telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk Tahun 2011 yang diwajibkan untuk menerapkan penyusutan Aset Tetap adalah Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan. Penyusutan Aset Tetap Satker BLU tersebut diungkapkan pada CaLK masing-masing LKKL. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada 65 Satuan Kerja Badan Layanan Umum disajikan pada Daftar 28.

9. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku 4 (empat) tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011, LK Likuidasi belum diterbitkan, namun LK Penutup per 31 Desember 2011 telah disusun, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2011 masih merupakan Neraca Penutup per 31 Desember 2011. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (*Audited*) dan Neraca penutup per 31 Desember 2011.

**NERACA
BRR NAD-NIAS**

Uraian	31 Des 2008 (<i>Audited</i>)	31 Des 2011
Aset		
Aset Lancar		
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200	-
Uang Muka Belanja	24.548.204.400	-
Belanja Dibayar Di Mula	2.149.584.510	-
Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.183.860.823	78.951.123.713
Aset Tetap		
Tanah	572.821.718.812	526.785.787.823
Peralatan Dan Mesin	1.538.503.845.802	771.847.388.434
Gedung Dan Bangunan	3.351.089.589.510	1.191.902.923.089
Jalan Inggasi Dan Jeringan	4.771.805.420.047	1.894.182.520.918
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111	20.808.386.326
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560	1.026.148.271.124
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842	5.431.771.255.523
Aset Lainnya		
Aset Lain-Lain	881.364.928.291	485.803.480.566
Jumlah Aset Lainnya	881.364.928.291	485.803.480.566
Jumlah Aset	12.079.073.627.956	5.996.326.859.802
Kewajiban		
Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	27.212.757.110	-
Cadangan Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.183.860.823	78.951.123.713
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842	5.431.771.255.523
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	881.364.928.291	485.803.480.566
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.809.747.133	5.917.374.736.089
Jumlah Ekuitas Dana	12.079.073.627.956	5.996.326.859.802
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.079.073.627.956	5.996.326.859.802

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (*Audited*) menjadi Neraca Penutup per 31 Desember 2011 adalah karena adanya koreksi dan penghapusbukuan.

10. Unit Badan Lainnya

Dalam rangka penataan pelaporan keuangan Unit Badan Lainnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya (UBL) didefinisikan sebagai unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi K/L di

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

mana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab langsung kepada pimpinan K/L tertentu. Nomenklatur UBL tersebut bermacam-macam, antara lain akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Termasuk dalam UBL adalah yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Hingga akhir tahun 2011, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 101 lembaga non struktural atau terdapat peningkatan 11 lembaga non struktural yang sebagian besar baru dibentuk pada tahun 2011. Dari 101 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebanyak 60% dan 20 % berdasarkan peraturan presiden.

Komposisi sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional LNS bisa dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Sekitar 75% (68 LNS) dibiayai dari APBN. Sebanyak 43 Sekretariat LNS merupakan Satker yang berada dibawah Kementerian Negara/Lembaga (K/L), sedangkan 25 Sekretariat LNS dibiayai dari Kegiatan K/L. Dari 43 satker tersebut, diantaranya adalah 13 Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) yang didanai APBN melalui Dana Dekonsentrasi di SKPD Dinas PU & Kimpraswil.
2. Tiga LNS yakni: Bapertarum, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, dan Otorita Asahan, mendanai kegiatannya dari penerimaan tertentu tanpa kucuran dana dari APBN.
3. Empat Lembaga Non Struktural yang menerima dana dari APBN dan Non APBN yakni: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Enam LNS saat ini sudah tidak aktif lagi namun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LNS tersebut belum dicabut. Sedangkan 8 LNS belum aktif karena belum lama dibentuk pemerintah dan 10 LNS yang baru dibentuk pada tahun 2011.

Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lembaga non struktural yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Yayasan di lingkungan K/L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan K/L dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata "pihak lain" pada butir g dan l yaitu:

- "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah".
- "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 2 butir l UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan kementerian/lembaga adalah yayasan yang terafiliasi dengan kementerian negara/lembaga, yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di kementerian negara/lembaga tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bernaung dibawah institusi TNI. Hal ini karena karena Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan sebagian menyampaikan laporan keuangan yakni:

1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMI yang mengelola Taman Mini Indonesia Indonesia Indah.
2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Kementerian Kehutanan.
3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha" di Jalan Sudirman, Semanggi – Jakarta Pusat.
4. Yayasan Kesejahteraan Pegawai BhumiBakti Adhiguna di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

5. Yayasan Gedung Arsip Nasional RI
6. Yayasan Yustitia Dharmayukti Karini di lingkungan Mahkamah Agung
7. Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8. Yayasan Pengembangan BUMN di lingkungan Kementerian Negara BUMN

Penyajian UBL dalam Laporan Keuangan

Berikut adalah perlakuan penyajian UBL pada LKPP disesuaikan dengan karakteristik/jenis dari UBL dimaksud, yaitu:

No.	Jenis UBL	Penyajian Dalam LKPP
1	UBL Sebagai Satuan Kerja K/L	Laporan Keuangan tergabung dalam UKKL yang bersangkutan
2	UBL Sebagai Bagian dari Satker K/L	Laporan Keuangan tergabung dalam UKKL yang bersangkutan
3	UBL Non Satker yang juga bertindak sebagai Satuan Kerjal/Bagian Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - UBL tersebut Otorita Batam dan Badan Wakaf Indonesia. - Sebagai Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja Laporan Keuangannya tergabung dalam UKKL yang bersangkutan. - Nilai ekuitas di luar yang diperoleh dari APBN disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya"
3	UBL Non Satker	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 UBL yang seharusnya tidak termasuk dalam definisi UBL, yaitu LPS dan BPMIGAS karena merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Permanen. - 2 UBL yaitu Otorita Asahan dan Baznas, disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya" - 1 UBL, yaitu BAPERTARUM-PNS hanya diungkapkan dalam CaLK. - 1 UBL, yaitu BP DAU, sebagai pengelola dana masyarakat disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" melalui Laporan Keuangan Kementerian Agama (BA 025).
4	UBL sudah menjadi Bagian Anggaran tersendiri untuk TA 2011	UBL tersebut adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
5	Yayasan	<p>Disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Pemerintah Lainnya"</p> <p>Baru 3 Yayasan yang disajikan pada LKPP Tahun 2011, yaitu Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola TMII, Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha"</p>
6	Tidak Aktif	Hanya diungkapkan dalam CaLK

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Sampai dengan akhir Tahun 2011, total Aset Bersih UBL sebesar Rp34,32 triliun. Pemilik aset terbesar: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS, LPP RRI, dan LPP TVRI.

Pada tahun anggaran 2012 untuk LPP TVRI dan LPP RRI juga telah ditetapkan menjadi Bagian Anggaran tersendiri.

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya disajikan dalam **Daftar 29**.

11. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubark an dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK No. 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
4. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
5. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 61 aset dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset)
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset)
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rincian ABMA/C disajikan pada **Daftar 30**.

12. Kewajiban Kontinjensi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan mempertimbangkan besarnya kebutuhan dana investasi, Pemerintah memberikan dukungan berupa:

- a. Jaminan kewajiban pembayaran BUMN/BUMD kepada kreditur atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
- b. Jaminan pembayaran BUMN kepada investor swasta atas kewajiban –kewajiban tertentu dalam perjanjian jual beli listrik.

Jaminan atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bertujuan memberikan kepastian pembayaran kembali sehingga dapat menarik minat investor/kreditur untuk menyalurkan dananya. Disamping itu dengan adanya Jaminan Pemerintah, maka risiko investor/kreditur dalam pemberian pinjaman menjadi lebih rendah yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya pinjaman/harga jual beli listrik.

Proyek-proyek yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (FTP I) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)
2. Program percepatan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM
3. Program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (FTP II) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)
4. Proyek Central Java Power Plant (CJPP) yang merupakan salah satu project show case program kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Swasta (KPSI)

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada investor/kreditur akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM) tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah baik dari sisi kapan terjadinya maupun nilai kewajiban yang timbul. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) dan PDAM kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut.

Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi TA 2011

Sampai dengan Desember 2011, bentuk penjaminan Pemerintah yang telah dilakukan untuk keempat program pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, telah diterbitkan sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36.216.962.894.355 dan USD3,958,718,574.
2. Untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 3 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 3 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis dan Kab. Lombok Timur). Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rp50.187.000.000 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

3. Untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP), berupa *Guarantee Agreement* yang telah ditandatangani antara PT PII dan Pemerintah selaku penjamin dengan PT Bhimasena Power Indonesia, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah sebesar asumsi nilai proyek Rp30 triliun dikurangi penjaminan PT PII Rp300 miliar. Sampai dengan saat ini, penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah belum efektif mengingat PT Bhimasena Power Indonesia belum mendapatkan pendanaan (*financial close*) dan masih terdapat syarat administratif yang belum dipenuhi.
4. Untuk program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, sampai saat ini masih dalam proses evaluasi dan penerbitan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Alokasi anggaran kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

Program	Exposure (Rp)	x	Probability Default	x	(100 % - Recovery Rate)	=	Expected Loss (Rp)
Penjaminan PT PLN	5.927 miliar	x	15 %	x	(100 % - 0 %)	=	889 miliar
Penjaminan PDAM	28 miliar	x	16,98 %	x	(100 % - 0 %)	=	4,75 miliar

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp5.927 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 15% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp889 miliar sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA 2011 adalah sebesar Rp889 miliar.

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp28 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp4,75 miliar. Namun untuk meningkatkan kepercayaan perbankan atas penjaminan Pemerintah untuk PDAM, maka alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN TA 2011 ditetapkan menjadi sebesar Rp10 Miliar.

Untuk penjaminan proyek FTP II, Pemerintah menyediakan dana penjaminan pemerintah dalam APBN terkait jaminan kelayakan usaha melalui dana subsidi listrik (PSO). Sedangkan alokasi anggaran penjaminan untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP), akan mulai dilakukan tahun 2013 dengan asumsi penjaminan Pemerintah efektif pada Oktober 2012 (setelah *financial close* tercapai).

Sampai dengan Desember 2011, alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN tidak dicairkan, dengan kata lain tidak terjadi gagal bayar pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

13. *Unfunded Liability* atas Program Tabungan Hari Tua (THT)

Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, disamping Negara dapat menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan PNS, juga melibatkan PNS dalam menanggung pembiayaan untuk penyelenggaraannya melalui iuran PNS bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3% dari 10% tersebut merupakan iuran THT. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1981, Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002, skema THT adalah manfaat pasti, di mana setiap PNS pada saat pensiun atau meninggal dunia akan menerima manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian dan formulanya sudah ditetapkan.

Pasal 14 PP 25 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara asuransi sosial yaitu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 PMK 65 Tahun 2008, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT adalah pos belanja yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam rangka penyesuaian perhitungan besarnya manfaat THT PNS dan Hakim.

Pada Laporan Keuangan PT TASPEN (program THT) Tahun 2011 diungkapkan bahwa terdapat Piutang *Past Service Liability* (PSL) Pemberi Kerja atas THT yang diestimasi, akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PSL Pemberi Kerja akibat PP 9/2007	1.638.443.906.070
PSL Pemberi Kerja akibat PP 14/2008	2.450.505.392.359
PSL Pemberi Kerja akibat PP 6/2009	3.024.845.340.493
PSL Pemberi Kerja akibat PP 25/2010	1.275.570.232.079
PSL Pemberi Kerja akibat PP 11/2011	3.432.866.853.874
Total	11.822.231.724.875

Pelunasan *Unfunded Liability* tersebut akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

- Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Tapan (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
- Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

Selanjutnya, guna meningkatkan kemanfaatan program pensiun dan program THT bagi PNS, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Perumusan dan penetapan program THT PNS baru yang mampu meningkatkan manfaat THT bagi PNS;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

- b. Perumusan dan penetapan mekanisme program THT PNS baru yang lebih efisien dan akuntabel serta sesuai dengan *international best practices*;
- c. Pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif atas PT Taspen (Persero).

14. Past Service Liabilities Program Pensiun

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN-PTA 2011 pembayaran pensiun 100% beban APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan *sharing* terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel berikut ini:

No.	Periode	Sharing (%)		Sharing (Rp)	
		APBN	TASPEN	APBN	TASPEN
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	-	684.484.404.672
2	April 1994 - Maret 1997	77,50%	22,50%	10.520.490.487.535	3.251.694.491.866
3	April 1997 - Desember 1998	77%	23%	4.166.973.000.600	1.443.702.023.854
4	Januari 1999 - Desember 2002	75%	25%	38.808.425.790.885	10.629.716.356.793
5	Januari 2003 - Desember 2005	79%	21%	45.267.251.385.247	10.369.704.931.360
6	Januari - Desember 2006	82,50%	17,50%	18.983.960.941.237	3.772.133.275.016
7	Januari - Desember 2007	65,50%	14,50%	23.342.032.127.654	3.476.043.626.139
8	Januari - Desember 2008	91%	9%	30.715.162.682.604	2.630.368.160.583
Total				171.885.128.485.088	36.258.868.298.113

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuarial Independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktuarial Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp1.879,64 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2011.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2011 diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp42,20 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

A. Saldo per 31 Desember 2010	28.722.730.784.872
B. Penerimaan:	
Penerimaan Iuran Peserta	6.603.299.827.280
Penerimaan Dana dari Pemerintah	51.851.747.090.890
Hasil Investasi	3.148.394.364.877
Kenaikan Nilai Investasi	4.628.274.904.132
Pendapatan Lain-lain	13.138.741.576
Total Penerimaan	68.242.854.728.555
C. Pengeluaran:	
Pembayaran Manfaat Pensiun	51.843.550.831.851
Beban Operasional	800.975.111.740
Total Pengeluaran	52.444.525.943.591
D. Perubahan Dana (B-C)	13.798.328.784.964
E. Koreksi Dana Bersih	(317.603.038.071)
F. Saldo per 31 Desember 2011 (A+D+E)	42.203.456.631.765

15. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum)

Bapertarum PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994. Tabungan Perumahan diwajibkan kepada setiap PNS yang dipotong dari gaji masing-masing PNS. Untuk mengelola tabungan tersebut dibentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS dengan tujuan membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan. Pemotongan gaji untuk tabungan perumahan tersebut efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Februari 1993 dan berakhir bulan yang bersangkutan berhenti menjadi PNS.

Dana yang terkumpul dari pemotongan tabungan tersebut disetor ke rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama Bapertarum PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dana tabungan tersebut setinggi-tingginya sebesar 60% dari jumlah dana tabungan dipergunakan untuk membantu seluruh PNS untuk uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilik Rumah bagi pegawai yang belum memiliki rumah maupun membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pada LKPP Tahun 2011, Aset Bersih Bapertarum tidak disajikan lagi di Neraca, hal ini konsisten dan sama dengan perlakuan akuntansi untuk dana iuran pensiun yang dikelola PT TASPEN dan PT ASKES. Berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum-PNS Tahun 2011, aset sebesar Rp6.807.063.950.338,73, kewajiban Rp2.860.286.664.356,29, dan ekuitas bersih sebesar Rp3.946.777.285.982,44.

16. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dan hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL), Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyalur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran), atau Lembaga Penyalur (badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran) namun otoritas penggunaannya berada pada Kementerian Negara BUMN. Sampai dengan 31 Desember 2011 Dana PKBL BUMN berjumlah Rp833.328.094.726.

Selain dana PKBL BUMN juga terdapat Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli, yaitu Dana yang dikumpulkan dari dana BL BUMN Peduli dan merupakan bagian dari Dana Program Bina Lingkungan pada BUMN Pembina. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, saldo Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli adalah sebesar Rp14.180.502.976.

17. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2010

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada **Daftar 31**.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Cadangan DBH

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, dari total dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DBH sebesar Rp18.795.238.623.326, yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp17.029.587.614.507 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.765.651.008.819, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Jenis Cadangan	Jumlah Yang Telah Disalurkan Kepada Pihak Ke-3	Dana Cadangan yang Disetor ke Kas Negara	Jumlah Cadangan
1	Subsidi PCS	64.260.500.000	0	64.260.500.000
2	Subsidi PT PELMI	124.457.849.390	12.294.655.610	136.752.505.000
3	Subsidi PERUM BULOG	3.880.034.638.700	220.804.646.100	4.100.839.284.800
4	Subsidi PT KERETA API	152.468.942.728	7.433.342.272	159.902.285.000
5	Subsidi Energi	1.313.458.909.390	14.994.641.735	1.028.384.351.125
6	Subsidi Papua	2.750.517.989.430	1.094.011.741.080	3.344.529.740.510
7	Subsidi Berih	38.607.101.708	22.335.195.282	60.942.296.990
8	DBH Perikanan	15.348.647.120	0	15.348.647.120
9	DBH Pertambangan Umum	2.547.225.380.888	381.340.670.725	2.628.566.051.714
10	DBH Kehutanan	280.068.584.643	12.988.316.015	272.634.600.858
11	DBH SDA	8.683.058.060.409	0	8.683.058.060.409
	Jumlah	17.029.587.614.507	1.765.651.008.819	18.795.238.623.326

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS**D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS****SALDO AWAL KAS**

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2011 sebesar Rp99,01 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp99.011.278.600.702 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2010 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2011. Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU:		
Kas BUN di BI	79.606.375.358.793	32.185.520.242.213
Kas di KPPN	9.218.612.887.732	6.309.379.301.288
Kas Rekening Khusus	2.824.334.833.970	-
Kas pada BLU	7.287.580.742.179	5.567.846.500.843
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	48.185.913.485	-
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian	98.985.089.736.159	46.062.746.044.414
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Rekening SAL	-	5.870.514.138.408
Penyesuaian Saldo Awal Rekening Penempatan pada Bank Umum	-	15.000.000.000.000
Penyesuaian Saldo Awal (Kas pada BLU *)	26.554.437.138	112.445.204.316
Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN **)	(365.572.595)	7.666.397.318
Total Penyesuaian Saldo Awal	26.188.864.543	20.990.525.740.042
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	99.011.278.600.702	67.053.271.784.456

Keterangan:

*) Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU sebesar Rp26.554.437.138 merupakan penyesuaian atas Kas pada BLU berdasarkan data dari KPPN setempat, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Padang	(23.171.136)
KPPN Serang	(79.313.682)
KPPN Bandung I	(279.729.488)
KPPN Manado	(490.728.973)
KPPN Bengkulu	(319.298.813)
KPPN Mataram	3.672.732.535
KPPN Tegal	753.018.497
KPPN Semarang II	4.021.931.355
KPPN Semarang I	968.870.991
KPPN Surabaya I	460.938.396
KPPN Makassar II	6.325.196.394
KPPN Jakarta II	8.281.761.687
KPPN Jakarta III	3.282.229.373
Total	26.554.437.138

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp365.572.595 merupakan penyesuaian atas Kas KPPN, yaitu:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Balikpapan	3.050.150
KPPN Palopo	(78.444.835)
KPPN Sijunjung	(146.700.000)
KPPN Manne	(10.523.500)
KPPN Mamuju	(132.954.410)
Total	(395.572.595)

PERUBAHAN KAS

Kenaikan Kas pada TA 2011 sebesar Rp8,83 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	32.781.696.498.577	33.197.581.404.814
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(117.624.715.204.186)	(80.043.299.768.387)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	131.392.395.224.420	91.552.011.400.614
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	1.313.542.615.553	2.927.386.748.278
Koreksi Pembukuan:		
Pergunaan SAL *)	(40.319.043.049.000)	(17.347.946.819.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	1.287.457.711.323	(1.178.259.859.686)
Kenaikan (Penurunan) Kas	6.631.333.786.686	29.107.483.117.333

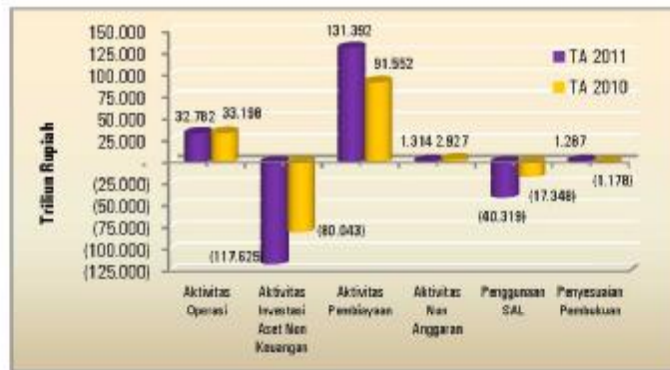
*) Penggunaan SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Penerimaan Pembiayaan.

**) Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pengembalian Pendapatan TA yang lalu	(102.364.746.513)	(168.929.200.391)
Koreksi Uang Persediaan	(561.052.742)	159.535.528.423
Koreksi Rekening 'tr'	(216.316.651)	241.745.689
Selisih Kurs Kas BUN	1.404.184.991.745	(1.169.106.909.607)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(52.302)	(1.024.810)
Koreksi Kas Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Koreksi Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Koreksi Transfer	4.176.996	-
Koreksi Kas KPPN	212.666.534	-
Koreksi Pembulatan	77	-
Koreksi Kas di BUN	(13.064.014.611)	-
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	1.287.457.711.323	(1.178.259.859.686)

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 48.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 48: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per
31 Desember 2011
sebesar Rp121,26
triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2011 sebesar Rp121.261.988.260.868 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	107.842.612.387.387	96.160.754.902.189
Rekening Khusus	-	2.824.334.833.970
Rekening Pemerintah Lainnya	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	6.327.755.216.087	8.603.994.085.726
Kas pada BLU yang Belum Disahkan***)	100.924.694.157	53.015.078.502
Kas pada BLU yang telah Didepositikan (Investasi Jangka Pendek)	(170.553.016.059)	-
Jumlah Saldo Akhir Kas	121.261.988.260.868	117.332.963.445.378

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	82.453.918.298.407	79.606.375.358.793
Rekening Kas di KPPN	11.670.556.947.661	9.218.612.887.732
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	13.089.016.578.965	7.267.580.742.179
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	429.120.562.354	48.195.913.485
Jumlah	107.842.612.387.387	96.160.754.902.189

Rekening Kas BUN di BI pada TA 2011 termasuk Rekening Khusus sebesar Rp2.390.016.546.991.

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2011 sebesar Rp13.089.016.578.965 termasuk Kas yang didepositikan (investasi jangka pendek) sebesar Rp143.539.893.732 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.327.755.216.087 berasal dari saldo sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Rp6.756.875.778.441 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung KIL yang sudah disahkan sebesar Rp429.120.582.354.

***) Kas pada BLU sebesar Rp100.924.694.157 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut KIL	13.019.388.267.063	7.340.595.820.881
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disepositikan	(1.70.563.016.059)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	13.089.016.578.965	7.267.580.742.179
Kas pada BLU yang belum disahkan KPPN	100.924.694.157	53.015.078.502

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp13.089.016.578.965 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Saldo awal BLU	7.287.580.742.179	5.567.846.500.843
Koreksi Tambah Saldo Awal Kas pada BLU	26.554.437.138	112.445.204.316
Pendapatan BLU	20.103.995.586.771	10.590.842.035.270
Belanja BLU	(14.328.738.106.623)	(8.983.552.988.350)
Koreksi Pembukuan Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp32,78 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2011. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp32.781.696.488.577, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.209.469.558.508.440	980.192.560.688.363
Dikurangi Arus Kas Keluar	(1.176.687.862.019.860)	(946.994.969.283.449)
Arus Kas Bersih	32.781.696.488.577	33.197.591.404.914

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2010, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp415.894.916.338.

Penerimaan Perpajakan Rp873,87 triliun

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2011 sebesar Rp873.873.892.399.381 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp819.752.426.342.423 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp54.121.466.056.958. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2011 setelah dikurangi pengembalian

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	431.121.712.728.316	354.152.324.675.100
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPhBM)	277.800.076.679.384	219.538.218.197.355
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.893.164.324.396	28.580.589.978.740
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(730.151.679)	8.026.429.073.342
Cukai	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
Pajak Lainnya	3.929.192.148.211	3.371.209.407.180
Jumlah Penerimaan Pajak DN	819.752.426.342.423	679.834.893.844.284
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	25.265.863.309.375	19.759.193.417.044
Bea Keluar	28.855.602.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	54.121.466.056.958	28.656.900.712.960
Penerimaan Perpajakan	873.873.892.399.381	708.491.594.557.244

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2011 lebih besar Rp165.382.297.842.137 atau 23,34 persen dari Penerimaan Perpajakan dalam TA 2010.

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2011 adalah sebesar Rp431.121.712.728.316 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	25.941.792.128.888	22.833.341.093.125
PPh Gas Alam	47.153.704.628.050	36.039.390.019.682
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah *)	3.338.636.314.000	-
Jumlah PPh Migas	76.434.133.068.938	58.872.731.112.807
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	66.751.563.274.222	55.331.533.581.255
PPh Pasal 22	4.946.489.944.246	4.737.703.749.312
PPh Pasal 22 Impor	28.291.747.589.839	23.601.167.040.565
PPh Pasal 23	18.702.757.359.018	16.277.579.888.579
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.287.028.613.473	2.934.981.111.137
PPh Pasal 25/29 Badan	154.609.563.580.736	131.480.615.289.276
PPh Pasal 26	27.239.272.558.180	20.958.300.304.414
PPh Final dan Fiskal LN	50.818.584.952.948	39.926.176.715.682
PPh Non Migas Lainnya	40.572.806.616	31.535.882.073
Jumlah PPh Non Migas	354.687.579.659.378	295.279.593.562.293
Jumlah Pajak Penghasilan	431.121.712.728.316	354.152.324.675.100

*) Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) pada TA 2010 tidak disajikan pada Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. PPh DTP pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2011 lebih besar Rp76.969.388.053.216 atau 21,73 persen dari penerimaan TA 2010.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2011 adalah sebesar Rp277.800.076.679.384. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	165.218.964.383.262	131.879.564.017.016
PPN dan PPnBM Impor	112.374.211.359.301	87.495.386.460.763
PPN dan PPnBM lainnya	206.900.936.821	163.285.719.576
Jumlah PPN dan PPnBM	277.800.076.679.384	219.538.218.197.355

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2011 lebih besar Rp58.261.858.482.029 atau 26,54 persen dari TA 2010.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2011 adalah sebesar Rp29.893.164.324.396. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
PBB Pedesaan	1.177.346.808.822	1.231.724.607.759
PBB Perkotaan	6.603.174.032.018	6.379.133.976.045
PBB Perkebunan	985.954.945.312	906.563.035.437
PBB Kehutanan	251.302.697.483	231.794.826.611
PBB Pertambangan	397.619.412.898	499.103.659.423
PBB Migas	20.477.766.627.863	19.332.269.873.466
Jumlah PBB (Neto)	29.893.164.324.396	28.580.589.978.740

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2011 lebih besar Rp1.312.574.345.656 atau 4,59 persen dari TA 2010.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2011 adalah sebesar minus Rp730.151.679, sedangkan Penerimaan TA 2010 sebesar Rp8.026.429.073.342. Realisasi Penerimaan BPHTB TA 2011 merupakan pengembalian BPHTB tahun anggaran yang lalu. Penerimaan BPHTB tidak dicatat lagi dikarenakan mulai tahun 2011 Penerimaan BPHTB diserahkan ke pemerintah daerah.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2011 adalah sebesar Rp77.010.010.613.795, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Cukai Hasil Tembakau	73.251.428.868.906	63.295.281.573.097
Cukai Ethyl Alkohol	152.953.431.380	145.871.055.229
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.583.211.248.830	2.697.254.271.105
Denda Administrasi Cukai	11.381.400.196	12.995.359.858
Cukai Lainnya	11.035.664.483	14.520.253.278
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2011 lebih besar Rp10.844.088.101.228 atau 16,39 persen dari Penerimaan Cukai TA 2010.

f. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp3.928.192.148.211. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penjualan Benda dan Bes Materal	3.609.605.383.070	3.340.690.298.876
Pendapatan PPh Batubara	61.093.244	5.049.944
Pajak Tidak Langsung	1.826.035.898	907.491.220
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	84.726.712.822	(18.094.935.596)
- Bunga Penagihan PPN	224.199.680.642	47.163.885.911
- Bunga Penagihan PPhBM	204.067.265	443.759.337
- Bunga Penagihan PTL	7.569.195.450	93.757.488
Jumlah Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.371.209.407.190

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2011 lebih besar Rp556.982.741.031 atau 16,52 persen dari TA 2010.

g. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2011 adalah sebesar Rp54.121.466.956.958, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp25.265.863.309.375 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp28.855.602.747.583. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	23.783.424.990.710	18.599.690.058.915
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	3.173.020.085	2.061.691.716
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	391.846.604.781	540.690.656.021
Bea Masuk dalam rangka KITE	946.688.042.226	566.917.871.634
Denda atas sanksi administrasi	15.000.000	10.000.000
Bea Masuk - Ditanggung Pemerintah *)	73.310.676.000	-
Pabean Lainnya	67.424.975.573	49.923.238.758
Jumlah Bea Masuk	25.265.863.309.375	19.759.193.417.044
Bea Keluar	28.855.602.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	54.121.466.956.958	28.656.900.712.960

*) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) pada TA 2010 tidak disajikan pada Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. BM DTP pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 lebih besar Rp25.464.565.343.998 atau 88,86 persen dari TA 2010.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP sebesar
Rp331,34 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2011 adalah sebesar Rp331.337.448.572.183, yang berarti lebih besar Rp62.659.469.001.827 atau 23,32 persen dari TA 2010 sebesar Rp268.677.979.570.356.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2011 adalah sebesar Rp213.823.349.552.827. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	141.303.483.452.283	111.814.923.202.135
Pendapatan Gas Alam	52.187.085.923.633	40.918.314.502.416
Pendapatan Pertambangan Umum	16.369.789.735.678	12.646.750.881.580
Pendapatan Kehutanan	3.216.476.006.406	3.009.672.120.638
Pendapatan Perikanan	183.802.161.080	91.995.180.732
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	562.702.273.747	343.786.432.785
Jumlah Penerimaan SDA	213.823.349.552.827	188.825.442.320.286

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2011 lebih besar Rp44.997.907.232.541 atau 26,65 persen dari TA 2010.

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2011 adalah sebesar Rp28.183.973.126.600, yang berarti lebih kecil Rp1.912.959.567.665 atau 6,36 persen dari TA 2010 sebesar Rp30.096.932.694.265. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp69.226.130.305.985. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	9.525.540.319.958	6.304.681.982.848
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.803.490.867.212	9.782.852.016.185
Pendapatan Sewa	186.810.775.728	147.500.857.882
Pendapatan Jasa I	16.222.029.858.308	16.735.427.684.773

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pendapatan Jasa II	1.371.822.057.319	1.867.532.340.837
Pendapatan Jasa Luar Negeri	454.063.043.127	688.538.910.955
Pendapatan Jasa Perbankan	898.213.800	598.750.759
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.835.358.321.429	3.468.219.982.038
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.295.511.200.017	2.551.632.939.518
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	-	144.828.206.658
Pendapatan Jasa Kepolisian II	85.821.898.822	43.535.283.500
Pendapatan Jasa Lainnya	258.310.892.000	118.335.390.253
Pendapatan Bunga	2.169.004.446.254	3.858.459.830.084
Pendapatan Gain On Bond Redemption	780.000.000	48.397.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.732.674.065.900	3.445.549.357.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	240.761.503.805	166.807.987.382
Pendapatan Pendidikan	2.865.915.235.801	2.983.449.553.758
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	82.848.578.390	213.767.298.728
Pendapatan Iuran dan Denda	1.319.106.824.983	704.797.429.654
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	7.986.615.385.380	5.763.384.770.255
Pendapatan Pelunasan Piutang	26.715.895.618	47.908.471.893
Pendapatan dari Penutupan Rekening	628.093.308.285	11.789.234.305
Pendapatan Selisih Kurs	2.713.540.544.637	64.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	208.936.088.712	204.501.240.681
Jumlah PNPB Lainnya	68.226.130.305.885	58.164.762.520.535

Dengan demikian, Penerimaan PNPB Lainnya pada TA 2011 lebih besar Rp10.061.367.785.450 atau 17,01 persen dari TA 2010.

d. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2011 adalah sebesar Rp20.103.995.586.771, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.821.832.190.696	9.906.996.304.665
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	167.462.819.227	34.976.353.539
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	647.563.491.201	172.630.678.219
Pendapatan BLU Lainnya	1.467.137.085.647	476.238.698.847
Jumlah Penerimaan BLU	20.103.995.586.771	10.590.842.035.270

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2011 lebih besar Rp9.513.153.551.501 atau 89,82 persen dari TA 2010.

0.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah sebesar Rp4,26 triliun

Penerimaan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp4.258.217.536.874. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	34.102.500	-
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	-	25.000.000
Hibah Dalam Negeri Lainnya	-	254.107.349.174
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	166.310.915.813	98.867.782.883
Hibah Dalam negeri Langsung Bentuk Uang - Penda	287.168.580.076	70.238.704.605
Hibah Dalam Negeri Langsung - Penda	10.000.000.000	-
Jumlah Hibah Dalam Negeri	463.503.698.389	423.238.836.762
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	-	235.708.020
Hibah Luar Negeri – Bilateral	323.935.838.288	253.114.464.189
Hibah Luar Negeri – Multilateral	2.388.865.678.488	1.804.053.783.311
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	7.198.973.228	542.343.768.481
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	-	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	112.795.828.858	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	918.255.286.945	-
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	42.642.352.680	-
Jumlah Hibah Luar Negeri	3.794.713.838.485	2.589.747.724.001
Jumlah Hibah	4.258.217.536.874	3.022.986.560.763

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2011 lebih besar Rp1.235.230.976.111 atau 40,86 persen dari TA 2010.

Penerimaan Hibah tersebut tidak termasuk Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp552.196.724.430 serta Pendapatan Hibah dalam bentuk Surat Berharga sebesar Rp433.525.600.000. Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa dan Surat Berharga tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2011 adalah sebesar Rp175.745.947.140.204, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rpi):

*Belanja Pegawai
sebesar Rp175,75
triliun*

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.438.707.054.822	42.465.549.827.688
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	40.253.949.624.738	36.935.432.979.430
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	819.040.106.833	727.783.954.353
Belanja Gaji Dokter PTT	771.007.436.015	680.958.920.462
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	248.984.377.220	165.888.295.443
Belanja Honorarium	1.368.820.236.166	1.444.890.460.937
Belanja Lembur	501.557.316.895	470.289.735.805
Belanja Vaksinasi	217.977.946.087	248.539.701.180
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	20.363.825.257.336	12.171.280.231.935
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	59.470.665.084.274	50.603.760.868.126
Belanja Asuransi Kesehatan	2.141.251.233.920	1.816.913.001.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	150.576.864.996	129.288.057.338
Belanja Cadangan Perubahan <i>Sharing</i>	(374.730.220)	-
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	(40.668.838)	202.215.097.395
Total Belanja Pegawai	175.745.947.140.204	148.872.682.131.332

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2011 lebih besar Rp27.673.345.008.872 atau 18,69 persen dari TA 2010.

0.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp124,16 triliun

Belanja Barang pada TA 2011 adalah sebesar Rp124.159.163.392.116 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	66.807.696.651.991	51.545.119.265.391
Belanja Jasa	15.888.779.363.493	12.122.676.491.688
Belanja Pemeliharaan	9.284.459.416.087	7.809.363.490.993
Belanja Perjalanan	19.635.213.116.970	18.303.524.718.632
Belanja Barang BLU	12.543.014.843.575	7.807.229.767.375
Jumlah Belanja Barang	124.159.163.392.116	97.587.913.734.089

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2011 ini lebih besar Rp26.571.249.658.027 atau 27,23 persen dari TA 2010.

Belanja Barang tersebut tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp469.912.832.050. Belanja Barang dari hibah dalam bentuk Barang/Jasa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

0.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp93,26 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2011 sebesar Rp93.260.261.464.346 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp4.879.218.489.683 atau 5,52 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2010 sebesar Rp88.381.042.974.663.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp79.615.326.431.749 dan Rp13.644.935.032.597 dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp79.615.326.431.749 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara DN	57.210.627.839.839	54.560.273.982.091
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	4.768.589.586.200	2.750.895.750.000
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara DN	3.236.157.597.300	2.073.333.477.100
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	310.612.680.000	737.473.500.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Belanja Pembayaran Discount SBSN DN	51.466.619.000	36.998.773.200
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	11.900.654.889.891	11.833.182.927.188
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	514.676.089.460	513.199.205.250
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	373.906.900.000	177.338.000.000
Belanja Pembayaran Denda	1.247.399.871.387	1.319.296.422.615
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	1.235.358.882	-
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	79.615.326.431.749	73.802.892.037.454

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp13.644.935.032.587 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.540.016.135.917	3.551.962.345.889
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.104.918.896.680	11.026.998.591.520
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	13.644.935.032.597	14.578.950.937.299

D.2.7. Subsidi

Subsidi sebesar
Rp295,36 triliun

Belanja Subsidi pada TA 2011 sebesar Rp295.358.422.916.324 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	165.161.338.980.975	82.351.322.825.873
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	123.428.269.621.815	93.343.805.878.147
Subsidi Non BBM - Pajak *)	3.411.946.990.000	-
Subsidi Non BBM - Lainnya	-	-
Subtotal	126.840.216.611.815	93.343.805.878.147
Subsidi dalam Rangka PSO	1.833.928.069.279	1.373.894.220.390
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	293.835.483.682.069	177.069.022.924.410
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.522.939.254.255	822.952.538.294
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.522.939.254.255	822.952.538.294
Jumlah Belanja Subsidi	295.358.422.916.324	177.891.975.462.704

*) Subsidi Pajak (PPh Ditanggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) tidak disajikan pada Laporan Arus Kas TA 2010, namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Subsidi Pajak pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian, Subsidi TA 2011 ini lebih besar Rp117.466.447.453.620 atau 66,03 persen dari Subsidi TA 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Belanja Hibah sebesar
Rp300,11 miliar

D.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2011 terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp300.108.798.355. Belanja hibah TA 2011 lebih besar Rp230.100.020.780 atau 328,67 persen dari TA 2010 sebesar Rp70.008.777.575.

Bantuan Sosial
sebesar Rp71,08
triliun

D.2.9. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp71.076.290.233.168 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	6.244.225.314.365	4.608.087.845.000
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	32.069.345.814.817	37.604.432.063.192
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.830.500.000	965.889.642.762
Beasiswa	4.684.535.971.423	4.775.195.414.218
Lembaga Perbadatan	146.686.983.700	79.907.018.360
Lembaga Sosial Lainnya	27.927.665.638.863	20.561.954.653.740
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	71.076.290.233.168	68.595.466.637.272

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2011 ini lebih besar Rp2.480.823.595.896 atau 3,62 persen dari TA 2010.

Belanja Lain-lain
sebesar Rp5,46 triliun

D.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2011 adalah sebesar Rp5.464.234.053.592, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Rekonstruksi Aceh	-	1.052.074.256
Kerjasama Teknis Internasional	10.000.000.000	-
Pemilu Tahunan	-	(2.040.000)
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	9.778.482.000	-
Cadangan Dana Rebasasi	-	(3.329)
Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	(10.650.675)	942.264.497.985
Belanja Dana Penunjang (PHLN)	-	1.199.027.080
Belanja Non Modal-Otorita Batam	557.785.893	845.925.755
Belanja karena rugi selisih kurs	360.891.025.539	909.200.000.000
Jasa Surveyor	-	232.979.742.237
Jasa Perbendaharaan	199.847.380.770	102.072.122.875
Belanja untuk LPP TVRI	685.547.340.402	571.869.960.825
Belanja untuk LPP RRI	677.107.093.980	658.918.956.130
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	406.145.000.000	358.183.000.000
Belanja Lainnya	3.114.270.695.883	17.988.301.645.511
Jumlah Belanja Lain-lain	5.464.234.053.592	21.666.884.988.929

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2011 mengalami penurunan sebesar Rp16.202.650.855.337 atau 74,78 persen dari TA 2010. Penurunan realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2011 disebabkan adanya penataan akun-akun pada Belanja Lain-lain sesuai dengan *nature of transaction*-nya, bahwa kegiatan yang tidak memenuhi karakteristik dibiayai dari Belanja Lain-lain harus dianggarkan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

belanja K/L yang bersangkutan.

*DBH Pajak sebesar
Rp41,53 triliun*

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2011 adalah sebesar Rp41.525.561.096.164, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	13.237.326.489.261	10.931.465.581.702
Bagi Hasil PBB	28.281.486.730.011	27.106.379.095.361
Bagi Hasil BPHTB	6.747.876.892	7.775.863.958.765
Jumlah Bagi Hasil Pajak	41.525.561.096.164	45.815.708.635.828

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2011 lebih kecil Rp4.290.147.539.664 atau 9,36 persen dari TA 2010.

*DBH Cukai Tembakau
sebesar Rp1,41 triliun*

D.2.12. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.408.448.764.184, sedangkan pada TA 2010 sebesar Rp1.202.111.025.283. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2011 lebih besar Rp206.337.738.901 atau 17,17 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2010.

*DBH SDA sebesar
Rp53,97 triliun*

D.2.13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2011 adalah sebesar Rp53.974.986.297.954, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Minyak Bumi	20.634.080.735.284	20.567.117.852.257
Bagi Hasil Gas Alam	16.872.249.758.993	14.629.244.504.747
Bagi Hasil Pertambangan Umum	14.498.126.522.475	7.790.420.800.000
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	519.987.115.194	305.855.434.155
Bagi Hasil Kehutanan	1.512.465.063.891	1.763.104.839.304
Bagi Hasil Perikanan	138.077.102.117	120.000.000.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	53.974.986.297.954	45.185.743.838.463

Dengan demikian, DBH SDA TA 2011 lebih besar Rp8.809.243.267.491 atau 19,50 persen dari TA 2010.

*DAU sebesar
Rp225,53 triliun*

D.2.14. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2011 sebesar Rp225.533.712.048.000, jumlah tersebut lebih besar Rp21.962.735.239.500 atau 10,79 persen dari TA 2010 sebesar Rp203.570.976.808.500.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp24,80 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2011 sebesar Rp24.802.229.752.980, jumlah tersebut lebih besar Rp3.845.918.584.980 atau 18,35 persen dari TA 2010 sebesar Rp20.956.311.168.000.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,42 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2011 sebesar Rp10.421.312.993.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.321.699.313.000 atau 14,53 persen dari TA 2010 sebesar Rp9.099.613.680.000.

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp53,66 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2011 adalah sebesar Rp53.657.183.069.474, lebih besar Rp34.738.572.760.663 atau 183,62 persen dari TA 2010 sebesar Rp18.918.610.308.811.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp117,62 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2011 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp117.624.715.204.186, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Arus Masuk	134.372.526.847	263.876.638.486
Dikurangi Arus Keluar	117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Arus Kas Bersih	(117.624.715.204.186)	(80.043.299.758.387)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2011 lebih besar Rp37.581.415.445.799 atau 48,95 persen dari TA 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Penjualan Aset
sebesar Rp1.34,37
miliar

D.2.18. Penjualan Aset

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah, gedung, bangunan dan tanah, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2011 adalah sebesar Rp134.372.526.547, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	2.725.200.373	92.412.745.784
Penjualan Kendaraan Bermotor	1.807.702.673	2.169.006.285
Penjualan Sewa Beli	40.584.546.231	43.296.161.610
Penjualan Aset Tetap Lainnya	898.345.500	143.252.500
Penjualan Aset Lainnya	88.356.731.770	125.855.472.307
Jumlah Penjualan Aset	134.372.526.547	263.876.638.486

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2011 lebih kecil Rp129.504.111.939 atau 49,08 persen dari TA 2010.

Belanja Modal
sebesar Rp117,76
triliun

D.2.18. Belanja Modal

Belanja Modal pada TA 2011 adalah sebesar Rp117.759.087.730.733 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	3.174.518.573.375	1.801.599.831.427
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.589.152.098.168	28.288.339.011.692
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.296.677.877.838	16.534.548.831.437
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.570.778.106.938	30.184.518.770.901
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.342.236.811.366	2.321.846.720.441
Belanja Modal BLU	1.785.724.263.048	1.176.323.230.975
Jumlah Belanja Modal	117.759.087.730.733	88.307.176.396.673

Belanja Modal ini pada TA 2011 lebih besar Rp37.451.911.333.860 atau 46,64 persen dari TA 2010.

Belanja Modal tersebut tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp82.283.892.380. Belanja Modal dari hibah dalam bentuk Barang/Jasa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp32.781.696.488.577 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp117.624.715.204.186 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp84.843.018.715.609 Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari
Aktivitas Pembiayaan
sebesar Rp131,39
triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2011 adalah sebesar Rp131.392.395.224.420, yang berasal dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Arus Masuk	292.028.544.623.338	248.301.707.025.210
Dikurangi Arus Keluar	(160.636.149.398.918)	(156.749.685.624.596)
Arus Kas Bersih	131.392.395.224.420	91.552.011.400.614

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2011 lebih besar Rp39.840.383.823.806 atau 43,52 persen dari TA 2010.

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar Rp249.672.520.403.961, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Rekening Pemerintah	40.319.043.049.000	22.189.312.807.078
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	1.597.981.517.178	3.232.148.153.135
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	207.136.113.196.150	167.834.217.942.000
Pinjaman Dalam Negeri	619.382.841.633	393.806.359.471
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	249.672.520.403.961	193.449.285.061.684

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 lebih besar Rp56.223.235.342.277 atau 29,06 persen dibandingkan dengan TA 2010.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah pada TA 2011 sebesar Rp40.319.043.049.000 merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penerimaan dari Rekening SAL	40.319.043.049.000	17.347.946.818.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	-	4.841.365.789.078
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	40.319.043.049.000	22.189.312.807.078

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2011 lebih besar Rp18.129.730.441.922 atau 81,71 persen dari TA 2010.

b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.597.981.517.178, berarti lebih kecil Rp1.634.166.635.957 atau 50,56 persen dari penerimaan pada TA 2010 sebesar Rp3.232.148.153.135. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Rincian Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Hasil Privatisasi	425.044.145.867	2.098.694.387.048
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	330.323.053	133.448.541.746
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset	801.228.042.627	747.780.020.064

Penerimaan
Pembiayaan DN
sebesar Rp249,67
triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

eks BPPN		
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	371.379.005.731	252.245.204.277
Total Penerimaan	1.597.981.517.178	3.232.148.153.135

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2011 sebesar Rp207.136.113.196.150, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penerbitan/Penjualan SPN	40.000.000.000.000	29.795.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	110.514.000.000.000	84.020.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.817.637.491.000	1.701.033.244.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	24.327.438.850.000	27.076.856.698.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	30.477.036.855.150	25.041.328.000.000
Total Penerimaan SBN	207.136.113.196.150	167.634.217.942.000

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2011 lebih besar Rp39.501.895.254.150 atau 23,56 persen dibanding TA 2010.

d. Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dari BUMN dan dari Pemerintah Daerah. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri pada TA 2011 sebesar Rp619.382.641.633, lebih besar Rp225.776.282.162 atau 57,36 persen dari TA 2010 sebesar Rp393.606.359.471,

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 sebesar Rp33.747.178.723.921 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pinjaman Program	15.266.144.513.219	28.974.644.489.116
Pinjaman Proyek	18.481.034.210.702	25.820.145.711.090
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	33.747.178.723.921	54.794.790.200.206

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 lebih kecil Rp21.047.611.476.285 atau 38,41 persen dari TA 2010.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2011 adalah sebesar Rp15.266.144.513.219, dengan rincian (dalam Rp):

Penerimaan
Pembiayaan LN
sebesar Rp33,75
triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Program Bilateral	873.396.325.700	7.296.002.579.700
Program Multilateral	14.392.748.187.519	21.678.641.909.418
Jumlah Pinjaman Program	15.266.144.513.219	28.974.644.489.118

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2011 lebih kecil Rp13.708.499.975.897 atau 47,31 persen dari TA 2010.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2011 adalah sebesar Rp18.481.034.210.702, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	9.046.106.089.582	13.648.925.389.888
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.246.144.127.735	7.995.635.711.316
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.188.783.933.385	3.972.357.132.656
Pinjaman Proyek Lainnya	-	203.227.477.230
Jumlah Pinjaman Proyek	18.481.034.210.702	25.820.145.711.090

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2011 lebih kecil Rp7.339.111.500.388 atau 28,42 persen dibandingkan TA 2010.

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp8,61 triliun

0.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2011 sebesar Rp8.608.845.495.456 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	1.334.486.195.806	57.831.271.296
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	7.274.358.299.650	482.024
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	8.608.845.495.456	57.831.763.320

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2011 lebih besar Rp8.551.213.732.136 atau 14.837,68 persen dari TA 2010.

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp89,89
triliun

0.2.23. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar Rp89.889.447.737.085 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	2.617.700.000.000	1.000.000.000.000
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	38.045.000.000.000	24.700.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	49.174.159.351.085	49.025.829.689.752
Pelunasan SBSN	52.588.386.000	2.805.790.002.000
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	89.889.447.737.085	77.531.619.691.752

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2011 lebih besar Rp12.357.828.045.333 atau 15,94 persen dibandingkan TA 2010.

*Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp47,32
triliun*

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 sebesar Rp47.322.502.478.271 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pinjaman Program	9.429.608.883.864	8.960.856.742.350
Pinjaman Proyek	37.892.893.594.407	41.671.672.839.486
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	47.322.502.478.271	50.632.531.581.836

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2011 lebih kecil Rp3.310.029.103.565 atau 6,54 persen dibandingkan dengan TA 2010.

*PMN/Investasi
Pemerintah sebesar
Rp19,20 triliun*

D.2.25. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2011 adalah sebesar Rp19.200.357.712.264, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	8.240.874.519.422	4.038.500.000.000
Penyertaan Modal Negara untuk Badan Internasional	611.283.192.842	-
Penyertaan Modal Negara Lainnya	100.000.000	2.000.100.000.000
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	2.676.500.000.000	8.427.500.000.000
Dana Bergulir	7.671.600.000.000	5.333.049.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	19.200.357.712.264	19.799.149.000.000

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2011 lebih kecil Rp598.791.287.736 atau 3,02 persen dari TA 2010.

*Penerusan Pinjaman
sebesar Rp4,22 triliun*

D.2.26. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2011 adalah sebesar Rp4.223.841.471.298. Jumlah tersebut lebih kecil Rp4.562.553.879.710 atau 51,93 persen dibandingkan dengan TA 2010 sebesar Rp8.786.395.351.008.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp131.392.395.224.420 dan defisit anggaran sebesar Rp84.843.018.715.609, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN**

*Kenaikan Kas dari
Aktivitas
Nonanggaran sebesar
Rp1,31 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2011, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp1.313.542.615.553, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	1.081.050.588.567	619.814.108.170
PFK <i>Profinancing</i> (Neto)	-	(34.367.584.001)
Kiriman Uang (Neto)	12.817.535.129	2.110.479.145.663
Transito (Neto)	219.674.491.857	231.461.078.546
Arus Kas Bersih	1.313.542.615.553	2.927.388.748.278

Dengan demikian, Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2011 lebih kecil Rp1.613.844.132.725 atau 55,13 persen dari TA 2010.

D.2.27. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

*PFK (Neto) sebesar
Rp1,08 triliun*

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2011 sebesar Rp1.081.050.588.567 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya, serta penerimaan dan pengeluaran karena kesalahan rekening pihak ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
PFK terkait Pengakuan Utang PFK		
Penerimaan		
Penerimaan PFK 10% Gaji	16.206.213.608.890	14.364.213.100.894
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	4.188.354.646	2.603.737.089
Penerimaan PFK Beras BULOG	221.898.477.489	194.517.894.374
Penerimaan PFK 2% Pemda	2.188.134.244.756	1.957.723.651.041
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	0	538
Penerimaan PFK Lain-lain	382.182.686.930	360.422.971.142
Jumlah Penerimaan PFK	19.002.577.373.781	16.889.481.354.878
Pengeluaran		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(16.122.609.531.270)	(13.748.624.194.032)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(3.131.896.112)	(6.197.747.721)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(202.664.678.214)	(196.662.974.400)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(2.112.651.113.844)	(1.914.952.896.918)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(390.529.377.554)	(383.707.083.883)
Jumlah Pengeluaran PFK	(18.830.896.796.994)	(16.230.134.896.754)
Jumlah PFK terkait Pengakuan Utang PFK (Neto)	171.680.576.787	658.346.458.124
PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur		
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening		
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	5.156.956.584.762	303.806.189.164
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening		
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	(4.247.998.982.982)	(393.338.549.118)
Jumlah PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto)	908.957.601.780	(89.532.349.954)
PFK (Neto)	1.081.050.588.567	619.814.108.170

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Dengan demikian, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2011 lebih besar Rp461.236.480.397 atau 74,42 persen dari TA 2010.

Jumlah PFK terkait Pengakuan Utang PFK (Neto) sebesar positif Rp171.690.576.787 menjadi perhitungan penambahan saldo Utang PFK pada Neraca. Sedangkan jumlah PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto) sebesar positif Rp909.360.011.780 menjadi perhitungan penambahan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca.

PFK Prefinancing
sebesar Rp0

D.2.28. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya

PFK Prefinancing dan PFK Lainnya merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa *prefinancing* (pembayaran pendahuluan), penerimaan/pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong). Dalam TA 2011 tidak terdapat transaksi PFK Prefinancing dan PFK Lainnya, sedangkan pada TA 2010 sebesar minus Rp34.367.584.001, yang berasal dari Pembayaran dari Rekening BUN ke Reksus Kosong.

Kiriman Uang sebesar
Rp12,82 miliar

D.2.29. Kiriman Uang

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2011 sebesar Rp12.817.535.129 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2011 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan adanya transaksi kiriman uang antar rekening pada akhir tahun, belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	1.614.190.734.757.419	1.325.889.913.002.888
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	2.610.402.594.608.159	1.836.812.447.294.623
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	7.707.811.003.417	422.938.867.167
Penerimaan Pemindahbukuan	1.220.031.858.881.484	953.561.128.428.368
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka	3.194.863.329.067.827	2.430.648.501.857.462
Penerapasan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	78.142.902.443	300.188.447.031
Jumlah Penerimaan KU	9.647.674.461.250.749	6.547.835.116.985.339
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	(1.614.187.503.052.304)	(1.325.869.445.857.022)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(2.610.420.628.968.605)	(1.836.821.353.734.337)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(7.674.827.347.317)	(189.533.624.804)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(1.220.037.708.442.182)	(951.664.705.149.508)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka	(3.194.863.329.067.817)	(2.430.648.501.857.463)
Penerapasan		
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(77.845.827.425)	(301.086.540.642)
Jumlah Pengeluaran KU	(8.947.061.843.715.620)	(8.545.574.637.783.778)
Jumlah KU (Neto)	12.817.535.129	2.110.478.145.563

Dengan demikian, KU masuk neto dalam TA 2011 lebih kecil Rp2.097.661.610.434 atau 99,39 persen dari TA 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Transito Rp219,67
miliar

0.2.30. Transito

Transito (Neto) TA 2011 sebesar Rp219.674.491.857 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	16.851.328.468.000	14.815.755.922.810
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	191.628.475.989	180.924.620.174
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PMP (Swadana)	1.080.585.569.045	800.285.940.590
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	530.588.235.964	921.474.650.792
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	490.558.929	75.345.533
Jumlah Penerimaan Transito	18.662.621.367.827	18.518.516.479.799
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(17.108.380.321.610)	(15.292.765.972.418)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(190.367.846.485)	(183.710.889.707)
Pengeluaran UP Pengguna PMP (Swadana)	(1.184.453.438.445)	(823.849.322.851)
Pengeluaran Pengembalian Setoran Sisa UP/TUP TAYL	21.774.580.470	13.680.783.720
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(510.000.000)	(400.000.000)
Jumlah Pengeluaran Transito	(18.442.946.816.370)	(18.287.035.481.253)
Jumlah Transito (Neto)	219.674.491.857	231.481.079.546

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2011 lebih kecil Rp11.786.586.689 atau 5,09 persen dari TA 2010.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

DAFTAR

Table 1.6

REKAPITULASI DATA REALISASI DAN TARGET

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PENGENDAHIAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2012
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011		TA 2012		TL 2010	KEPAILAIAN PENDAPATAN	AKUMULASI PENDAPATAN
		4	5	4	5			
41	PENDAPATAN PERUSAHAAN	1.155.814.931.272.000	1.210.518.662.664.400	1.004.454	100.454	886.271.611.820.143	276.247.141.849.071	276.247.141.849.071
411	Pendapatan Perusahaan	878.842.112.762.000	912.317.892.881.200	88.465	88.465	733.241.892.821.749	188.667.223.777.642	188.667.223.777.642
411.1	Subsidi	431.111.984.000.000	431.111.984.000.000	38.194	38.194	381.111.984.000.000	381.111.984.000.000	381.111.984.000.000
411.2	Subsidi	447.730.128.762.000	481.205.898.881.200	50.271	50.271	352.129.908.821.749	150.455.243.777.642	150.455.243.777.642
411.3	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.4	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.5	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.6	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.7	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.8	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.9	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.10	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.11	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.12	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.13	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.14	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.15	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.16	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.17	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.18	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.19	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.20	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.21	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.22	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.23	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.24	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.25	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.26	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.27	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.28	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.29	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.30	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.31	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.32	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.33	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.34	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.35	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.36	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.37	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.38	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.39	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.40	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.41	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.42	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.43	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.44	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.45	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.46	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.47	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.48	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.49	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.50	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.51	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.52	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.53	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.54	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.55	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.56	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.57	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.58	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.59	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.60	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.61	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.62	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.63	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.64	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.65	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.66	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.67	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.68	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.69	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.70	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.71	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.72	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.73	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.74	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.75	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.76	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.77	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.78	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.79	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.80	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.81	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.82	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.83	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.84	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.85	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.86	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.87	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.88	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.89	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.90	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.91	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.92	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.93	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.94	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.95	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.96	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.97	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.98	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.99	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
411.100	Subsidi	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah

Table 1.6

... ..

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PENGENDAHIAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2012
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011		TA 2010	KERANGKA PENDAPATAN	AKUMULASI PENDAPATAN
		ANGGARAN	REALISASI			
1		2	3	4	5	6-6.3
4112.0	Subsidi dari Hibah		133.300.000,00	1.116.487.123,22	7	2.377.016.575,18
4112.1	Subsidi dari Hibah		133.300.000,00	1.116.487.123,22		1.116.487.123,22
4112.2	Subsidi dari Hibah					
4112.3	Subsidi dari Hibah					
4112.4	Subsidi dari Hibah					
4112.5	Subsidi dari Hibah					
4112.6	Subsidi dari Hibah					
4112.7	Subsidi dari Hibah					
4112.8	Subsidi dari Hibah					
4112.9	Subsidi dari Hibah					
4112.10	Subsidi dari Hibah					
4112.11	Subsidi dari Hibah					
4112.12	Subsidi dari Hibah					
4112.13	Subsidi dari Hibah					
4112.14	Subsidi dari Hibah					
4112.15	Subsidi dari Hibah					
4112.16	Subsidi dari Hibah					
4112.17	Subsidi dari Hibah					
4112.18	Subsidi dari Hibah					
4112.19	Subsidi dari Hibah					
4112.20	Subsidi dari Hibah					
4112.21	Subsidi dari Hibah					
4112.22	Subsidi dari Hibah					
4112.23	Subsidi dari Hibah					
4112.24	Subsidi dari Hibah					
4112.25	Subsidi dari Hibah					
4112.26	Subsidi dari Hibah					
4112.27	Subsidi dari Hibah					
4112.28	Subsidi dari Hibah					
4112.29	Subsidi dari Hibah					
4112.30	Subsidi dari Hibah					
4112.31	Subsidi dari Hibah					
4112.32	Subsidi dari Hibah					
4112.33	Subsidi dari Hibah					
4112.34	Subsidi dari Hibah					
4112.35	Subsidi dari Hibah					
4112.36	Subsidi dari Hibah					
4112.37	Subsidi dari Hibah					
4112.38	Subsidi dari Hibah					
4112.39	Subsidi dari Hibah					
4112.40	Subsidi dari Hibah					
4112.41	Subsidi dari Hibah					
4112.42	Subsidi dari Hibah					
4112.43	Subsidi dari Hibah					
4112.44	Subsidi dari Hibah					
4112.45	Subsidi dari Hibah					
4112.46	Subsidi dari Hibah					
4112.47	Subsidi dari Hibah					
4112.48	Subsidi dari Hibah					
4112.49	Subsidi dari Hibah					
4112.50	Subsidi dari Hibah					
4112.51	Subsidi dari Hibah					
4112.52	Subsidi dari Hibah					
4112.53	Subsidi dari Hibah					
4112.54	Subsidi dari Hibah					
4112.55	Subsidi dari Hibah					
4112.56	Subsidi dari Hibah					
4112.57	Subsidi dari Hibah					
4112.58	Subsidi dari Hibah					
4112.59	Subsidi dari Hibah					
4112.60	Subsidi dari Hibah					
4112.61	Subsidi dari Hibah					
4112.62	Subsidi dari Hibah					
4112.63	Subsidi dari Hibah					
4112.64	Subsidi dari Hibah					
4112.65	Subsidi dari Hibah					
4112.66	Subsidi dari Hibah					
4112.67	Subsidi dari Hibah					
4112.68	Subsidi dari Hibah					
4112.69	Subsidi dari Hibah					
4112.70	Subsidi dari Hibah					
4112.71	Subsidi dari Hibah					
4112.72	Subsidi dari Hibah					
4112.73	Subsidi dari Hibah					
4112.74	Subsidi dari Hibah					
4112.75	Subsidi dari Hibah					
4112.76	Subsidi dari Hibah					
4112.77	Subsidi dari Hibah					
4112.78	Subsidi dari Hibah					
4112.79	Subsidi dari Hibah					
4112.80	Subsidi dari Hibah					
4112.81	Subsidi dari Hibah					
4112.82	Subsidi dari Hibah					
4112.83	Subsidi dari Hibah					
4112.84	Subsidi dari Hibah					
4112.85	Subsidi dari Hibah					
4112.86	Subsidi dari Hibah					
4112.87	Subsidi dari Hibah					
4112.88	Subsidi dari Hibah					
4112.89	Subsidi dari Hibah					
4112.90	Subsidi dari Hibah					
4112.91	Subsidi dari Hibah					
4112.92	Subsidi dari Hibah					
4112.93	Subsidi dari Hibah					
4112.94	Subsidi dari Hibah					
4112.95	Subsidi dari Hibah					
4112.96	Subsidi dari Hibah					
4112.97	Subsidi dari Hibah					
4112.98	Subsidi dari Hibah					
4112.99	Subsidi dari Hibah					
4113.00	Subsidi dari Hibah					

... ..

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (MUSYAWARAH)

LAMBAR 1.8

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
A	BUMN Perbankan	
1	PT. Bank Bukopin	22.537.414.557,42
2	PT. Bank Mandiri	1.688.383.760.000,00
3	PT. Bank Negara Indonesia	758.289.011.872,50
4	PT. Bank Rakyat Indonesia	980.580.000.000,00
5	PT. Bank Tabungan Negara	198.200.385.540,00
	JUMLAH DIVIDEN BUMN PERBANKAN	3.627.944.571.969,92
B	BUMN NON PERBANKAN	
1	Perum Jamkrindo	29.877.778.000,00
2	Perum Pegulainan	878.883.612.131,00
3	Perum Perumnas	600.000.000,00
4	Perum Peruri	60.000.000.000,00
5	PT. Adhi Karya	28.718.000.000,00
6	PT. Anka Tambang	438.402.000.000,00
7	PT. Angkasa Pura I	122.799.940.000,00
8	PT. Angkasa Pura II	438.112.126.213,00
9	PT. ASDP	14.425.305.000,00
10	PT. ASEI	14.436.450.000,00
11	PT. Balai Pustaka	300.000.000,00
12	PT. Bhandha Ghara Raksa	3.079.813.139,00
13	PT. Bio Farma	24.567.251.500,00
14	PT. Biro Klasifikasi Indonesia	7.244.871.025,00
15	PT. Bukit Asam	838.674.325.125,00
16	PT. Duhanu	5.944.000.000,00
17	PT. Freeport Indonesia	1.761.137.250.000,00
18	PT. Indosat	48.248.018.750,00
19	PT. Inhutani I	5.300.000.000,00
20	PT. Inhutani V	20.000.000,00
21	PT. INTI	458.568.151,00
22	PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung	8.255.888.870,50
23	PT. Jasa Marga	509.078.702.408,00
24	PT. Jasa Raharja	304.492.000.000,00
25	PT. Jasindo	38.850.324.400,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (MAGAZIN)

DAFTAR 1.B

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMI	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
26	PT. Kawasan Berikat Nusantara	10.627.784.434,00
27	PT. Kawasan Industri Makassar	356.262.112,00
28	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	284.462.692,00
29	PT. KIM	1.348.188.085,00
30	PT. Kimia Farma	41.858.500.000,00
31	PT. Kliring Berjangka Indonesia	10.337.089.272,00
32	PT. Krakatau Steel	75.720.000.000,00
33	PT. LEN Industri	2.750.213.864,00
34	PT. Pelabuhan Indonesia I	28.139.591.000,00
35	PT. Pelabuhan Indonesia II	525.279.589.000,00
36	PT. Pelabuhan Indonesia III	224.219.482.000,00
37	PT. Pelabuhan Indonesia IV	55.087.363.000,00
38	PT. Pembangunan Perumahan	35.884.151.718,00
39	PT. Pengembangan Pariwisata Bali	10.016.729.218,00
40	PT. Perkebunan Nusantara II	600.000.000,00
41	PT. Perkebunan Nusantara III	284.304.741.340,00
42	PT. Perkebunan Nusantara IV	217.107.566.539,00
43	PT. Perkebunan Nusantara IX	25.018.120.379,31
44	PT. Perkebunan Nusantara V	68.312.383.172,01
45	PT. Perkebunan Nusantara VI	48.399.875.120,00
46	PT. Perkebunan Nusantara VII	75.973.160.102,00
47	PT. Perkebunan Nusantara VIII	29.243.355.702,00
48	PT. Perkebunan Nusantara X	27.156.410.428,00
49	PT. Perkebunan Nusantara XI	8.030.021.137,00
50	PT. Perkebunan Nusantara XII	20.199.008.644,90
51	PT. Perkebunan Nusantara XIII	50.623.490.000,00
52	PT. Permodalan Nasional Madani	2.067.000.000,00
53	PT. Persero Batam	85.665.000,00
54	PT. Pertamina	5.623.103.550.000,00
55	PT. Pertani	4.179.187.952,00
56	PT. Perusahaan Gas Negara	2.141.920.001.443,72
57	PT. Perusahaan Pengelola Aset	24.394.757.376,00
58	PT. PLN	4.545.000.000.000,00
59	PT. Pupuk Sriwidjaya	588.257.000.000,00
60	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	21.366.218.000,00
61	PT. Rakayasa Industri	192.196.900,00
62	PT. Sunj Hyang Seri	4.317.284.530,66
63	PT. Semen Baturaja	50.182.161.252,42
64	PT. Semen Gresik	751.098.836.530,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (ANGKET)

DAFTAR 1.B

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
66	PT. Socfin Indonesia	101.807.134.500,00
67	PT. Sucotindo	1.906.884.698,00
68	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	7.853.182.866,00
69	PT. Surveyor Indonesia	8.787.695.143,00
70	PT. Telkom	3.058.198.883.758,28
71	PT. Timah	308.079.200.000,00
72	PT. Wijaya Karya	68.336.000.000,00
73	PT. Yodya Karya	218.878.408,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN NON PERBANKAN		24.556.028.554.628,80
JUMLAH SELURUHNYA		28.183.973.126.598,70

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	411.001.940.000	320.490.132.887	331.904.847	320.986.004.294	30.436.307,714
21	SEKRETARAT NEGARA	18.685.050.000	65.28.803.815	6.238.130	35.122.381.045	1.436.682.085
22	KORPRI	2.571.800.000	2.117.574.232	373.339.731	2.044.234.501	2.044.234.501
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.441.444.100	1.297.348.841.831	14.337.088.210	1.283.011.653.621	1.021.677.280.291
21	SEKRETARAT NEGARA	1.240.048.400.000	1.216.167.274.811	57.7.0.001	1.216.167.274.811	1.216.167.274.811
22	KORPRI	1.201.395.700.000	2.104.838.060.319	17.871.087.214	2.107.207.021.004	1.332.138.008.851
003	BADAN PERHIMPUNAN NASIONAL	3.56.633.820.000	6.4.554.361.355	7.55.207.670	6.014.627.118	6.014.627.118
21	SEKRETARAT NEGARA	2.820.300.000	4.228.304.510	10.45.356.834	4.228.304.510	4.228.304.510
22	KORPRI	6.051.343.100	4.240.631.554.073	5.611.067.68	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073
004	BADAN PERHIMPUNAN NASIONAL	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073	5.611.067.68	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073
21	SEKRETARAT NEGARA	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073	5.611.067.68	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073
22	KORPRI	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073	5.611.067.68	4.240.631.554.073	4.240.631.554.073
005	MARHAHAH AGUNG	140.000.000	140.000.000	852.01.000	140.000.000	140.000.000
21	SEKRETARAT NEGARA	140.000.000	140.000.000	852.01.000	140.000.000	140.000.000
22	KORPRI	140.000.000	140.000.000	852.01.000	140.000.000	140.000.000
006	PERUSAHAAN NASIONAL	18.685.050.000	18.685.050.000	2.447.9.11	18.685.050.000	18.685.050.000
21	SEKRETARAT NEGARA	18.685.050.000	18.685.050.000	2.447.9.11	18.685.050.000	18.685.050.000
22	KORPRI	18.685.050.000	18.685.050.000	2.447.9.11	18.685.050.000	18.685.050.000
007	SEKRETARAT NEGARA	1.031.448.200.000	1.031.448.200.000	2.001.590.718	1.031.448.200.000	1.031.448.200.000
21	SEKRETARAT NEGARA	1.031.448.200.000	1.031.448.200.000	2.001.590.718	1.031.448.200.000	1.031.448.200.000
22	KORPRI	1.031.448.200.000	1.031.448.200.000	2.001.590.718	1.031.448.200.000	1.031.448.200.000
008	PERUSAHAAN NASIONAL	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
21	SEKRETARAT NEGARA	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
22	KORPRI	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
009	PERUSAHAAN NASIONAL	2.317.960.956.617	2.317.960.956.617	1.047.045.425	2.317.960.956.617	2.317.960.956.617
21	SEKRETARAT NEGARA	2.317.960.956.617	2.317.960.956.617	1.047.045.425	2.317.960.956.617	2.317.960.956.617
22	KORPRI	2.317.960.956.617	2.317.960.956.617	1.047.045.425	2.317.960.956.617	2.317.960.956.617
010	PERUSAHAAN NASIONAL	1.111.000.000.000	1.111.000.000.000	2.001.590.718	1.111.000.000.000	1.111.000.000.000
21	SEKRETARAT NEGARA	1.111.000.000.000	1.111.000.000.000	2.001.590.718	1.111.000.000.000	1.111.000.000.000
22	KORPRI	1.111.000.000.000	1.111.000.000.000	2.001.590.718	1.111.000.000.000	1.111.000.000.000
011	PERUSAHAAN NASIONAL	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
21	SEKRETARAT NEGARA	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
22	KORPRI	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
012	PERUSAHAAN NASIONAL	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
21	SEKRETARAT NEGARA	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000
22	KORPRI	4.100.000.000	4.100.000.000	23.233.021	4.100.000.000	4.100.000.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELOM I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELOM I	BAGIAN ANGGARAN & ESELOM I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
24	SERPRENIN VAKIL PRESIDEN	133.818.180.000	22.728.215.833	-	22.728.215.833	16.159.372.024
25	SERPRENIN KEMRIH	82.474.849.000	22.082.749.994	-4.829.290	21.253.459.704	16.141.802.206
26	PAJARAN SERPRENIN DESKOR	45.287.721.000	44.837.851.018	-	44.837.851.018	41.201.081.801
27	PAJARAN SERPRENIN PESERTA	4.298.946.000	31.218.731.055	50.237.794	31.168.493.261	31.133.001.659
28	UPHIT SERPRENIN PESERTA BOKER/PAJARAN & PENGEMBALAN KEKEMENTERIAN YUP PPP	70.254.072.000	47.270.771.277	222.595.016	47.048.176.261	42.992.841.548
29	LEMBAGA SERPRENIN/ASASIS DAN KEBERAGAMAAN	6.000.000.000	3.639.713.517	423.132.056	3.216.581.461	3.216.581.461
010	KEKEMENTERIAN DALAM NEGERI	10.172.483.173.000	13.281.000.972.037	9.312.603.711	13.368.203.304.328	13.400.479.803.064
21	SERPRENIN KEMENDI	1.126.163.620.000	24.239.163.055	455.295.055	23.783.868.000	46.275.272.020
22	KORPORASI PERUSAHAAN	58.704.827.000	41.303.233.023	431.919.298	40.871.313.725	40.766.012.155
23	UNIT PELAKSANAAN PEMERINTAH	189.980.981.000	48.912.433.249	26.846.019	48.645.587.230	1.291.167.624
24	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN	336.873.123.000	4.342.394.236	1.011.184.123	3.331.210.113	4.230.873.373
25	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	11.627.011.040.000	8.274.064.241.025	1.444.944.947	6.829.119.296.078	6.702.287.424.110
26	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	2.168.883.886.000	2.375.803.835	252.255.534	2.123.548.301	2.123.548.301
27	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	2.060.832.000	2.132.327.113.117	492.246.203	1.640.080.910	1.640.080.910
28	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	650.994.279.000	305.773.372	80.300.447	225.472.921.553	225.472.921.553
29	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	31.300.000.000	55.247.733.372	28.526.823	26.720.910.549	26.720.910.549
11	PAJARAN PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN	25.191.000.000	10.938.175.982	1.300.000	9.638.175.982	9.638.175.982
12	PAJARAN PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN	149.283.600.000	47.339.751.111	22.255.330	25.084.420.781	25.084.420.781
011	KEKEMENTERIAN DALAM NEGERI	5.643.116.112.000	4.115.063.522.005	9.613.610.444	4.105.450.911.561	4.105.450.911.561
21	SERPRENIN KEMENDI	433.123.172.000	3.821.723.004.294	7.354.212.772	3.814.368.791.522	3.814.368.791.522
22	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	42.000.000.000	32.835.381.219	374.372.850	32.461.008.369	32.461.008.369
23	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	36.100.000.000	28.929.344.122	1.180.410.000	27.748.934.122	27.748.934.122
24	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	55.789.239.000	81.527.683.550	423.266.289	81.104.417.261	81.104.417.261
25	DIKEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN	243.692.880.000	281.925.205.980	297.230.351	281.628.075.629	281.628.075.629

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
26	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	2.79.280.000	55.812.344.056	413.282.723	55.399.061.333	15.351.457.6814
27	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	29.000.000.000	24.459.204.629	36.200.000	24.123.004.629	16.132.408.948
28	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	35.682.247.000	41.818.331.853	73.183.05	41.891.514.853	44.137.355.322
29	KEPPRES PRESIDEN	5.425.200.000	5.38.024.833	77.200.000	5.302.824.833	15.200.000.000
30	KEPPRES PRESIDEN	22.420.700.000	7.729.158.892	50.501.22	14.698.657.670	14.522.058.572
012	MEMENTERI PERTAHANAN	80.031.073.531.000	51.360.068.533.853	158.073.183.110	51.201.995.350.743	1.167.788.888.353
21	BAKAMBATAN PANGKALAN	4.401.045.946.000	3.301.105.304.400	10.400.572.000	3.290.704.732.400	10.400.572.000
21	BAKAMBATAN PANGKALAN	55.28.152.102.000	59.23.402.178.500	6.703.358.22	58.529.820.280	5.800.357.872.417
22	BAKAMBATAN PANGKALAN	2.472.414.728.000	2.401.058.420.300	87.211.057.908	2.313.847.362.400	24.000.146.850.000
23	BAKAMBATAN PANGKALAN	1.234.278.344.000	9.464.453.228.000	7.284.972.000	9.457.178.256.000	392.000.000.000
24	BAKAMBATAN PANGKALAN	24.38.152.133.000	8.081.270.852.607	1.572.410.238	8.068.860.622.369	381.537.017.333
013	MEMENTERI DALAM NEGERI	9.271.109.1018.000	0.441.008.072.429	10.271.487.344	6.204.940.091.038	1.103.148.072.038
21	SEKRETARIAT NEGARA	55.70.823.182.000	5.35.589.563.182	92.933.200.374	5.075.656.362.808	65.031.611.828
22	KEPPRES PRESIDEN	38.600.000.000	28.790.500.000	35.200.000	28.755.300.000	1.100.000.000
23	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	10.000.000.000	91.000.000.000	328.000.000	90.672.000.000	2.288.000.000
25	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	126.279.860.000	93.876.425.614	1.122.000.000	92.754.425.614	62.507.351.100
26	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	342.444.000.000	2.710.200.000.000	1.615.000.000	2.708.585.000.000	10.940.000.000
27	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	238.188.808.000	34.847.402.717	213.800.000	34.633.602.717	1.517.205.280
28	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32.440.400.000	32.557.000.000	50.430.200	32.506.570.000	1.000.000.000
29	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	48.000.000.000	28.072.000.000	2.000.000	26.072.000.000	1.000.000.000
30	DEKRET JENDERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	33.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000	23.000.000.000	1.000.000.000
11	BALAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	38.100.000.000	35.522.702.800	1.351.200.000	34.171.502.800	1.139.200.000
015	MEMENTERI RELIGI	17.487.167.400.000	16.179.999.661.457	75.611.446.103	16.104.388.215.354	1.357.334.061.711

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REKASIMETRO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
21	SERVIS/INSTRUMEN	5.519.854.210,00	5.865.837.382,38	9.572,1663	5.931.279.891,19	6.005,04352831
22	KEPERAWATAN/REPARASI	1.729.940.543,00	94.451.242,23	5,464,0047	94.451,242,23	5,464,0047
23	DIKURUS/KEBERSIHAN	133.129.237,00	4.735.533,33	3,558,8680	14.440.577,191	10,853,216894
24	DIKURUS/KEBERSIHAN	91.257.816,3000	5.307.033.205,650	1.577,301494	5.307,033,205,650	5,860,1872796
25	DIKURUS/KEBERSIHAN	2.57.501.787,000	725,047.144,517	1.472,209,669	725,047,144,517	2,814,60494182
26	DIKURUS/KEBERSIHAN	130.000.000,000	6.211.273,330	3,928,110,000	14.541.702,160	11,186,382,8104
27	DIKURUS/KEBERSIHAN	110.000.000,000	11.410.113,194	413,664,34	14.550,000,000	13,136,614,212
28	DIKURUS/KEBERSIHAN	14.822.000,000	308.159.304,219	927,388,189	304.100,000,752	987,733,533,2068
29	DIKURUS/KEBERSIHAN	555.145.000,000	542.878.523,670	483,768,72	542.878,523,670	518,712,567,4029
30	DIKURUS/KEBERSIHAN	139.230.189,000	44.089.448,000	21,361,619	44.719,32,1029	49,230,622,954
31	DIKURUS/KEBERSIHAN	4.371.671,000	393,377,767,740	653,307,328	335,311,688,22	435,639,73,7384
32	DIKURUS/KEBERSIHAN	132.000.000,000	31.049.049,636	2,400,103	31.725,068,373	44,007,567,637
33	DIKURUS/KEBERSIHAN	17.200.123.000,000	15.107,955,035,311	11,001,185,354	15,005,000,071,053	11,751,937,000,0029
34	DIKURUS/KEBERSIHAN	559.701.000,000	462.576.764,994	552,248,194	459,495,016,900	483,000,012,210
35	DIKURUS/KEBERSIHAN	57.300.000,000	61.230.241,273	98,264,163	51.113,916,420	61,322,024,910
36	DIKURUS/KEBERSIHAN	2.530.633.881,000	2.665.510,103,039	1.217,107,233	2.665,510,063,633	2,707,083,172
37	DIKURUS/KEBERSIHAN	3.31.682.143,000	342.427,109,120	111,009,901	342,220,290,200	402,710,472,1829
38	DIKURUS/KEBERSIHAN	1.135.103.210,000	845.858,153,000	1,327,358,7	817,163,302,889	302,057,614,131
39	DIKURUS/KEBERSIHAN	5.577,729,380,000	2.117,754,683,650	352,960,004	2.071,506,016,966	2,297,38,623,1394
40	DIKURUS/KEBERSIHAN	4.34.000,000,000	391.237,244,189	99,291,092	391,122,636,974	392,994,022,0096
41	DIKURUS/KEBERSIHAN	5.310.000,000,000	4.833,333,333,333	9,727,882	4.802,307,881,74	5,027,232,10,3288
42	DIKURUS/KEBERSIHAN	1.130.011.841,000	1.001,156,114,501	1,444,207,233	1.001,156,114,501	1.011,119,672,274
43	DIKURUS/KEBERSIHAN	1.130.000,000,000	202.158,151,025	3,732,525,000	67,559,171,882	1,33,553,073,330
44	DIKURUS/KEBERSIHAN	5.825,000,000,000	56,304,467,912	31,162,300	56,304,467,912	66,146,625,629

MENURUT BA DAN ESELDI I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELDI I	BAGIAN ANGGARAN & ESELDI I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REKASIMETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAHI ANGGARAN
19	BADAN KEMITRAAN PISTONAM	516.161.622.000	505.453.562.839	323.287.162	533.169.762.737	45.827.305.933
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	2.244.843.317.400	1.000.089.211.713	2.124.901.910	1.492.969.704.803	137.491.007.191
21	SEKRETARAT KEMENDI	440.630.740.000	405.351.513.538	824.3.252	433.765.620.883	384.217.63.017
22	DIREKTORAT PERKOTATAN KEMENDI	230.297.177.000	3.115.647.067.624	856.243.678	311.733.666.328	447.577.467.672
23	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	430.420.584.000	367.559.578.629	24.223.627	357.579.786.702	326.047.54.170
24	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	117.400.180.000	85.835.103.873	33.185.828	80.521.000.000	41.520.301.000
25	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	477.104.812.000	295.148.244.319	213.501.241	293.220.541.191	416.540.194.194
26	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	45.300.000.000	45.857.573.738	22.487.254	43.758.111.185	13.327.665.825
27	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	254.307.478.000	361.350.701.658	217.9.41098	351.177.286.102	13.13.607.388
28	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	20.000.000.000	48.682.223.184	2.729.494	48.321.099.422	1.239.502.447
29	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	46.350.387.000	33.811.732.216	21.768.732	31.526.889.785	1.1830.432.514
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.674.131.619.400	9.120.074.436.981	7.623.373.313	9.417.901.114.944	10.107.430.043.402
21	SEKRETARAT KEMENDI	1.238.587.579.000	923.870.885.853	53.300.518	923.736.788.187	294.818.222.833
22	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	116.438.800.000	84.029.579.191	295.407.881	83.729.928.800	331.676.673.100
24	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	5.226.619.924.000	6.384.313.984.117	20.391.419	6.764.312.210.422	22.719.643.940
25	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	2.326.412.907.000	2.086.2.433.236	27.272.87	2.086.2.367.259	61.272.73.832.711
26	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	4.310.541.210.000	222.79.481.291	212.211.941	222.367.229.440	22.642.84.112
27	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	82.500.388.000	48.659.295.110	19.180.000	45.311.828.110	13.335.465.880
28	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	729.467.883.000	547.477.479.103	57.308.238	547.527.118.822	1.825.57.562.194
29	DIREKTORAT PERKOTAAN KEMENDI	230.000.000.000	234.010.294.034	291.895.042	234.964.286.127	233.49.022.194
02	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	528.360.232.000	673.520.852.232	824.378.788	673.520.852.232	82.838.412.041
03	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	349.910.423.000	349.910.423.000	..	349.910.423.000	349.910.423.000
04	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	547.402.2.3.000	547.402.2.3.000	..	547.402.2.3.000	547.402.2.3.000
022	DEPARTEMEN PERBURUHAN	23.134.155.914.400	20.111.371.011.153	7.233.185.328	20.110.043.933.814	3.194.917.161.181

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESELON I

TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
21	SERPE PINJANG	437.036.300.000	345.160.315.319	253.336.670	342.167.838.949	67.838.727.064
22	KEPEK DAN KEMERAN	29.314.000.000	4.751.484.240	41.404.000	44.228.000.000	121.294.400.000
23	DITUNJUK BUNGA DAN	3.177.283.100.000	2.038.833.035	30.358.111	2.012.658.000.000	1.017.201.1322
24	DITUNJUK BUNGA DAN	22.695.831.000	6.602.333.333	401.516.706	6.595.133.333	19.911.664.654
25	DITUNJUK BUNGA DAN	53.908.702.000	4.925.679.503.544	5.422.700.207	4.924.139.151.237	925.079.851.654
26	DITUNJUK BUNGA DAN	412.317.211.000	3.682.268.172.251	59.297.720	3.682.303.221.687	2.063.310.133.16
27	BAJAJ PERHUBUNGAN	1.018.481.000.000	1.018.481.000	10.296.121	1.018.481.000	1.018.481.000
28	BAJAJ PERHUBUNGAN	3.741.585.805.000	2.902.337.851	221.338.221	2.902.338.000.000	375.770.858.179
023	DEKORASI PERHUBUNGAN	17.700.495.000.000	61.272.982.232.758	116.111.122.716	61.060.512.704.464	6.180.480.282.179
29	SERPE PINJANG	12.594.986.889.000	1.467.847.382	1.467.847.382	1.467.847.382	1.467.847.382
30	KEPEK DAN KEMERAN	10.000.000.000	31.336.784.024	2.972.972.186	12.415.616.505	67.221.163.21
31	DITUNJUK BUNGA DAN	1.400.000.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
32	DITUNJUK BUNGA DAN	35.180.774.522.000	28.258.528.582.078	30.312.338.202	28.024.474.582.778	2.925.839.833.221
33	DITUNJUK BUNGA DAN	22.695.831.000	37.242.523.202.078	29.333.134.102	37.242.523.202.078	924.639.871.654
34	DITUNJUK BUNGA DAN	1.111.592.929.000	1.111.592.929.000	1.111.592.929.000	1.111.592.929.000	1.111.592.929.000
35	DITUNJUK BUNGA DAN	54.254.162.000.000	7.261.583.333.333	32.741.100.000	7.261.583.333.333	6.533.934.311
36	BAJAJ PERHUBUNGAN	3.518.685.135.000	3.051.451.513.740	20.032.712.078	3.051.451.513.740	375.248.685.504
024	DEKORASI PERHUBUNGAN	79.407.232.607.000	26.167.242.821.428	10.931.942.919	26.117.294.931.461	6.176.443.623.551
37	SERPE PINJANG	25.820.000.000	2.441.629.228.138	1.491.342.000	2.441.629.228.138	20.232.443.217
38	KEPEK DAN KEMERAN	36.552.811.000	32.830.27.027	1.952.028.028	7.272.218.028	1.738.421.011
39	DITUNJUK BUNGA DAN	12.018.162.100	12.018.162.100	18.018.162.100	12.018.162.100	12.018.162.100
40	DITUNJUK BUNGA DAN	15.112.000.739.000	11.332.529.481.239	18.035.172.000	11.332.529.481.239	205.578.858.221
41	DITUNJUK BUNGA DAN	1.111.592.929.000	1.111.592.929.000	471.512.467	1.111.592.929.000	1.111.592.929.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELDWI I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELDWI	BAGIAN ANGGARAN & ESELDWI I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	13.000.000.000,00	3.314.553,10	7.053.282,60	311.270.706,88	33.857.000,00
11	BALAK PEMERINTAH PUSAT	840.000.000,00	4.314.461,49	3.951.406,44	44.159.724,44	44.159.724,44
12	BALOK PEMERINTAH PUSAT	3.337.518.000,00	2.294.818.171,63	7.033.357.182	2.293.512.167,81	33.537.175,80
025	DEKORASI	38.403.176.000,00	33.743.950.951,69	40.673.844,74	33.703.107.106,95	9.195.206,75
21	DEKORASI	1.457.097.000,00	1.403.057.253,04	5.115.800,92	1.397.941.452,12	10.135.547,88
22	DEKORASI	13.377.820,00	10.127.705,62	2.631.058,04	10.127.705,62	13.377.820,00
23	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	7.130.240.000,00	2.290.124.848,45	3.114.700,10	2.287.010.148,35	4.841.851,65
24	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	25.855.600.000,00	21.705.040.174,19	25.415.240.035	20.682.382.628,19	5.173.217,81
25	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	220.700.000,00	151.916.509,53	37.510,76	151.878,77	68.781.211,23
26	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	4.727.200,00	4.709.999,17	9.717,83	4.700.281,34	66.918,66
27	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	4.160.000,00	384.514,67	21.306,82	363.208,85	4.160.000,00
28	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	140.000.000,00	75.700.000,00	1.200.000,00	74.500.000,00	17.440.000,00
29	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	332.000.000,00	302.833.713,08	1.033.366,22	301.800.346,86	45.236.653,14
31	BALOK PEMERINTAH PUSAT	55.284.500,00	47.277.573,64	1.554.000,00	45.723.573,64	45.723.573,64
026	DEKORASI	4.054.000.000,00	3.480.185.095,03	4.014.400,00	3.476.170.695,03	174.319.304,97
21	DEKORASI	158.300.000,00	373.536.172,05	235.300,00	373.200,872,05	3.133.652,05
22	DEKORASI	41.200.000,00	18.474.010,00	38.500,00	18.435.510,00	14.011.489,00
24	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	337.000.000,00	492.872.553,79	371.000,00	492.501.553,79	306.877.553,79
25	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	540.000.000,00	35.878.571,57	1.271.300,00	34.607.271,57	44.000.000,00
26	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	133.250.000,00	625.303.143,29	950.000,00	624.353.143,29	14.441.423,29
27	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	77.180.000,00	641.363.537,71	71.300,00	641.292.237,71	17.155.167,71
28	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	47.200.000,00	27.079.139,07	4.300,00	27.074.839,07	14.120.160,93
31	BALOK PEMERINTAH PUSAT	78.000.000,00	71.527.854,08	35.757,734	71.492.096,35	13.507.903,65
13	DI LINGKUP PEMERINTAH PUSAT	112.500.000,00	101.405.423,00	571.000,00	100.834.423,00	3.665.577,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN
027	DEMENTERAN SOSIAL	4.121.567.382,000	3.168.246.266,674	11.717.820,481	3.157.408.831,413	164.116.825,587
21	BANKA, PIHAK KE LUAR Negeri	2.291.091.299,000	2.291.091.299,000	9.126.294,910	2.291.091.299,000	1.229.194,011
22	KEPERAWATAN KESEHATAN	33.451.978,000	22.823.153,625	932.202,000	22.891.051,625	15.232.423,885
23	DI LAKUKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	777.234.674,000	694.550.182,155	2.851.402,598	691.701.779,557	62.077.206,623
24	DI LAKUKAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN KESEHATAN	755.500.582,000	731.027.469,710	2.934.674,749	728.122.794,961	1.095.631,470
25	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN SOSIAL	3.160.232,500	2.052.454,458,270	2.092.202,627	2.050.251,830,643	71.880.761,711
26	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN KEHUMANIORAN	1.910.000,000	1.472.542,442,774	6.187.276,234	1.466.355,166,540	1.294.822,184
029	DEMENTERAN KEHUTANAN	5.873.240.583,000	4.398.829.210,809	9.011.984,883	4.389.707,226,000	11.119.034.700,204
21	BANKA, PIHAK KE LUAR Negeri	411.767.236,000	300.323.412,253	732.380,828	299.591,031,425	10.923.904,572
22	KEPERAWATAN KESEHATAN	84.240,000	48.910.474,272	1.292.862,129	44.384.200,129	18.990.984,844
23	DI LAKUKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	311.076.831,000	252.620.304,070	50.280,107	252.338.023,963	62.272.123,111
24	DI LAKUKAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN KESEHATAN	2.331.044.221,000	2.092.164.944,010	1.092.240,194	2.091.072,749,816	300.050.044,044
25	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN SOSIAL	1.239.894.291,000	924.050.153,523	1.238.248,404	922.811.905,119	252.822.658,671
26	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN KEHUMANIORAN	269.299.647,000	332.755.866,664	1.752.412,791	331.003,453,874	22.774.137,484
27	BANKA, PIHAK KE LUAR Negeri	241.162,000	2.728.022,186	918,660,177	21.492.294,029	24.004.894,811
28	KEPERAWATAN KESEHATAN	233.814,311,000	2.267.963,274	51.207,580	2.216.755,694,147	1.332.623,856
032	DEMENTERAN KEALIHAN DAN PERHUBUNGAN	9.544.700.112,000	9.179.979.101,184	3.974,623,443	5.175.355,677,741	203.201.779,444
21	BANKA, PIHAK KE LUAR Negeri	1.882.521.800,000	922.022.223,141	822.982,554	921.209,268,587	62.570.133,200
22	KEPERAWATAN KESEHATAN	51.120,000	61.910.234,222	10.927,390	50.982,843,832	2.916,161
23	DI LAKUKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	1.240.000,000	1.094.891.023,822	917.484,227	1.093.973,539,595	9.222.842,944
24	DI LAKUKAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN KESEHATAN	1.240.000,000	645.472.183,527	412.388,227	643.083,305,299	41.616,627,784
25	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN SOSIAL	427.000,000	322.722.561,078	432.301,880	322.289,680,194	10.432,381
26	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN KEHUMANIORAN	315.650.000,000	222.317.221,184	572.200,025	221.745.021,159	82.788.423,915
27	DI LAKUKAN PENELITIAN DAN PENELITIAN KEHUMANIORAN	523.625.000,000	622.329.244,123	22.719,370	622.106,874,753	452.436.602,374

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELDWI I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELDWI	BAGIAN ANGGARAN & ESELDWI I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REKASIMETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN
11	ENDAP BISE BELAJAR DAN PERSEKUTUAN	451.100.500,00	406.531.703,02	2.305,20	418.200.282,782	326.793.632,238
12	BALAI PENELITIAN DAN PENGUNJUKAN	441.000.000,00	424.094.463,949	306.000,00	424.000.000,00	1.017.918,949
13	BALAI PENELITIAN DAN PENGUNJUKAN, PUSAT PENELITIAN	215.000.000,00	2.330.272,651	35.227,583	215.125.300,387	31.088,387
033	DEPARTEMEN PENDIDIKAN UMUM	56.536.382.500,00	51.373.641.079,546	17.117.419,714	51.305.933.661,367	5.799.374,010
21	SEKRETARAT KEMERDEKAAN	540.000,00	793.324.225,527	205.625,107	793.480.476,240	67.000,000
22	KESEKRETARAT KEMERDEKAAN	122.500,00	66.317.181,547	335,800,000	511.120,337	457.802.702,633
23	UNIT PELAKSANAAN DAN BANTUAN	334.000,00	297.007.044,000	297.007,000	297.116.140,911	14.914.940,000
24	DIREKTORAT MANAJEMEN	27.045.600,000,00	22.596,235,170,000	62.032,300,000	22.596,235,170,111	22.382,541.172,800
25	DIREKTORAT KEMERDEKAAN	13.717.000,000,00	12.440.654.479,147	7.041,932,323	12.440.654.479,289	12.372.942,566,111
26	DIREKTORAT KEMERDEKAAN	14.328.000,000,00	1.149.799,592,000	1.342,286,624	1.149.799,592,000	1.149.799,592,000
13	BALAI PENELITIAN DAN PENGUNJUKAN	435.300,000,00	434.127.123,324	653.866,388	434.127.123,324	21.831.651,574
14	BALAI PENELITIAN DAN PENGUNJUKAN	414.000,000,00	264.107.487,426	1.291.942,184	264.107.487,426	10.110.012,288
034	DEPARTEMEN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	501.027.500,000	607.100.000,102	453.241,800	607.454.251,553	118.379.275,411
21	SEKRETARAT KEMERDEKAAN	500.000,000,00	467.020.405,629	405.900,000	467.426.306,152	1.013.712,483
035	DEPARTEMEN KOORDINATOR BIDANG PERHUKUMAN	240.243.000,000	230.172.021,178	1.171,914,710	230.243.936,284	10.888.206,710
21	SEKRETARAT KEMERDEKAAN	240.000,000,000	235.72.821,070	1.171,914,710	235.72.821,070	1.013.651,574
036	DEPARTEMEN KOORDINATOR BIDANG KESAMAJEMERDEKAAN DAN HUKUM	233.070,000,000	141.938,340	141.938,340	211.349,801,164	22.279.034,311
21	SEKRETARAT KEMERDEKAAN	233.000,000,000	141.938,340	141.938,340	211.349,801,164	22.279.034,311
040	DEPARTEMEN KOORDINATOR PARLISIPASI	2.700.000,000,000	1.106.943.207,295	943.131,426	1.105.999.564,351	1.013.712,483
21	SEKRETARAT KEMERDEKAAN	172.000,000,000	172.000,000,000	172.000,000,000	172.000,000,000	172.000,000,000
22	KESEKRETARAT KEMERDEKAAN	35.000,000,000	35.000,000,000	35.000,000,000	35.000,000,000	35.000,000,000
23	UNIT PELAKSANAAN DAN BANTUAN	140.000,000,000	140.000,000,000	140.000,000,000	140.000,000,000	140.000,000,000
24	DIREKTORAT KEMERDEKAAN	545.000,000,000	441.33.353,317	50.800,704	441.33.353,317	1.048.102.405,324
25	DIREKTORAT KEMERDEKAAN	150.000,000,000	247.000.181,817	247.000,000	247.000.181,817	447.102.405,324

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELDI I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELDI I	BAGIAN ANGGARAN & ESELDI I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REKONSILIASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
00	ORBITAL JERMAN PENSIORAN	552.100.000.000	50.412.856.571	3.515.518.800	53.188.806.667	0,111111111111111
00	BALAI PENELITIAN SAINS DAN TEKNOLOGI JAWA BARAT	10.941.000.000	291.516.291.516	1.253.000.000	291.494.291.516	0,499999999999999
041	DEKTERAN BAGIAN USIA MUDA NEGARA	141.841.115.000	112.839.272.479	2.003.008.512	100.800.771.801	0,433111111111111
01	DEKTERAN USIA MUDA K. PUSAT	141.841.115.000	112.839.272.479	2.003.008.512	100.800.771.801	0,433111111111111
042	DEKTERAN RISET DAN TEKNOLOGI	671.381.614.000	133.106.419.198	2.811.031.111	130.180.388.017	0,020000000000000
043	DEKTERAN LINGKUNGAN HILUP	974.319.017.000	631.564.116.188	2.851.352.318	631.180.388.017	0,065000000000000
01	DEKTERAN RISET DAN TEKNOLOGI	974.319.017.000	631.564.116.188	2.851.352.318	631.180.388.017	0,065000000000000
044	DEKTERAN KOPERASIAN UTM	2.210.087.000	325.357.473.025	151.733.840	855.057.788.122	0,038000000000000
01	DEKTERAN KOPERASIAN UTM	2.210.087.000	325.357.473.025	151.733.840	855.057.788.122	0,038000000000000
047	DEKTERAN PERBERKATAN PEMERINTAH DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.179.635.000.000	1.382.958.958.729	34.511.795	1.397.448.231.464	0,011111111111111
01	DEKTERAN PERBERKATAN PEMERINTAH DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.179.635.000.000	1.382.958.958.729	34.511.795	1.397.448.231.464	0,011111111111111
048	DEKTERAN PERKAWANAN APARATUR NEGARA DAN PERKAWANAN RAKYAT	161.547.495.000	157.140.670.278	1.043.130.811	156.005.541.887	0,009600000000000
01	DEKTERAN PERKAWANAN APARATUR NEGARA DAN PERKAWANAN RAKYAT	161.547.495.000	157.140.670.278	1.043.130.811	156.005.541.887	0,009600000000000
049	DEKTERAN PERKAWANAN APARATUR NEGARA DAN PERKAWANAN RAKYAT	154.506.114.000	84.510.212.839	1.144.137.754	83.118.074.003	0,054000000000000
01	DEKTERAN PERKAWANAN APARATUR NEGARA DAN PERKAWANAN RAKYAT	154.506.114.000	84.510.212.839	1.144.137.754	83.118.074.003	0,054000000000000
050	DEKTERAN INTELJENSI NEGARA	1.323.189.943.800	1.297.271.894.958	37.154.912	1.297.271.894.958	0,009900000000000
01	DEKTERAN INTELJENSI NEGARA	1.323.189.943.800	1.297.271.894.958	37.154.912	1.297.271.894.958	0,009900000000000
051	LEMBAGA SAKSI NEGARA	153.106.943.000	332.817.394.556	37.136.562	295.717.738.002	0,533333333333333
01	LEMBAGA SAKSI NEGARA	153.106.943.000	332.817.394.556	37.136.562	295.717.738.002	0,533333333333333
052	LEMBAGA SAKSI NEGARA	154.483.543.000	221.897.080.187	1.831.950.113	218.101.721.064	0,141000000000000
01	LEMBAGA SAKSI NEGARA	154.483.543.000	221.897.080.187	1.831.950.113	218.101.721.064	0,141000000000000
053	LEMBAGA SAKSI NEGARA	300.380.583.000	121.057.363.657	1.935.358.189	119.161.725.087	0,037000000000000
01	LEMBAGA SAKSI NEGARA	300.380.583.000	121.057.363.657	1.935.358.189	119.161.725.087	0,037000000000000
054	DEKTERAN METRAMORFOSIS NASIONAL	30.311.119.000	36.332.241.139	37.481.970	36.270.753.113	0,120000000000000
01	DEKTERAN METRAMORFOSIS NASIONAL	30.311.119.000	36.332.241.139	37.481.970	36.270.753.113	0,120000000000000
055	DEKTERAN PUSAT STATISTIK	2.281.448.348.000	2.482.800.320.007	511.882.114	2.482.240.881.003	0,107500000000000
01	DEKTERAN PUSAT STATISTIK	2.281.448.348.000	2.482.800.320.007	511.882.114	2.482.240.881.003	0,107500000000000
056	DEKTERAN PUSAT STATISTIK	334.481.349.000	2.401.129.271.012	318.307.194	2.401.440.816.802	0,072000000000000
01	DEKTERAN PUSAT STATISTIK	334.481.349.000	2.401.129.271.012	318.307.194	2.401.440.816.802	0,072000000000000
057	DEKTERAN PUSAT STATISTIK	211.265.710.000	543.377.884.118	1.241.188.751	542.000.584.354	0,256000000000000
01	DEKTERAN PUSAT STATISTIK	211.265.710.000	543.377.884.118	1.241.188.751	542.000.584.354	0,256000000000000

MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.663.483.143,000	2.161.777.205,537	3.871.084,137	2.157.886.114,400	11.375.000.000,000
057	PERUMPERUMNAS NASIONAL	1.139.401.142,000	2.461.111.204,511	91.251.264,124	2.369.859.940,387	30.150.000,000
058	PERUMPERUMNAS NASIONAL	451.083.310,000	601.158.860,119	111.545,218	489.613,901	30.150.000,000
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	4.511.000,000	2.147.956,118,798	9.271,207,818	2.148.927,926	62.000.000,000
060	DEPARTEMEN KEHUTANAN	3.177.000,000	82.652,323,371	31.301,380	82.621,022	62.000.000,000
061	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	19.050,000	8.920,174,010	302,234	8.919,871,776	15.000,000
062	DEPARTEMEN TELEKOMUNIKASI	750.180,000	8.338.103,310	2.022,542,302	6.315,561,008	1.745,121,000
063	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	158.100,000	64.376,376,053	211,018	64.376,165,035	34.000,000
064	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	13.101,712,000	30.409,494,012	2.421,111,336	27.988,382,676	30.000,000
065	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	150.118,632,000	41.708,655,118	455,261,617	41.253,393,501	1.000,000
066	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	130.241,411,000	27.451,119,914	11,061,008	27.440,058,906	45.000,000
067	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	51.281,148,000	34.657,845,081,837	12.001,465,118	32.656,380,963	3.133,502,500,000
068	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	31.751,114,000	38.437,643,481,627	67,001,128,016	38.370,642,353,611	3.312,271,000
069	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	921.800,000	770,722,235,418	9,110,990,711	761,611,244,707	103,177,701,222
070	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	538.800,000	332,532,335,739	5,121,205,701	327,411,130,038	65,000,000,000
071	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	233.000,000	208,301,903,308	403,474,510	207,898,428,798	29,278,199,271
072	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	233.000,000	205,331,303,318	453,471,578	204,877,831,740	25,738,161,270
073	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	511.000,000	457,055,656,181	1,177,281,748	455,878,374,433	34,440,136,501
074	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	510.000,000	471,339,398,013	1,222,292,259	469,117,105,754	15,349,136,501
075	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	871.000,000	770,488,042,718	811,218,842	769,676,823,876	308,301,848,201
076	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	3.000,000	22,456,342,448	613,211,062	22,843,131,386	201,011,644,231
077	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	1.283,571,132,000	1.133,700,050,515	401,768,830	1.135,968,880,345	130,175,381,261
078	DEPARTEMEN PERTANAHAN DAN PERUMPERUMNAS	1.333,571,132,000	11,330,293,048	485,166,831	11,330,808,879	249,000,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELOW I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELOW I	BAGIAN ANGGARAN & ESELOW I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN
086	BADAN KORDINASI UJIAN BERGAMA NASIONAL	2.584.242.000,00	2.386.038.837,587	2.134.865,152	2.383.904,685	153.180.084,550
-1	BADAN KORDINASI UJIAN BERGAMA NASIONAL	2.584.242.000,00	2.386.038.837,587	2.134.865,152	2.383.904,685	153.180.084,550
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	51.588.288,000	55.115.993,718	231.123,883	55.478.788,027	33.109.481,478
-1	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	51.588.288,000	55.115.993,718	231.123,883	55.478.788,027	33.109.481,478
075	BENDAHUBUNGAN KUMANTOLONGI DAN GEOGRAFIKA	1.317.340,332,000	1.108.726.426,789	111.971,314	1.108.999.954,401	108.786.476,991
-1	BENDAHUBUNGAN KUMANTOLONGI DAN GEOGRAFIKA	1.317.340,332,000	1.108.726.426,789	111.971,314	1.108.999.954,401	108.786.476,991
076	KOMISI PEMULIHAN UMUM	1.084.207,400,000	704.779.973,172	3.111,690,549	701.668,282,623	147.231.917,476
-1	KOMISI PEMULIHAN UMUM	1.084.207,400,000	704.779.973,172	3.111,690,549	701.668,282,623	147.231.917,476
077	KOMISI PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	1.120.587,750,000	394.735.253,525	3.234,555,555	391.500,707,970	247.721.651,038
-1	KOMISI PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	1.120.587,750,000	394.735.253,525	3.234,555,555	391.500,707,970	247.721.651,038
078	MARHAHAH HONORARIO BPH	300.066,716,000	287.476,571,488	213,941,814	287.262,629,673	50.494,332,181
-1	MARHAHAH HONORARIO BPH	300.066,716,000	287.476,571,488	213,941,814	287.262,629,673	50.494,332,181
078	PUSAT PELAKSANAAN DAN ANALISIS TRANSKASI NEUANGAN	81.266,416,000	48.117,333,116	314,501,235	47.802,831,881	50.162,573,111
-1	PUSAT PELAKSANAAN DAN ANALISIS TRANSKASI NEUANGAN	81.266,416,000	48.117,333,116	314,501,235	47.802,831,881	50.162,573,111
079	LEMBAGA URU PESEJAJARAN INDONESIA	811.983,213,000	184.399,958,584	1.783.108,218	182.616,850,366	48.108.856,285
-1	LEMBAGA URU PESEJAJARAN INDONESIA	811.983,213,000	184.399,958,584	1.783.108,218	182.616,850,366	48.108.856,285
080	BENDAHUBUNGAN ZONIRNASIONAL	693.200,500,000	974.498,206,319	727,991,177	973.770,215,142	21.422,872,002
-1	BENDAHUBUNGAN ZONIRNASIONAL	693.200,500,000	974.498,206,319	727,991,177	973.770,215,142	21.422,872,002
081	BENDAHUBUNGAN DAN PERENCANAAN TEKNOLOGI	983.007,218,000	1.407.208.476,087	977,971,717	1.407.430.991,844	17.103.031,244
-1	BENDAHUBUNGAN DAN PERENCANAAN TEKNOLOGI	983.007,218,000	1.407.208.476,087	977,971,717	1.407.430.991,844	17.103.031,244
082	LEMBAGA PERENCANAAN DAN ANTARNASIONAL	443.581,134,000	403,513,183,488	13.865,315	403,374,318,173	32.789,299,011
-1	LEMBAGA PERENCANAAN DAN ANTARNASIONAL	443.581,134,000	403,513,183,488	13.865,315	403,374,318,173	32.789,299,011
083	BADAN KORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	511.441,000,000	497,134,145,338	854,304,117	496,279,841,221	23.162,248,582
-1	BADAN KORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	511.441,000,000	497,134,145,338	854,304,117	496,279,841,221	23.162,248,582
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	81.014,151,000	75,118,408,107	111,041,418	74,997,366,689	17.155,781,411
-1	BADAN STANDARISASI NASIONAL	81.014,151,000	75,118,408,107	111,041,418	74,997,366,689	17.155,781,411

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELOW I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELOW I	BAGIAN ANGGARAN & ESELOW I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REKASIMETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN
085	BADAN PEJABAT TERAKHIR	71.788.461.000	68.132.780.188	613.711.124	68.337.068.734	7.441.381.266
21	BADAN PEJABAT TERAKHIR	0	0	0	0	0
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	241.945.472.000	350.833.884.403	211.781.819	350.385.210.874	5.783.745.874
21	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	0	0	0	0
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131.800.000.000	141.347.003.019	481.791.812	140.787.713.927	11.427.876.873
21	ARSIP NASIONAL	0	0	0	0	0
088	BANDAR UDARA NASIONAL	474.402.749.000	41.347.003.019	452.780.000	41.347.003.019	1.177.876.073
21	BANDAR UDARA NASIONAL	0	0	0	0	0
089	BANDAR UDARA NASIONAL DAN PERBANGUNAN	47.382.289.000	31.037.133.325	531.200.114	45.361.188.000	23.498.100.190
21	BANDAR UDARA NASIONAL DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
090	BANDAR UDARA NASIONAL DAN PERBANGUNAN	111.265.833.000	344.779.064.717	4.013.701.171	340.006.334.991	23.579.461.981
21	BANDAR UDARA NASIONAL DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
091	DEPARTEMEN PERKAWINAN	70.826.479.000	2.375.141.662.701	3.211.067.812	2.371.813.104.800	27.163.105.101
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN	0	0	0	0	0
092	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	5.758.141.700.000	0.000.000.000.000	553.387.000	0.000.000.000.000	87.812.433.522
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
093	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	118.659.457.000	68.279.524.633	291.467.202	58.118.288.311	41.989.601.361
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
094	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	111.224.479.000	91.311.484.155	36.341.660	91.418.220.622	24.519.461.981
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
095	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	30.018.186.000	25.630.363.675	30.787.508	23.856.300.167	12.431.883.834
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
096	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	4.000.000.000.000	0.000.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000.000	0.000.000.000.000
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
097	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	18.582.700.000	18.122.582.714	30.3.52.000	18.122.582.714	1.218.883.834
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
098	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	31.099.974.000	9.210.823.570	11.711.010	9.210.823.570	11.519.461.981
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
099	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	3.000.000.000.000	2.382.210.311.000	511.043.814	2.382.210.311.000	11.938.103.872.000
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
100	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	4.437.071.180.000	2.361.629.944.810	2.361.629.944	2.361.629.944	0.000.000.000.000
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
101	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	4.883.800.000.000	4.123.500.005.712	2.511.188.249	4.123.500.005.712	137.487.282.537
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0
102	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	4.343.585.000.000	4.024.529.906.712	2.585.182.249	4.024.529.906.712	2.745.747.987
21	DEPARTEMEN PERKAWINAN DAN PERBANGUNAN	0	0	0	0	0

MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
099	LOKASI PEMERINTASAN KORUPSI	571.548.338.000	300.142.372.718	713.856.214	300.232.411.253	176.360.841.171
-1	KUM. SIMPA-SIMPAN KUM. ALIUS	5.014.841.248.000	300.942.112.719	11.131.412.944	311.229.416.479	2.412.250.841.171
099	DEWAN PERAWALAN DAERAH (DPO)	1.131.141.272.000	582.338.13.739	9.113.838.817	553.000.871.688	103.120.734.531
-1	STRUKTUR, FIKSI DAN CINTA	150.600.000.000	285.477.363.657	31.300.554	254.176.809.123	3.133.113.877
-2	DEWAN KEWALIDYAN (DKEW)	25.000.000.000	271.759.153.059	9.774.281.270	261.984.871.789	491.280.743.594
100	LOKASI TUKSAL RI	71.718.312.000	68.132.247.308	314.681.815	68.446.929.123	11.107.743.255
-1	KUM. SILINDRI HI	49.714.242.000	68.937.247.240	301.304.111	69.238.551.351	1.111.811.111
103	BADAN NASIONAL PENGANGKUTAN BENCANA	631.460.332.000	1.142.355.744.419	9.451.308.512	1.132.904.435.907	294.150.119.403
-1	FAKOR NASIONAL PENGANGKUTAN BENCANA	138.800.322.000	241.301.744.440	9.405.305.502	231.900.438.937	204.000.113.927
104	BADAN NASIONAL PEMBATAS DAN PERUMPOANGAN TKI	423.700.717.000	270.493.002.139	1.493.777.438	271.986.224.702	88.706.002.290
-1	SOLUSI LOKASI DAN PERUMPOANGAN TKI	433.700.717.000	325.433.702.139	1.493.777.438	326.926.224.702	111.216.002.290
105	BADAN PERANGKUTAN LUMPUH SIKORJID	1.284.400.317.000	172.176.807.294	213.013.210	172.389.820.474	174.196.027.474
-1	BADAN PERANGKUTAN LUMPUH SIKORJID	1.284.400.317.000	172.176.807.294	213.013.210	172.389.820.474	174.196.027.474
106	LEMBAGA REALISASI PENGANGKUTAN BENCANA PEMERINTAH	1.136.000.000.000	173.481.279.495	2.071.141.533	171.409.137.962	38.132.800.100
-1	LEMBAGA REALISASI PENGANGKUTAN BENCANA PEMERINTAH	1.136.000.000.000	173.481.279.495	2.071.141.533	171.409.137.962	38.132.800.100
107	BADAN SAR NASIONAL	1.324.148.113.000	1.163.837.844.003	13.081.112	1.150.756.732.891	125.470.381.110
-1	BADAN SAR NASIONAL	1.324.148.113.000	1.163.837.844.003	13.081.112	1.150.756.732.891	125.470.381.110
108	LOKASI PERANGKUTAN PERANGKUTAN USAHA	181.000.314.000	68.315.571.115	711.805.150	68.004.766.005	113.155.576.005
-1	LOKASI PERANGKUTAN PERANGKUTAN USAHA	181.000.314.000	68.315.571.115	711.805.150	68.004.766.005	113.155.576.005
109	BADAN PERANGKUTAN MELAYAH SURABADU	292.200.000.000	99.244.239.319	14.823.000	99.200.000.319	123.299.999.999
-1	BADAN PERANGKUTAN MELAYAH SURABADU	292.200.000.000	99.244.239.319	14.823.000	99.200.000.319	123.299.999.999
110	LOKASI PERANGKUTAN MELAYAH SURABADU (LPS)	18.112.430.000	65.251.255.519	51.205.000	34.046.255.519	202.200.000.000
-1	LOKASI PERANGKUTAN MELAYAH SURABADU (LPS)	18.112.430.000	65.251.255.519	51.205.000	34.046.255.519	202.200.000.000
111	BADAN NASIONAL PERANGKUTAN PERANGKUTAN	16.511.300.000	5.576.264.111	28.300.000	15.546.800.181	173.200.000
-1	BADAN NASIONAL PERANGKUTAN PERANGKUTAN	16.511.300.000	5.576.264.111	28.300.000	15.546.800.181	173.200.000
111	BADAN NASIONAL PERANGKUTAN PERANGKUTAN	454.000.000.000	314.335.278.379	2.314.081.616	312.021.196.763	114.190.000.191

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJAR PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN
21	INDONESIA	157.000.000.000	3.74.535.223.539	2.352.300.656	312.179.182.823	41.830.043.174
999	BEJARAN UMUM NEGARA	440.120.411.243.400	400.109.073.722.491	317.242.211.440	404.846.318.211.891	16.112.804.700.091
21	KEJARAN KEMENTERIAN	102.553.811.521.000	302.233.330.401.129	2.083.320.024	300.150.010.105	141.871.533.223.885
22	KEJARAN KEMENTERIAN	232.436.672.143.000	301.344.105.129	2	301.344.105.129	62.906.633.687.233
23	KEJARAN KEMENTERIAN	430.180.182.000	29.213.229.538.234		292.929.229.628.224	294.532.017.443.234
24	KEJARAN KEMENTERIAN	112.888.432.821.800	14.214.111.400.336	87.651.211.554	14.214.111.400.336	156.131.659.332.048
25	KEJARAN KEMENTERIAN	101.208.432.821.800	10.000.000.000.000	276.113.310.000	10.000.000.000.000	50.400.000.000.000
		992.343.497.667.400	824.102.206.241.445	1.116.370.151.176	822.771.288.191.519	24.571.536.461.281

RI-437E

LAPORAN REALISASI PENGANTAR BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MEMURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI SUBFUNGSI	FUNGSI SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	PERILIKSI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	PELAYANAN UMUM	960.456.106.102.800	806.316.716.371.388	370.201.743.846	608.846.465.027.864	161.608.661.636.248
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAIRY, LOGIS, AT G, MASALAH KUMBUKA	90.717.686.361.000	86.003.676.494.757	182.240.270.377	86.003.676.494.757	64.076.337.764.914
01 02	PELAYANAN LOKAL	12.153.725.150.000	11.351.872.113	72.424.497.779	11.351.872.113	684.767.675.522
01 04	PELAYANAN PELAYANAN PERSERIKATAN PTE	2.375.351.370.000	2.375.351.370.000	549.200.823	2.375.351.370.000	178.382.367.634
01 05	PELAYANAN PENCANTAI	1.06.300.576.410.000	82.037.367.020.376	2.807.836.347	82.037.367.020.376	114.916.648.364.866
01 06	PELAYANAN PELAYANAN	2.229.221.433.000	2.229.221.433.000	3.462.229.302	2.229.221.433.000	917.222.679.302
01 07	PELAYANAN PELAYANAN	200.313.377.000	200.313.377.000	113.003.247.211	200.313.377.000	966.736.673.766
01 08	PELAYANAN PELAYANAN	3.5.1030.5.703.800	3.4.832.357.342.567	83.04.418.353	3.4.832.357.342.567	36.507.022.654.000
01 09	PELAYANAN PELAYANAN	2.3.3.300.300	2.3.3.300.300	..	2.3.3.300.300	2.3.3.300.300
02	PERTAHANAN	48.954.107.640.000	51.779.248.764.189	157.258.011.292	51.779.248.764.189	1.166.881.672.997
02 01	PERTAHANAN NEGARA	45.313.465.288.000	48.883.367.037.392	144.881.810.778	48.883.367.037.392	1.768.638.623.244
02 02	PELAYANAN PERTAHANAN	4.330.028.182.000	4.276.463.416.590	141.294.214	4.276.463.416.590	630.107.086.800
02 04	PELAYANAN PERTAHANAN	100.611.660.000	37.602.066.760	86.301.600	133.307.309.469	11.767.120.642
03	KERTERANGAN DAN KEKAWAIBAN	24.326.142.707.000	21.117.819.061.668	26.581.195.191	21.117.819.061.668	2.630.504.341.570
03 01	KETERANGAN	11.200.435.261.000	10.668.460.218.330	8.076.728.378	10.668.460.218.330	11.233.620.306.336
03 02	PELAYANAN KEKAWAIBAN	369.650.325.000	242.355.777.418	9.463.908.542	1.232.300.338.007	25.400.173.907
03 03	PELAYANAN KEKAWAIBAN	2.916.925.420.000	2.330.638.067.943	3.371.687.307	2.330.638.067.943	1.888.740.046.532
03 04	PELAYANAN KEKAWAIBAN	6.111.328.261.000	4.736.662.710.770	6.666.470.770	4.736.662.710.770	11.302.137.666.000
03 05	PELAYANAN KEKAWAIBAN	254.974.971.000	243.777.497.223	28.447.923	243.777.497.223	1.465.167.200
03 06	PELAYANAN KEKAWAIBAN	2.836.306.322.000	2.836.306.322.000	1.066.060.306	2.836.306.322.000	1.647.067.502.312
04	BLOKUM	103.817.647.624.000	87.344.488.761.362	88.246.246.618	87.344.488.761.362	118.071.636.008.188
04 01	PERONGGOKAN, PEREMENANGAN USANG, KOPERAS DAN LKM	3.363.131.788.000	2.873.773.457.331	2.280.738.387	2.371.312.362.237	10.638.125.700

3A-1104-251

RI-437/E

LAPORAN REALISASI PENGANGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MEMURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGESALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	PERILAKI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04-02	TUGAS BOEJA	2.104.126.362,000	1.638.381.310,648	3.723,73%	1.638.381.310,648	138.745,051,352
04-03	PERTAHANAN, SERTIFIKASI DAN KEKALITA	17.213.931.211,000	5.533.30.898,795	32,15%	5.533.30.898,795	(11.680.630,402)
04-04	PEKERJAAN	12.843.334.843,000	10.986.489.239,390	85,62%	10.986.489.239,390	(1.856.845,603,610)
04-05	DAFTAR BELANJA DAN JENIS	10.784.536.171,000	6.730.373.028,178	62,51%	6.730.373.028,178	(4.054.162,842,822)
04-06	PERFORMANCE	1.244.726.327,000	864.251.074,508	69,44%	864.251.074,508	(379.475,352,492)
04-07	MELICHT: DAN KONSISTENSI	2.800.326.832,000	2.292.953.001,374	81,88%	2.292.953.001,374	(507.373,830,626)
04-08	TRANSPORTASI	16.193.774.787,000	14.041.987.052,151	86,71%	14.041.987.052,151	(2.151.787,734,849)
04-09	TELEKOMUNIKASI	1.453.300,000	1.405.879,329	96,81%	1.405.879,329	(47.420,671)
04-10	PERUSAHAAN	2.311.134.311,000	2.304.884.051,370	99,73%	2.304.884.051,370	(6.249,958,630)
04-11	KEKAWALAN	3.709.889.210,000	4.330.436.820,242	116,73%	4.330.436.820,242	620.547,610,242
05	LINGKUNGAN HIDUP	10.935.896.190,000	8.623.071.179,792	78,94%	8.623.071.179,792	(2.312.824,910,208)
05-01	KAWALAN, LINGKUNGAN	2.974.822.340,000	2.238.241.711,007	75,28%	2.238.241.711,007	(736.580,628,993)
05-02	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	223.039.261,000	199.340.974,228	89,37%	199.340.974,228	(23.698,286,772)
05-03	KERANGKASAN DAN KEBERKAWALAN	2.401.371.643,000	1.704.481.024,790	70,97%	1.704.481.024,790	(696.889,618,210)
05-04	TATA LAKSANA DAN KEBERKAWALAN	2.347.622.399,000	2.130.350.216,748	90,75%	2.130.350.216,748	(217.272,182,252)
05-05	LINGKUNGAN DAN KEKAWALAN	395.881.025,000	394.048.872,737	99,54%	394.048.872,737	(1.832,152,263)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	28.721.288.201,000	22.842.590.218,175	79,56%	22.842.590.218,175	(5.878.697,982,825)
06-01	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	2.380.526.060,000	1.939.572.070,739	81,48%	1.939.572.070,739	(440.953,989,261)
06-02	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	3.419.228.847,000	3.134.817.880,387	91,65%	3.134.817.880,387	(284.410,966,613)
06-03	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	3.129.822.630,000	3.022.177.278,377	96,57%	3.022.177.278,377	(107.645,351,623)
06-04	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	17.791.712.864,000	14.852.991.976,158	83,54%	14.852.991.976,158	(2.938.720,887,842)

30/11/2011-15:00

LAPORAN REALISASI PENGANTAR PUSAT JULI 2011-2007/2012

Rp. Miliar

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
 MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
 TAHUN ANGGARAN 2011
 (dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGENSIALAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
07	KESEHATAN	14.816.388.704,000	14.183.306.877,000	74.688,020,872	14.008.788.266,183	17.201.607,807
07.01	DEKATIFISIKASI KESEHATAN	1.283.870.238,000	1.537.273.771,500	8.773,416,787	1.528.500.354,713	238.438.351,511
07.02	Pelayanan Kesehatan Primer	8.316.314.471,000	8.238.507.888,500	4.738,113,363	8.193.774,435,137	306.388.237,777
07.03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	321.667.731,000	322.359.824,747	3.044,076,250	1.313.213,629,513	38.763.787,676
07.04	Keprofesionalan Belanja Kesehatan	2.903.383.767,000	2.358.758.934,597	2.739,945.152	2.363.301.462,475	135.030.044,553
07.05	Program Kesehatan	414.024.100,000	343.470.880,358	2.057.046,574	341.413.833,783	129.683.278,000
07.06	Kesehatan Lingkungan	81.885.598,000	338.332.370,343	0.885.495,608	353.133.385,435	1.153.688.683,663
08	PARAHISATA DAN BUDAYA	3.890.821.826,000	3.666.826.666,443	3.172,030,168	3.663.654,517,287	1340.388.807,713
08.01	Pembinaan dan Negeri Kebudayaan	1.759.235.365,000	252.711.000,397	486.930,311	1.251.301.783,085	231.587.294,824
08.02	Pembinaan dan Negeri Kebudayaan	8.428.100,000	7.949.700,300		7.943.108,900	482.601,000
08.04	Program Organisasi dan Budaya	63.757.000,000	34.385.810,572	20.748.48	34.372.781,634	15.077.238,836
08.05	Pembinaan dan Negeri Kebudayaan	1.373.382.300,000	842.229.244,344	23.600,500	1.339.008.339,248	53.680.600,042
08.06	Pembinaan dan Negeri Kebudayaan	432.370.860,000	388.380.234,770	282.847,911	389.427.633,899	83.168.278.000
09	AGAMA	1.663.070.493,000	1.028.657.061,237	4.796,161,787	1.023.860,879,450	11.291.237,673,660
09.01	Pembinaan dan Negeri Agama	754.761.860,000	708.790.611,536	2.830.070,234	705.960.541,302	346.035.467,666
09.02	Keprofesionalan dan Negeri Agama	634.232.262,000	58.278.737,939	38.485.460	58.137.313,473	15.268.645,557
09.03	Program Organisasi dan Negeri Agama	217.339.420,000	9.300.821,362	9.338.362	97.238.239,923	30.449.189,000
09.04	Pelayanan dan Negeri Agama Lainnya	367.062.312,000	67.260.030,136	1.000,000	66.260,030,136	8.742.071,233
10	PERDIKSI	107.676.668,674,000	88.004.266.001,272	180.200,086,827	87.824,086,184,445	38.822,611.669,660
10.01	Pembinaan dan Negeri Pendidikan	390.313.277,000				156.313.277,000
10.02	Pembinaan dan Negeri Pendidikan	22.604.341,267,000	20.535.905,321,228	28.712,103	20.477,337,373,823	11.882,637,384.777
10.03	Pembinaan dan Negeri Pendidikan	11.231,671,452,000	11.471,471,452,000	27.471,452,000	11.444,000,000,000	11.289.481.441,442
10.04	Pembinaan dan Negeri Pendidikan Lainnya	4.928,607,947,000	4.179.341.893,322	25.694,705,005	4.153,647,188,317	400.360.687,863

31/10/2012

RI-132/E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
 MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
 TAHUN ANGGARAN 2011
 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011: 09/07/2011

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGENSIALAN	REALISASI BELANJA NETTO	PERILAKSI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1.00	PEL. DICI. CAR. KEDIRASAK.	863.629.369.000	863.629.400.327	377.640.230	485.989.170.097	561.762.306.401
1.01	PEL. DICI. CAR. TIM. 30.	39.302.736.826.000	39.338.792.459.932	39.243.229.532	35.997.566.927.000	41.256.932.782.700
1.01.1	PELAYANAN KEMALUANGAN DAN KESEHATAN	8.583.228.749.000	8.588.321.884.134	8.542.881.111	8.548.117.938.033	8.548.200.230.310
1.01.10	PEL. DICI. CAR. KE-GURUPAAN	3.262.136.672.000	3.034.373.031.178	6.636.063.306	2.330.440.309.312	3.664.730.362.466
1.01.10.1	L. SA. MU. 500.100.1	1.311.935.439.000	1.513.917.244.442	3.908.224.264	1.171.331.171.429	1.711.225.872.211
1.01.10.10	PERALANGAN KEMALUANGAN DAN KESEHATAN	2.100.344.300.000	1.497.507.377.379	247.354.300	1.374.304.367.773	2.010.000.000.227
1.01.10.10.1	PEL. DICI. CAR. L. 100.1	17.289.412.867.000	14.28.669.804.29	8.856.314.238	7.113.210.910.75	1.853.922.403.853
1.01.10.10.10	PERALANGAN BOBILA	4.584.177.087.000	3.917.323.893.892	10.847.482.366	3.906.316.361.526	1.678.400.125.419
1.01.10.10.10.1	PERAL. KURUPAN DAN PERAL. BUKAN PERAL. 30.1.1. CAR. CUKAI	2.944.481.864.000	2.944.302.808.813	142.298.864	2.944.010.510.948	2.944.010.510.948
1.01.10.10.10.10.1	PERAL. KURUPAN DAN PERAL. BUKAN PERAL. 30.1.1. CAR. CUKAI	109.271.862.000	76.336.371.39	32.375.708	103.302.866.372	103.302.866.372
1.01.10.10.10.10.10.1	PERAL. KURUPAN DAN PERAL. BUKAN PERAL. 30.1.1. CAR. CUKAI	683.022.459.000	437.590.222.217	2.651.814.578	435.038.407.639	416.669.396.913
1.01.10.10.10.10.10.10.1	PERAL. KURUPAN DAN PERAL. BUKAN PERAL. 30.1.1. CAR. CUKAI	121.880.425.000	77.700.298.244	408.210.380	171.334.348.474	164.338.422
1.01.10.10.10.10.10.10.10.1	DAL. TILAK DAN JAMBUH DOS AL	73.320.100.000	38.677.000.000	66.406.700	39.477.412.226	65.703.683.773
1.01.10.10.10.10.10.10.10.10.1	L. SA. MU. 500.100.1	27.320.311.000	220.425.808.740	203.248.508	220.425.808.740	220.425.808.740
1.01.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1	PERAL. KURUPAN DAN PERAL. BUKAN PERAL. 30.1.1. CAR. CUKAI	3.780.287.388.000	2.706.361.334.540	6.306.268.870	2.330.365.375.671	2.330.365.375.671
00.00	Jumlah Subtumpai Tidak Aktif		62.676.400.534.863	237.658.660.037	62.337.741.874.826	62.337.741.874.826
	JUMLAH	908.243.922.697.800	887.008.206.608.416	1.166.290.661.826	883.721.866.191.618	244.621.636.481.281

2011/10/28

04-736 3.4

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIMESTER DAN PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Rupiah)

No.	Wilyayah	Data Bagi Hasil					DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Subsi	Jumlah				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Provinsi Kalimantan Tengah	1.174.448.854.151	1.827.801.142.882	1.451.813.222,7	2.540.114.040.328	8.423.164.848.101	310.613.401.000	12.305.332.553.823	
2	Provinsi Kalimantan Barat	1.725.452.187.837	53.309.342.699	7.896.892.693	1.784.740.432.239	13.227.375.552.300	1.484.971.475.000	19.717.386.469.933	
3	Provinsi Kalimantan Selatan	543.579.243.902	21.157.053.630	5.390.213.465	622.123.063.472	2.171.311.692.300	276.471.500.000	3.155.361.413.472	
4	Provinsi Kalimantan Timur	2.307.281.110.155	112.163.993.662.081	1.969.773.670	3.734.561.771.316	1.977.392.437.300	310.831.425.000	17.861.741.257.013	
5	Provinsi Kalimantan Utara	337.605.853.371	2.316.281.772.678	1.869.773.670	3.734.561.771.316	1.977.392.437.300	14.073.275.000	5.682.344.970.659	
6	Provinsi Sulawesi Barat	313.816.368.421	1.614.813.184.101	1.301.073.711	3.290.583.948.251	4.412.101.448.101	424.017.101.000	7.442.301.174.251	
7	Provinsi Sulawesi Tengah	1.781.533.368.559	5.283.051.368.625	783.873.622	3.639.393.042.338	3.814.343.400.300	389.862.00.000	14.346.341.448.933	
8	Provinsi Sulawesi Utara	292.282.972.297	752.009.287.277	1.039.978.298.794	1.039.978.298.794	2.888.443.940.300	238.097.400.000	3.866.399.977.794	
9	Provinsi Sumatera Utara	233.689.233.388	77.512.633.712	3.411.774.182	1.632.315.362.355	3.651.546.602.300	45.111.500.000	4.433.410.021.812	
10	Provinsi Sumatera Barat	873.076.318.481	417.462.772.000	1.791.877.479	3.847.383.481.115	3.701.467.012.101	454.794.829.000	3.063.500.832.855	
11	Provinsi Sumatera Selatan	3.891.076.175.682	1.211.611.507.621	113.078.633.468	521.139.076.328	21.236.362.565.300	1.312.223.675.000	27.850.955.978.899	
12	Provinsi Lampung	1.586.251.792.303	16.805.342.812	1.477.631.267	1.306.343.978.299	4.845.472.692.300	444.093.650.000	5.849.971.761.299	
13	Provinsi Bengkulu	2.502.469.183.573	53.532.672.628	312.908.877.712	2.539.338.032.517	21.262.242.603.300	2.214.392.000.000	23.514.337.864.517	
14	Provinsi Jambi	314.416.184.000	1.411.677.879	311.182.868.777	3.067.347.031.084	3.231.173.717.101	11.363.200.000	31.814.816.827.084	
15	Provinsi Kepulauan Riau	3.136.246.370.733	138.632.043.693	732.343.831.627	4.672.802.754.215	23.342.394.203.300	2.102.211.275.000	30.455.351.562.215	
16	Provinsi Aceh	320.502.141.059	153.632.355.601	1.421.853.484	827.374.882.326	3.668.443.223.300	262.772.400.000	3.931.215.623.326	
17	Provinsi Aceh Tenggara	330.689.337.280	740.249.021.577	1.421.853.484	1.441.430.471.112	3.668.443.223.300	984.073.475.000	3.652.503.696.112	
18	Provinsi Aceh Selatan	501.198.499.300	3.253.407.222.111	3.668.336.57.331	4.689.381.772.200	4.689.381.772.200	248.099.340.000	9.792.917.073.331	
19	Provinsi Aceh Timur	2.364.740.984.812	21.862.171.888.729	33.223.17.888.729	33.223.17.888.729	3.622.341.442.101	318.248.274.000	27.244.146.501.471	
20	Provinsi Aceh Lhokseumawe	398.115.373.326	13.759.867.173	1.334.251.277	401.231.682.298	4.689.381.772.200	100.135.000.000	3.041.170.941.553	
21	Provinsi Aceh Singkep	190.111.873.698	2.779.772.888	31.291.302.446	1.128.278.678.300	1.128.278.678.300	138.278.678.300	2.302.238.781.446	
22	Provinsi Aceh Nagan	388.188.620.217	30.163.736.118	2.162.136.129	430.177.574.789	5.021.306.669.300	388.175.500.000	3.465.531.862.159	

31-PTDP-164-155

04-73F.3.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH RI TAHUN 2011 (ASAS AKRAB)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER ORANG PERIMBAGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Wilyah	Data Bagi Hasil					DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Subsi	Jumlah				
		2	4	5	0 + 2 + 4 + 5	7	8	6 = 0 + 7 + 8	
1									
24	Provinsi Jawa Tengah	1.096.012.890.804	46.186.306.830	8.284.406.812	1.502.577.926.237	3.942.414.011.000	1.241.133.400.000	12.264.582.252.237	
25	Provinsi Jawa Barat	194.551.642.750	2.827.066.605	8.724.406.812	3.717.865.234	3.053.316.469.000	300.351.500.000	3.353.667.969	
26	Provinsi Jawa Timur	390.706.259.470	122.762.374.400	430.522.716.990	430.522.716.990	4.950.956.000.000	524.854.075.000	5.965.780.462.000	
27	Provinsi Sulawesi Selatan	531.217.953.655	2.022.332.697	3.077.192.752	3.477.442.385.000	3.827.252.322.000	288.013.600.000	4.105.521.924.000	
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	374.519.312.050	207.532.062.418	150.306.737.267	732.357.111.735	1.618.796.000.000	198.031.500.000	3.075.231.611.735	
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	433.988.254.443	11.010.633	1.326.883.780	435.315.148.226	1.467.446.871.000	1.106.888.000.000	3.075.231.611.735	
30	Provinsi Maluku	391.631.553.012	48.272.634.634	1.326.883.780	440.126.241.346	4.230.302.468.000	508.639.250.000	5.000.000.000	
31	Provinsi Maluku Utara	1.326.883.780	23.000.000.000		25.326.883.780	3.477.252.322.000	398.819.500.000	5.000.000.000	
32	Provinsi Papua	1.326.883.780	1.391.181.960.658		2.718.065.740.658	12.452.300.775.000	2.721.113.650.000	13.945.300.082.512	
33	Provinsi Papua Barat	391.631.553.012	1.391.181.960.658		2.718.065.740.658	4.230.302.468.000	398.819.500.000	5.000.000.000	
34	Provinsi Kalimantan Tengah	41.575.556.915.173	53.974.326.791.954	1.408.443.764.124	96.958.327.471.251	775.533.117.042.000	74.202.509.975.000	347.946.373.954.216	
	JUMLAH								

31CTDF-1F4-196

JALAN PULOMATI, KOTA SURABAYA

No. 14/12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pajak	Realisasi			
			PPH Pengutang	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	Provinsi Kepulauan Riau	224.658.386.410	64.058.948.207	168.598.437.283		232.657.385.410
2	Gab. Aceh Darussalam	20.000.000.000	2.702.000.000	2.300.000.000		23.000.000.000
3	Gab. Aceh Besar	28.898.988.151	8.294.472.262	20.604.515.889		28.903.988.151
4	Gab. Aceh Selatan	27.814.598.638	7.086.371.531	20.728.227.107		27.814.598.638
5	Gab. Aceh Singgih	20.000.000.000	2.472.447.447	17.527.552.553		20.000.000.000
6	Gab. Aceh Tenggara	22.758.207.823	3.282.488.107	19.475.719.716		22.758.207.823
7	Gab. Aceh Utara	20.470.867.145	2.724.001.381	17.746.865.764		20.470.867.145
8	Gab. Aceh Barat	86.113.688.825	2.291.975.246	83.821.713.579		86.113.688.825
9	Gab. Aceh Barat Daya	17.787.508.158	5.787.581.874	12.000.000.000		17.787.508.158
10	Gab. Aceh Selatan	26.418.000.182	3.881.041.762	22.536.958.420		26.418.000.182
11	Gab. Aceh Tenggara	25.778.008.011	7.593.083.873	18.184.924.138		25.778.008.011
12	Gab. Aceh Singgih	2.70.000.000	2.1.000.000	3.000.000.000		2.70.000.000
13	Gab. Aceh Tenggara	37.000.000.000	18.988.000.000	18.012.000.000		37.000.000.000
14	Gab. Aceh Tenggara	10.800.000.000	2.1.000.000	8.700.000.000		10.800.000.000
15	Gab. Aceh Tenggara	20.000.000.000	4.000.000.000	16.000.000.000		20.000.000.000
16	Gab. Aceh Tenggara	17.800.000.000	8.000.000.000	9.800.000.000		17.800.000.000
17	Gab. Aceh Tenggara	27.000.000.000	3.000.000.000	24.000.000.000		27.000.000.000
18	Gab. Aceh Tenggara	23.800.000.000	2.700.000.000	21.100.000.000		23.800.000.000
19	Gab. Aceh Tenggara	20.000.000.000	2.000.000.000	18.000.000.000		20.000.000.000
20	Gab. Aceh Tenggara	22.744.298.827	3.301.088.984	19.443.209.843		22.744.298.827
21	Gab. Aceh Tenggara	28.500.000.000	1.700.000.000	26.800.000.000		28.500.000.000
22	Gab. Aceh Tenggara	1.000.000.000	3.700.000.000	2.700.000.000		1.000.000.000
23	Gab. Aceh Tenggara	27.000.000.000	1.000.000.000	26.000.000.000		27.000.000.000
24	Gab. Aceh Tenggara	15.000.000.000	2.100.000.000	12.900.000.000		15.000.000.000
25	Provinsi Sumatera Utara	301.000.000.000	104.882.744.321	227.398.877.180		301.000.000.000
26	Gab. Aceh	54.400.000.000	8.800.000.000	45.600.000.000		54.400.000.000
27	Gab. Aceh	20.000.000.000	3.000.000.000	17.000.000.000		20.000.000.000
28	Gab. Aceh Tenggara	10.000.000.000	11.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000
29	Gab. Aceh Tenggara	30.000.000.000	4.000.000.000	26.000.000.000		30.000.000.000
30	Gab. Aceh Tenggara	4.000.000.000	8.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
31	Gab. Aceh Tenggara	30.000.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000		30.000.000.000
32	Gab. Aceh Tenggara	30.000.000.000	3.000.000.000	27.000.000.000		30.000.000.000
33	Gab. Aceh Tenggara	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000
34	Gab. Aceh Tenggara	50.000.000.000	5.000.000.000	45.000.000.000		50.000.000.000
35	Gab. Aceh Tenggara	28.800.000.000	4.200.000.000	24.600.000.000		28.800.000.000
36	Gab. Aceh Tenggara	25.000.000.000	3.000.000.000	22.000.000.000		25.000.000.000
37	Gab. Aceh Tenggara	20.000.000.000	3.000.000.000	17.000.000.000		20.000.000.000
38	Gab. Aceh Tenggara	10.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000		10.000.000.000
39	Gab. Aceh Tenggara	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
40	Gab. Aceh Tenggara	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		2.000.000.000
41	Gab. Aceh Tenggara	25.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000		25.000.000.000
42	Gab. Aceh Tenggara	18.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000		18.000.000.000
43	Gab. Aceh Tenggara	16.000.000.000	3.000.000.000	13.000.000.000		16.000.000.000
44	Gab. Aceh Tenggara	20.000.000.000	1.000.000.000	19.000.000.000		20.000.000.000
45	Gab. Aceh Tenggara	33.000.000.000	3.000.000.000	30.000.000.000	1.000.000	33.000.000.000
46	Gab. Aceh Tenggara	27.000.000.000	7.000.000.000	20.000.000.000	1.000.000	27.000.000.000
47	Gab. Aceh Tenggara	28.000.000.000	2.000.000.000	26.000.000.000	1.000.000	28.000.000.000
48	Gab. Aceh Tenggara	25.000.000.000	2.000.000.000	23.000.000.000	1.000.000	25.000.000.000
49	Gab. Aceh Tenggara	10.000.000.000	3.000.000.000	7.000.000.000		10.000.000.000
50	Gab. Aceh Tenggara	0.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		0.000.000.000
51	Gab. Aceh Tenggara	10.000.000.000	3.000.000.000	7.000.000.000		10.000.000.000
52	Gab. Aceh Tenggara	20.000.000.000	4.000.000.000	16.000.000.000		20.000.000.000
53	Gab. Aceh Tenggara	20.000.000.000	2.000.000.000	18.000.000.000		20.000.000.000
54	Gab. Aceh Tenggara	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000
55	Gab. Aceh Tenggara	28.000.000.000	3.000.000.000	25.000.000.000		28.000.000.000
56	Gab. Aceh Tenggara	15.000.000.000	2.000.000.000	13.000.000.000		15.000.000.000
57	Gab. Aceh Tenggara	10.000.000.000	3.000.000.000	7.000.000.000		10.000.000.000

Lampiran 11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	Realisasi			
			PPN Penawaran	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
59	Provinsi Sumatera Barat	115.954.114.268	51.719.275.858	54.164.838.410		115.884.114.268
60	Cab. Limapuluh Kota	24.46.637.210	2.054.027.391	21.392.710.822		24.46.637.210
61	Cab. Agam	22.109.902.211	3.891.398.498	18.217.503.713		22.109.902.211
62	Cab. Kabupaten Marawa	19.176.417.772	1.773.207.187	17.403.210.585		19.176.417.772
63	Cab. Pasang Pasaman	21.007.442.800	2.044.134.102	18.963.308.698		21.007.442.800
64	Cab. Pasaman	22.567.789.446	2.304.483.134	20.263.306.312		22.567.789.446
65	Cab. Pasir Salaman	28.073.027.831	2.125.075.102	25.947.952.729		28.073.027.831
66	Cab. Padang	21.540.308.933	2.392.262.195	19.148.046.738		21.540.308.933
67	Cab. Solok	20.067.777.649	2.155.203.204	17.912.574.445		20.067.777.649
68	Cab. Tanah Datar	17.071.016.350	3.124.144.024	13.946.872.326		17.071.016.350
69	Cab. Kota Tinggi	13.880.134.848	1.125.855.297	12.754.283.551		13.880.134.848
70	Cab. Padang Pariaman	10.891.040.420	2.002.272.002	8.888.768.418		10.891.040.420
71	Cab. Padang	62.100.511.900	20.029.447.425	42.071.064.475		62.100.511.900
72	Cab. Padang Panjang	15.269.829.022	2.111.181.502	13.158.647.520		15.269.829.022
73	Cab. Sawahlunto	17.040.087.678	2.405.822.009	14.634.265.669		17.040.087.678
74	Cab. Solok	14.719.293.359	2.671.327.022	12.047.966.337		14.719.293.359
75	Cab. Padang	20.424.488.110	3.111.022.000	17.313.466.110		20.424.488.110
76	Cab. Pasaman Barat	24.586.843.158	3.127.035.127	21.459.808.031		24.586.843.158
77	Cab. Dharmasraya	27.211.818.045	2.782.034.585	24.429.783.460		27.211.818.045
78	Cab. Solok Selatan	24.799.643.438	2.235.237.233	22.564.406.205		24.799.643.438
79	Provinsi Riau	467.571.813.718	146.811.373.404	378.910.643.814		467.571.813.718
80	Cab. Bengkalis	238.057.822.226	48.102.781.834	190.955.040.392		238.057.822.226
81	Cab. Indragiri Hulu	66.396.694.443	8.747.881.373	57.648.813.070		66.396.694.443
82	Cab. Indragiri Hulu	80.859.978.327	2.611.136.120	78.248.842.207		80.859.978.327
83	Cab. Pangkas	16.716.007.022	11.049.004.425	5.667.002.597		16.716.007.022
84	Cab. Rokan Negeri	23.053.010.115	8.205.132.105	14.847.878.010		23.053.010.115
85	Cab. Pekanbaru	24.089.449.222	10.001.985.824	14.087.463.398		24.089.449.222
86	Cab. Pekanbaru	93.520.738.123	1.227.287.857	92.293.450.266		93.520.738.123
87	Cab. Pekanbaru	22.014.932.811	0.000.000.000	22.014.932.811		22.014.932.811
88	Cab. Solok	21.794.910.823	22.100.855.124	19.694.055.699		21.794.910.823
89	Cab. Dumai	63.455.407.827	10.767.883.175	52.687.524.652		63.455.407.827
90	Cab. Pekanbaru	22.308.207.110	15.440.274.111	6.867.932.999		22.308.207.110
91	Cab. Kabupaten Merak	94.795.070.027	6.972.845.627	87.822.224.400		94.795.070.027
92	Provinsi Kepulauan Riau	718.477.387.113	75.719.219.898	642.758.167.215		718.477.387.113
93	Cab. Batam	18.722.488.157	8.635.102.122	10.087.386.035		18.722.488.157
94	Cab. Batam	70.407.500.225	5.812.122.607	64.595.377.618		70.407.500.225
95	Cab. Batam	16.667.429.224	10.200.020.000	6.467.409.224		16.667.429.224
96	Cab. Batam	13.925.825.116	16.125.000.111	17.800.825.116		13.925.825.116
97	Cab. Kabupaten Bintan	37.000.310.028	0.000.000.000	37.000.310.028	1.560.240	37.000.310.028
98	Cab. Tanjung Pinang	11.096.906.222	6.805.011.891	4.291.894.331		11.096.906.222
99	Cab. Lingga	12.400.789.828	1.111.373.183	11.289.416.645		12.400.789.828
100	Provinsi Jambi	172.051.101.810	31.212.810.013	140.838.291.797		172.051.101.810
101	Cab. Batanghari	93.847.489.151	21.111.294.267	72.736.194.884		93.847.489.151
102	Cab. Bungo	31.120.007.211	4.344.071.441	26.775.935.770		31.120.007.211
103	Cab. Bungo	19.729.716.821	1.044.855.054	18.684.861.767		19.729.716.821
104	Cab. Muaro Jambi	30.510.478.858	3.125.872.274	27.384.606.584		30.510.478.858
105	Cab. Muaro Jambi	83.496.894.927	4.111.811.182	79.385.083.745		83.496.894.927
106	Cab. Sarolangun	18.812.568.826	2.585.575.002	16.226.993.824		18.812.568.826
107	Cab. Tanjung Jabung Barat	80.143.042.022	3.004.182.071	77.138.859.951		80.143.042.022
108	Cab. Tanjung Jabung Timur	10.728.273.022	1.031.232.937	9.697.040.085		10.728.273.022
109	Cab. Tebo	42.304.500.826	2.511.087.282	39.793.413.544		42.304.500.826
110	Cab. Jambi	64.020.000.811	10.227.022.745	53.792.978.066		64.020.000.811
111	Cab. Tanjung Pagar	15.011.251.027	1.000.000.000	14.011.251.027	1.560.240	15.011.251.027
112	Provinsi Sumatera Selatan	279.811.101.843	91.248.070.421	188.563.031.422		279.811.101.843
113	Cab. Lahat	10.446.517.414	6.081.172.732	4.365.344.682		10.446.517.414
114	Cab. Muarabajar	210.310.023.352	0.000.000.000	210.310.023.352		210.310.023.352
115	Cab. Muarabajar	54.367.569.070	4.062.867.682	50.304.701.388		54.367.569.070

Jurnal Ilmiah, Vol. 10, No. 1, 2012, Hal. 285-302

No. 14.12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pajak	Realisasi			
			PPH Penerima	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
115	Gab. Nusa Eria	214.912.180.938	14.575.485.382	203.333.562.136		214.912.180.938
117	Gab. Ogan Komering L.	42.040.004.876	4.003.042.171	37.172.165.406		42.040.004.876
118	Gab. Ogan Komering L.	84.326.146.148	8.894.287.987	72.447.488.511		84.326.146.148
119	Gab. Palembang	126.240.122.122	12.181.172.443	112.045.871.356		126.240.122.122
120	Gab. Pangkajene	27.716.000.140	3.220.171.004	24.495.829.136		27.716.000.140
121	Gab. Pulau Lingsu	30.251.122.856	3.201.022.162	27.050.100.694		30.251.122.856
125	Gab. P. Jambi	58.085.41.051	6.774.182.032	51.311.229.019		58.085.41.051
126	Gab. Bangka Belitung	28.475.479.122	3.071.022.082	25.404.457.040		28.475.479.122
128	Gab. Riau	131.101.258.137	11.015.504.282	120.085.753.855		131.101.258.137
129	Gab. Riau	66.702.006.362	3.866.332.082	62.835.674.280		66.702.006.362
129	Gab. OKU Timur	28.885.580.733	2.502.571.137	26.383.009.596		28.885.580.733
129	Gab. OKU Selatan	30.347.987.271	3.492.133.812	26.855.853.459		30.347.987.271
128	Provinsi Bangka Belitung	98.011.817.200	11.435.019.000	86.576.798.200		98.011.817.200
129	Gab. Bangka	58.026.535.520	3.227.895.071	54.798.640.449		58.026.535.520
130	Gab. Belitung	39.984.281.680	2.497.123.929	37.487.157.751		39.984.281.680
131	Gab. Pangkal Pinang	33.757.488.346	6.591.236.446	27.166.251.900		33.757.488.346
132	Gab. Bangka Selatan	20.413.240.860	1.321.178.147	19.092.062.713		20.413.240.860
133	Gab. Bangka Tengah	30.410.347.022	2.873.964.462	27.536.382.560		30.410.347.022
134	Gab. Bangka Barat	35.670.810.132	3.375.181.805	32.295.628.327		35.670.810.132
135	Gab. Belitung Timur	30.173.218.520	3.264.152.823	26.909.065.697		30.173.218.520
136	Provinsi Bengkulu	54.397.481.737	14.616.970.455	39.780.511.282	851.914	54.397.481.737
137	Gab. Bengkulu Selatan	19.789.824.652	1.323.102.603	18.466.722.049		19.789.824.652
138	Gab. Bengkulu Utara	27.236.186.653	2.772.861.807	24.463.324.846		27.236.186.653
139	Gab. Bengkulu Tengah	22.211.559.033	2.013.772.112	20.197.786.921	312.200	22.211.559.033
140	Gab. Bengkulu	27.039.030.619	2.269.136.141	24.769.894.478		27.039.030.619
141	Gab. Berau	2.519.029.255	1.195.134.582	1.323.894.673		2.519.029.255
142	Gab. Sekeloa	2.637.088.021	1.371.081.302	1.266.006.719		2.637.088.021
143	Gab. Mukah	26.687.597.024	1.582.631.962	25.104.965.062		26.687.597.024
144	Gab. Lebong	26.009.428.011	1.074.071.401	24.935.356.610		26.009.428.011
144	Gab. Bengkulu Tengah	14.112.149.424	1.329.136.484	12.783.012.940	1.015.945	14.112.149.424
145	Gab. Kerinci	27.571.734.140	1.183.391.272	26.388.342.868	2.388.516	27.571.734.140
147	Provinsi Lampung	127.313.221.839	48.241.448.503	87.071.773.336		127.313.221.839
148	Gab. Lampung Barat	37.340.587.124	2.187.537.711	35.153.049.413		37.340.587.124
149	Gab. Lampung Selatan	29.910.121.146	2.687.782.083	27.222.339.063		29.910.121.146
150	Gab. Lampung Tengah	14.826.434.818	1.882.801.584	12.943.633.234		14.826.434.818
151	Gab. Lampung Utara	28.070.507.625	3.511.073.615	24.559.434.010		28.070.507.625
152	Gab. Lampung Timur	40.389.319.422	4.024.489.624	36.364.829.798		40.389.319.422
153	Gab. Lampung	25.914.757.152	2.515.894.875	23.398.862.277		25.914.757.152
154	Gab. Tangk. Karang	28.730.080.877	4.205.101.802	24.524.979.075		28.730.080.877
155	Gab. Way Kanan	36.396.15.124	2.882.431.273	33.513.723.851		36.396.15.124
155	Gab. Pesawaran	20.360.648.116	2.151.065.202	18.209.582.914	1.868.548	20.360.648.116
157	Gab. Punggur	14.970.707.050	2.171.011.887	12.800.685.163		14.970.707.050
158	Gab. Musiq	17.618.790.341	1.594.624.187	16.024.166.154		17.618.790.341
159	Gab. Tangk. Karang	10.288.642.010	1.071.372.001	9.217.270.009		10.288.642.010
160	Gab. Empat Lintang	63.767.300.140	18.871.282.052	44.896.018.088		63.767.300.140
161	Gab. Way	29.789.812.228	3.812.313.607	25.977.498.621		29.789.812.228
162	Provinsi DKI Jakarta	8748.273.328.633	6.041.610.333.680	2.706.663.000.000	6.346.434.776	8.754.626.355.489
163	Provinsi Jawa Barat	924.451.803.739	501.810.358.148	422.641.445.591	38.791.583	924.451.803.739
164	Gab. Bandung	20.274.42.022	22.062.124.202	103.623.516.383	122.281.206	20.274.42.022
165	Gab. Bekasi	353.626.455.620	15.867.915.801	337.758.539.819		353.626.455.620
166	Gab. Bogor	30.838.913.521	42.734.742.602	154.101.785.206		30.838.913.521
167	Gab. Cianjur	616.670.810	12.271.281.701	45.000.000.000		616.670.810
168	Gab. Cianjur	10.895.718.173	11.595.881.733	87.613.157.274	6.151.461	10.895.718.173
169	Gab. Cirebon	40.100.000.000	11.342.100.000	62.000.000.000		40.100.000.000
170	Gab. Garut	84.130.011.832	14.822.052.495	69.307.959.337	1.120.200	84.130.011.832
171	Gab. Indragiri	17.044.249.014	21.146.005.264	161.000.000.000	12.100.000	17.044.249.014
172	Gab. Karawang	210.676.128.138	22.062.842.152	188.613.286.000		210.676.128.138

LPP 10-15

JALAN PULOGEMUKU, KEMENTERIAN KEUANGAN

06/14/12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	Realisasi			
			PPH Penerima	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
173	Cab. Purwokerto	48.135.936.222	12.181.752.423	31.953.186.537		48.139.139.262
174	Cab. Majalengka	00.302.004.739	11.011.005.204	69.002.710.476		00.202.204.769
175	Cab. Purworejo	11.514.340.181	21.251.401.290	48.961.234.486		11.114.240.787
176	Cab. Sukoharjo	10.130.633.450	14.195.781.305	151.741.366.164		173.137.531.489
177	Cab. Sukoharjo	00.130.302.241	12.601.288.047	71.181.104.204		00.130.302.241
178	Cab. Sukoharjo	13.788.219.029	14.351.782.113	33.417.486.314		13.788.219.029
179	Cab. Sukoharjo	59.070.151.545	13.005.111.105	43.653.432.451		59.070.151.545
180	Cab. Banyuwangi	81.271.364.572	18.561.445.891	42.701.514.591		81.271.364.572
181	Cab. Banyuwangi	339.717.061.525	55.463.151.165	503.143.507.456	11.511.101	339.717.061.525
182	Cab. Banyuwangi	10.000.000.000	40.000.000.000	120.000.000.000		10.000.000.000
183	Cab. Banyuwangi	10.000.000.000	50.000.000.000	80.000.000.000		10.000.000.000
184	Cab. Banyuwangi	42.000.000.000	17.000.000.000	35.000.000.000		42.000.000.000
185	Cab. Banyuwangi	10.000.000.000	17.000.000.000	35.000.000.000		10.000.000.000
186	Cab. Banyuwangi	52.251.507.023	11.201.135.007	4.001.566.756		52.251.507.023
187	Cab. Banyuwangi	42.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000		42.000.000.000
188	Cab. Banyuwangi	40.818.201.556	11.134.811.313	23.683.286.246		40.818.201.556
189	Cab. Banyuwangi	20.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000		20.000.000.000
190	Provinsi Banten	341.027.454.577	211.052.468.736	128.985.444.841		341.027.454.577
191	Cab. Tangerang	50.517.068.025	11.071.892.795	91.651.166.754		50.517.068.025
192	Cab. Tangerang	10.041.903.148	15.192.862.942	34.459.126.166		10.041.903.148
193	Cab. Tangerang	18.638.796.719	10.134.201.577	49.730.101.707		18.638.796.719
194	Cab. Tangerang	217.260.000.000	21.041.000.000	163.205.266.356		217.260.000.000
195	Cab. Tangerang	87.000.000.000	42.947.967.004	54.173.347.916		87.000.000.000
196	Cab. Tangerang	259.135.218.026	10.071.299.002	173.011.511.206		259.135.218.026
197	Cab. Tangerang	37.000.000.000	16.200.000.000	21.000.000.000	1.000.000	37.000.000.000
198	Cab. Tangerang Selatan	69.27.81.627	50.511.201.204	1.940.462.510		69.27.81.627
199	Provinsi Jawa Tengah	610.791.104.824	242.447.001.219	268.399.282.409	138.680	610.791.104.824
200	Cab. Banjarnegara	40.694.174.923	8.171.211.643	34.173.255.206		40.694.174.923
201	Cab. Banjarnegara	00.242.000.181	16.262.000.000	6.189.210.000		00.242.000.181
202	Cab. Banjarnegara	36.999.499.746	1.911.988.645	31.087.270.201		36.999.499.746
203	Cab. Banjarnegara	11.328.029.073	1.131.062.267	61.183.555.366		11.328.029.073
204	Cab. Banjarnegara	38.225.541.280	1.269.421.140	31.904.121.741		38.225.541.280
205	Cab. Banjarnegara	16.170.485.631	1.901.834.887	53.717.151.736		16.170.485.631
206	Cab. Banjarnegara	67.919.225.510	50.204.835.585	81.177.386.366		67.919.225.510
207	Cab. Banjarnegara	37.815.381.239	8.074.794.032	31.143.267.202		37.815.381.239
208	Cab. Banjarnegara	58.758.950.851	8.737.181.007	53.901.561.161		58.758.950.851
209	Cab. Banjarnegara	10.900.100.000	8.125.000.000	41.271.000.000		10.900.100.000
210	Cab. Banjarnegara	38.000.000.000	1.000.000.000	30.111.268.516		38.000.000.000
211	Cab. Banjarnegara	45.421.269.440	6.827.022.244	30.211.237.204		45.421.269.440
212	Cab. Banjarnegara	44.519.600.000	1.000.000.000	30.200.000.000		44.519.600.000
213	Cab. Banjarnegara	38.000.000.000	7.691.064.000	28.045.111.000		38.000.000.000
214	Cab. Banjarnegara	02.270.000.000	16.011.000.000	48.201.000.000		02.270.000.000
215	Cab. Banjarnegara	43.010.919.122	1.211.241.745	31.697.225.166		43.010.919.122
216	Cab. Banjarnegara	44.919.000.000	0.162.201.149	30.001.442.000		44.919.000.000
217	Cab. Banjarnegara	30.930.380.139	0.123.951.027	21.804.425.162		30.930.380.139
218	Cab. Banjarnegara	10.919.731.888	8.291.385.703	30.071.596.507		10.919.731.888
219	Cab. Banjarnegara	36.846.218.022	5.993.424.453	33.917.786.127		36.846.218.022
220	Cab. Banjarnegara	30.000.000.000	8.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
221	Cab. Banjarnegara	38.000.000.000	0.001.114.422	33.000.000.000		38.000.000.000
222	Cab. Banjarnegara	30.613.514.835	0.111.951.205	31.653.123.311		30.613.514.835
223	Cab. Banjarnegara	37.912.018.422	7.273.607.327	31.697.225.166		37.912.018.422
224	Cab. Banjarnegara	42.669.000.150	11.121.067.071	31.421.541.747		42.669.000.150
225	Cab. Banjarnegara	27.821.828.557	8.593.002.173	33.281.591.406		27.821.828.557
226	Cab. Banjarnegara	34.231.074.840	1.800.070.000	20.071.000.000		34.231.074.840
227	Cab. Banjarnegara	38.832.354.711	6.323.142.675	33.008.512.296		38.832.354.711
228	Cab. Banjarnegara	30.241.004.170	1.491.005.007	31.001.207.000		30.241.004.170
229	Cab. Banjarnegara	19.419.477.729	6.882.111.132	12.127.387.212		19.419.477.729
230	Cab. Banjarnegara	29.120.880.210	1.540.885.574	12.571.516.595		29.120.880.210
231	Cab. Banjarnegara	19.029.584.121	1.282.871.236	12.692.111.784		19.029.584.121
232	Cab. Banjarnegara	38.111.315.751	56.871.105.071	131.177.136.416		38.111.315.751

06/14/12

LAPORAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN 2012

No. 14.12

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Page	Realisasi			
			PPH Penorangan	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
231	Ges Sarawak	85.670.94854	19.231.051.492	45.434.236.442		61.570.194.294
234	Ges Tega	23.737.730.726	6.895.021.265	1.709.460.464		22.707.710.700
235	Provinsi DI Yogyakarta	79.987.201.998	43.318.847.824	32.576.393.734		79.987.201.998
236	Gab. Bantul	41.464.748.811	8.971.749.737	31.887.466.316		41.464.748.811
237	Gab. Gunung Kidul	33.612.123.128	1.445.404.207	24.001.717.889		33.612.123.128
238	Gab. Kulon Progo	26.645.812.841	1.895.794.395	23.985.016.252		26.645.812.841
239	Gab. Sleman	18.907.869.845	51.272.502.215	57.083.169.151		73.707.364.573
242	Ges Yogyakarta	80.359.787.138	22.093.563.087	39.267.216.588		63.219.787.766
243	Provinsi Jawa Timur	749.274.863.789	587.550.881.001	586.794.139.911		749.274.863.789
244	Gab. Blora	6.910.038.020	6.021.001.166	71.299.161.204		78.219.799.480
245	Gab. Bojonegara	85.023.918.037	8.591.184.272	57.293.510.357		65.814.694.629
246	Gab. Gresik	24.040.000.216	7.002.814.302	37.047.580.113		44.090.394.629
247	Gab. Lamongan	100.216.146.024	11.011.327.247	111.001.876.207		112.013.203.454
248	Gab. Malang	5.878.928.172	8.295.881.025	25.592.085.142		31.776.904.342
249	Gab. Pasuruan	133.738.638.130	16.889.625.107	93.747.123.222		133.738.638.130
250	Gab. Sidoarjo	70.744.157.018	13.443.371.024	55.883.546.394		73.186.917.418
251	Gab. Surabaya	16.737.430.070	8.291.805.184	43.007.444.415		68.036.684.673
252	Gab. Gresik	88.078.994.073	7.962.162.873	63.125.227.434		63.718.394.279
253	Gab. Lamongan	89.901.855.120	7.897.874.173	81.893.792.582		89.701.647.755
254	Gab. Malang	38.837.536.646	7.182.178.805	31.851.227.236		38.837.536.646
255	Gab. Pasuruan	37.059.977.377	6.782.585.907	33.679.463.369		37.059.977.377
256	Gab. Sidoarjo	34.869.738.317	7.797.735.402	27.082.201.216		34.869.738.317
257	Gab. Gresik	86.473.718.170	13.431.881.757	77.987.187.515		85.412.669.422
258	Gab. Lamongan	7.070.361.053	10.851.521.229	83.212.127.171		71.274.009.453
259	Gab. Surabaya	40.680.600.670	7.071.801.174	47.277.179.007		47.749.000.177
260	Gab. Sidoarjo	73.677.838.835	7.772.813.887	53.183.106.168		73.677.838.835
261	Gab. Gresik	39.216.200.624	6.092.307.063	27.102.598.206		39.216.200.624
262	Gab. Pasuruan	12.696.818.017	6.723.283.842	47.973.226.174		12.696.818.017
263	Gab. Sidoarjo	7.708.207.280	10.889.907.898	67.732.029.629		71.340.144.807
264	Gab. Gresik	49.480.254.412	4.071.136.862	47.483.686.791		49.480.254.412
265	Gab. Lamongan	57.031.707.127	11.777.857.204	39.675.550.402		57.031.707.127
266	Gab. Malang	62.126.264.210	10.341.475.042	51.081.177.438		62.126.264.210
267	Gab. Pasuruan	88.416.817.855	41.772.897.787	145.647.577.767		130.146.615.645
268	Gab. Sidoarjo	38.278.310.526	8.231.113.062	77.873.596.550		38.278.310.526
269	Gab. Gresik	28.757.183.773	7.591.792.232	131.088.225.226	5.436.262	139.197.189.773
270	Gab. Lamongan	37.067.708.522	8.693.573.897	31.183.717.410		37.067.708.522
271	Gab. Sidoarjo	88.042.007.030	10.471.275.121	65.223.004.101		88.042.007.030
272	Gab. Gresik	78.275.738.139	8.785.746.871	39.883.587.592		78.275.738.139
273	Ges. B. Bar	23.717.467.774	1.801.862.023	19.762.466.711		22.717.467.774
274	Ges. Kediri	37.238.928.238	14.167.171.125	23.067.915.734		37.238.928.238
275	Ges. Madiun	28.714.680.842	8.497.892.892	32.337.226		28.714.680.842
276	Ges. Malang	67.329.734.737	20.191.261.877	43.029.072.711		67.329.734.737
277	Ges. Mojokerto	28.875.165.143	7.475.371.265	7.283.512.174		28.875.165.143
278	Ges. Pasuruan	22.700.483.040	6.061.671.009	7.144.370.112		22.700.483.040
279	Ges. Probolinggo	29.228.187.721	8.705.704.452	22.577.414.246		29.228.187.721
280	Ges. Tulungagung	39.851.717.833	13.865.872.881	41.888.598.769		39.851.717.833
281	Ges. Batu	26.747.884.435	5.432.465.101	23.703.415.284		26.747.884.435
282	Provinsi Kalimantan Barat	178.574.883.838	38.114.349.530	91.158.778.818		178.574.883.838
283	Gab. Bengkalis	26.010.076.428	2.602.402.207	23.212.114.172		26.010.076.428
284	Gab. Pekanbaru	77.763.838.951	7.371.583.887	39.747.357.505		77.763.838.951
285	Gab. Singkawang	12.061.868.128	2.047.002.185	43.182.795.321		12.061.868.128
286	Gab. Tapanuli	80.006.746.050	4.034.487.063	65.047.916.200		80.006.746.050
287	Gab. Pangkajene	18.477.000.542	2.681.271.292	7.983.785.251		18.477.000.542
288	Gab. Sambas	32.120.812.324	2.861.167.674	24.161.084.312		32.120.812.324
289	Gab. Singkep	42.567.310.226	4.223.082.963	38.342.216.201		42.567.310.226
290	Gab. Siang	40.650.488.811	3.067.084.101	42.002.136.211		40.650.488.811
291	Ges. Pontianak	17.884.338.843	18.573.055.141	31.877.370.202		17.884.338.843
292	Ges. Sanggau	10.450.788.547	3.582.851.585	7.809.307.387		10.450.788.547
293	Gab. Sekeloa	28.789.210.273	1.713.361.151	22.862.228.129		28.789.210.273
294	Gab. Sukadana	37.526.877.737	7.187.862.203	77.391.582.705	1.258.176	31.126.217.451

LPP-11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pajak	Realisasi			
			PPH Pemotong	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
293	Cab. Sekeloa	30.223.886.359	2.095.025.464	28.127.860.895		30.223.886.359
294	Cab. Midevi	28.01.937.141	2.2.2.091.425	25.920.501.591		28.010.337.141
295	Provinsi Kalimantan Tengah	139.979.828.917	27.773.889.817	112.205.949.100		139.979.828.917
296	Cab. Bontol	48.147.731.450	1.801.770.863	46.345.960.587		48.147.731.450
297	Cab. Uluwatu	10.601.144.054	2.011.281.064	8.589.858.990		10.601.144.054
298	Cab. Kapuas	37.447.401.528	2.040.262.825	35.407.138.703		37.447.401.528
299	Cab. Kutacandjaja Barat	7.830.780.155	5.587.103.574	2.243.676.581		7.830.780.155
300	Cab. Pangkajenejene	11.479.323.921	5.481.481.555	6.000.842.366		11.479.323.921
301	Cab. Padasajene	28.858.938.158	9.185.887.584	19.673.050.574		28.858.938.158
302	Cab. Uluwatu	44.617.206.111	2.410.075.471	42.207.130.640		44.617.206.111
303	Cab. Muarajaya	7.854.957.530	2.145.051.187	5.709.906.343		7.854.957.530
304	Cab. Pangsajene	23.780.688.450	1.641.302.067	22.139.386.383		23.780.688.450
305	Cab. Gunung Mas	27.921.732.154	1.881.841.808	26.039.890.346		27.921.732.154
306	Cab. Lamsari	58.058.222.553	1.525.457.425	56.532.765.128		58.058.222.553
307	Cab. Sekeloa	31.748.622.114	1.121.041.601	30.627.580.513		31.748.622.114
308	Cab. Pangkajene	36.730.508.617	1.490.507.092	35.239.999.525		36.730.508.617
309	Cab. Sungai	16.418.626.428	2.491.421.002	13.927.205.426		16.418.626.428
310	Provinsi Kalimantan Selatan	133.981.322.525	53.119.180.779	80.862.141.746		133.981.322.525
311	Cab. Banjar	28.719.021.418	7.075.804.605	21.643.216.813		28.719.021.418
312	Cab. Banjar Kuala	17.488.046.651	3.011.782.192	14.476.264.459		17.488.046.651
313	Cab. Hulu Sungai Selatan	27.836.868.110	3.731.281.363	24.105.586.747		27.836.868.110
314	Cab. Hulu Sungai Tengah	23.427.411.228	3.745.025.192	19.682.386.036		23.427.411.228
315	Cab. Hulu Sungai Utara	37.430.848.073	2.500.373.174	34.930.474.899		37.430.848.073
316	Cab. Kotabaru	7.876.380.753	10.625.051.052	2.748.670.297		7.876.380.753
317	Cab. Tanah Bumbu	18.012.410.443	6.884.944.003	11.127.466.440		18.012.410.443
318	Cab. Tanah Laut	50.607.000.001	5.775.155.184	44.831.844.817		50.607.000.001
319	Cab. Tapin	28.260.233.972	3.300.125.491	24.960.108.481		28.260.233.972
320	Cab. Tanah Merah	25.580.835.879	8.785.201.182	16.795.634.697		25.580.835.879
321	Cab. Banjarbaru	46.111.000.001	10.644.801.361	35.466.198.640		46.111.000.001
322	Cab. Banjar	47.496.109.623	3.880.627.174	43.615.482.449		47.496.109.623
323	Cab. Tanah Sakti	37.031.637.017	5.681.774.855	31.349.862.162		37.031.637.017
324	Provinsi Kalimantan Timur	603.011.803.481	231.758.447.359	371.253.356.122		603.011.803.481
325	Cab. Berau	80.780.837.154	17.744.183.087	63.036.654.067		80.780.837.154
326	Cab. Balikpapan	28.817.208.838	10.740.375.011	18.076.833.827		28.817.208.838
327	Cab. Buntar	628.803.000.938	23.297.051.052	605.505.949.886		628.803.000.938
328	Cab. Kutai Barat	89.881.151.150	11.743.882.534	78.137.268.616		89.881.151.150
329	Cab. Kutai Timur	250.120.030.000	16.338.172.213	233.781.857.787		250.120.030.000
330	Cab. Mahakam	87.889.908.211	8.935.814.584	78.954.093.627		87.889.908.211
331	Cab. Paser	100.038.440.117	8.707.702.061	91.330.738.056		100.038.440.117
332	Cab. Paser	11.629.969.634	16.488.881.652	5.858.912.018		11.629.969.634
333	Cab. Balikpapan	20.268.407.127	12.573.304.792	7.695.102.335		20.268.407.127
334	Cab. Berau	180.107.221.200	40.885.375.287	139.221.845.913		180.107.221.200
335	Cab. Tarakan	43.670.715.318	8.132.585.172	35.538.129.146	1.000.000	43.670.715.318
336	Cab. Samarinda	10.000.903.411	18.201.205.343	8.200.301.932		10.000.903.411
337	Cab. Tarakan	12.689.763.131	14.252.011.782	1.562.248.651		12.689.763.131
338	Cab. Paser	36.061.888.067	8.101.782.073	27.960.105.994		36.061.888.067
339	Provinsi Sulawesi Utara	78.499.839.559	32.482.938.445	46.016.901.114	808.000	78.499.839.559
340	Cab. Bulungan	18.888.728.076	1.573.511.102	17.315.216.974		18.888.728.076
341	Cab. Malinau	26.921.406.140	2.004.028.010	24.917.378.130		26.921.406.140
342	Cab. Sangihe	17.581.814.127	2.754.924.157	14.826.889.970		17.581.814.127
343	Cab. Tana Toraja	20.000.238.025	2.451.791.034	17.548.446.991		20.000.238.025
344	Cab. Manado	48.200.012.214	10.071.261.104	38.128.751.110	1.000.000	48.200.012.214
345	Cab. Kepulauan Selayar	17.758.753.850	1.593.034.772	16.165.719.078		17.758.753.850
346	Cab. Malinau	10.320.480.040	1.041.342.805	9.279.137.235		10.320.480.040
347	Cab. Malinau	17.952.111.875	1.251.405.703	16.700.706.172		17.952.111.875
348	Cab. Kepulauan Selayar	16.000.000.000	1.048.242.341	14.951.757.659		16.000.000.000
349	Cab. Gorontalo	15.559.489.721	2.462.102.182	13.097.387.539		15.559.489.721
350	Cab. Bulungan	18.888.728.076	2.771.001.147	16.117.726.929	1.000.000	18.888.728.076
351	Cab. Bulungan	11.429.680.824	1.231.341.195	10.198.339.629		11.429.680.824
352	Cab. Tana Toraja	20.811.826.759	2.187.637.607	18.624.189.152		20.811.826.759

JALAN PUSKAS, KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN

No. 14/12

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Page	Realisasi			
			PPH Penorangan	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
353	Gab. Mahkota Uluu	2' 438.508.143	3.007.861.101	3.933.548.542		21.238.309.743
354	Gab. Dabang Marororo Uluu	10' 60.550.014	1.277.124.003	3.053.425.226		3.100.310.214
355	Provinsi Gorontalo	27.083.343.823	3.573.773.280	17.519.537.933		27.183.343.823
356	Gab. Gorontalo	20.819.429.729	1.701.352.152	13.973.225.472		23.519.429.729
357	Gab. Gorontalo	10' 10.044.153	3.032.481.145	12.077.886.117		15.100.444.153
358	Gab. Gorontalo	2' 05' 51' 143	1.887.082.863	12.054.421.218		21.257.511.243
359	Gab. Gorontalo	2' 528.800.825	1.578.515.502	732.921.565		21.528.800.825
360	Gab. Gorontalo Uluu	18.238.716.057	1.135.483.885	7.103.225.411		18.238.716.057
361	Gab. Gorontalo Uluu	28.317.785.510	1.671.857.231	21.103.155.585		28.317.785.510
362	Provinsi Sulawesi Tengah	74.088.878.885	11.745.782.211	56.348.127.384	108.880	74.088.878.885
363	Gab. Banggai	37.218.477.147	3.204.083.803	23.087.450.571		37.218.477.147
364	Gab. Banggai Kepulauan	26' 30.460.130	1.387.084.007	24.793.261.233		26.304.601.130
365	Gab. Banggai	23' 40.011.170	1.481.341.275	22.227.231.254		23.400.011.170
366	Gab. Banggai	20.358.910.524	1.657.047.625	3.305.226.212		20.358.910.524
367	Gab. Banggai	27.067.006.210	1.487.667.075	23.263.726.742		27.067.006.210
368	Gab. Banggai	10.550' 06.420	1.587.732.871	48.952.273.206		50.250' 06.420
369	Gab. Banggai	32.010.08' 0.1	1.881.867.889	33.025.135.482		32.010.08' 0.1
370	Gab. Banggai	28.228.946.051	10.381.803.283	7.833.227.788	435.240	28.228.946.051
371	Gab. Banggai Kepulauan	28.805.800.076	1.011.525.785	21.157.582.476		28.805.800.076
372	Gab. Banggai	18.705.788.429	1.451.764.482	13.252.146.411	1.516.248	18.705.788.429
373	Gab. Banggai Kepulauan	26.750' 02.240	1.311.083.972	21.082.216.232		26.750' 02.240
374	Provinsi Sulawesi Selatan	228.141.171.212	81.747.423.818	151.401.714.373	12.187.018	228.141.171.212
375	Gab. Barru	25.750.897.176	2.871.174.447	23.137.127.581		25.750.897.176
376	Gab. Barru	25.862.579.116	3.071.892.172	22.872.386.407		25.862.579.116
377	Gab. Barru	40.610.000.000	1.742.381.001	42.073.000.000		40.610.000.000
378	Gab. Barru	50.860.473.621	7.564.503.812	23.573.452.524		50.860.473.621
379	Gab. Barru	30.438' 08.272	2.824.651.425	27.174.224.225		30.438' 08.272
380	Gab. Barru	34.792.384.719	4.882.943.972	30.171.438.210		34.792.384.719
381	Gab. Barru	27.088.028.224	3.342.225.267	24.285.801.430		27.088.028.224
382	Gab. Barru	25' 17' 212.174	2.152.882.285	22.052.223.175		25' 17' 212.174
383	Gab. Barru	36.510.458.778	3.054.203.202	33.573.286.128		36.510.458.778
384	Gab. Barru	30' 340' 25.915	3.062.073.000	21.034.225.112		30' 340' 25.915
385	Gab. Barru Kepulauan	34' 17.875.451	8.005.871.434	27.005.110.227		34' 17.875.451
386	Gab. Barru	20.567.461.621	3.554.203.874	27.003.111.587		20.567.461.621
387	Gab. Barru	23.485.996.228	2.571.001.632	23.865.284.218		23.485.996.228
388	Gab. Barru Kepulauan	37.210' 05.215	3.747.072.857	33.573.112.361		37.210' 05.215
389	Gab. Barru	28.782.002.171	2.882.071.122	21.022.784.138		28.782.002.171
390	Gab. Barru	27.780.750.020	3.567.853.822	23.653.381.167		27.780.750.020
391	Gab. Barru	23' 02.460.424	3.103.075.224	9.077.206.180		23' 02.460.424
392	Gab. Barru	27.314.236.111	3.196.621.872	21.045.316.119		27.314.236.111
393	Gab. Barru	88.006.048.217	4.124.181.782	85.882.866.435		88.006.048.217
394	Gab. Barru	24.067.020.254	4.002.879.877	24.067.020.254		24.067.020.254
395	Gab. Barru	17.829.415.920	2.232.647.601	12.483.505.281	1.516.248	17.829.415.920
396	Gab. Barru	24.930.419.020	44.041.261.174	0.140.810.112	40.100.244	24.930.419.020
397	Gab. Barru	20.014.404.121	4.282.172.782	17.223.591.738		20.014.404.121
398	Gab. Barru	55.811' 588.811	18.518.381.103	39.287.827.486		55.811' 588.811
399	Provinsi Sulawesi Barat	35.295.876.183	7.518.328.471	27.788.247.632		35.295.876.183
400	Gab. Mandar	30.067.780.828	1.871.873.187	25.183.475.202		30.067.780.828
401	Gab. Mandar	30' 06.421.027	3.022.221.052	24.363.227.162		30' 06.421.027
402	Gab. Mandar	28.827.813.018	2.805.357.874	25.172.121.104		28.827.813.018
403	Gab. Mandar	25.038.930.117	2.141.435.574	23.793.280.242		25.038.930.117
404	Gab. Mandar	36.029.612.250	1.838.001.277	34.425.121.220		36.029.612.250
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	84.301.827.517	13.819.311.375	41.411.188.152		84.301.827.517
406	Gab. Makassar	20.407.000.071	1.647.302.082	23.644.224.110		20.407.000.071
407	Gab. Makassar	2' 885.402.279	1.701.435.873	23.173.596.486		2' 885.402.279
408	Gab. Makassar	36.238.047.021	3.761.223.802	31.404.010.724		36.238.047.021
409	Gab. Makassar	20.888.205.772	1.956.142.284	18.923.580.478		20.888.205.772
410	Gab. Makassar	30' 13.473.112	8.725.183.573	21.883.251.585		30' 13.473.112
411	Gab. Makassar	27.927' 212.829	2.447.058.752	24.475.147.212		27.927' 212.829
412	Gab. Makassar	27.823.606.011	1.973.323.872	27.823.606.011		27.823.606.011

Lampiran 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL PAJAH
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	Realisasi			
			PPH Penorogan	PEB	BPHTF	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
413	Gab. Bangka	22.292.033.320	1.267.223.075	21.024.208.232		22.292.233.250
414	Gab. Bangka Utara	19.900.919.020	002.723.451	3.000.000.000		3.000.000.000
415	Gab. Banten Utara	17.829.340.820	984.481.882	17.844.858.938		17.829.340.820
416	Gab. Bengkulu	27.067.279.821	1.172.451.024	25.894.828.797		27.067.279.821
417	Gab. Bengkulu Utara	26.020.000.000	1.000.000.000	25.020.000.000		26.020.000.000
418	Provinsi Bali	125.876.815.312	68.083.435.498	57.873.380.014		125.876.815.312
419	Gab. Bali	22.028.222.446	57.083.623.123	35.172.275.200		22.028.222.446
420	Gab. Barat	27.145.027.928	4.362.801.887	22.782.226.041		27.145.027.928
421	Gab. Bengkulu	54.284.254.646	1.505.235.003	52.779.019.643		54.284.254.646
422	Gab. Bontar	20.380.806.000	0.000.000.000	20.380.806.000		20.380.806.000
423	Gab. Jambi	27.197.424.128	5.222.822.582	21.974.601.546		27.197.424.128
424	Gab. Lampung	26.269.090.022	0.222.088.622	26.047.001.400		26.269.090.022
425	Gab. Lampung	16.302.042.222	4.971.021.001	11.331.021.221		16.302.042.222
426	Gab. Lampung	20.908.358.222	8.502.235.001	12.406.123.221		20.908.358.222
427	Gab. Lampung	10.600.210.222	11.200.823.102	21.801.033.324		10.600.210.222
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	86.383.536.124	45.758.624.371	40.624.911.753		86.383.536.124
429	Gab. Nusa Tenggara Barat	20.211.120.000	2.401.021.221	17.810.098.779		20.211.120.000
430	Gab. Nusa Tenggara Barat	18.998.486.128	3.270.231.221	15.728.254.907		18.998.486.128
431	Gab. Nusa Tenggara Barat	2.800.275.028	3.582.202.142	6.382.477.170		2.800.275.028
432	Gab. Nusa Tenggara Barat	24.148.727.928	4.624.272.942	19.524.454.986		24.148.727.928
433	Gab. Nusa Tenggara Barat	30.600.275.028	5.202.167.824	25.398.107.204		30.600.275.028
434	Gab. Nusa Tenggara Barat	34.600.289.623	6.670.021.684	27.930.267.939		34.600.289.623
435	Gab. Nusa Tenggara Barat	37.324.640.222	14.222.282.001	23.102.358.221		37.324.640.222
436	Gab. Nusa Tenggara Barat	17.365.180.628	2.681.021.083	14.684.159.545	1.358.222	17.365.180.628
437	Gab. Nusa Tenggara Barat	22.300.224.221	1.001.021.001	21.300.203.220		22.300.224.221
438	Gab. Nusa Tenggara Barat	50.012.275.028	53.122.289.623	26.887.275.028		50.012.275.028
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	88.282.208.847	24.318.480.420	63.963.728.427		88.282.208.847
440	Gab. Nusa Tenggara Timur	19.085.279.640	1.170.881.822	17.914.397.818		19.085.279.640
441	Gab. Nusa Tenggara Timur	27.088.021.220	2.001.000.000	25.087.021.220		27.088.021.220
442	Gab. Nusa Tenggara Timur	17.522.222.828	2.000.000.000	15.522.222.828		17.522.222.828
443	Gab. Nusa Tenggara Timur	10.587.823.240	1.624.823.240	8.963.000.000		10.587.823.240
444	Gab. Nusa Tenggara Timur	30.200.275.028	1.000.000.000	29.200.275.028		30.200.275.028
445	Gab. Nusa Tenggara Timur	17.230.116.846	1.224.823.240	16.005.293.606		17.230.116.846
446	Gab. Nusa Tenggara Timur	15.258.275.028	2.222.289.623	13.035.985.405		15.258.275.028
447	Gab. Papua	15.207.280.222	1.221.881.432	14.005.398.790		15.207.280.222
448	Gab. Papua	10.512.021.222	1.622.289.623	8.889.731.599		10.512.021.222
449	Gab. Papua Barat	14.670.000.000	1.467.000.000	13.203.000.000		14.670.000.000
450	Gab. Papua Barat	22.281.823.240	1.222.823.240	21.059.000.000		22.281.823.240
451	Gab. Papua Barat Daya	26.000.275.028	1.270.021.221	24.730.253.807		26.000.275.028
452	Gab. Papua Barat Daya	27.222.289.623	1.422.289.623	25.800.000.000		27.222.289.623
453	Gab. Papua Barat Daya	3.022.289.623	14.222.881.432	11.200.651.809		3.022.289.623
454	Gab. Papua Barat Daya	19.867.442.028	1.222.289.623	18.645.152.405		19.867.442.028
455	Gab. Papua Barat Daya	16.762.289.623	962.021.221	15.800.268.402		16.762.289.623
456	Gab. Papua Barat Daya	13.022.289.623	0.000.000.000	13.022.289.623		13.022.289.623
457	Gab. Papua Barat Daya	18.344.687.222	882.021.221	17.462.666.001		18.344.687.222
458	Gab. Papua Barat Daya	17.018.222.222	882.021.221	16.136.201.001	1.358.222	17.018.222.222
459	Gab. Papua Barat Daya	17.642.847.028	182.021.221	17.460.826.249		17.642.847.028
460	Gab. Papua Barat Daya	17.528.222.222	1.422.289.623	16.105.932.599		17.528.222.222
461	Provinsi Maluku	20.181.264.247	14.188.148.217	6.993.116.030	11.820.000	20.181.264.247
462	Gab. Maluku Tenggara Barat	26.813.226.622	802.221.822	26.011.004.800	1.358.222	26.813.226.622
463	Gab. Maluku Tenggara	24.708.588.622	1.222.289.623	23.486.299.000		24.708.588.622
464	Gab. Maluku Tenggara	26.412.289.623	1.882.021.221	24.530.268.402		26.412.289.623
465	Gab. Maluku Tenggara	10.000.000.000	882.021.221	9.118.000.000		10.000.000.000
466	Gab. Maluku Tenggara	37.222.289.623	882.021.221	36.340.268.402		37.222.289.623
467	Gab. Maluku Tenggara	24.887.442.028	962.021.221	23.925.420.807		24.887.442.028
468	Gab. Maluku Tenggara	12.622.289.623	1.000.000.000	11.622.289.623		12.622.289.623
469	Gab. Maluku Tenggara	24.148.727.928	1.422.289.623	22.726.438.305	1.358.222	24.148.727.928
470	Gab. Maluku Tenggara	15.222.289.623	882.021.221	14.340.268.402	1.358.222	15.222.289.623
471	Gab. Maluku Tenggara	24.222.289.623	882.021.221	23.340.268.402		24.222.289.623
472	Gab. Maluku Tenggara	13.010.222.222	882.021.221	12.128.201.001	1.358.222	13.010.222.222

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

Ur.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPI Penerimaan	PRB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
473	Provinsi Maluku Utara	67.865.385.811	14.116.055.165	52.877.510.511	77.814	67.845.443.480
474	Gab. Halmahera Tengah	12.010.391.293	1.354.259.708	31.563.131.523		32.917.491.231
475	Gab. Halmahera Barat	21.733.193.881	1.177.070.509	35.491.207.982		36.668.378.491
476	Gab. Tanimbar	42.808.554.581	1.354.671.76	35.743.301.600		37.100.073.366
477	Gab. Halmahera Timur	47.760.275.524	1.335.079.05	40.334.202.663		41.669.381.718
478	Gab. Halmahera Selatan	10.914.450.174	1.245.043.462	28.367.551.112	370.314	29.603.064.888
479	Gab. Kepulauan Sula	11.830.185.755	1.373.016.13	30.155.171.057		31.528.187.190
480	Gab. Pulau Morotai	14.292.171.563	344.133.508	13.463.593.351		13.807.726.859
481	Gab. Halmahera Selatan	42.305.713.823	1.335.423.825	40.773.351.856		42.108.775.681
482	Gab. Halmahera Utara	33.353.733.105	5.123.828.533	26.229.507.175		31.353.335.708
483	Gab. Malinau	12.674.821.896	1.350.377.218	11.122.495.056	1.818.144	12.925.680.614
484	Gab. Kepulauan Sula	16.853.657.503	1.353.071.080	16.534.351.050	1.818.144	16.717.502.194
485	Provinsi Papua	249.221.798.193	53.578.012.467	179.842.785.781	4.832.010	244.252.629.258
486	Gab. Jayapura	22.034.431.184	3.774.119.018	16.963.771.286		20.737.890.304
487	Gab. Supena	31.075.272.351	7.772.143.718	33.594.573.637		38.367.717.355
488	Gab. Jayawijaya	21.040.424.831	3.161.110.430	24.190.535.471		27.351.645.901
489	Gab. Mamberamo	11.702.324.355	4.138.110.674	47.503.513.371		52.343.934.049
490	Gab. Mimika	177.738.185.784	62.167.129.718	84.577.257.107		146.744.386.825
491	Gab. Nabire	11.631.122.365	2.827.820.06	26.701.207.000		29.528.947.066
492	Gab. Paniai	20.824.544.235	2.303.558.069	16.593.552.156		18.897.110.225
493	Gab. Puncak Jaya	19.910.221.112	1.371.258.245	25.344.36.064		26.725.620.319
494	Gab. Kepulauan Yapen	15.300.284.553	2.473.453.424	32.523.337.551		35.000.090.975
495	Gab. Jayawijaya	36.519.311.123	7.313.122.069	30.582.405.140	16.578.202	36.901.983.352
496	Gab. Sorong	23.946.374.23	1.774.054.290	21.524.24.740		23.298.298.980
497	Gab. Sarmi	12.281.271.515	1.350.129.030	30.573.687.778		31.923.816.808
498	Gab. Sankar	40.864.577.713	1.163.776.688	36.185.402.751		37.349.179.439
499	Gab. Kepulauan Tanimbar	49.788.944.411	2.143.351.400	41.644.77.000		43.788.048.411
500	Gab. Tolikara	33.535.141.735	1.575.113.006	31.593.785.732		33.168.900.738
501	Gab. Boven Digoel	48.017.877.271	3.293.259.708	44.783.507.568		48.081.767.276
502	Gab. Mappi	46.841.385.271	2.393.746.1	46.577.302.760		46.577.302.760
503	Gab. Keerom	43.044.185.253	2.182.138.038	40.862.455.321		43.044.185.253
504	Gab. Wampan	41.437.522.175	1.541.253.667	40.896.268.508		41.437.522.175
505	Gab. Mamberamo Raya	32.311.371.185	1.167.746.827	30.543.535.542		31.711.287.972
506	Gab. Mamberamo Tengah	12.482.154.484	1.161.621.792	11.321.441.174	1.818.144	12.482.154.484
507	Gab. Mappi	13.077.421.162	1.371.893.084	11.705.528.170	1.818.144	13.077.421.162
508	Gab. Tillyam	11.410.505.504	1.304.746.076	10.104.507.060	1.818.144	11.410.505.504
509	Gab. Mamberamo	10.736.221.222	1.984.171.057	10.551.047.000		10.736.221.222
510	Gab. Mamberamo	20.031.303.722	1.361.037.587	16.579.307.175	1.070.344	20.031.303.722
511	Gab. Tillyam	14.676.135.184	1.301.329.037	13.374.877.307		14.676.135.184
512	Gab. Supena	19.221.507.443	1.330.010.90	17.891.561.544		19.221.507.443
513	Provinsi Papua Barat	143.487.384.901	19.571.327.011	173.811.057.898		143.487.384.901
514	Gab. Sorong	123.876.785.415	2.375.821.638	121.500.963.777		123.876.785.415
515	Gab. Manuhara	121.736.213.581	4.205.520.857	87.743.507.121		107.337.241.469
516	Gab. Sula	36.807.303.505	1.389.021.380	35.418.281.740		36.807.303.505
517	Gab. Sarmi	11.500.189.171	1.303.822.930	10.196.366.042		11.500.189.171
518	Gab. Sarmi Sabena	31.028.582.172	1.503.030.074	29.525.552.098		31.028.582.172
519	Gab. Raja Mambra	11.314.537.735	1.169.777.115	10.144.760.621		11.314.537.735
520	Gab. Teluk Anson	180.088.272.071	5.031.72.006	174.056.550.074		180.088.272.071
521	Gab. Teluk Anson	36.775.241.535	1.761.153.735	35.014.087.803		36.775.241.535
522	Gab. Tambora	28.646.284.257	325.374.894	28.320.909.363		28.646.284.257
523	Gab. Manuhara	11.481.387.585	211.175.867	11.270.211.718		11.481.387.585
524	Gab. Carac	10.212.783.532	1.407.474.794	8.805.308.736		10.212.783.532
525	Gab. Carac	-	-	-	0	0
526	Gab. Carac	-	-	-	0	0
527	Gab. Carac	-	-	-	0	0
528	Gab. Carac	-	-	-	0	0
JUMLAH		41.918.928.404.418	13.237.328.449.261	28.281.442.969.029	8.747.378.192	41.928.396.919.170

U.P. 2012

U.P. 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Pada	Milik Puri	Gr. Bumi	Pemukjangan Lusa	Realisasi	Isa Lintasan	Hasil Pabrikasi	Total
		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Prowas Unggias Aceh Darussalam	1.045.874.241.185	481.418.591.414	847.832.008.181	1.704.195.511	0	237.584.746	0	1.310.941.821.034
2	Kab. Aceh Barat	10.163.318.234	2.155.244.236	-0.076.523.502	40.255.732	0	17.226.567	273.236.623	15.892.253.337
3	Kab. Aceh Barat Daya	10.867.426.273	2.156.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
4	Kab. Aceh Selatan	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	51.146.043	273.236.623	15.001.746.019
5	Kab. Aceh Tenggara	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	11.146.043	273.236.623	15.001.746.019
6	Kab. Aceh Timur	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
7	Kab. Aceh Utara	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
8	Kab. Aceh Tengah	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
9	Kab. Aceh Besar	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
10	Kab. Aceh Negeri	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
11	Kab. Aceh Singgaja	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
12	Kab. Aceh Selatan	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
13	Kab. Aceh Tenggara	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
14	Kab. Aceh Timur	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
15	Kab. Aceh Utara	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
16	Kab. Aceh Tengah	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
17	Kab. Aceh Besar	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
18	Kab. Aceh Negeri	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
19	Kab. Aceh Singgaja	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
20	Kab. Aceh Selatan	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
21	Kab. Aceh Tenggara	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
22	Kab. Aceh Timur	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
23	Kab. Aceh Utara	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
24	Kab. Aceh Tengah	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
25	Kab. Aceh Besar	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
26	Kab. Aceh Negeri	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019
27	Kab. Aceh Singgaja	10.867.426.273	2.155.244.236	-0.076.523.502	1.204.256.421	0	4.704.093	273.236.623	15.001.746.019

C.P.P. Rp. 581.

U.P. 2012

U.P. 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Page	Molak Bumi	Gr. Bumi	Pembangunan Lusa	Pras Bumi	Realisasi	Hasil Pabrikasi	Total
		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab. Maluku	51.00.0334	38.432.068	40.320.056	3272652	0	182.242.879	572.298.879	815.102.0
2	Kab. Maluku	60.216.0129	38.432.066	40.320.056		0	182.242.861	572.298.873	581.246.013
3	Kab. Maluku	21012.011129	2.200.937.052	1.000.216.002		0	101.388.601	271.236.628	2.007.272.273
4	Kab. Maluku	21012.011129	207.111.004	20.434.052	222.210.010	0	2.214.800.315	2.14.228.021	2.000.268.011
5	Kab. Maluku	5301.011129	107.111.004	20.434.052		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
6	Kab. Maluku	21012.011129	107.111.004	20.434.052		0	5.474.219.000	572.298.873	2.007.272.273
7	Kab. Maluku	21012.011129	107.111.004	20.434.052		0	2.102.200.000	572.298.873	2.007.272.273
8	Kab. Maluku	602.010.0129	38.432.066	40.320.056	20.120.012	0	101.388.601	271.236.628	600.200.012
9	Kab. Maluku	602.010.0129	38.432.066	40.320.056	44.720.012	0	207.000.000	271.236.628	1.000.216.002
10	Kab. Maluku	57.111.004	107.111.004	20.434.052	5.000.000	0	5.474.219.000	572.298.873	600.216.002
11	Kab. Maluku	902.210.0129	250.000.000	24.250.000		0	182.242.861	572.298.873	1.000.216.002
12	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	182.242.861	572.298.873	581.246.013
13	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	101.388.601	271.236.628	601.216.013
14	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
15	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
16	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	182.242.861	572.298.873	581.246.013
17	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	101.388.601	271.236.628	601.216.013
18	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
19	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
20	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
21	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
22	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
23	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
24	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
25	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
26	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
27	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
28	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
29	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
30	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
31	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
32	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
33	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
34	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
35	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
36	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
37	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
38	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
39	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
40	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
41	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
42	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
43	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
44	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
45	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
46	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
47	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
48	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
49	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
50	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
51	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
52	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
53	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
54	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
55	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
56	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
57	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
58	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
59	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011
60	Kab. Maluku	602.210.0129	38.432.066	40.320.056		0	104.000.000	514.228.021	501.000.011

C.P.P. No. 501.

U.P. 2012

U.P. 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Paya	Milyar Rupiah	Ger. Bani	Pembanguan Lusa	Pras. Bani	Realisasi	Hasil Pembusan	Total
			4	5	6	7	8	9	10
57	Kab. Sines	507.510.25	38.432.058	-0.350.955		0	314.434.503	578.298.875	712.850.77
58	Kab. Buntar	493.550.123	35.213.803	-0.350.955		0	184.206.561	371.256.340	574.504.133
59	Pemb. Sumbawa Barat	8.044.641.762			2.190.271.700	0	2.764.207.402		8.808.849.162
60	Kab. Sumbawa	1.115.054.945			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
61	Kab. Sumbawa	1.284.011.211			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
62	Kab. Sumbawa	1.177.700.873			985.213.335	0	1.96.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
63	Kab. Sumbawa	1.292.542.943			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
64	Kab. Sumbawa	1.367.517.023			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
65	Kab. Sumbawa	1.341.129.929			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
66	Kab. Sumbawa	1.364.110.773			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
67	Kab. Sumbawa	1.005.311.422			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
68	Kab. Sumbawa	1.245.384.575			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
69	Kab. Sumbawa	1.292.542.943			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
70	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
71	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
72	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
73	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
74	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
75	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
76	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
77	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
78	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
79	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
80	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
81	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
82	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
83	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280
84	Kab. Sumbawa	1.214.452.044			985.213.335	0	2.04.213.335	2.14.213.335	3.159.268.280

U.P. 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BAKU BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Pusat	Wajib Puri	Gratifikasi	Pembangunan Lintas	Realisasi	Hasil Pelaksanaan	Total
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								

Lampiran 1

Lampiran 1

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAIRY BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)**

No.	Daerah	Paya	Milyar Rupiah	Gr. Bani	Pembangunan Lima	Rasio	Isa (Lanjutan)	Hasil Penerimaan	Total
		2	4	5	6	7	8	9	10
13	Prowal Borneo Selatan	234.771.301,379	242.603.358,150	804.372.872,144	152.168.651,141	0	4.334.331,039	273.236.628	1.014.010.304,459
14	Kab. Mahakam	235.155.316,647	2.255.723,015	1.244.632.970,152	138.532.678,334	0	55.723,102	273.236.628	216.292.336,332
15	Kab. Mahakam	100.107.131,14	207.289.371,601	1.010.266.322,172	21.634.981,63	0	32.266.186,862	273.236.628	409.084.101,627
16	Kab. Mahakam	208.051.284,72	24.922.814,808	3.083.151,682	22.061.201,34	0	1.384.000,001	273.236.628	324.272.923,144
17	Kab. Kutai Barat	308.371.100,020	34.100.841,522	310.658.492,924	134.000,000	0	3.111.319,172	273.236.628	347.774.100,192
18	Kab. Kutai Barat	111.565.217,72	31.651.125,564	36.558.231,974	31.743.729,08	0	1.117.916,812	273.236.628	314.892.216,758
19	Kab. Kutai Barat	141.202.241,17	67.625.625,250	21.223.321,119	22.669.136,272	0	794.217,292	273.236.628	176.267.106,723
20	Kab. Kutai Barat	118.301.728,823	34.677.233,828	30.830.331,624	21.862.270,442	0	704.311,034	273.236.628	148.292.060,923
21	Kab. Kutai Barat	115.993.335,872	31.651.233,828	36.558.231,974	31.587.728,117	0	704.311,034	273.236.628	148.292.060,923
22	Kab. Kutai Barat	118.024.742,479	32.578.542,864	31.602.818,472	21.891.072,442	0	704.311,034	273.236.628	148.292.060,923
23	Kab. Kutai Barat	115.227.251,52	34.657.724,950	34.838.131,842	21.824.328,032	0	704.311,034	273.236.628	148.292.060,923
24	Kab. Kutai Barat	145.701.250,334	6.122.072,281	31.232.371,882	22.021.260,042	0	2.624.260,422	273.236.628	100.862.240,439
25	Kab. Kutai Barat	118.362.680,125	31.180.841,420	48.132.410,624	31.391.944,171	0	104.311,034	273.236.628	148.292.060,923
26	Kab. Kutai Barat	122.221.300,000	30.827.244,224	46.238.431,924	31.824.378,522	0	311.000,000	273.236.628	148.292.060,923
27	Kab. Kutai Barat	115.502.451,832	34.657.233,828	36.558.231,974	21.862.270,442	0	704.311,034	273.236.628	148.292.060,923
28	Prowal Borneo Selatan	141.107.897,209	11.929.119,184	18.538.331,124	145.001.955,324	0	11.291,842	273.236.628	133.945.951,508
29	Kab. Mahakam	5000.482,728	2.640.634,421	5.000.000,000	12.031.727,27	0	12.031,842	273.236.628	146.072.117,33
30	Kab. Mahakam	4806.039,419	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	0	5.000,000	273.236.628	80.000.000,000
31	Kab. Mahakam	31.033.525,633	5.000.000,000	31.033.525,633	5.000.000,000	0	5.000,000	273.236.628	31.033.525,633
32	Kab. Mahakam	18.043.219,822	2.640.634,421	18.043.219,822	18.043.219,822	0	18.043,219	273.236.628	18.043.219,822
33	Kab. Mahakam	61.024.100,655	2.640.634,421	61.024.100,655	61.024.100,655	0	61.024,100	273.236.628	61.024.100,655
34	Prowal Borneo Selatan	32.221.028,822	5.000.000,000	32.221.028,822	5.000.000,000	0	5.000,000	273.236.628	32.221.028,822
35	Kab. Kutai Barat	16.195.250,822	16.195.250,822	16.195.250,822	16.195.250,822	0	16.195,250	273.236.628	16.195.250,822
36	Kab. Kutai Barat	3.200.240,132	3.200.240,132	3.200.240,132	3.200.240,132	0	3.200,240	273.236.628	3.200.240,132

Catatan: Rp. 571.

U.P. 2012

Lampiran Ke-1333M/P/2011/La-10.2/11/08/11.20/4000/021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BAZA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Paya	Melayak Bumi	Ger Bani	Pembangunan Luma	Realisasi	Hasil Pelaksanaan	Total
	2	1	4	5	6	7	8	11
40	Kab. Berauk	5.553.311,759	100.483.246,167	1.461.287,729	2.227.871,698	0	271.286.628	116.216.841,697
41	Kab. Bulik	3.327.207,138	13.756.234,162	1.208,381,144	223.010,242	0	1.226.107	15.062.284,123
42	Kab. Sinaru	3.421.401,641	15.798.511,887	1.708,381,111	56.703,812	0	1.226.107	11.511.417,357
43	Kab. Soroako	2.201.210,111	13.758.244,854	1.300,291,144	501.128,222	0	1.226.107	10.862.306,532
44	Kab. Sui	2.201.210,111	13.758.244,854	1.300,291,144	501.128,222	0	1.226.107	10.563.308,222
45	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	62.940.053,100	1.200,381,144	223.177,021	0	1.226.107	31.062.317,154
46	Kab. Sumpang Berauk	3.207.207,675	11.258.048,122	1.200,381,144	4.441.953,431	0	1.226.107	11.894.140,828
47	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
48	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	16.351.217,021
49	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
50	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
51	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
52	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
53	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
54	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
55	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
56	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
57	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
58	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
59	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
60	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
61	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
62	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
63	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
64	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
65	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
66	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
67	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
68	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
69	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379
70	Kab. Sumpang Berauk	18.701.211,811	14.558.231,001	1.300,291,144	381.438,374	0	1.226.107	18.411.718,379

C.F.P. No. 57

U.P. 2012

Lampiran 12... (KEMENTERIAN PERENCANAAN, PERTANAHAN, DAN DAERAH OMBUDSMAN)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BAKU BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Pada	Milik Puri	Gratuit	Pembangunan Urea	Realisasi	Isa Lahan	Hasil Perikanan	Total
		1	4	5	6	7	8	9	10
68	Kab. Sukoharjo	55.882.212.549	12.118.351.550	5.682.455.702	682.231.002	2.562.278.752	1.822.500.343	572.298.875	54.012.748.727
69	Kab. Sukoharjo	31.182.310.725	12.118.351.550	3.862.455.702	574.001.225	2.562.278.752	224.250.623	572.298.875	53.251.000.634
70	Kab. Sukoharjo	46.697.510.725	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	11.182.700.319
71	Kab. Sukoharjo	38.880.000.000	22.300.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	28.810.000.000
72	Kab. Sukoharjo	41.211.000.000	22.300.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	44.211.000.000
73	Kab. Sukoharjo	51.211.000.000	22.300.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	55.211.000.000
74	Kab. Sukoharjo	21.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	23.001.100.222
75	Kab. Sukoharjo	31.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	33.001.100.222
76	Kab. Sukoharjo	41.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	43.001.100.222
77	Kab. Sukoharjo	51.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	53.001.100.222
78	Kab. Sukoharjo	61.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	63.001.100.222
79	Kab. Sukoharjo	71.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	73.001.100.222
80	Kab. Sukoharjo	81.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	83.001.100.222
81	Kab. Sukoharjo	91.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	93.001.100.222
82	Kab. Sukoharjo	101.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	103.001.100.222
83	Kab. Sukoharjo	111.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	113.001.100.222
84	Kab. Sukoharjo	121.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	123.001.100.222
85	Kab. Sukoharjo	131.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	133.001.100.222
86	Kab. Sukoharjo	141.004.100.000	12.118.351.550	3.862.455.702	171.654.122	3.124.557.504	272.221.201	272.220.623	143.001.100.222

U.P. 2012

U.P. 2012

Lampiran 12: Realisasi Pengeluaran - 10.2.1 (Rp. 100.000.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BAKU BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN/ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Paya	Minyak Bumi	Gas Bumi	Pencampuran Luma	Realisasi Pusat Bumi	Isa Lahan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	Kab. Sukoharjo	677.603.723	86.427.008	8.328.862	44.626.522	0	502.43.731	578.298.828	282.206.279
235	Kab. Tolo	1.263.240.248	65.427.008	8.328.862	44.626.522	0	902.558.924	278.298.828	1.301.538.183
236	Kab. Karanganyar	729.206.021	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	462.108.662	278.298.828	661.126.621
237	Kab. Sukoharjo	685.275.273	67.711.004	8.498.062	44.626.522	0	411.998.062	278.298.828	691.126.621
238	Kab. Karanganyar	687.663.323	67.711.004	8.498.062	44.626.522	0	411.998.062	278.298.828	691.126.621
239	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
240	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	402.108.662	278.298.828	681.126.621
241	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
242	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
243	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
244	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
245	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
246	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
247	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
248	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
249	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
250	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279
251	Kab. Karanganyar	677.603.723	65.427.008	9.310.062	44.626.522	0	282.43.731	278.298.828	292.266.279

U.P. 2012

U.P. 2012

Lampiran Ke-13 (RUMAHPUTRA) - 10.2.11 (2012.10.000000)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Pada	Moayk Puni	Gras Duni	Pembangunan Luma	Realisasi	Hasil Pelnbasan	Total
		2	4	5	6	7	8	9
1	Prowas Infomasi Bawt	35.537.181,710			38.430.401,831	0	5.893.220,121	52.281.021,959
21	Kab. Bina Sawa	3.355.212,575			3.682.271,427	0	373.058,852	4.054.501,557
211	Kab. Bina Sawa	6.105.210,127			4.283.161,131	0	2.294.308,992	1.007.522,674
212	Kab. Bina Sawa	1.084.081,941			1.284.587,834	0	2.294.308,992	1.284.587,834
213	Kab. Bina Sawa	31.387.188,721			37.862,862	0	31.387.188,721	31.387.188,721
214	Kab. Bina Sawa	5.987.278,353			1.007.585,531	0	5.987.278,353	4.989.596,333
215	Kab. Bina Sawa	4.087.210,024			3.887.211,933	0	2.294.308,992	1.062.501,775
217	Kab. Bina Sawa	3.107.108,324			1.182.232,131	0	2.024.876,672	10.821.081,739
218	Kab. Bina Sawa	10.223.182,239			4.117.020,347	0	1.724.816,611	13.121.019,192
219	Kab. Bina Sawa	5.717.001,071			5.119.065,437	0	882.146,211	4.117.001,071
220	Kab. Bina Sawa	5.702.282,522			5.335.030,937	0	882.146,211	4.300.372,822
221	Kab. Bina Sawa	4.193.250,039			4.14.230,039	0	334.230,039	5.151.540,933
222	Kab. Bina Sawa	8.367.346,624			4.000.074,444	0	6.267.308,009	10.707.211,643
223	Kab. Bina Sawa	4.084.152,831			3.052.581,221	0	1.031.571,204	5.084.218,031
224	Kab. Bina Sawa	8.722.048,742			9.122.451,131	0	8.722.048,742	10.574.401,031
225	Prowas Infomasi Taya	10.772.241,479			9.829.277,881	0	18.504.091,138	12.688.631,019
226	Kab. Bina Sawa	58.325.515,379			27.571.921,527	0	4.025.225,294	58.325.515,379
227	Kab. Bina Sawa	4.082.210,275			32.052.076,331	0	31.879.206,712	65.389.100,034
228	Kab. Bina Sawa	30.841.101,742			4.155.803,184	0	10.882.245,554	41.578.149,471
229	Kab. Bina Sawa	31.343.376,727			1.477.108,053	0	8.277.088,053	39.620.464,780
230	Kab. Bina Sawa	51.753.261,871			1.884.017,834	0	37.281.288,053	89.034.550,924
231	Kab. Bina Sawa	12.021.201,134			4.307.946,124	0	2.101.228,082	13.021.201,134
232	Kab. Bina Sawa	24.623.016,839			26.007.232,422	0	2.101.228,082	26.724.244,921
233	Kab. Bina Sawa	100.213.482,351			131.107.276,327	0	36.423.108,214	136.636.558,575
234	Kab. Bina Sawa	15.112.472,730			1.413.848,274	0	5.281.411,071	11.831.061,759
235	Kab. Bina Sawa	25.887.251,132			1.003.526,523	0	8.375.220,102	34.262.471,234
236	Kab. Bina Sawa	55.217.242,627			1.983.521,283	0	8.451.321,283	63.668.563,910
237	Kab. Bina Sawa	18.000.000,000			4.307.977,021	0	2.282.146,212	19.989.977,232

C.P.P. 2012

U.P. No. 178

U.P. No. 178/2012/Dep. Keh. dan Keh. Desa

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Pada	Milyar Rupiah	Ger. Bani	Pembelian Langsung	Prorata	Realisasi	Realisasi	Total
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab. Sukoharjo	40.827.566.239	4.984.070,7	0	44.382.405.359	0	572.358.875	50.072.467,24	
20	Kab. Sukoharjo	44.052.825.242	4.337.781,27	0	20.962.371.102	0	372.236.623	54.552.244.035	
210	Pembeli Realisasi Sektor	610.218.094.602	7.761.271.188	0	618.180.421.740	0	621.864.718	619.871.664.464	
312	Keb. Sukoharjo	14.274.325.834	200.814.132	0	14.073.511.702	0	14.274.325.834	29.548.341.668	
315	Kab. Sukoharjo	40.017.347.853	200.814.132	0	12.800.000.000	0	14.274.325.834	16.028.431.141	
316	Kab. Sukoharjo	16.007.278.073	200.814.132	0	13.273.511.702	0	14.274.325.834	10.865.418.39	
317	Kab. Sukoharjo	14.014.227.623	200.814.132	0	13.073.511.702	0	14.274.325.834	14.860.230.82	
318	Kab. Sukoharjo	921.188.317.739	200.814.132	0	921.188.317.739	0	14.274.325.834	510.381.315.739	
319	Kab. Sukoharjo	152.247.480.24	200.814.132	0	152.247.480.24	0	14.274.325.834	238.772.351.234	
320	Kab. Sukoharjo	11.007.210.832	200.814.132	0	11.007.210.832	0	14.274.325.834	182.901.310.03	
321	Kab. Sukoharjo	14.004.181.131	200.814.132	0	14.004.181.131	0	14.274.325.834	10.861.431.84	
322	Kab. Sukoharjo	22.007.210.832	200.814.132	0	22.007.210.832	0	14.274.325.834	200.814.131	
323	Kab. Sukoharjo	252.827.710.239	200.814.132	0	252.827.710.239	0	14.274.325.834	215.072.555.232	
324	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	3.911.188.054.984	302.483.078.152	0	3.608.147.146.889	0	352.811.406.073	4.261.022.951.288	
325	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	610.381.315.834	
326	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	700.247.24	
327	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
328	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
329	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
330	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
331	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
332	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
333	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
334	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
335	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
336	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
337	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
338	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
339	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
340	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
341	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
342	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
343	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
344	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
345	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
346	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
347	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
348	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
349	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
350	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
351	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
352	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
353	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
354	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
355	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
356	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
357	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
358	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
359	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	
360	Kab. Sukoharjo	14.274.325.834	302.483.078.152	0	14.274.325.834	0	352.811.406.073	510.381.315.834	

U.P. No. 178

U.P. 2012

Lampiran 12... (KEM) PPT/PT/1a-19.2.11 (08.11.2012) 400x400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAIRAH BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Paya	Wahak Bumi	Gas Bumi	Pemukim Luma	Realisasi	Isa Lintasan	Hasil Perikanan	Total
		2	4	5	6	T	8	9	11
238	Kab. Sulu	655.277.237,17	132.213.253,88	350.257.507,9	253.523.263,35	0	4.352.200,184	572.298,873	873.253.276,132
239	Kab. Sulu	523.153.431,27	153.601.272,846	335.666.330,902	220.030.203,33	0	4.352.200,184	572.298,873	740.077.102.539
240	Kab. Sulu	610.027.260,634	164.617.657,962	377.244.733,107	274.207.232,147	0	8.604.240,367	273.236,623	716.063.310,315
241	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
242	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
243	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
244	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
245	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
246	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
247	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
248	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
249	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
250	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
251	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
252	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
253	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
254	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
255	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
256	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
257	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
258	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
259	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
260	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
261	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
262	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
263	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
264	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
265	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
266	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
267	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
268	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
269	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084
270	Kab. Sulu	311.020,411			1.200.000,001	0	14.429,823	374.238,021	1.073.028,084

C.P.P. No. 572

U.P. 2012

U.P. 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BAKU HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Pada	Milik Puri	Gr. Bumi	Pembangunan Lahan	Realisasi	Isa Lahan	Hasil Pabrikasi	Total
		2	4	5	6	7	8	9	11
1	Kab. Bangka Belitung	1.054.401.377	240.522.843	1.547.548.535	0	307.540.415	572.298.878	5.282.200.233	
2	Kab. Belitung	3.262.480.322	240.522.843	1.034.528.132	0	243.127.242	273.236.628	2.567.351.323	
3	Kab. Bangka	2.601.510.973	240.522.843	2.107.672.232	0	206.722.643	273.236.628	2.877.224.123	
4	Kab. Belitung	5.911.480.544	240.522.843	3.162.970.445	0	454.249.058	544.249.058	3.191.969.343	
5	Kab. Bangka	3.102.148.539	240.522.843	1.257.512.212	0	322.528.081	544.249.058	2.033.107.882	
6	Kab. Belitung	5.502.406.373	240.522.843	1.867.598.032	0	575.766.169	575.236.628	2.882.468.721	
7	Kab. Bangka	2.007.210.227	240.522.843	1.167.118.457	0	225.211.022	273.236.628	2.362.125.052	
8	Kab. Belitung	3.174.401.134	240.522.843	1.743.675.611	0	1.205.518.092	273.236.628	3.024.026.072	
9	Kab. Bangka	1.092.826.279	240.522.843	1.164.748.842	0	214.418.031	273.236.628	2.207.406.628	
10	Kab. Belitung	5.977.874.822	240.522.843	1.117.255.24	0	864.790.387	575.236.628	2.981.410.8	
11	Pusat	12.215.025.108	1.235.122.158	18.974.102.885	0	91.568.417	572.298.878	12.718.181.881	
12	Kab. Bangka	1.717.789.037	107.422.001	1.587.548.245	0	2.226.024	572.298.878	1.728.374.5	
13	Kab. Belitung	1.722.311.812	107.422.001	1.404.726.842	0	3.421.024	273.236.628	1.785.240.241	
14	Kab. Bangka	1.044.104.128	107.422.001	1.861.528.131	0	321.181.024	544.249.058	1.624.412.241	
15	Kab. Belitung	1.717.789.037	107.422.001	1.294.585.131	0	1.362.014	544.249.058	1.391.548.24	
16	Kab. Bangka	1.355.167.022	107.422.001	1.453.932.022	0	1.474.402	572.298.878	1.822.560.2	
17	Kab. Belitung	1.717.789.037	107.422.001	1.587.548.245	0	2.226.024	273.236.628	1.728.374.5	
18	Kab. Bangka	1.717.789.037	107.422.001	1.801.124.241	0	1.336.024	273.236.628	1.702.311.8	
19	Kab. Belitung	1.991.067.539	107.422.001	1.881.236.311	0	5.238.024	544.249.058	2.014.477.743	
20	Kab. Bangka	1.717.789.037	107.422.001	1.851.890.124	0	14.121.011	575.236.628	2.014.477.743	
21	Kab. Belitung	1.717.789.037	107.422.001	1.421.378.242	0	4.367.014	575.236.628	1.811.467.574	
22	Kab. Bangka	1.722.311.812	107.422.001	1.411.022.124	0	1.336.024	273.236.628	1.607.024.2	
23	Kab. Belitung	1.717.789.037	107.422.001	1.807.646.142	0	1.336.024	273.236.628	1.707.276.12	
24	Kab. Bangka	1.717.789.037	107.422.001	1.807.646.142	0	1.336.024	273.236.628	1.707.276.12	
25	Kab. Belitung	1.717.789.037	107.422.001	1.411.022.124	0	1.336.024	273.236.628	1.607.024.2	
26	Kab. Bangka	1.714.268.812	107.422.001	1.593.814.422	0	1.226.024	273.236.628	1.784.024.12	
27	Kab. Belitung	1.717.201.927	107.422.001	1.582.051.245	0	1.226.024	273.236.628	1.782.285.2	
28	Kab. Bangka	1.717.201.927	107.422.001	1.387.876.073	0	1.336.024	273.236.628	1.701.160.23	

C.P. P. 2012

U.P. 2012

U.P. 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Page	Moayk Puni	Gr. Buni	Pembanguan Luas	Realisasi Punc Buni	Isa Lihitlanan	Hasil Pambunan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
431	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
432	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
433	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
434	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
435	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
436	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
437	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
438	Pemerintah Kabupaten Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
439	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
440	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
441	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
442	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
443	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
444	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
445	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
446	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
447	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
448	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
449	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628
450	Kab. Enrekang	267.54.044				0		572.298.628	572.298.628

C.P. P. 2012

U.P. 2012

Lampiran Ke-13 (Rincian) Perhitungan - 10.2.11 (Rp.1.000.000.000)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER BADA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN/ANGGARAN 2011
(Dalam Ringgali)

No.	Daerah	Paya	Milyar Rupiah	Ger. Bani	Pembayaran Lunas	Realisasi Pasar Bani	Isa Laksanakan	Hasil Penerimaan	Total
		1	4	5	6	7	8	9	10
104	Kab. Jayapura	10.832.307.133			2.252.260,7		702.402.393	572.298.873	10.832.307,133
105	Kab. Mamberamo Raya	32.813.336.223			1.310.038.437		3.572.30.602	572.298.873	36.652.200,873
106	Kab. Mamberamo Tengah	16.001.500.023			1.184.038.437		302.220.102	271.236.623	16.771.500,271
107	Kab. Paniai	10.244.000.523			1.400.12.441		402.220.102	271.236.623	10.754.000,271
108	Kab. Puncu	10.244.000.523			1.400.12.441		402.220.102	271.236.623	10.754.000,271
109	Kab. Tanimba	10.244.000.523			1.400.12.441		402.220.102	271.236.623	10.754.000,271
110	Kab. Waropen	10.244.000.523			1.400.12.441		402.220.102	271.236.623	10.754.000,271
111	Kab. Waropen	10.244.000.523			1.400.12.441		402.220.102	271.236.623	10.754.000,271
112	Kab. Waropen	10.244.000.523			1.400.12.441		402.220.102	271.236.623	10.754.000,271
113	Pemerintah Papua Barat	540.810.304.916	401.770.031.106	81.261.600.138	1.784.038.437		702.220.102	271.236.623	16.771.500,271
114	Kab. Sarmi	28.122.282.523	45.270.154.227	1.008.224.892	431.122.222		12.168.007.186	572.298.873	416.370.661,881
115	Kab. Sarmi	28.122.282.523	45.270.154.227	1.008.224.892	431.122.222		12.168.007.186	572.298.873	416.370.661,881
116	Kab. Sorong	12.222.200.023	4.720.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
117	Kab. Sorong	12.222.200.023	4.720.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
118	Kab. Sorong	12.222.200.023	4.720.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
119	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
120	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
121	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
122	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
123	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
124	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
125	Kab. Supi	41.222.200.023	3.626.021.062	1.022.222.062	41.144.422		4.21.442.021	572.298.873	15.05.271.422
126	Jumlah	53.874.816.281.864	20.684.000.716.284	16.122.240.716.812	14.491.126.624.916	618.887.116.114	1.812.466.163.881	138.877.102.117	63.874.816.281.864

C.P.P. No. 154.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSEKUTUAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011

2011AK3.D

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	915.443.887	915.443.887
2	Kab. Aceh Barat	50.857.993	50.857.993
3	Kab. Aceh Besar	50.857.993	50.857.993
4	Kab. Aceh Selatan	50.857.993	50.857.993
5	Kab. Aceh Singkil	50.857.993	-
6	Kab. Aceh Tengah	244.118.370	244.118.370
7	Kab. Aceh Tenggara	50.857.993	-
8	Kab. Aceh Timur	50.857.993	50.857.993
9	Kab. Aceh Utara	50.857.993	-
10	Kab. Bireun	50.857.993	-
11	Kab. Pidie	244.118.370	244.118.370
12	Kab. Simeulue	50.857.993	22.217.937
13	Kota Banda Aceh	50.857.993	50.857.993
14	Kota Sabang	50.857.993	50.857.993
15	Kota Langsa	50.857.993	50.857.993
16	Kota Lhokseumawe	50.857.993	50.857.993
17	Kab. Nagan Raya	50.857.993	-
18	Kab. Aceh Jaya	50.857.993	50.857.993
19	Kab. Pidie Jaya	244.118.370	244.118.370
20	Kab. Aceh Barat Daya	50.857.993	50.857.993
21	Kab. Gayo Lues	244.118.370	244.118.370
22	Kab. Aceh Tamiang	50.857.993	-
23	Kab. Bener Meriah	244.118.370	-
24	Kota Suhlussalam	50.857.993	50.857.993
25	Provinsi Sumatera Utara	3.099.972.655	3.099.972.655
26	Kab. Asahan	128.399.062	60.178.072
27	Kab. Dair	397.548.484	140.638.764
28	Kab. Deli Serdang	230.557.747	102.822.474
29	Kab. Tanah Karo	714.806.868	714.806.868
30	Kab. Labuhan Batu	113.568.335	2.822.474
31	Kab. Langkat	151.299.998	2.822.474
32	Kab. Mandailing Natal	104.014.781	104.014.781
33	Kab. Nias	86.485.412	42.273.157
34	Kab. Simalungun	1.102.120.776	1.102.120.776
35	Kab. Tapanuli Selatan	103.425.339	2.822.474
36	Kab. Tapanuli Tengah	107.588.935	107.588.935
37	Kab. Tapanuli Utara	815.750.320	815.750.320

100 - 100,00%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSEKUTUAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011

2011AK3.0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
36	Kab. Toba Samosir	92.942.183	44.289.279
39	Kota Binjai	99.261.974	2.922.474
40	Kota Medan	270.029.844	270.029.844
41	Kota Pematang Siantar	716.641.200	76.062.360
42	Kota Sibolga	94.227.867	20.629.567
43	Kota Tanjung Balai	90.629.370	90.629.370
44	Kab. Batu Bara	110.779.402	4.908.088
45	Kab. Labuhan Batu Utara	107.852.128	27.017.505
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	105.504.835	105.504.835
47	Kab. Padang Lawas Utara	100.524.430	100.524.430
48	Kab. Padang Lawas	100.555.000	100.555.000
49	Kab. Nias Utara	85.049.091	-
50	Kab. Nias Barat	85.945.347	-
51	Kota Tehing Tinggi	99.626.863	99.626.863
52	Kota Padang Sidempuan	99.190.143	2.922.474
53	Kab. Pakpak Bharat	87.631.889	48.474.839
54	Kab. Nias Selatan	99.713.908	2.922.474
55	Kab. Humbang Hasundutan	329.983.015	329.983.015
56	Kab. Serdang Bedagai	171.075.042	171.075.042
57	Kab. Samosir	95.721.148	14.720.704
58	Kota Gunung Sitoli	84.909.787	84.909.787
59	Provinsi Sumatera Barat	1.617.664.928	1.617.664.928
60	Kab. Limapuluh Kota	1.358.886.141	1.358.886.141
61	Kab. Agam	224.591.161	224.591.161
62	Kab. Kepulauan Mentawai	85.140.260	85.140.260
63	Kab. Padang Pariaman	85.140.260	85.140.260
64	Kab. Pasaman	211.845.894	211.845.894
65	Kab. Pesisir Selatan	85.140.260	85.140.260
66	Kab. Sijunjung	85.140.260	85.140.260
67	Kab. Solok	243.688.205	243.688.205
68	Kab. Tanah Datar	235.376.935	235.376.935
69	Kota Bukit Tinggi	85.140.260	85.140.260
70	Kota Padang Panjang	85.140.260	85.140.260
71	Kota Padang	85.140.260	85.140.260
72	Kota Payakumbuh	246.365.602	246.365.602
73	Kota Sawahlunto	232.214.489	232.214.489
74	Kota Solok	85.140.260	85.140.260

119 - LAMIR 3/2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
75	Kota Pariaman	85.140.260	85.140.260
76	Kab. Pasaman Barat	85.140.260	85.140.260
77	Kab. Dharmasraya	85.140.260	85.140.260
78	Kab. Solok Selatan	85.140.260	85.140.260
79	Provinsi Riau		
80	Kab. Bengkalis		
81	Kab. Indragiri Hilir		
82	Kab. Indragiri Hulu		
83	Kab. Kampar		
84	Kab. Kuantan Singingi		
85	Kab. Pelalawan		
86	Kab. Rokan Hilir		
87	Kab. Rokan Hulu		
88	Kab. Siak		
89	Kota Dumai		
90	Kota Pekanbaru		
91	Kab. Kepulauan Meranti		
92	Provinsi Kepulauan Riau	494.990.801	494.990.801
93	Kab. Bintan	82.488.467	82.488.467
94	Kab. Natuna	82.488.467	41.248.233
95	Kab. Karimun	82.488.467	82.488.467
96	Kota Batam	659.987.795	659.987.795
97	Kab. Kepulauan Anambas	82.488.467	82.488.467
98	Kota Tanjung Pinang	82.488.467	41.248.233
99	Kab. Lingga	82.488.467	82.488.467
100	Provinsi Jambi	880.702.272	880.702.272
101	Kab. Batanghari	66.070.272	-
102	Kab. Bungo	66.070.272	66.070.272
103	Kab. Kerinci	880.936.959	880.936.959
104	Kab. Merangin	66.070.272	66.070.272
105	Kab. Muaro Jambi	66.070.272	33.035.135
106	Kab. Sarolangun	66.070.272	66.070.272
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	66.070.272	33.035.135
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	66.070.272	33.035.135
109	Kab. Tebo	66.070.272	-
110	Kota Jambi	88.070.272	88.070.272
111	Kota Sungai Penuh	66.070.272	-

DIPERIKSA OLEH:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
112	Provinsi Sumatera Selatan	628.277.573	-
113	Kab. Lahat	208.425.857	-
114	Kab. Musi Banyuasin	41.885.171	-
115	Kab. Musi Rawas	41.885.171	41.885.171
116	Kab. Muara Enim	41.885.171	41.885.171
117	Kab. Ogan Komering Ilir	41.885.171	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu	41.885.171	18.288.050
119	Kota Palembang	41.885.171	-
120	Kota Pagar Alam	208.425.857	81.480.252
121	Kota Luluk Linggau	208.425.857	208.425.857
122	Kota Prabumulih	41.885.171	-
123	Kab. Empat Lawang	41.885.171	41.885.171
124	Kab. Banyuasin	41.885.171	41.885.171
125	Kab. Ogan Ilir	41.885.171	-
126	Kab. OKU Timur	208.425.857	91.490.252
127	Kab. OKU Selatan	208.425.857	208.425.857
128	Provinsi Bangka Belitung		
129	Kab. Bangka		
130	Kab. Belitung		
131	Kota Pangkal Pinang		
132	Kab. Bangka Selatan		
133	Kab. Bangka Tengah		
134	Kab. Bangka Barat		
135	Kab. Belitung Timur		
136	Provinsi Bengkulu		
137	Kab. Bengkulu Selatan		
138	Kab. Bengkulu Utara		
139	Kab. Rejang Lebong		
140	Kota Bengkulu		
141	Kab. Kaur		
142	Kab. Seluma		
143	Kab. Mukomuko		
144	Kab. Lebong		
145	Kab. Bengkulu Tengah		
146	Kab. Kepahiang		
147	Provinsi Lampung	983.405.224	983.405.224
148	Kab. Lampung Barat	80.307.832	80.307.832

118 - LAM - 083 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSEKUTUAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011

2011AK3.0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
149	Kab. Lampung Selatan	142.932.742	142.932.742
150	Kab. Lampung Tengah	428.099.289	428.099.289
151	Kab. Lampung Utara	109.383.737	109.383.737
152	Kab. Lampung Timur	526.509.705	526.509.705
153	Kab. Tanggamus	215.622.254	215.622.254
154	Kab. Tulang Bawang	70.243.230	-
155	Kab. Way Kanan	70.188.632	70.188.632
156	Kab. Pasawaran	154.115.744	154.115.744
157	Kab. Pringsewu	183.256.250	183.256.250
158	Kab. Mesuji	70.243.230	70.243.230
159	Kab. Tulang Bawang Barat	70.243.230	70.243.230
160	Kota Bandar Lampung	70.243.230	70.243.230
161	Kota Metro	84.221.983	84.221.983
162	Provinsi DKI Jakarta	1.720.872.475	1.720.872.475
163	Provinsi Jawa Barat	33.979.946.712	33.979.946.712
164	Kab. Bandung	2.558.627.824	2.558.627.824
165	Kab. Bekasi	13.102.588.290	13.102.588.290
166	Kab. Bogor	1.204.883.883	1.204.883.883
167	Kab. Ciamis	1.870.886.933	1.870.886.933
168	Kab. Cianjur	1.883.825.209	1.883.825.209
169	Kab. Cirebon	2.177.287.251	2.177.287.251
170	Kab. Garut	6.988.425.304	6.988.425.304
171	Kab. Indramayu	1.315.414.755	1.315.414.755
172	Kab. Karawang	8.478.123.889	8.478.123.889
173	Kab. Kuningan	1.718.648.622	1.718.648.622
174	Kab. Majalengka	5.534.696.136	5.534.696.136
175	Kab. Purwakarta	1.824.190.888	1.824.190.888
176	Kab. Subang	2.137.568.140	2.137.568.140
177	Kab. Sukabumi	1.545.714.480	1.545.714.480
178	Kab. Sumedang	6.363.375.884	6.363.375.884
179	Kab. Tasikmalaya	1.757.456.561	1.757.456.561
180	Kab. Bandung Barat	1.464.262.342	1.464.262.342
181	Kota Bandung	1.642.420.488	1.642.420.488
182	Kota Bekasi	1.388.240.810	1.388.240.810
183	Kota Bogor	1.242.459.258	1.242.459.258
184	Kota Cirebon	5.335.707.817	5.335.707.817
185	Kota Depok	1.660.759.153	1.660.759.153

118-1411-3-2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSEKUTUAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011

2011AK3.0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
186	Kota Sukabumi	1.010.150.455	1.010.150.455
187	Kota Cimahi	1.332.113.722	1.332.113.722
188	Kota Tasikmalaya	1.615.290.976	1.615.290.976
189	Kota Banjar	1.553.124.104	1.553.124.104
190	Provinsi Banten	588.632.000	588.632.000
191	Kab. Lebak	98.105.400	49.052.700
192	Kab. Pandeglang	98.105.400	-
193	Kab. Serang	558.510.700	558.510.700
194	Kab. Tangerang	98.105.400	-
195	Kota Cilegon	98.105.400	-
196	Kota Tangerang	98.105.400	-
197	Kota Serang	226.333.137	226.333.137
198	Kota Tangerang Selatan	98.105.400	49.052.700
199	Provinsi Jawa Tengah	102.752.820.771	102.752.820.771
200	Kab. Banjarnegara	3.442.985.085	3.442.985.085
201	Kab. Banyumas	3.200.063.537	3.200.063.537
202	Kab. Batang	5.114.554.883	5.114.554.883
203	Kab. Blora	4.918.402.487	4.918.402.487
204	Kab. Boyolali	8.436.773.703	8.436.773.703
205	Kab. Brebes	3.163.886.592	3.163.886.592
206	Kab. Cilacap	3.187.630.762	3.187.630.762
207	Kab. Demak	8.499.585.182	8.499.585.182
208	Kab. Grobogan	4.712.738.509	4.712.738.509
209	Kab. Jepara	9.936.470.657	9.936.470.657
210	Kab. Karanganyar	4.736.712.785	4.736.712.785
211	Kab. Kebumen	3.655.839.701	3.655.839.701
212	Kab. Kendal	16.173.028.830	16.173.028.830
213	Kab. Klaten	8.866.326.884	8.866.326.884
214	Kab. Kudus	60.824.479.283	60.824.479.283
215	Kab. Magelang	7.513.885.137	7.513.885.137
216	Kab. Pati	4.485.589.900	4.485.589.900
217	Kab. Pekalongan	3.188.534.126	3.188.534.126
218	Kab. Pematang	3.206.232.744	3.206.232.744
219	Kab. Purwalingga	3.088.558.757	3.088.558.757
220	Kab. Purwokerto	3.696.282.179	3.696.282.179
221	Kab. Rembang	3.328.315.227	3.328.315.227
222	Kab. Semarang	3.868.501.033	3.868.501.033

100 - 1000 - 1000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
223	Kab. Bragan	3.529.158.424	3.529.158.424
224	Kab. Sukoharjo	3.821.844.952	3.821.389.530
225	Kab. Tegal	3.480.913.618	3.480.913.618
226	Kab. Temanggung	13.765.366.002	13.765.366.002
227	Kab. Wonorejo	3.132.684.090	3.132.684.090
228	Kab. Wonosobo	5.909.799.874	5.909.799.874
229	Kota Magelang	3.085.761.481	3.085.761.481
230	Kota Pekalongan	3.053.738.877	3.053.738.877
231	Kota Salatiga	3.587.606.084	3.587.606.084
232	Kota Semarang	8.101.014.119	8.101.014.119
233	Kota Surakarta	3.661.370.677	3.661.370.677
234	Kota Tegal	3.194.835.312	3.194.835.312
235	Provinsi DI Yogyakarta	6.054.769.655	6.054.769.655
236	Kab. Bantul	4.036.513.103	4.036.513.103
237	Kab. Gunung Kidul	2.018.258.551	2.018.258.551
238	Kab. Kulon Progo	3.027.384.828	3.027.384.828
239	Kab. Sleman	2.825.559.173	2.825.559.173
240	Kota Yogyakarta	2.220.082.207	2.220.082.207
241	Provinsi Jawa Timur	219.703.158.430	219.703.158.430
242	Kab. Bangkalan	6.379.295.707	6.379.295.707
243	Kab. Banyuwangi	7.436.230.204	7.436.230.204
244	Kab. Blitar	9.929.049.772	9.929.049.772
245	Kab. Bojonegara	20.787.812.828	20.787.812.828
246	Kab. Bondowoso	13.200.976.906	13.200.976.906
247	Kab. Gresik	6.417.876.783	6.417.876.783
248	Kab. Jember	12.866.496.343	12.866.496.343
249	Kab. Jombang	11.147.481.862	11.147.481.862
250	Kab. Kediri	27.325.003.438	27.325.003.438
251	Kab. Lamongan	12.787.520.935	12.787.520.935
252	Kab. Lumajang	7.716.040.323	7.716.040.323
253	Kab. Madiun	7.667.273.767	7.667.273.767
254	Kab. Magetan	6.943.044.757	6.943.044.757
255	Kab. Malang	32.413.320.448	32.413.320.448
256	Kab. Mojokerto	7.970.152.316	7.970.152.316
257	Kab. Nganjuk	12.117.757.947	12.117.757.947
258	Kab. Ngawi	11.034.191.817	11.034.191.817
259	Kab. Pacitan	6.636.581.326	6.636.581.326

10 - 141 - 3 - 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSEKUTUAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011

2011AK3.0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
260	Kab. Pamelasan	28.020.125.932	28.020.125.932
261	Kab. Pasuruan	26.389.414.585	26.389.414.585
262	Kab. Ponorogo	7.421.826.788	7.421.826.788
263	Kab. Probolinggo	16.588.263.842	16.588.263.842
264	Kab. Sampang	7.484.690.048	7.484.690.048
265	Kab. Sidoarjo	13.618.655.968	13.618.655.968
266	Kab. Situbondo	8.388.216.633	8.388.216.633
267	Kab. Sumenep	15.428.472.807	15.428.472.807
268	Kab. Trenggalek	6.814.737.160	6.814.737.160
269	Kab. Tulungagung	8.848.420.478	8.848.420.478
270	Kab. Tulungagung	16.885.226.658	16.885.226.658
271	Kota Blitar	8.105.860.495	8.105.860.495
272	Kota Kediri	53.521.087.830	53.521.087.830
273	Kota Madiun	6.118.903.304	6.118.903.304
274	Kota Malang	21.880.755.508	21.880.755.508
275	Kota Mojokerto	7.180.319.414	7.180.319.414
276	Kota Pasuruan	6.170.534.397	6.170.534.397
277	Kota Probolinggo	5.948.038.072	5.948.038.072
278	Kota Surabaya	19.806.258.084	19.806.258.084
279	Kota Batu	6.539.629.554	6.539.629.554
280	Provinsi Kalimantan Barat		
281	Kab. Bengkayang		
282	Kab. Landak		
283	Kab. Kapuas Hulu		
284	Kab. Ketapang		
285	Kab. Pontianak		
286	Kab. Sambas		
287	Kab. Sanggau		
288	Kab. Sintang		
289	Kota Pontianak		
290	Kota Singkawang		
291	Kab. Kayong Utara		
292	Kab. Kubu Raya		
293	Kab. Sekadau		
294	Kab. Melawi		
295	Provinsi Kalimantan Tengah	567.746.039	567.746.039
296	Kab. Barito Selatan	43.672.772	-

119-1481-34-2012-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
297	Kab. Bontu Utara	43.672.772	-
298	Kab. Kapuas	43.672.772	-
299	Kab. Ketawaringin Barat	43.672.772	19.078.985
300	Kab. Ketawaringin Timur	43.672.772	43.672.772
301	Kota Palangkaraya	43.672.772	19.078.985
302	Kab. Bontu Timur	43.672.772	19.078.985
303	Kab. Murung Raya	43.672.772	-
304	Kab. Pulang Pisau	758.994.718	758.994.718
305	Kab. Gunung Mas	43.672.772	-
306	Kab. Lamandau	43.672.772	-
307	Kab. Sukamara	43.672.772	-
308	Kab. Katingan	43.672.772	-
309	Kab. Seruyan	43.672.772	-
310	Provinsi Kalimantan Selatan		
311	Kab. Banjar		
312	Kab. Barito Kuala		
313	Kab. Hulu Sungai Selatan		
314	Kab. Hulu Sungai Tengah		
315	Kab. Hulu Sungai Utara		
316	Kab. Kotabaru		
317	Kab. Tabalong		
318	Kab. Tanah Laut		
319	Kab. Tapin		
320	Kota Banjarbaru		
321	Kota Banjarmasin		
322	Kab. Balangan		
323	Kab. Tanah Bumbu		
324	Provinsi Kalimantan Timur		
325	Kab. Berau		
326	Kab. Bulungan		
327	Kab. Kutai Kartanegara		
328	Kab. Kutai Barat		
329	Kab. Kutai Timur		
330	Kab. Malinau		
331	Kab. Nunukan		
332	Kab. Paser		
333	Kota Balikpapan		

DPP-1481-34-2013-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
334	Kota Buntang		
335	Kab. Tana Tidung		
336	Kota Samarinda		
337	Kota Tarakan		
338	Kab. Penajam Paser Utara		
339	Provinsi Sulawesi Utara	470.912.235	470.912.235
340	Kab. Bolaang Mongondow	33.636.588	16.818.293
341	Kab. Minahasa	33.636.588	16.818.293
342	Kab. Sangihe	33.636.588	16.818.293
343	Kota Bitung	33.636.588	16.818.293
344	Kota Manado	33.636.588	16.818.293
345	Kab. Kepulauan Talaud	33.636.588	16.818.293
346	Kab. Minahasa Selatan	33.636.588	16.818.293
347	Kab. Minahasa Tenggara	33.636.588	16.818.293
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaru	33.636.588	16.818.293
349	Kota Kotamubagu	33.636.588	16.818.293
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	627.682.980	627.682.980
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	33.636.588	16.818.293
352	Kota Tomohon	33.636.588	16.818.293
353	Kab. Minahasa Utara	33.636.588	16.818.293
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	33.636.588	16.818.293
355	Provinsi Gorontalo		
356	Kab. Boalemo		
357	Kab. Gorontalo		
358	Kota Gorontalo		
359	Kab. Pohuwato		
360	Kab. Gorontalo Utara		
361	Kab. Bone Bolango		
362	Provinsi Sulawesi Tengah	649.558.538	649.558.538
363	Kab. Banggai	81.194.817	81.194.817
364	Kab. Banggai Kepulauan	81.194.817	81.194.817
365	Kab. Buol	288.682.683	288.682.683
366	Kab. Toli-Toli	288.682.683	288.682.683
367	Kab. Donggala	81.194.817	81.194.817
368	Kab. Morowali	81.194.817	81.194.817
369	Kab. Poso	81.194.817	81.194.817
370	Kota Palu	288.682.683	288.682.683

100 - 1481 - 34 - 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
371	Kab. Parigi Moutong	81.194.817	81.194.817
372	Kab. Sigi	81.194.817	81.194.817
373	Kab. Tana Una Una	81.194.817	81.194.817
374	Provinsi Sulawesi Selatan	2.492.246.875	2.492.246.875
375	Kab. Bantaeng	111.172.375	111.172.375
376	Kab. Barru	118.481.974	118.481.974
377	Kab. Bone	676.178.338	676.178.338
378	Kab. Bulukumba	189.104.153	73.875.213
379	Kab. Enrekang	103.843.619	103.843.619
380	Kab. Gowa	103.843.619	103.843.619
381	Kab. Jeneponto	103.843.619	103.843.619
382	Kab. Luwu	104.215.604	45.527.863
383	Kab. Luwu Utara	103.843.619	103.843.619
384	Kab. Maros	103.843.619	103.843.619
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	104.933.470	104.933.470
386	Kab. Pinrang	103.843.619	103.843.619
387	Kab. Selayar	103.843.619	103.843.619
388	Kab. Sidenreng Rappang	103.843.619	103.843.619
389	Kab. Sinjai	547.615.124	547.615.124
390	Kab. Soppeng	2.294.921.917	2.294.921.917
391	Kab. Takalar	103.843.619	103.843.619
392	Kab. Tana Toraja	114.911.802	114.911.802
393	Kab. Wajo	118.853.538	118.853.538
394	Kota Pare-pare	103.843.619	103.843.619
395	Kab. Toraja Utara	104.807.365	45.830.067
396	Kota Makassar	103.843.619	103.843.619
397	Kota Palopo	103.843.619	103.843.619
398	Kab. Luwu Timur	103.843.619	103.843.619
399	Provinsi Sulawesi Barat		
400	Kab. Majene		
401	Kab. Mamuju		
402	Kab. Polewali Mandar		
403	Kab. Mamasa		
404	Kab. Mamuju Utara		
405	Provinsi Sulawesi Tenggara		
406	Kab. Buton		
407	Kab. Konawe		

DPP-1481-34-1246-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERSEKUTUAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011

2011AK3.0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
408	Kab. Kulaku		
409	Kab. Muna		
410	Kota Kendari		
411	Kota Bau-Bau		
412	Kab. Konawe Selatan		
413	Kab. Bombana		
414	Kab. Konawe Utara		
415	Kab. Buton Utara		
416	Kab. Wakatobi		
417	Kab. Kulaka Utara		
418	Provinsi Bali	2.573.157.820	2.573.157.820
419	Kab. Badung	285.906.424	285.906.424
420	Kab. Bangli	308.834.774	308.834.774
421	Kab. Buleleng	3.369.578.755	3.369.578.755
422	Kab. Gianyar	800.517.853	800.517.853
423	Kab. Jembrana	285.906.424	285.906.424
424	Kab. Karangasem	297.571.410	297.571.410
425	Kab. Klungkung	285.906.424	285.906.424
426	Kab. Tahanan	285.906.424	285.906.424
427	Kota Denpasar	285.906.424	285.906.424
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	45.182.630.275	45.182.630.275
429	Kab. Bima	6.925.497.449	6.925.497.449
430	Kab. Dompu	3.938.170.588	3.938.170.588
431	Kab. Lombok Barat	10.670.555.325	10.670.555.325
432	Kab. Lombok Tengah	21.084.854.823	21.084.854.823
433	Kab. Lombok Timur	39.158.552.211	39.158.552.211
434	Kab. Sumbawa	7.151.723.959	7.151.723.959
435	Kota Mataram	4.858.553.085	4.858.553.085
436	Kab. Lombok Utara	4.947.581.257	4.947.581.257
437	Kota Bima	3.081.431.648	3.081.431.648
438	Kab. Sumbawa Barat	3.598.136.954	3.598.136.954
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	860.054.374	860.054.374
440	Kab. Alor	53.731.660	53.731.660
441	Kab. Belu	218.288.755	218.288.755
442	Kab. Ende	44.281.314	-
443	Kab. Flores Timur	40.954.970	-
444	Kab. Kupang	40.854.870	17.881.680

119-1A11-3124E-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAHA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
445	Kab. Lembata	429.415.794	-
446	Kab. Manggarai	40.954.970	-
447	Kab. Ngada	40.954.970	-
448	Kab. Sikka	117.662.484	-
449	Kab. Sumba Barat	167.511.830	167.511.830
450	Kab. Sumba Timur	69.152.895	69.152.895
451	Kab. Timor Tengah Selatan	40.005.482	-
452	Kab. Timor Tengah Utara	40.954.970	-
453	Kota Kupang	40.954.970	-
454	Kab. Rote Nelayan	40.954.970	17.891.880
455	Kab. Nagasaki	40.954.970	-
456	Kab. Sumba Tengah	40.954.970	-
457	Kab. Sumba Barat Daya	310.890.901	135.819.147
458	Kab. Manggarai Timur	40.954.970	-
459	Kab. Suku Raijua	80.295.585	-
460	Kab. Manggarai Barat	65.021.208	65.021.208
461	Provinsi Maluku		
462	Kab. Maluku Tenggara Barat		
463	Kab. Maluku Tengah		
464	Kab. Maluku Tenggara		
465	Kab. Pulau Buru		
466	Kota Ambon		
467	Kab. Seram Bagian Barat		
468	Kab. Seram Bagian Timur		
469	Kab. Maluku Barat Daya		
470	Kab. Buru Selatan		
471	Kab. Kepulauan Aru		
472	Kota Tual		
473	Provinsi Maluku Utara		
474	Kab. Halmahera Tengah		
475	Kab. Halmahera Barat		
476	Kota Ternate		
477	Kab. Halmahera Timur		
478	Kota Tidore Kepulauan		
479	Kab. Kepulauan Sula		
480	Kab. Pulau Morotai		
481	Kab. Halmahera Selatan		

DIPERIKSA OLEH

LAPORAN KEJAYAKAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (2009750)

LAMP 3 D

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
519	Kab. Raja Ampat		
520	Kab. Teluk Bintuni		
521	Kab. Teluk Wondolama		
522	Kab. Tambora		
523	Kab. Maybrat		
524	Kab. Kaimana		
525	Dana Cadangan		
	JUMLAH	1.415.973.003.052	1.408.448.784.184

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	718.848.172.000	718.848.172.000	60.811.300.000	60.811.300.000
2	Kab. Aceh Besar	367.377.754.000	367.377.754.000	33.230.700.000	33.260.700.000
3	Kab. Aceh Besai	452.088.329.000	452.088.329.000	47.686.700.000	47.686.700.000
4	Kab. Aceh Selatan	305.001.529.000	305.001.529.000	44.153.700.000	44.153.700.000
5	Kab. Aceh Singkil	257.073.215.000	257.073.215.000	39.232.300.000	39.232.300.000
6	Kab. Aceh Tamiang	308.085.281.000	308.085.281.000	37.485.000.000	37.485.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	345.178.264.000	345.178.264.000	33.836.500.000	33.866.500.000
8	Kab. Aceh Utara	441.119.241.000	441.119.241.000	51.652.200.000	51.662.200.000
9	Kab. Aceh Utara	440.958.167.000	440.958.167.000	34.513.900.000	34.513.900.000
10	Kab. Aceh Utara	780.010.589.000	780.010.589.000	75.572.300.000	75.572.300.000
11	Kab. Aceh Utara	407.985.029.000	407.985.029.000	38.567.300.000	38.577.300.000
12	Kab. Aceh Utara	760.319.659.000	760.319.659.000	50.029.000.000	50.029.000.000
13	Kota Banda Aceh	406.387.627.000	406.387.627.000	29.637.200.000	29.637.200.000
14	Kota Banda Aceh	741.688.681.000	741.688.681.000	76.368.900.000	76.368.900.000
15	Kota Langsa	276.305.406.000	276.305.406.000	26.665.800.000	26.665.800.000
16	Kota Lhokseumawe	375.410.071.000	375.410.071.000	21.805.500.000	21.805.500.000
17	Kab. Nagan Raya	331.212.473.000	331.212.473.000	31.831.800.000	31.831.800.000
18	Kab. Aceh Jaya	255.317.500.000	255.317.500.000	33.753.200.000	33.753.200.000
19	Kab. Aceh Jaya	755.713.281.000	755.713.281.000	48.136.600.000	48.136.600.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	275.720.062.000	275.720.062.000	42.653.700.000	42.653.700.000
21	Kab. Bireu Lues	201.310.455.000	201.310.455.000	37.037.700.000	37.037.700.000
22	Kab. Aceh Tenggara	308.322.187.000	308.322.187.000	33.526.100.000	33.526.100.000
23	Kab. Bener Meriah	285.311.068.000	285.311.068.000	33.121.700.000	33.121.700.000
24	Kota Sakti Jusalah	189.847.725.000	189.847.725.000	33.771.700.000	33.771.700.000
25	Provinsi Sumatera Utara	948.887.504.000	948.887.504.000	38.485.500.000	38.485.500.000
26	Kab. Asahan	523.032.037.000	523.032.037.000	50.836.000.000	50.836.000.000
27	Kab. Deli	374.322.083.000	374.322.083.000	44.159.400.000	44.159.400.000
28	Kab. Deli Serdang	380.039.680.000	380.039.680.000	67.156.300.000	67.156.300.000
29	Kab. Tanah Karo	441.830.815.000	441.830.815.000	42.453.100.000	42.453.100.000
30	Kab. Labuhan Ratu	370.830.816.000	370.830.816.000	45.520.700.000	45.520.700.000
31	Kab. Langkat	680.304.684.000	680.304.684.000	53.889.500.000	53.889.500.000
32	Kab. Mandailing Natal	455.386.638.000	455.386.638.000	48.435.400.000	48.435.400.000
33	Kab. Nias	780.935.711.000	780.935.711.000	54.936.900.000	54.936.900.000
34	Kab. Simalungun	606.367.265.000	606.367.265.000	73.986.400.000	73.986.400.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	373.142.835.000	373.142.835.000	44.504.100.000	44.504.100.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	343.958.029.000	343.958.029.000	57.309.400.000	57.309.400.000
37	Kab. Tapanuli Utara	408.030.012.000	408.030.012.000	58.002.100.000	58.002.100.000
38	Kab. Toba Samosir	370.485.155.000	370.485.155.000	51.448.900.000	51.448.900.000
39	Kota Sibolga	336.978.734.000	336.978.734.000	25.236.900.000	25.236.900.000
40	Kota Medan	880.827.413.000	880.827.413.000	81.564.300.000	81.564.300.000
41	Kota Pekanbaru Sentar	352.723.110.000	352.723.110.000	24.784.000.000	24.784.000.000
42	Kota Singkil	248.506.013.000	248.506.013.000	22.757.000.000	22.757.000.000
43	Kota Tanjung Balai	775.735.152.000	775.735.152.000	33.158.800.000	33.158.800.000
44	Kab. Batu Bara	306.130.939.000	306.130.939.000	38.945.300.000	38.945.300.000
45	Kab. Labuhan Batu Lela	346.064.405.000	346.064.405.000	77.157.500.000	77.157.500.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	767.177.103.000	767.177.103.000	35.441.200.000	35.441.200.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	280.768.244.000	280.768.244.000	77.739.200.000	77.739.200.000
48	Kab. Padang Lawas	248.724.117.000	248.724.117.000	40.026.800.000	40.026.800.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (Lanjutan)

DAFTAR LAMBEK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
49	Kab. Nias Utara	281.050.187.000	281.858.187.000	53.814.300.000	52.989.000.000
50	Kab. Nias Barat	193.365.061.000	193.535.061.000	63.821.100.000	47.967.725.000
51	Kota Lubuk Linggau	262.130.545.000	262.130.545.000	22.087.200.000	22.087.200.000
52	Kota Padang Sidempuan	308.201.834.000	308.201.834.000	25.539.300.000	25.589.300.000
53	Kab. Pangkajene Arange	198.434.615.000	198.401.615.000	23.841.200.000	23.811.200.000
54	Kab. Nias Selatan	312.180.984.000	312.108.984.000	54.201.300.000	54.201.300.000
55	Kab. Humbang Hasandutan	313.362.208.000	313.333.208.000	31.613.800.000	31.612.800.000
56	Kab. Selatpanjang	458.459.739.000	458.459.739.000	65.734.200.000	65.764.200.000
57	Kab. Sintang	203.201.579.000	203.201.579.000	35.851.300.000	35.831.300.000
58	Kota Tanjung	251.731.275.000	251.781.275.000	50.750.700.000	50.790.700.000
59	Provinsi Sumatera Barat	784.880.895.000	784.880.895.000	40.733.300.000	40.733.300.000
60	Kab. Limapuluh Kota	467.068.452.000	467.038.452.000	48.701.300.000	48.701.300.000
61	Kab. Agam	480.438.105.000	480.438.105.000	48.864.100.000	48.894.100.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	323.157.822.000	323.157.822.000	47.204.900.000	35.435.800.000
63	Kab. Padang Panjang	464.363.502.000	464.363.502.000	66.639.200.000	66.669.400.000
64	Kab. Pasaman	363.189.348.000	363.189.348.000	40.528.300.000	40.528.300.000
65	Kab. Pasisir Selatan	514.412.081.000	514.412.081.000	77.488.000.000	77.436.000.000
66	Kab. Sijunjung	331.519.952.000	331.519.952.000	72.072.300.000	45.072.300.000
67	Kab. Sulu	440.038.502.000	440.038.502.000	52.035.000.000	52.035.000.000
68	Kab. Tanah Datar	432.395.143.000	432.395.143.000	47.837.100.000	47.837.100.000
69	Kota Bukittinggi	273.042.100.000	273.042.100.000	23.320.700.000	17.750.725.000
70	Kota Padang Panjang	235.871.127.000	235.871.127.000	17.853.000.000	15.412.350.000
71	Kota Padang	711.700.928.000	711.700.929.000	53.431.700.000	53.431.400.000
72	Kota Payakumbuh	260.336.050.000	260.336.050.000	21.102.800.000	21.192.800.000
73	Kota Sawahlunto	225.221.340.000	225.221.340.000	26.055.000.000	26.085.000.000
74	Kota Solok	237.236.270.000	237.236.270.000	15.327.200.000	14.750.725.000
75	Kota Pekanbaru	263.070.223.000	263.070.223.000	21.948.300.000	21.950.300.000
76	Kab. Pasaman Barat	405.217.973.000	405.217.973.000	53.579.800.000	43.930.325.000
77	Kab. Umarussawa	208.721.955.000	208.721.955.000	37.728.000.000	37.728.000.000
78	Kab. Sulang Selatan	264.291.239.000	264.291.239.000	37.688.000.000	28.280.175.000
79	Provinsi Riau	380.051.123.500	380.051.123.500	56.823.400.000	56.823.400.000
80	Kab. Bengkalis	100.413.024.000	100.413.024.000	18.685.300.000	14.010.775.000
81	Kab. Indragiri Hilir	573.482.644.000	573.482.644.000	85.771.700.000	65.771.300.000
82	Kab. Indragiri Hulu	427.199.395.000	427.199.395.000	11.358.000.000	11.366.000.000
83	Kab. Kampar	440.688.198.500	440.688.198.500	28.850.300.000	28.850.300.000
84	Kab. Kampar Simpang	431.274.869.000	431.274.869.000	13.901.100.000	13.901.100.000
85	Kab. Parit Sembilan	363.711.023.000	363.711.023.000	17.970.200.000	17.970.200.000
86	Kab. Pekanbaru	188.048.029.000	188.048.029.000	13.158.300.000	14.374.150.000
87	Kab. Rokan Hulu	375.358.605.000	375.358.605.000	4.347.000.000	4.347.000.000
88	Kab. Rokan	30.812.581.000	30.812.581.000	10.485.500.000	10.485.500.000
89	Kota Dumai	745.131.340.000	745.131.340.000	4.149.700.000	4.149.700.000
90	Kota Pekanbaru	782.879.555.000	782.879.555.000	17.432.500.000	17.432.500.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	740.293.822.000	740.293.822.000	45.512.900.000	45.512.900.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	395.745.542.000	395.745.542.000	21.909.200.000	21.909.200.000
93	Kab. Bintan	184.765.533.000	184.765.533.000	15.070.800.000	15.070.800.000
94	Kab. Natuna	71.908.237.000	71.908.237.000	26.315.500.000	27.238.200.000
95	Kab. Karimun	155.874.980.000	155.874.980.000	3.856.700.000	3.856.700.000
96	Kota Batam	316.771.074.000	316.771.074.000	39.157.300.000	38.157.300.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FISKAL TAHUN 2011 (ASAS RENCANA)

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
97	Kab. Kepulauan Anson	208.075.222.000	208.075.222.000	34.289.300.000	25.713.375.000
98	Kota Tanjung Pinang	252.716.590.000	252.716.590.000	2.441.200.000	2.441.200.000
99	Kab. Lingga	200.841.641.000	200.841.641.000	4.814.500.000	4.814.500.000
100	Provinsi Jambi	683.887.413.000	683.887.413.000	24.736.800.000	24.736.800.000
101	Kab. Batanghari	344.092.897.000	344.092.897.000	31.436.000.000	31.436.000.000
102	Kab. Bungo	343.428.052.000	343.428.052.000	48.855.400.000	48.855.400.000
103	Kab. Kerinci	365.273.971.000	365.273.971.000	43.933.200.000	43.933.200.000
104	Kab. Merangin	416.377.224.000	416.377.224.000	46.356.700.000	46.356.700.000
105	Kab. Muaro Jambi	371.182.909.000	371.182.909.000	44.548.700.000	44.548.700.000
106	Kab. Sarolangun	363.195.573.000	363.195.573.000	42.777.000.000	42.777.000.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	243.522.187.000	243.522.187.000		
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	781.719.593.000	781.719.593.000	3.330.900.000	3.330.900.000
109	Kab. Tebo	325.192.480.000	325.192.480.000	42.587.000.000	42.587.000.000
110	Kota Lingsi	441.744.799.000	441.744.799.000	34.673.700.000	34.673.700.000
111	Kota Jambi Penuh	257.773.767.000	257.773.767.000	50.532.000.000	50.532.000.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	848.813.301.000	848.813.301.000	32.287.000.000	32.287.000.000
113	Kab. Lahat	425.542.368.000	425.542.368.000	43.212.900.000	43.212.900.000
114	Kab. Musi Banyuasin	295.108.781.000	295.108.781.000	61.809.000.000	61.809.000.000
115	Kab. Musi Rawas	467.443.542.000	467.443.542.000	67.010.900.000	67.010.900.000
116	Kab. Muara Enim	460.445.260.000	460.445.260.000	41.740.800.000	41.740.800.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	670.312.905.000	670.312.905.000	66.445.100.000	66.445.100.000
118	Kab. Ogan Komering Lili	375.426.823.000	375.426.823.000	3.177.000.000	3.177.000.000
119	Kota Palembang	787.313.729.000	787.313.729.000	47.679.100.000	47.679.100.000
120	Kota Palembang	230.436.235.000	230.436.235.000	21.846.700.000	21.846.700.000
121	Kota Lubang Buluh	267.774.762.000	267.774.762.000	26.060.100.000	26.060.100.000
122	Kota Palembang	247.579.377.000	247.579.377.000	22.557.100.000	22.557.100.000
123	Kab. Empat Lawang	238.437.139.000	238.437.139.000	41.633.900.000	41.633.900.000
124	Kab. Empat Kandang	526.461.721.000	526.461.721.000	73.770.800.000	73.770.800.000
125	Kab. Empat Kandang	363.061.733.000	363.061.733.000	41.827.800.000	41.827.800.000
126	Kab. Empat Kandang	458.812.787.000	458.812.787.000	58.734.800.000	58.734.800.000
127	Kab. Empat Kandang	338.570.827.000	338.570.827.000	45.206.500.000	45.206.500.000
128	Provinsi Bangka Belitung	481.688.916.000	481.688.916.000	23.841.200.000	17.880.900.000
129	Kab. Bangka	325.159.554.000	325.159.554.000	33.857.500.000	33.857.500.000
130	Kab. Belitung	280.922.544.000	280.922.544.000	43.657.200.000	43.657.200.000
131	Kota Pangkal Jayeng	277.469.663.000	277.469.663.000	23.732.100.000	17.628.225.000
132	Kab. Bangka Selatan	271.438.278.000	271.438.278.000	31.824.800.000	31.824.800.000
133	Kab. Bangka Tengah	285.990.998.000	285.990.998.000	27.724.000.000	27.724.000.000
134	Kab. Bangka Barat	265.457.548.000	265.457.548.000	31.259.300.000	25.445.478.000
135	Kab. Belitung Timur	261.911.574.000	261.911.574.000	23.368.000.000	23.368.000.000
136	Provinsi Bengkulu	607.388.038.000	607.388.038.000	38.809.800.000	38.809.800.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	322.434.462.000	322.434.462.000	37.642.700.000	37.642.700.000
138	Kab. Bengkulu Utara	374.568.595.000	374.568.595.000	51.068.800.000	51.068.800.000
139	Kab. Bengkulu Tengah	374.729.904.000	374.729.904.000	43.034.100.000	43.034.100.000
140	Kota Bengkulu	397.878.445.000	397.878.445.000	27.371.500.000	27.371.500.000
141	Kab. Bengkulu	248.921.574.000	248.921.574.000	36.428.300.000	36.428.300.000
142	Kab. Bengkulu	287.005.754.000	287.005.754.000	38.330.200.000	38.330.200.000
143	Kab. Bengkulu	283.109.275.000	283.109.275.000	37.742.700.000	37.742.700.000
144	Kab. Bengkulu	241.212.057.000	241.212.057.000	26.259.900.000	26.259.900.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH JAKSA TAHUN 2011 (Lanjutan)

DAFTAR LAMBEK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
145	Kab. Bengkulu Tengah	250.180.557.000	250.130.567.000	58.685.520.000	58.695.300.000
146	Kab. Kepahiang	264.750.012.000	264.750.012.000	33.841.500.000	33.911.500.000
147	Provinsi Lampung	768.873.038.000	768.873.038.000	42.210.200.000	42.210.200.000
148	Kab. Lampung Barat	407.798.810.000	407.798.810.000	59.228.200.000	59.228.200.000
149	Kab. Lampung Selatan	574.756.583.000	574.756.583.000	75.477.700.000	75.477.700.000
150	Kab. Lampung Tengah	705.179.583.000	705.179.583.000	104.385.500.000	104.395.300.000
151	Kab. Lampung Utara	562.368.682.000	562.368.682.000	67.457.700.000	67.467.700.000
152	Kab. Lampung Timur	627.844.589.000	627.844.589.000	62.538.300.000	62.538.300.000
153	Kab. Tanggamus	448.288.584.000	448.288.584.000	75.750.000.000	75.750.000.000
154	Kab. Tulang Bawang	700.392.837.000	700.392.837.000	77.337.700.000	77.337.400.000
155	Kab. Way Kambing	368.389.252.000	368.389.252.000	50.090.000.000	50.090.000.000
156	Kab. Way Semesta	375.847.754.000	375.847.754.000	68.638.800.000	68.638.800.000
157	Kab. Pringsewu	368.274.778.000	368.274.778.000	59.281.200.000	59.281.200.000
158	Kab. Merang	758.175.517.000	758.175.517.000	48.039.900.000	48.039.900.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	284.455.820.000	284.455.820.000	60.901.100.000	60.901.100.000
160	Kota Bandar Lampung	825.925.790.000	825.925.790.000	39.112.300.000	39.112.300.000
161	Kota Metro	771.543.683.000	771.543.683.000	20.827.800.000	20.827.800.000
162	Provinsi DKI Jakarta	209.909.442.000	209.909.442.000	-	-
163	Provinsi Jawa Barat	1.181.553.108.000	1.181.553.108.000	45.784.800.000	45.784.800.000
164	Kab. Bandung	1.200.323.247.000	1.200.323.247.000	100.035.000.000	100.035.000.000
165	Kab. Bekasi	880.732.734.000	880.732.734.000	73.837.100.000	73.837.100.000
166	Kab. Bogor	1.326.864.682.000	1.326.864.682.000	164.959.000.000	164.959.000.000
167	Kab. Cimahi	350.315.823.000	350.315.823.000	85.270.700.000	85.270.700.000
168	Kab. Cianjur	366.045.243.000	366.045.243.000	100.103.500.000	100.103.500.000
169	Kab. Cirebon	330.384.906.000	330.384.906.000	76.614.800.000	76.614.800.000
170	Kab. Garut	1.141.265.938.000	1.141.265.938.000	117.350.100.000	117.350.100.000
171	Kab. Indramayu	822.082.501.000	822.082.501.000	78.243.700.000	78.243.700.000
172	Kab. Karawang	374.032.253.000	374.032.253.000	81.771.000.000	81.771.000.000
173	Kab. Kuningan	722.472.887.000	722.472.887.000	69.431.200.000	69.431.200.000
174	Kab. Majalengka	770.740.075.000	770.740.075.000	88.854.700.000	88.854.700.000
175	Kab. Purwakarta	577.517.234.000	577.517.234.000	10.008.000.000	10.008.000.000
176	Kab. Subang	746.157.315.000	746.157.315.000	52.450.400.000	52.450.400.000
177	Kab. Sukabumi	879.025.825.000	879.025.825.000	115.487.000.000	115.487.000.000
178	Kab. Sumedang	721.147.647.000	721.147.647.000	72.084.200.000	72.084.200.000
179	Kab. Tasikmalaya	801.879.893.000	801.879.893.000	78.050.300.000	78.050.300.000
180	Kab. Bandung Barat	662.914.828.000	662.914.828.000	62.614.000.000	62.614.000.000
181	Kota Bandung	1.305.982.541.000	1.305.982.541.000	59.077.200.000	59.077.200.000
182	Kota Bekasi	757.182.222.000	757.182.222.000	52.128.000.000	52.128.000.000
183	Kota Bogor	473.156.903.000	473.156.903.000	11.336.300.000	11.336.300.000
184	Kota Cimahi	472.007.037.000	472.007.037.000	4.871.000.000	4.871.000.000
185	Kota Cirebon	554.100.270.000	554.100.270.000	13.860.200.000	13.860.200.000
186	Kota Sukabumi	330.018.367.000	330.018.367.000	13.645.100.000	13.645.100.000
187	Kota Tasikmalaya	354.977.241.000	354.977.241.000	1.938.000.000	1.938.000.000
188	Kota Tasikmalaya	476.026.663.000	476.026.663.000	37.502.800.000	37.502.800.000
189	Kota Banjar	236.020.004.000	236.020.004.000	20.656.000.000	20.656.000.000
190	Provinsi Banten	480.383.683.000	480.383.683.000	45.179.800.000	45.179.800.000
191	Kab. Laba	661.438.028.000	661.438.028.000	71.147.300.000	71.147.300.000
192	Kab. Pandeglang	724.354.772.000	724.354.772.000	91.789.500.000	91.789.500.000

JAH14-LRA-203

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FISKAL TAHUN 2011 (LAKSANA)

DAFTAR LAMBEK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
132	Kab. Serang	826.724.102.000	826.724.102.000	84.533.900.000	84.582.300.000
134	Kab. Tangerang	720.007.063.000	720.607.063.000	63.669.100.000	61.524.350.000
135	Kota Tangerang	375.582.908.000	375.582.908.000	3.964.200.000	3.964.400.000
136	Kota Tangerang Selatan	554.937.553.000	554.937.553.000	11.818.100.000	11.810.100.000
137	Kota Serang	365.036.818.000	365.036.818.000	47.241.100.000	47.241.100.000
138	Kota Tangerang Selatan	475.345.958.000	475.345.958.000	57.938.000.000	57.980.000.000
139	Provinsi Jawa Tengah	1.278.180.223.000	1.278.180.223.000	51.789.800.000	51.789.800.000
200	Kab. Banjarnegara	562.684.578.000	562.684.578.000	65.768.000.000	65.768.000.000
201	Kab. Banyuwangi	855.897.523.000	855.897.523.000	83.807.900.000	83.807.600.000
202	Kab. Batang	772.338.223.000	772.338.223.000	57.230.500.000	57.230.500.000
203	Kab. Blora	547.437.870.000	547.437.870.000	77.143.000.000	77.114.800.000
204	Kab. Boyolali	641.787.653.000	641.787.653.000	67.173.500.000	67.173.500.000
205	Kab. Brebes	300.577.669.000	300.577.669.000	65.338.500.000	65.338.500.000
206	Kab. Cilacap	877.475.472.000	877.475.472.000	102.822.500.000	102.822.500.000
207	Kab. Demas	544.790.034.000	544.790.034.000	67.834.200.000	67.864.200.000
208	Kab. Garut	682.380.053.000	682.380.053.000	78.230.000.000	78.280.000.000
209	Kab. Jepara	582.496.113.000	582.496.113.000	71.708.000.000	71.708.000.000
210	Kab. Karanganyar	577.800.067.000	577.800.067.000	53.568.000.000	53.136.000.000
211	Kab. Kebumeh	752.339.067.000	752.339.067.000	79.138.000.000	79.186.000.000
212	Kab. Kendal	566.305.365.000	566.305.365.000	67.337.800.000	67.357.800.000
213	Kab. Klatsar	793.538.625.000	793.538.625.000	80.957.300.000	80.664.300.000
214	Kab. Kudus	485.096.653.000	485.096.653.000	38.321.200.000	38.321.200.000
215	Kab. Majalengka	605.559.339.000	605.559.339.000	73.335.300.000	73.355.300.000
216	Kab. Pati	692.522.880.000	692.522.880.000	65.388.800.000	65.338.800.000
217	Kab. Pekalongan	552.849.031.000	552.849.031.000	60.713.000.000	60.713.000.000
218	Kab. Pemalang	672.815.577.000	672.815.577.000	67.457.500.000	67.464.500.000
219	Kab. Purbanegara	522.204.239.000	522.204.239.000	67.544.100.000	67.544.100.000
220	Kab. Purworejo	585.119.442.000	585.119.442.000	60.956.000.000	60.956.000.000
221	Kab. Pemalang	488.937.872.000	488.937.872.000	62.341.000.000	62.341.000.000
222	Kab. Semarang	568.130.051.000	568.130.051.000	89.014.500.000	89.014.500.000
223	Kab. Sragen	618.724.280.000	618.724.280.000	71.627.300.000	71.624.300.000
224	Kab. Sukoharjo	565.137.680.000	565.137.680.000	49.172.000.000	49.172.000.000
225	Kab. Tegal	704.172.500.000	704.172.500.000	81.323.000.000	81.335.000.000
226	Kab. Tembung	483.203.962.000	483.203.962.000	57.046.800.000	57.046.800.000
227	Kab. Wonorejo	602.359.252.000	602.359.252.000	77.852.700.000	77.852.700.000
228	Kab. Wonorejo	486.041.113.000	486.041.113.000	62.258.200.000	62.258.200.000
229	Kota Magelang	292.750.563.000	292.750.563.000	24.849.100.000	24.849.100.000
230	Kota Pasuruan	282.728.844.000	282.728.844.000	24.675.500.000	24.675.500.000
231	Kota Ponorogo	262.810.261.000	262.810.261.000	20.541.200.000	20.541.200.000
232	Kota Surabaya	715.958.887.000	715.958.887.000	48.401.500.000	48.401.500.000
233	Kota Sukoharjo	474.030.648.000	474.030.648.000	24.855.500.000	24.849.500.000
234	Kota Tagal	265.377.464.000	265.377.464.000	23.569.100.000	23.569.100.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	870.812.378.000	870.812.378.000	19.489.800.000	19.489.800.000
236	Kab. Bantul	625.052.065.000	625.052.065.000	45.935.700.000	45.925.700.000
237	Kab. Gunungkidul	572.300.004.000	572.300.004.000	55.158.700.000	55.168.700.000
238	Kab. Kulon Progo	444.247.738.000	444.247.738.000	43.343.900.000	43.343.900.000
239	Kab. Sleman	633.130.563.000	633.130.563.000	72.620.500.000	72.650.500.000
240	Kota Yogyakarta	426.338.833.000	426.338.833.000	1.752.100.000	1.762.100.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (Lanjutan)

DAFTAR LAMBEK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
241	Provinsi Jawa Timur	1.347.601.888.000	1.347.601.888.000	66.031.200.000	66.031.200.000
242	Kab. Bengkulu	565.076.782.000	565.076.782.000	83.309.300.000	83.309.300.000
243	Kab. Bengkulu Tengah	375.562.045.000	375.562.045.000	81.931.200.000	81.931.200.000
244	Kab. Bener Meriah	888.037.053.000	888.037.053.000	89.864.500.000	89.864.500.000
245	Kab. Bener Meriah	665.339.925.000	665.339.925.000	67.937.100.000	67.937.100.000
246	Kab. Bener Meriah	540.234.125.000	540.234.125.000	88.948.700.000	88.948.700.000
247	Kab. Gresik	561.337.041.000	561.337.041.000	76.338.800.000	76.338.800.000
248	Kab. Jember	1.298.232.324.000	1.298.232.324.000	99.610.000.000	99.610.000.000
249	Kab. Jember	864.828.242.000	864.828.242.000	43.082.300.000	43.082.300.000
250	Kab. Kediri	790.529.257.000	790.529.257.000	77.453.200.000	77.453.200.000
251	Kab. Lamongan	800.131.048.000	800.131.048.000	88.238.100.000	88.238.100.000
252	Kab. Lumajang	608.140.873.000	608.140.873.000	65.231.200.000	65.231.200.000
253	Kab. Madun	523.294.108.000	523.294.108.000	53.130.800.000	53.130.800.000
254	Kab. Magelang	540.588.882.000	540.588.882.000	58.638.900.000	58.638.900.000
255	Kab. Magelang	1.245.367.624.000	1.245.367.624.000	108.465.000.000	108.465.000.000
256	Kab. Magelang	598.977.083.000	598.977.083.000	57.904.900.000	57.904.900.000
257	Kab. Magelang	665.916.858.000	665.916.858.000	61.747.700.000	61.747.700.000
258	Kab. Majene	654.720.280.000	654.720.280.000	69.770.200.000	69.770.200.000
259	Kab. Mandar	400.825.505.000	400.825.505.000	54.072.200.000	54.072.200.000
260	Kab. Mangrove	570.349.051.000	570.349.051.000	65.844.700.000	65.844.700.000
261	Kab. Maros	774.530.808.000	774.530.808.000	75.436.300.000	75.436.300.000
262	Kab. Maros	634.712.282.000	634.712.282.000	74.787.700.000	74.787.700.000
263	Kab. Mataram	635.230.544.000	635.230.544.000	75.632.000.000	75.632.000.000
264	Kab. Mataram	498.782.274.000	498.782.274.000	63.845.300.000	63.845.300.000
265	Kab. Mataram	785.043.820.000	785.043.820.000	59.774.800.000	59.774.800.000
266	Kab. Mataram	576.074.782.000	576.074.782.000	60.953.300.000	60.953.300.000
267	Kab. Mataram	664.759.775.000	664.759.775.000	67.734.500.000	67.734.500.000
268	Kab. Mataram	525.332.337.000	525.332.337.000	61.777.800.000	61.777.800.000
269	Kab. Mataram	606.247.945.000	606.247.945.000	66.440.200.000	66.440.200.000
270	Kab. Mataram	724.035.454.000	724.035.454.000	60.751.200.000	60.751.200.000
271	Kota Mataram	250.235.751.000	250.235.751.000	23.442.000.000	23.442.000.000
272	Kota Mataram	385.397.680.000	385.397.680.000	4.525.800.000	4.525.800.000
273	Kota Mataram	287.285.915.000	287.285.915.000	24.071.300.000	24.071.300.000
274	Kota Mataram	523.832.725.000	523.832.725.000	15.578.000.000	15.578.000.000
275	Kota Mataram	265.354.548.000	265.354.548.000	20.862.000.000	20.862.000.000
276	Kota Mataram	264.117.770.000	264.117.770.000	15.245.200.000	15.245.200.000
277	Kota Mataram	371.527.089.000	371.527.089.000	22.575.200.000	22.575.200.000
278	Kota Mataram	875.450.727.000	875.450.727.000	88.459.500.000	88.459.500.000
279	Kota Mataram	273.388.209.000	273.388.209.000	17.864.300.000	17.864.300.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	845.483.888.000	845.483.888.000	38.389.600.000	38.389.600.000
281	Kab. Bengkalis	340.823.812.000	340.823.812.000	59.129.800.000	59.129.800.000
282	Kab. Bengkalis	703.595.624.000	703.595.624.000	61.850.500.000	61.850.500.000
283	Kab. Bengkalis	602.042.718.000	602.042.718.000	99.738.400.000	99.738.400.000
284	Kab. Bengkalis	671.278.725.000	671.278.725.000	75.127.200.000	75.127.200.000
285	Kab. Bengkalis	340.258.817.000	340.258.817.000	60.887.500.000	60.887.500.000
286	Kab. Bengkalis	520.019.668.000	520.019.668.000	95.541.200.000	95.541.200.000
287	Kab. Bengkalis	503.566.510.000	503.566.510.000	79.127.800.000	79.127.800.000
288	Kab. Bengkalis	453.392.817.000	453.392.817.000	77.616.800.000	77.616.800.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FISKAL TAHUN 2011 (ASAS RENCANA)

DAFTAR LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
288	Kota Pekanbaru	454.002.213,000	454.002.213,000	34.139.300,000	34.188.300,000
289	Kota Pekanbaru	306.338.263,000	306.338.263,000	36.163.000,000	36.132.000,000
291	Kab. Pangkajene Ardra	254.802.207,000	254.802.207,000	51.222,000,000	51.222,000,000
292	Kab. Pangkajene Ardra	466.680.663,000	466.680.663,000	88.598.400,000	88.598.400,000
293	Kab. Sekeloa	286.352.775,000	286.352.775,000	41.251,000,000	41.261,000,000
294	Kab. Merangin	322.100,019,000	322.100,019,000	49.819,200,000	49.912,200,000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	795.818.335,000	795.818.335,000	51.915,000,000	51.915,000,000
296	Kab. Beraut	385.876,629,000	385.876,629,000	42,280,900,000	42.122,575,000
297	Kab. Beraut	366.138,068,000	366.138,068,000	35.810,400,000	35.810,400,000
298	Kab. Kapuas	673,018,652,000	673,018,652,000	63,347,700,000	63.347,700,000
299	Kab. Kotawaringin Barat	424.143,849,000	424.143,849,000	27.102,200,000	27.102,200,000
300	Kab. Kotawaringin Timur	532,322,153,000	532,322,153,000	45.672,400,000	45.672,400,000
301	Kota Pangkajene Ardra	386.322,889,000	386.322,889,000	39.138,300,000	39.138,300,000
302	Kab. Pangkajene Ardra	310.788,577,000	310.788,577,000	44.758,700,000	44.758,700,000
303	Kab. Muarajaya	442.515,042,000	442.515,042,000	14,569,900,000	14.569,900,000
304	Kab. Pangkajene Ardra	352.419,142,000	352.419,142,000	52.100,000,000	52.100,000,000
305	Kab. Pangkajene Ardra	366.320,651,000	366.320,651,000	38.678,300,000	38.678,300,000
306	Kab. Lamanda	286,233,363,000	286,233,363,000	40,877,300,000	40,877,300,000
307	Kab. Sekeloa	783,491,180,000	783,491,180,000	38.931,600,000	38,931,600,000
308	Kab. Sekeloa	445.162,914,000	445.162,914,000	23,415,100,000	23,415,100,000
309	Kab. Sekeloa	402,457,243,000	402,457,243,000	35,513,000,000	35.513,000,000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	504.878.152,000	504.878.152,000	37.748,400,000	37.748,400,000
311	Kab. Banjar	425.361,238,000	425.361,238,000	40.135,300,000	40.135,300,000
312	Kab. Banjar	361,562,283,000	361,562,283,000	43.788,800,000	43.788,800,000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	324,451,413,000	324,451,413,000	36,846,000,000	36,846,000,000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	322,575,838,000	322,575,838,000	35,885,500,000	35,885,500,000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	284,012,088,000	284,012,088,000	43,751,300,000	43,751,300,000
316	Kab. Kotabaru	424,735,432,000	424,735,432,000	25,057,800,000	25,057,800,000
317	Kab. Tabalong	261.785,235,000	261.785,235,000	17,354,200,000	17,354,200,000
318	Kab. Tanah Laut	327,811,689,000	327,811,689,000	15,451,300,000	15,451,300,000
319	Kab. Tapin	284,509,388,000	284,509,388,000	31,810,200,000	31,810,200,000
320	Kota Banjarbaru	242.193,675,000	242.193,675,000	25,384,300,000	25,384,300,000
321	Kota Banjarbaru	444.335,657,000	444.335,657,000	11.852,700,000	11.852,700,000
322	Kab. Belitung	177,244,648,000	177,244,648,000	2.102,000,000	2.036,450,000
323	Kab. Tanah Laut	783,283,563,000	783,283,563,000	17.787,100,000	17.787,100,000
324	Provinsi Kalimantan Timur	51.448.845,000	51.448.845,000	38.188,100,000	38.188,100,000
325	Kab. Beraut	346.428,844,000	346.428,844,000	9,899,200,000	9,899,200,000
326	Kab. Beraut	345,388,161,000	345,388,161,000	8.787,000,000	8.787,000,000
327	Kab. Kota Bontol	1,066,820,000	1,066,820,000	53,235,300,000	53,235,300,000
328	Kab. Kota Bontol	457,634,645,000	457,634,645,000	48,258,600,000	48,258,600,000
329	Kab. Kota Bontol	311,436,164,000	311,436,164,000	13,971,900,000	13,971,900,000
330	Kab. Mainan	516,080,363,000	516,080,363,000	40,760,000,000	40,760,000,000
331	Kab. Mainan	728,331,761,000	728,331,761,000	33,738,700,000	33,738,700,000
332	Kab. Pasir	206.234,262,000	206.234,262,000	3,638,300,000	3.638,300,000
333	Kota Balikpapan	268.229,227,000	268.229,227,000	1,038,500,000	1,038,500,000
334	Kota Balikpapan	83,904,543,000	83,904,543,000	4.820,000,000	4,820,000,000
335	Kab. Tana Tidjung	146.538,558,000	146.538,558,000	3,835,000,000	3.835,000,000
336	Kota Samarinda	387,782,857,000	387,782,857,000		

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FISKAL TAHUN 2011 (Lanjutan)

DAFTAR LAMBEK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
327	Kota Tarakan	160.480.848.000	160.438.848.000		
328	Kab. Paser Utara	116.428.267.000	116.423.267.000	7.933.300.000	7.952.300.000
329	Provinsi Sulawesi Utara	618.711.007.000	618.711.007.000	28.288.200.000	28.288.200.000
330	Kab. Davao Oriental	390.510.271.000	390.510.271.000	52.880.700.000	52.880.700.000
331	Kab. Misamis	109.491.075.000	109.491.075.000	93.611.800.000	93.611.800.000
332	Kab. Sangay	322.070.577.000	322.070.577.000	83.211.800.000	83.211.800.000
333	Kota Erang	304.372.464.000	304.372.464.000	27.999.800.000	27.999.800.000
334	Kota Manado	482.454.731.000	482.454.731.000	42.948.800.000	42.948.800.000
335	Kab. Kepulauan Talaud	278.873.014.000	278.873.014.000	45.930.300.000	45.930.300.000
336	Kab. Misamis Selatan	321.072.211.000	321.072.211.000	73.240.500.000	73.240.500.000
337	Kab. Misamis Oriental	254.095.688.000	254.095.688.000	44.055.400.000	44.055.400.000
338	Kab. Kepulauan Sulu Tadjuraud	256.257.512.000	256.257.512.000	46.519.800.000	46.519.800.000
339	Kota Zamboanga	223.190.059.000	223.190.059.000	27.614.400.000	27.614.400.000
340	Kab. Davao Oriental	102.378.443.000	102.378.443.000	58.185.200.000	58.185.200.000
341	Kab. Bulacan	195.303.759.000	195.303.759.000	54.368.300.000	54.368.300.000
342	Kota Zamboanga	24.739.833.000	24.739.833.000	34.559.700.000	34.559.700.000
343	Kab. Misamis Oriental	307.578.483.000	307.578.483.000	47.728.300.000	47.728.300.000
344	Kab. Bulacan	226.324.673.000	226.324.673.000	75.430.300.000	75.430.300.000
345	Provinsi Gorontalo	481.118.102.000	481.118.102.000	78.057.700.000	78.057.700.000
346	Kab. Gorontalo	250.437.090.000	250.437.090.000	46.054.900.000	46.054.900.000
347	Kab. Gorontalo	382.578.841.000	382.578.841.000	60.782.000.000	60.782.000.000
348	Kota Manado	296.333.485.000	296.333.485.000	28.678.300.000	28.678.300.000
349	Kab. Gorontalo	280.367.211.000	280.367.211.000	77.367.100.000	77.367.100.000
350	Kab. Gorontalo Utara	270.507.872.000	270.507.872.000	43.211.800.000	43.211.800.000
351	Kab. Bone	267.849.954.000	267.849.954.000	27.061.300.000	27.061.300.000
352	Provinsi Sulawesi Tengah	743.161.759.000	743.161.759.000	38.179.100.000	38.179.100.000
353	Kab. Donggala	504.385.617.000	504.385.617.000	64.255.200.000	64.255.200.000
354	Kab. Banggai Kepulauan	323.060.075.000	323.060.075.000	73.555.300.000	73.555.300.000
355	Kab. Buana	320.192.207.000	320.192.207.000	45.620.500.000	45.620.500.000
356	Kab. Toli Toli	352.284.608.000	352.284.608.000	47.518.400.000	47.518.400.000
357	Kab. Donggala	392.426.232.000	392.426.232.000	65.306.300.000	65.306.300.000
358	Kab. Morowali	428.529.750.000	428.529.750.000	48.964.000.000	48.964.000.000
359	Kota Pasa	434.150.782.000	434.150.782.000	57.450.800.000	57.450.800.000
360	Kota Pasa	422.397.767.000	422.397.767.000	39.201.900.000	39.201.900.000
361	Kab. Pangi	447.807.500.000	447.807.500.000	70.237.900.000	70.237.900.000
362	Kab. Pangi	383.717.753.000	383.717.753.000	53.830.300.000	53.830.300.000
363	Kab. Luwu Utara	370.935.670.000	370.935.670.000	55.097.200.000	55.097.200.000
364	Provinsi Sulawesi Selatan	818.757.989.000	818.757.989.000	41.888.000.000	41.888.000.000
365	Kab. Bontone	263.320.424.000	263.320.424.000	33.901.900.000	33.901.900.000
366	Kab. Bantaeng	295.397.521.000	295.397.521.000	38.887.000.000	38.887.000.000
367	Kab. Bantaeng	622.474.218.000	622.474.218.000	88.360.000.000	88.360.000.000
368	Kab. Bantul	721.378.895.000	721.378.895.000	63.052.800.000	63.052.800.000
369	Kab. Bantul	302.527.273.000	302.527.273.000	42.179.400.000	42.179.400.000
370	Kab. Gowa	470.823.554.000	470.823.554.000	51.230.300.000	51.230.300.000
371	Kab. Jeneponto	355.798.283.000	355.798.283.000	57.859.300.000	57.859.300.000
372	Kab. Luwu	396.997.261.000	396.997.261.000	57.320.300.000	57.320.300.000
373	Kab. Luwu Utara	377.853.264.000	377.853.264.000	55.722.200.000	55.722.200.000
374	Kab. Makassar	338.303.014.000	338.303.014.000	49.836.900.000	49.836.900.000

JAH14-LRA 2011

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FISKAL TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR LAMBEK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
335	Kab. Pangkajene-Andalena	305.732.042.000	305.433.049.000	57.821.320.000	57.821.300.000
336	Kab. Pinrang	420.139.733.000	420.189.733.000	51.463.100.000	51.732.100.000
337	Kab. Selayar	304.337.578.000	304.387.578.000	46.784.100.000	46.784.100.000
338	Kab. Sidenreng Rappang	365.825.521.000	365.825.521.000	48.058.600.000	48.058.600.000
339	Kab. Sinjai	345.793.215.000	345.793.215.000	51.552.000.000	51.552.000.000
340	Kab. Soppeng	340.042.287.000	340.042.287.000	40.758.100.000	40.758.100.000
341	Kab. Takalar	324.734.972.000	324.734.972.000	43.636.000.000	43.636.000.000
342	Kab. Tana Toraja	323.960.734.000	323.960.734.000	58.028.500.000	58.028.500.000
343	Kab. Wajo	413.888.242.000	413.888.242.000	63.257.200.000	63.257.200.000
344	Kota Palopo	276.366.812.000	276.366.812.000	29.405.800.000	29.405.800.000
345	Kab. Tana Ujung	207.449.219.000	207.449.219.000	85.048.500.000	85.048.500.000
346	Kota Makassar	718.799.524.000	718.799.524.000	60.858.100.000	60.858.100.000
347	Kota Parepare	288.098.718.000	288.098.718.000	23.780.000.000	23.780.000.000
348	Kab. Tana Toraja	283.360.823.000	283.360.823.000	41.521.900.000	41.521.900.000
349	Provinsi Sulawesi Barat	441.578.798.000	441.578.798.000	35.960.700.000	35.960.700.000
400	Kab. Majene	300.871.441.000	300.871.441.000	47.822.900.000	47.822.900.000
401	Kab. Mamuju	422.352.567.000	422.352.567.000	76.023.700.000	76.023.700.000
402	Kab. Polewali Mandar	700.536.754.000	700.536.754.000	50.730.000.000	50.730.000.000
403	Kab. Mamuju Utara	290.185.285.000	290.185.285.000	52.590.700.000	52.590.700.000
404	Kab. Mamuju Utara	227.777.700.000	227.777.700.000	34.761.300.000	34.761.300.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	700.836.557.000	700.836.557.000	83.804.600.000	83.804.600.000
406	Kab. Buana	382.426.701.000	382.426.701.000	47.622.800.000	47.622.800.000
407	Kab. Konawe	473.778.515.000	473.778.515.000	55.752.000.000	55.752.000.000
408	Kab. Kolaka	440.334.708.000	440.334.708.000	33.258.000.000	33.258.000.000
409	Kab. Muna	425.343.351.000	425.343.351.000	65.735.000.000	65.735.000.000
410	Kota Makassar	398.702.727.000	398.702.727.000	31.327.600.000	31.327.600.000
411	Kota Bau-Bau	377.820.077.000	377.820.077.000	24.674.800.000	24.674.800.000
412	Kab. Konawe Selatan	362.334.553.000	362.334.553.000	57.365.300.000	57.365.300.000
413	Kab. Bombana	282.286.285.000	282.286.285.000	41.746.200.000	41.746.200.000
414	Kab. Konawe Utara	208.532.449.000	208.532.449.000	47.050.500.000	47.050.500.000
415	Kab. Butta Butta	250.434.842.000	250.434.842.000	41.521.000.000	41.521.000.000
416	Kab. Wakatobi	252.080.407.000	252.080.407.000	30.750.500.000	30.750.500.000
417	Kab. Kolaka Utara	222.275.703.000	222.275.703.000	35.729.200.000	35.729.200.000
418	Provinsi Bali	560.673.538.000	560.673.538.000	21.221.700.000	15.916.275.000
419	Kab. Badung	157.052.573.000	157.052.573.000	250.800.000	210.178.000
420	Kab. Bangli	321.578.751.000	321.578.751.000	29.332.400.000	29.332.400.000
421	Kab. Buleleng	588.436.927.000	588.436.927.000	54.728.700.000	54.728.700.000
422	Kab. Gianyar	455.103.918.000	455.103.918.000	41.078.300.000	41.078.300.000
423	Kab. Jembrana	338.727.765.000	338.727.765.000	35.484.800.000	35.484.800.000
424	Kab. Karangasem	470.037.798.000	470.037.798.000	41.734.700.000	41.734.700.000
425	Kab. Klungkung	315.814.053.000	315.814.053.000	29.868.200.000	29.416.150.000
426	Kab. Tabanan	763.234.443.000	763.234.443.000	71.527.200.000	71.527.200.000
427	Kota Denpasar	381.538.052.000	381.538.052.000	3.558.900.000	3.558.900.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	648.671.083.000	648.671.083.000	45.964.400.000	45.964.400.000
429	Kab. Bima	575.830.728.000	575.830.728.000	57.220.000.000	57.220.000.000
430	Kab. Dompu	340.357.265.000	340.357.265.000	42.456.800.000	42.456.800.000
431	Kab. Lombok Barat	768.534.063.000	768.534.063.000	53.256.300.000	53.256.300.000
432	Kab. Lombok Tengah	682.768.958.000	682.768.958.000	57.211.500.000	57.211.500.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FISKAL TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR LAMBEK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
438	Kab. Lampung Timur	89.748.073,000	89.748.073,000	89.351.320,000	88.957.800,000
439	Kab. Sumatera	496.158.922,000	493.153.922,000	53.735.000,000	56.735.600,000
440	Kota Marau	367.095.272,000	367.095.272,000	25.487.000,000	25.487.000,000
441	Kab. Lampung Utara	248.572.287,000	243.572.287,000	35.120.000,000	35.120.000,000
442	Kota Bima	268.007.555,000	268.007.555,000	23.036.500,000	23.036.500,000
443	Kab. Sumatra Barat	274.927.257,000	274.927.257,000	25.743.320,000	25.142.800,000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	752.057.444,000	752.057.444,000	47.389.400,000	47.389.400,000
444	Kab. Alor	380.447.237,000	380.447.237,000	50.351.320,000	50.351.320,000
445	Kab. Belu	427.871.241,000	427.871.241,000	83.134.400,000	83.134.400,000
446	Kab. Ende	376.137.455,000	375.131.455,000	57.646.720,000	57.646.720,000
447	Kab. Flores Timur	372.358.575,000	372.358.575,000	49.808.320,000	48.820.800,000
448	Kab. Kupang	407.338.523,000	407.338.523,000	66.211.720,000	66.211.720,000
449	Kab. Lembata	263.383.845,000	263.383.845,000	45.873.320,000	45.873.320,000
450	Kab. Manggarai	378.378.823,000	378.378.823,000	81.122.000,000	81.122.000,000
451	Kab. Niasda	287.115.920,000	287.115.920,000	42.245.800,000	42.245.800,000
452	Kab. Sikka	382.434.730,000	382.434.730,000	47.417.000,000	47.417.000,000
453	Kab. Sumba Barat	736.492.829,000	736.492.829,000	44.171.720,000	44.171.720,000
454	Kab. Sumba Timur	385.898.300,000	385.898.300,000	73.338.120,000	46.358.100,000
455	Kab. Timor Tengah Selatan	455.454.583,000	455.454.583,000	78.582.400,000	78.582.400,000
456	Kab. Timor Tengah Utara	334.408.729,000	334.408.729,000	60.538.800,000	60.538.800,000
457	Kota Kupang	377.752.553,000	377.752.553,000	70.732.000,000	40.732.800,000
458	Kab. Rote Ndao	738.407.480,000	738.407.480,000	34.115.200,000	34.115.200,000
459	Kab. Malaka	251.101.757,000	251.101.757,000	50.740.120,000	50.740.120,000
460	Kab. Sumba Tengah	207.842.741,000	207.842.741,000	51.455.320,000	51.455.320,000
461	Kab. Sumba Barat Daya	277.318.203,000	277.318.203,000	54.932.300,000	54.932.300,000
462	Kab. Manggarai Timur	285.150.551,000	285.150.551,000	62.128.500,000	62.128.500,000
463	Kab. Sabu Naja	185.817.747,000	185.817.747,000	54.207.400,000	54.207.400,000
464	Kab. Manggarai Barat	287.003.657,000	287.003.657,000	47.830.500,000	47.830.500,000
465	Provinsi Maluku	703.993.953,000	703.993.953,000	44.657.700,000	44.657.700,000
466	Kab. Maluku Tenggara Barat	378.328.722,000	378.328.722,000	50.791.000,000	50.791.000,000
467	Kab. Maluku Tengah	546.558.283,000	546.558.283,000	53.850.000,000	53.850.000,000
468	Kab. Maluku Tenggara	254.149.048,000	254.149.048,000	43.042.320,000	43.042.320,000
469	Kab. Pulau Burai	774.987.724,000	774.987.724,000	55.138.800,000	55.138.800,000
470	Kota Ambon	471.395.704,000	471.395.704,000	36.720.500,000	36.720.500,000
471	Kab. Seram Bagian Barat	323.227.002,000	323.227.002,000	43.232.000,000	43.232.000,000
472	Kab. Seram Bagian Timur	762.858.512,000	762.858.512,000	44.438.200,000	44.438.200,000
473	Kab. Maluku Utara, Jaya	302.514.889,000	302.514.889,000	47.874.500,000	35.750.525,000
474	Kab. Buru Selatan	222.107.223,000	222.107.223,000	43.774.720,000	43.774.720,000
475	Kab. Kepulauan Aru	302.907.385,000	302.907.385,000	35.667.500,000	26.768.525,000
476	Kota Tulae	180.858.800,000	180.858.800,000	53.858.200,000	53.858.200,000
477	Provinsi Maluku Utara	540.389.811,000	540.389.811,000	51.233.800,000	51.233.800,000
478	Kab. Halmahera Tengah	255.879.015,000	255.879.015,000	39.916.000,000	39.916.000,000
479	Kab. Halmahera Barat	783.223.030,000	783.223.030,000	45.810.200,000	45.810.200,000
480	Kota Ternate	374.020.637,000	374.020.637,000	23.522.800,000	23.522.800,000
481	Kab. Halmahera Timur	242.818.772,000	242.818.772,000	70.221.500,000	40.221.500,000
482	Kota Tondok Kepulauan	373.516.321,000	373.516.321,000	40.757.000,000	40.757.000,000
483	Kab. Kepulauan Sula	296.452.813,000	296.452.813,000	57.930.720,000	54.960.400,000
484	Kab. Pulau Morotai	203.946.615,000	203.946.615,000	53.034.120,000	53.034.120,000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (KONTINJENSI)

DAFTAR LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
401	Kab. Halmahera Selatan	364.182.238.000	364.133.238.000	50.523.300.000	50.523.300.000
402	Kab. Halmahera Utara	290.478.860.000	290.473.860.000	51.752.000.000	51.752.000.000
403	Kab. Talo	288.082.285.000	288.082.285.000	126.788.900.000	126.788.900.000
404	Kab. Tanimbar Jaya	373.384.668.000	373.384.668.000	108.575.500.000	108.575.500.000
405	Provinsi Papua	1.276.285.908.000	1.276.285.908.000	56.151.200.000	56.151.200.000
406	Kab. Ulu Murut	363.091.081.000	363.091.081.000	84.054.400.000	84.054.400.000
407	Kab. Jayapura	410.432.253.000	410.432.253.000	49.271.500.000	49.271.500.000
408	Kab. Jayawijaya	408.441.180.000	408.441.180.000	96.775.100.000	96.775.100.000
409	Kab. Merauke	754.629.889.000	754.629.889.000	102.758.300.000	102.758.300.000
410	Kab. Mimika	316.335.501.000	316.335.501.000	53.575.100.000	53.575.100.000
411	Kab. Naniwa	428.579.222.000	428.579.222.000	71.729.300.000	71.729.300.000
412	Kab. Paniai	384.779.124.000	384.779.124.000	89.280.000.000	89.280.000.000
413	Kab. Puncak Jaya	413.434.652.000	413.434.652.000	90.837.800.000	90.837.800.000
414	Kab. Kepulauan Yapen	304.615.581.000	304.615.581.000	61.029.200.000	61.029.200.000
415	Kota Jayapura	382.354.839.000	382.354.839.000	46.370.800.000	46.370.800.000
416	Kab. Sarmi	430.994.089.000	430.994.089.000	99.140.000.000	99.140.000.000
417	Kab. Seram	375.553.119.000	375.553.119.000	44.822.900.000	44.822.900.000
418	Kab. Yahukimo	426.267.102.000	426.267.102.000	66.188.000.000	66.188.000.000
419	Kab. Pegunungan Bintang	494.385.584.000	494.385.584.000	75.518.900.000	75.518.900.000
500	Kab. Tolitola	376.438.030.000	376.438.030.000	97.332.100.000	97.332.100.000
501	Kab. Boven Digoel	631.612.244.000	631.612.244.000	62.883.500.000	62.883.500.000
502	Kab. Masi	485.129.572.000	485.129.572.000	75.522.400.000	75.522.400.000
503	Kab. Asmat	585.993.333.000	585.993.333.000	62.047.800.000	62.047.800.000
504	Kab. Indera	316.515.827.000	316.515.827.000	45.827.200.000	45.827.200.000
505	Kab. Mamberamo Raya	436.951.462.000	436.951.462.000	52.612.800.000	52.612.800.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	291.037.175.000	291.037.175.000	83.022.800.000	83.022.800.000
507	Kab. Nduga	390.094.076.000	390.094.076.000	127.624.100.000	127.624.100.000
508	Kab. Degi	280.034.216.000	280.034.216.000	62.338.000.000	62.338.000.000
509	Kab. Intan Jaya	418.415.561.000	418.415.561.000	124.852.200.000	124.852.200.000
510	Kab. Puncak	460.452.735.000	460.452.735.000	109.067.100.000	109.067.100.000
511	Kab. Deiyai	323.332.648.000	323.332.648.000	62.131.800.000	62.131.800.000
512	Kab. Supit	275.855.252.000	275.855.252.000	41.752.100.000	41.752.100.000
513	Provinsi Papua Barat	700.444.910.000	700.444.910.000	40.538.900.000	40.538.900.000
514	Kab. Sorong	360.929.803.000	360.929.803.000	75.414.400.000	75.414.400.000
515	Kab. Manokwari	444.344.531.000	444.344.531.000	81.864.400.000	81.864.400.000
516	Kab. Paniai	404.103.567.000	404.103.567.000	55.316.500.000	55.316.500.000
517	Kota Sorong	268.180.059.000	268.180.059.000	44.889.000.000	44.889.000.000
518	Kab. Sumba Barat	755.257.482.000	755.257.482.000	55.122.900.000	55.122.900.000
519	Kab. Sumba Tengah	372.441.509.000	372.441.509.000	66.824.900.000	66.824.900.000
520	Kab. Timor Barat	381.734.852.000	381.734.852.000	44.881.500.000	44.881.500.000
521	Kab. Timor Tengah	770.181.869.000	770.181.869.000	57.843.400.000	57.843.400.000
522	Kab. Timor Tengah Selatan	223.338.735.000	223.338.735.000	61.752.200.000	61.752.200.000
523	Kab. Timor Tengah Utara	778.553.707.000	778.553.707.000	70.448.700.000	70.448.700.000
524	Kab. Timor Leste	392.038.119.000	392.038.119.000	39.938.000.000	39.938.000.000
525	Dana Cadangan				
	JUMLAH	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	25.222.800.900.000	24.803.509.995.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (Rp.000.000)

DAFTAR 8.F

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Page	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Provinsi Bangkore Aceh Darussalam	4.646.783.087.600	4.610.668.488.600	34.778.671.000	4.645.436.087.600
2	Kab. Aceh Besar	42.725.398.520	42.725.398.520		42.725.398.520
3	Kab. Aceh Besar	85.422.792.200	85.422.792.200		85.422.792.200
4	Kab. Aceh Selatan	50.900.917.520	50.900.917.520		50.900.917.520
5	Kab. Aceh Singkil	82.081.812.100	82.081.812.100		82.081.812.100
6	Kab. Aceh Tengah	100.301.597.320	100.301.597.320		100.301.597.320
7	Kab. Aceh Tenggara	100.854.852.080	100.854.852.080		100.854.852.080
8	Kab. Aceh Timur	82.186.282.160	82.186.282.160		82.186.282.160
9	Kab. Aceh Utara	127.422.884.360	127.422.884.360		127.422.884.360
11	Kab. Lhokseumawe	104.522.544.880	104.522.544.880		104.522.544.880
11	Kab. Pidie	133.351.082.280	133.351.082.280		133.351.082.280
12	Kab. Simelue	47.556.550.240	47.556.550.240		47.556.550.240
13	Kota Banda Aceh	128.887.704.700	128.887.704.700		128.887.704.700
14	Kota Bireueh	82.842.012.480	82.842.012.480		82.842.012.480
15	Kota Gaye Lues	71.622.022.880	71.622.022.880		71.622.022.880
1E	Kota Lhoksumawe	83.822.022.840	83.822.022.840		83.822.022.840
17	Kab. Nagan Raya	60.524.782.240	60.524.782.240		60.524.782.240
13	Kab. Aceh Jaya	58.182.501.360	58.182.501.360		58.182.501.360
13	Kab. Pidie Jaya	69.016.204.540	69.016.204.540		69.016.204.540
21	Kab. Aceh Barat Daya	40.922.522.540	40.922.522.540		40.922.522.540
21	Kab. Gaye Lues	83.722.254.880	83.722.254.880		83.722.254.880
21	Kab. Aceh Tenggara	70.882.742.280	70.882.742.280		70.882.742.280
23	Kab. Bener Meriah	60.911.282.600	60.911.282.600		60.911.282.600
27	Kota Subulussalam	58.882.882.240	58.882.882.240		58.882.882.240
25	Provinsi Sumatera Utara	3.577.572.000	0	-	0
26	Kab. Asahan	123.882.882.000	123.882.882.000		123.882.882.000
27	Kab. Dair	87.882.522.540	87.882.522.540		87.882.522.540
28	Kab. Deli Serdang	212.222.822.280	212.222.822.280		212.222.822.280
29	Kab. Langkat	72.822.122.160	72.822.122.160		72.822.122.160
31	Kab. Labuhan Batu	112.842.522.880	112.842.522.880		112.842.522.880
31	Kab. Langkat	144.222.222.140	144.222.222.140		144.222.222.140
32	Kab. Nias	64.122.362.320	64.122.362.320		64.122.362.320
33	Kab. Nias	58.222.222.280	58.222.222.280		58.222.222.280
34	Kab. Simalungun	152.222.462.600	152.222.462.600		152.222.462.600
36	Kab. Tapanuli Selatan	81.822.122.240	81.822.122.240		81.822.122.240
3E	Kab. Tapanuli Tengah	81.822.122.280	81.822.122.280		81.822.122.280
37	Kab. Tapanuli Utara	120.222.222.280	120.222.222.280		120.222.222.280
39	Kab. Toba Samosir	82.422.022.640	82.422.022.640		82.422.022.640
39	Kota Binjai	110.882.412.880	110.882.412.880		110.882.412.880
43	Kota Medan	339.102.422.540	339.102.422.540		339.102.422.540
41	Kota Tapanuli Selatan	80.822.422.520	80.822.422.520		80.822.422.520
42	Kota Sibolga	83.882.122.180	83.882.122.180		83.882.122.180
43	Kota Tanjung Pagar	83.122.822.240	83.122.822.240		83.122.822.240
47	Kab. Bat. Bar.	79.122.222.280	79.122.222.280		79.122.222.280
45	Kab. Labuhan Batu Utara	42.822.822.280	42.822.822.280		42.822.822.280
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	40.022.822.000	40.022.822.000		40.022.822.000

DAFTAR 8.F-1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERUBAHAN POKOK TAHUN 2011, 2012

DAFTAR 8.F

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Page	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
47	Kab. Padang Lawas Utara	37.089.967.440	0	37.089.967.440	37.089.967.440
48	Kab. Padang Lawas	43.508.271.720	0	43.508.271.720	43.508.271.720
49	Kab. Nias Utara	31.311.541.200	0	31.311.541.200	31.311.541.200
50	Kab. Nias Barat	20.525.064.700	0	20.525.064.700	20.525.064.700
51	Kota Tinggi	60.711.327.530	0	60.711.327.530	60.711.327.530
52	Kota Padang Sidempuan	77.971.925.700	0	77.971.925.700	77.971.925.700
53	Kab. Pangkal Bera	59.054.455.220	0	59.054.455.220	59.054.455.220
54	Kab. Nias Selatan	57.690.736.730	0	57.690.736.730	57.690.736.730
55	Kab. Humbang Hasundutan	51.814.458.320	0	51.814.458.320	51.814.458.320
56	Kab. Sintang	124.365.935.600	0	124.365.935.600	124.365.935.600
57	Kab. Sambas	40.357.237.080	0	40.357.237.080	40.357.237.080
58	Kota Tanjung	40.201.735.240	0	40.201.735.240	40.201.735.240
59	Provinsi Sumatera Barat	18.835.500.000	0	18.835.500.000	18.835.500.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	101.445.736.530	0	101.445.736.530	101.445.736.530
61	Kab. Asahan	125.404.675.730	0	125.404.675.730	125.404.675.730
62	Kab. Kepulauan Meranti	20.246.945.700	0	20.246.945.700	20.246.945.700
63	Kab. Padang Pariaman	144.793.311.240	0	144.793.311.240	144.793.311.240
64	Kab. Pasaman	109.904.013.500	0	109.904.013.500	109.904.013.500
65	Kab. Pesisir Selatan	113.595.775.240	0	113.595.775.240	113.595.775.240
66	Kab. Sijunjung	83.986.045.730	0	83.986.045.730	83.986.045.730
67	Kab. Solok	86.501.452.730	0	86.501.452.730	86.501.452.730
68	Kab. Tanah Datar	59.855.152.440	0	59.855.152.440	59.855.152.440
69	Kota Bukittinggi	29.581.525.880	0	29.581.525.880	29.581.525.880
70	Kota Padang Panjang	29.018.563.280	0	29.018.563.280	29.018.563.280
71	Kota Padang	178.008.844.180	0	178.008.844.180	178.008.844.180
72	Kota Payakumbuh	43.075.585.530	0	43.075.585.530	43.075.585.530
73	Kota Sawahlunto	67.245.165.600	0	67.245.165.600	67.245.165.600
74	Kota Sibolangga	49.708.415.830	0	49.708.415.830	49.708.415.830
75	Kota Tanah Bata	67.032.414.520	0	67.032.414.520	67.032.414.520
76	Kab. Pasaman Barat	60.581.595.720	0	60.581.595.720	60.581.595.720
77	Kab. Dharmasraya	78.723.815.760	0	78.723.815.760	78.723.815.760
78	Kab. Solok Selatan	63.105.267.100	0	63.105.267.100	63.105.267.100
79	Provinsi Riau	3.473.322.000	0	3.473.322.000	3.473.322.000
80	Kab. Bengkalis	53.000.085.100	0	53.000.085.100	53.000.085.100
81	Kab. Indragiri Hilir	52.817.542.160	0	52.817.542.160	52.817.542.160
82	Kab. Indragiri Utara	69.752.624.480	0	69.752.624.480	69.752.624.480
83	Kab. Kampar	124.524.525.120	0	124.524.525.120	124.524.525.120
84	Kab. Kuat Singing	63.011.090.760	0	63.011.090.760	63.011.090.760
85	Kab. Pelalawan	57.801.005.780	0	57.801.005.780	57.801.005.780
86	Kab. Rokan Hilir	61.652.313.100	0	61.652.313.100	61.652.313.100
87	Kab. Rokan Hulu	80.125.285.480	0	80.125.285.480	80.125.285.480
88	Kab. Siak	87.045.475.240	0	87.045.475.240	87.045.475.240
89	Kota Dumai	50.821.143.080	0	50.821.143.080	50.821.143.080
90	Kota Pekanbaru	160.352.735.880	0	160.352.735.880	160.352.735.880
91	Kab. Kepulauan Meranti	39.124.464.520	0	39.124.464.520	39.124.464.520
92	Provinsi Kepulauan Riau	9.073.500.000	0	9.073.500.000	9.073.500.000

DAFTAR 8.F-1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (Rp.000.000)

DAFTAR 8.F

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Page	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	B = 4 + 5
93	Kab. Liman	29.541.152.121	0	29.541.152.120	29.541.152.120
94	Kab. Nalun	17.589.932.600	0	17.589.932.600	17.589.932.600
95	Kab. Karimun	47.632.066.640	0	47.632.066.640	47.632.066.640
96	Kota Batam	79.399.034.010	0	79.399.034.010	79.399.034.010
97	Kab. Kepulauan Sumbawa	45.229.975.200	0	45.229.975.200	45.229.975.200
98	Kota Tanjung Pagar	35.314.242.700	0	35.314.242.700	35.314.242.700
99	Kab. Lingga	28.016.318.320	0	28.016.318.320	28.016.318.320
100	Provinsi Jambi	16.000.000.000	0	16.000.000.000	16.000.000.000
101	Kab. Darulighen	57.727.037.800	0	57.727.037.800	57.727.037.800
102	Kab. Langkat	70.986.949.250	0	70.986.949.250	70.986.949.250
103	Kab. Karo	80.151.735.160	0	80.151.735.160	80.151.735.160
104	Kab. Masing	72.762.637.560	0	72.762.637.560	72.762.637.560
105	Kab. Muaro Jambi	64.055.210.300	0	64.055.210.300	64.055.210.300
106	Kab. Sarolangun	60.967.125.520	0	60.967.125.520	60.967.125.520
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	47.256.835.600	0	47.256.835.600	47.256.835.600
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	59.071.225.160	0	59.071.225.160	59.071.225.160
109	Kab. Tebo	58.023.681.120	0	58.023.681.120	58.023.681.120
110	Kota Jambi	178.024.640.540	0	178.024.640.540	178.024.640.540
111	Kota Sungai Penuh	47.324.224.260	0	47.324.224.260	47.324.224.260
112	Provinsi Sumatera Selatan	38.472.173.000	0	38.472.173.000	38.472.173.000
113	Kab. Lahat	104.037.647.590	0	104.037.647.590	104.037.647.590
114	Kab. Musi Rawas	67.825.254.930	0	67.825.254.930	67.825.254.930
115	Kab. Musi Rawas	103.561.221.240	0	103.561.221.240	103.561.221.240
116	Kab. Muara Enim	178.926.362.660	0	178.926.362.660	178.926.362.660
117	Kab. Ogan Komering Ilir	140.124.144.200	0	140.124.144.200	140.124.144.200
118	Kab. Ogan Komering Lili	64.426.987.160	0	64.426.987.160	64.426.987.160
119	Kota Palembang	264.756.467.460	0	264.756.467.460	264.756.467.460
120	Kota Pagar Alam	59.614.725.460	0	59.614.725.460	59.614.725.460
121	Kota Lubang Buluh	64.318.982.340	0	64.318.982.340	64.318.982.340
122	Kota Palembang	27.026.710.480	0	27.026.710.480	27.026.710.480
123	Kab. Empat Lintang	41.926.630.960	0	41.926.630.960	41.926.630.960
124	Kab. Banyuwangi	102.219.662.600	0	102.219.662.600	102.219.662.600
125	Kab. Ogan Ilir	67.076.774.460	0	67.076.774.460	67.076.774.460
126	Kab. OK I Timur	120.456.764.260	0	120.456.764.260	120.456.764.260
127	Kab. OK I Selatan	64.741.144.660	0	64.741.144.660	64.741.144.660
128	Provinsi Bangka Belitung	33.778.671.000	0	33.778.671.000	33.778.671.000
129	Kab. Bangka	44.729.037.240	0	44.729.037.240	44.729.037.240
130	Kab. Belitung	32.926.804.120	0	32.926.804.120	32.926.804.120
131	Kota Pangkal Pinang	38.150.974.760	0	38.150.974.760	38.150.974.760
132	Kab. Bangka Selatan	28.003.510.500	0	28.003.510.500	28.003.510.500
133	Kab. Bangka Tengah	43.616.469.260	0	43.616.469.260	43.616.469.260
134	Kab. Bangka Utara	63.526.910.960	0	63.526.910.960	63.526.910.960
135	Kab. Belitung Timur	54.661.362.880	0	54.661.362.880	54.661.362.880
136	Provinsi Bengkulu	8.240.071.000	0	8.240.071.000	8.240.071.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	67.011.032.700	0	67.011.032.700	67.011.032.700
138	Kab. Bengkulu Utara	156.692.731.690	0	156.692.731.690	156.692.731.690

DAFTAR 8.F-1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

MAREK 11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
139	Kab. Pajang Lebong	87.932.714.130	C	87.932.714.130	87.932.714.130
140	Kota Bengkulu	88.902.042.210	C	88.902.042.210	88.902.042.210
141	Kab. Karir	41.303.433.080	C	41.303.433.080	41.303.433.080
142	Kab. Seluma	77.492.288.800	C	77.492.288.800	77.492.288.800
143	Kab. M. Comoko	52.152.488.440	C	52.152.488.440	52.152.488.440
144	Kab. Arang	73.744.842.100	C	73.744.842.100	73.744.842.100
145	Kab. Bengkulu Tengah	40.575.543.500	C	40.575.543.500	40.575.543.500
146	Kab. Kepahiang	71.721.798.885	C	71.721.798.885	71.721.798.885
147	Provinsi Lampung	43.200.000.000	D	43.200.000.000	43.200.000.000
148	Kab. Lampung Barat	115.778.018.950	C	115.778.018.950	115.778.018.950
149	Kab. Lampung Selatan	139.452.093.040	C	139.452.093.040	139.452.093.040
150	Kab. Lampung Tengah	215.952.245.440	C	215.952.245.440	215.952.245.440
151	Kab. Lampung Utara	139.575.073.020	C	139.575.073.020	139.575.073.020
152	Kab. Lampung Timur	184.481.120.750	C	184.481.120.750	184.481.120.750
153	Kab. Tanggamus	130.628.480.200	C	130.628.480.200	130.628.480.200
154	Kab. Tulang Bawang	86.753.644.790	C	86.753.644.790	86.753.644.790
155	Kab. Way Kanan	107.526.088.800	C	107.526.088.800	107.526.088.800
156	Kab. Takawa	109.653.784.990	C	109.653.784.990	109.653.784.990
157	Kab. Pringsewa	89.210.159.000	C	89.210.159.000	89.210.159.000
158	Kab. Muji	179.346.370.370	C	179.346.370.370	179.346.370.370
159	Kab. Tulang Bawang Barat	39.941.333.000	C	39.941.333.000	39.941.333.000
160	Kota Bandar Lampung	213.628.120.740	C	213.628.120.740	213.628.120.740
161	Kota Metro	96.358.173.000	C	96.358.173.000	96.358.173.000
162	Provinsi DKI Jakarta	1.313.264.447.360	D	1.313.264.447.360	1.313.264.447.360
163	Provinsi Jawa Barat	8.154.072.000	D	8.154.072.000	8.154.072.000
164	Kab. Bandung	445.455.210.440	C	445.455.210.440	445.455.210.440
165	Kab. Bekasi	276.626.563.690	C	276.626.563.690	276.626.563.690
166	Kab. Bogor	499.076.510.070	C	499.076.510.070	499.076.510.070
167	Kab. Ciamis	259.370.250.440	C	259.370.250.440	259.370.250.440
168	Kab. Cirebon	316.907.331.540	C	316.907.331.540	316.907.331.540
169	Kab. Cirebon	203.465.307.000	C	203.465.307.000	203.465.307.000
170	Kab. Cisarua	386.701.374.080	C	386.701.374.080	386.701.374.080
171	Kab. Cikarang	235.328.610.570	C	235.328.610.570	235.328.610.570
172	Kab. Karawang	231.555.109.140	C	231.555.109.140	231.555.109.140
173	Kab. Kuripan	212.322.243.080	C	212.322.243.080	212.322.243.080
174	Kab. Majalengka	184.278.051.130	C	184.278.051.130	184.278.051.130
175	Kab. Pangalene	148.811.523.950	C	148.811.523.950	148.811.523.950
176	Kab. Subang	202.945.117.330	C	202.945.117.330	202.945.117.330
177	Kab. Sukabumi	307.928.401.550	C	307.928.401.550	307.928.401.550
178	Kab. Sumedang	210.076.340.770	C	210.076.340.770	210.076.340.770
179	Kab. Tasikmalaya	258.978.513.150	C	258.978.513.150	258.978.513.150
180	Kab. Bandung Barat	207.271.613.280	C	207.271.613.280	207.271.613.280
181	Kota Bandung	337.755.454.960	C	337.755.454.960	337.755.454.960
182	Kota Bekasi	277.158.140.720	C	277.158.140.720	277.158.140.720
183	Kota Bogor	137.152.649.040	C	137.152.649.040	137.152.649.040
184	Kota Cirebon	80.442.792.030	C	80.442.792.030	80.442.792.030
185	Kota Depok	159.946.457.400	C	159.946.457.400	159.946.457.400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

RUMAH SAKIT

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
186	Kota Sukoharjo	62.833.339,640	C	62.833.339,340	32.833.366,640
187	Kota Cimahi	60.905.071,520	C	60.905.071,520	60.905.071,520
188	Kota Tasikmalaya	130.656.128,320	C	130.656.128,320	130.656.128,320
189	Kota Banjar	62.756.004,900	C	62.756.004,900	62.756.004,900
190	Provinsi Banten	4.956.000,000	D	4.956.000,000	4.956.000,000
191	Kab. Serang	240.952.242,720	C	240.952.242,720	240.952.242,720
192	Kab. Tangerang	245.368.090,200	C	245.368.090,200	245.368.090,200
193	Kab. Serang	189.076.520,120	C	189.076.520,120	189.076.520,120
194	Kab. Tangerang	289.251.655,500	C	289.251.655,500	289.251.655,500
195	Kota Cilegon	91.061.082,180	C	91.061.082,180	91.061.082,180
196	Kota Tangerang	236.368.452,500	C	236.368.452,500	236.368.452,500
197	Kota Serang	144.759.835,940	C	144.759.835,940	144.759.835,940
198	Kota Tangerang Selatan	149.045.673,740	C	149.045.673,740	149.045.673,740
199	Provinsi Jawa Tengah	32.064.260,000	D	32.064.260,000	32.064.260,000
200	Kab. Banjarnegara	179.171.633,520	C	179.171.633,520	179.171.633,520
201	Kab. Banyumas	267.637.888,300	C	267.637.888,300	267.637.888,300
202	Kab. Banjarnegara	136.711.714,330	C	136.711.714,880	136.711.714,880
203	Kab. Cilacap	156.756.485,080	C	156.756.485,080	156.756.485,080
204	Kab. Sukoharjo	174.722.743,794	C	174.722.743,794	174.722.743,794
205	Kab. Banjarnegara	224.473.888,300	C	224.473.888,300	224.473.888,300
206	Kab. Cilacap	269.364.100,240	C	269.364.100,240	269.364.100,240
207	Kab. Banjarnegara	180.722.037,540	C	180.722.037,540	180.722.037,540
208	Kab. Purwokerto	193.722.537,280	C	193.722.537,280	193.722.537,280
209	Kab. Cilacap	147.446.324,240	C	147.446.324,240	147.446.324,240
210	Kab. Banjarnegara	187.355.055,040	C	187.355.055,040	187.355.055,040
211	Kab. Cilacap	214.428.930,200	C	214.428.930,200	214.428.930,200
212	Kab. Banjarnegara	182.220.162,390	C	182.220.162,390	182.220.162,390
213	Kab. Cilacap	262.118.226,680	C	262.118.226,680	262.118.226,680
214	Kab. Banjarnegara	111.322.663,600	C	111.322.663,600	111.322.663,600
215	Kab. Banjarnegara	156.666.694,430	C	156.666.694,430	156.666.694,430
216	Kab. Banjarnegara	160.150.453,335	C	160.150.453,335	160.150.453,335
217	Kab. Banjarnegara	120.030.638,640	C	120.030.638,640	120.030.638,640
218	Kab. Banjarnegara	235.870.033,660	C	235.870.033,660	235.870.033,660
219	Kab. Banjarnegara	104.464.027,340	C	104.464.027,340	104.464.027,340
220	Kab. Banjarnegara	173.625.408,130	C	173.625.408,130	173.625.408,130
221	Kab. Banjarnegara	112.347.720,300	C	112.347.720,300	112.347.720,300
222	Kab. Banjarnegara	127.321.585,000	C	127.321.585,000	127.321.585,000
223	Kab. Banjarnegara	190.328.073,600	C	190.328.073,600	190.328.073,600
224	Kab. Banjarnegara	126.826.555,280	C	126.826.555,280	126.826.555,280
225	Kab. Banjarnegara	209.325.189,680	C	209.325.189,680	209.325.189,680
226	Kab. Banjarnegara	122.312.105,320	C	122.312.105,320	122.312.105,320
227	Kab. Banjarnegara	212.652.777,080	C	212.652.777,080	212.652.777,080
228	Kab. Banjarnegara	149.528.177,080	C	149.528.177,080	149.528.177,080
229	Kota Magelang	30.376.025,720	C	30.376.025,720	30.376.025,720
230	Kota Pekalongan	39.640.521,720	C	39.640.521,720	39.640.521,720
231	Kota Selayar	33.852.950,930	C	33.852.950,930	33.852.950,930
232	Kota Semarang	237.340.130,130	C	237.340.130,130	237.340.130,130

DAFTAR RIWAYAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

DITAHUN 2011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
229	Kota Gorontalo	170.724.549,440	C	170.724.549,440	170.724.549,440
231	Kota Segi	47.762.623,880	C	47.762.623,880	47.762.623,880
235	Provinsi DI Yogyakarta	9.142.321.000	D	9.142.321.000	9.142.321.000
236	Kab. Bantul	243.724.530,400	C	243.724.530,400	243.724.530,400
237	Kab. Gunung Kidul	185.357.330,240	C	185.357.330,240	185.357.330,240
238	Kab. Gunung Kidul	194.558.330,440	C	194.558.330,440	194.558.330,440
239	Kab. Sleman	206.951.421,330	C	206.951.421,330	206.951.421,330
240	Kota Yogyakarta	175.074.178,480	C	175.074.178,480	175.074.178,480
241	Provinsi Jawa Timur	37.476.102,000	D	37.476.102,000	37.476.102,000
242	Kab. Bangkaya	197.310.239,090	C	197.310.239,090	197.310.239,090
243	Kab. Banyuwangi	234.957.223,920	C	234.957.223,920	234.957.223,920
244	Kab. Blora	215.928.050,540	C	215.928.050,540	215.928.050,540
245	Kab. Bojonegara	187.712.089,400	C	187.712.089,400	187.712.089,400
246	Kab. Bondowoso	133.327.883,800	C	133.327.883,800	133.327.883,800
247	Kab. Gresik	151.722.182,320	C	151.722.182,320	151.722.182,320
248	Kab. Jember	371.544.541,570	C	371.544.541,570	371.544.541,570
249	Kab. Lamongan	185.658.353,610	C	185.658.353,610	185.658.353,610
250	Kab. Malang	709.377.678,810	C	709.377.678,810	709.377.678,810
251	Kab. Pamekasan	241.458.570,320	C	241.458.570,320	241.458.570,320
252	Kab. Probolinggo	136.276.600,770	C	136.276.600,770	136.276.600,770
253	Kab. Tulungagung	120.950.320,330	C	120.950.320,330	120.950.320,330
254	Kab. Magelang	139.326.501,240	C	139.326.501,240	139.326.501,240
255	Kab. Mojokerto	315.572.115,000	C	315.572.115,000	315.572.115,000
256	Kab. Mojokerto	148.068.370,130	C	148.068.370,130	148.068.370,130
257	Kab. Ngawi	101.722.545,440	C	101.722.545,440	101.722.545,440
258	Kab. Ngawi	131.550.478,100	C	131.550.478,100	131.550.478,100
259	Kab. Pacitan	179.228.037,190	C	179.228.037,190	179.228.037,190
260	Kab. Pamekasan	145.628.683,590	C	145.628.683,590	145.628.683,590
261	Kab. Ponorogo	207.662.307,520	C	207.662.307,520	207.662.307,520
262	Kab. Ponorogo	184.358.738,070	C	184.358.738,070	184.358.738,070
263	Kab. Puncung	172.322.514,130	C	172.322.514,130	172.322.514,130
264	Kab. Sampang	132.307.920,400	C	132.307.920,400	132.307.920,400
265	Kab. Situbone	238.720.673,970	C	238.720.673,970	238.720.673,970
266	Kab. Situbone	94.368.580,530	C	94.368.580,530	94.368.580,530
267	Kab. Sumedura	175.471.830,400	C	175.471.830,400	175.471.830,400
268	Kab. Trenggalek	173.959.007,000	C	173.959.007,000	173.959.007,000
269	Kab. Tuban	137.628.563,880	C	137.628.563,880	137.628.563,880
270	Kab. Tulungagung	183.757.139,930	C	183.757.139,930	183.757.139,930
271	Kota Bontol	97.022.877,590	C	97.022.877,590	97.022.877,590
272	Kota Kediri	70.070.087,440	C	70.070.087,440	70.070.087,440
273	Kota Madun	58.760.005,190	C	58.760.005,190	58.760.005,190
274	Kota Malang	149.327.430,300	C	149.327.430,300	149.327.430,300
275	Kota Maja	36.488.874,770	C	36.488.874,770	36.488.874,770
276	Kota Pasuruan	70.111.122,390	C	70.111.122,390	70.111.122,390
277	Kota Probolinggo	78.228.091,040	C	78.228.091,040	78.228.091,040
278	Kota Sukabaya	308.351.310,320	C	308.351.310,320	308.351.310,320
279	Kota Batu	47.458.638,430	C	47.458.638,430	47.458.638,430

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

RUMAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
280	Provinsi Kalimantan Barat	78.066.000.000	0	77.800.000.000	77.800.000.000
281	Kab. Bengkayang	68.040.607.770	0	68.040.607.770	68.040.607.770
282	Kab. Landak	80.222.277.900	0	80.222.277.900	80.222.277.900
283	Kab. Kayumas H.Li	64.357.639.880	0	64.357.639.880	64.357.639.880
284	Kab. Mempawah	86.117.750.240	0	86.117.750.240	86.117.750.240
285	Kab. Pontianak	77.200.665.290	0	77.200.665.290	77.200.665.290
286	Kab. Sambas	103.776.490.300	0	103.776.490.300	103.776.490.300
287	Kab. Sanggau	67.476.709.400	0	67.476.709.400	67.476.709.400
288	Kab. Sintang	76.254.753.130	0	76.254.753.130	76.254.753.130
289	Kota Pontianak	123.968.079.280	0	123.968.079.280	123.968.079.280
290	Kota Singkawang	77.216.113.640	0	77.216.113.640	77.216.113.640
291	Kab. Sekeloa Utara	20.662.584.520	0	20.662.584.520	20.662.584.520
292	Kab. Sukadana	80.574.103.300	0	80.574.103.300	80.574.103.300
293	Kab. Sintang	44.228.169.400	0	44.228.169.400	44.228.169.400
294	Kab. Melawi	33.356.841.320	0	33.356.841.320	33.356.841.320
295	Provinsi Kalimantan Tengah	7.052.571.000	0	7.052.571.000	7,052,571,000
296	Kab. Serik Sebelah	42.128.672.100	0	42.128.672.100	42.128.672.100
297	Kab. Serik Utara	48.365.906.800	0	48.365.906.800	48.365.906.800
298	Kab. Sukau	111.361.719.130	0	111.361.719.130	111.361.719.130
299	Kab. Kutawaringin Barat	34.347.004.180	0	34.347.004.180	34.347.004.180
300	Kab. Kutawaringin Timur	57.198.295.400	0	57.198.295.400	57.198.295.400
301	Kota Palangkaraya	66.100.459.480	0	66.100.459.480	66.100.459.480
302	Kab. Serik Timur	49.345.901.170	0	49.345.901.170	49.345.901.170
303	Kab. Murung Raya	22.100.967.440	0	22.100.967.440	22.100.967.440
304	Kab. Long Masau	53.307.889.240	0	53.307.889.240	53.307.889.240
305	Kab. Gunung Mas	57.156.134.900	0	57.156.134.900	57.156.134.900
306	Kab. Jangra	42.284.305.300	0	42.284.305.300	42.284.305.300
307	Kab. Sukadana	13.077.162.200	0	13.077.162.200	13.077.162.200
308	Kab. Sekeloa	31.307.740.090	0	31.307.740.090	31.307.740.090
309	Kab. Sekeloa	22.116.891.000	0	22.116.891.000	22.116.891.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	88.679.038.000	0	88.679.038.000	88.679.038.000
311	Kab. Banjar	80.757.279.440	0	80.757.279.440	80.757.279.440
312	Kab. Banjar Baru	94.055.933.730	0	94.055.933.730	94.055.933.730
313	Kab. Banjar Selatan	49.336.401.200	0	49.336.401.200	49.336.401.200
314	Kab. Banjar Tengah	80.426.912.130	0	80.426.912.130	80.426.912.130
315	Kab. Banjar Utara	51.357.461.000	0	51.357.461.000	51.357.461.000
316	Kab. Banjar	47.377.101.120	0	47.377.101.120	47.377.101.120
317	Kab. Tabalong	30.255.769.200	0	30.255.769.200	30.255.769.200
318	Kab. Tanah Laut	53.798.929.880	0	53.798.929.880	53.798.929.880
319	Kab. Tapin	40.456.009.570	0	40.456.009.570	40.456.009.570
320	Kota Banjarbaru	73.227.744.120	0	73.227.744.120	73.227.744.120
321	Kota Banjarmasin	119.355.813.390	0	119.355.813.390	119.355.813.390
322	Kab. Banjarbaru	77.257.103.170	0	77.257.103.170	77.257.103.170
323	Kab. Tanah Laut	45.517.000.000	0	45.517.000.000	45.517.000.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	3.102.572.000	0	3.102.572.000	3,102,572,000
325	Kab. Berau	34.377.532.160	0	34.377.532.160	34.377.532.160
326	Kab. Berau	27.735.015.600	0	27.735.015.600	27.735.015.600

DAFTAR B-311

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

RUMAH SAKIT

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
327	Kab. Kutai Kartasegara	126.413.441,832	C	104.256.532,900	104.256.532,900
328	Kab. Kutai Barat	31.253.135,120	C	31.262.135,120	31.262.135,120
329	Kab. Kutai Timur	40.080.887,000	C	40.080.887,000	40.080.887,000
330	Kab. Malinau	58.034.443,120	C	49.486.879,720	49.486.879,720
331	Kab. Murai	32.043.307,140	C	32.043.307,140	32.043.307,140
332	Kab. Paser	74.576.157,870	C	74.576.157,870	74.576.157,870
333	Kab. Pongkor	68.147.037,280	C	68.147.037,280	68.147.037,280
334	Kab. Puntianak	20.245.879,870	C	20.245.879,870	20.245.879,870
335	Kab. Tana Tidung	8.427.583,000	C	8.427.583,000	8.427.583,000
336	Kota Samarinda	113.799.345,520	C	113.799.345,520	113.799.345,520
337	Kota Tarakan	52.244.331,200	C	52.244.331,200	52.244.331,200
338	Kab. Penajam Paser Utara	33.962.321,020	C	33.962.321,020	33.962.321,020
339	Provinsi Sulawesi Utara	100.684.749,000	D	100.684.749,000	100.684.749,000
340	Kab. Soerab Mangrove	84.627.878,400	C	84.627.878,400	84.627.878,400
341	Kab. Minahasa	141.624.052,800	C	141.624.052,800	141.624.052,800
342	Kab. Sangihe	75.361.487,040	C	75.361.487,040	75.361.487,040
343	Kota Bitung	97.313.015,590	C	97.313.015,590	97.313.015,590
344	Kota Manado	140.752.517,640	C	140.752.517,640	140.752.517,640
345	Kab. Kepulauan Talaud	41.438.031,130	C	41.438.031,130	41.438.031,130
346	Kab. Minahasa Selatan	102.423.606,590	C	102.423.606,590	102.423.606,590
347	Kab. Minahasa Tenggara	79.968.793,130	C	79.968.793,130	79.968.793,130
348	Kab. Kepulauan Sula (Tegayandang Barat)	96.174.283,400	C	96.174.283,400	96.174.283,400
349	Kota Karamunai	111.892.741,640	C	111.892.741,640	111.892.741,640
350	Kab. Soerab Mangrove Timur	59.354.295,640	C	59.354.295,640	59.354.295,640
351	Kab. Soerab Mangrove Selatan	59.511.087,790	C	59.511.087,790	59.511.087,790
352	Kota Tomohon	57.367.543,740	C	57.367.543,740	57.367.543,740
353	Kab. Minahasa Utara	82.255.310,000	C	82.255.310,000	82.255.310,000
354	Kab. Soerab Mangrove Utara	89.576.643,080	C	89.576.643,080	89.576.643,080
355	Provinsi Gorontalo	18.900.000,000	D	18.900.000,000	18.900.000,000
356	Kab. Gorontalo	47.000.770,160	C	47.000.770,160	47.000.770,160
357	Kab. Gorontalo	143.701.537,930	C	143.701.537,930	143.701.537,930
358	Kota Gorontalo	130.720.789,160	C	130.720.789,160	130.720.789,160
359	Kab. Pohuwato	67.458.915,570	C	67.458.915,570	67.458.915,570
360	Kab. Gorontalo Utara	102.325.471,820	C	102.325.471,820	102.325.471,820
361	Kab. Bone Bolong	104.345.033,440	C	104.345.033,440	104.345.033,440
362	Provinsi Sulawesi Tengah	22.641.260,000	D	22.641.260,000	22.641.260,000
363	Kab. Banggai	116.321.080,370	C	116.321.080,370	116.321.080,370
364	Kab. Banggai Kepulauan	62.317.002,800	C	62.317.002,800	62.317.002,800
365	Kab. Buana	89.368.325,890	C	89.368.325,890	89.368.325,890
366	Kab. Taliabu	80.454.838,270	C	80.454.838,270	80.454.838,270
367	Kab. Banggai	119.324.345,290	C	119.324.345,290	119.324.345,290
368	Kab. Morowali	71.753.953,920	C	71.753.953,920	71.753.953,920
369	Kab. Poso	176.378.073,320	C	176.378.073,320	176.378.073,320
370	Kota Palu	67.078.088,580	C	67.078.088,580	67.078.088,580
371	Kab. Parigi Moutong	79.730.904,000	C	79.730.904,000	79.730.904,000
372	Kab. Sigi	67.327.650,500	C	67.327.650,500	67.327.650,500
373	Kab. Tojo Una-Una	54.447.771,400	C	54.447.771,400	54.447.771,400

DAFTAR B-316

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

RUMAH SAKIT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
374	Provinsi Sulawesi Selatan	44.081.760.000	0	44.081.760.000	44.081.760.000
375	Kab. Bantaeng	88.518.402.320	0	88.518.402.320	88.518.402.320
376	Kab. Barru	127.908.714.800	0	127.908.714.800	127.908.714.800
377	Kab. Bone	214.928.445.840	0	214.928.445.840	214.928.445.840
378	Kab. Bulukumba	145.167.320.000	0	145.167.320.000	145.167.320.000
379	Kab. Gowa	174.964.664.920	0	174.964.664.920	174.964.664.920
380	Kab. Luwu	130.658.031.300	0	130.658.031.300	130.658.031.300
381	Kab. Maros	176.362.748.480	0	176.362.748.480	176.362.748.480
382	Kab. Pangajene	142.001.558.520	0	142.001.558.520	142.001.558.520
383	Kab. Pangkajene-Andemone	110.907.070.380	0	110.907.070.380	110.907.070.380
384	Kab. Pinrang	125.445.205.000	0	125.445.205.000	125.445.205.000
385	Kab. Pangkajene-Andemone	149.657.148.880	0	149.657.148.880	149.657.148.880
386	Kab. Pangkajene-Andemone	140.401.683.520	0	140.401.683.520	140.401.683.520
387	Kab. Parepare	57.877.644.400	0	57.877.644.400	57.877.644.400
388	Kab. Pangkajene-Andemone	126.758.730.120	0	126.758.730.120	126.758.730.120
389	Kab. Pangkajene-Andemone	118.367.008.120	0	118.367.008.120	118.367.008.120
390	Kab. Pangkajene-Andemone	102.511.671.080	0	102.511.671.080	102.511.671.080
391	Kab. Pangkajene-Andemone	136.541.530.280	0	136.541.530.280	136.541.530.280
392	Kab. Pangkajene-Andemone	118.255.074.340	0	118.255.074.340	118.255.074.340
393	Kab. Pangkajene-Andemone	138.337.241.520	0	138.337.241.520	138.337.241.520
394	Kab. Pangkajene-Andemone	88.758.807.400	0	88.758.807.400	88.758.807.400
395	Kab. Pangkajene-Andemone	73.658.197.120	0	73.658.197.120	73.658.197.120
396	Kab. Pangkajene-Andemone	73.377.489.600	0	73.377.489.600	73.377.489.600
397	Kab. Pangkajene-Andemone	88.654.121.040	0	88.654.121.040	88.654.121.040
398	Kab. Pangkajene-Andemone	88.683.688.320	0	88.683.688.320	88.683.688.320
399	Provinsi Sulawesi Barat	81.800.000.000	0	81.800.000.000	81.800.000.000
400	Kab. Mamasa	79.368.250.400	0	79.368.250.400	79.368.250.400
401	Kab. Mamuju	117.146.781.180	0	117.146.781.180	117.146.781.180
402	Kab. Mamuju Utara	136.620.100.240	0	136.620.100.240	136.620.100.240
403	Kab. Mamuju	50.872.485.880	0	50.872.485.880	50.872.485.880
404	Kab. Mamuju Utara	74.415.034.000	0	74.415.034.000	74.415.034.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	39.095.321.000	0	39.095.321.000	39.095.321.000
406	Kab. Buton	148.960.523.360	0	148.960.523.360	148.960.523.360
407	Kab. Buton	73.040.605.520	0	73.040.605.520	73.040.605.520
408	Kab. Buton	74.025.918.840	0	74.025.918.840	74.025.918.840
409	Kab. Buton	148.960.523.360	0	148.960.523.360	148.960.523.360
410	Kab. Buton	138.218.684.760	0	138.218.684.760	138.218.684.760
411	Kab. Buton	65.714.502.030	0	65.714.502.030	65.714.502.030
412	Kab. Buton	107.768.007.560	0	107.768.007.560	107.768.007.560
413	Kab. Buton	53.047.047.800	0	53.047.047.800	53.047.047.800
414	Kab. Buton	37.624.125.190	0	37.624.125.190	37.624.125.190
415	Kab. Buton	46.320.139.520	0	46.320.139.520	46.320.139.520
416	Kab. Buton	83.694.747.520	0	83.694.747.520	83.694.747.520
417	Kab. Buton	49.052.620.240	0	49.052.620.240	49.052.620.240
418	Provinsi Bali	5.739.821.000	0	5.739.821.000	5.739.821.000
419	Kab. Badung	84.548.772.730	0	84.548.772.730	84.548.772.730
420	Kab. Badung	91.752.164.200	0	91.752.164.200	91.752.164.200

DAFTAR B-316

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

DITAHUN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
421	Kab. Sulewig	170.700.113.382	C	170.700.113.330	170.700.113.330
422	Kab. Selayar	115.360.137.280	C	115.360.137.280	115.360.137.280
423	Kab. Sembra	50.200.893.790	C	50.200.893.790	50.200.893.790
424	Kab. Sanggah	125.217.281.390	C	125.217.281.390	125.217.281.390
425	Kab. Slingku	47.719.000.140	C	47.719.000.140	47.719.000.140
426	Kab. Takanan	137.352.902.330	C	137.352.902.330	137.352.902.330
427	Kab. Tanggar	141.271.863.140	C	141.271.863.140	141.271.863.140
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	87.300.000.000	0	87.300.000.000	87.300.000.000
429	Kab. Bima	170.271.651.630	C	170.271.651.630	170.271.651.630
430	Kab. Dompu	103.123.363.400	C	103.123.363.400	103.123.363.400
431	Kab. Lombok Barat	144.901.083.640	C	144.901.083.640	144.901.083.640
432	Kab. Lombok Tengah	137.610.480.020	C	137.610.480.020	137.610.480.020
433	Kab. Lombok Timur	200.709.021.030	C	200.709.021.030	200.709.021.030
434	Kab. Sumbawa	126.362.408.680	C	126.362.408.680	126.362.408.680
435	Kota Mataram	107.550.067.800	C	107.550.067.800	107.550.067.800
436	Kab. Lombok Utara	46.352.803.880	C	46.352.803.880	46.352.803.880
437	Kota Bima	38.726.634.000	C	38.726.634.000	38.726.634.000
438	Kab. Sumbawa Barat	34.306.261.300	C	34.306.261.300	34.306.261.300
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	42.300.000.000	0	42.300.000.000	42.300.000.000
440	Kab. Gkr	36.500.480.130	C	36.500.480.130	36.500.480.130
441	Kab. Jelu	107.754.702.130	C	107.754.702.130	107.754.702.130
442	Kab. Ende	49.362.600.020	C	49.362.600.020	49.362.600.020
443	Kab. Flores Timur	71.564.674.370	C	71.564.674.370	71.564.674.370
444	Kab. Kupang	39.950.302.820	C	39.950.302.820	39.950.302.820
445	Kab. Lembata	47.156.352.790	C	47.156.352.790	47.156.352.790
446	Kab. Manggarai	75.358.063.240	C	75.358.063.240	75.358.063.240
447	Kab. Ngada	89.210.366.120	C	89.210.366.120	89.210.366.120
448	Kab. Sikka	80.307.607.080	C	80.307.607.080	80.307.607.080
449	Kab. Sumba Barat	47.327.401.080	C	47.327.401.080	47.327.401.080
450	Kab. Sumba Timur	88.708.732.000	C	88.708.732.000	88.708.732.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	65.604.490.640	C	65.604.490.640	65.604.490.640
452	Kab. Timor Tengah Utara	38.376.160.030	C	38.376.160.030	38.376.160.030
453	Kab. Kupang	94.401.670.740	C	94.401.670.740	94.401.670.740
454	Kab. Wae Aliao	38.224.623.900	C	38.224.623.900	38.224.623.900
455	Kab. Mangrove	46.306.143.940	C	46.306.143.940	46.306.143.940
456	Kab. Sumba Tengah	35.324.920.040	C	35.324.920.040	35.324.920.040
457	Kab. Sumba Barat Daya	59.624.803.880	C	59.624.803.880	59.624.803.880
458	Kab. Manggarai Timur	89.366.744.120	C	89.366.744.120	89.366.744.120
459	Kab. Sabu Raiju	19.324.290.000	C	19.324.290.000	19.324.290.000
460	Kab. Manggarai Barat	77.754.429.900	C	77.754.429.900	77.754.429.900
461	Provinsi Maluku	86.850.000.000	0	86.850.000.000	86.850.000.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	82.650.000.120	C	82.650.000.120	82.650.000.120
463	Kab. Maluku Tenggara	137.850.941.670	C	137.850.941.670	137.850.941.670
464	Kab. Maluku Tenggara Barat	70.378.621.480	C	70.378.621.480	70.378.621.480
465	Kab. Tula, Rahu	84.650.672.130	C	84.650.672.130	84.650.672.130
466	Kab. Ambo	135.960.039.330	C	135.960.039.330	135.960.039.330
467	Kab. Seram Bagian Barat	81.227.127.840	C	81.227.127.840	81.227.127.840

DAFTAR RIWAYAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

RUMAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
466	Kab. Seram Bagian Timur	50.630.405,36E	C	50.660.405,330	50.660.405,330
468	Kab. Maluku Barat Daya	32.221.634,09E	C	32.221.634,090	32.221.634,090
470	Kab. Suru Selatan	30.034.278,72E	C	30.034.278,720	30.034.278,720
471	Kab. Kepulauan Aru	66.843.059,12E	C	67.344.309,120	67.344.309,120
472	Kab. Tula	37.762.651,20E	C	37.762.651,200	37.762.651,200
473	Provinsi Maluku Utara	48.411.571,000	B	48.153.571,000	48.153.571,000
474	Kab. Halmahera Tengah	58.955.446,33E	C	58.955.446,330	58.955.446,330
475	Kab. Halmahera Barat	46.451.297,00E	C	46.451.297,000	46.451.297,000
476	Kab. Tena	65.413.613,99E	C	65.413.613,990	65.413.613,990
477	Kab. Halmahera Timur	52.618.724,28E	C	52.618.724,280	52.618.724,280
478	Kab. Tulele Kepulauan	64.541.155,60E	C	64.541.155,600	64.541.155,600
479	Kab. Kepulauan Sula	53.025.779,79E	C	53.025.779,790	53.025.779,790
480	Kab. Talaue	27.035.632,00E	C	27.035.632,000	27.035.632,000
481	Kab. Halmahera Selatan	75.484.671,24E	C	75.484.671,240	75.484.671,240
482	Kab. Halmahera Utara	37.147.150,28E	C	37.147.150,280	37.147.150,280
483	Kab. Yalimo	38.135.830,50E	C	38.135.830,500	38.135.830,500
484	Kab. Jayapura	63.723.027,00E	C	63.723.027,000	63.723.027,000
485	Provinsi Papua	3.971.248.797,550	3.957.459.547,550	13.500.000,000	3.970.959.547,550
486	Kab. Dore	39.528.531,44E	C	39.528.531,440	39.528.531,440
487	Kab. Jayapura	87.187.479,40E	C	87.187.479,400	87.187.479,400
488	Kab. Jayawijaya	78.901.627,33E	C	78.901.627,330	78.901.627,330
489	Kab. Merauke	43.634.599,99E	C	43.634.599,990	43.634.599,990
490	Kab. Mimika	57.715.571,44E	C	57.715.571,440	57.715.571,440
491	Kab. Nabire	74.556.792,03E	C	74.556.792,030	74.556.792,030
492	Kab. Paniai	53.327.130,93E	C	53.327.130,930	53.327.130,930
493	Kab. Puncak Jaya	58.019.623,04E	C	58.019.623,040	58.019.623,040
494	Kab. Kepulauan Yapen	36.179.882,20E	C	36.179.882,200	36.179.882,200
495	Kab. Jayapura	86.541.748,04E	C	86.541.748,040	86.541.748,040
496	Kab. Sorong	36.266.168,03E	C	36.266.168,030	36.266.168,030
497	Kab. Sorong	82.730.171,00E	C	82.730.171,000	82.730.171,000
498	Kab. Yahukimo	24.552.327,00E	C	24.552.327,000	24.552.327,000
499	Kab. Pegunungan Bintang	34.172.907,00E	C	34.172.907,000	34.172.907,000
500	Kab. Tolikara	31.254.457,00E	C	31.254.457,000	31.254.457,000
501	Kab. Wamena	34.617.634,00E	C	34.617.634,000	34.617.634,000
502	Kab. Mappi	35.642.703,04E	C	35.642.703,040	35.642.703,040
503	Kab. Enhat	31.559.677,63E	C	31.559.677,630	31.559.677,630
504	Kab. Wabobo	27.268.493,32E	C	27.268.493,320	27.268.493,320
505	Kab. Mamberamo Jaya	12.172.674,00E	C	12.172.674,000	12.172.674,000
506	Kab. Mamberamo Tengah	12.130.811,00E	C	12.130.811,000	12.130.811,000
507	Kab. Muga	31.367.842,00E	C	31.367.842,000	31.367.842,000
508	Kab. Dogiyah	27.722.420,52E	C	27.722.420,520	27.722.420,520
509	Kab. Merauke	46.453.999,00E	C	46.453.999,000	46.453.999,000
510	Kab. Puncak	11.633.065,00E	C	11.633.065,000	11.633.065,000
511	Kab. Jayapura	17.515.890,00E	C	17.515.890,000	17.515.890,000
512	Kab. Supiori	29.553.043,00E	C	29.553.043,000	29.553.043,000
513	Provinsi Papua Barat	2.074.868.828,10E	1.963.198.948,960	108.867.877,16E	2.068.864.828,10E
514	Kab. Sorong	30.458.137,89E	C	30.458.137,890	30.458.137,890

DAFTAR_R03_2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (Rp.000.000)

DAFTAR 8.F

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
>15	Kab. Mamasa	38.231.352.800	0	83.221.352.800	83.221.352.800
>18	Kab. Takengon	25.204.902.000	0	25.204.902.000	25.204.902.000
>17	Kota Sorong	43.346.095.640	0	43.346.095.640	43.346.095.640
315	Kab. Sorong Selatan	17.351.121.440	0	17.351.121.440	17.351.121.440
313	Kab. Raja Ampat	10.311.102.380	0	10.311.102.380	10.311.102.380
327	Kab. Teluk Bintuni	52.329.004.190	0	52.329.004.190	52.329.004.190
321	Kab. Teluk Wondoloba	49.541.192.000	0	49.541.192.000	49.541.192.000
322	Kab. Tambora	31.262.705.000	0	31.262.705.000	31.262.705.000
323	Kab. Maybrat	14.107.422.000	0	14.107.422.000	14.107.422.000
>24	Kab. Kamena	19.937.074.000	0	19.937.074.000	19.937.074.000
325	Lena Cederangan	0	0	-	0
	JUMLAH	64.485.576.868.802	10.421.312.993.000	53.857.237.684.474	64.078.550.677.474

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
1	510.000267.030	REKENING KHUSUS DEPKEL (RUPIAH) JURUSAN MOTIVASIAKOR PROJECT TYPE FRANT 4 2000	0	0
2	510.000267.080	REKENING KHUSUS DEPKEL (RUPIAH) JURUSAN MOTIVASIAKOR PROJECT TYPE FRANT 4 2000	77.340.787,83	120.706.433,71
3	510.000275.930	NON PROJECT GRANT 4 3 TAHUN 2002	100.575.065,937	100.575.065,937
4	510.000276.860	NON PROJECT GRANT 4 3 TAHUN 2003	77.218.454,564	77.218.454,564
5	510.000171.860	TEKNOLOGI PERFORMAN HIGIENITRANSKRIPSI PROGRAM SECOND BAKNEDY ROUND 2008	24.320.044,564	42.347.180,357
6	901.001311.930	REKESK DEPKEL UP CONSTRUCTION OF JUNIOR SECONDARY SCHOOL FACILITY FOR THE BASIC EDUCATION PROGRAM (ICWA AFRIC LUCI)	22.864.200,646	22.804.121,380
7	901.002311.930	REKESK DEPKEL UP LOAN EASTERN INDONESIA NATIONAL RURAL IMPROVEMENT PROJECT (ENRPI), A PRO LOO2	14.7845.024,237	222.963038,180
8	901.041111.930	REKESK DEPKEL UP FRCY GALAH WADA UNIVERSITY DEV. IP-494 2007	302.330,209	285.462,120
9	901.045111.030	REKESK DEPKEL UP PROF. PENGEMB. PRAS. PEDESAAN (P2C) RURAL AREAS INFRASTR. DEVELOPMENT PROJECT (IP-506) J3IC TIMOR LESTY	2.529.877,040	2.182.649,214
10	901.046111.930	REKESK DEPKEL UP PROFESIONA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT (RURAL AREAS PROGRAM, PROJECT LOAN J3IC 2004)	21.208.257,185	9.445.515,222
11	901.049111.030	REKESK DEPKEL UP PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT (DOMESTIC PROGRAM, PROJECT LOAN J3IC 2004)	4.893.242,883	28.951.907,830
12	901.050111.930	REKESK DEPKEL UP DEVELOPMENT OF FACULTY OF MEDICINE AND DENTAL SCIENCES OF SYARIAH MUHAMMADIYAH UNIVERSITY	823.050,303	3.650.845,003
13	901.050111.930	REKESK DEPKEL UP PROJEK PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAMIC DAN J3IC 2004 TIMOR LESTY	129.139,229	3.514.239,990
14	901.055111.930	REKESK DEPKEL UP REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LOAN J3IC IP-573 A DALAM WALITA JFY	207.878.482,203	287.074.227,157
15	901.055111.930	REKESK DEPKEL UP REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LOAN J3IC IP-543 B DALAM WALITA JFY	0	0
16	901.058111.030	REKESK DEPKEL UP PROJEK UZUNE PROJEK TRUST FUND	0	8.303.003,103
17	901.203411.930	REKESK DEPKEL UP FEMBY SECOND WATER & SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT	0	1.491.803,300
18	901.203411.930	REKESK DEPKEL UP PROJEK UZUNE EMPLOYMENT FOR RURAL DEVELOPMENT PROJECT (ADB NO. 1755-INO)	151.058	151.024
19	901.208111.930	REKESK DEPKEL UP PARTICIPATORY INTEGRATED DEV. IN RURAL AREAS PROJ. PINDA 500-10 200	00,098	32,617
20	901.209111.030	REKESK DEPKEL UP PROJEK DECENTRALIZED HEALTH SERVICES	70,009	69,411
21	901.210111.930	REKESK DEPKEL UP TECHNICAL AND PROFESSIONAL SKILLS DEVELOPMENT PROJ.	37,368	37,123
22	901.214111.930	REKESK DEPKEL UP MARINE & COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT	15.753,982	15.915,908

DAFTAR NERACA 323

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
23	901.210411030	REKES DEKPU UP SECOND KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT BRD NO. 4827-IND/CA/CF/NO. 3935/IND/RES/099	310.852.400	308.212.328
24	901.221411990	REKES DEKPU UP DECENTRALIZED BASIC EDUCATION PROJECT	386.301	382.686
25	901.224411990	REKES DEKPU UP SECOND URBAN POVERTY PROJECT LOAN IERD NO. 4384/IND/REF/TA/ICP/0350/NO.04/PM/04/11/4/US1	3.813.450.288	23.529.345.272
26	901.229411990	REKES DEKPU UP FOSTER FARMER INCOME IMPROVEMENT THROUGH INNOVATION PROJECT (IP3P)	54.073.303	54.577.958
27	901.230411990	REKES DEKPU UP CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASE II (CEREF-02)	3.387.957.710	314.775
28	901.232411030	REKES DEKPU UP GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT REVENUE ADMINISTRATION PROJECT 4762/NO	8.541.158.104	141.916.154.295
29	901.233411990	REKES DEKPU UP HEALTH WORKFORCE AND SERVICE PROJECT LOAN IERD 4702/IND/CA/CR/3704/NO	49.075.201	484.239.349
30	901.235411030	REKES DEKPU UP LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT LOAN IERD NO. 4731/3834/IND/DUM/VA/USD	0	113.238.578
31	901.236411990	REKES DEKPU UP SECOND EAST-TIMOR ECONOMIC TA REPORT PROJECT (EIR-02)	4.294.555.745	68.351.050.495
32	901.240411030	REKES DEKPU UP THIRD ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT	728.415.160	724.791.303
33	901.241411990	REKES DEKPU UP THE IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION SYSTEM AT VILLAGE LEVEL PROJECT (LJNU-IND/030)	13.712.737.984	13.970.544.958
34	901.242411990	REKES DEKPU UP CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASE II (CEREF-02)	58.298	40.034.000.915
35	901.243411990	REKES DEKPU UP SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT	1.287.283	427.889
36	901.244411990	REKES DEKPU UP SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT	206.832	79.680
37	901.245411990	REKES DEKPU UP STATE ADJUSTMENT SUPPORT THROUGH POLICY PROJECT	0	362.186
38	901.249411990	REKES DEKPU UP SUPPORT FOR POOR & DISABLED WAGED WRECK PROJECT	25.146.157.950	41.245.340.700
39	901.247411030	REKES DEKPU UP INDONESIA MANAGER'S HIGH EDUCATION RELEVANCE & EFFICENCY PROJ. IERD NO. 4739/IND/CA/NO. 4077/NO	41.702.751.528	182.376.149.844
40	901.248411990	REKES DEKPU UP MECHANIZATION OPERATIONAL FILTER SPECTER PROJECT (M-SSP)	0	0
41	901.251411030	REKES DEKPU UP THIRD ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT PHASE I	4.676.732	4.531.218
42	901.252411990	REKES DEKPU UP THIRD URBAN POVERTY PROJECT LOAN IERD NO. 4773/IND/CA/CR/4085	8.750.809.308	13.219.278.917
43	901.257411030	REKES DEKPU UP LOCAL GOVERNMENT FINANCE AND GOVERNANCE EFFICIENCY (SG-DEK) PROGRAM (GFR-030) DAN 408 NO. 2183/IND	0	0
44	901.255411990	REKES DEKPU UP INITIATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECT (IGRP)	51.04.793	837.528

DAFTAR NERACA 328

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
43	901.255411030	REKLS DEKLU UP WATER RESOURCES AND IRRIGAT ON SECTOR MNGMNT FR..WISWP	88.806.143	13.799.403.523
43	901.257411990	REKLS DEKLU UP COMMUNITY WATER SUPPLYS & HEALTH PROJECT	12.751	538.779
47	901.238411930	REKLS DEKLU UP COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT (DAN NO. 2164 NO.151)	1.032	137.382
48	901.239411990	REKLS DEKLU UP IRRIG. STRATEGIC DEVELOPMNT PROGRAM PROJECT 4789-NC	175.708.744	66.308.177.574
48	901.230411930	REKLS DEKLU UP FARMER IRRIGATION SECTOR IP SP	454	90.143
48	901.251411930	REKLS DEKLU UP FARMER IRRIGATION SECTOR IP SP	1.392	1.889
51	901.234411930	REKLS DEKLU UP EARLY CHILDHOOD EDUC & DEV PROJECT (DAN 4705)	130.47.911.930	52.621.808.517
52	901.258411030	REKLS DEKLU UP PROFESIONAL LEANING IP	967.133	15.281.742.707
53	901.250411030	REKLS DEKLU UP SUSTAINABLE AQUACULTURE DEV FOR FOOD SECURITY AND POVERTY REDUCTION PROJECT	1.839.767	3.532.143
54	901.240411990	REKLS DEKLU UP MADRASAH EDUCATION DEVELOPMEN PROJECT	126.407	127.860.141
55	901.271411930	REKLS DEKLU UP FARMER EMPOWNT THROUGH AGRICULTURE TRAINING & INFORMATION PROJECT	66.640.550.272	27.777.900.292
55	901.274411990	REKLS DEKLU UP LEAN STRATEGIC TOOLS INFRASTRUCTURE PROJECT (SRIP)	382.227	350.778.112
57	901.278411930	REKLS DEKLU UP BETTER EDUCATION THROUGH EFFICIENT MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHER UPGRADING PROJECT (BERKMLU)	9.785.227.793	25.378.822.649
58	901.246411030	REKLS DEKLU UP RURAL COMMUNICATIONS THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT PROJECT (NICE)	3339.339	223.136.321
58	901.260411930	REKLS DEKLU UP THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (MANSYAGS/204)	32.012	116.774.374.062
60	901.262411030	REKLS DEKLU UP NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT	41.319.865.707	245.721.415.297
61	901.263411990	REKLS DEKLU UP LEANING TO DO WITH INFORMATION AND COMMUNICATION NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT RUREAN AREAS PROJECT (NICE/ID)	2.735.391	17.910.468.275
62	901.264411030	REKLS DEKLU UP VOCATIONAL EDUCATION'S REINTEGRATION PROJECT (INVEST)	66.457.380	1.992.299
63	901.265411990	REKLS DEKLU UP RURAL INFRASTRUCTURE SUPPLY PROGRAM (MANSY)	9	13.240.112.404
64	901.269411930	REKLS DEKLU UP NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT (DAN NO. 135 ID)	10.061.949.547	1.004.557.395
65	901.287411990	REKLS DEKLU UP INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT (DAN NO. NO.121 (1ST)132 (UNCL)/VA 118)	42.111.830.943	62.411.025.254
66	901.288411990	REKLS DEKLU UP INTEGRATED RURAL WATER RESOURCES MGT INVESTM PROGRAM PROJECT (DAN NO. NO.121 (1ST)132 (UNCL)/VA 118)	10.455.751.617	2.385.061.681

DAFTAR NERACA 327

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
67	301.280411030	REKUSUS DEPKEU LOKAL IBRD 7666-IC/CAM OPERAS CANAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (CISPI)	21.227.621.955	3.736.398
68	301.280411990	REKUSUS DEKLU UNTUK QUALITY PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY PROJECT LOKAL (Q3/IND)	2.125.721	357.438
69	301.281111930	REKUSUS DEPKEU UNTUK RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO TIG PNM/ MANDIRI PROJECT (TIG PNM) (LOAN ADE NO. 2875-NC)	59.018.230	11.506.500
70	301.282411990	REKUSUS DEPKEU UNTUK URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT (IBRD LOAN NO. 7730-ID)	728.843.853	13.408.900.000
71	301.283111930	REKUSUS DEPERKULTEK DEVELOPMENT OF RANLUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (RANLUS) (LOAN ADE NO. IP.852-D-M-VOLTA-IPY)	1.390.942.478	4.411.468.000
72	301.284411030	REKUSUS DEPKEU UTK INVEST PROJECT RECURRY SECTION DEVELOPMENT PROJECT (IBRD/LOAN ADE NO. 2264-IND/SP)	0	0
73	301.285411930	REKUSUS DEPERKULTEK THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPLOYMENT IN RURAL AREAS (PEFY MANDIRI PLODSE) (LOAN BRU 7867-ID)	65.022.538.007	6.562.712
74	301.285711030	REKUSUS KEMENTERAN KEUANGAN UTK PROJECT FOR INCREASING TAX ADMINISTRATIVE REFORM (LOAN IERD NO. 7501-ID)	0	0
75	301.287411990	REKUSUS KEMENTERAN UTK FORTIFICATION IN UPTAN AREAS (LOAN 7386-ID)	2.840.851.744	0
76	301.288111030	REKUSUS KEMENTERAN UTK SCHOLARSHIPS PROGRAM FOR STAFF MEMBERS REFORMING INSTITUTIONS PROJECT (IBRD/LOAN)	66.215.237.734	0
77	301.289411990	REKUSUS KEMENTERAN UTK PHASE II PROJECT (AD NO. LIT 835) (DALAM VALUTA USD)	1.648.771	0
78	301.300411930	REKUSUS KEMENTERAN UTK PHASE I INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT (IBRD/ PHASE II LOAN ID) (DALAM VALUTA USD)	264.741.864.748	0
79	301.301411990	REKUSUS KEMENTERAN UTK PHASE II INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT (DALAM VALUTA USD)	228.045.149.324	0
80	301.301311990	REKUSUS KEMENTERAN UTK PHASE I INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT (DALAM VALUTA USD)	59.383.220.275	0
81	302.001901030	REKUSUS KEMENTERAN UTK PHASE I HIBAH UNI-EUROPA NO. 001-ASIE/2008/023-038 DALAM VALUTA EURO	286.431.268	0
82	302.002011930	REKUSUS KEMENTERAN UTK HIBAH KEM. NO. 2007-69038 DALAM VALUTA EURO	51.324.832.000	0
83	302.002001030	REKUSUS KEMENTERAN UTK HIBAH KEM. NO. 2007-69038 DALAM VALUTA EURO	4.535.741.324	0
84	302.007411990	REKUSUS DEPERKULTEK CORRECTIONAL INSTITUTION AND MANAGEMENT PHASE II (UCREMA- II)	5.589.751.712	5.215.662.507
85	302.080111030	REKUSUS DEPKEU UTK GOVERNMENT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REFORM ADMINISTRATION PROJECT (F053538)	1.569.888.082	1.665.408.284
86	302.082411990	REKUSUS DEKLU UTK HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SUMPUR PROJECT	527.185.802	522.438.138
87	302.087111930	REKUSUS DEPKEU UTK COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH AND RURAL URBAN SUMPTER PROJECT	33.370	33.087

DAFTAR NERACA 328

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
88	902.085711930	REKUS DEPKEU UP STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT	0	3.997.038
89	902.085411980	REKUS DEKLU UP INITIATIVES FOR LOCAL ECON. INNOVATION UPV PROJECT (UGRP)	10.134.548	24.025.851.148
90	902.087111930	REKUS DEPKEU UP WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MINDYNT PROJECT WISMP	1.209.320	10.070
91	902.089411980	REKUS DEPKETUP STAPRO 411 TOLKANTIG FRENCH SLIP PRO D. HB4 PEM BELANDA SEC FOCRY DUSGHT	300.545.308	305.726.727
92	902.081411930	REKUS DEPKETUP IRRIGATION SECTOR DEVELOPMENT PROJECTS 33853	846.766	4.053.242.950
93	902.082411930	REKUS DEPKEU UP EDU-PEW YUNION GRANT FIN JSA TENGGARAI WTR. RSPC.MNG.PROGRAM	229.766.807	262.567
94	902.085411930	REKUS DEPKEU UP FACTORY IRRIGATION SECTOR PROJECT	4.399	5.485
95	902.085111930	REKUS DEPKEU UP EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT TR56841	25.387.515.275	8.621.957.382
96	902.087411930	REKUS DEPKETUP ORGANICAL Y. JGRAND HOUSING IN MANGGROVEH CARLSSALAM AND NERI4 SUMATERA	61.261.110	61.262.258
97	902.088411930	REKUS DEPKEU UP PROTES DELICH GRANT	3659.11.389	1.382.719.275
98	902.089411930	REKUS DEPKEU UP PROTECFROM BEST PRACTICE POLICY FORMULATION PROJECT INTT 57276	0	9.037.184
99	902.100411980	REKUS DEPKEU UP PROTECFROM MATAN BASED RECONSTR AND REHABILITATION PLANNING PROJECT KRRAITF 067303-IND	0	52.054.687.283
100	902.102411980	REKUS DEPKETUP STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AND AUDIT OF DISASTER RELIEF AID. IN GRANT NO. TR57423	0	0
101	902.102411930	REKUS DEPKEU GRANT USND TR57423 (MJI) FCF FOR AID NORTH SUMATERA, SUPP. FCF FOOD AND DISADVANTAGE AREAS PROJ	4.410.826.879	8.210.059.742
102	902.103411930	REKUS DEPKETUP INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT ACCOUNT IMPREST ACCOUNT FACILITY GRANT AGREEMENT 0064 NC	0	0
103	902.109111930	REKUS DEPKEU UP PROTECFROM GRANT TRD 726-ID	32.268.753	6.139.564
104	902.107411930	REKUS DEPKEU UP PROTECFROM INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION PROGRAM FACILITY TR 067357	10.280.016.000	31.600.028
105	902.108111930	REKUS DEPKEU UP PROTES RECONSTRUCTION PROGRAM GRANT TRD 726-ID	10.75.997.710	30.293.814.578
106	902.109411930	REKUS DEPKETUP GRANT FOR LOT STUDY BY TEACHERS STATE EMPLOYEES AND EMPLOYEES OF THE EDUCATION SUPP. PROJ. TR 06727	0	0
107	902.106111930	REKUS DEPKEU UP MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCE MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT TR 08047-IND	29.240.278	14.841.383
108	902.102411980	REKUS DEPKEU UP RECONSTRUCTION DEVELOPMENT PROJECT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT	0	6.131.223
109	902.107111930	REKUS DEPKEU UP THIRD KEY DEL. PROJ. PHASE I FOR SMALL ENTERPRISES DEVELOPMENT INITIATIVE (S&T)	0	0

DAFTAR NERACA 329

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
10	902.154.1.030	REKES DEPKU GRANT NO. 057574 STREAMLING DATA FLOWS FROM REGION TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT	0	0
11	902.174.1.980	REKES DEPKU UP NE HERLAJUS RUST FUND FOR THE BETTER EDUCATION THROUGH REFERRED TGT AND L.V.V. TEACHER TRAINING PROJ.	25.063.811,701	18.787.817,669
12	902.1224.1.980	REKES DEPKU UP TECH. ASE. TO IND. NAT. EQL WINDOW, MULTI DONOR TRUST FUND TO SJE. FUCL. FIN. MGT & REV. ADM. FORDIM GRANT TF091414	362.720,300	9.048,219
13	902.1294.1.980	REKES DEPKU UP GAS EDUCATION PROJECT II 081995140	3.838.439,480	3.078.981,929
14	902.1244.1.980	REKES DEPKU UP REGENERATIVE POWER GENERATION DEV PROJECT TF 082324	895.847,352	2.759.978,561
15	902.1254.1.030	REKES DEPKU UP ICH GRANT FOR THE MSOW LABS BE WENGGY FIN. REPORT & COURSE OF FF TF92616	68.847,292	389.540,300
16	902.1284.1.980	REKES DEPKU UP DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM BOS-SIA II 093619	0	0
17	902.1204.1.030	MULTI-DONOR SUPPORT FACILITY FINANCIAL COMMUNITY EMPOWERMENT CO-FINANCING GRANT DECENTRALIZED VET OF NATURAL RESOURCES & RENEWABLE ENERGY	1.963,791	60.769.333,555
18	902.1304.1.980	REKES DEPKU UP RIGANT 083368 AGRI ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING (MUL) 070804	54.519.629,297	105.079.528,817
19	902.1314.1.030	REKES DEPKU UP GLOBAL PARTNERSHIP ON UJ. PU. BASIC AND EXAMINE PIPE AND WATER SUPPLY TO SURABAYA'S URBAN UJDI PROJECT	3.279.697,309	4.795.960,300
20	902.1324.1.980	REKES DEPKU UP NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT GRANT NO. 106310	0	0
21	902.1304.1.980	REKES DEPKU UNTUK HIBAH TF083092 (THE PREPARATION OF STATEMENT OF THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM OF INDONESIA) PROJECT	0	1.239.919,520
22	902.1364.1.980	PROYEK MULTI-DONOR TRADE AND INVESTMENT CLIMATE FACILITY TF 084033	1.203,288	35.7150,124
23	902.1354.1.980	REKES DEPKU UP SUPPORT FOR THE T-IRC WATER SUPPLY & SANITATION FOR RURAL COMMUNITY PROJECT FANSIMAS (TF 084922)	14.789.434,623	30.183
24	902.1354.1.030	REKES DEPKU UP DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY I CAPACITY STRENGTHENING PROG. FOR LOCAL GOVERNMENT PRIORITIES (TF 085624)	173.771,478	621.238,827
25	902.1374.1.980	REKES DEPKU UP WFP INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT GRANT II 094130	0	1.385.338,153
26	902.1384.1.980	REKES DEPKU UNTUK INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SLE PROGRAM D- SANITATION COMMUNITY & MUNICIPALITIES PROJECT TF 084720	358.360,498	0.596.400,300
27	902.1394.1.980	REKES DEPKU UP INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SLE PROGRAM J- TECHNICAL ASSISTANCE FOR FLOOD MITIGATION PROJECT TF 082649	54.110,282	588.315,914
28	902.1404.1.030	REKES DEPKU UP JPPF ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE PCR, GRANT NO. 9152-INDONESIA 0911157	62.082,248	1.168.423,157

DAFTAR NERACA 330

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
120	902.141.11.030	REKUS DEKRU UNTUK DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY II: FOSTER TRAINING AND POLICAT ON CENTER DEPARTMENT (REKONSTRUKSI)	3.620.580	5.415.492
130	902.142.11.990	REKUS DEKRU UNTUK REFORMASI JEREBAN DAN SEMPUR AND SAMPURAN PROGRAM JLM VAL AJUKORREK FLADINE AGRE: (NO. 54134)	269.240.207	113.228.145.048
131	902.143.11.990	REKUS KEMENKEU LTK ILO TECH AGRICULTURE TO IND TAXI COM FORDIM UNDER THE SJFP TO PUBLIC FIN MNGMT N TCA ADM (MULTI-CORREKTIF) (C9398)	239.851.323	0
132	902.144.11.990	SLIPUP INC II - KUNJUNGAN CORRUPTION LIAISON ON CORRUPTION PREVENTION STRATEGY TF-054167	0.531.108	222.328.857
133	902.145.11.990	REKUS DEKRU LTK REFORMASI GOV FOR LOCAL GOVERNMENT SUPPLY OF WATER TO CORRECT	228.822.848	0
134	902.146.11.030	WORLD BANK AS JNDP H S/LMA (SALU) (C9398)	325.313	4.385.800.000
135	902.147.11.990	REKUS DEKRU UNTUK DIF GRANT FOR SUPPORT TO SPA FOR PREPARATION OF NEW STRATEGIC PLAN (REKONSTRUKSI) (C9398)	34.678.300	59.234.345
136	902.148.11.990	WATER AND SANITATION POLICY AND ACTION PLANNING FACILITY PROJECT (WASPOL) (C9398)	1.007.021.387	2.247.150.000
137	902.150.11.990	REKUS KEMENKEU LTK GRANT AGREEMENT PNFN SUPPORT FACILITY TRUST FUNDS (PS)	138.517.640.497	91.708.200.000
138	902.151.11.030	REKUS KEMENKEU LTK RESTRUCTURE REKONSTRUCTION FINANCING FACILITY PROJECT (REKONSTRUKSI) (C9398)	48.729.326.891	0
139	902.152.11.990	REKUS REFORMASI FIDEL PARTNERSHIP ON OUTPUT BASED AND EXTENSIVE COMMUNICATION IN RURAL AREAS (REKONSTRUKSI) (C9398)	269.157.348	0
140	902.153.11.030	REKUS KEMENKEU LTK DIF GRANT FOR WATER-SHED MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION (C9398)	693.282.387	0
141	902.154.11.990	REKUS KEMENKEU LTK DIF GRANT FOR SUPPORT TO BRIDGE ON FIDEL IMPLEMENTATION OF USE IN RURAL AREAS (REKONSTRUKSI) (C9398)	57.252.150	0
142	902.155.11.030	REKUS KEMENKEU LTK THIRD NATIONAL PROG FOR COMMUNICATION IN RURAL AREAS (REKONSTRUKSI) (C9398)	22.225.461.324	0
143	902.156.11.990	REKUS REFORMASI KEMENKEU LTK DIF GRANT FOR SUPPORT FOR SLAVE CHILDREN FACILITY (REKONSTRUKSI) (C9398)	317.880.000	0
144	902.157.11.990	REKUS REFORMASI KEMENKEU LTK DIF GRANT FOR NORTH SUMATRA RESTRUCTURE REFORM STRATEGIC PLAN (REKONSTRUKSI) (C9398)	0	0
145	902.158.11.990	REKUS KEMENKEU LTK REFORMASI INTEGRATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) FOR PNFN (MANDIRI-SIMPADU) (C9398)	2.287.2297	0
146	902.159.11.990	REKUS KEMENKEU LTK REFORMASI PNFN SUPPORT FACILITY TRUST FUNDS (PS) COMM-BASED SETTLEMENT (REKONSTRUKSI) (C9398)	0.527.200.000	0
147	902.160.11.030	REKUS KEMENKEU LTK REFORMASI PNFN SUPPORT FACILITY TRUST FUNDS (PS) COMM-BASED SETTLEMENT (REKONSTRUKSI) (C9398)	24.253.487.620	0

DAFTAR NERACA 331

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
48	902.151.11.030	REKESK KEMENKEU LTR TF093870 PMPN SUPPORT FACILITY TRUST FUND (FSD) THROUGH TRUST FUND FOR GOV M FUND. JAMWAF DUM VAL. USD	537.780.000	0
49	902.152.11.930	REKESK KEMENKEU LRTU3 SUPPORT FACILITY BILLY ADUNESIA F 99202	1.715.250.000	0
50	902.150.11.930	REKESK KEMENKEU LRTU3 SOLID ERANT (FSD NO. 34-0-003-0-014M/2011) USD	068.932.877	0
51	902.134.11.930	REKESK KEMENKEU LRTU3 THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS (SF FINANCING TR-099018-11)	62.382.128.722	0
52	901.502.11.930	REKESK KEMENKEU LRTU3 PROYEC PERAGAKAN SENI, KREATIF DAN AMALIAH SUKSES (27 SEKSE. MK/01M/021) USD	0	0
53	901.254.11.030	REKESK KEMENKEU LRTU3 PROYEC JAKARTA MASS RAF J TRANSIT SYSTEM (MRT) DAN L. DAN. P. 006	0	0
54	902.155.11.930	REKESK KEMENKEU LRTU3 (CPE) RECD - READINESS PREPARATION DALAM WADUKAL. USD	2.305.951.311	0
55	902.0033.11.030	REKESK KEMENKEU LRTU3 PROYEC EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAM (ESPP) GRANT R.O. 60472 DUM VALUTA AUD	0	0
56	901.504.11.930	REKESK KEMENKEU LRTU3 (KEMER) SANITASI DAN AIR MINUM (KEMER) (KEMER) SUPPORT TO PMPN WADUKAL PROJECT 2768-RU/01Y VAL. USD	0	0
57	901.203.11.030	REKESK KEMENKEU LRTU3 WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MAT PROGRAM PHASE II (R027410.0.1M/2011) USD	0	0
	JUMLAH		2.990.016.547.054	2.424.934.933.971

DAFTAR NERACA 332

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No.	KANWIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
	I. ACEH		188.416.406.674	168.798.620.207
1	BANDA ACEH	001	66.377.311.348	65.273.671.531
2	LANGSA	002	16.353.696.330	17.686.283.870
3	MELLAGOH	003	21.355.659.287	13.645.287.433
4	TAPAK TILAY	074	9.177.385.471	5.784.700.630
5	LHOKSARANG	089	40.312.479.221	35.553.786.477
6	KUTACANE	005	8.155.076.402	7.573.688.133
7	TAKENGON	022	7.656.881.835	6.684.176.076
8	BANDA ACEH IKTISUS	075	0	0
	II. MEDAN		321.195.207.671	281.707.843.368
9	MEKKA	004	11.517.432.750	32.783.362.082
10	PEMATANG SIHANGAR	005	50.559.635.281	25.573.370.663
11	PALANG SIDEMPURAN	006	16.722.665.475	17.463.227.733
12	GUNUNG SITU	007	4.920.717.821	7.485.528.932
13	RANTAU PEKAPAT	076	6.354.975.248	6.220.385.133
14	TAMJUNG BERAH	078	13.294.293.422	11.093.388.470
15	SIDDAGA	008	10.576.537.877	13.659.148.065
16	SIMPANGSIANG	019	7.275.056.200	17.346.585.263
17	MEKKA	023	76.928.883.253	72.093.175.833
18	TEDONG NENGGI	024	15.310.664.203	13.073.055.233
19	BALIK	025	14.130.883.048	8.575.003.123
	III. PADANG		200.128.014.170	120.830.860.643
20	PALANG	010	11.072.676.377	60.353.466.656
21	BUKIT TUBI	011	45.115.247.789	32.643.228.150
22	SUMILANG	077	7.656.868.245	5.004.740.030
23	SOLOK	090	15.216.445.255	15.611.476.173
24	LJONG SAMPINE	091	8.325.323.205	5.543.324.874
25	PANGAI	042	6.917.951.798	4.242.776.295
	IV. PEKANBARU		263.197.614.313	190.675.346.121
26	PEKANBARU	009	55.756.645.771	37.083.676.009
27	TAMJUNG BERAH	009	26.410.663.448	23.569.617.493
28	RENDAH	092	16.984.617.770	12.259.507.930
29	DUMAI	020	60.454.600.241	13.503.666.395
30	BALAU	037	20.617.652.765	16.694.328.063
	V. JAMBI		107.874.425.308	85.428.219.856
31	JAMBI	012	60.822.889.565	42.773.527.929
32	SIMPANG PETAH	013	7.253.031.000	6.073.267.435
33	MUARA BUNGO	079	7.728.691.812	5.867.942.570
34	KUALA TINGKAL	043	14.608.613.760	4.673.767.733
35	BANGKO	038	17.353.061.551	5.643.630.040
	VI. PALEMBANG		188.873.682.826	191.414.216.424
36	PALEMBANG	014	117.250.602.748	95.253.270.232
37	LJONG LINGGA	070	3.010.823.292	6.774.351.730
38	BATURAJA	008	13.355.813.454	8.253.070.830
39	LAMPUNG	044	34.254.223.038	27.774.104.122
40	SEKAJAJI	021	20.257.781.463	11.086.789.630

DAFTAR NERACA 393

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No.	NAMU/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
	VII. BANDAR LAMPUNG		124.091.607.162	120.864.023.068
41	BANDAR LAMPUNG	017	63.316.071.055	33.001.002.035
42	KOTABUMI	116	50.121.042.037	13.445.360.870
43	NETE	128	7.597.610.063	21.285.486.033
44	LUBA	145	3.009.877.400	3.121.050.000
	VIII. BENGKULU		76.202.812.730	62.806.218.171
45	BENGKULU	016	60.056.061.771	30.756.737.232
46	MUKOMUKOM	121	8.342.791.191	6.823.067.136
47	CURUP	146	4.307.864.217	7.759.454.732
48	MUKOMUKOM	181	3.343.452.591	2.401.366.911
	IX. PANGKAL PINANG		34.904.308.343	20.540.451.800
49	PANGKAL PINANG	015	20.226.471.423	16.691.377.000
50	TANJUNGPONDAN	107	4.725.931.207	3.899.574.900
	X. SERANG		163.509.005.823	103.766.370.199
51	SERANG	021	69.821.939.505	52.703.181.822
52	TANGKARANG	122	67.666.634.052	51.094.460.113
53	KANGKASHEUNE	181	6.221.422.266	5.971.723.453
	XI. JAKARTA		6.215.001.070.288	4.885.355.813.864
54	JAKARTA I	013	242.318.039.803	132.566.385.873
55	JAKARTA II	013	4.000.856.131.823	4.044.182.782.482
56	JAKARTA III	083	400.076.021.567	295.103.002.509
57	JAKARTA IV	133	241.828.857.073	168.781.487.363
58	JAKARTA V	133	276.717.621.450	224.757.385.451
59	JAKARTA VI	140	0	0
	XII. BANDUNG		739.473.513.121	603.847.251.714
60	PURWAKARTA	021	41.776.439.077	31.769.041.503
61	BANDUNG I	022	116.247.001.077	135.043.047.183
62	BANDUNG	023	119.026.079.569	30.703.402.566
63	CIREBON	021	64.376.632.025	46.873.000.542
64	TASIKMALAYA	025	43.235.823.479	37.631.750.802
65	KARANGKANG	080	1.410.737.144	51.234.227.134
66	SUMEDANG	087	22.691.266.778	14.213.325.237
67	BANDUNG II	095	12.025.036.805	145.411.615.013
68	GARUT	006	24.252.491.520	22.012.231.636
69	SUKADJATI	129	44.362.811.703	36.702.100.482
70	KIMAMPANG	147	24.401.977.167	14.203.002.800
71	BEKASI	171	63.320.263.172	42.009.324.851
	XIII. SEMARANG		575.404.071.000	445.130.821.281
72	SEMARANG I	026	78.311.416.577	61.826.788.393
73	SEMARANG II	027	19.756.623.540	14.723.621.424
74	SIKAPURTA	023	61.306.001.002	71.013.763.133
75	PURWOKERTO	023	41.368.433.549	32.061.760.300
76	PEKAYONGAN	022	17.481.832.807	14.058.181.000
77	PATI	097	31.528.800.002	24.401.040.000
78	MAGELANG	115	66.162.823.324	40.084.444.802
79	TEGAYAH	118	58.403.745.547	31.896.598.000

DAFTAR NERACA 394

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No.	KANWIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
00	KJULB	029	41.666.243.263	12.191.357.720
01	DIYACAP	030	13.752.633.270	11.084.324.230
02	SEMARANG II	031	69.366.843.620	57.293.366.530
03	KATEN	040	50.224.575.187	18.554.550.030
04	SRAGEN	042	16.126.645.424	13.090.300.666
05	PURWODAJI	043	16.712.613.721	12.032.276.670
06	BANJARNEGARA	044	20.354.527.743	11.281.372.240
	XIV. TIDYAKARTA		148.845.090.854	134.370.668.061
07	YOGYAKARTA	033	83.250.037.870	121.677.362.561
08	WONOREJO	049	7.076.097.087	6.624.426.000
09	MAJES	076	7.928.136.845	6.823.471.230
	XV. SURABAYA		790.833.712.442	629.817.075.077
00	SURABAYA	031	59.314.731.187	135.529.355.246
01	MAJALINGRAH	032	151.276.123.353	135.553.366.734
02	MAJALINGRAH	033	66.757.469.748	56.721.588.276
03	KEDIRI	034	49.416.031.170	42.575.226.051
04	BONDOWONEGO	035	28.443.637.509	15.346.166.932
05	PAMEKASAN	036	23.345.856.463	22.126.304.367
06	BOJONEGORO	037	50.312.433.150	14.506.922.879
07	KUDUS	038	36.372.233.333	37.497.765.000
08	PASURUAN	039	4.717.712.212	4.141.762.833
09	BANJIRANG	040	21.777.034.509	8.469.305.081
100	JEMBER	041	44.353.039.750	47.411.906.000
101	SURABAYA	045	26.326.039.623	36.276.671.818
102	BITUNG	046	20.372.736.087	16.741.366.035
103	SIDHARJO	047	31.622.630.527	25.466.327.100
104	TUBAN	048	1.476.034.060	12.623.178.879
	XVI. PONTIANAK		118.459.122.694	93.401.279.064
105	PONTIANAK	042	65.166.063.183	52.475.757.034
106	SINTANG	079	12.656.630.200	11.543.393.600
107	SINGKAWANG	043	23.827.632.452	15.789.026.550
108	KOTA WAGAY	094	5.152.025.202	4.723.300.400
109	PUTUSGIEAU	047	3.027.276.400	3.412.060.100
110	SAMBAS	047	8.227.091.434	7.451.395.400
	XVII. PALANGKARAYA		71.579.808.714	49.123.077.800
111	PALANGKARAYA	049	46.136.539.853	32.267.042.700
112	SAMPTI	044	8.116.043.019	6.622.370.400
113	BUNTO	080	10.316.091.263	6.743.400.500
114	PANGKALAN BUN	042	6.446.343.890	5.285.322.000
	XVIII. BANJARMASIN		112.567.725.843	91.314.602.379
115	BANJARMASIN	045	66.405.572.764	55.003.472.267
116	KOTABARU	081	7.244.064.506	7.507.726.124
117	BANGKALAN	043	16.610.221.377	12.541.748.300
118	TALUNING	051	17.489.812.549	8.469.770.400
119	PELAIHARI	049	4.340.354.587	3.351.372.239
	XIX. SAMARINDA		175.948.398.725	94.120.181.889

DAFTAR NERACA 395

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No.	NAMU/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
120	SAMARINDA	046	64.307.239.253	32.102.390.119
121	BALI KAPANG	047	63.184.066.592	35.615.939.563
122	TARAKAN	043	19.656.636.700	14.147.386.630
125	NUA JUKA	152	7.128.399.891	2.253.654.833
124	TANJUNGPINANG	153	11.376.637.550	2.723.969.630
	XX. BEMPASAR		132.471.870.720	116.202.489.800
125	BEMPASAR	037	59.106.636.329	37.402.107.730
126	SINGARAJA	132	21.321.463.265	23.001.388.030
127	KALATUNGGAH	154	11.454.639.759	12.284.327.330
	XXI. MATARAM		111.106.739.455	71.824.511.673
128	MATARAM	038	66.475.039.587	45.729.708.732
129	BANGALUA	071	27.726.675.270	17.264.147.961
130	SUNDAPWA OLSAP	101	9.215.317.194	5.876.522.610
131	SPELING	159	8.749.937.604	6.554.922.430
	XXII. KUPANG		86.000.812.880	77.714.048.677
132	KUPANG	039	50.917.613.931	45.151.366.634
133	ENJENE	040	9.667.891.205	2.226.288.031
134	WAIKAPU	041	6.175.039.592	5.511.214.939
135	RUTEK	111	6.636.434.277	6.636.379.030
136	WAIMENA	172	6.668.997.140	5.993.326.830
137	LARATILIA	174	4.655.076.124	2.603.755.030
	XXIII. MAKASAR		281.386.641.016	237.837.262.618
138	MAKASSARI	054	64.654.139.384	35.297.347.212
139	MANTAPONE	055	21.540.936.521	15.241.386.263
140	BANTARNE	056	12.330.042.159	11.209.187.320
141	PARIPARIP	057	53.126.220.563	26.609.369.639
142	PALUPE	058	11.216.434.221	9.623.629.439
143	WAJUCI	059	8.321.147.500	7.481.588.493
144	MAKASSAR I	106	74.146.634.765	61.106.937.179
145	BENIWA	156	2.327.731.472	2.284.624.389
146	MAKALE	173	4.322.372.091	3.567.245.417
147	SINJAI	177	2.354.736.440	3.223.090.579
148	MAMULI	178	16.312.832.207	5.256.422.610
	XXIV. PALU		83.827.539.007	86.833.008.753
149	PALU	061	63.236.666.823	46.623.726.561
150	PORDO	062	8.912.625.308	5.614.261.630
151	LUMAJE	053	6.168.225.472	5.404.319.151
152	TODOTU	062	5.337.422.004	4.689.168.441
	XXV. KENDARI		72.601.273.699	52.202.420.524
153	KENDARI	063	46.355.664.344	37.224.955.064
154	BALIKALI	103	12.920.039.127	6.729.206.930
155	KULASA	158	3.303.562.610	4.681.256.530
156	RANGI	157	3.029.567.616	3.567.369.063
	XXVI. BORDONTALO		41.066.614.727	31.012.666.374
157	BORDONTALO	064	36.956.036.558	27.567.348.274

DAFTAR NERACA 336

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NO.	KAWIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
138	MARSA	130	4.173.713.668	3.659.607.100
	XXVII. MANADO		117.986.620.918	77.048.816.918
139	MANADO	043	80.259.610.410	67.350.510.919
130	TAJUNA	035	3.602.825.137	3.215.206.900
131	BOJALENGU	042	10.207.836.384	5.281.882.000
132	ETING	075	15.000.108.042	3.197.227.900
	XXVIII. TERNATE		33.303.318.339	29.349.064.300
133	TERNATE	052	30.438.583.635	26.592.722.900
134	TUBU	012	2.864.734.704	2.756.341.400
	XXIX. AMBON		80.787.163.286	73.267.462.601
135	AMBON	060	64.106.613.395	53.161.122.147
136	TIALA	034	6.472.551.900	5.595.696.454
137	SANJALING	034	2.801.300.230	2.511.048.200
138	MASOHI	072	7.290.487.800	7.082.095.800
	XXX. JAYAPURA		221.445.997.769	194.526.934.407
139	JAYAPURA	053	87.453.555.472	107.427.074.596
140	ELANG	054	16.121.892.746	15.771.341.200
141	MANOKWARI	055	16.635.706.800	14.002.730.725
142	SORONG	056	15.375.235.800	17.255.413.900
143	KAPPAE	057	6.912.561.738	7.037.137.100
144	WERUJUE	058	35.136.700.040	16.617.788.700
145	MAJULI	059	5.046.511.834	4.823.921.100
146	WAMENA	013	5.880.947.500	5.461.425.300
147	SEPLI	038	8.246.088.277	3.563.541.496
148	UMSA	040	25.301.503.966	13.236.770.900
	JUMLAH KPPN		11.870.566.047.881	9.218.612.887.732

LAPORAN KEHARIAN PEMERINTAH KATTAHALA 2011 (Lanjutan)

DAFTAR 6

REKENING PEMERINTAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

		Rincian (Rp)		
NO	NO REKENING	NAMA REKENING	31 Desember 2011	31 DESEMBER 2010
A.	DI BANK INDONESIA			
1	51020002	Rekening Debit kas/tepat	0,00	0,00
2	51020010	Rekening Simpanan Berjangka	0,00	0,00
3	62020011	RE_RP*	0,00	105,27
4	62020021	RE_RUD	0,00	0,00
5	62020041	RE_USD	0,00	0,00
6	62020051	RE_CRP	0,00	0,00
7	62020060	RE_RDP	0,00	0,00
8	62020061	RE_ELR	0,00	0,00
9	62020071	Deposito Berjangka Pemegang Rekening Produk or Sharif	6.227.138.722.228,00	7.202.482.402.789,21
10	62020072	Persamaan Pembiayaan dari bank lain	23.745.646.879,00	61.521.102.284,71
11	62020084	Persamaan Pihak Lain	11.795.110.000,00	205.304.371.205,20
12	62020091	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran/B. menampung dari kantor/instansi yang ditunjuk/ditugaskan oleh kantor	0,00	0,00
13	62020092	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran untuk Jangdulan Sekt. Utang Kasir	0,00	0,00
14	62020093	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran untuk Jangdulan Sekt. Utang Kasir	0,00	0,00
15	51020094	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran untuk Jangdulan Sekt. Utang Kasir	0,00	91.194.584.202,20
16	51020095	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran untuk Jangdulan Sekt. Utang Kasir	0,00	0,00
17	62020096	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran untuk Jangdulan Sekt. Utang Kasir	0,00	0,00
18	51020097	Rekening Kasir Per Diem/Rekening Jendral Anggaran untuk Jangdulan Sekt. Utang Kasir	0,00	0,00
		JUMLAH	6.558.844.566.113	7.580.201.440.611,59
B.	REKENING PEREMPTAN DI BANK UMUM			
1	0102117058	EMI Cak. Pasangan	0,00	0,00
2	02021010227004	UML Cak. Jkt. Medan	0,00	0,00
3	11020000000000	UML Mandiri Cak. Jkt. Pas. Kandi II	0,00	0,00
		JUMLAH	0,00	0,00
C.	REKENING RETUR			
1	0102001001	Bank BNI Cabang Jakarta Pusat	0,00	7.497.297.292,20
2	02021010227004	Bank BNI Cabang Jakarta Medan	0,00	0,00
3	11020000000000	Bank Mandiri Cabang Jakarta Kandi II	0,00	87.541.203.287,20
4	0010010205054	EPD Bandung Cabang Utama Bandung	0,00	3.329,20
5	10020000000000	EPD Klaten Cabang Utama Perintis	0,00	0,00
6	0101010000	EPD Maluku Cabang Utama Ambon	0,00	4.283.266.102,20
7	10020000000000	EPD Salsal Cabang Utama Makassar	0,00	0,00
8	10020000000000	UML Sumed. Cabang Utama Medan	0,00	0,00
9	6202000000	UML Mandiri	0,00	271.025.185.000,20
10	6202000000	Rekening di BNI KEM Janda Jera	0,00	0,00
11	6202000000	Rekening di BNI KEM Medan	0,00	0,00
12	6202000000	Rekening di BNI KEM Padang	0,00	0,00
13	6202000000	Rekening di BNI KEM Pekanbaru	0,00	0,00
14	6202000000	Rekening di BNI KEM Banda Aceh	0,00	0,00
15	6202000000	Rekening di BNI KEM Aceh Singgaja	0,00	0,00
16	6202000000	Rekening di BNI KEM Aceh Tenggara	0,00	0,00
17	6202000000	Rekening di BNI KEM Aceh Selatan	0,00	0,00
18	6202000000	Rekening di BNI KEM Aceh Barat	0,00	0,00
19	6202000000	Rekening di BNI KEM Aceh Barat Daya	0,00	0,00
20	6202000000	Rekening di BNI KEM Aceh Tenggara	0,00	0,00
21	6202000000	REKENING di KEM KEM Ambon	0,00	0,00
22	6202000000	Rekening di KEM KEM Jakarta I	0,00	0,00
23	6202000000	Rekening di KEM KEM Jakarta II	0,00	0,00
24	6202000000	Rekening di KEM KEM Jakarta III	0,00	0,00
25	6202000000	Rekening di KEM KEM Jakarta IV	0,00	0,00
26	6202000000	REKENING di KEM KEM KEM Medan	0,00	0,00
27	6202000000	REKENING di KEM KEM KEM Padang	0,00	0,00
28	6202000000	REKENING di KEM KEM KEM Pekanbaru	0,00	0,00
29	6202000000	REKENING di KEM KEM KEM Banda Aceh	0,00	0,00
30	6202000000	REKENING di KEM KEM KEM Banda Aceh	0,00	0,00
		JUMLAH	0,00	482.881.617.107,40
		GRAND TOTAL	8.558.844.566.113,00	8.057.897.957.719,59

DAFTAR PERKIRAAN 2012

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (ASAS TERKOR)

LAMBAR 7

**SALDO PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2011**

No.	Nama Rekening	Saldo Awal 1 Januari 2011	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Rek. Indak Dana Lngg. Berqam	19.704.664.185,78	7.643.401.989,31	16.957.371.250,00	7.113.274.325,59
2.	Rek. Listrik Pemasaran	9.460.189.842,84	38.183.887,00	9.486.818.771,84	72.672.838,00
3.	Rek. KKP A Eng. Hasil SWI	13.372.133,71	452.129.819,23	435.831.794,23	6.570.268,61
4.	Rek. KUMK	760.789.961.775,13	139.285.273.925,90	906.288.152.875,00	40.777.002.226,93
5.	Proyek Listrik di ...	13.429.448,40	11.721.836,24	13.118.264,00	11.279.041,40
6.	Proyek P.D. ...	19.150.676,20	153.810,00	6.134.410,00	13.070.076,20
7.	Rek. Pecoran (LT 1050/2000)	14.401.152,28	567.275.239,21	571.795.050,00	10.200.732,59
8.	Dana Belanja ERM SEPTU	10.267.681,28	22.815.748,00	28.349.634,00	11.000.000,00
9.	Rekening ...	32.837.159,87	267.813.419,07	184.675.513,28	11.500.000,00
10.	Proy. ...	7.983.181,40	110.771,00	1.110,00	7.872.980,40
11.	P.R.U.F.P. Perkebr. (5%) BRI	206.200.783,58	1.135.461.038,39	906.636.417,00	645.234.404,97
12.	P.R.U.F.P. Perkebr. (3,25%) BR	3.085.810.522,11	21.231.903.517,08	18.733.955.217,53	6.161.758.224,66
13.	P.R.U.F.P. Perkebr. (3%) BRI	149.544.540,76	945.406.248,37	677.438.561,00	768.512.228,13
14.	P.R.U.F.P. Perkebr. (3,25%) Mandiri	56.237.199,03	1.036.067.349,53	781.637.457,75	65.107.090,81
15.	P.R.U.F.P. Perkebr. (5%) Mandiri	13.597.547,06	70.269.186,53	42.187.924,50	41.335.170,60
16.	P.R.U.F.P. Perkebr. (3,25%) Mandiri	556.572,57	2.794.544.118,61	2.055.425.530,59	1.300.890.390,19
17.	P.R.U.F.P. Perkebr. (5%) Mandiri	70.917.119,04	23.453.101,63	86.374.811,09	61.125.319,61
	Jumlah	794.774.458.673,93	219.213.881.500,85	957.280.006.834,87	50.708.133.599,71

LAPORAN KEUANGAN

LEMBAGA KEUANGAN, PENGEF. K.104-FUS-KT-24-DR.2011 (4020752)

DITJUK-3

**KAS PADA KIL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian/lembaga/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PEMERINTAH		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	10.581.022	78.652.646	17.700.000	34.688.873	3.044.874.479	1.925.258.480
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.004.639.807	4.923.873.283	-	-	-	-
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	15.805.535.379	12.861.631.482	132.871.641	1.193.839.643	2.310.592.423	389.630.542
4	005	Mahkamah Agung	636.687.521	1.281.149.772	-	332.202.990	6.194.083.868	7.17.937.978
5	006	Kajaksan Agung	703.832.328	487.188.213	3.877.623.188	4.404.766.934	56.727.015.418	511.342.900
6	007	Sekretariat Negara	3.035.136.669	7.867.837.362	448.075.654	4.135.000	15.182.785.648	7.738.337.498
7	010	Kementerian Dalam Negeri	6.415.690.382	4.260.023.753	22.372.149.618	67.215.928.241	11.137.702.626	3.635.543.096
8	011	Kementerian Luar Negeri	89.237.337.975	355.550.551.237	14.544.581	130.112.045	165.351.188	114.058.152
9	012	Kementerian Pertahanan	3.033.990.995	-	6.679.893.698	4.831.423.918	119.899.965.000	4.145.785.970
10	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	2.517.672.150	1.020.431.927	3.040.880.248	4.088.349.033	2.155.885.364	1.992.376.866
11	015	Kementerian Keuangan	1.439.660.756	2.253.758.643	970.359.613	416.590.873	8.115.195.871	2.149.709.968
12	018	Kementerian Pertanian	6.029.889.911	7.105.679.680	312.270.855	280.182.862	6.708.488.077	6.722.647.329
13	019	Kementerian Perindustrian	3.132.527.913	537.773.094	23.887.118.524	2.108.256.492	159.994.850	5.646.919.227
14	020	Kementerian ESDM	707.393.230	142.416.490	10.024.539.870	345.808.190.529	24.371.542.175	1.572.590.125
15	022	Kementerian Perhubungan	473.989.973	663.093.328	98.385.904.989	104.877.776.482	1.873.343.972	126.491.856
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	29.057.547.642	27.089.509.576	1.426.762.912	1.910.102.673	227.389.900.896	79.591.894.944
17	024	Kementerian Kesehatan	6.014.567.167	15.037.882.568	2.379.653.331	2.991.949.230	380.314.581.981	772.403.090.194
18	025	Kementerian Agama	2.772.512.926	8.723.647.912	8.837.150.137	11.228.028.167	10.104.236.574	10.815.757.688
19	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.015.981.617	18.361.918.789	60.469.150	314.361	17.559.844	9.673.273
20	027	Kementerian Sosial	1.176.984.982	304.886.345	48.365.486.680	63.275.181.111	119.850.889.281	72.418.176.820

DITJUK-3/C

LEMBAGA KEUANGAN: PENGEF.1704-FUS-KT-24-DR-2011-146207521

DITJUK.3

**KAS PADA KIL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	KAS DI BENDAHARA PEMERINTAH	KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
21 029	2.1898.190.391	7.987.015.381	31.840.821.058
22 032	1.477.382.772	3.623.489.421	1.148.074.146
23 033	895.824.764	482.337.441	23.732.861.771
24 034			
25 035			809.363.470
26 038	630.727.715	11.415.000	306.900.481
27 040	2.740.697.216	5.829	590.067
28 042	203.531.790	50.000	349.089.104
29 043	1.273.164.777	122.437.700	2.781.517.085
30 044	4.529.000	358.634.330	2.771.110.906
31 047	734.080.171	1.558.183.545	291.408.075
32 048	900		
33 050			
34 051		49.152	311.794.000
35 054	988.008.527	1.108.973.357	8.110.843.481
36 055	800	1.906.740.308	4.853.263.921
37 056	531.237.388	38.857.282	1.534.150.828
38 057	40.959.025	26.260.717	68.380.000
38 058	884.765.832	7.636.183.000	1.368.861.516
		3.081.348.824	33.158.330
			816.709
		812.687.408	35.688.500
		6.887.324.837	2.914.260.792
		23.875.577	6.065.684.912
		68.380.000	642.074.558
		3.081.348.824	33.158.330

DITJUK.MERKAS.3

LEMBAGA KEUANGAN: PENGEF. K.104-FUS-KT-24-10-2011 (4620752)

DITJUK 3

**KAS PADA KIL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

		KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
40	060	2.691.198.021	2.377.562.072	929.225.730.831
41	063	19.783.347	177.208.631	894.856.264
42	064	2.642.800	-	6.201.000
43	065	2.135.186.973	598.877.365	6.835.628
44	066	50.705.840	-	8.056.788.253
45	067	120.382.875	378.768.376	68.980.000
46	068	6.972.725.190	3.043.143.972	367.639.400
47	074	24.690.342	-	5.782.875.437
48	075	34.790.671	48.817.942	258.341.291
49	076	784.812.937	1.271.412.045	2.248.807
50	079	3.319.350	13.181.600	197.889.230
51	080	-	55.105.884	-
52	081	892.395.067	878.950.581	1.783.478.489
53	082	88.071.600	7.306.000	45.777.154
54	083	3.214.300	52.790.620	-
55	084	-	2.522.222	-
56	085	-	7.267.500	-
57	086	-	84.015.781	-
58	087	341.292.393	38.488.038	12.380.200
59	088	22.088.116	100.247.627	254.719.000
				4.871.181

DITJUK KEPADA 3/2

REKAPITULASI PERFORMAN KEUANGAN TAHUN 2011

DAFTAR 3

**PIUTANG PERERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

KID	KIR	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			Saldo Bujukan 31 Desember 2011 Audited
			31 Desember 2011 Audited			
			BRUTO	PEMBAYARAN	NETTO	
1	002	Devisa Persebaran Rakyat	2.394.224.515	178.5501	2.215.674.005	-
2	004	Bantuan Persebaran Keuangan	11.153.218	655.7081	10.497.510	-
3	005	Musibahan Agung	27.402.524	1120.2371	26.282.287	182.224.564
4	007	Sekeloa: Nagas	-	-	-	469.311,46
5	010	Kontribusi Dasar Nagas	27.301.025.209	8.726.1031	21.574.922.100	4.522.363.000
6	011	Kontribusi Luar Nagas	23.776.293.300	-	23.776.293.300	23.274.369.492
7	012	Kontribusi Lendak	27.280.000.825	-	27.280.000.825	128.825.705.152
8	013	Kontribusi Bantuan RUMAH	11.242.361.840	-	11.242.361.840	1.224.108.101
9	015	Kontribusi Bantuan	41.429.129.187	142.861.100111	41.286.268.076	58.179.428.892
10	018	Kontribusi Bantuan	558.725.44	117.370.4131	441.355.031	2.229.292.455
11	019	Kontribusi Bantuan	4.191.125.500	100.000.0001	4.091.125.500	3.221.423.118
12	020	Kontribusi Bantuan	8.514.724.454.890	1.573.827.48.927	6.940.896.962.963	586.507.548.257
13	022	Kontribusi Bantuan	127.344.738.087	128.221.1441	127.216.516.946	222.841.109.455
14	023	Kontribusi Bantuan	241.287.185.278	150.191.252.5451	91.095.932.733	324.200.000
15	024	Kontribusi Bantuan	2.487.321.480	128.221.1441	2.359.100.336	1.582.517.575
16	026	Kontribusi Bantuan	1.206.862.303	-	1.206.862.303	1.672.400.197
17	028	Tariga KIR dan Transkript	5.301.10	126.221	5.274.879	256.110
18	027	Kontribusi Sosial	248.071.000	-	248.071.000	673.240.187
19	028	Kontribusi Bantuan	1.512.768.000.007	11.229.241.308.221	1.501.538.758.786	4.202.123.253.172
20	022	Kontribusi Bantuan	1.702.040.871	128.221.1441	1.573.827.48.927	461.164.825
21	023	Kontribusi Bantuan	1.127.884.712	1.822.221	1.126.062.500	15.721.451.112
22	028	Kontribusi Bantuan	1.242.221.000	-	1.242.221.000	-
23	040	Kontribusi Bantuan	212.403.000	11.229.241.308.221	201.173.696.779	3.873.360.600
24	041	Kontribusi Bantuan	1.208.503.000	-	1.208.503.000	1.208.503.000
25	043	Kontribusi Bantuan	150.286.000	1.822.221	148.463.779	71.347.500
26	041	Kontribusi Bantuan	12.819.813	-	12.819.813	-
27	051	Bantuan Sosial	27.757.532	117.5631	27.640.969	29.347.825
28	055	Kontribusi Bantuan	375.443.856	1.822.221	373.621.635	1.251.840
29	058	Bantuan Sosial	375.443.856	1.822.221	373.621.635	47.519.587
30	057	Kontribusi Bantuan	2.800.000	-	2.800.000	-
31	008	Kontribusi Bantuan	2.442.361.211.016	1047.712.271.8621	1.394.648.939.154	1.300.227.777.237
32	009	Kontribusi Bantuan	1.258.852.609	120.820.2251	1.138.032.384	2.483.761.220
33	003	Bantuan Sosial	627.000	111.2001	515.800	370.000
34	005	Under Services	-	-	-	443.123.620
35	006	Bantuan Sosial	2.316.000.110	-	2.316.000.110	747.404.297
36	008	Under Services	3.458.000.217	-	3.458.000.217	8.081.521.886
37	015	Bantuan Sosial	3.313.811.803	-	3.313.811.803	17.207.705.897
38	018	Bantuan Sosial	14.223.220	-	14.223.220	1.221.820
39	017	Musibahan Agung	57.884.212	174.4711	57.709.741	-
40	018	Bantuan Sosial	-	-	-	1.713.202.295
41	019	Bantuan Sosial	117.547.812	11.229.241.308.221	106.318.571	247.229.887
42	020	Bantuan Sosial	1.498.574.741	17.125.9731	1.481.448.768	493.379.500
43	001	Bantuan Sosial	34.380.221.448	121.421.200.1421	34.258.800.307	19.121.886.254
44	022	1474	-	-	-	167.524.197
45	003	Bantuan Sosial	7.002.789.843	7.045.420.0741	6.957.369.769	61.231.220
46	004	Bantuan Sosial	15.229.000	-	15.229.000	2.827.280
47	006	Bantuan Sosial	316.069.000	109.010.2031	207.058.797	97.327.000
48	008	Under Services	18.503.000	1.822.221	16.680.779	109.700.000
49	007	Bantuan Sosial	-	-	-	131.12.825
50	008	Under Services	11.229.241.308.221	-	11.229.241.308.221	-
51	009	Bantuan Sosial	178.713.57	17.578.2941	161.135.276	1.213.350.182
52	004	Bantuan Sosial	1.381.773.278	12.421.2521	1.369.352.026	-
53	007	Bantuan Sosial	110.017.000	11.011.5071	99.005.493	-
54	003	Bantuan Sosial	447.371.212.828	411.229.219.9031	36.141.992.925	454.252.778
55	006	Devisa Persebaran Dasar	12.777.000	11.229.241.308.221	1.547.757.779	1.431.000
56	114	Bantuan Sosial	2.161.151.220	10.820.1571	2.150.331.063	1.211.444.012
57	100	Bantuan Sosial	2.778.761.286	118.300.7671	2.660.460.519	25.200.000
58	117	Under SBI	1.428.221.000	-	1.428.221.000	501.000.000
59	100	Kontribusi Bantuan	43.228.201.820	446.892.274.4231	42.781.309.397	78.022.311.100
60	111	Under Services	1.522.011.478	118.125.1821	1.403.886.296	-
61	112	Bantuan Sosial	14.311.265.41	151.527.450.7231	13.729.737.988	-
62	113	Bantuan Sosial	-	-	-	-
63	114	Bantuan Sosial	879.120.004.870	7.204.375.4731	871.915.629.397	280.289.742.276
64	115	Bantuan Sosial	1.428.182.200	-	1.428.182.200	1.97.544.222.017
65	116	Bantuan Sosial	5.148.172.404.278	119.087.142.1821	5.029.085.262.096	4.467.574.478.017
66	117	Bantuan Sosial	-	-	-	2.121.512.481
JUNTAH			10.886.181.412.626	110.252.216.812.624	8.833.929.200.002	8.020.878.486.618

12/12/2011 10:00:00

LAPORAN KEUANGAN FISCAL TAHUN 2011 (2011/2011)

DIPA 03 10

**BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Ribu)

NO	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI			31 Desember 2010 Audited
			31 Desember 2011 Audited	BRUTO	PERYIBIHAN	
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	37.032.037	37.066.664	78.138.493	37.067.037
2	005	Mahkamah Agung	227.267.078	11.136.435	226.130.644	178.133.603
3	007	Sekretariat Negara	78.454.000	252.170	48.201.830	48.067.350
4	010	Kementerian Dalam Negeri	88.072.704	1454.864	88.937.840	3.604.814.386
5	011	Kementerian Luar Negeri	31.295.078.475	43.173.418.310	12.661.938	4.333.207
6	012	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6.237.920		6.237.920	4.514.883
7	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	138.960.300		168.680.500	-
8	016	Kementerian Keuangan	9.074.036.706	19.478.768.120	366.249.860	227.204.036
9	018	Kementerian Pertanian	595.011.000	276.854.267	318.156.733	2.207.042.247
10	019	Kementerian Perindustrian	36.346.821	337.749	60.078.072	7200.000
11	020	Kementerian ESDM	34.562.000	1472.210	54.089.190	15.000.000
12	022	Kementerian Perhubungan	48.170.400	120.652	48.639.340	3.206.666.491
13	023	Kementerian Pertambangan dan Energi	37.661.120		67.661.170	102.171.170
14	024	Kementerian Kesehatan	270.131.114	39.422.818	280.368.296	24.137.234
15	027	Kementerian Sosial	13.423.696	167.300	13.422.498	20.516.000
16	029	Kementerian Kehutanan	8.690.023.388	19.239.754.411	268.147.940	9.766.636.786
17	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	17.466.664	167.300	17.633.964	710.000
18	033	Kementerian Pekerjaan Umum	22.430.000	22.276.676	248.194.384	230.069.000
19	034	Kemendikbudang Puj. Jilid dan Pemanaran	8.840.000	154.200	8.685.800	8.840.000
20	036	Kemendikbudang Perencanaan				11.000.000
21	040	Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan				35.075.000
22	041	Kementerian Negara BUMN	4.063.038		4.063.038	-
23	044	Kementerian Negara SUKRI	48.868.800		48.638.800	83.626.642
24	050	Badan Intelijen Negeri				4.037.000
25	054	Badan Pusat Statistik	362.246.625	380.644.009	287.632.664	14.226.368.666
26	056	Kementerian Negara PPD Supenas	38.000.000	1.000.450	55.000.500	85.200.000
27	058	Badan Pertanahan Nasional	68.301.770	3.267.609	68.040.237	16.024.050
28	059	Kementerian Kominfo	134.576.406		164.376.436	93.712.840
29	060	Kapal Laut RI	44.666.702		44.666.702	66.679.627
30	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan				2.500.000
31	067	Kementerian Negara PDT	17.260.000	30.260.000	8.000.000	6.000.000
32	070	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	62.360.607	126.500	62.118.734	45.167.499
33	080	Badan Tenaga Kerja Nasional	4.217.551.028	3.78.400.243	3.829.140.785	1.200.000
34	081	Badan Pengawasan dan Inspeksi Teknologi	2.134.008	2.154.000	19.208.007	16.746.000
35	082	Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional	2.400.000	115.000	2.389.000	43.636.230
36	083	Resort Nasional	7.200.000	156.000	7.164.000	7.200.000
37	084	Badan Standardisasi Nasional				1.640.000
38	085	Badan Pengawas Tenaga Kerja	8.000.000	150.000	5.670.000	6.000.000
39	086	Lembaga Administrasi Negara	1.663.076.096	17.766.360	1.646.312.736	-
40	087	Aspi Nasional Fasilitas Indonesia				35.625.638
41	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.185.000	158.170	1.177.825	230.000
42	090	Kementerian Perdagangan	338.800.208	354.868.753	45.003.455	186.287.715
43	090	Komis Pemberantasan Korupsi	8.466.146	147.348	8.421.802	-
44	104	Badan Nasional Penegakan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	170.466.732	1062.464	168.646.230	143.604.429
45	108	Komis Pengawasan Peningkatan Usaha	173.000.207	138.050.207	3.680.000	-
46	696.08	PIU (Monev) lainnya	242.267.906	1.217.466	241.050.440	106.666.000
TOTAL			60.470.939.992	151.244.956.650	9.225.983.342	38.591.410.563

DAFTAR NERACA 346

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 11

**UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	Kementerian Negara/Lembaga	(Dalam Rupiah)	
		31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1	Badan Pemeriksa Keuangan	1.266.471.406	2.751.348.438
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Manajemen	1.192.330.134	1.194.147.308
3	Kepolisian Agung		20.960.000.000
4	Sekretariat Negara	89.052.473	61.506.737
5	Kementerian Dalam Negeri	61.141.626.775	-
6	Kementerian Luar Negeri	5.238.141.334	-
7	Kementerian Pertahanan		377.408.269.748
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.025.779.231	-
9	Kementerian Keuangan	28.225.040.672	33.201.365.732
10	Kementerian Pertanian	19.624.686	25.378.367
11	Kementerian Perhubungan	511.735.736	5.572.061.629
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	17.218.005.484	-
13	Kementerian Kesehatan	77.133.031.271	85.374.041.336
14	Kementerian Agama	1.774.576.637	3.368.667.258
15	Kementerian Sosial	5.670.246.200	-
16	Kementerian Kehutanan	277.473.187	152.667.228
17	Kementerian RT	50.730.484	128.591.636
18	Kementerian Pekerjaan Umum	50.375.000	38.618.057
19	Kementerian Yudisial	6.069.127.750	2.569.140.125
20	Kementerian Lingkungan Hidup		-
21	Badan Asal Statistik	476.850.688	1.295.769.112
22	Badan Perencanaan Nasional	21.021.064	1.250.000
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	277.227.137.290	180.554.002
24	Kepolisian RI	120.331.100	-
25	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	7.241.769.771	38.666.667
26	Badan Karantina Nasional	451.200.000	388.296.233
27	Badan Vektorologi, Klimatologi dan Geofisika	5.537.000	-
28	Komis Pemilihan Umum	15.000.000	-
29	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	11.867.670	5.520.590
30	Badan Koordinasi Survei dan Inventarisasi Nasional	77.308.636.628	-
31	Badan Standardisasi Nasional		-
32	Lembaga Administrasi Negara		107.710
33	Badan Kapabilitas Negara	107.775.000	12.085.426.204
34	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	805.942.677	-
35	Kementerian Padagogik	24.152.707.302	37.676.466.875
36	Kementerian Penerimaan Rakyat	82.400.000	-
37	Komis Pemilihan Umum Nasional	511.572.225	83.181.507
38	BBR NAB - Inas		29.095.718.910
39	Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi	377.510.250	-
40	Badan Nasional Pengendalian Ransum	2.223.203.837	-
41	Badan Nasional Penempatan dan Pemincungan Tenaga Kerja Indonesia	211.130.000	-
42	Lembaga Keuangan Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah	3.034.861.313	7.520.510.350
43	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.187.079.075	-
44	BUN (dalam lainnya)		9.357.734.801
	TOTAL	1.270.165.315.147	614.122.632.355

DAFTAR NERACA 346

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 13

**PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2.704.250.390	3.101.340.008
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	14.613.638.516	10.382.651.284
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	17.178.887.432	10.727.245.088
4	005	Mahkamah Agung	12.404.808.724	12.517.840.795
5	006	Cepkemas Agung	278.882.062.878	31.988.453.287
6	007	Sekretariat Negara	97.626.516.572	31.288.430.725
7	007	PLU Sekretariat Negara	74.100.698.902	73.798.841.748
8	010	Kementerian Dalam Negeri	51.310.707.266	4.455.852.476
9	011	Kementerian Luar Negeri	70.281.389.138	17.06.230.813
10	012	Kementerian Pertahanan	46.200.248.007.363	26.136.823.677.708
11	018	Kementerian Dalam Negeri HAM RI	274.316.072.768	140.654.654.171
12	015	Kementerian Keuangan	282.731.013.571	251.137.038.102
13	015	PLU Kementerian Keuangan	1.107.528.165	1.583.323.824
14	016	Kementerian Pertanian	148.145.604.310	48.571.353.058
15	018	PLU Kementerian Pertanian	10.292.297.371	-
16	018	Kementerian Perindustrian	8.135.508.898	5.221.331.601
17	020	Kementerian ESDM	297.242.280.202	268.580.638.088
18	022	Kementerian Perhubungan	749.278.638.230	1.050.708.825.328
19	022	PLU Kementerian Perhubungan	1.170.208.883	798.324.278
20	028	Kementerian Perdagangan	143.290.602.535	130.608.176.355
21	028	PLU Kementerian Perdagangan	147.733.428.887	73.295.442.441
22	024	Kementerian Kesehatan	490.573.054.941	369.498.047.798
23	024	PLU Kementerian Kesehatan	259.696.258.207	247.390.631.518
24	025	Kementerian Agama	61.710.852.238	29.614.825.131
25	025	PLU Kementerian Agama	3.832.508.518	7.637.474.822
26	026	Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja	167.185.665.697	70.578.662.455
27	026	PLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi	603.425.378	225.618.224
28	027	Kementerian Sosial	265.705.082.508	262.308.066.478
29	028	Kementerian Kehutanan	27.267.652.654	25.506.067.292
30	022	Kementerian Kesehatan dan Perikanan	745.794.093.748	31.205.152.652
31	033	Kementerian Pekerjaan Umum	401.248.081.555	775.314.675.738
32	038	PLU Kementerian Pekerjaan Umum	-	8.244.200
33	034	Kementan Bicara Kebijakan Keselamatan	148.727.235	198.172.250
34	035	Kementan Bicara Perencanaan	207.875.501	315.220.607
35	036	Kementan Bicara Kesehatan Rakyat	674.294.157	8.196.417
36	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	150.087.998.280	18.152.547.711
37	041	Kementerian Negara RI/MP	1.352.542.207	621.088.275
38	042	Kementerian Negara RI/SD dan Teknologi	0.296.354.452	4.705.738.542
39	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	17.284.283.255	5.200.052.051
40	044	Kementerian Negara RI/PM	280.480.075	24.326.375
41	044	PLU Kementerian Negara RI/PM	497.460.035	300.458.856
42	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	3.230.142.221	7.108.060.323
43	048	Kementerian Negara RI/AM	834.284.347	234.272.878
44	050	Badan Intelektual Nasional	8.278.072.297	2.578.453.077

DAFTAR NERACA 348

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 13

**PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
45	251	Lembaga Kerja Negara	9.871.455.194	1.837.910.018
46	252	Trojan Korban dan Nasional	2.414.000	4.475.000
47	254	Zecan Pusat Statistik	18.293.518.208	20.780.532.841
48	255	Semen aron Negara PPA-Bepenas	1.535.774.408	1.490.245.008
49	256	Zecan Perumahan Nasional	55.078.268.898	50.550.757.478
50	257	Parutnakaan has onia Redup Indonesia	1.411.258.784	1.287.338.615
51	258	Semen aron Kombi	58.278.298.428	24.587.577.858
52	259	RIH Kementerian Kaminia	11.178.209.010	1.278.340.750
53	260	Keplisian RI	2.458.580.229.880	1.322.552.761.774
54	268	Zecan Pegawai Obat dan Kesehatan	83.502.750.532	48.524.018.500
55	264	Lembaga Kristiana Nasional	368.644.130	1.005.022.788
56	265	Zecan Koordinasi Panataman Model	6.130.770.588	3.496.119.882
57	268	Zecan Markotika Nasional	18.551.278.514	10.787.471.508
58	267	Kementerian Negara PNT	12.310.009.280	1.297.413.144
59	238	Zecan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	688.571.788.111	521.427.671.438
60	274	Acnisi Kes onal dan Asasi Manusia	38.402.368	08.238.750
61	275	Zecan Mitigasi, Klimatologi, dan Biofisika	28.246.417.380	35.350.514.442
62	276	Acnisi Pem lihan Lahan	495.217.642.488	425.220.524.572
63	277	Multikemari Komisi RI	1.475.252.202	1.044.225.837
64	276	Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan	585.620.672	475.557.170
65	278	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	5.776.377.174	3.514.057.270
66	280	Zecan Tenaga Kultur Nasional	55.303.750.178	42.338.334.778
67	281	Zecan Pengajaran dan Penerapan Teknologi	11.202.574.374	10.448.634.406
68	281	BLU Badan Pengajaran dan Penerapan Teknologi	10.759.135	-
69	282	Lembaga Penerangan dan Antiterror Nasional	28.107.781.394	13.315.172.818
70	282	RIH Lembaga Penerangan dan Antiterror Nasional	84.270.640	08.087.650
71	283	Zecan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	21.234.888.333	28.726.818.004
72	284	Zecan Sterilisasi Nasional	150.822.760	12.280.820
73	285	Zecan Pegawai Tenaga Kultur	296.685.538	450.332.070
74	286	Lembaga Administrasi Negara	1.538.830.318	1.181.851.328
75	287	Asip Nasional Republik Indonesia	234.781.177	221.380.507
76	286	Zecan Pegawai Tenaga	10.228.132.818	34.570.846.418
77	288	Zecan Pegawai Keuangan dan Pembangunan	5.234.852.211	7.400.837.030
78	290	Kementerian Perdagangan	8.288.850.577	5.205.350.840
79	291	Kemen Perumahan Rakyat	1.516.121.85.418	130.858.630.758
80	291	BLU Kemen Perumahan Rakyat	31.155.200	-
81	292	Kemen Pemuda dan Olah Raga	72.788.750.273	7.215.750.815
82	293	Acnisi Damanantasi Nasional	12.180.850.475	16.511.660.450
83	294	RFK NAD - Nias	28.251.23.713	28.251.23.713
84	295	Lewan Perwakilan Daerah	1.572.238.572	1.500.517.877
85	300	Kemen Yustisial RI	245.679.231	1.206.355.800
86	303	Zecan Nasional Perang Jajangan Bencana	355.130.770.110	10.293.374.728

DAFTAR NERACA 349

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 13

**PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
87	104	Zecan nasional Perembeter dan Parilindungan Tenaga Kerja Indonesia	70.278.330.333	37.387.745.217
8E	105	Zecan Peranggulangan Lumpur Sidoarjo	3.401.733	3.335.500
8F	106	Lembaga Keti dan Pengacuan BerangJasa Pemerintah	1.306.298.501	1.388.340.451
9C	107	Zecan SAR	8.096.198.020	5.074.112.677
91	10E	icmisi Pergawas Parsangan Usaha	1.170.552.59E	727.358.291
92	10F	Zecan Pengembangan Wilayah Sumatera	8.408.500	-
93	11C	Dirhubsman Rapuan Indonesia	98.182.530	-
94	111	Zecan nasional Pengelola Parbetatar	452.272.20E	-
95	200.01	PLN (Subsidi)	4.947.000.000	1.753.007.130.505
96	200.03	PLN (Bchaya lainnya)	2.671.216.019.618	2.661.316.032.742
JUMLAH			59.214.346.453.180	38.388.080.681.005

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA TAHUN 2011

LOH/P/14.42

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMI TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

NO	SEKTOR	BUMI	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN K LAIN - LAIN	EBIT	BEMAS BUNGA	LABA SEBELUM PAJAJI	PAJAJI	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HUKUM	HUKUM	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 - 11 - 2	4	5	6 - 3 - 4 - 7	8 - 10 - 7	9	10 - 10 - 11	11 - 10 - 11	12 - 10 - 11	13	14 - 11 - 13
1	Perkebunan	P Perkebunan Nusantara I	Quarter 2011	7.750,00	65.220	66.970	66.655	68.534	70.305	39.035	10.302	54.105	(51.420)	102.007	19	102.007
2		P Perkebunan Nusantara II	Quarter 2011	1.317.752	1.431.333	1.116.419	291.238	311.587	179.213	38.001	4.541	53.185	(51.420)	83.35		83.35
3		P Perkebunan Nusantara III	Quarter 2011	2.578.569	2.831.281	1.370.072	95.635	121.270	1.728.207	45.252	425.752	1.290.333	(290.272)	290.272	112	1.290.333
4		P Perkebunan Nusantara IV	Quarter 2011	5.971.020	6.221.740	1.311.500	192.610	709.477	1.358.078	139.472	321.400	387.318	(387.318)	2.410	2.410	2.410
5		P Perkebunan Nusantara V	Quarter 2011	4.950.700	4.403.350	647.320	44.477	36.740	520.643	63.253	437.250	370.005	(370.005)	370.005	370.005	370.005
6		P Perkebunan Nusantara VI	Quarter 2011	1.238.614	2.051.328	207.206	33.070	18.700	250.523	73.054	23.633	78.135	(78.135)	178.726	3.270	178.726
7		P Perkebunan Nusantara VII	Quarter 2011	4.323.292	4.244.820	208.059	57.030	19.214	477.119	200.256	2.172	53.430	(53.430)	133.411		133.411
8		P Perkebunan Nusantara VIII	Quarter 2011	2.351.887	1.691.265	362.626	14.720	96.214	341.311	1.078	321.331	250.344	(250.344)	233.891	367	233.891
9		P Perkebunan Nusantara IX	Quarter 2011	1.638.400	1.032.852	605.548	27.257	125.289	450.265	63.023	47.733	30.130	(30.130)	315.103	10.762	304.341
10		P Perkebunan Nusantara X	Quarter 2011	2.110.000	1.924.139	225.861	85.177	51.719	269.155	41.487	27.030	51.100	(51.100)	155.142	340	155.142
11		P Perkebunan Nusantara XI	Quarter 2011	1.557.990	1.621.949	33.959	43.229	50.513	41.23.823	48.326	(12.829)	(12.829)	(12.829)	(12.829)		(12.829)
12		XI	Quarter 2011	1.271.873	1.012.052	189.821			125.261	18.231	90.259	(90.259)	(90.259)	(90.259)		(90.259)
13		P Perkebunan Nusantara XII	Quarter 2011	3.516.206	3.382.252	233.954	164.837	133.661	277.169	37.406	244.763	20.257	(20.257)	184.506	16.170	168.336
14		P Perkebunan Nusantara XIII	Quarter 2011	42.226	221.247	203.021	3.944	10.344	(1.30.820)	43.722	(144.221)	(6.740)	(6.740)	(6.740)		(6.740)
15		P Rancangan Perusahaan	Unaudited 2011	4.343.503,02	4.071.350,52	268.083	33.952,35	136.471,39	156.229		196.022	75.227,63	(75.227,63)	119.794	(75.227,63)	44.566,37
16	Bank	P Perbankan	Unaudited 2011	2.157.623	2.837.729	268.006	15.650	36.710	(46.272)		(46.272)	(11.762)	(11.762)	(11.762)		(11.762)
17		P Perbankan	Unaudited 2011	1.125,82	1.252,5	327	2.020	10.473	9.651		9.651	9.651	(9.651)	9.651		9.651
18		P Perbankan	Unaudited 2011	40,02	19,049	33,982	1,044	2,061	(37,001)		37,001	(37,001)	(37,001)	37,001		37,001
19		P Perbankan	Unaudited 2011	7,470	2,05	63,340	1,053	315	41	59	(60)	(60)	(60)	(60)		(60)

DUKUP MERCU 236

LOH-PP-14.42

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA TAHUN 2011

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMI TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

NO	SEKTOR	BUMI	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA K LAIN - LAIN	PENDAPATAN K LAIN - LAIN	EBIT	BEMAS BUNGA	LABA SEBELUM PAJAJI	PAJAJI	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HUKUM MUDRITAS	HUKUM MUDRITAS	LABA RUGI BERSIH	(Rp. Juta)
20		Pt. Hutanriah	Quifinal 2011	31.289	30.345	1.90	2.22	4.200	6.91	6.91	0	6.223	0.222	2.222	0.222	6.222	
21		Pt. Hutanriah	Luasfinal 2011	-	4.300	4.300	2.976	408	4.88	2.94	2.94	185	0.95	35	95	95	
22	Perdagangan	Pt. Perdagangan Nusantara	Luasfinal 2011	63.352	61.263	2.089	1.716	1.203	5.772	5.772	0	5.529	0	5.529	0	5.529	
23		Pt. PPR	Luasfinal 2011	134.930	134.930	0	2.242	19.117	3.624	3.624	0	4.125	0	4.125	0	4.125	
24	Perdagangan	Pt. Perdagangan Nusantara	Luasfinal 2011	24.833.282	23.232.852	1.600.430	1.156.754	1.614.579	11.758.113	11.758.113	31.272	956.941	0	956.941	0	956.941	
25		Pt. Sanyo Pulp & Sawi	Luasfinal 2011	2.931.029	2.915.826	1.72.203	62.026	18.220	147.433	147.433	21.203	70.805	0	70.805	0	70.805	
26	Perdagangan	Pt. Perini	Luasfinal 2011	2.128.416	2.094.120	34.296	12.948	38.230	41.275	41.275	10.208	1.905	0	1.905	0	1.905	
27	Perdagangan	Pt. Perini	Luasfinal 2011	40.772.094	23.028.222	1.335.228	94.432	6.116.222	52.22.260	52.22.260	1.305.8	5.089.980	0	4.089.980	0	4.089.980	
28	Perdagangan	Pt. Perdagangan Nusantara	Luasfinal 2011	259.620	220.255	39.365	7.223	1.215	59.122	59.122	12.822	43.437	0	43.437	0	43.437	
29	Perdagangan	Pt. Perdagangan Nusantara	Luasfinal 2011	509.402	326.892	172.510	14.171	2.408	29.591	29.591	6.820	18.326	0	18.326	0	18.326	
30	Perdagangan	Pt. Perdagangan Nusantara	Luasfinal 2011	12.246.433	8.232.852	4.013.581	683.220	40.713	7.551.024	7.551.024	642.520	1.872.207	0	1.872.207	0	1.872.207	
31		Pt. Tindak Tindak	Luasfinal 2011	3.740.613	6.372.326	1.932.713	31.079	7.6.829	1.222.721	1.222.721	371.720	856.505	0	856.505	0	856.505	
32		Pt. Bukit Jaya Tbk	Luasfinal 2011	1.551.577	5.324.522	52.782.274	421.226	1.341.113	4.029.104	4.029.104	971.237	2.023.207	0	2.023.207	0	2.023.207	
33		Pt. Gunung Karya	Luasfinal 2011	48.529	28.795	1.934	1.851	1.008	10.432	10.432	0.132	3.207	0	3.207	0	3.207	
34	Perdagangan	Pt. Perdagangan Nusantara	Luasfinal 2011	38.225.526	51.821.526	13.595.999	2.802.573	5.570.202	41.121.226	41.121.226	8.322.526	20.522.883	0	20.522.883	0	20.522.883	
35		Pt. PRT Tbk	Luasfinal 2011	11.527.487	11.225.229	302.258	477.524	587.229	7.624.120	7.624.120	1.122.229	3.222	0	3.222	0	3.222	
36		Pt. Lintas Nusantara	Luasfinal 2011	2.006	19.576	17.570	1	2.229	0.072	0.072	0	0	0	0	0	0	
37		Pt. Bumi Teja	Luasfinal 2011	22.728	21.224	1.504	1.172	1.511	13.922	13.922	0	832	0	832	0	832	
38	Perdagangan	Pt. Bumi Teja Tbk	Luasfinal 2011	12.448.722	1.521.241	4.322.2	226.222	27.20	5.029.222	5.029.222	1.241.222	3.882.222	0	3.882.222	0	3.882.222	
39		Pt. Bumi Teja Tbk	Luasfinal 2011	1.220.522	7.229	302.010	22.229	1.228	323.029	323.029	3.222	25.229	0	25.229	0	25.229	
40		Pt. Bumi Teja Tbk	Luasfinal 2011	9.210	2.240	7.223	224	7.697	25.228	25.228	17.620	117.620	0	117.620	0	117.620	
41	Perdagangan	Pt. Bumi Teja Tbk	Luasfinal 2011	1.325.614	1.514.221	1.440.222	15.026	120.512	132.526	132.526	4.228	126.229	0	126.229	0	126.229	
42		Pt. PA Indonesia	Luasfinal 2011	226.221	22.221	1.822.221	32.126	120.221	12.221	12.221	12.221	0	0	0	0	0	

DAFTAR MENCAKUP

LAPPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA TAHUN 2011

LOH/PP/14.42

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMI TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

NO	SEKTOR	BUMI	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN K LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEMAS BUNGA	LABA SEBELUM PAJAJI	PAJAJI	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HUKUM MINDIRITAS	HUKUM MINDIRITAS	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 - 11 - 2	4	5	6 - 3 - 4 - 5 - 7	8	9	10 - 10 - 11	11	12 - 10 - 11	13	14 - 11 - 13	
43	P. Pindur		Quifinal 201	1.225.802	1.473.16	1.023.24	51.040	22.364	120.132	37.922	68.211	2.302	43.203	43.203	47.202	-	47.202
44	P. Debarz		Quifinal 201	385.512	543.77	51.98	4.828	-	50.023	39.023	10.552	10.552	43.183	13.241	47.411	-	47.411
45	P. Ekastra Steel Tbk		Quifinal 201	17.315.582	7.352.311	328.57	191.857	372.361	1.120.587	1.120.587	38.22	38.22	1.022.513	-	1.022.513	12.175	1.022.513
46	P. Kencana Star, SA		1E. K. 11 - 110	520.828	552.973	67.713	3.161	2.667	51.533	71.750	1.262	1.262	31.389	-	29.281	-	29.281
47	P. Binasidone		Quifinal 201	9.540.0	6.720.7	38.016	4.420	5.429	76.447	2.715	23.333	9.414	14.534	-	4.064	-	14.534
48	P. Rawa Rawa (11)		Quifinal 201	125.729	75.870	6.027	3.410	925	11.582	5.147	17.331	-	7.331	-	17.331	-	17.331
49	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	470.087	452.22	69.544	51.677	-	48.732	48.732	3.287	3.287	43.493	-	43.493	-	43.493
50	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	265.627	33.768	33.724	4.140	12.577	75.237	3.654	3.654	3.642	0.341	-	0.281	-	0.281
51	P. Deltadigital Debar		1E. K. 11 - 110	410.27	56.283	32.3	-	-	3002	-	3021	12.102	3002	-	3021	-	3021
52	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	87.988	28.793	35.071	201.632	16.278	140.880	-	140.53	12.102	41.382	-	118.632	-	118.632
53	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	170.002	35.700	0.524	5.517	3.330	11.251	50.4	6.35	2.500	3.235	-	2.025	-	2.025
54	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	130.320	24.326	1.402	3.674	2.337	1.892	1.892	-	1.892	2.073	-	1.892	-	1.892
55	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	151.203	212.432	37.357	34.834	11.230	124.512	27.252	26.821	110.272	156.139	-	35.821	-	35.821
56	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	32.719	9.240	7.026	11.750	7.04	46.272	5.425	22.024	432	122.474	-	22.437	-	22.437
57	P. Deltadigital Debar		1E. K. 11 - 110	1321.013	1.023.25	282.763	67.022	31.222	251.272	26.372	26.372	26.372	254.207	122.200	24.107	-	24.107
58	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	81.577	5.232	3.025	2.246	6.602	16.002	1.940	4.252	1.533	2.445	-	3.442	-	3.442
59	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	41.96	30.825	27.230	44.210	9.724	7.651	2.242	5.77	5.77	5.77	-	5.77	-	5.77
60	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	350	2.236	11.640	1.673	202	202	-	202	-	202	-	202	-	202
61	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	4.522	64.306	300.407	14.278	46.219	1110.612	5.025	122.221	120.397	120.397	11.244	312.231	-	312.231
62	P. Deltadigital Debar		Quifinal 201	22.377	22.377	22.377	230	633	120.277	31.927	319.234	120.234	120.234	-	319.234	-	319.234

DAFTAR MENGENAL 230

LOH/PP/14.42

LAPPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA TAHUN 2011

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMIH TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

NO	SEKTOR	BUMIH	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN K LAIN - LAIN	BEBAN K LAIN - LAIN	EBIT	BEMBUK BUNGA	LABA SEBELUM PAJAJI	PAJAJI	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM H NI MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 - 11 - 2	4	5	6 - 3 - 11 - 7	8	9	10 - 11 - 12	13 - 14 - 15	16 - 17 - 18	19	20 - 21 - 22	
100		P. Kawasan Industri	Quartal 2011	7.760	12.117	5016	587	5	5.602	7	5.602	1.776	4.533	19039	5032	11 - 112-13	5.032
104		P. PUP Djarum	Quartal 2011	6.399	31.242	13.261	1.777	762	12.261	452	12.261	2.205	2.205	12.209	12.209	12 - 209	12.209
105	Perdagangan	P. Gunung Kidul Pasopis	Quartal 2011	754.536	754.182	5.053	333	2.696	802	578	802	425	2.205	574	574	13 - 170-171	5.032
105	Perbankan	P. Bank Pembangunan Daerah	Quartal 2011	497.053	479.208	17.845	4.419	4.638	54.721	11.173	54.721	425	2.205	574	574	13 - 170-171	5.032
105	Perbankan	P. Bank Perkotaan	Quartal 2011	43.028.002	18.056.101	24.971.901	17.922.371	13.629.201	11.302.235	16.672.035	3.813.170	3.813.170	2.895.885	214.270	17.270.065	44.524	17.029.616
105	Perbankan	P. Bank BNI Tbk	Quartal 2011	44.154.540	3.752.272	40.402.268	3.205.089	22.077.205	3.792.800	13.772.900	3.025.562	205.255	5.000.295	14.079.491	3.200	14.079.491	3.200
105	Perbankan	P. Bank BJB Tbk	Quartal 2011	2.321.792	7.495.052	11.153.218	1.710.338	2.490.583	1.521.266	7.249.305	1.652.250	5.800.295	6.623.681	5.800	34	18.278	2.027.877
111	Keuangan	P. BANK BTPN Tbk	Quartal 2011	2.038.2	8.972.372	1.555.739	1.555.739	3.489	1.522.260	423.589	1.522.260	1.18.381	8.6730	10.68.201	1.028.201	1.028.201	1.028.201
112		P. JAWABARA	Quartal 2011	545.572	5.054.323	360.332	41.829	4.423	357.659	307.542	307.542	356.232	205.822	205.822	205.822	205.822	205.822
112		P. ASAPRI	Quartal 2011	1.555.268	1.485.847	76.401	76.415	4.423	76.415	4	76.415	4	76.401	76.401	76.401	76.401	76.401
113		P. JAWABARA	Quartal 2011	1.628.268	3.432.770	1.804.502	3.029	400	1.154.537	2.084.637	511.2	2.084.637	2.083.523	2.083.523	2.083.523	2.083.523	2.083.523
114		P. TABREK	Quartal 2011	15.079.487	4.484.522	9.594.965	675.171	2.577	5.942.862	5.942.862	5.942.862	5.942.862	5.942.862	5.942.862	5.942.862	5.942.862	5.942.862
115		P. ASKES	Quartal 2011	2.242.811	8.972.372	301.029	675.171	2.577	1.577.272	321.2	1.577.272	321.2	1.438.235	1.255	1.438.235	1.438.235	1.438.235
115		P. JASINDO	Quartal 2011	1.355.414	1.051.322	3.2.022	1.051.322	1.051.322	3.2.022	3.2.022	3.2.022	3.2.022	3.2.022	3.2.022	3.2.022	3.2.022	3.2.022
117		P. RLI	Quartal 2011	372.062	3.063.210	2.701.248	1.226	4.423	31.522	3.000	31.522	3.000	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
118		P. JAWABARA	Quartal 2011	3.575.629	2.752.629	1.261.701	691.211	1.069	1.752.271	372.252	1.752.271	372.252	1.424.267	562.76	2.647.782	1.063	1.264.912
118		P. ASH	Quartal 2011	2.01.532	1.98.211	67.144	182	3.809	3.809	1.047	67.696	1.047	3.700	61.024	61.024	61.024	61.024
121	Perdagangan	P. ASKES	Quartal 2011	3.575.629	2.752.629	1.261.701	1.226	4.423	31.522	3.000	31.522	3.000	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
121	Perdagangan	P. PT. JAWABARA	Quartal 2011	3.086.821	5.912.211	3.3.15	62.128	2.268	378.266	62.128	378.266	62.128	372.271	1122	372.271	372.271	372.271
121	Perdagangan	P. PPA	Quartal 2011	7.552.452	7.024.051	528.401	47.025	1.025	7.525.026	54.545	7.525.026	54.545	251.232	27.577	280.332	280.332	280.332
122		P. Danesko	Quartal 2011	252.422	32.802	32.802	45.417	1.025	159.277	2.0017	2.0017	2.0017	2.0017	2.0017	2.0017	2.0017	2.0017
124		P. Perumusan Negara	Quartal 2011	50.122	694.422	42.14	82.26	20.17	49.242	1.114	49.242	1.114	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26
125		P. in Papua	Quartal 2011	1.520.028	4.674.239	1.976.621	77.426	1.823	7.027.252	774.216	7.027.252	774.216	1.426.236	1.426.236	1.426.236	1.426.236	1.426.236

DAFTAR MELAKUKAN

LAPORAN KEUANGAN TERKORPORASI TAHUN 2011/2012

LOHPP 14.42

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMI TANIUM 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH**

ID	SEKTOR	BUMI	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN-LAIN	EBIT	BEMAS BUNGA	LABA SEBELUM PAJAJI	PAJAJI	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HUKUM	HUKUM	LABA RUGI BERSIH
125		P. P. Air, Madu, Fructose	Quartal 2011	308.402	20.100	3-11-20	1	8-3-14-15	7	1-10-7	8	10-10-81	11	11-10-11	13	11-11-13
125		P. Balsa	Quartal 2011	3.780	31.302	100.304	25.813	120.325		100.025	30.386	30.623		30.323		30.323
125		P. Pasir	Quartal 2011	2.737.920	2.737.920	100.218	51.719	139.285		139.285	23.785	23.302	271.429	139.237	45.151	116.353
125		P. Asap	Quartal 2011	763.649	230.005	2.343	13.815	18.765		8.745	3.170	13.349		15.643		15.643
125		P. Kayu	Quartal 2011	540.763	372.365	37.627	14.235	37.627		37.627	35.155	37.382	1086	35.783		35.783
131		P. Kayu	Quartal 2011	1.479.076	1.371.388	100.357	5.946	114.303	3.256	107.915	21.590	24.228	1.156	64.092	1300	64.294
132		P. Biji	Quartal 2011	231.082	231.297	68.788	3.851	1.799		66.342	18.263	5.380		21.932		21.932
132		P. Biji	Quartal 2011	703.329	236.949	6.283	31.325	25.123		30.123	9.106	33.525		25.072		25.072
134		P. Kayu	Quartal 2011	1.11.35	33.937	27.726	1.250	18.517		16.817	4.201	13.225		13.812		13.812
135		P. Kayu	Quartal 2011	8.749	59.075	31.418	21.270	42.252		42.252		42.252	11.77	45.747	1111	46.55
135		P. Kayu	Quartal 2011	301.388	67.313	8.173	5.823	8.329	3.844	12.681	72.383	2.284		2.904	151	2.986
135		P. Kayu	Quartal 2011	4.320.479	2.821.252	1.251.368	28.719	1.738.575	240.422	1.729.475	437.251	1.318.224	12.786	32.282	130.236	1.389.222
135		P. Kayu	Quartal 2011	263.764	252.479	40.835	24.873	27.422		27.772	7.270	30.253		21.052		21.052
135		P. Kayu	Quartal 2011	3.230.629	2.821.143	131.480	43.144	136.463		136.463	1.487	44.58	946	144.432	442	145.387
142		P. Kayu	Quartal 2011	33.002	20.724	27.28	25.040	4.745		4.745	0.209	40.287		41.337		40.387
141		P. Kayu	Quartal 2011	1.205	3.201	1.066	122	12.375		12.375	182	11.501		11.887		11.887
		GRAND TOTAL	141	1.371.041.018	1.158.340.059	2.114.013.311	451.50.811	813.71.351	132.12.718	107.100.151	481.20.359	120.220.883	1.563.551	121.31.268	8.188.748	115.912.601

DAFTAR MERKAS 332

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 14.C

**Daftar BPYBDS pada BUMN
PER 31 Desember 2011**

No.	BUMN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
1	Perum DAMRI	161.462.000.000,00	145.810.132.570,00
2	Perum PPD	67.770.841.818,00	67.770.841.818,00
3	PT Kereta Api Indonesia	826.546.294.645,00	826.546.294.645,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara	28.048.436.783.477,00	36.028.022.757.584,00
5	Perum Jasa Tirta I	1.131.342.305,00	1.131.342.305,00
6	PT Angkasa Pura I	3.383.080.807.000,00	1.658.828.138.178,01
7	PT Angkasa Pura II	2.221.583.000.000,00	2.065.258.136.834,68
8	Perum BULOG	670.113.824.005,00	751.818.346.381,00
9	PT Pelindo I	435.790.297.506,00	56.800.815.000,00
10	PT Pelindo II	0,00	7.652.876.000,00
11	PT Pelindo III	209.730.528.118,00	209.730.528.118,00
12	PT Pelindo IV	68.176.454.500,00	320.700.155.600,00
13	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	1.304.818.487.854,00	1.047.255.575.783,00
14	Perum Percetakan Negara Indonesia	1.003.285.000,00	506.280.000,00
15	Perum Prasarana Perikanan Samudra	47.036.685.555,00	47.036.685.555,00
16	PT Djakarta Lloyd	667.188.771.346,05	667.188.771.346,05
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia	2.997.874.185.088,93	2.931.814.461.210,00
18	Perum Perumnas	5.068.434.600,00	5.068.434.600,00
19	PT Pos Indonesia	28.936.024.480,00	21.325.953.360,00
20	Perum LKBN Antara	0,00	25.927.871.802,00
21	PT Pengcrukan Indonesia	0,00	58.688.872.481,05
22	Perum produksi Film Negara (PFN)	14.903.777.061,00	14.903.777.061,00
23	PT Pertamina	520.817.982.842,48	588.201.837.308,47
24	PT Geo Dipa Energi	1.670.877.372.176,00	0,00
Jumlah		44.364.558.169.478,40	47.527.099.986.351,20

DAFTAR 365

LAPORAN KELOMPOK PEMERINTAH RI (SATU LAPORAN 2011) (2009/2012)

LAMBAR 15

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS
PER 31 DESEMBER 2011**

						(Dalam Rp)
No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31	
1	PT Persepsi Geoteknologi (NGLMI)	Audited 2011 (31 Maret 2011)	41,12%	8.384.035.677,712	3.494.149.638,058	
2	PT Surokaya Industri dan Logistik (SHE)	Audited 2011	60,00%	274.367.675,116	114.483.638,058	
3	PT Jayawati Fresh Estate Pulpating (JIEF)	Unaudited 2011	50,00%	210.052.203,000	105.026.101,000	
4	PT Asean Aceh Fertiza	Proses Likuidasi			-	
5	PT Asean Copper Product	n.a.			-	
Jumlah I					1.668.859.494,413	
No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Barito Bakso	Audited 2011	A	0,08%	4.735.255	47.362.550,000
		Audited 2011	E	13,00%	1.034.532.376	133.425.237,600
2	PT Bekasari Industri (BEKIND)	Audited 2011		4,97%	22.366	22.366,000,000
3	PT Bencor Indonesia	Unaudited 2011	Ins	9,00%	21.330	19.214.140,000
4	Sertas Palangrang	Unaudited 2011		1,74%	24.000	24.000,000,000
5	PT Binasat, Inc.	Audited 2011	Str. B	14,25%	776.674.945	11.662.439,000
6	PT Waskita Karya	Audited 2011		1,00%	100.000	100.000,000,000
7	PT Ecoindo	Unaudited 2011	Ser. D			265,000
		Unaudited 2011	Ser. C		2.955	794.735,000
		Unaudited 2011	Ser. D		2.000	3.430,000,000
		Unaudited 2011	Total	10%	42.250,000,000	
8	PT Pesisir panyuh Limbah Industri (PPLI)	Audited 2010			40.576.223,000	2.479.011,250
9	PT Asean Britulu Fertizer	Audited 2010		13%	39,000	111.261,075,000
JUMLAH II					593.097.113,750	
JUMLAH I + II					4.261.956.608,163	

LAMBAR 16/14/366

LEMBAGA

REKAM-REKAM PERENCANAAN FISKAL TAHUN 2011 DAN 2012

ASET TETAP PADA KLONAN BUIH
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No	BA	Keterangan	TAHUN		PRORATA	PERMUTASIAN		Jumlah	KUMULASI	KUMULASI	KUMULASI	KUMULASI
			2010	2011		2010	2011					
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

01/0000000000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (4002770)

Dit. 28/12/11

**TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2011 Audited			31 Desember 2010
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	Audited
1	004	BPK	1.773.348.370	(1.778.343.870)	-	1.431.709.351
2	005	BA	1.927.636.701	(1.903.816.849)	123.819.851	417.117.711
3	006	Kelembagaan Agung	348.914.611	-	348.914.611	4.114.300
4	007	Bank Negara	58.053.000	(790.475)	57.262.525	-
5	010	Gubernur Dalam Negeri	10.473.085.531	-	10.473.085.531	243.145.278
6	011	Gubernur Luar Negeri	1.626.200.400	(337.371)	1.625.863.029	4.131.974.529
7	012	Gubernur Pemerintahan	4.241.250.381	-	4.241.250.381	735.434.709
8	013	Gubernur Hukum dan HAM RI	421.564.049	-	421.564.049	3.402.053.371
9	014	Gubernur Keuangan	28.441.840	(137.218)	28.304.622	811.411.341
10	016	Gubernur Peranan	2.147.094.820	(1.840.438.733)	306.656.087	7.949.871
11	015	Gubernur Perindustrian	1.010.051.000	(935.475)	1.010.186.475	51.750.343
12	020	Gubernur ESDM	33.357.000	(39.042.360)	33.314.640	481.841.357
13	022	Gubernur Perhubungan	423.135.811	(1.312.741)	421.823.070	-
14	023	Gubernur Pendidikan Nasional	12.350.000	-	12.350.000	131.000.000
15	028	III Kementerian Pendidikan Nasional	124.000.000	-	124.000.000	-
16	024	Gubernur Kesehatan	838.088.352	(37.033.384)	801.054.968	811.481.742
17	024	III Kementerian Kesehatan	21.900.000	-	21.900.000	21.900.000
18	025	Gubernur Agama	-	-	-	4.050.200
19	026	Tenaga Kerja dan Tenaga Jasa	-	-	-	-
20	027	Gubernur Sosial	651.024.381	(334.233.300)	316.791.081	7.324.300
21	021	Gubernur Ketahanan	-	-	-	34.991.481
22	027	Gubernur Ketahanan dan Perikanan	-	-	-	14.993.872
23	023	Gubernur Pekerjaan Umum	54.301.538.883	(348.183.108)	53.953.355.775	11.818.900.473
24	024	Gubernur Bidang Politik dan Kasemanan	51.121.044	(133.601)	50.987.443	40.372.620
25	040	Gubernur Kewarganegaraan dan Parawisata	135.260.031	(171.310.351)	24.949.680	201.743.331
26	041	Gubernur Negara S. MA	65.911.692	-	65.911.692	-
27	043	Gubernur Negara Inggris-Indop	1.861.000.000	-	1.861.000.000	1.941.000.000
28	044	Gubernur Negara S. CM	114.408.084	-	114.408.084	114.408.084
29	044	IPS	148.811.549	(74.754.810)	74.056.739	1.311.111.243
30	045	Gubernur Negara PPK Berapenas	-	-	-	14.270.300
31	050	Badan Perencanaan Nasional	3.233.471.131	(2.100.300.825)	1.133.170.306	2.084.302.309
32	050	Gubernur Kominfo	731.608.184	-	731.608.184	541.773.102
33	051	Gubernur P	431.281.818	(211.191.110)	220.090.708	241.711.811
34	053	SPUM	-	-	-	15.450.000
35	057	Gubernur Negara PII	17.000.000	-	17.000.000	18.000.000
36	071	LIP	53.401.444.530	(53.470.471.704)	11.972.762	11.030.621
37	090	Badan Tenaga Kerja Nasional	20.291.312.479	(21.223.716.973)	1.932.595.506	3.021.824.292
38	091	BPPT	40.713.310.177	(40.047.380.354)	665.929.823	-
39	092	LAPPA	1.131.022.571	(1.131.022.571)	-	1.131.022.571
40	093	Sekretariat	27.500.000	(11.750.000)	15.750.000	21.000.000
41	093	Badan Pengkajian Tenaga Kerja	34.671.248	(1.711.381)	32.959.867	40.311.241
42	097	ANP	-	-	-	2.044.152
43	098	BRK	315.950.641	(301.050.341)	14.900.300	-
44	099	BPPI	24.341.066.482	(24.343.056.452)	-	14.070.300
45	091	Gubernur Perdagangan	691.881.240	(1.728.381)	689.152.859	838.758.812
46	101	SPPI	1.821.271	(1.821.271)	-	1.131.000
47	399.03	SPPI Kelengkapan	-	-	-	14.471.378
		TOTAL	249.628.424.411	(157.010.079.393)	92.618.345.018	38.224.744.301

7677AR.11/11/11/11/11

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

JANUARI 2012

**ASET TAK BERWUJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited
1	001	MPR	333.829.540	297.032.440	30.641.200	30.773.300
2	002	DPD	2.277.405.370	2.074.235.570	27.403.430.650	27.400.400.033
3	004	DPR	48.201.373.701	24.841.047.711	20.300.729.003	15.120.300.140
4	005	MA	10.663.237.070	10.770.067.030	14.329.970.254	12.007.960.577
5	006	Kepolisian Agung	2.484.073.122	2.118.500.077	5.977.880.224	11.749.091.420.945
6	007	Sekretariat Negara	12.662.301.404	10.424.150.200	1.948.607.533.647	2.022.704.670.874
7	007	R.L. Keuangan Negara	274.500.300	140.901.000	85.600.100.500	600.700.000.000
8	010	Kementerian Dalam Negeri	751.143.021.142	270.441.660.030	107.135.011.001	20.600.340.000
9	011	Kementerian Luar Negeri	17.700.120.501	5.400.000.711	107.700.000.000	372.700.000.000
10	012	Kementerian Pertahanan	202.520.510.500	141.000.000.000	3.500.434.000.000	3.000.000.000.000
11	013	Kementerian Hukum dan HAM	230.200.000.000	150.000.000.000	30.000.000.000	5.000.000.000
12	015	Kementerian Keuangan	474.600.000.000	300.000.000.000	240.000.000.000	500.000.000.000
13	016	B.L. Kementerian Keuangan	2.800.000.000	800.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
14	017	Kementerian Pertanian	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
15	018	B.L. Kementerian Pertanian	4.000.000.000	-	20.000.000.000	-
16	019	Kementerian Perindustrian	5.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000
17	020	Kementerian ESUM	1.000.000.000	1.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
18	021	B.L. Kementerian ESUM	-	-	-	10.000.000.000
19	022	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
20	023	B.L. Kementerian Kelautan dan Perikanan	21.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	-
21	024	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
22	025	B.L. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
23	026	B.L. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
24	027	Kementerian Kesehatan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
25	028	Kementerian Agama	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
26	029	B.L. Kementerian Agama	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
27	030	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
28	031	R.L. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
29	032	Kementerian Sosial	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
30	033	Kementerian Kehutanan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
31	034	Kementerian Kelautan dan Perikanan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
32	035	Kementerian Pekerjaan Umum	4.000.000.000.000	3.000.000.000.000	4.000.000.000.000	3.000.000.000.000
33	036	B.L. Kementerian Pekerjaan Umum	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
34	037	Kementerian Bidang Politik dan Keamanan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
35	038	Kemampuan Bidang Pemerintahan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
36	039	Kemampuan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
37	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
38	041	Kementerian Negara BUMN	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
39	042	Kementerian Negara Badan Penyelenggara	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
40	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
41	044	Kementerian Negara BUMN	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
42	045	B.L. Kementerian Negara BUMN	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
43	046	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
44	047	Kementerian Negara PRR dan Kelangkaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
45	048	R.L.	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
46	049	LSN	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
47	050	Usaha Kesehatan Nasional	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
48	051	BUMS	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
49	052	Kementerian Negara PPP, Rujukan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
50	053	Badan Penelitian Nasional	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
51	054	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

34/01/2012 10:57:21

LAPORAN KUALANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (RUPIAH)

JANUARI 2012

**ASET TAK BERWUJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

Kode	Nama	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
		2011	2010	2011	2010
52	525 Kementerian Agama	95.461.851.931	87.642.763.739	19.430.055.542	26.613.356.739
53	535 R.I. Kementerian Agama	4.510.179.000	4.374.290.600	-	-
54	540 Kementerian P	275.820.915.714	25.807.712.155	274.652.965.030	170.023.646.635
55	550 DITJEN	8.072.253.551	5.039.279.825	5.623.293.740	5.520.900.000
56	560 Lembaga Kelembagaan Nasional	75.487.112.203	75.487.112.203	1.621.437.045	00.922.000
57	570 B/PPN	93.041.567.078	70.127.693.978	70.615.072	79.915.072
58	580 B/AN	62.673.876.958	11.819.378.308	93.519.036.875	38.517.488.445
59	590 Kementerian Negara PUI	14.000.000	14.000.000	2.547.138.400	2.547.138.400
60	600 R/ERN	17.073.798.308	10.714.825.000	2.765.612.188	2.413.196.508
61	610 Komnas HAM	1.687.052.066	1.030.577.080	-	-
62	620 B/MG	97.054.023.063	54.681.030.131	16.157.950.870	15.130.688.435
63	630 K/TJ	313.036.455	50.834.225	9.344.921.229	1.709.300.577
64	640 Mahkamah Konstitusi RI	5.479.046.974	3.075.052.230	3.603.802.462	3.005.724.467
65	650 PPATK	4.353.470.326	6.400.829.231	46.437.000	-
66	660 L/P	2.575.012.381	8.472.673.875	18.689.127.770	21.226.755.335
67	670 Badan Tenaga Nuklir Nasional	23.243.133.014	18.745.375.290	6.353.533.552	25.173.074.800
68	680 D/PT	58.713.185.329	20.030.832.937	2.901.335.000	70.573.922.002
69	690 R.I. KPPT	34.737.000	-	2.647.606.204	357.429.375
70	700 LAPAN	6.963.407.747	892.307.817	167.348.381	178.222.353
71	710 B.L. LAPAN	2.262.000	3.362.000	-	-
72	720 B/ka/Perpres	339.891.335.233	345.531.739.731	60.042.692	7.704.551.009
73	730 BSN	1.239.807.750	1.031.162.730	302.010.200	109.777.000
74	740 Badan Pengawas Tenaga Nuklir	230.200.700	100.000.000	1.629.059.940	1.422.962.940
75	750 LAN	23.700.029.800	2.642.111.000	260.635.379	1.291.946.440
76	760 ANRI	11.524.354.025	5.019.802.873	3.287.136.649	6.282.150.649
77	770 B/RI	148.251.042.174	10.537.055.030	6.351.879.139	170.243.325.031
78	780 B/PP	8.719.739.675	8.708.039.615	1.280.136.138	1.873.344.172
79	790 Kementerian Perdagangan	114.589.602.200	80.113.955.997	2.309.843.702	804.372.852
80	800 Kemend. Perindustrian Rakyat	48.483.327.553	20.705.952.233	542.230.877.000	544.253.548.500
81	810 Kemend. Perindustrian dan Perdagangan	17.478.109.900	17.037.805.900	175.981.009.254	127.703.685.634
82	820 K/RI	12.154.990.178	11.139.475.728	1.388.539.007	3.780.950.661
83	830 B/RI/MD - Migas	-	-	485.603.737.566	659.859.728.122
84	840 D/PE	4.224.326.072	2.533.829.500	5.025.000	03.931.000
85	850 Komisi Yudisial RI	1.309.201.000	1.300.201.000	205.273.375	-
86	860 B/PP	23.644.861.964	22.663.110.815	125.924.591.600	32.080.335.000
87	870 B/PP2TR	5.557.016.170	2.887.026.745	5.040.000	-
88	880 D/PS	449.756.147	45.009.147	180.957.450	501.375.855
89	890 L/PP	6.444.711.246	5.133.859.745	86.475.000	-
90	900 Badan SAR	22.781.001.102	1.415.150.000	52.021.000.000	5.683.254.100
91	910 K/RI	8389.059.346	12.309.029.072	1.989.511.740	-
92	920 Badan Pengembangan Wilayah Sumatera	18.223.102.850	-	-	-
93	930 Ombudsman Republik Indonesia	3.500.000	-	-	-
94	940 Badan Nasional Pengabdian Masyarakat	56.277.000.000	-	-	-
95	950 BUN II (wascas)	-	-	142.127.890.000	-
96	950 B4 BUN I (CI + DIT. S/M)	-	-	13.471.000.122.905	23.052.303.553.232
97	950 B8 BUN I (Felonj. lainnya)	-	-	46.701.931.669	21.012.153.813
98	950 B9 BUN I (Transaksi Kh. aset)	-	-	43.470.131.894.739	-
99	950 B03 BUN I (P/)	-	-	-	2.874.411.711.232
100	950 B04 BUN I (K/ P/)	-	-	-	1.749.673.730.841
101	950 B05 BUN I (K/ S/M)	-	-	-	25.263.047.187.832
102	950 B06 BUN I (K/ S/M)	-	-	-	145.800.297.541.520
103	950 B07 BUN I (S/ PER/16/MING)	-	219.379.000	-	44.283.237.789.177
104	950 B08 BUN I (S/ lainnya)	22.724.946.611	125.292.142.235	-	-
105	TOTAL	17.406.618.812.595	9.351.448.050.846	105.997.977.282.250	303.373.990.422.989

34/01/12/TAJAL 573

LAPORAN KEUANGAN PERHIMPATAN PLSAFTALIN 2011 (AKSES/02)

LAMBAR 304

ASET TANAH KKKS YANG DICATAT PADA NERACA LKPP 2011

No.	UNIT / KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2011		KETERANGAN
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	
1	2	3	4	5	3
1	TOTAL KONDIS & RNF	EAL (PAFA)	9.703.925	549.054.637.372,00	
2	VICE PRESIDEN BRUKA	SANSA-SANSA	1.154.532	44.076.139.000,00	
3	PT. MEDCO E & P INDONESIA	INDRAKON	340.639	28.962.652.000,00	
4	PT PERTAMINA OF OREO CEPU	OREO CEPU	42.055	3.332.560.000,00	
5	PT. SHEVTON INDONESIA SEMFAM	EAL (PAFA)	14.489.999	261.860.240.300,00	
6	PT. SHEVTON PACIFIC INDONESIA	POKAN	437.675.227	13.522.439.648.130,00	
7	PT. SONTOP PETROFILM SA	PEKABARU	6.301.159	230.121.861.000,00	
8	PT. PETROSELAT LTD	RELAT PASIRANG	471.388	10.632.640.000,00	
9	PT. MEDCO E & P INDONESIA	PEKABARU - PELALAWAN	6.189.862	34.593.226.280,00	
10	PT. (AH) & PARTNERS LTD	PELALAWAN & PEKABARU	301.235	1.945.178.000,00	
11	PT. SAULA (DITINCI) DARU LTD	PEKABARU	484.000	7.532.552.400,00	
12	PT. PETROCHINA INTERNATIONAL	SEKONG	3.367.621	7.007.330.750,00	
13	PT. PETROCHINA SA AWATI	SAJAWATI	1.660.974	2.654.057.310,00	
14	KANGAR ENERGY	KANGAR BLOCK	399.504	40.811.268.850,00	
15	PT. MEDCO E & P RIMAU	RIMAU BLOCK	1.497.097	5.562.254.000,00	
16	MOBIL OPIJ LTD	BLETA & BUNJONGORO	597.573	49.579.668.000,00	
17	EXXONMOBIL IN INDONESIA	BLOCK RASPH	504.270	10.531.290.000,00	
18	PT. PELAWAN OF REGION SUMATERA	SUMATERA	12.440.918	322.032.437.000,00	
19	CONOCOPhillips SOUTH LAMB LTD	LAMB	25.687.874	3.400.038.150,00	
20	VICE UNIT SANSERAH	SANSERAH	12.292.828	51.415.110.000,00	
21	VICE UNIT MITI ARU	LAPANAN MITI ARU	5.689.295	30.536.457.115,00	
22	VICE UNIT MITI ARU	LAPANAN MITI ARU	11.083.001	64.797.354.535,00	
23	VICE UNIT BADAU & MAMU	BADAU DAN MAMU	79.697.257	129.273.434.540,00	
24	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGRO	BANGRO BLOCK	1.011.125	19.021.657.350,00	
25	PT. MEDCO E & P INDONESIA	LEWATANG BLOCK	362.044	3.549.652.330,00	
26	JCE HESS JAWA BARU	LAMB	671.217	9.029.690.000,00	
27	JCE PERAMANG BLENDAHIRE - PENCIPO	PENCIPO	395.099	31.224.818.000,00	
28	JCE PERTAMINA JAWA BARU	TIJAN	508.945	66.459.349.700,00	
29	CONOCOPhillips GRISIK LTD	GRISIK MUGI BAYUJAIN	656.629	532.678.000,00	
30	PT. MEDCO E & P INDONESIA	CENTRA SINATRAMUSI RUMAH	295.547	2.112.769.000,00	
31	JCE PERAMANG ALISMAN	USAN KUNIPRU	482.029	2.259.768.000,00	
32	PT. ROE RUMAH SIAK PUSAKO	SIAK PUSAKO	132.629	4.130.446.000,00	
33	TAC PERTAMINA RUP MERUP LTD	SARONGIN	301.749	3.657.675.075,00	
34	PT. LAPINDO BANGKAS INC.	SIDUKAU	47.124	33.256.382.832,00	
35	JCE PERAMANG MEDCO TUMORI	BLOCK CULU SULAWESI	273.689	3.274.530.000,00	
36	PT. SHEVTON PACIFIC INDONESIA - SAK	SIAK - TEKADARU	4.254.516	3.425.633.400,00	
37	ENERGY EQUITY PROPERTIES (AMG)	SEMPANG	367.468	20.850.789.000,00	
38	PEARL OIL TUNGGAL LTD	TUNGGAL BONG JAMRI	350.137	1.011.880.132,00	
39	PT. PETROCHINA INTERNATIONAL	LALANG BLOCK - LAMB	8479.768	523.855.357.250,00	
40	RODONG ENERGY LTD	GRISIK	39.592	1.068.439.575,00	
41	HESS INDONESIA PANDEAN	GRISIK	786.825	33.457.000.000,00	
		TOTAL		13.788.358.699.984,00	
42	PT. PELAWAN OF REGION JAWA BARU	LAMB BADAU DAN MAMU	-	59.521.200.000,00	Hes III 2011
43	Chesam Indonesia Company	East Kalimantan	1.924.589	475.336.809.000,00	Hes IIP 2011
44	PT PERTAMINA EP Celu		89.288	39.316.155.000,00	Hes IIP 2011
		TOTAL		573.925.470.000,00	
	TOTAL		887.818.264	14.362.284.169.984,00	

Luas Tanah = Rp9.400

LAPORAN KEUANGAN PERIODE VI 2011-2012 (RUPIAH)

LAMBAR 20.3

DAFTAR ASET NON TANAH KKKS

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Nilai IP Aset Non Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BCB PT Bumi Sakti Pusako-Petroleum Ind.	Coastal Plain Pasaman	6.765	235.156.225	062.529.363.135
2	BP Beras Ltd.	Serau	221	525.356.402	542.130.386.610
3	BP Mahur Ltd.	Mahuri			
4	BP WIRIGLAR	Wriggar			
5	Camor Resources Canada Ltd.	Bakasan	153	41.916.192	201.831.693.620
6	Chevron Indonesia Company (Coastal)	Esat Kalimantan	4.231	750.351.012	3.775.065.244.719
7	Chevron Malaysia Ltd.	Malacca Strait	37	455.514.026	2.075.131.921.407
8	Citic Sarawak Ltd.	Sarawak On Dula	731	66.429.476	355.539.009.620
9	CK-010 South East Sumatera Ltd	South East Sumatera	1.681	704.387.285	4.107.498.967.225
10	ConocoPhillips (Gross) Ltd.	Carondek	1.141	867.033.217	542.2435.174.739
11	ConocoPhillips (South Java) Ltd.	South Java B	255	41.755.830	245.711.874.855
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	1.072	2.255.497.235	30.850.850.030.670
13	Energy Equity (FFIG) (Sungai) (P) Ltd	Sungai	531	7.153.295	74.035.701.625
14	ExxonMobil Indonesia (North)	North	4.055	1.122.134.224	4.977.143.029.520
15	ExxonMobil Indonesia (South)	South	2.275	342.545.042	3.475.113.774.295
16	JOC Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	41	5.033.131	75.012.082.720
17	JOC Pertamina-Casta International Group Ltd	North Gebang	133	25.855.382	167.233.379.061
18	JOC Pertamina-Mexco E&P Tomar Suawati	Sentoro Toi	23	10.353.735	110.033.307.159
19	JOC Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	1.037	103.363.725	358.118.418.679
20	JOC Pertamina-PetroChina Sawah	Kepala Dukung	235	22.221.374	125.918.309.545
21	JOC Pertamina-Talangan Ujan Komerling Ltd.	Ujan Komerling	1.031	52.871.485	322.831.133.227
22	JOC Pertamina-Talangan Jambi Merang	Jambi Merang	235	330.934	5.575.752.147
23	Kalita (Korea) Barak (P) Ltd.	Senori Baru	132	10.269.000	55.339.436.143
24	Kalita Petrosum (Seram) Ltd.	Dula	933	6.029.900	31.339.236.660
25	Kangsan Energy Indonesia	Kangsan	283	355.216.425	962.979.513.541
26	Kudat Energy (P) Ltd.	West Mearu	108	22.501.425	210.038.349.425
27	Koncur Petroleum S.A.	Malacca Strait	1.314	170.679.511	870.233.911.821
28	Lapindo Brantas (P)	Brantas	219	1.810.200	125.131.330.520
29	Miral Capu Ltd.	Capu	1.317	55.533.935	820.044.054.045
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	533	457.154.072	2.425.479.121.725
31	Mobil (P) Langkat (P) Ltd.	Langkat	57	14.310.595	122.233.579.175
32	Petroleum Fuel Energy (P) (P) Ltd	Offshore North East Java	15	255.553.945	2.025.439.769.225
33	Petroleum Fuel Energy (P) (P) Ltd	Walisari	521	5.141.934	25.930.990.864
34	PetroChina International (Bangkok) Ltd.	Bangkok	23	439.011	3.827.014.250
35	PetroChina International (Barru) Ltd.	Salawati Basin	2.803	70.071.432	350.133.722.754
36	PetroChina International (Mishung) Ltd.	Tanjung Mishung	5.332	825.351.055	4.275.413.090.520
37	Petrosea Ltd.	Selat Anjung	33	4.435.391	26.135.235.422
38	Petromil Natuna Sea B	Natuna Sea Block A	614	305.125.855	1.930.331.016.637
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Sek	300	11.355.035	45.073.381.451
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Polan	45.437	3.000.069.200	17.535.552.372.690
41	PT SPR Langkat	Mountain Front Quarter	37	3.399.212	21.743.119.651
42	PT Mada - SP Indonesia	North & Central Sumatera	1.120	125.148.075	945.929.121.620
43	PT Mada - SP Langkat	Langkat	27	72.992.535	322.459.522.752
44	PT Mada - SP Mada	Block A	1	320.000	13.238.000
45	PT Mada - SP Riau	Berikan Fimau	2.411	175.939.127	1.257.132.731.282
46	PT Mada - SP Tarakan	Tarakan	135	25.445.905	211.038.547.872
47	PT Pertamina (P)	Indonesia	3.953	335.236.217	5.369.761.000.475
48	Santos (Macure) (P) Ltd.	Macure	13	15.939.911	145.591.075.217

LAMBAR 20.3.3

LAPORAN KEUANGAN PERIODE VI 2011-2012 (KORPORASI)

LAMBAR 20.3

DAFTAR ASET NON TANAH KKKS

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Nilai IP Aset Non Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
4E	Santos (Sampang) Fvc Ltd.	Sampang	13	64.313.076	904.963.330,104
EC	Star Energy (CE&PI) Ltd.	Kekap	737	376.343.130	1.687.319.722,421
E*	Total E&P Indonesia	Mahakam	7.036	3.257.319.830	28.776.330.705,030
E2	Total E&P Indonesia	Tengah Asia	64	22.036.026	212.130.094,057
E3	Trianga Paser Inc.	Pasei	37	60.313.436	420.093.751,000
E4	Poa Indonesia Co.	Banggasanga	2.672	1.166.777.816	9.126.991.789,006
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			10.803	10.307.305.076	133.124.336.739,694
IKKKS EKSPLORASI					
E5	Amadeus Indonesia Company	North East Madura II	12	30.121,00	294.066.643,00
E6	Amadeus Indonesia Komoran Company	Makassar	5	151.231,00	1.667.112.210,00
E7	Amadeus Papadrig Ltd.	Papayang	13	23.778	215.281.124
E8	Amadeus Papadrig Ltd.	Papadri	14	23.778	215.281.124
E9	Bungamas International Co	Bungamas	23	186.284	1.673.363.210
E0	Omnia Petroleum Energy Ltd	Bangka	21	26.360,00	1.69.342.964,00
E1	EVI Arabela Ltd	Arabela			
E2	EVI Bukit Ltd	Bukit	77	236.795	1.893.014.006
E3	EVI Krueng Mare Ltd	Offshore North Aceh	3	49.619,00	293.009.358
E4	EVI Muara Bera. B.V.	Muara Bera.	5	7.000	63.002.883
E5	EVI Pailangan B.V.	Pailangan			
E6	Exo-Mekki Exploration and Production Indonesia-Musasi-Lesab	Mandar	1	210.721,65	2.436.261.410,50
E7	Exo-Mekki Exploration and Production Indonesia-Sumatra-Jabal	Sumatra	1	219.798,76	3.482.292.376,00
E8	Husky Oil (Mature) Ltd	Mature Strait	35	31.500	374.215.254
E9	Husky Oil North Sumbawa Ltd.	North Sumbawa	64	163.276	1.533.094.432
F0	Ipax Mesala Ltd	Mesala	43	134.713	695.533.533
F1	Ipax Petreum Ltd	North Sumatra	63	46.813	379.236.280
F2	Kalla Ilir Ltd	Satu Block	31	29.040	89.767.254
F3	KEC Perubai B.V.	Perubai	33	177.080	1.636.022.884
F4	Fair Oil (Sabau)	Sabau	13	240.984	2.264.197.432
F5	Transwaco Saraway Exploration JTC.		33	133.221	944.070.540
F6	IP Dumurai Ltd	Dumurai			
SUB TOTAL IKKKS EKSPLORASI			666	2.363.640	22.061.717.248
TOTAL ASET			11.469	19.504.168.976	155.140.396.136,232

LAMBAR 20.3/2012

LEMBARAN KEUANGAN PEMERINTAH FUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR 21.3

SUMUR TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
IKONS PRODUKSI					
1	EUB #1 Bumi Sialk Field - Pertamina Hulu	Coastal Main Pakanbaru			
2	EP 3era, Ltd.	Berau			
3	EP Mutiara	Mutiri	1	2.719.113	31.428.004.734
4	EP#1 RABOH	Wanagar			
5	Esmer Petroleum Canada Ltd	Berbar			
6	Chevron Indonesia Company (Gloco)	Sawak Kalimantan	2	2.611.833	11.613.911.128
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Sisi			
8	Geo Seasia Ltd.	Seremban BUKA	11	3.720.653	11.353.402.128
9	GNOC South East Sumatera Ltd	South East Sumatera	125	41.544.710	110.643.971.391
10	ConocoPhillips Indonesia Ltd	Garuhur	15	2.152.873	8.100.382.643
11	ConocoPhillips (South Jambi), Ltd.	South Jambi B			
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd	South Natuna Sea E	2	374.763	947.136.383
13	Energy Equity Field (Sampang) Pty Ltd	Sampang			
14	ExxonMobil Indonesia Inc	Jack O	12	10.331.433	38.020.972.781
15	PetroIndraze (Indonesia) Ltd.	Pangkal			
16	JOB Pertamina - Galang Sakti Ltd	Raja Prudipna			
17	JOB Pertamina-Eusea International Group Ltd.	Narai Selang			
18	JOB Pertamina-Medco E&P (Bontol Sulawesi)	Sono-Lon			
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban			
20	JOB Pertamina-PetroChina Sulawesi	Kepala Tunggal			
21	JOB Pertamina-Talisman (Gasan Komering) Ltd.	Gasan Komering			
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang			
23	Konink/Konink Sand, Pty Ltd	Konink Sand			
24	Konink Petroleum (Serambi) Ltd	Dula			
25	Konink Energy Indonesia	Konink			
26	Konink Energy Co. Ltd	West Natuna	11	2.322.010	34.672.910.697
27	Konink Petroleum S.A.	Makassar Sisi	2	523.822	2.511.117.253
28	Lampiran 3 andas Inc	BREHAS			
29	Merti Capu Ltd.	Capu			
30	Merti Petroleum Indonesia	Purba Sumatera (Mblure)			
31	Merti (Lampiran 3) Ltd.	Tunggal			
32	Pertamina Hulu Energi (MWA) Ltd.	Offshore North West Java	1	1.072.452	1.521.593.113
33	Pertamina Hulu Energi (MWA) Ltd.	Widawati			
34	PetroChina International (Dangdut) Ltd.	Bangka	15	1.524.433	13.687.595.813
35	PetroChina International (Barru) Ltd.	Saewad Barru			
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2	329.631	3.157.272.500
37	PetroChina Ltd	Sawad Panjang	1	83.048	447.917.603
38	Petroleum Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A			
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Sialit			
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Bakar	250	18.353.425,00	34.841.920.737,00
41	PT GPR Langgak	Muntain Tran, Kuantan			
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera			
43	PT Medco E&P (Merang)	Merang			
44	PT Medco E&P (Matsya)	Block A			
45	PT Medco E&P (Misu)	Bantaran Misu			
46	PT Medco E&P (Tanjung)	Tanjung			
47	PT Pertamina (PT)	Indonesia			
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura			
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang			

DAFTAR LAMBEK 177

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 21.3

SUMUR TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Nilai Perolehan USD	Rp
1	2	3	4	5	6
EC	Solar Energy (KAKAP) Ltd.	Sekeloa	2	13.792.608	63.806.338.500
E1	Total ESP nonasam	Makassar	12	96.326.008	763.802.929.782
E2	Total ESP nonasam	Tengah Area			
E3	Triangle Pasulu	Pasulu			
E4	Poco Indonesia Co.	Bergasriga	18	2.358.844	5.877.527.708
SUB TOTAL IKKIS PRODUKSI			32	102.473.754	1.115.877.388.255
IKKIS EKSPLORASI					
44	Anasario Indonesia Company	North East Mahale II			
50	Anasario Indonesia Mahale I Company	Mahale I			
51	Anasario Pasulu I-1	Pasulu			
52	Anasario Pasulu I-2	Pasulu			
53	Eurotrans International Co.	Bungmas			
54	Russ Energy Energy Ltd	Rengas			
55	Chikmasat Ltd.	Chikmas			
62	Chikmasat Ltd.	Buket			
63	Chikmasat Ltd.	Offshore North Area			
64	Chikmasat Ltd.	Musa Jekal			
65	Chikmasat Ltd.	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Manda) Limited	Mandar			
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Sumamas) Limited	Sumamas			
68	Fusey Oil (Madura) Ltd	Madura Strait			
69	Fusey Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa			
70	Indo Masea Ltd	Masea			
71	Indo Permulaan Ltd	Kamalayan			
72	Kalita/Berlu Ltd	Jeruju Dock			
73	Widuh Pembaca E.V	Pambaca			
74	Fajar Oil (Sembak)	Sembak			
75	Transworld Energy Exploration Ltd				
76	BP (Jember) Ltd	Jember			
SUB TOTAL IKKIS EKSPLORASI			-	-	-
TOTAL ASSET			62	198.276.734	1.119.877.388.255

DAFTAR MERKAL 173

LAPORAN BELANJAWAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (SANTYER)

DAFTAR 20 C

SUBSEQUENT EXPENDITURE

No	Kontraktor (Kontrak Kerja Sama) (KIKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Area	Subsequent Expenditure	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KIKKS PRODUKSI					
1	ROBFT Bumi Blok P. Jember-Permina Hulu	Scandal Plan Pekanbaru			
2	M² Heran Ltd	Heran			
3	M² Indun Ltd	Indun			
4	M² W. HIRFAR	M² Hajar			
5	Carma Heron (Asia Canada) Ltd	Heron			
6	Chercon Indonesia Company (KIKKS)	Her Kaumaha	263	28.154.120	120.452.100.193
7	Chercon Makassar Ltd	Makassar Block	3	146.166	1.024.809.880
8	Chercon Sarawak Ltd	Sarawak Block	635	41.008.128	223.138.019.403
9	EMUCO South East Sumatra Ltd	South East Sumatra	1.488	382.443.438	1.961.449.809.471
10	ContractoPhilips-Ginsak Ltd	Ginsak	203	63.246.628	542.311.028.143
11	ContractoPhilips-South Jember Ltd.	South Jember	5	130.870	495.882.369
12	ContractoPhilips-Indonesia Ltd.	South Jember Sea E	682	2.309.246.940	8.206.256.395.395
13	Energy Energy (PUC) Sangkang Piy Ltd.	Sangkang	2	1.950	10.000.152
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	ExxonMobil	351	144.943.608	599.261.005.333
15	Hasan Indonesia Penghasil Ltd	Penghasil			
16	JCB Pertamina-Golten Spine Ltd	Pala Pando			
17	JCB Pertamina-Cetera (Indonesia) Group Ltd	North Sabang			
18	JCB Pertamina-Indro ESP (Loran) Sulawesi	Seneh-101			
19	JCB Pertamina-NareChina East Java	Tuban	85	3.051.300	1.341.250.251
20	JCB Pertamina-NareChina Sulawesi	Angela Surong	7	1.924.828	1.355.993.281
21	JCB Pertamina-Sanman (Jaya Kemuning) Ltd	Cyan Kemuning	111	3.172.002	20.328.253.319
22	JCB Pertamina-Sanman (Jambi) Merang	Jambi Merang			
23	Karika (Korintia) B.V. Piy Ltd.	Korintia Brou	5	247.131	1.139.577.595
24	Karisa Petroleum (Sarawak) Ltd.	Elis	2	41.135	201.971.137
25	Karisa Energy Indonesia	Sarawak	85	342.209	3.139.523.331
26	Karisa Energy Co. Ltd.	West Sarawak	27	14.255.847	140.742.033.423
27	Karisa Petroleum S.A.	Masaka Sarawak	355	44.054.361	225.539.973.213
28	Lacina Ermas Inc.	Sarawak	13	1.052.015	17.055.041.537
29	Mobi Cepu Ltd.	Cepu	3	6.761	41.252.352
30	Mobi Exploration Indonesia	North Sumatera Cirebon	11	1.215.919	8.181.499.353
31	Mobil Oil/Tunggal Oil Ltd.	Tunggal	17	243.331	2.374.035.133
32	Permina Hulu Energi O&G Ltd.	Central Northwest Java	5.039	2.046.006.902	8.588.208.989.319
33	Petrolia Esso-Tara	Nalawai			
34	Petrolia International (Sarawak) Ltd.	Bangkai			
35	Petrolia International (Sarawak) Ltd.	Sarawak Block	437	41.166.069	145.318.289.059
36	Petrolia International (Jaya) Ltd.	Tanjung Jabung	1.273	148.154.702	1.388.370.953.723
37	Petrolia Ltd	Sela, Pangajene	1	5.700	35.000.353
38	Premier Oil (NGL) Sarawak	Natural Gas Block A	162	1.4824.828	118.036.847.049
39	PT Chevron-Facifica Indonesia	Suk			
40	PT Chevron-Facifica Indonesia	Rokar			
41	PT SP1 Langgajene	Moerman Front Buntan			
42	PT Indro ESP Indonesia	South & Central Sumatera			
43	PT Indro ESP Lemadang	Lemadang			
44	PT Indro ESP Malacca	Block A			
45	PT Indro ESP Petai	Barisan Petai	9	1.613.120	16.627.649.949
46	PT Indro ESP Terahan	Terahan			
47	PT Pertamina ESP	Indonesia			
48	Santos (Madura) Piy Ltd.	Madura	13	12.66.846	110.468.602.249
49	Santos (Sempang) Piy Ltd.	Sempang	1	1.476	16.217.326
50	Ster Energy (GUP) Ltd	Kakap	3	26.486	27.223.719
51	Total (Sarawak) Indonesia	Makassar	1.536	2.685.066.260	10.880.774.263.031
52	Total (Sarawak) Indonesia	Tengah Arca	3	20.026.034	86.188.383.146
53	Triangge Pose Inc.	Fasa			

DAFTAR 20 D 979

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (Lanjutan)

DAFTAR 20 C

SUBSEQUENT EXPENDITURE

No	Kontraktor/Kontrak Kerja Sama (KIKIS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Subsequent Expenditure	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
54	Vita Indonesia Co.	Garassangka	133	37.069.868	179.227.869.744
SUB TOTAL KIKIS PRODUKSI			13.893	8.596.424.524	44.346.408.225.493
KIKIS EKSPLORASI					
55	Anata Kencana Company	North East Waters II	-	-	-
56	Anata Kencana Kencana Company	Muntian	-	-	-
57	Anata Kencana Inc.	Papayan	-	-	-
58	Anata Kencana Inc.	Panah	-	-	-
59	Harjamas International Co.	Bungaya	-	-	-
60	Enusa Hengshan Energy Hc.	Bangka	-	-	-
61	Pt. Amstar Ind.	Amthari	-	-	-
62	Pt. Huker Ind.	Huker	-	-	-
63	Pt. Gunung Masah Ind.	Offshore North West	-	-	-
64	Pt. Nusantara Baku S.V.	Nusra Baku	-	-	-
65	Pt. Sukman B.V.	Sukman	-	-	-
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Indonesia Limited	Mentah	-	-	-
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Sumatra Limited	Sumatra	-	-	-
68	Huas UT (Medan) Ltd	Watu Sereh	-	-	-
69	Huas UT North Sumatra Ltd	North Sumatra	-	-	-
70	Index Mesela Ltd	Mesela	-	-	-
71	Inaia Petroleum Ltd	Manokwar	-	-	-
72	Randikber Ltd.	debu blok	-	-	-
73	AED Persewa B.V.	Persewa	-	-	-
74	Petal Oil (Sabuku)	Sabuku	-	6.179	57.127.331
75	Transworld Seaway Exploration LTD	-	-	-	-
76	B* Bantani Ltd	Bantani	-	-	-
SUB TOTAL KIKIS EKSPLORASI			-	6.179	57.127.331
TOTAL ASET			13.897	8.602.603.703	44.403.535.556.824

DAFTAR 20 D 980

LAPORAN KEJERAKAN PERENCANAAN PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

HALAMAN 23/28

ASET RUSAK BERAT

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KCKS)	Lokasi Area (Block)	Jumlah Aset	Aset Rusak Berat	
				Milai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS EKSPLORASI					
55	Prasarana Indonesia Company	Kontraktor Mandiri			
56	Ruasano Indonesia Mandiri Company	Mandiri			
57	Ruasano Papua ang Ltd	Papua ang			
58	Ruasano Papua Ltd	Papua			
59	Bungarus International Co.	Bungarus			
60	Enusa - Bangkalan Energy, It	Bangkalan			
61	EAI Ambalat Ltd	Ambalat	2	4.310	5.255.890
62	EAI Banjaran	Banjaran	1	137.431	166.432.998
63	EAI Energy Mandiri Ltd	C. Islanda Kudu Banjar	48	245.895	296.396.806
64	EAI Nusantara Mandiri	Nusa Tenggara			
65	EAI Super 3/2	Bungarus			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mender) Limited	Mandiri			
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Sumatra) Limited	Sumatra			
68	Lusva Oil (Madura) Ltd.	Madura Barat			
69	Enusa, It, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	2	2.862	34.898.797
70	Enusa, Masela Ltd	Masela	4	3.895	46.490.097
71	Enusa Patimura Ltd	Patimura	18	23.663	28.746.298
72	Kalimantan Barat Ltd	Kalimantan Barat			
73	Enusa, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1	877	1.064.854
74	Pear Oil (Ekulakul)	Ekulakul	1	5.275	63.985.700
75	Transwara Senaway Exploration - LTD.	Senaway	1	552	6.706.154
76	BP Barabesi Ltd	Barabesi			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			66	471.212	564.662.853
TOTAL ASET			21.905	697.264.512	1.033.909.336

LAPORAN KUNINGAN FISCAL TAHUN 2011 (4882702)

DIPA 30. F

ASET PEROLEHAN KKKS TAHUN 2011

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Per 31 Desember 2011
			Nilai Perolehan
KKKS PRODUKSI			
1	BOB PT Bumi Sank Pasaka-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru	1.029.159,95
2	BP Borneo Ltd.	Borneo	2.156.338,21
3	BP Mutani Ltd.	Mutani	
4	BP WIRIAGAR	Wiragar	
5	Camor Resources Canada Ltd.	Bawean	
6	Chevron Indonesia Company (Cina)	East Kalimantan	42.116.715,43
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	37.542.300,36
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	1.758.858,98
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southwest Sumatera	954.928.239,11
10	ConocoPhillips (Gresik) Ltd.	Gresik	58.628.000,00
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	42.962,00
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	72.781.297,00
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	504.488,12
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	1.173.815,48
15	Hees (Indonesia) Pangkajene Ltd.	Pangkajene	83.779.427,70
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	-
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	Gelang	-
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Seroro-Tolli	-
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	109.354,45
20	JOB Pertamina-PetroChina Sulawesi	Kepala Buring	-
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	4.418.071,30
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	66.740,44
23	Kalita (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	1.183,19
24	Kalita (Bentul) Ltd.	Bentul Block	2.517.919,03
25	Kalimaya Petroleum (Seram) Ltd.	Bula	51.827,98
26	Kangsan Energy Indonesia	Kangsan	2.012,00
27	Kondur Petroleum S.A.	Makassar Strait	5.907.781,85
28	Lajindo Brantas Inc.	Brantas	50.008,34
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	4.260.280,44
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	682.779,41
31	Mont'Dr Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	63.941,23
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	18.688.789,20
33	Perunda Benua Taka	Wailawi	1.471,00
34	PetroChina International (Bemudai) Ltd.	Salawati Basin	2.889.419,47
35	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	15.905.297,78
36	PetroChina International (Bangku) Ltd.	Bangku	-
37	Petrosehat Ltd.	Selat Panjang	56.186,68
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	562.565.878,01
39	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Wasi Maluru	42.321.348,18
40	PT. SPR Langgak	Muntin Fmt Kuantan	-
41	PT Chevron Pacific Indonesia	Siek	1.281.705,51
42	PT Chevron Pacific Indonesia	Rolan	128.579.560,86
43	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera	853.608,89
44	PT Medco E&P Lematang	Lematang	126.881,60
45	PT Medco E&P Melaka	Block A	-
46	PT Medco E&P Rimau	Banisan Rimau	8.549.183,87

DIPA 30. F 303

LAPORAN KEUANGAN FISKAL PERUSAHAAN TAHUN 2011 (4882702)

DFTAR LAMPIRAN

ASET PEROLEHAN KKKS TAHUN 2011

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Per 31 Desember 2011
			Nilai Perolehan
KKKS PRODUKSI			
47	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	8.250,00
48	PT Pertamina EP	Indonesia	87.173.861,57
49	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	-
50	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	-
51	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	650.000,00
52	Total E&P Indonesia	Mahakam	224.838.661,92
53	Total E&P Indonesia	Tengah	788.941,50
54	Triangle Phase Inc	Pase	1.118.883,39
55	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	45.402.359,00
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			2.382.563.147,67
KKKS EKSPLORASI			
56	Anatarko Indonesia Company	North East Madura I	-
57	Anatarko Indonesia Namban Company	Namban	-
58	Anatarko Papanang Ltd.	Papanang	-
59	Anatarko Popoti Ltd.	Popoti	-
60	Bungas Petroleum Co.	Bungas	248.121,00
61	Elc Amalat Ltd.	Amalat	-
62	Elc Buket Ltd.	Buket	-
63	Elc Gunung Mene Ltd.	Gunung Mene	-
64	Elc Muara Bakau S.A.	Muara Bakau	3.501,42
65	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Menda) Limited	Menda	-
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Surabaya) Limited	Surabaya	-
67	Jusay Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait	-
68	Jusay Oil North Sumatra Ltd.	North Sumatra II	1.000,00
69	Mapes Masaka Ltd.	Masaka	2.100,00
70	Seoase Energy	Manokwar	-
71	ATM Ramacha P.V.	Pancong	-
72	Seamander Energy (Singapore) Limited	Bangarai	1.06.113,82
73	Saraway Offshore Exploration Limited	Saraway Offshore	-
74	Pearlco (Sabuk) Limited	Sabuk	34.700,00
75	Pearlco (Samar) Limited	Samar	-
76	Pearlco (S) Limited	Sarua	-
77	Pearlco (East Marsh) Ltd.	East Marsh	-
78	Pearlco (Cahaya) Limited	Korpu	-
79	EP Sebera Ltd.	Sebera	-
80	Elc Tanjung Bui	Tanjung	-
81	CorocoF-Ilips (Warim) Ltd.	Warim	-
82	CorocoF-Ilips (Korpu) Ltd.	Korpu	-
83	CorocoF-Ilips (Ambo) Ltd.	Ambo	-
84	CorocoF-Ilips (Maha Sea Block) Ltd.	Maha Sea	-
85	Star Energy (Sebatik)	Sebatik	-
86	Star Energy (Batubara)	Batubara	-
87	Star Energy (Batubara)	Batubara	-
88	Star Energy (Batubara)	Batubara	-
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			788.032,35
TOTAL ASET KAPITAL			2.383.321.180,02

DFTAR LAMPIRAN 38

Jd 2012

[PERVALUAN PERSENTAS PLOTTAN 2011 2000/000]

RINGKASAN ASSET UBIARA YANG DIKELOLA
PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASSET PERBERKAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

NO. JENIS ASSET	ENTRAJASSET	TBM KOT	SALINAN 3 DIMENSI		SALINAN 2 DIMENSI		SALINAN 1 DIMENSI		SALINAN 0 DIMENSI		SALINAN 0 DIMENSI PILAS	SALINAN 0 DIMENSI PILAS	SALINAN 0 DIMENSI PILAS
			ORI	REPLIKASI	ORI	REPLIKASI	ORI	REPLIKASI	ORI	REPLIKASI			
1	ASSET PERUSAHAAN	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ASSET PERUSAHAAN	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Total													

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASSET PERBERKAS
Jl. ... No. ...

Periklanan dan pemasaran adalah bagian integral dari kegiatan perusahaan. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan melakukan berbagai kegiatan pemasaran yang meliputi iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Semua kegiatan pemasaran tersebut dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.

DUPKAM BERKAS SET

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		Dalam Rupiah)
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	102.088.063	1.084.188.831			
2	004	Bulan Pemeriksa Keuangan	27.009.591.017	2.191.341.392	189.313.796	290.014.900	
3	005	Mahkamah Agung	7.122.222.207	3.517.543.774	295.004.531		
4	006	Ketaksamaan Agung	52.575.145.887	1.845.635.750			
5	007	Sekretariat Negara	58.484.424.331	36.845.718.358	99.400.454	10.681.239.117	
6	010	Kementerian Dalam Negeri	240.630.523	3.250.629.696	375.304.509	48.633.994	
7	011	Kementerian Luar Negeri	6.377.506.628	6.144.859.402	134.087.731		
8	012	Kementerian Pertahanan	3.238.789.596.999	848.472.444.569			
9	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	11.601.007.436	10.271.046.636	60.618.001.500	45.840.000	
10	015	Kementerian Keuangan	17.174.925.541	202.674.045.731	1.563.445.635	1.657.370.182	
11	018	Kementerian Pertanian	6.125.215.601	5.681.134.174	386.575.000	50.838.838	
12	019	Kementerian Perindustrian	952.352.095	1.078.418.319	508.918.100	342.941.500	
13	020	Kementerian ESDM	28.998.099.190	18.855.590.948	42.459.875	88.475.000	
14	022	Kementerian Perhubungan	131.518.828.284	139.725.868.192	18.480.886.134	12.248.080	
15	023	Kementerian Pendidikan Nasional	355.438.295.118	68.580.459.557	51.063.938.818		
16	024	Kementerian Kesehatan	757.292.903.523	480.417.525.175	99.880.286.883	75.455.159.412	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 23

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		Dalam Rupiah
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	
17	025	Kementerian Agama	3.557.037.840.052	334.118.122.227	0.154.923.870	2.962.890.081	
18	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	789.017.524	1.106.764.679	800.966.680	474.281.348	
19	027	Kementerian Sosial	429.229.942	2.844.045.420			
20	029	Kementerian Kesehatan	1.595.987.772	20.076.067.215			
21	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.585.102.403	3.077.845.489			
22	033	Kementerian Pekerjaan Umum	90.256.723.878	129.943.580.652	464.723.968	924.648.281	
23	034	Kemendagri Bidang Politik dan Keamanan	89.281.032	34.792.984	67.900.000	92.900.000	
24	035	Kemendagri Bidang Pemerintahan	80.660.791	472.555.219			
25	036	Kemendagri Bidang Kesejahteraan Rakyat	502.912.927	85.173.284			
26	040	Kementerian Kesehatan dan Pariwisata	1.770.921.240	2.196.627.671	18.333.333	38.333.333	
27	041	Kementerian Negara BUMN	16.772.500	16.772.500			
28	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	821.680.991	639.279.882			
29	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	73.607.371	70.121.689	109.200.000	12.000.000	
30	044	Kementerian Negara KUMH	2.808.617.548	2.746.160.312	7.485.950.149	7.530.870.448	
31	047	Kementerian Negara Pambudayaan Perumpuan	96.293.000	374.463.888			
32	048	Kementerian Negara PAM	123.191.980	293.140			

DAFTAR NERACA 389

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 23

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		Dalam Rupiah)
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	
33	050	Badan Intelijen Negara	-	62.641.824.097	-	-	-
34	051	Lembaga Sumpul Negara	311.794.000	157.734.520	-	-	-
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-
36	054	Badan Pusat Statistik	2.774.401.823	4.728.485.565	-	-	-
37	058	Badan Pertanahan Nasional	9.895.858.284	3.945.778.871	17.400.378.211	14.515.577.014	15.000.000
38	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	-	-	-	-	-
39	059	Kementerian Kominfo	1.713.855.113	1.146.033.884	6.040.229.256.099	46.933.667	1.417.354.316
40	060	Kepolisian RI	83.127.696.097	198.832.881.549	9.252.117.772	-	30.340.000
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	926.332.883	1.895.860.838	16.380.000	-	-
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	6.201.000	-	-	-	-
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	626.741.873	355.247.880	-	-	-
44	068	Badan Nasional Monev	8.118.498.620	1.005.588.234	-	-	-
45	067	Kementerian Negara PDT	133.951.193	157.424.221	-	-	-
46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	223.600.345	388.336.893	-	-	-
47	074	Kumham HAM	-	37.005.485	-	-	-
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	855.648.487	4.576.579.279	-	-	-

DAFTAR NERACA 39D

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		(Dalam Rupiah)
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	
49	076	Komisi Pemilihan Umum	389.770.658	860.777.048			
50	077	Mahkamah Konstitusi RI	10.055.990	93.670.588	93.106.000	93.106.000	
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	19.320.000	18.089.388	2.500.000	
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	502.174.953	1.681.037.825	2.513.580	-	
53	080	Bulan Tenaga Nuklir Nasional	1.855.754.382	2.485.122.018	177.588.250	0.375.000	
54	081	Bulan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1.499.328.181	7.851.174.147			
55	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	356.453.745	1.943.557.271			
56	084	Badan Standardisasi Nasional	15.625.618	19.620.196	248.500.000	466.190.000	
57	085	Badan Pengawas Tenaga Muliir	300.260.443	235.049.038			
58	086	Lembaga Administrasi Negara	181.746.148	308.592.561	903.676.968	629.779.489	
58	087	Ayup Nasional Republik Indonesia	1.538.126.556	15.704.775			
60	088	Bulan Kepejawaan Negara	195.842.208	678.208.678	98.000.000	-	
61	089	Bulan Penjawasan Keuangan dan Pembangunan	1.488.435.491	2.745.925.873	112.224.813	410.383.918	
62	080	Kementerian Perdagangan	141.236.531	735.348.021	652.345.859	715.182.887	
63	081	Kemen Perumahan Rakyat	9.888.228.118	7.980.000			
64	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	1.225.169.854	2.90.693.054	1.650.000	-	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 23

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		Dalam Rupiah)
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	
65	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.828.046.840	3.881.752.442			
66	095	Dewan Perwakilan Daerah	341.437.793	417.038.789			
67	100	Komisi Yudisial RI	18.500.000	83.430.625	9.798.000	8.798.000	
68	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	364.836.512.063	38.308.858.050			
69	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	707.847.172	1.055.467.130	87.877.562	86.763.748	
70	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		17.507.000			
71	107	Badan SAR Nasional	482.047.967	-			
72	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	24.560.405	151.892.061			
73	110	Ombudsman Republik Indonesia	41.580.400	-			
74	889.03				2.318.040.768.528		
75	999.05	BUM DJPK	18.292.725.877.411	15.798.485.847.230			
76	888.08	BUM Belanja lainnya	3.485.884.368.048	8.708.566.834.982			
77	988.882	BUM Dit. PKN	1.137.834.225.863	638.058.754.870			
78	988.889	BUM IBAPERTARUM		3.551.728.799.482			
		JUMLAH	31.780.834.389.020	31.370.392.714.581	8.639.914.082.680	119.116.551.668	

DAFTAR NERACA 392

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 2011 (AKHIR)

Lampiran 24.A

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI
Per 31 Desember 2011

Luar Rp/ik

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate %	Unmortized	Book Value
					Premi - Diskon	
FIXED RATE BOND			27.088.488.000,000		(07.274.007,000)	27.018.093.993,000
1	FRCD17	15-Jun-12	7.351.283,000,000	13,17000%	2.815,260,000	7.534.176,740,000
2	FRCD18	15-Jul-12	5.453,000,000,000	13,17000%	-	5.453,000,000,000
3	FRCD23	15-Dec-12	4.284,205,000,000	11,00000%	(70.587,267,000)	4.461.859,893,000
VARIABLE RATE			4.388.488.000,000			4.388.488.000,000
1	VRCD18	23-Dec-12	4.388.488,000,000	6,57000%		4.388.488,000,000
ORI			21.026.488.000,000			21.026.488.000,000
1	OR CD4	12-Mar-12	2.838,785,000,000	3,00000%	-	2.838,785,000,000
2	OR CD6	14-Aug-12	8.188,203,000,000	3,34000%	-	8.188,203,000,000
ZERO COUPON			1.248.000.000,000		(100.287,864,000)	1.148.732,136,000
1	ZCC03	20-Nov-12	1.248,000,000,000		(100,287,864,000)	1.148,732,136,000
SURAT UTANG PEMERINTAH			4.184.808.289,458			4.184.808.289,458
1	SUD03	1-Apr-12	3.353,312,838	3,10000%	-	3.135,553,312,838
2	SUD05	1-Oct-12	363,791,236,333	3,10000%	-	333,751,236,333
3	SUD04	1-Jan-12	968,131,824,075	3,10000%	-	898,131,824,075
4	SUD04	1-Dec-12	811,238,530,770	3,10000%	-	811,238,530,770
5	SUD07	1-Feb-12	929,607,817,588	3,10000%	-	829,607,817,588
6	SUD07	1-Aug-12	871,188,107,138	3,10000%	-	871,188,107,138
BAGIAN LANCAR SUB JY PJO			58.517.748.788,456		(167.641,671,000)	58.344.607.418,456
SFM			28.200.000.000,000		(880.090,040,000)	28.200.043.000,000
1	SPYD3 20098	9-Feb-12	3.800,000,000,000	-	(25,845,700,000)	3.774,154,299,000
2	SPYD3 20098	8-Mar-12	3.400,000,000,000	-	(38,428,380,000)	3.437,571,620,000
3	SPYD3 20098	6-Apr-12	880,000,000,000	-	(14,442,890,000)	865,557,110,000
4	SPYD3 20098	4-May-12	4.000,000,000,000	-	(13,344,130,000)	3.986,655,870,000
5	SPYD3 20098	8-Jun-12	4.100,000,000,000	-	(38,380,790,000)	4.061,619,210,000
6	SPYD3 20098	8-Jul-12	2.200,000,000,000	-	(38,215,360,000)	2.161,784,640,000
7	SPYD3 20098	1-Aug-12	280,000,000,000	-	(38,790,000)	241,210,000,000
8	SPYD3 20098	15-Sep-12	280,000,000,000	-	(64,470,000)	199,530,000,000
9	SPYD3 20098	9-Feb-12	1.100,000,000,000	-	(4,858,540,000)	1.095,141,460,000
10	SPYD3 20098	23-Feb-12	300,000,000,000	-	(1,960,370,000)	298,039,630,000
11	SPYD3 20098	18-Aug-12	1.300,000,000,000	-	(48,236,330,000)	1.251,763,670,000
12	SPYD3 20098	4-Sep-12	2.000,000,000,000	-	(34,108,240,000)	1.965,891,760,000
13	SPYD3 20098	10-May-12	4.000,000,000,000	-	(134,132,500,000)	3.865,867,500,000
14	SPYD3 20098	11-Feb-12	4.300,000,000,000	-	(11,000,000,000)	4.189,000,000,000
SUM JANGKA PEDETAI			79.800.000.000,000		(999.950,940,000)	78.800.049,060,000
SURAT PERBERDAHAAN MEBARA SYARIAH			1.320.000.000,000		(10.151,163,000)	1.309.848,837,000
1	SPMS 200912	3-Feb-12	500,000,000,000	-	(1,880,500,000)	500,000,000,000
2	SPMS 200912	15-Apr-12	420,000,000,000	-	(3,130,430,000)	416,869,570,000
3	SPMS 200912	24-Feb-12	380,000,000,000	-	(2,000,230,000)	377,999,770,000
SLSM			5.280.280.000,000			5.280.280.000,000
1	SHU07	23-Feb-12	5.280,280,000,000	12,000%		5.280,280,000,000
SDHI			3.347.000.000,000			3.347.000.000,000
1	SDHI 20124	8-Mar-12	3.347,000,000,000	7,50000%	-	3.347,000,000,000
SLSM JANGKA PEDETAI			8.888.200.000,000			8.888.200.000,000
TOTAL SUB JANGKA PEDETAI			88.830.528.289,458		(877.748,074,000)	87.952.780,215,458

DITATA PERACA 3/30

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR TAHUN)

DAFTAR 24.B

Utang Bunga(lmbakan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011

(Dalam Ruziah)

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
		Date			
FIXED RATE BOND			474.925.758.000.000		13.328.508.988.302
1	FRC017	'501/2012	7.851.283.000.000	13,1500%	487.671.353.431
2	FRC018	'501/2012	5.433.262.000.000	13,1750%	382.499.892.808
3	FRC019	'506/2013	11.436.241.000.000	14,2500%	75.323.521.079
4	FRC020	'501/2013	13.031.751.000.000	14,2750%	86.773.495.100
5	FRC023	'501/2012	14.772.743.000.000	11,0000%	25.715.478.984
6	FRC026	'510/2014	13.435.779.000.000	11,0000%	31.5143.123.807
7	FRC027	'506/2013	13.634.700.000.000	9,5000%	50.231.802.000
8	FRC028	'501/2012	14.271.233.000.000	10,0000%	38.438.012.708
9	FRC030	'505/2013	13.894.200.000.000	10,7500%	14.7319.190.000
10	FRC031	'511/2013	17.809.700.000.000	11,0000%	254.219.497.000
11	FRC032	'507/2013	1.454.000.000.000	15,0000%	55.368.132.000
12	FRC033	'503/2013	3.403.477.000.000	12,5000%	348.674.772.773
13	FRC034	'506/2013	16.736.400.000.000	12,8000%	65.616.792.000
14	FRC035	'508/2012	11.023.750.000.000	12,9000%	66.784.010.000
15	FRC036	'504/2013	13.626.000.000.000	11,0000%	388.315.946.000
16	FRC037	'509/2012	3.433.000.000.000	12,0000%	67.523.800.000
17	FRC038	'508/2013	2.621.757.000.000	11,3000%	127.372.297.556
18	FRC039	'505/2013	4.175.000.000.000	11,7500%	105.244.580.000
19	FRC040	'509/2012	26.474.000.000.000	11,0000%	864.131.438.000
20	FRC042	'507/2012	14.774.700.000.000	10,2500%	565.568.406.100
21	FRC043	'507/2012	14.417.000.000.000	10,2500%	582.688.037.000
22	FRC044	'508/2014	13.674.000.000.000	10,0000%	384.475.380.000
23	FRC045	'505/2013	6.400.000.000.000	8,7500%	80.563.900.000
24	FRC046	'507/2012	16.856.700.000.000	9,5000%	735.638.630.000
25	FRC047	'501/2013	23.643.000.000.000	10,0000%	767.168.470.000
26	FRC048	'509/2013	5.675.270.000.000	8,0000%	151.585.262.110
27	FRC049	'500/2013	4.786.007.000.000	8,0000%	127.310.750.721
28	FRC050	'507/2013	15.856.000.000.000	10,5000%	790.349.450.000
29	FRC051	'505/2014	3.236.123.000.000	11,2500%	22.931.522.689
30	FRC052	'508/2013	23.500.700.000.000	10,5000%	932.110.000.000
31	FRC053	'507/2012	13.622.000.000.000	8,2500%	747.814.042.000
32	FRC054	'501/2013	27.036.000.000.000	9,5000%	1.184.135.056.000
33	FRC055	'509/2013	15.400.000.000.000	7,3750%	320.932.800.000
34	FRC056	'500/2013	17.134.700.000.000	8,3750%	420.578.230.000
35	FRC057	'505/2014	13.643.000.000.000	9,5000%	184.574.170.000
36	FRC058	'506/2012	3.403.000.000.000	8,2500%	26.323.800.000
37	FRC059	'505/2012	7.851.000.000.000	7,0000%	70.349.300.000
38	FRC060	'504/2012	3.703.000.000.000	8,2500%	48.794.000.000
39	FRC061	'505/2012	7.003.000.000.000	7,0000%	64.169.800.000
DRH			42.616.370.000.000		180.003.432.785
1	DRH04	'502/2012	12.829.750.000.000	5,0000%	48.586.819.620
2	DRH05	'509/2013	3.856.575.000.000	11,7500%	3.355.756.875
3	DRH06	'508/2012	3.183.750.000.000	3,5000%	54.331.807.200
4	DRH07	'505/2013	7.851.000.000.000	7,5000%	26.784.285.000
5	DRH08	'510/2014	11.000.000.000.000	7,5000%	26.936.000.000

DAFTAR NERACA 394

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR 24.B

Utang Bunga(lmbakan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011

(Dalam Ruziah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
VARIABLE RATE BOND			135.003.418.000.000		723.777.587.150
1	WRJ173	25/10/2012	4.838.468.300.000	4,6133%	86.831.448.867
2	WRJ179	25/12/2014	13.656.225.300.000	4,75740%	17.911.946.131
3	WRJ120	25/04/2015	3.609.707.300.000	4,81338%	67.332.276.233
4	WRJ121	25/11/2015	7.446.320.300.000	4,43740%	88.498.905.376
5	WRJ122	25/03/2016	8.296.749.300.000	4,43740%	7.963.137.291
6	WRJ123	25/10/2016	3.033.759.300.000	4,81338%	70.939.126.781
7	WRJ124	25/02/2017	3.609.300.300.000	4,43740%	44.512.576.000
8	WRJ125	25/09/2017	6.819.300.300.000	4,43740%	1.505.108.110
9	WRJ126	25/01/2018	5.472.742.300.000	4,81338%	46.376.300.289
10	WRJ127	25/07/2018	5.442.742.300.000	4,81338%	46.376.300.289
11	WRJ128	25/06/2018	7.033.554.300.000	4,43740%	51.636.701.040
12	WRJ129	25/08/2018	13.213.300.300.000	4,75740%	61.367.771.479
13	WRJ130	25/12/2018	13.503.713.300.000	4,43740%	6.022.089.685
14	WRJ131	25/07/2020	25.822.354.300.000	4,6133%	226.130.404.706
SU DAN SRBI			244.836.437.384.007		82.027.721.802
1	SUJ12	01/04/2025	13.781.775.358.347	0,1030%	4.734.036.004
2	SUJ14	01/07/2025	61.701.747.150.885	0,1030%	4.036.194.626
3	SUJ17	01/08/2025	49.454.555.511.832	0,1030%	20.311.511.472
4	SRB01	01/08/2025	120.007.547.327.420	0,1030%	62.676.046.601
SBSN			61.451.268.000.000		706.615.830.740
1	IFPCC1	15/08/2028	2.714.700.300.000	11,8000%	120.050.335.700
2	IFPCC2	15/08/2018	1.568.700.300.000	11,0500%	80.856.046.000
3	IFPCC3	15/08/2018	2.632.300.300.000	6,2500%	17.336.940.000
4	IFPCC4	15/10/2018	550.000.300.000	8,0000%	10.548.000.000
5	IFPCC5	15/11/2017	1.171.700.300.000	6,0000%	48.666.400.000
6	IFPCC6	15/03/2020	2.176.300.300.000	10,2500%	63.146.100.000
7	IFPCC7	15/01/2025	1.674.200.300.000	10,2500%	73.201.997.000
8	IFPCC8	15/03/2020	252.700.300.000	6,8000%	9.376.720.000
9	IFPCC9	15/02/2028	3.713.300.300.000	10,0000%	140.134.120.000
10	SFP 2013A	03/03/2012	3.847.300.300.000	7,6100%	184.261.086.000
11	SFP 2013B	17/05/2015	4.250.000.300.000	7,5500%	129.370.000.000
12	SFP 2014A	03/08/2014	2.836.700.300.000	7,3900%	120.63.176.000
13	SFP 2014B	25/01/2014	3.847.300.300.000	7,6100%	181.364.000
14	SFP 2014C	07/10/2014	3.000.000.300.000	7,1800%	9.694.000.000
15	SFP 2014D	11/02/2014	6.000.000.300.000	7,8900%	29.360.000.000
16	SFP 2014E	11/04/2012	2.600.000.300.000	6,6000%	9.012.000.000
17	SFP 2021B	17/10/2021	3.000.000.300.000	7,1800%	8.261.000.000
18	SR-001	25/02/2012	5.636.250.300.000	12,0000%	12.540.132.800
19	SR-002	11/02/2013	3.033.860.300.000	6,7000%	41.334.276.700
20	SR-003	23/02/2014	7.841.400.300.000	8,1600%	12.417.960.800
INTERNATIONAL BOND			195.629.800.000.000		4.183.545.628.445
1	RIB014	11/03/2014	11.769.400.300.000	6,7500%	246.348.076.000
2	RIB015	22/07/2015	3.038.000.300.000	7,2500%	126.669.806.500
3	RIB016	15/01/2016	3.191.300.300.000	7,5000%	262.241.300.000
4	RIB017	03/03/2017	3.033.000.300.000	6,8750%	169.364.444.444

DAFTAR NERACA 395

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

DAFTAR 24.B

**Utang Bunga(lmbalin (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011**

(Dalam Ruziah)

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
		Date			
5	RI001E	17/01/2018	17.220.000.000.000	6,57300%	566.038.072.222
3	RI003E	12/10/2018E	14.500.000.000.000	8,00000%	570.628.472.222
7	RI003F	17/02/2017	13.602.000.000.000	8,62500%	326.421.241.667
8	RI003E	17/01/2018E	13.139.000.000.000	7,75000%	540.301.555.556
9	RI002E	12/03/2018E	10.103.000.000.000	5,87900%	315.647.000.000
10	RI141E14	03/05/2014	9.038.000.000.000	11,27500%	148.380.241.667
11	RI193E01	01/03/2018E	13.139.000.000.000	11,02500%	565.000.750.000
12	SM14	29/04/2014	5.504.300.000.000	3,50000%	67.374.702.222
10	SM18	29/11/2018	9.034.000.000.000	4,00000%	40.302.222.222
14	JFYS1907	29/07/2018E	4.088.000.000.000	3,75000%	41.121.012.500
15	JFYS32010	12/11/2020	7.008.000.000.000	1,00000%	5.261.890.000
13	RI052F	05/05/2017	22.670.000.000.000	4,87900%	171.314.136.667
TOTAL			1.153.923.030.364.000		10.274.079.498.334

* Kurs Tengah DJPP pada tanggal pelaporan 30 Desember 2011 adalah Rp.116,00

* Kurs Tengah BULSD pada tanggal pelaporan 30 Desember 2011 adalah Rp5,000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

LAMBAR 25

**Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011**

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate	Unamortized	Book Value
			Outstanding	%	Prem) - (Disc)	
FIXED RATE BOND			27.623.466.000.000		(67.374.007.000)	27.556.091.993.000
1	FRC07	15-Jan-12	7.831.233.000.000	13,14000%	2.813.000.000	7.831.233.000.000
2	FRC08	15-Jul-12	5.430.000.000.000	13,17500%	-	5.430.000.000.000
3	FRC09	13-Dec-12	14.722.149.000.000	11,00000%	(7.297.097.000)	14.651.659.933.000
VARIABEL RATE			4.366.483.000.000		-	4.366.483.000.000
1	VR001	25-Jan-12	4.366.483.000.000	4,31000%	-	4.366.483.000.000
ORI			21.026.495.000.000		-	21.026.495.000.000
1	OR004	12-Mar-12	12.930.795.000.000	6,50000%	-	12.930.795.000.000
2	OR008	19-Aug-12	8.095.700.000.000	6,25000%	-	8.095.700.000.000
ZERO COUPON			1.249.000.000.000		(100.267.864.000)	1.148.732.136.000
1	ZC007	20-Nov-12	1.249.000.000.000	-	(100.267.864.000)	1.148.732.136.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			4.184.803.289.456		-	4.184.803.289.456
1	SU002	1-Apr-12	322.568.812.888	0,10000%	-	322.568.812.888
2	SU002	1-Jul-12	391.731.283.333	0,10000%	-	391.731.283.333
3	SU004	1-Jan-12	888.131.884.015	0,10000%	-	888.131.884.015
4	SU004	1-Dec-12	511.338.590.716	0,10000%	-	511.338.590.716
5	SU007	1-Feb-12	320.591.911.533	0,10000%	-	320.591.911.533
6	SU007	1-Aug-12	671.160.000.000	0,10000%	-	671.160.000.000
BAGIAN LANCAR SUN JK PJG			58.512.248.280.456		(167.641.874.000)	58.344.607.416.456
SPN			29.900.000.000.000		(699.956.940.000)	29.200.043.060.000
1	SP12C12020E	5-Feb-12	3.800.000.000.000	-	(25.943.701.000)	3.774.056.299.000
2	SP12C12030E	3-Mar-12	3.450.000.000.000	-	(35.430.530.000)	3.414.569.470.000
3	SP12C12040B	3-Apr-12	500.000.000.000	-	(11.712.938.000)	488.287.062.000
4	SP12C12050I	7-May-12	800.000.000.000	-	(13.347.138.000)	786.652.862.000
5	SP12C12060E	3-Jun-12	4.000.000.000.000	-	(48.880.847.000)	3.951.119.153.000
6	SP12C12070B	6-Jul-12	2.200.000.000.000	-	(35.273.939.000)	2.164.726.061.000
7	SP12S12010E	1-Aug-12	750.000.000.000	-	(55.739.000)	749.440.261.000
8	SP12S12011E	13-Sep-12	200.000.000.000	-	(44.870.000)	199.530.130.000
9	SP12S12020E	2-Oct-12	1.000.000.000.000	-	(1.836.572.000)	998.163.428.000
10	SP12S12022B	23-Nov-12	300.000.000.000	-	(1.980.940.000)	298.019.060.000
11	SP12S12031E	18-Dec-12	1.800.000.000.000	-	(2.234.081.000)	1.565.918.919.000
12	SP12S120514	14-Sep-12	3.050.000.000.000	-	(34.139.741.000)	3.015.860.259.000
13	SP12S121005	10-May-12	4.100.000.000.000	-	(34.132.303.000)	3.965.867.697.000
14	SP12S121102	11-Feb-12	4.500.000.000.000	-	(171.332.705.000)	4.328.667.295.000
SUN JANGKA PENDEK (A)			29.900.000.000.000		(699.956.940.000)	29.200.043.060.000
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH			1.320.000.000.000		(10.151.183.000)	1.309.848.817.000

DRAFT/REVISI/307

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR)

LAMP. 25

**Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011**

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate %	Unamortized	Book Value
					Prem(-)/Disc(+)	
1	SPUS20122012	8-Feb-12	6.000.000.000		(1.880.619.000)	4.119.381.000
2	SPUS20122012	12-Apr-12	4.000.000.000		(8.180.489.000)	4.119.511.000
3	SPUS24022012	24-Feb-12	300.000.000.000	-	(2.020.206.000)	297.979.794.000
SBSN			5.550.290.000.000			5.550.290.000.000
	SBSN	29-Feb-12	5.550.290.000.000	12,000%	-	5.550.290.000.000
SDHI			3.342.000.000.000			3.342.000.000.000
	SDHI 27125	5-Mar-12	3.342.000.000.000	7,9100%	-	3.342.000.000.000
SBSN JANGKA PENDEK (%)			8.892.290.000.000			8.892.290.000.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			98.630.539.289.456		(877.749.974.000)	97.752.789.315.456

LAPORAN KE-41/2011/PEMERINTAH FUSAT T4-...A.2011 (ADDITED)

DRAFT 23 A

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Par 31 Desember 2011

Miliar Rupiah

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate	Unamortized	Book Value
		Date	Outstanding	(%)	Prin(+)/Dis(-)	
FIXED RATE BOND			446.842.288.000.000		(4.168.630.225.000)	442.673.648.775.000
1	FFJC15	'5/08/2013	11.456.041.370.300	4,2500%		11.456.041.000.000
2	FFJC20	'5/12/2013	13.061.451.370.300	4,2500%		13.061.451.000.000
3	FFJC26	'5/10/2014	13.755.749.370.300	4,2500%	(156.757.642.000)	13.598.991.358.000
4	FFJC27	'5/08/2015	13.554.030.370.300	5,2500%	(2.400.368.000)	11.153.662.360.000
5	FFJC28	'5/07/2017	14.221.768.370.300	6,0000%	(70.477.383.000)	13.524.290.987.000
6	FFJC30	'5/05/2018	13.657.030.370.300	6,2500%	(166.409.584.000)	13.490.621.403.000
7	FFJC31	'5/11/2020	17.839.030.370.300	4,2500%	(355.253.230.000)	17.483.777.170.000
8	FFJC32	'5/07/2018	1.434.030.370.300	5,0000%	(26.107.667.000)	1.407.922.703.000
9	FFJC33	'5/08/2013	9.733.777.370.300	4,2500%	(6.354.764.000)	3.379.013.370.000
10	FFJC34	'5/06/2021	16.756.430.370.300	4,2500%	(205.240.364.000)	16.551.189.640.000
11	FFJC35	'5/08/2022	11.023.750.370.300	4,2500%	(22.260.323.000)	10.801.489.327.000
12	FFJC36	'5/09/2013	13.736.430.370.300	4,2500%	(6.957.361.000)	6.779.069.000.000
13	FFJC37	'5/08/2026	2.753.030.370.300	4,2500%	(1.582.760.000)	1.170.269.610.000
14	FFJC38	'5/08/2013	2.023.757.370.300	4,2500%	(17.263.754.000)	2.006.493.603.000
15	FFJC39	'5/08/2020	4.175.030.370.300	4,2500%	(47.060.667.000)	4.127.969.703.000
16	FFJC40	'5/08/2026	26.771.030.370.300	4,2500%	(210.963.642.000)	26.560.066.728.000
17	FFJC42	'5/07/2027	14.774.130.370.300	4,2500%	(176.002.578.000)	14.598.128.142.000
18	FFJC43	'5/07/2022	14.417.030.370.300	4,2500%	(102.104.269.000)	14.314.925.771.000
19	FFJC44	'5/09/2024	13.034.030.370.300	4,2500%	(134.100.666.000)	12.900.929.704.000
20	FFJC45	'5/05/2037	6.733.030.370.300	5,7500%	(24.329.643.000)	6.708.701.357.000
21	FFJC46	'5/07/2023	16.855.030.370.300	5,2500%	(203.021.563.000)	16.652.008.837.000
22	FFJC47	'5/02/2028	23.043.030.370.300	4,2500%	(146.143.057.000)	22.896.886.840.000
23	FFJC48	'5/08/2013	5.624.970.370.300	5,0000%	(261.938.750.000)	5.363.031.620.000
24	FFJC49	'5/08/2013	4.736.937.370.300	6,0000%	(153.353.602.000)	4.583.583.668.000
25	FFJC50	'5/07/2018	15.686.030.370.300	6,0000%	(446.263.052.000)	15.239.767.616.000
26	FFJC51	'5/05/2014	2.336.133.370.300	4,2500%	(36.852.740.000)	2.299.280.630.000
27	FFJC52	'5/08/2030	23.533.030.370.300	4,2500%	(257.501.708.000)	23.275.528.662.000
28	FFJC53	'5/07/2021	13.622.030.370.300	6,2500%	(35.270.651.000)	13.586.759.719.000
29	FFJC54	'5/07/2021	7.196.030.370.300	5,0000%	(77.059.007.000)	7.118.971.763.000
30	FFJC55	'5/09/2016	15.733.030.370.300	7,3750%	(36.430.622.000)	15.696.599.748.000
31	FFJC56	'5/09/2026	17.164.030.370.300	5,3750%	(306.954.078.000)	16.857.075.662.000
32	FFJC57	'5/05/2021	13.553.030.370.300	5,2500%	(307.060.153.000)	13.245.970.547.000
33	FFJC58	'5/06/2032	3.733.030.370.300	5,2500%	(96.007.245.000)	3.637.023.325.000
34	FFJC59	'5/05/2027	7.853.030.370.300	7,0000%	(54.843.150.000)	7.798.186.841.000
35	FFJC60	'5/04/2017	3.733.030.370.300	6,3750%	(50.576.234.000)	3.682.454.636.000
36	FFJC61	'5/05/2027	7.133.030.370.300	7,0000%	(302.850.354.000)	6.830.179.946.000
DBI			21.583.875.000.000			21.583.875.000.000
1	DBIC1	'5/09/2013	7.666.875.000.000	4,2500%		7.666.875.000.000
2	DBIC2	'5/08/2013	7.923.030.370.300	7,9500%		7.923.030.370.300
3	DBIC3	'5/10/2014	11.030.030.370.300	7,3000%		11.030.030.370.300
ZERO COUPON			1.263.000.000.000		(104.765.143.000)	1.158.234.857.000
1	ZCC05	20/02/2013	1.263.000.000.000			1.158.234.857.000
VARIABLE RATE BOND			130.694.933.000.000			130.694.933.000.000

CATATAN 10/2011

LAPORAN KE-41.54N PEMERINTAH PUSAT T4-JA.2011 (MODIFIED)

DRAFT 23 A

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Par 31 Desember 2011**

* dalam Rupiah *

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Premia (+) / Dis(-)	Book Value
1	WFO01E	25/12/2011	12.658.226.000.000	4,4670%	-	12.566.225.000.000
2	WFO02E	25/04/2012	3.833.037.000.000	4,8133%	-	3.833.037.000.000
3	WFO02E	25/11/2012	7.446.320.000.000	4,4670%	-	7.446.320.000.000
4	WFO02E	25/03/2012	3.788.044.000.000	4,4670%	-	3.788.044.000.000
5	WFO02E	25/10/2012	3.652.056.000.000	4,8133%	-	3.652.056.000.000
6	WFO03A	25/12/2017	3.033.310.000.000	4,4074%	-	3.033.310.000.000
7	WFO03E	25/09/2017	6.933.330.000.000	4,4674%	-	6.933.330.000.000
8	WFO03E	25/11/2013	5.742.142.000.000	4,8133%	-	5.742.142.000.000
9	WFO02E	25/07/2013	5.442.142.000.000	4,8133%	-	5.442.142.000.000
10	WFO03E	25/06/2013	7.033.984.000.000	4,4674%	-	7.033.984.000.000
11	WFO03E	25/08/2013	12.212.320.000.000	4,4670%	-	12.212.320.000.000
12	WFO02E	25/12/2013	10.533.015.000.000	4,4074%	-	10.533.015.000.000
13	WFO02E	25/07/2013	25.322.354.000.000	4,8133%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			240.451.634.074.551			240.451.634.074.551
1	SUD02	01/04/2012	10.077.450.567.616	0,1000%	-	10.077.450.567.616
2	SUD04	01/12/2012	43.921.476.665.153	0,1000%	-	43.921.476.665.153
3	SUD07	01/08/2012	40.754.718.553.133	0,1000%	-	40.754.718.553.133
4	SUD01	01/06/2010	126.637.947.327.423	0,1000%	-	126.637.947.327.423
Total SUN Jangka Panjang (a)			840.641.730.074.551		(4.274.404.308.000)	836.367.325.766.551
SBSN			52.552.970.000.000		300.328.346.000	52.853.298.346.000
1	IF0001	15/08/2012	2.711.000.000.000	11,8000%	-	2.711.000.000.000
2	IF0002	15/08/2013	1.095.000.000.000	11,9500%	-	1.095.000.000.000
3	IF0003	15/09/2012	5.635.000.000.000	5,7500%	45.044.124.000	5.680.044.124.000
4	IF0004	15/10/2013	5.000.000.000.000	5,0000%	12.322.345.000	5.012.322.345.000
5	IF0005	15/11/2017	1.171.000.000.000	6,0000%	37.714.412.000	1.208.714.412.000
6	IF0006	15/03/2010	2.175.000.000.000	10,2500%	14.970.747.000	2.189.970.747.000
7	IF0007	15/11/2012	1.547.000.000.000	10,3000%	4.389.128.000	1.551.389.128.000
8	IF0008	15/03/2010	252.000.000.000	8,8000%	268.625.000	252.268.625.000
9	IF0009	15/02/2010	3.713.000.000.000	10,0000%	202.814.452.000	3.915.814.452.000
10	SH0001A	09/05/2010	4.263.000.000.000	7,2500%	-	4.263.000.000.000
11	SH0001A	09/08/2011	2.855.000.000.000	7,3600%	-	2.855.000.000.000
12	SH0001A	25/08/2014	336.000.000.000	7,3000%	-	336.000.000.000
13	SH0001A	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,1800%	-	2.000.000.000.000
14	SH0001A	11/02/2011	6.000.000.000.000	7,3800%	-	6.000.000.000.000
15	SH0001A	11/04/2011	2.000.000.000.000	8,0000%	-	2.000.000.000.000
16	SH0001A	17/10/2011	3.000.000.000.000	7,1600%	-	3.000.000.000.000
17	SH0002	10/02/2010	6.000.000.000.000	8,4000%	-	6.000.000.000.000
18	SP002	23/02/2011	7.341.710.000.000	8,1500%	-	7.341.710.000.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			52.552.970.000.000		300.328.346.000	52.853.298.346.000
TOTAL SBN Jangka Panjang (a+b)			893.194.700.074.551		(3.974.076.022.000)	889.220.624.052.551

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKHIR 2011)

DAFTAR 26.8

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri (Valas)
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized		Bank Value
							Prem(+)	Dis(-)	
(Dalam Rpl)									
			181.024.485.578.150			169.571.600.000.000			189.845.723.698.000
1	RI0014	10-Mar-14	11.330.185.221.750	6,75%	-11.452.895.578.150	11.788.400.000.000	274.123.698.000	-11.269.179.000	11.777.138.921.000
2	RI0015	20-Apr-15	9.613.000.000.000	7,25%	-545.000.000.000	9.068.000.000.000	-25.761.411.000	-27.429.039.000	9.042.238.589.000
3	RI0016	15-Jan-16	9.099.000.000.000	7,50%	-937.800.000.000	8.161.200.000.000	-27.429.039.000	-38.855.548.000	8.133.770.961.000
4	RI0017	8-Mar-17	8.370.000.000.000	6,88%	-302.000.000.000	8.068.000.000.000	-174.784.028.000	904.513.271.000	8.028.144.452.000
5	RI0018	17-Jan-18	17.804.549.384.750	6,88%	-575.349.384.750	17.229.200.000.000	904.513.271.000	-181.792.127.000	17.053.435.974.000
6	RI0035	12-Oct-35	15.436.000.000.000	8,50%	-927.200.000.000	14.508.800.000.000	13.602.000.000.000	-365.232.488.000	15.413.313.271.000
7	RI0037	17-Feb-37	13.575.648.587.500	6,63%	26.357.412.500	13.602.000.000.000	18.136.000.000.000	17.770.747.502.000	13.420.207.873.000
8	RI0038	17-Jan-38	18.728.115.845.000	7,75%	-583.115.845.000	18.136.000.000.000	18.136.000.000.000	0	17.770.747.502.000
9	RI0320	13-Mar-20	18.550.000.000.000	5,88%	-414.000.000.000	18.136.000.000.000	9.068.000.000.000	-29.694.486.000	18.136.000.000.000
10	RI 140504	4-May-14	12.025.000.000.000	10,38%	-2.957.000.000.000	9.068.000.000.000	18.136.000.000.000	-124.917.757.000	9.038.305.514.000
11	RI 190304	4-Mar-19	24.050.000.000.000	11,63%	-5.914.000.000.000	18.136.000.000.000	22.670.000.000.000	349.340.488.000	18.011.082.243.000
12	RI0521	5-May-21	21.441.886.560.150	4,88%	1.228.013.439.850	22.670.000.000.000	14.962.200.000.000	0	23.019.340.488.000
	SBSN VALAS (USD)		16.056.798.522.903		-1.104.598.522.903	14.962.200.000.000			14.962.200.000.000
13	SM14	23-Apr-14	7.031.748.227.903	8,80%	-1.137.548.227.903	5.894.200.000.000			5.894.200.000.000
14	SM1B	21-Nov-18	9.036.050.295.000	4,00%	32.949.705.000	9.068.000.000.000			9.068.000.000.000

DAFTAR NERACA 401

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (Rp2011)

DAFTAR 26.B

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri (Valas)
Per 31 Desember 2011**

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized		Book Value
							Prem(+)	Dis(-)	
	SUN VALAS (JPY)		10.188.748.000.000		808.900.000.000	11.098.000.000.000	0	0	11.098.000.000.000
14	RIJPY0719	29-Jul-19	3.695.300.000.000	2,73%	392.700.000.000	4.088.000.000.000	0	0	4.088.000.000.000
15	RIJPY1120	20-Nov-20	6.490.800.000.000	1,60%	517.200.000.000	7.008.000.000.000	0	0	7.008.000.000.000
	Jumlah SBSN Valas		15.055.798.522.903		-1.104.598.522.903	14.952.200.000.000	0	0	14.952.200.000.000
	Jumlah SUN Valas		181.211.213.578.150		-10.542.895.578.150	180.667.800.000.000	274.123.698.000	274.123.698.000	180.941.723.698.000
	TOTAL		207.278.012.102.053		-11.647.564.102.053	195.629.800.000.000	274.123.698.000	274.123.698.000	195.903.923.698.000

(Dalam Rp)

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011): 11680,00 %

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011): 906800,00 %

DAFTAR NERACA-402

WALAU SUDAH DIKORIGIRI, BUKAN BERTUTUP SAMA SAMA

DAFTAR 53

INTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011

NO	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KORREKSI GAKAS	KORREKSI RL	SELISIH KOREKSI	
					ABSOLUT	NETTO
1	001	DEKRET/KEPUTUSAN/PERNYATAAN	30.924.317.000	30.924.317.000	-	-
2	002	DEKRET/PERKAR/PERNYATAAN	228.103.778.878	228.103.778.878	-	-
3	004	EDARAN PEMERINTAH KEJANDARAN	348.031.068.282	649.031.038.282	-	-
4	005	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.902.271.170.000	-	-
5	006	KEPERATURANAN	2.014.525.220.072	2.014.525.220.072	-	-
6	007	PERATURAN MENTERI	0.720.070.020.040	0.000.732.030.040	-	-
7	008	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
8	009	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
9	010	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
10	011	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
11	012	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
12	013	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
13	014	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
14	015	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
15	016	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
16	017	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
17	018	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
18	019	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
19	020	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
20	021	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
21	022	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
22	023	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
23	024	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
24	025	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
25	026	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
26	027	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
27	028	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
28	029	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
29	030	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
30	031	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
31	032	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
32	033	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
33	034	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
34	035	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
35	036	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
36	037	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
37	038	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
38	039	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
39	040	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
40	041	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
41	042	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
42	043	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
43	044	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
44	045	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
45	046	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
46	047	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
47	048	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
48	049	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
49	050	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
50	051	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
51	052	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
52	053	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
53	054	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
54	055	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
55	056	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
56	057	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
57	058	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
58	059	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
59	060	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
60	061	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
61	062	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
62	063	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
63	064	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
64	065	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
65	066	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
66	067	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
67	068	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
68	069	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
69	070	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
70	071	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
71	072	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
72	073	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
73	074	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
74	075	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
75	076	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
76	077	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
77	078	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
78	079	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
79	080	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
80	081	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
81	082	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
82	083	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
83	084	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
84	085	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
85	086	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
86	087	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
87	088	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
88	089	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
89	090	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
90	091	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
91	092	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
92	093	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
93	094	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
94	095	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
95	096	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
96	097	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
97	098	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
98	099	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-
99	100	PERATURAN MENTERI	2.120.319.388.000	2.120.319.388.000	-	-

DAFTAR 54

REVISI DAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

DAFTAR 53

**INTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011**

NO	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KOMERSIAL/GAS	KOREKSI RA	SELISIH KOREKSI	
					ABSOLUT	NETTO
06	001	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERTANIAN	10.857.261.567	887.811.211.171	1.000.458.498	1.000.458.498
07	002	LEMBAGA PENELITIAN DAN AKTARIFA NASIONAL	257.458.408.183	257.458.408.183	1.387	1.387
08	003	BADAN PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	423.886.370.843	423.886.370.843	-	-
09	004	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	2.179.472.233	2.179.472.233	-	-
10	005	BADAN PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	18.701.815.248	18.701.815.248	-	-
11	006	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	344.222.618.263	344.222.618.263	-	-
12	007	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	228.619.183.889	228.619.183.889	11.921.750	11.921.750
13	008	BADAN PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	189.557.788.557	189.557.788.557	828	828
14	009	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	1.100.766.767.227	1.100.766.767.227	-	-
15	010	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	18.810.183.889	18.810.183.889	2.884.225.227	2.884.225.227
16	011	KEMENTERIAN PERKULIAHAN	-	-	-	-
17	012	KEMENTERIAN PERKULIAHAN	17.575.183.889	17.575.183.889	-	-
18	013	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	18.810.183.889	18.810.183.889	-	-
19	014	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	5.300.500.000.000	5.300.500.000.000	-	-
20	015	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	1.245.222.618.263	1.245.222.618.263	-	-
21	016	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	18.810.183.889	18.810.183.889	-	-
22	017	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	2.179.472.233	2.179.472.233	-	-
23	018	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	12.458.408.183	12.458.408.183	12.458.408.183	12.458.408.183
24	019	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	-	-	-	-
25	020	LEMBAGA PENELITIAN DAN KEHIMPUNAN NASIONAL	423.886.370.843	423.886.370.843	244.142.714	244.142.714
26	021	KEPIMPINAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN	-	-	-	-
TOTAL			442.978.890.181.398	442.978.890.181.398	1.636.158.316.182	1.636.158.316.182

527/2012

1206/2012/2012/2012/2012/2012

**INSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN BADAU LAYANAN UMUM
PEODPATAN, BESAR, DAN SURPLUS (KEMISI)
Per 31 Desember 2011
RENASIHAN 2011**

No	Jenis Laporan	REKONSTRUKSI	Partisipasi dan Sumbangan Tindak Tindak							Salinan (Berkas) Salin Dulu Ke Kas Majera	Salinan (Berkas) Majera	Salinan (Berkas) Majera APBN	Salinan (Berkas) Tempo APBN
			Operasional	Ke Operasional	APBN	Hibah	Tidak Partisipasi	Bukan Usaha	Salinan (Berkas) Salin Dulu Ke Kas Majera				
1	REKONSTRUKSI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	REKONSTRUKSI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	REKONSTRUKSI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	REKONSTRUKSI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	REKONSTRUKSI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	REKONSTRUKSI	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	REKONSTRUKSI	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	REKONSTRUKSI	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	REKONSTRUKSI	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	REKONSTRUKSI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	REKONSTRUKSI	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12	REKONSTRUKSI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
13	REKONSTRUKSI	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14	REKONSTRUKSI	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	REKONSTRUKSI	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16	REKONSTRUKSI	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
17	REKONSTRUKSI	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
18	REKONSTRUKSI	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
19	REKONSTRUKSI	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
20	REKONSTRUKSI	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
21	REKONSTRUKSI	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
22	REKONSTRUKSI	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
23	REKONSTRUKSI	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
24	REKONSTRUKSI	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
25	REKONSTRUKSI	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
26	REKONSTRUKSI	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
27	REKONSTRUKSI	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
28	REKONSTRUKSI	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
29	REKONSTRUKSI	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
30	REKONSTRUKSI	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
31	REKONSTRUKSI	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
32	REKONSTRUKSI	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
33	REKONSTRUKSI	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
34	REKONSTRUKSI	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
35	REKONSTRUKSI	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
36	REKONSTRUKSI	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
37	REKONSTRUKSI	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
38	REKONSTRUKSI	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
39	REKONSTRUKSI	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
40	REKONSTRUKSI	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
41	REKONSTRUKSI	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
42	REKONSTRUKSI	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
43	REKONSTRUKSI	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
44	REKONSTRUKSI	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
45	REKONSTRUKSI	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
46	REKONSTRUKSI	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
47	REKONSTRUKSI	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
48	REKONSTRUKSI	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
49	REKONSTRUKSI	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
50	REKONSTRUKSI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
51	REKONSTRUKSI	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
52	REKONSTRUKSI	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
53	REKONSTRUKSI	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
54	REKONSTRUKSI	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
55	REKONSTRUKSI	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
56	REKONSTRUKSI	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
57	REKONSTRUKSI	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
58	REKONSTRUKSI	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
59	REKONSTRUKSI	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
60	REKONSTRUKSI	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
61	REKONSTRUKSI	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
62	REKONSTRUKSI	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
63	REKONSTRUKSI	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
64	REKONSTRUKSI	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
65	REKONSTRUKSI	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
66	REKONSTRUKSI	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
67	REKONSTRUKSI	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
68	REKONSTRUKSI	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
69	REKONSTRUKSI	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
70	REKONSTRUKSI	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
71	REKONSTRUKSI	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	
72	REKONSTRUKSI	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
73	REKONSTRUKSI	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
74	REKONSTRUKSI	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
75	REKONSTRUKSI	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
76	REKONSTRUKSI	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
77	REKONSTRUKSI	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
78	REKONSTRUKSI	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
79	REKONSTRUKSI	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
80	REKONSTRUKSI	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
81	REKONSTRUKSI	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
82	REKONSTRUKSI	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
83	REKONSTRUKSI	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
84	REKONSTRUKSI	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
85	REKONSTRUKSI	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
86	REKONSTRUKSI	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
87	REKONSTRUKSI	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	
88	REKONSTRUKSI	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
89	REKONSTRUKSI	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
90	REKONSTRUKSI	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
91	REKONSTRUKSI	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
92	REKONSTRUKSI	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
93	REKONSTRUKSI	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
94	REKONSTRUKSI	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
95	REKONSTRUKSI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
96	REKONSTRUKSI	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
97	REKONSTRUKSI	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	
98	REKONSTRUKSI	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
99	REKONSTRUKSI	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
100	REKONSTRUKSI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

527/2012

LEMBANG: (SK-30) (Sifatnya: Zakat No. 2011-46850)

5070738 E

**INSTRUMEN LAPORAN KEUANGAN BADAU LAYANAN UMUM
PELOUPATAN, BESAR, DAN SURPLUS (LAMSI)
Per 31 Desember 2011
RENASIHAN 2011**

No	Jenis Layanan	BEMERKE BUDJETER	Pembayaran dan Pembayaran Tunggak							Salinan (Bakul) Sisa Dulu di Kas Meters	Saluran Kas dan Meters	Surplus/Defisit Meters APBN	Surplus/Defisit Tempo APBN
			Operasional	Ins Operasional	APBN	Hutang	Tangg. Penerimaan	Batas Usaha	Salinan (Bakul) Sisa Dulu di Kas Meters				
1			4	5	1	7	1-4-5-6-7	11-13	11	12	13		
		TOTAL PER DEPARTEMEN	1.770.717,25	100.251.058	16.251.058	16.251.058	1.770.717,25	1.770.717,25	67.005.206.315	30.000.000.000	37.005.206.315	37.005.206.315	
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (001)	764.017,71	206.652.000	37.110.000	37.110.000	764.017,71	764.017,71	26.000.000.000	1.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	
		KEMENTERIAN PERTANIAN (001)	30.530.112,02	101.200.000	20.200.000	20.200.000	30.530.112,02	30.530.112,02	60.000.000.000	1.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN (001)	3.225.125,73	401.200.000	101.200.000	101.200.000	3.225.125,73	3.225.125,73	20.000.000.000	100.000.000.000	23.225.125.73	23.225.125.73	
		KEMENTERIAN KESKERTAHAN (001)	1.110.125,73	500.000.000	8.000.000	8.000.000	1.110.125,73	1.110.125,73	0.000.000.000	0.000.000.000	1.110.125.73	1.110.125.73	
		KEMENTERIAN AGAMA (005)	1.110.125,73	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.110.125,73	1.110.125,73	0.000.000.000	0.000.000.000	1.110.125.73	1.110.125.73	
		KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KELUARGA (001)	86.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	86.000.000,00	86.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	86.000.000,00	86.000.000,00	
		POLISI REPUBLIK INDONESIA (001)	3.225.125,73	0.000.000	0.000.000	0.000.000	3.225.125,73	3.225.125,73	0.000.000.000	0.000.000.000	3.225.125.73	3.225.125.73	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENGURANG PENCUKUPAN (001)	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMERIKSA NASIONAL (002)	8.330.320,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	8.330.320,00	8.330.320,00	0.000.000.000	0.000.000.000	8.330.320,00	8.330.320,00	
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.110.125,73	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.110.125,73	1.110.125,73	0.000.000.000	0.000.000.000	1.110.125.73	1.110.125.73	
		KEMENTERIAN SOSIAL	25.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	
		KEMENTERIAN PERKANTORAN RAYAT	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		TOTAL JENIS PELAYANAN KEPERLOKATAN KARAS DAN JENSA	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	100.000.000.000	100.000.000.000	1.770.717,25	1.770.717,25	
		SERIKABAT NEGARA (001)	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	100.000.000.000	100.000.000.000	1.770.717,25	1.770.717,25	
		1. SERIKABAT NEGARA (001)	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	100.000.000.000	100.000.000.000	1.770.717,25	1.770.717,25	
		2. SERIKABAT NEGARA (001)	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENELITIAN DAN PENELITIAN	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	1.770.717,25	100.000.000.000	100.000.000.000	1.770.717,25	1.770.717,25	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	
		REKONSILIASI PERANGKAT LUNAS	0.000.000,00	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000,00	0.000	

laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Amdot)

DAFTAR 25 D

**PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 65 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN KEMH NOMOR 63/KM/08/2012
PER 31 DESEMBER 2011 (Amdot)**

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perakumulasi	Akumulasi Penyusutan	Nilai Setelah Disusutkan
024 KEMENTERIAN KESEHATAN				
1	RSUPH Dr. Cipto Mangunkusumo	2.206.151.085.000	408.119.130.551	1.028.930.724.592
2	RSUP Jember	470.458.443.000	168.532.039.37	263.980.648.606
3	RSUP Palaranbeta	194.390.732.500	59.900.313.893	101.237.118.670
4	RSUPH Hasan Saad	495.337.075.200	219.814.337.679	271.476.744.721
5	RSUPH Fatmahanik	1.300.894.050.000	64.757.000.000	1.241.347.050.000
6	RS Geger Chomas	1.110.282.401.500	137.036.103.00	973.923.048.370
7	RSUP Dr. Hasan Sadikin	1.104.327.197.811	309.995.232.889	798.925.051.652
8	RSUP Dr. Karadi	1.150.061.323.401	232.500.572.407	917.560.753.994
9	RSUP Dr. Sardjito	385.877.393.419	98.172.027.010	187.498.777.400
10	RSUP Dr. M. Izzudin	1.073.124.027.671	144.055.000.000	900.738.000.360
11	RSUP Dr. M. Djani	48.473.380.687	2.840.439.711	246.139.800.606
12	RSUP Dr. Wahidin Sudirjosubro	308.726.083.782	89.000.000.111	525.375.191.651
13	RSUP Sengul Jember	302.502.071.392	224.770.994.482	401.548.090.600
14	RSUP A. H. An. Muli	720.368.703.499	202.726.438.501	467.147.327.448
15	RSUP Dr. Soerjadi Tirtonegara	534.008.810.525	60.000.000.000	134.000.000.000
16	RSUP Prof. Dr. P. D. Karso	338.890.032.500	80.220.000.000	258.670.032.500
17	RS Wala Cilacap	180.257.205.000	69.772.537.873	125.478.888.633
18	RSU Prof. Dr. R. Soeharto	712.288.048.200	62.403.191.259	322.995.417.100
19	RSU Dr. L. A. Pribadi	570.484.449.444	28.730.637.469	978.330.787.975
20	RSU Dr. Anwarman	106.137.055.000	29.000.000.000	89.137.055.000
21	RSU Dr. Soerjadi Purwokerto	90.544.000.000	35.000.000.000	55.544.000.000
22	RSSH Euctoropi	71.537.470.000	72.700.000.000	49.837.470.000
23	RSJ Dr. Soeharto Eandjar	388.108.251.217	37.380.507.000	328.727.744.217
24	RSJ Dr. Mardani Wari	516.348.743.780	45.540.000.000	471.408.743.780
25	RSJ Prof. Dr. Soerjo	343.152.052.000	30.000.000.000	313.152.052.000
26	RSJ Dr. Fauzan Niskoliriprat	168.896.081.000	40.320.000.000	128.576.081.000
27	RSHU Jember	20.000.000.000	41.700.000.000	21.000.000.000
28	RS C. S. Sirene	320.548.000.000	15.700.154.000	304.847.846.000
29	RSPH Soetami Soerjo	170.798.000.000	19.340.000.000	151.458.000.000
	Suk Jumlah	18.398.594.050.520	3.358.581.078.542	12.000.000.780.000
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
1	Badan Pengelola Sistem Perumahan Nasional	3.102.327.825	448.981.827	2.653.345.998
	Suk Jumlah	3.102.327.825	448.981.827	2.653.345.998
015 KEMENTERIAN KEUANGAN				
1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Negeri	810.530.000.000	57.000.000.000	753.530.000.000
2	Pusat Penelitian Ekonomi	12.478.223.000	3.800.000.000	9.678.223.000
	Suk Jumlah	810.530.000.000	60.800.000.000	763.208.223.000
050 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Badan Koordinasi Nasional Sistem Persepsi	51.278.370.346	13.140.140.718	38.138.229.627
	Suk Jumlah	51.278.370.346	13.140.140.718	38.138.229.627
041 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM				
1	Persepsi Persepsi Nama Bangsa	10.951.763.749	3.693.765.906	7.257.997.843
	Suk Jumlah	10.951.763.749	3.693.765.906	7.257.997.843
020 KEMENTERIAN KEMENTERIAN				
1	Pusat Penelitian Pembangunan	5.498.591.254	790.322.510	4.708.268.744
	Suk Jumlah	5.498.591.254	790.322.510	4.708.268.744
040 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI				
1	Pusat Penelitian PTEK	0.500.187.213	8.700.000.000	2.700.000.000

DAFTAR NEPACA 416

laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiopeng)

DAFTAR 25 D

**PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 65 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN KEMH NOMOR 63/KM/08/2012
PER 31 DESEMBER 2011 (Audiopeng)**

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Setelah Disusutkan
	Suku Jumlah	8.548.197.716	6.798.097.666	2.749.104.550
042	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			
1	BPPT Ekuinip	1.511.550	237.119	1.274.431
	Suku Jumlah	1.511.550	237.119	1.274.431
025	KEMENTERIAN AGAMA			
1	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaya Yogyakarta	1.366.903.523,850	272.395.820,007	1.094.507.703,843
2	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	316.378.097,508	39.300.553,193	277.077.544,315
	Suku Jumlah	1.683.281.621,358	311.696.373,200	1.371.585.248,158
082	LAPAN			
1	Pusat Penelitian dan Teknologi Diripusat FATERGATE	927.339,095	339.757,803	587.581,292
	Suku Jumlah	927.339,095	339.757,803	587.581,292
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			
1	Abesent Centre Analisis Boga	42.168.885,103	7.275.517,981	34.893.367,122
2	Balai Esai Industri Agro	117.187.855,652	7.320.134,007	109.867.721,645
3	Balai Esai Teknologi Pengolahan Pencernaan Industri	32.998.204,562	7.183.454,709	25.814.749,853
	Suku Jumlah	192.354.945,317	21.779.106,697	170.575.838,620
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA			
1	Pusat Pengolahan Sampah Kalora Bina Ramah PPR-GRK	50.178.305,487,678	1,972,115,897	48,206,189,590
2	Pusat Pengolahan Sampah Kembangan PERI Jakarta	24,796,787,893,674	7,361,436,272	17,435,351,602
	Suku Jumlah	74,975,093,381,352	9,333,552,169	65,641,541,189
029	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL			
1	Universitas Djuanda	2,522,851,613	1,159,807,7	1,363,043,805
2	Universitas Pajajaran	7,827,067,650	-	7,827,067,650
3	Universitas Kristen Marung	819,537,638	105,342,295	714,195,343
4	Universitas Islamudin	2,304,749,502	202,636,236	2,102,113,266
5	Universitas Swadaya	5,174,091,593	68,175,971	5,105,915,622
6	Universitas Hidayat Sumarang	308,775,195	-	308,775,195
7	Institut Teknologi Sains dan Negeri	7,947,438,629	-	7,947,438,629
8	Universitas Kristen Surabaya	301,353,012	-	301,353,012
9	Universitas Muhammadiyah	300,593,177	-	300,593,177
10	Universitas 11 Maret Surabaya	2,377,707,682	200,426,824	2,177,280,858
11	Universitas Kristen Yogyakarta	7,889,862,337	35,087,411	7,854,774,926
12	Universitas Kristen Himpunan	235,303,429	-	235,303,429
13	Universitas Kristen Dharma	221,053,660	-	221,053,660
14	Universitas Swadaya	2,321,993,715	230,832,814	2,091,160,901
15	Universitas Batu Caves	777,727,402	-	777,727,402
	Suku Jumlah	24,572,334,933	1,067,270,805	23,505,064,128
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
1	Balai Esai Pendidikan Pengajaran dan Peningkatan Ilmu Palyasip (EPSIP)	141,577,783,687	57,377,535,623	84,200,248,064
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	841,767,109,057	55,427,632,649	786,339,476,408
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	404,342,454,466	23,275,453,376	381,067,001,090
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	50,212,703,635	45,127,450,602	5,095,253,033
	Suku Jumlah	1,837,893,540,845	135,180,072,250	1,702,713,468,595
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAHYAT			
1	Pusat Penyediaan Prumahan	2,534,062,703	38,634,457	2,495,428,246
	Suku Jumlah	2,534,062,703	38,634,457	2,495,428,246

DAFTAR 25 D

CATATAN

LAPORAN KEANGGARAN PERALOKAN DAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN LAPORAN KEANGGARAN PERALOKAN DAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2011
REKONSTRUKSI DAN PERAWAHTERAPAN
PER 31 Desember 2011
dalam Ribuan Rupiah

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REKONSTRUKSI DAN PERAWAHTERAPAN					Jumlah Revisi	Sisa	TOTAL ASSET BERBILAH	MOD APBN	METER UJUD	Keterangan	BA
			4	5	6	7	8							
1														
1	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
2	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
3	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
4	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
5	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
6	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
7	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
8	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
9	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
10	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
11	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
12	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
13	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
14	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
15	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
16	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
17	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
18	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
19	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
20	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
21	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
22	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
23	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
24	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
25	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
26	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
27	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
28	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
29	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
30	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
31	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
32	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
33	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
34	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
35	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
36	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
37	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
38	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
39	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
40	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
41	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
42	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
43	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
44	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
45	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
46	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
47	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
48	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
49	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
50	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
51	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
52	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
53	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
54	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
55	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
56	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
57	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
58	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
59	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
60	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
61	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
62	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
63	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
64	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
65	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
66	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
67	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
68	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
69	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
70	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
71	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
72	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
73	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
74	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
75	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
76	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
77	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
78	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
79	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
80	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
81	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
82	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
83	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
84	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
85	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
86	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
87	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
88	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
89	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
90	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
91	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
92	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
93	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
94	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
95	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
96	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
97	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
98	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
99	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												
100	PT. PERTAMINA (Persero)	1.500.000												

Jumlah Revisi

21 JANUARY

APENDIX 1: LIST OF ASSETS

REKAPITULASI LEMBARAN LEMBARAN STRUKTURAL
 APBN, MODAPBN DAN TOTAL ASSET
 Per 31 Desember 2011
 dalam Ribu Rupiah

NO	NAMA LEMBARAN	APBN	RELEKAS					Jumlah Realisasi	Sisa	TOTAL ASSET BERBILAH	MOD APBN	BETERN UDAU	Keterangan	BA
			4	5	6	7	8							
1														
24	Etat Pengabdian Masyarakat - Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000					822.200	1.000						
25	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
26	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
27	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
28	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
29	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
30	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
31	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
32	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
33	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
34	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
35	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
36	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
37	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
38	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
39	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
40	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
41	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
42	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
43	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
44	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						
45	Etat Pengabdian Masyarakat - Kesehatan Masyarakat	1.200.000					1.177.000	1.000						

21 JANUARY

31 JANUARI 2012

LAPORAN KEJARAN PERAKSI: 2011 FLSATTAJIMK 2011 HASRATES

HIRTISAR LAPORAN KEJARAN KELOMPOK LEMBAGA NON STRUKTURAL
 APPN / MODAPRI DAN TOTAL ASSET
 Per 31 December 2011
 dalam Ribuan Rupiah

NO	NAMA LEMBAGA	APPN	RELIEKASI				Jumlah Realisasi	SISA	TOTAL ASSET BERBILAH	MOD APBN	BETERUDAU	Keterangan	BA
			4	5	6	7							
1													
47	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
48	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
49	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
50	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
51	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
52	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
53	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
54	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
55	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
56	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
57	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
58	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
59	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
60	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
61	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
62	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
63	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
64	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
65	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
66	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
67	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
68	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
69	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									
70	Dewan Madia & Swadaya Pustaka Jati Baru Jati Padjajaran Baru (Riau, Cirebon)	130.00.000		130.000									

Jumlah Realisasi: 2011: 2011

DAFTAR LAMBEK A

LAPORAN KEJARAN PERAK: TAHUN KEHIDUPAN 2011

HIRITISAR LAPORAN KEJARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
 APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
 Per 31 December 2011
 (dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	BELANJA				Jumlah Realisasi	SISA	TOTAL ASET BERBILAH	MOD APBN	METER UDAH	Keterangan	BA
			4	5	6	7							
1	3	3					3		11	17	15	14	
B2	Corong Perikanan Sgk Sungai Lingsat	784,341	784,341	-	-	784,341	100%	-	-	784,341	Belanja	003	
B4	Corong Perikanan Sgk Sungai Lingsat	20,700,000	30,000,000	6,000,000	-	36,000,000	173.912%	20,700,000	-	14,300,000	Kontrak	003	
B5	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	784,341	Belanja	003	
B6	Belanja Bahan	-	-	-	-	-	-	-	-	784,341	Belanja	003	
B7	Belanja Perjalanan Dinas	55,408,061	10,000,000	1,000,000	-	66,408,061	120.032%	55,408,061	66,408,061	784,341	Belanja	003	
B8	Belanja Pemeliharaan	24,500,000	15,000,000	1,000,000	-	16,000,000	65.306%	24,500,000	-	784,341	Belanja	003	
B9	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	70,000,000	11,000,000	1,000,000	-	12,000,000	17.143%	70,000,000	-	784,341	Belanja	003	
B10	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	784,341	Belanja	003	
	Jumlah	140,392,702	67,784,341	9,000,000	-	76,784,341	54.691%	140,392,702	140,392,702	140,392,702	Belanja	003	

Jumlah: 140,392,702

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KELUARGA

DIREKTORAT JENDERAL
KEMASUKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kitab Badan Penyelola dan Pengembangan TMI	67.750.900	-	67.750.900	65.921.227	1.944.552	67.865.779	(114.879)
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	48.061.307	1.734.931	49.796.238	44.315.644	4.381.406	48.697.050	1.099.188
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.907.533	-	4.907.533	3.588.257	146.754	3.735.011	1.172.522
4	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	-	-	-	-	-	-	-
5	Yayasan Gedung Eriji Nasional RI	-	-	-	-	-	-	-
6	Yayasan Yustisia Dharmaukti Karini	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	-	-	-	-	-	-	-
8	Yayasan Pengembangan BUMI	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	120.719.740	1.734.931	122.454.671	113.825.128	6.472.712	120.297.840	2.156.831

DIREKTORAT JENDERAL
KEMASUKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR 20.C

LAPORAN KEUANGAN PERPRINTA-FINANCIAL PER 31 DESEMBER 2011

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2011
(Dalam Ribu Rupiah)

NO	NAMA YAYASAN	Keterangan/Lembaga	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset	Kewajiban JKPendek	Kewajiban Jil Panjang	TOTAL Kewajiban	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban & Ekuitas	IKET
			3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10=8+9	11	12=(10-11)	13
1	Yayasan Pangsapin Kue, Benda, Pengolahan dan Pengemasan TMI	Scholarship Grants	13.983.481	50.828.521	11.420.388		81.507.290	6.452.186	14.036.242	20.488.428	48.360.311	81.507.290	T.A. 2011
2	Yayasan Sarana Wanita Jend. Eka M. Pangdihardjo	Korantangan	3.539.262	8.621.195	68.762		12.229.219	11.339.044	1.732.297	13.071.341	21.362.890	33.642.659	T.A. 2011
3	Yayasan Saun, Negeri Pertiwi dan Tumbuh Sejahtera	Scholarship Grants	10.630.832	83.219			10.714.051	12.329		12.329	11.720.926	22.434.980	T.A. 2011
4	Yayasan Dharma Dharma	DPK	1.174.511	608.652			1.783.163	7.802.853		7.802.853		15.605.016	T.A. 2008
5	Yayasan Pendidikan Charming for All	DPK											T.A. 2008
6	Yayasan Pendidikan Charming for All	DPK											T.A. 2008
7	Yayasan Pendidikan Charming for All	DPK											T.A. 2008
8	Yayasan Pendidikan Charming for All	DPK											T.A. 2008
9	Yayasan Pendidikan Charming for All	DPK											T.A. 2008
10	TOTAL		136.577.015	84.198.154	14.607.480	10.760.850	252.377.279	16.701.290	85.681.564	90.195.453	162.251.826	252.377.279	

DAFTAR 20.C

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 BERKAS

DAFTAR 30.A

DAFTAR ASET BERKAS MILIK ASING/DINA YANG BELUM SELESAI
BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.06/2008
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011

No	Kategori	Provinsi	Dibatalkan s.r. Perkiraan PI	Dibatalkan dan Perkiraan	Kompetensi	Pembelian/Perencanaan				Jumlah		
						Diikuti	Habis	Dibatalkan	Ditunda			
1	Bangka Aceh	Melurus Padi Gasek	0	3	3	0	0	0	0	4	0	15
2	Bangka	Sirihem Ulu	1	44	48	0	0	0	0	14	0	133
3	Bangka	Sungai Bahau	1	2	0	0	0	0	0	3	4	11
4	Bangka	Bau	0	5	0	0	0	0	0	2	0	7
5	Bangka	Kapuasen Piasu	3	17	0	0	0	0	0	6	2	95
6	Bangka	Sungai Selat	2	13	5	2	0	0	0	8	0	11
7	Bengkulu	Bangka Belitung	4	13	0	2	0	0	0	12	1	30
8	Bengkulu	Jambi	2	9	0	0	0	0	0	0	0	13
9	Bengkulu	Lempang	1	9	0	0	0	0	0	4	1	15
10	Bengkulu	Hargailu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bengkulu	Bantan	0	4	0	0	0	0	0	1	2	8
12	Bengkulu	BKI. Bantur	3	13	19	0	0	0	0	1	19	48
13	Bengkulu	Jawa Barat	7	47	54	0	0	0	0	1	1	30
14	Bengkulu	Jawa Tengah	6	18	16	0	0	0	0	9	0	48
15	Bengkulu	D.I Yogyakarta	0	1	3	0	0	0	0	0	3	7
16	Bengkulu	Jawa Timur	27	69	26	3	0	0	0	15	0	130
17	Bengkulu	Kalimantan Barat	5	71	43	0	0	0	0	6	12	157
18	Bengkulu	Kalimantan Selatan	2	2	5	0	0	0	0	0	0	9
19	Bengkulu	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bengkulu	Kalimantan Timur	0	5	6	0	0	0	0	0	3	14
21	Bengkulu	Bali	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5
22	Bengkulu	Musa Tenggara Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
23	Bengkulu	Musa Tenggara Timur	0	0	4	1	0	0	0	2	0	13
24	Bengkulu	Sulawesi Selatan	3	13	18	0	0	0	0	7	5	38
25	Bengkulu	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
26	Bengkulu	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Bengkulu	Sulawesi Tengah	1	7	0	0	0	0	0	0	0	3
28	Bengkulu	Gorontalo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Bengkulu	Nusa Tenggara Barat	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
30	Bengkulu	Sulawesi Utara	0	2	0	0	1	0	0	6	1	11
31	Bengkulu	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bengkulu	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11
33	Bengkulu	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	88	408	266	15	1	0	0	119	22	949

Keterangan:

Daftar aset sebanyak 1.310 dalam lampiran PMK 116/PMK.06/2008 terdiri 618 kasus selama tahun 2008 s.d. 2011 telah dilaksanakan ASN/C sebanyak 36 spesies yaitu:

1. Penerimaan status ASN/C menjadi BMC sebanyak 15 spesies
2. Penerimaan status ASN/C menjadi BMC sebanyak 72 spesies
3. Pelaksanaan ASN/C kepada pihak ketiga dengan pembiayaan komersial sebanyak 4 spesies

Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dengan surat nomor 8/320/MK/02006 tanggal 29 Oktober 2008 telah menetapkan komposisi spesies ASN/C di Jalan M. L. Arief No. 34, Gedung 300, Jakarta. Untuk dapat melakukan pengurusan hukum di pengadilan, perlu dilakukan proses upa di pengadilan Pengadilan Pertama Kelas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, pengadilan komposisi spesies ASN/C di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi.

LAPORAN KELOMPOK ANGGAN PEMERINTAH FUSAT TAHUN 2011 (ANGGEB)

LAMBAR 30 B

**CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ABMA/C TAHUN 2011
PER TIM Asistensi DAERAH
PER KANWIL DJKN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011**

No.	Kanwil	Potensial Penyelesaian					Jumlah
		Dimantapkan sebagai BMN	Dimantapkan sebagai BMD	Kompensasi	Dikembalikan	Dihentikan	
1	I Banda Aceh	0	1	0	0	0	1
2	II Medan	0	4	0	0	0	4
3	III Pekanbaru	0	0	0	0	0	0
4	IV Palembang	0	0	0	0	0	0
5	V Bandar Lampung	0	1	0	0	0	1
6	VI Serang	0	1	0	0	0	1
7	VII Jakarta	0	4	0	0	0	4
8	VIII Bandung	0	3	0	0	0	3
9	IX Semarang	1	1	0	0	0	5
10	X Surabaya	0	6	1	0	0	7
11	XI Pontianak	0	2	0	0	0	2
12	XII Banjarmasin	3	1	0	0	0	4
13	XIII Serang	0	0	0	0	0	0
14	XIV Denpasar	2	1	0	0	0	3
15	XV Makassar	0	0	0	0	0	0
16	XVI Manado	1	0	0	0	0	1
17	XVII Jayapura	0	0	0	0	0	0
Jumlah		7	28	1	0	0	36

Keterangan:

Penyelesaian di Tahun 2009:

2 aset menjadi BMN, dan 3 aset dipisahkan ke pihak ketiga, sisa ada 3 aset;

Penyelesaian di Tahun 2010:

6 aset menjadi BMN, dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset);

Penyelesaian di Tahun 2011:

7 aset menjadi BMN, 28 menjadi BMD, dan 1 aset dipisahkan ke pihak ketiga (total 36 aset);

Kompensasi penyelesaian ABMA/C tahun 2011 sebesar Rp 881.230.500,00

ABMA/C di Jalan K.T. Haryono No. 94 Kutabone Ikipada Yayasan Pendidikan Kristen Kutabone

Sedangkan dari total ABMA/C sebanyak 1.010 dalam lambaran FAK 183/PMK/00/2008, 61 aset telah dipisahkan ke instansi yang masih ada 348 aset yang belum diselesaikan status hukumnya

DAFTAR 31

**MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2010**

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
I	TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN							
1	Pendapatan dan Hibah							
1.1	Penerimaan perpajakan menurut SAU senilai Rp665,40 miliar belum dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAU dan transaksi pembetulan (reversal) penerimaan perpajakan senilai Rp3,39 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.	<p>1. Masih diemudian jumlah transaksi dan nilai transaksi pengganti tidak sesuai dengan jumlah transaksi dan nilai transaksi reversasi sebesar Rp1.595.742,90 juta tahun 2009 dan sebesar Rp3.397.102,76 juta tahun 2010.</p> <p>2. Terdapat data transaksi SAU dan SAU yang tidak terakumulasi, yaitu sebesar Rp471.492,82 juta ada di SAU namun tidak terdapat di SAU, dan sebesar Rp492.502,04 ada di SAU namun tidak terdapat di</p>	X			<p>Pemerintah telah dan sedang melakukan upaya-upaya:</p> <p>1. Menyempurnakan sistem pencatatan transaksi penerimaan melalui BankPos Persepsi, salah satunya yaitu sentralisasi penerimaan negara melalui penerapan sistem billing. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No-60/PMK.5/2011 tgl 23 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Uji coba Penerapan Sistem Pembayaran Pakai Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem MPN. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi transaksi reversal dan menggunakan data MPN yang telah diakui oleh bank/pos persage sebagai</p>	<p>Dalam rangka Pelaksanaan Uji coba Penerapan Sistem Pembayaran Pakai Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem MPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedang melakukan UAT terhadap aplikasi dan sistem billing yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. Uji coba untuk tahap awal dilakukan secara terbatas pada lingkup kantor pos persage di wilayah tertentu dan akan terus diperluas baik pada lingkup PT Pos Indonesia maupun pada perbankan seperti Bank Mandiri.</p>	<p>Uji coba Billing System diterapkan secara bertahap mulai semester II tahun 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -427-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>SALU</p> <p>3. Pada DJBC, berdasarkan pengujian terhadap database SAL, tidak semua /no/ nomor dokumen yang di-input merupakan WPN penerimaan yang seharusnya dan masih terdapat kesalahan penginput-an nomor dokumen. Berdasarkan hasil rekonsiliasi DJBC, 29.631 transaksi senilai Rp162.700,11 juta di SAL tidak tercatat di SALU dan 104.071 transaksi senilai Rp493.907,59 juta di SALU tidak tercatat di SAL.</p>				<p>dokumen sumber pembukuan penerimaan negara untuk menghilangkan perbedaan antara data transaksi kas dan data MPN.</p> <p>2. Dalam rangka meningkatkan compliance Bank/Pos Persepsi dalam mematuhi ketentuan peraturan negara, sejak tahun 2010, telah dilakukan User Acceptance Test (UAT) ulang terhadap Bank/Pos Persepsi. Dengan UAT ulang tersebut, Bank/Pos Persepsi telah menunjukkan kinerjanya yang semakin membaik.</p> <p>3. Melaksanakan penyempurnaan peraturan rekonsiliasi perpajakan pada tahun 2011 dan mengintensifikan rekonsiliasi penerimaan perpajakan antara data SAIMPN dengan data Kas Negara secara bulanan.</p>	<p>Sudah dilakukan UAT ulang pada 81 Bank/Pos Persepsi dari jumlah keseluruhan 82 Bank/Pos Persepsi. Bank Persepsi yang belum di UAT ulang adalah PT, Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk.</p> <p>Direktarat Jenderal Perbendaharaan telah menatibakan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-90/Per/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara sebagai upaya penyempurnaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-05/Per/2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Persepsi pada Sistem Akuntansi</p>	<p>Semester II Tahun 2011</p> <p>Semester II Tahun 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -428-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN	
			1	2	3				
							<p>Instansi. Proses salish data Penerimaan Pajak antara SAU dan SAU senilai Rp482.502.044,016 a. Data senilai Rp409.131.902.480 telah tercatat di rekening kas negara. b. Data senilai Rp73.370.241.556 telah dikonfirmasi ulang oleh Bank/Pos Persepsi - Total transaksi yang dibatalkan: Rp70.563.749.572. - Total transaksi sudah dipaparkan menjadi Rp2.795.851.934. - Total transaksi yang belum dipaparkan senilai Rp10.840.050.</p>	<p>Telah dan akan terus dilakukan pertemuan rutin mingguan antara DJPN dan DJP di bawah koordinasi Staff khusus Menklu Bidang IT.</p>	Semester II Tahun 2011
						<p>4. Melakukan monitoring data harian dengan menyelenggarakan pertemuan rutin mingguan antara DJP dan DJPN di bawah koordinasi staf khusus Menteri Keuangan Bidang IT. Dalam hal terjadi reversal dalam jumlah yang signifikan pada masing-</p>			

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -429-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>masing Bank/Pos Persepsi, maka segera ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada Bank/Pos Persepsi bersangkutan tentang sebab-subab terjadinya reversal dalam jumlah yang signifikan.</p> <p>5. Meminta kepada Bank/Pos Persepsi untuk melaporkan setiap transaksi yang direversal ke KPPN mitra kerja.</p> <p>6. Menyempurnakan prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi reversals MPN/SAI dengan data SAU yang dilakukan oleh KPPN melalui intranet Ditjen Perbendaharaan dan selanjutnya melakukan konfirmasi ke</p>	<p>Sejak bulan Juni 2010 Ditjen Perbendaharaan telah meminta kepada Direksi Bank/Pos Persepsi untuk melaksanakan pelaporan setiap transaksi reversals yang dilakukan pada setiap akhir hari kerja bersamaan dengan penyampaian LHP ke KPPN mitra kerja Bank/Pos Persepsi. Ditjen Perbendaharaan menerbitkan SE-36/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara pada tanggal 24 Agustus 2011.</p> <p>- Penyempurnaan prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi reversals MPN/SAI dengan data SAU yang dilakukan oleh KPPN melalui intranet Ditjen Perbendaharaan dan selanjutnya</p>	<p>Semester II Tahun 2011</p> <p>Semester II Tahun 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -430-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						Bank Penerima Mitra Kerja (KPPH).	<p>melakukan konfirmasi ke Bank Penerima mitra kerja KPPH dilakukan melalui pemberian Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara pada tanggal 24 Agustus 2011.</p> <p>DJP telah melakukan konfirmasi ke KPP untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui S-1356/P.10/2011 tanggal 6 Oktober 2011).</p> <p>Sampai per 30 November 2011 dan jawaban satker berdasarkan SSPCP diperoleh 1.890 record SAI yang belum diformulasikan dokumen sumbernya senilai Rp-49.491.224,979.</p> <p>Rekonsiliasi penerimaan dilakukan secara periodik dan bojong yang berdasarkan perditjen BC No. 23/BC.2011 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan pada Ditjen BC.</p>	Semester II 2011
						7. Terkait dengan pendapatan bee dan cukai:		
						a. Ditjen Bea dan Cukai telah memindai/lanjuti amatch antara SAI dan SAU dengan mendistribusikan data penerimaan yang amatch tersebut ke satker satker melalui surat Sesi/itjen Bea dan Cukai Nomor S-244/BC.1/2011 tanggal 21 Juni		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -431-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>2011 untuk dilakukan pendirian lebih lanjut ke dokumen sumber (SSR/CP).</p> <p>b. Menetapkan satior untuk dilakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik dan benjang.</p> <p>c. Melakukan pembahasan dengan PT Pos mengenai penyempurnaan aplikasi pos beban dan penyusunan strategi implementasi aplikasi beban atas transaksi barang kiriman pos (PPK), sesuai surat undangan PT Pos nomor 928/Posint/0611 tanggal 17 Juni 2011.</p> <p>d. Untuk transaksi SAU <i>unsurich</i> yang tidak mempunyai kode Kantor Bea dan Cukai, dicatat sebagai penerimaan satior Kantor Pusat Bea dan Cukai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Memor Per-05/PB/2010 tanggal 22 Februari</p>	<p>Atas transaksi barang kiriman pos (PPK), telah dilakukan pembahasan dengan PT Pos mengenai penyempurnaan aplikasi kiriman pos beban dan penyusunan strategi implementasi aplikasi pabean sesuai surat undangan PT Pos Nomor 928/Posint/0611 tanggal 17 Juni 2011</p> <p>Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER/05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perpajakan, Pasu Laporan Keuangan Audited 2010 atas transaksi SAU <i>unsurich</i> tersebut, yang mempunyai</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -432-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Amda)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>2010 tentang pelaksanaan rekonstruksi dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perpajakan.</p> <p>e. Menyempurnakan prosedur pembukuan pada unit fungsional perpajakan, diantaranya diantaranya dikeluarkan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Tata Cara Rekonstruksi Penemuan Pada Dijin Bea dan Cukai.</p> <p>f. Memperbaiki penatausahaan dan pelaporan data penemuan dengan menyusun Perdirjen Bea dan Cukai tentang penatausahaan penemuan;</p> <p>g. Pelaksanaan rekonstruksi akan diterapkan secara bertahap untuk tingkat satker tiap bulan, tingkat Kanwil triwulanan, dan tingkat Eselon I tiap semester.</p>	<p>kode kantor dicatat sebagai penemuan kantor bea dan cukai yang bersangkutan dan yang tidak mempunyai kode kantor bea dan cukai dicatat sebagai penemuan satker Kantor Pusat DUBC.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -433-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
1.2	<p>Peleaksanaan monitoring dan pengawasan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal sehingga selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun tidak dipantau dan kekurangan PPh Migas sebesar Rp2,60 triliun belum ditagh.</p>	<p>1. Tidak ada instansi yang melakukan rekonsiliasi antara nilai <i>government tax settlement</i> dalam FOR Tahun 2009 dengan nilai pembayaran pajak oleh operator dan <i>partner</i> dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2 Tahun 2008, sehingga selisih kewajiban PPh Migas Tahun 2009 sebesar USD139,45 juta atau ekuivalen Rp1.253.878,92 juta dari kontraktor-kontraktor pada 21 wilayah kerja tidak dipantau.</p> <p>2. Pengawasan terhadap kepatuhan KKKS masih lemah dan tidak seluruh jumlah kewajiban pajak KKKS dapat diketahui.</p> <p>3. Tidak ada instansi yang memantau ketepatan kelengkapan kompensasi selisihan pembayaran PPh Migas pada</p>	<p>X</p>	<p>h. Terkait dengan ketidaklengkapan NTPN, akan terus dikordinasikan dengan DJPBN dan bank.</p>	<p>1. Memperbaiki mekanisme monitoring dan pengawasan kewajiban PPh Migas dengan pembuatan PMK dan aturan teknis dari PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operas yang Dapat Dikembalikan dan Penjualan Pakai Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Perhitungan PPh Migas.</p> <p>2. Memverifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan akan menagih kekurangan PPh Migas.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi antara DJP, DJA, DJPK, BP Migas dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> dan pengaitan PPh Migas.</p> <p>4. Dalam rangka memperbaiki mekanisme administrasi pelaporan dan penerimaan migas (PPh Migas dan PNB/BP Migas), saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kewenangan dan koordinasi antar</p>	<p>- Telah diterbitkan peraturan pelaksanaan PP 79/2010 yaitu 3 PMK (PMK.256/PMK-011/2011, PMK-258/PMK-011/2011, PMK-257/PMK-011/2011) dan 2 Perdirjen Pajak (PER.28/PJ/2011 dan PER.28/PJ/2011), sedangkan 2 RPMK masih dalam proses finalisasi.</p> <p>- Berdasarkan PP No. 79/2010, DJP diberi kewenangan untuk melakukan penemikasaan terhadap KKKS untuk menguji kebenaran perhitungan PPh Migas dan Pajak lainnya.</p> <p>- Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) telah melakukan penaltian atas kekurangan pembayaran PPh Migas tersebut dan telah menebitikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar USD198.880.192,58. Terhadap SKPKB yang diterbitkan oleh KPP tersebut, sebagian besar telah abayar sebesar USD185.273.286,06.</p>	<p>Semester II Tahun 2011</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -434-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>periode kewajiban berikutnya sehingga tidak dapat diketahui kesempatan perhitungan kewajiban pajaknya.</p> <p>4. Tidak ada instansi yang memantau <i>Fyaz Traasle Petroleum (FTP)</i> dan <i>cost recovery</i> dalam penghitungan kewajiban pajak KKKS.</p> <p>5. Kendalajelasan kewenangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP terkait kurang bayar PPh Migas.</p> <p>6. Pemerintah belum memiliki mekanisme penetapan dan persagihan PPh Migas sehingga keturunan pembayaran PPh Migas sebesar USD4,73 juta atau ekuivalen Rp42.514,39 juta belum ditetapkan dan ditagih.</p>				<p>instansi terkait dalam pengalihan administrasi perpajakan dan KKKS.</p>		
1.3	<p>Terdapat inkonsistensi pengurusan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal</p>	<p>1. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh KKKS dalam perhitungan bag hasil dan kewajiban PPh Migas untuk periode Januari s.d. November</p>	X		<p>Telah diterbitkan PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Periklanan Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Perhitungan PPh Migas, sehingga tidak terjadi lag</p>	<p>- PP 79/2010 telah diimplementasikan sejak awal tahun 2010.</p> <p>- Telah diterbitkan peraturan pelaksanaan PP 79/2010 yaitu 3 PMK (PMK/256/PMK-011/2011,</p>	<p>Sudah berjalan tahun 2011</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -435-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	sebesar Rp 1,43 triliun.	<p>2010 menunjukkan ketidakakonsistensian 29 KKKS dalam menggunakan tarif PPh tersebut.</p> <p>2. KKKS menggunakan tarif <i>tax treaty</i> yang lebih kecil dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC. Dengan menggunakan tarif <i>tax treaty</i> tersebut, kontraktor memperoleh <i>save more</i> lebih dari yang seharusnya sehingga Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif <i>tax treaty</i> atau sebesar USD159,33 juta (ekuivalen Rp1.432.540,10 juta dengan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2010 Rp8,981).</p>				<p>inkonsistensi tarif pajak di tahun 2011 dan seterusnya.</p> <p>Aturan pelaksanaan atas PP No.79 Tahun 2010 tersebut sedang dalam proses penyusunan.</p>	<p>PMK-258/PMK-011/2011, PMK-257/PMK-011/2011, dan 2 Perdjien Pajak (PER-28/PJ/2011 dan PER-29/PJ/2011), sedangkan 2 RPMK masih dalam proses finalisasi.</p> <p>* Terkait dengan <i>tax treaty</i>, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah alternatif penyelesaian sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPM/GAS) akan berkoordinasi mengupayakan untuk melakukan amandemen kontrak bagi hasil migas dengan menambahkan klausul bahwa KKKS tidak boleh memanfaatkan <i>tax treaty</i> atau apabila memanfaatkan <i>tax treaty</i>, maka bagian pemerintah harus disesuaikan sehingga penerimaan pemerintah tetap, atau</p> <p>b. Mengupayakan renegosiasi perjanjian pengabdian pajak berganda (P3E) dengan mengacu/ujian ketentuan P3G tersebut terhadap kontrak kerja</p>	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
1.4	Penerimaan hibah langsung minimal sebesar Rp668,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUK dan dikelola di luar mekanisme APBN.	<p>1. DJPB tidak mencatat Penerimaan Hibah Mon Kas baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebesar Rp4.553,52 juta maupun Penerimaan Hibah Mon Kas Luar Negeri sebesar Rp133.943,21 juta, namun telah mengungkapkannya dalam Cd.K.</p> <p>2. Terdapat perbedaan Penerimaan Hibah Luar Negeri kas sebesar Rp1.041.732,88 juta antara LKPP dengan LK BA 999.02. DJPB telah menjelaskan alasan bahwa perbedaan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.041.732,88 juta disebabkan adanya selisih kurs atas Penerimaan Hibah Luar Negeri dan perbedaan waktu pencatatan atas Penerimaan Hibah melalui mekanisme</p>	X			<p>1. Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (revisi PMK.40/PMK/05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan Hibah non kas, serta metode dan format kontinuitas.</p> <p>2. Mengintensifkan penerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Prjman dan/atau Hibah Pemerintah.</p> <p>3. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L.</p>	<p>sama migas</p> <p>Teah diterbitkan: - PMK Nomor: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; - PMK Nomor: 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; - Perdjrym PBN No. Per-81/PB/2011 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyempaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa Surat Berharga.</p> <p>PMK No. 33/PMK.08/2010 telah diimplementasikan dan ditenstifkan pelaksanaannya.</p> <p>Sosialisasi dan rekonsiliasi hibah dengan K/L terus dilakukan.</p> <p>K/L telah melakukan registrasi pendapatan hibahnya kepada Ditjen Pengelolaan Uang-Kementerian Keuangan dan mengungkapkannya</p>	September 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -437-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>relating khusus.</p> <p>3. Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik juga menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah langsung belum seluruhnya melaporkan atau menyelesaikan pemeriksaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan, baik hibah kas maupun barang/jasa. Pemeriksaan uji petik menunjukkan bahwa terdapat 13 KL yang belum melaporkan penerimaan hibahnya minimal sebesar Rp885.346,33 juta dan satu KL belum melaporkan belanja hibah sebesar Rp7.994,75 juta.</p>					<p>dalam Laporan Keuangan KIL yang bersangkutan KIL yang telah melaporkan hibahnya kepada DU/PU antara lain: BKKBN, Kejaksaan Agung (Rp.6.348.045.000,-), Kementerian Pertanian (Rp.13.616.972.296,- EUR 1.326.395,- USD74.341.487,- AUD18.089.944,- JPY714.633.000,- dan CNY12.277.863), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp.1.590.044,-), Kementerian Kehutanan (USD16.297.491,- GBP 5.000.000,- AUD 1.303.835,-), Kementerian Perhubungan (JPY 1.498.520.000) dan Kementerian Kesehatan.</p> <p>Kementerian Keuangan sudah menyampaikan surat kepada KIL agar menyusun pedoman atau <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> hibah pada masing-masing KIL. Beberapa KIL telah menyusun pedoman atau SOP dimaksud, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -438-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2	Sistem Pengendalian Belanja							
2.1	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.	<p>1. Penyaluran bantuan pada 6 (enam) K/L sebesar Rp2.255.331,88 juta belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban keuangannya dan penerima bantuan.</p> <p>2. Dana bantuan pada 4 (empat) K/L belum disalurkan dan masih tersimpan pada pihak ketiga (bank/lembaga kelumpuk penerima/koperasi) sebesar Rp175.634,86 juta.</p> <p>3. Penyaluran bantuan pada 3 (tiga) K/L tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak tepat sasaran sebesar Rp4.837,13 juta.</p>	X			<p>1. Meninjau kembali beberapa kebijakan dan pedoman atas pelaksanaan bantuan sosial agar lebih optimal dan tepat sasaran.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada K/L untuk meningkatkan peran APF K/L dan BPKP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Belanja</p>	<p>Sedang disusun ketetapan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencarian dana Bantuan pada K/L. Telah disusun PMK No. 90/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyaluran dan Penelaahan PKA-KL dan PMK No. 101/PMK.02/2011 ttg. Klasifikasi Anggaran sebagai amarat PP 90 Tahun 2010.</p> <p>Sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial telah dan akan terus dilakukan.</p> <p>Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada K/L terkait untuk meningkatkan pengawasan atas penyaluran bantuan sosial.</p> <p>BPKP dan Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi peningkatan peran APF K/L dalam penyaluran Bantuan.</p> <p>Sosialisasi Buletin SAP tentang Akuntansi Bantuan telah dan akan terus</p>	Semester II Tahun 2011 (untuk sosialisasi Buletin SAP telah dilakukan sejak Mei 2011)

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -439-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESMIAN
			1	2	3			
						<p>Bantuan Sosial</p> <p>4. Menginstruksikan Satker/penerima bantuan sosial untuk membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.</p> <p>5. Menyortirkan sisa dana bantuan sosial ke kas negara.</p> <p>6. Meningkatkan pengawasan penggunaan dana bantuan sosial.</p> <p>7. Memberikan teguran kepada satker yang tidak taat menjalankan peraturan dalam penggunaan bantuan sosial.</p> <p>8. Khusus pada Kementerian Sosial RI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengewalusi kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Pos dan PT BRI dalam penyaluran bantuan sosial. - Mengoptimalkan implementasi MOU antara Kementerian Sosial dengan BPKP dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. 	<p>dilakukan</p> <p>Beberapa K/L, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial sudah memberikan instruksi dan teguran kepada satker yang ada di lingkungannya untuk lebih taat dalam memertanggungjawabkan bantuan sosial.</p> <p>Terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang belum ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendidikan Nasional: dari temuan Rp1,43 triliun yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp1,06 triliun. - Kementerian Sosial: dari temuan Rp236.510.250.900, beberapa penerima bantuan telah menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kementerian Sosial. - Kementerian Kesehatan: Sedang telah melakukan penelusuran sisa dana, melakukan monitoring penyelesaian 	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -440-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
22	Pengumpulan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebesar Rp4,70 Triliun.	1. Kendalisesuan anggaran Belanja Barang dan Modal sebagai berikut: - Pada 33 K/L masih ditemukan Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk Belanja	X			1. Mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan Bagian Akun Standar (BAS), baik kepada penelaah di DUA, pejabat/pegawai di Kamwil dan KPPN, serta perencanaan anggaran di K/L;	dana bansos BOK, Jamkesmas, Poskesristan TA 2010 dan telah menyetorkan sebagian ke kas negara sebesar Rp7.690.685.646. Terkait sisa dana bantuan tidak tersalurkan yang belum disetorkan ke kas negara: - Kementerian Pendidikan Nasional: dan temuan Rp80,33 miliar, sebesar Rp66,30 miliar yang telah disetorkan ke kas negara. - Kementerian Pertanian: dari temuan Rp10,73 miliar sebesar Rp7,66 miliar telah disetorkan ke kas negara. - Kementerian Agama: telah menginstruksikan untuk menyetorkan ke Kas Negara. - Kemsos telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.386.895.000	Juli 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -441-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESIAN
			1	2	3			
		<p>Barang senilai Rp680.007,81 juta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada 50 K/L masih ditemukan Anggaran Belanja Barang dimisalkan untuk Belanja Modal sebesar Rp118.259,13 juta. - Pembiayaan pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp17.000,00 juta dari anggaran Belanja Barang. - Realisasi Belanja Baricos di 3 (tiga) K/L minimal sebesar Rp688.949,33 juta yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Belanja Baricos di dua K/L yang dianggarkan dari Belanja Modal sebesar Rp16.623,29 <p>2. Prosedur penganggaran dan alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tidak sesuai ketentuan dan klasifikasi perwujudan realisasi Belanja Lain-Lain minimal sebesar Rp2.897.051,40 juta pada LKPP TA. 2010. Nilai</p>				<p>2. Menetapkan PMK tentang Petunjuk Penyusunan RKA-K/L yang memuat definisi dan pengertian serta contoh-contoh yang lebih detail dan spesifik terhadap masing-masing jenis belanja.</p> <p>3. Terkusi dengan alokasi anggaran dari Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan <i>Nature of Account</i>, Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisasi alokasi Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan <i>Nature of Account</i>, yaitu membuat PMK 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.09) ke BA K/L Tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b pada UU APBN-P Tahun 2010 bahwa Pemerintah dapat melakukan pengeseran dari BA 999.09 Pengeluaran Barang Lainnya ke BA K/L untuk kegiatan yang mempunyai ciri-ciri antara lain: dilakukan oleh K/L yang telah mempunyai kode BA, tidak berifat <i>ad-hoc</i>, kegiatan lintas sektoral yang</p>	<p>Telah disiapkan PMK No. 50/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pelaksanaan RKA-K/L pada tanggal 27 Juni 2011.</p> <p>TA 2011 sebagian telah dilakukan pengeseran anggaran Belanja Lain-lain ke anggaran K/L</p>	<p>Agar bulan Juni 2011</p> <p>Tahun 2012 untuk tahun 2011 sebagian telah dilakukan pengeseran anggaran Belanja Lain-Lain ke anggaran K/L</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -442-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang seharusnya menggunakan BA lain.			X	<p>4. Terkait dengan status kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, BPK Sabang, dan Bawasku, saat ini masih dalam proses pembahasan dan koordinasi dengan melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, LPP TVRI, LPP TVRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>diordinasikan oleh satu K/L, dan bukan merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUI.</p>	<p>Pemerintah telah mencaikan GP Batam (BA 112), Bawasku (BA 115), LPP RRI (BA 116), LPP TVRI (BA 117), dan BPKS (BA 118) sebagai pengguna anggaran di APBN tahun 2012.</p> <p>Terkait temuan pada K/L</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa K/L telah memberikan teguran kepada pengelola keuangan yang tidak melaksanakan belanja sesuai dengan anggarannya, dan menginstruksikan agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran, seperti pada Kementerian Hukum dan HAM, Badan Perantaraan Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Perwisata dan Ekonomi Kreatif, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir 	Tahun 2012

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -443-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.	Sistem Pengendalian Aset							
3.1	Uang Mula dan Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 belum dapat diikuti kewajarannya	1. Sistem pengendalian pengeluaran rekasus belum memadai. Proses pengajuan WA atas SP2D rekasus yang telah ditandatangani mulai dari pengajuan K/L kepada vendor/donor melalui Dit. PKN sampai dengan proses	X			1. Melakukan koordinasi dengan K/L selaku <i>executing agency</i> secara lebih intensif untuk menjamin ketersediaan dana dalam rekening khusus sesuai dengan rencana belanja KPA/Satker sehingga dapat meminimalkan risikonya	Surat permintaan <i>revisi/ahrevisi/reimbursement</i> sudah disampaikan kepada <i>Executing Agency</i> dari Kementerian/Lembaga atas kenselambatan penyelesaian pertanggungjawaban kepada Pembeli PHN	Mulai Juni 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -444-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN (reimbursement)	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>pengantian bersangkutan masih lemah.</p> <p>Mekanisme hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dan DWP dengan BUN dengan Kementerian Telesis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)isiter selaku EA dalam pengelolan rekasus belum dapat menjamin ketepatan waktu dan kesepatan jumlah pengajuan talangan serta reimbursement.</p> <p>Sistem pengendalian dalam pengelolan relesing antara Sub BUN Dana Talangan Rekasus oleh Dit. PKW belum optimal sehingga saldo dan klasifikasi akun UlangMula dari Relesing BUN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyektini.</p>				<p>loosang/tidak mencukupi;</p>	<p>Pada saat ini draft perubahan PMK No. 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Available sedang dalam proses penetapan. Substansi yang diatur dalam RPPMK tersebut adalah: (1) penetapan batas waktu sebagai dasar penetapan suatu Backlog atas PHLU dapat dinyatakan Available; (2) pencatatan atas penerimaan pengantian atas talangan yang sudah ditetapkan sebagai Backlog Available.</p> <p>Sudah diterbitkan KMK No. 119/KMK.05/2011 tentang Penetapan Jumlah Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Available dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 (Audiensi). Sedangkan pada tahun 2012, terhadap Backlog yang Available telah ditetapkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-119/PIB/2012 tentang Penetapan Jumlah Backlog atas PHLU</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -445-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aksi/tef)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESMIAN
			1	2	3			
		<p>2. Pada Tahun 2009 dan 2010, terdapat nilai talangan dan reimbursement masing-masing sebesar Rp1.142.215,25 juta dan Rp1.427.815,40 juta yang tidak dapat diidentifikasi (tanpa ID-nya) (undentified transactions).</p> <p>3. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat penjaminan/hibah dengan nilai pengajuan reimbursement (WA yang diajukan) lebih kecil dibandingkan dengan nilai WA yang diterima oleh lender/bonor (WA yang di-reimburse). Selisih yang terjadi adalah sebesar Rp2.816.688,15 juta.</p> <p>4. Selama Tahun 2008 sampai dengan 2010, terdapat reimbursement sebesar Rp85.847,43 juta atas tujuh penjaminan/hibah dengan nilai talangan Rp0,00.</p> <p>5. Terdapat WA untuk hibah IF 093613 dengan aplikasi nomor 01188UN sebesar Rp787,45</p>					<p>Melalui Mekanisme Revisus yang (Aksi/tef) Dalam LKPP Tahun 2010 (Aksi/tef) Sebagai Dasar Koreksi Akuntansi atas Saldo Awal Liang Mulla BUN pada LKBUN Tahun 2011.</p> <p>Telah disusun Bnis Proses Tasta Cara Penarikan dan Pengelolaan Rekening Riungan dan Hbwh, dan saat ini sedang dalam pengembangan aplikasinya.</p> <p>Sistem akuntansi dan pelaporan Rekening Khusus dan Rekening Dana Talangan sedang dalam penyempurnaan.</p> <p>Telah dilaksanakan pemetaan data untuk tahun 2009 dan 2010, dengan hasil terdapat dana talangan sebesar Rp17.475.232.003 dan reimbursement sebesar Rp197.995.246.080 yang belum selesai dipetakan.</p>	
						<p>2. Menyempurnakan peraturan dan proses bisnis pengelolaan Rekening Khusus terkait penggunaan Dana Talangan apabila terjadi Rekening Khusus kosong/tidak mencukupi.</p> <p>3. Memperbaiki Sistem Akuntansi dan Pelaporan Rekening Khusus dan Rekening Dana Talangan.</p> <p>4. Melakukan verifikasi atas penggunaan nilai Dana Talangan dan reimbursement masing-masing sebesar Rp1.142.215,25 juta dan Rp1.427.815,40 antara lain: a. Dari data temuan atas undentified transaction telah dilaksanakan pemetaan dan identifikasi data. Data yang belum dapat diidentifikasi sebesar masing-</p>		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -446-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>juta yang batal diajukan kepada Bank Dunia. WA tersebut seterusnya diajukan untuk mengganti pemberian talangan pengalangan SP7D nomor 1521940 tanggal 28 Desember 2009 melalui KPPN Jakarta III. Pembatalan dilakukan karena pinjaman tersebut sebenarnya telah <i>overdraw</i> (tebih melebihi nilai pagu pinjaman yang tercantum dalam DJPA). Dengan demikian, pemberian talangan sebesar Rp.78,45 juta tersebut tidak akan pernah mendapatkan penggantian dari donor.</p>				<p>masing Rp 18.995.538.900 dan Rp 1.387.971.412.723.</p> <p>b. Mengajukan permintaan penjelasan atas nilai talangan dan reimbursement yang belum dapat diidentifikasi dan ID-nya (<i>undentified transaction</i>) kepada Bank Indonesia.</p> <p>5. Melakukan rekonsiliasi data antara DJPBN dan K/L dan melakukan klarifikasi data antara penerimaan pembiayaan/ pendapatan hibah dengan Aplikasi Penarikan Dana (<i>Withdrawal Application/WA</i>);</p> <p>6. Melengkapi data pengawasan pengajuan (<i>Withdrawal Application</i>) dan pengembangannya dari <i>Awak/Donor</i>.</p>	<p>Telah dilaksanakan rekonsiliasi data pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan upaya penyelesaian masalah terkait PHLN dengan <i>Executive Agency</i>. Rekonsiliasi data PHLN dengan <i>executing agency</i> akan dilakukan secara menyeluruh terhadap PHLN yang ada, dengan mempertimbangan prioritas kebutuhan antara lain batas waktu closing date/closing account atau PHLN yang memiliki permasalahan untuk segera diselesaikan.</p> <p>Data mengenai tanggal, nomor dan besaran WA telah dapat disediakan sehingga perbandingan antara nilai WA dan <i>drawdown</i>nya dapat dijelaskan. Dari daftar WA yang menurut BPK</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -447-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>7. Terhadap temuan nilai Rp85.947,43 juta atas 7 perjanjian/hibah dengan nilai tsalangan Rp0:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi data dan besaran nilainya untuk masing-masing transaksi. Melakukan pembetulan Sistem Akuntansi pengelolaan Rekening Khusus dan Dana Talangan. Melakukan penyempurnaan pengawasan <i>with/awal/ application</i> dengan sistem aplikasi yang memadai. <p>8. Terhadap <i>overdraft</i>, yaitu pencairan bedanya dari <i>grant</i> yang melebihi nilai <i>grant</i>, akan dibebankan penggunaan Dana Talangan dimaksud kepada KIL yang bersangkutan. <i>Overdraft</i> ditambahkan oleh kenaikan nilai tukar (<i>exchange rate</i>) nilai terhadap rupiah pada saat perencanaan (pagu DIPA) dengan nilai</p>	<p>besarnya lebih kecil dari pada re/imbursement-nya, telah dapat dilengkapi data WA berkenaan.</p> <p>Data yang sudah dapat diidentifikasi sebesar Rp15.554.921.134, sedangkan sisanya sebesar Rp70.292.510.338 sudah dikonfirmasi ke BPK pada tanggal 23 Juni 2011 untuk memastikan rincian data sebagaimana dimaksud.</p> <p>Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan surat nomor S-5993/PB/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang permintaan penggantian atas pengeluaran grant 93613 yang tidak mendapat penggantian (<i>issigable</i>) dari Bank Dunia karena melebihi pagu hibah.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -448-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Modifikasi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.2	Sistem pengendalian atas pencatatan piutang pajak oleh DJP tidak memadai	<p>1. <i>Monitoring</i> atas pencatatan penambahan Piutang Pajak yang berasal dari SKPKBT tahun Pajak 2008 s.d. 2010 masih lemah, sehingga terdapat perbedaan nilai antara penambahan Piutang Pajak yang berasal dari pencatatan SKPKB dan STP dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dengan data dalam Sistem Informasi DJP (SIDJPS) Sistem Informasi Perpagalan Modifikasi (SIPMod) sebesar Rp2.510.754,65 juta. Sampai dengan penyusunan laporan, Pemerintah belum dapat memberikan dokumen sumber terkait Piutang Pajak.</p> <p>2. Terdapat selisih absolut nilai pengurang Piutang PBB dalam LP3 dengan penerimaan PBB sebesar Rp1.033.757,40 juta.</p> <p>3. Saldo awal dan saldo akhir Piutang Pajak pada LKPP Tahun</p>	X			<p>tular pada pelaksanaan pembayaran.</p> <p>1. Terkait dengan <i>monitoring</i> pencatatan penambahan piutang, langkah yang akan dilaksanakan adalah</p> <p>a. Menyusun prosedur dan format kertas kerja rekonsiliasi penambahan Piutang Pajak dari SKPKB/SKPKBT/STP yang dilaporkan di Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dan register SIDJPS/SPMod.</p> <p>b. Menyusun prosedur dan format kerja <i>monitoring</i> SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 ke atas yang telah diaku sebagai Piutang Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>c. Membangun aplikasi yang mengintegrasikan seluruh transaksi perpajakan yang mempengaruhi Piutang Pajak.</p>	<p>Selesai disusun tanggal 8 Juli 2011</p> <p>Selesai disusun tanggal 8 Juli 2011</p> <p>Aplikasi untuk Penyusunan Kertas Kerja Laporan Perkembangan Piutang Pajak (L.04.05) sudah selesai dibangun.</p>	Selesai

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -449-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Amda)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		2010 per 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan rincian per SKPKB/STP.				<p>2. Terkait selisih pengurang Piutang PBB dalam LPJ dengan penerimaan PBB, langkah-langkah yang akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rekonsiliasi data pembayaran PBB antara Modul Penerimaan Negara dan Bank Operasional III. b. Melakukan sinkronisasi dan penutakhiran data pembayaran PBB khususnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMOJP). <p>3. Terkait pencatatan pelimpahan SP3DRI dan DUBC ke DUP, langkah-langkah yang dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan perubahan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-78/PJ/2008 tanggal 19 Desember 2008, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI); 	<p>Penutakhiran Piutang PBB Non Migas pada Aplikasi SISMOJP telah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2011</p> <p>Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-84/PJ/2008 tentang Penutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan akan direvisi.</p> <p>Penegapan Penutakhiran data Piutang PBB sektor P2</p>	<p>Juli 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -450-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.3	Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 belum seluruhnya dilakukan IP, masih berbeda dengan laporan hasil IP, dan belum didukung dengan pencatatan pengguna barang yang memadai	1. Milis koreksi yang berasal dari laporan Tim Selges IP DJKN per 1 April 2011 pada 74 K/L sebesar Rp410.294.609,02 juta, sedangkan nilai koreksi yang telah di- <i>input</i> ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik				<p>b. Menindaklanjuti SP3000 senilai Rp46.720.899.090 yang telah divalidasi oleh DJBC ke masing-masing KPP terkait melalui Surat Direktur Pemertasaan dan Penagihan Nomor S-481/PJ.04/2011 tanggal 11 Mei 2011.</p> <p>4. DUP akan menyusun kertas kerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Penambahan Putang Pajak oleh masing-masing KPP sehingga dapat dilakukan <i>monitoring</i> atas Putang Pajak sejak awal timbulnya sampai tanggal laporan keuangan.</p>	<p>Keuangan</p> <p>Penurunan Data SP3000 Tahun 2011 selesai dilakukannya pada tanggal 27 Mei 2011</p> <p>Selesai disusun pada tanggal 4 Agustus 2011</p>	
			X			<p>1. Terkait dengan hasil inventarisasi dan Penilaian (IP):</p> <p>a. Mendorong seluruh K/L untuk menyempikan pelaporan BMM Semester I/2011 secara lengkap dan tepat waktu termasuk untuk melakukan verifikasi dan validasi data IP sebelum dilakukan</p>	<p>Seluruh K/L telah menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBPI) Semester I/2011 secara tetap dan telah melaporkan koreksi hasil IP</p>	Tahun 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -451-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>MegralSIMAK berdasar data DJKN sebesar Rp410.099.943,27 juta sehingga terdapat selisih neto sebesar Rp194.666.751,83 juta, atau selisih absolut sebesar Rp12.946.515,83 juta.</p> <p>2. Hasil pemeriksaan pada KL juga menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Aset Tetap pada delapan KL dengan nilai perolehan sebesar Rp5.394.273,04 juta yang belum dilakukan IP; - Aset Tetap bukan milik KL yang bersangkutan senilai Rp27.127,02 juta dimasukkan sebagai hasil IP; - Hasil IP pada tiga KL sebesar Rp282.656,47 juta masih belum menunjukkan nilai wajar di antaranya karena nilaiya masih sebesar Rp1,00. 				<p>perhitungannya dalam SIMAK BMN.</p> <p>b. Menugaskan seluruh pemegang nominatur di Direktorat BMN bersama-sama DJKN untuk KPKM/Kanwil untuk melakukan rekonsiliasi hasil IP atau melakukan likuidasi kembali atas koreksi hasil IP satuan kerja KL pada proses rekonsiliasi BMN Semester I/2011 dan tahunan 2011 serta menugaskannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN.</p> <p>c. Mengumpulkan dan memetakan data BMN yang belum dilakukan IP atau sudah di IP namun nilainya masih belum wajar (sebaran setier, jenis BMN, lokasi BMN, dll) dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dukungan pembiayaan.</p>	<p>Berdasarkan hasil likuidasi dan rekonsiliasi sampai dengan pelaporan keuangan tahun 2011 selisih koreksi hasil IP dengan simak BMN turun menjadi Rp1.536.138.215,162 (selisih absolut) dan Rp1.325.999.554,496 (selisih neto).</p> <p>Sudah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, melalui rapat dan surat Nomor S-206/IMK.6/2011 tanggal 8 Juli 2011, namun sebagian K/L hanya menyajikan data sebaran setier yang belum di IP (belum termasuk data rinci BMN-nya).</p> <p>DJKN melalui Kanwil DJKN dan KPKM/L terkait berkoordinasi dengan setier terkait untuk mengumpulkan data BMN.</p>	<p>Tahun 2012</p> <p>Junji 2011 (selesai)</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -452-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil IP sebesar Rp56.419.063,60 juta pada empat K/L yang belum dicatat dalam LK/L. - Pelaksanaan IP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Komban TNI) belum selesai dilakukan, hasil IP belum dicatat seluruhnya, inventarisasi fiskal tidak dilakukan secara populasi, dan hasil IP masih menunjukkan nilai yang tidak wajar. <p>3. Pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah di DUKN, belum mencakup penilaian mengenai masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum bisa melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.</p> <p>4. Terdapat selisih nilai Aset Tetap antara Neraca LKPP Tahun 2010 dan Laporan</p>				<p>d. Melakukan IP dengan target penyelesaian sebelum Triwulan IV/2011 sehingga masih cukup waktu bagi satker untuk melakukan verifikasi hasil IP, rekonsiliasi dengan tim pelaksanaan IP, mengoreksi dalam aplikasi SIMAK BMN dan melaporkannya dalam laporan barang selambat-lambatnya pada laporan tahunan 2011.</p> <p>e. Melakukan pembinaan dan asistensi pada seluruh K/L terutama terkait monitoring koreksi IP dengan target TA 2011 adalah periode terakhir koreksi IP.</p> <p>f. Menyelenggarakan rapat dan</p>	<p>Sedang dilakukan pengumpulan dan pemetaan data satker dan data BMN yang belum di IP.</p> <p>dari 690 satker pada 8 K/L yang dinyatakan belum di IP pada tahun 2010 saat ini hanya tersisa 2 satker pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang belum selesai di IP. Satker tersebut adalah PPK Irigasi Sorong dan PPK Irigasi Manokwari. Kendala penyelesaian IP pada 2 satker tersebut terkait dengan keberadaan BMN yang belum dinilai dan belum tersedianya data spesifikasi BMN. Data spesifikasi ini diperlukan mengingat BMN yang menjadi temuan BPK adalah berupa seluruh air di bawah permukaan tanah</p> <p>Pembinaan dan asistensi pada K/L dalam rangka penyusunan LBMN dan persiapan rekonsiliasi BMN semester IV 2011 sudah dilakukan termasuk melakukan monitoring koreksi IP.</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dengan K/L</p>	Tahun 2012

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -453-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan output dari SIMAK BMN sebesar Rp37.729.088,22 juta diantaranya karena permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditelepon Status Penggunaannya (BPYBDS) sebesar Rp26.418.257,67 juta masih dicatat dalam LBMN karena belum ada PP mengenai penataannya sebagai Penyerahan Model Negara (PMN). - BMN eks DIKTP sebesar Rp10.231.833,16 juta masih disajikan dalam LBMN karena belum ada penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang mengawal BMN tersebut. Sementara itu, BMN eks DIKTP sudah tidak lagi dicatat di Neraca sebagai Aset Tetap 		X		<p>komunikasi informal dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian BMN yang dilakukan IP.</p> <p>2. Terkait dengan penerapan penyusutan aset tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun RPKM tentang Penyusutan. Mengembangkan aplikasi, sosialisasi dan <i>training</i> pada beberapa K/L. Menersikan pada seluruh K/L dengan menyesuaikan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. <p>3. Terkait dengan aset BPYBDS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan <i>monitoring</i> atas pencatatan BPYBDS pada K/L yang memiliki aset BPYBDS. 	<p>terkait telah dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian BMN yang belum dilakukan IP.</p> <p>RPKM tentang Penyusutan telah disusun dan sedang dalam proses pembahasan. Telah diterbitkan KMK No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Pengembangan aplikasi, sosialisasi, dan <i>training</i> akan diterapkan tahun 2012.</p> <p>Penerapan penyusutan pada seluruh satker K/L dilakukan pada tahun 2013.</p> <p>Pada tanggal 10 dan 11 Februari 2011 telah dilakukan rekonsiliasi antara K/L dengan BUMN serta Kementerian BUMN dan DJKN untuk memastikan pencatatan BPYBDS telah sesuai</p>	<p>Tahun 2012</p> <p>Tahun 2012</p> <p>Tahun 2013</p> <p>Semester II 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -454-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>melainkan direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain.</p> <p>- Aset tetap Renovasi sebesar Rp610.572.952 juta dibukukan dalam Neraca menggunakan mekanisme jumlah aset karena alunnya telah tersedia. Namun, Aset Tetap Renovasi tidak dapat dibukukan dalam LEMM karena aset belum tersedia kodifikasinya.</p>				<p>dengan Perdirjen Perbendaharaan No.10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan BPYBDS dalam Penyusunan LKPP dan Surat Menten Keuangan kepada K/L nomor S-343/MK/06/2009 tanggal 4 Juni 2009 hal Perilaku Pencatatan BPYBDS pada neraca K/L dan neraca BUMN.</p> <p>Telah dilakukan rapat koordinasi percepatan penyelesaian BPYBDS yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, dan Dineski BUMN yang memiliki BPYBDS.</p>		
						<p>b. Meminta K/L agar mempercepat penyempalan pemindahan penerapan status aset BPYBDS menjadi PMN, sehingga dapat diproses Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara.</p> <p>c. Memproses usulan PMN dari BPYBDS yang sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan, antara lain:</p> <p>1). BPYBDS pada Perum LKBN Antara senilai Rp25.927 miliar, dimana PP PMN nya telah diharmonisasikan di Kuntara, dan dalam proses</p>	<p>Meminta K/L agar mempercepat penyelesaian BPYBDS yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, dan Dineski BUMN yang memiliki BPYBDS.</p> <p>PMN BPYBDS pada Perum LKBN Antara telah ditetapkan dengan PP.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -455-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>penyempaiannya DPR;</p> <p>2). BPYBDS pada PT PLN senilai Rp20,019 triliun, dimana saat ini telah dimintakan persetujuan kepada DPR RI, dan sedang dibahas di Komisi terkait di DPR.</p> <p>3). BPYBDS pada 13 BUMI di bawah Kementerian Perhubungan, dimana saat ini Kementerian Perhubungan alian melampirkan data-data atas kelengkapan data yang telah disampelkan.</p>	<p>RPP PMN BPYBDS pada PT PLN telah dilakukan pembahasan dengan Komisi DPR terkait. Sesuai hasil pembahasan RPP dengan Senat dan Kementerian & HAM tanggal 13 Juli 2011, apabila tidak terdapat kejelasan status persetujuan DPR, Menteri Keuangan dapat mengajukan surat kepada pemindahtanganan BUMN kepada DPR dengan pertimbangan persetujuan terabut pada dasarnya sudah diberikan melalui Peraturan Pasal 31 UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011.</p> <p>Perkembangan BPYBDS pada 13 BUMI tersebut sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 BUMI sedang dalam proses harmonisasi RPP, yaitu: PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Pelindo IV, PT ASDP, dan PT Pengerukan Indonesia; 	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -456-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							<ul style="list-style-type: none"> - 1 BUMN telah dimintakan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan No S-611/MK.06/2011 tanggal 5 September 2011, yaitu PT Pelindo II. - 4 BUMN sedang dalam proses kajian bersama, yaitu: Perum DAMRI, PT Kereta Api Indonesia, PT Djakarta Lloyd, dan PT PELNI. 	
						<p>4. Menyusun RPKM pengelolaan BMN eks DK/TP yang diperoleh sebelum TA 2010, termasuk di dalamnya peraturan terkait mekanisme Hibah, penjualan, pemusnahan, penghapusan, serta akuntansi dan pelaporannya.</p>	<p>Peraturan terkait Pengelolaan BMN eks DK/TP sudah ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2011 melalui PMK No. 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011.</p>	
						<p>5. Mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Pengalangan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.</p>	<p>PMK No. 29/PMK.06/2010 telah diimplementasikan, termasuk kodifikasi Aset Tetap Renovasi yang sudah diimplementasikan pada Laporan BMN Semester I/2011.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -457-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.4	Pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset Bks KKKS belum memadai	<p>1. Beberapa kelemahan pengendalian terkait dengan inventarisasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pemberian tanda IP pada aset-aset yang telah diinventarisir secara sensus tersebut. Sehingga timbul risiko adanya aset yang tidak terhitung (inventarisasi) atau terhitung dua kali. - Ketidaksagaman sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi fisik, sedang, atau jelek) dan status (digunakan atau tidak digunakan) serta adanya kreativitas masing-masing tim dalam 	X			<p>6. Menyempurnakan aplikasi SIMAK BKN.</p> <p>1. Menempatkan Buletin Teknis Inventarisasi yang telah dipublikasikan mengenai metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP BKN KKKS. Buletin Teknis Inventarisasi tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan IP BKN KKKS yang belum selesai.</p> <p>2. Melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil IP yang telah selesai dilaksanakan dan memperhalusnya sesuai dengan hasil rekomendasi temuan BPK yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan kurs sesuai dengan tanggal/bulan perolehannya PIS (Face Into Services) untuk aset perolehan tahun 2005 ke atas. 	<p>Aplikasi SIMAK BKN sudah dipaparkan dengan menyelesaikan pengolongan dan kodifikasi BKN sesuai PMK No. 29/PMK/06/2010 dan semua K/L sudah melakukan migrasi dari aplikasi SIMAK lama ke SIMAK baru per-Semester I 2011.</p> <p>Buletin Teknis Inventarisasi telah diterapkan pada kegiatan IP lanjutan (dimulai bulan Juli-September 2011) di KKKS yang belum selesai dilakukan IP.</p> <p>Hasil IP sedang dalam proses perbaikan oleh Karwil DUKW dan Kantor Pusat DUKW.</p>	Juni 2011 (selesai)

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -458-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>melaksanakan inventarisasi aset.</p> <p>- Pelaksanaan inventarisasi aset KKKS secara sensus dragulan karena adanya beberapa aset yang kondisi dan statusnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek fisik BPK.</p> <p>2. Kelemahan pengendalian terkait penilaian yaitu:</p> <p>- Tidak terdapat dokumentasi yang memadai atas proses awal penetapan metode/pengukuran menggunakan pendekatan biaya (MPC) dan perbandingan data pasar, tentang bagaimana asumsi disusun dan simplifikasi ditetapkan;</p> <p>- Tidak adanya validasi atas data dasar Harta Modal III yang digunakan, yang sebenarnya merupakan data aset KKKS yang dibuat oleh</p>				<p>Hasil koreksi Kantor Pusat DJKN telah disampaikan kepada Kamwil DJKN untuk dilakukan perbaikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BMW KKKS. Selanjutnya hasil koreksi tersebut akan disampaikan kembali kepada Kantor Pusat DJKN.</p> <p>b. Terhadap status sumur telah dilakukan koreksi sesuai dengan data yang disampaikan BP MIGAS/KKKS, sehingga terhadap sumur yang sudah pemanen/akan dikalikan dari neraca (CaLK) sedangkan sumur yang masih digorekan akan dicatat dalam neraca.</p> <p>c. Telah disusun foto aset KKKS sesuai dengan format yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa IP aset KKKS dimaksud telah dilaksanakan secara sensus, mengingat jumlah dan</p>		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -459-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>Pertamina (sangat) ini dikelola oleh BP MIGAS untuk tujuan cost recovery untuk inventarisasi aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian aset KKKK dilakukan tanpa membandingkan dengan dokumen sumber atau dokumen pendukung masing-masing aset. - Pelaksanaan penilaian aset pada beberapa KKKK yang telah dinyatakan selesai 100% belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat beberapa aset dengan nilai hasil penilaian senilai nol. - Penilaian aset yang diperoleh tahun 2004 dan sebelumnya menggunakan nilai kurs tanggal penilaian, namun untuk aset yang diperoleh tahun 2005 s.d. 2010 menggunakan kurs akhir tahun penolehan. Dari Harmoni III terdapat 				<p>karakteristik aset KKKK diharapkan penyusunan foto selesai pada bulan September 2011.</p> <p>d. Terhadap <i>subsequent expense/love</i> untuk aset KKKK saat ini sedang dilakukan pembahasan.</p> <p>3. Melanjutkan IP BMW KKKK yang belum selesai. Berdasarkan rapat koordinasi tingkat pusat yang diadakan tanggal 23 Juni 2011 telah disepakati bahwa IP BMW KKKK yang belum dilaksanakan (terhadap 36 KKKK) akan dimulai pada minggu kedua Juli 2011 yang diawali dengan pembekalan di 3 titik tempat yaitu Makassar (tanggal 01 Juli 2011), Pekanbaru (tanggal 04 Juli 2011) dan Jakarta (04 Juli 2011).</p>	<p>Terkait dengan pelaksanaan <i>subsequent events</i> berupa <i>overhaul</i>, telah dijawab oleh KSAP bahwa perlakuan kapitalisasi <i>overhaul</i> dilaksanakan sesuai dengan PP 71/2010 tentang SAP.</p> <p>Pencapaian IP BMW KKKK sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011 (Audiited) selesai sebanyak 73 KKKK dan target penyelesaian sebanyak 76 KKKK, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011 (Audiited): <ul style="list-style-type: none"> - Tanah: Rp14.362.284.169.984. - Non Tanah: Rp136.146.896.126.232. 	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -460-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>Informasi BPK LHP SPI - LKPP TAHUN 2010 Halaman 37 dari 46bulan <i>Place /no Service</i> (PIS) sehingga sbbanannya kurs yang digunakan untuk perolehan aset tahun 2005 s.d. 2010 adalah kurs akhir bulan perolehan.</p> <p>- Dalam penitisan DJKW tidak mempertimbangkan status aset. Selain itu nilai aset KIKS di harrumi III termasuk biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh KIKS setelah tanggal perolehan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAP yang mengatur bahwa pengeluaran setelah tanggal perolehan akan dikapitalisasi bila menambah kapasitas dan tenaga aset.</p> <p>- Masih adanya beberapa aset dengan tahun perolehan setelah tahun</p>					<p>- Ditunggalkan dalam CaLK LKPP Tahun 2011 (Audiited).</p> <p>- Aset sunur yang tidak digunakan sebesar Rp1.119.972.096.205.</p> <p>- Aset <i>Subsequent Expenditure</i> sebesar Rp44.345.555.350.377.</p> <p>- Aset Kondisi Rusak Berat sebesar Rp1.313.308.913.398.</p> <p>- Aset yang dalam proses penghapusan sebesar Rp927.406.395.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -461-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>3. Terkait aset kredit eks BPPN:</p> <p>a. Mengelola database aset kredit eks BPPN hasil inventarisasi dan verifikasi dalam Modul Kelayaan Negara II.</p> <p>b. Rekonstruksi data penyerahan pengurusan aset kredit dengan KPKML dalam rangka update/validasi data berikut.</p>	<p>- Telah dilakukan pemisahan data jumlah dan nilai aset kredit yang telah diserahkan kepada KPKML dan Karwali setempat.</p> <p>- Dari hasil inventarisasi aset kredit di tahun 2011, diperoleh sejumlah dokumen kredit dengan nilai sebesar Rp21.981.781.870.391 (termasuk nilai matauang asing setelah dikomversi dengan kurs tengah per 30 Desember 2011), atau disebut juga <i>Non-Azaf Transferred KK (Non-ATK)</i>.</p>	Desember 2011
						<p>4. Terkait aset properti eks BPPN:</p> <p>a. Inventarisasi fisik dan penilaian aset berputra, aset site keajaiban, dan aset dalam sepihak, serta 244 aset hasil verifikasi.</p> <p>b. Mengelola database aset properti eks BPPN hasil verifikasi dan penilaian dalam Modul Kelayaan Negara II.</p>	<p>Dalam tahun 2011, 726 aset properti dari 1.643 aset properti yang memiliki dokumen aset yang memadai dimiliki sebesar Rp1.981.239.805.153. Dalam proses penilaian 726 aset properti, kantor penilai tidak dapat menemukan fisik aset 67 aset properti, maka atas aset dimaksud disajikan dengan menggunakan nilai buku sesuai data dan Tim Koordinasi. 917 aset properti akan dilakukan penilaian di tahun anggaran 2012.</p>	Desember 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -463-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
4.	Sistem Pengendalian Keuangan Status penitipan, pengelolaan, dan penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk urun dana pensiun masih belum diatur dengan jelas.	Berdasarkan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010, dapat diketahui bahwa status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk urun dana pensiun masih belum diatur dengan jelas.			X	1. Menyempurnakan kebijakan dan aturan mengenai penyelenggaraan program pensiun PNS, termasuk kepastian mengenai status dana pensiun PNS. Penyelesaian ini merupakan bagian dari grand design perubahan program pensiun dan THT PNS yang disinkronkan dengan implementasi SUSM. 2. Melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.	Kementerian Keuangan bersama Kementerian PAN dan RB, BKN, Setkab dan Setneg telah melakukan beberapa kali pertemuan dan telah disusunkan usulan revisi PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS. Mentri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Presiden RI Nomor 5/886/MK/02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Permohonan Inisiasi Perubahan PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.	2012-2014
5.	Sistem Pengendalian Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2010 masih berbeda dengan rincian fisik kas	Dalam LKPP Tahun 2010, saldo akhir SAL menurut catatan masih berbeda dengan rincian fisik kas. Fisik SAL, setelah dikurangi Utang PPK dan Utang pada Pihak Ketiga adalah Rp97.700.391,95 juta atau lebih kecil sebesar Rp-40.204,49 juta dibandingkan catatannya. Selisih antara fisik dan catatannya SAL tersebut diantaranya terjadi karena: - Terdapat akumulasi uang persediaan yang sudah				1. Menyusun Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan salah kurs pada perovialian luar negeri. 2. Melakukan penelusuran dan identifikasi permasalahan terkait saldo kas di Bendahara Pengeluaran di KPPN dan kas pada BILL. 3. Menyusun petunjuk langkah-langkah bagi KPPN dalam penyelesaian permasalahan Kas di Bendahara	Penyusunan PMK mengenai perlakuan salah kurs masih dalam proses pembahasan dan penyelesaian. Penelusuran dan identifikasi permasalahan terkait saldo kas di Bendahara pengeluaran telah dilaksanakan. Telah dimulainya langkah-langkah bagi KPPN untuk menyelesaikan permasalahan kas di bendahara pengeluaran pada Semester II Tahun 2011	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -464-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESMIAN
			1	2	3			
		<p>digunakan oleh Kementerian LuarNegeri sebesar Rp80.077,83 juta, namun belum dipertanggungjawabkan sehingga masih tercatat sebagai utang KL pada BUN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum efektifnya rekonstruksi antara data realisasi belanja berdasarkan SAU dan SAI sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp17.405,48 juta. - Adanya kesalahan penggunaan mata anggaran atas penyeteroran pengembalian UP oleh satker selama tahun 2010. - Adanya permasalahan terkait pengelolaan dana talangan dan pengantiannya. - <i>Vendor/donor</i> Masih ditemukan <i>wadew/leak transactions</i> atas talangan dan pengantiannya selama tahun 2010 masing-masing sebesar Rp16,78 juta dan Rp184.163,44 juta. 				<p>Pengeluaran.</p> <p>4. Terhadap temuan <i>wadew/leak transactions</i>, akan dilakukan likuidasi atas data tahun 2010 baik penggunaan dana talangan dan pengantiannya, serta diimbangi dengan mengajukan pemintaan penyelesaian atas nilai talangan dan pengantiannya kepada Bank Indonesia.</p>	<p>neraca tingkat KPPN khususnya terkait transaksi tahun-tahun yang lalu, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan setor bendahara atas sisa UP yang disetor ke bank parapsi bujukan mitra kerja KPPN satker tsb. - Koreksi atas kesalahan penggunaan akun pada storan sisa UP. - Koreksi pencatatan atas kelebihan setoran sisa UP untuk mengoreksi saldo kas di bendahara pengeluaran yang muncul pada neraca KPPN. - Koreksi akumulasi atas kas di bendahara pengeluaran yang sudah tidak dapat ditelusuri lagi dokumen sumber maupun sekiernya. <p>Data dana talangan yang sudah dapat diidentifikasi sebesar Rp15.554.921.134 sedangkan sisanya sebesar Rp70.292.910.398 sudah dikonfirmasi ke BPK tanggal 23 Juni 2011 untuk memastikan rincian data sebagaimana dimaksud.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -465-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TERHADAP PERATURAN/PERKURANG-UNDANGAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN	
			1	2	3				
II	<p>TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN/PERKURANG-UNDANGAN</p> <p><i>Pendapatan dan Hibah</i></p> <p>1.1 Penetapan, pengisian, dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas sehingga realisasi PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak sejalan kewajarannya</p>		<p>1. Melaksanakan pengisian dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DJP tidak melakukan pengawasan yang memadai terkait penyempalan SPDP PBB Migas. - DJP tidak menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam UU PBB dalam penetapan PBB Migas. - Pengisian PBB Migas kepada subjek pajak tidak memiliki dasar hukum. <p>2. Penetapan Nilai PBB Migas Tidak Wajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas areal <i>onshore</i> yang digunakan DJP sebagai dasar perhitungan PBB Migas bukan hanya luas tanah yang sudah dibebaskan, melainkan seluruh luas wilayah kerja berdasarkan koordinat yang 	X			<p>1. Melaksanakan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang ada, khususnya yang mengatur masalah areal <i>onshore</i> dan hasil produksi. Langkah nil yang akan dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi antar Direktorat untuk memperbaiki Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-155/PJ.2010 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ.2010 untuk mempertegas mengenai definisi dan klasifikasi objek PBB Migas, khususnya areal <i>onshore</i> dengan menyesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p> <p>2. Melaksanakan perbaikan terhadap aturan dan mekanisme penetapan dan pengisian PBB Migas melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi bersama lintas Esdun I di lingkungan Kementerian 	<p>Dokumen tagihan PBB Migas telah dilengkapi dengan SPPT dan DUA telah memproses pembayaran triwulan I & II 2011 sesuai dengan tagihan DJP. Pembayaran PBB Migas sebesar Rp19,3 T mengacu sesuai dengan SPPT PBB Migas tahun 2010 sebagai dasar pengisian, yang telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan surat Direktur Eksternifikasi dan Penilaian nomor S-525/PJ.06/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan S-1266/PJ.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011.</p>	November 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -466-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>ditemukan dalam Kontrak Kerja Sama. Hal tersebut mengakibatkan pengenaan ganda atas satu objek pajak yang sama, bahkan pengenaan pajak atas objek yang tidak dikenalkan PBB atau yang dikecualikan dari wilayah kerja.</p> <p>- Luas areal <i>arsofave</i> yang digunakan oleh DJP melebihi luas wilayah administrasi kabupaten/kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>- Terdapat kelebihan penyetoran PBB Migas atas Hasil Produksi sebesar Rp371.779,28 juta (Rp7.209.041,02 juta - Rp6.837.261,74 juta). Berdasarkan hasil uji petik menunjukkan adanya KKK\$ yang melaporkan hasil produksi pada KKK\$ yang belum menggesarkan</p>				<p>Kuangan untuk menyempurnakan aturan yang selama ini menjadi payung hukum penetapan dan pengisian PBB Migas yang tidak sesuai lagi, antara lain:</p> <p>1) Surat Edaran Bersama antara Dirjen Pajak dan Dirjen Lembaga Keuangan (selarang Dirjen Anggaran) Nomor 630/4568, tanggal 24 September 2001 untuk disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Pemintasan Pemda/BUKuan Pembayaran PBB Migas untuk disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada.</p>	<p>Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Minyak Bumi, dan Panas Bumi, yang akan mengatur mengenai obyek dan subyek, pengenaan, pengisian, dan pembayaran PBB Migas.</p> <p>Rancangan ini merupakan konsep terintegrasi antara unit eselon I yang berkaitan dengan PBB Migas, termasuk Panas Bumi. Dalam rancangan PMK tersebut beberapa hal perlu disempurnakan, seperti mekanisme pelunasan PBB berdasarkan SPPT yang harus diterima dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak SPPT diterima dengan mekanisme distribusi dana bagi hasil PBB Migas yang dilakukan setiap 3 bulan.</p> <p>Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga sebagai perbaikan atas Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (selarang Direktur Jenderal Anggaran) nomor 630/4568 tanggal 24 September 2001.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -467-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<i>Wing</i> yang sebenarnya.				<p>b. Menyusun SOP <i>Wing</i>, yaitu SOP yang mengatur alur penerapan dan pengisian PBB Migas antar unit eselon I di Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dengan BPMIGAS dan Kementerian ESDM untuk mendorong percepatan penyampaian SPDP dari KKKS sehingga SPPT PBB Migas untuk tahun pajak berjalan dapat segera terselesaikan.</p> <p>3. Melaksanakan verifikasi atas validitas data luas areal tanah dan bangunan yang disampaikan oleh KKKS melalui BPMIGAS sehingga diperoleh data objek pajak yang lebih valid, termasuk inventarisasi data luas 51 kabupaten/kota yang kelebihan luas administrasi serta selesih <i>Wing</i>.</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan BPMIGAS untuk mengkonfirmasi luas areal tanah dan bangunan yang disampaikan dalam SPDP oleh KKKS.</p>	<p>SOP Link akan diselesaikan dengan mengacu pada RPKM yang sedang disusun.</p> <p>Koordinasi telah dan akan terus dilakukan.</p> <p>Telah dilakukan analisis data spasial, dan diketahui bahwa pengisian luas wilayah kerja dalam SPDP seharusnya terdiri dari beberapa kabupaten/kota, namun dalam penulisan di SPDP dimasukkan dalam satu kabupaten/kota tertentu. Akan dilakukan koordinasi dengan BPMIGAS untuk menyelesaikan masalah ini.</p> <p>Perhitungan PBB Migas secara keseluruhan telah mencerminkan luas wilayah kerja yang dikuasai KKKS, namun distribusi dalam wilayah</p>	<p>Agustus 2011</p> <p>September s.d. Desember 2011</p> <p>Desember 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -468-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Amda)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESIAN
			1	2	3			
1.2	Penyelesaian PPN sebesar Rp11,26 triliun melalui mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN	Penyelesaian PPN melalui mekanisme Pajak OTP tidak sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 16B yang menyatakan bahwa fasilitas PPN berupa: (1) terutang tetapi tidak dipungut baik sebagian maupun seluruhnya; dan (2) dibebaskan.	X			<p>b. Jika terdapat selisih luas, akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan hasil ukuran yang lebih riil.</p> <p>c. Mengusulkan untuk diperhitungkan dalam tahun-tahun berikutnya terkait dengan pembayaran PBB Migas.</p> <p>Pemerintah akan mengubah skema pemberian Pajak Ditanggung Pemerintah menjadi skema pemberian subsidi harga.</p>	<p>kabupaten/kota perlu diperbaiki sesuai dengan kabupaten/kota dimana wilayah kerja pertambangan itu berada</p> <p>Berdasarkan hasil pembahasan APBN-P 2011 antara DPR dan Pemerintah, dievaluasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPN OTP telah dihapuskan dalam APBN-P 2011 2. Dalam APBN-P 2011, termasuk dalam belanja Subsidi BBM adalah pajak atas Subsidi BBM. 3. Kementerian Keuangan berdasarkan kesepakatan dengan BPK sedang menyusun kajian tentang pajak atas Subsidi BBM. 	<p>Akhir Semester II Tahun 2011, disesuaikan dengan APBN-P 2011</p>
1.3	PNBP pada 41 KL Minimal sebesar Rp368,97 miliar belum dilatibai terambatkan disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp213,75 juta	1. Terdapat PNBP yang terambatkan disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp312.504,54 juta yang terjadi pada 23 KL.	X			<p>1. Mendorong pimpinan KL untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengelola PNBP yang mengelola PNBP tidak sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Pimpinan KL yang menjadi teruan BPK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Nomor: S-172/MK.2/2011 	<p>Juni-Juli 2011</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -469-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	milir digunakan langsung di luar mekanisme APBN	2. Terdapat PMBP yang belum disektor pada 18 KL sebesar Rp56.464,60 juta dan PMBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp213.752,49 juta.				yang berlaku.	tanggal 20 Juli 2011 hal Pembentukan PMBP dan Pembentukan Sanksi kepada Pengelola PMBP, dan Surat Nomor: S-2008/PA/G/2011 tanggal 22 Agustus 2011, hal Permintaan Laporan Tindak Lanjut dan Penyampalan Copy SSSP atas Temuan BPK Tahun 2010.	
						2. Menyusun RPKM tentang sanksi atas pengeluaran PMBP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Telah dilakukan pembahasan secara intensif atas RPKM sanksi. Ketentuan sanksi akan diatur dalam revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PMBP. Sedang disusun RPKM mengenai tata cara pelaksanaan dan waktu penyeteroran secara berkala. Beberapa KL, seperti Badan Pertanahan Nasional, BKKBN, Kementerian Perencanaan dan Ekonomi Kreatif, BMKG, Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menyampaikan surat teguran kepada setiap terhitung di lingkungannya.	Tahun 2012

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -470-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2	Belanja Negara							
2.1	Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas	1. Pengalokasian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2010 tidak sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal	X			Pemerintah akan menyampaikan Dana Penyesuaian dalam pembahasan Keuangan dan RAPPN TA 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal	Beberapa KL telah melakukan penyetoran PWP nya ke Kas Negara, seperti Kementerian Pertanian (Rp61.060.101), Basamas (Rp1.161.330.000), Badan Pertanahan Nasional, BKKBN (Rp128.540.504), Kementerian Serneg (Rp15.061.358), BPKP (Rp465.155.000-), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp353.000), Kementerian Kehutanan (Rp 3,7 M), Kementerian Dalam Negeri (Rp1.900.000,-), Kementerian Kesehatan, Beberapa KL sedang/ telah menyusun petunjuk pelaksanaan penatausahaan PWP, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, BAPETEN, LAPAN, BATAN, BPKP.	Agustus 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -471-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Lanjutan)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>27 menyatakan bahwa penempatan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan sekarang kurangnya sebesar 26% dan Penempatan Dalam Negeri (PDN) Melebihi yang ditetapkan APBN dan Penjelasan Pasal 107 ayat (2) menyatakan bahwa DAU ditetapkan sebesar 25,5% dan PDN Melebihi s.d. Tahun 2007.</p> <p>2. Bidang yang dibayai oleh DPDP, PPD, DPPPD, dan DPPPP hampir sama dengan bidang yang dibayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>3. Belum ada ketentuan dan prosedur yang jelas dalam menentukan daerah dan besaran alokasi atas Dana Penyesuaian, terutama DPDP, PPD, DPPPD, dan DPPPP.</p> <p>4. Belum diketahui efektivitas kegiatan yang didana oleh Dana Penyesuaian Alokasi kurang bayar DAK tidak sesuai dengan alokasi pos yang seharusnya.</p>				<p>diperlukan tambahan Dana Penyesuaian, agar tetap mengacu pada kriteria dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan (transparan dan akuntabel). Pemerintah juga akan mempertajam kriteria, program, dan jenis kegiatan yang dapat mencerminkan output dan outcome dalam mengalokasikan Dana Penyesuaian.</p>	<p>Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan perubahan APBN 2011 pada bulan Agustus 2011.</p> <p>3. Pemerintah bersama DPR telah memasukkan dalam UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2010 kriteria-kriteria alokasi Dana Penyesuaian yang terukur.</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -472-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiensi)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2.2	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD53,45 Ribu Tidak Dilaksanakan Keempatnya, Diberikan Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Dilukung Bukti Pertanggungjawaban	<p>1. Pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.713,17 juta pada 23 KL digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak pernah dilakukan;</p> <p>2. Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas atas nama satu orang yang berbantuan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke tempat lain. Permasalahan ini ditemukan pada sembilan KL dengan nilai Rp1.293,13 juta;</p> <p>3. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban. Adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan menggunakan mas-kapai sesuai tiket yang dilamarikan sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. Permasalahan ini terjadi pada 33 KL dengan nilai Rp69.159,26 juta dan</p>	X			<p>1. Memberikan pembinaan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>2. Menyetorkannya ke Kas Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan;</p>	<p>1. Pembinaan kepada pegawai telah dan terus dilakukan. Beberapa KL juga telah menyampaikan teguran kepada satuan kerjanya, seperti Arsip Nasional RI, BPP, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.</p> <p>2. Beberapa KL telah menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dilaksanakan ke Kas Negara, seperti Badan Pertanahan Nasional (Rp106.370.000), Arsip Nasional RI (Rp139.490.000), BPP (Rp131.957.100), Kementerian Pertanian (Rp1.095.258.283), BAKOSURTANAL (Rp94.153.950), BPP (Rp131.957.100), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp183.275.840).</p>	Tahun 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -473-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>USD63.45 ribu.</p> <p>4. Penjelasan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perencanaan, Permasalahan ini terjadi pada dua IKL dengan nilai Rp6.420,98 juta</p>					<p>Komisi Yudisial (Rp52.560.100), Kementerian Kehutanan (Rp1.743.710.880), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp461.496.700), BAPETEM BATAM (Rp73.260.806), Kementerian Sosial (Rp24.360.000), Kementerian Sosial (Rp796.404.912), BPKP (Rp236.752.500), Kementerian Koordinator (Rp2.709.740.700), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (Rp.77.038.710), Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp224.867.085.), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (Rp.37.563.800), Kementerian Koperasi dan UKM (Rp1.068.240.501), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Rp.11.161.300) dan Setreg (Rp.26.111.100)</p>	
						<p>3. Melakukan verifikasi perjalanan dinas dengan dokumen sumbernya.</p>	<p>3. Umuk mengindari penyimpangan pertanggungjawaban SPPD perlu</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -474-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Aneka)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>4. Menyusun SOP perjalanan dinas;</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>ditugaskan tugas dan tanggung jawab PPK selaku pejabat yang menguji permintaan pembayaran atas bukti-bukti pengeluaran.</p> <p>4. Sudah dibentuk tim pada Kementerian Keuangan yang menangani pengaturan tentang perjalanan dinas.</p> <p>5. Penguasaan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan terus dilakukan.</p>	

Keterangan:

Klasifikasi 1: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Klasifikasi 2: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.

Klasifikasi 3: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -475-

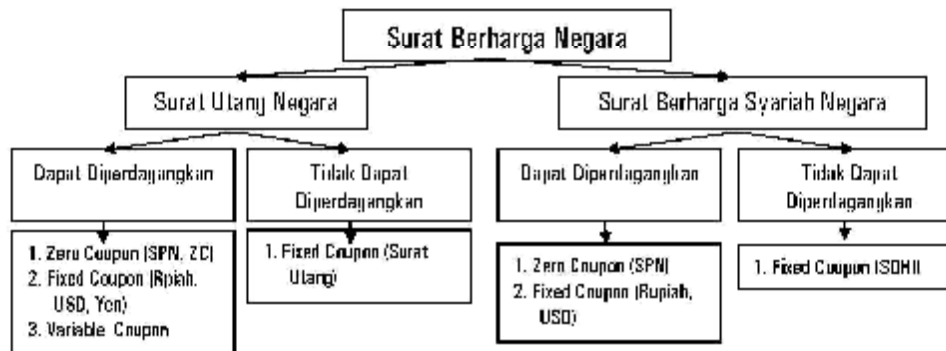
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2011 dan berakhir 31 Desember 2011, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Secara umum, SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu *Zero Coupon* (ZC). Sementara itu, Surat Berharga Syariah Negara mulai diterbitkan pada tahun 2008 dengan denominasi Rupiah dan tingkat imbalan tetap (*Fixed Rate*).

Berikut ini adalah gambaran struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2011:



Grafik 49: Struktur Surat Berharga Negara

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2011

Target pembiayaan APBN-Perubahan tahun 2011 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp126,6 triliun. Realisasi SBN Neto tahun 2011 mencapai 95,58%. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*). Untuk melaksanakan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dilakukan kegiatan:

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2011 dilelang sebanyak 24 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2011. Penerbitan Obligasi Negara secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1,02 kali sampai 56,63 kali.

Total nilai net nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp89,514 triliun, ON dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate*) dan ON dengan pembayaran bunga secara diskonto (*Zero Coupon*) tidak diterbitkan pada tahun 2011, serta ORI diterbitkan sebesar Rp11,00 triliun. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor cara *backbuilding* melalui Agen Panjua yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. Penerbitan ORI008 tersebut mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat, terbukti dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp11,00 triliun.

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2011, Pemerintah menerbitkan 23 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp 40 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2011

No	Seri	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value
1	SPN.C3111119	16 Agustus 2011	18 November 2011	-	1.201.070.000.000
2	SPN.C3111223	20 September 2011	23 Desember 2011	-	131.070.000.000
3	SPN.C312010E	04 Oktober 2011	05 Januari 2012	-	732.000.000.000
4	SPN.C3121113	18 Oktober 2011	18 Januari 2012	-	200.000.000.000
5	SPN.OE12020E	01 November 2011	02 Februari 2012	-	1.100.000.000.000
6	SPN.OE120223	24 November 2011	23 Februari 2012	-	500.000.000.000
7	SPN.12120E13	19 Agustus 2011	18 Agustus 2012	-	1.500.000.000.000
8	SPN.12120E14	25 September 2011	14 September 2012	-	2.230.000.000.000
9	SPN.1212170E	04 Oktober 2011	05 Oktober 2012	-	4.100.000.000.000
10	SPN.1212170E	01 November 2011	02 November 2012	-	4.530.000.000.000
11	SPN20110623	22 Maret 2011	23 Juni 2011	-	2.000.000.000.000
12	SPN20110706	05 April 2011	06 Juli 2011	-	2.000.000.000.000
13	SPN20110720	19 April 2011	20 Juli 2011	-	600.000.000.000
14	SPN20110804	03 Mei 2011	04 Agustus 2011	-	2.000.000.000.000
15	SPN20110922	23 Juni 2011	22 September 2011	-	100.000.000.000
16	SPN20111006	05 Juli 2011	06 Oktober 2011	-	1.400.000.000.000
17	SPN20111020	19 Juli 2011	20 Oktober 2011	-	550.000.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

18	SPN20120209	06 Februari 2011	09 Februari 2012	-	3.800.000.000.000
19	SPN20120309	10 Maret 2011	09 Maret 2012	-	3.450.000.000.000
20	SPN20120406	05 April 2011	06 April 2012	-	950.000.000.000
21	SPN20120504	03 Mei 2011	04 Mei 2012	-	700.000.000.000
22	SPN20120608	07 Juni 2011	08 Juni 2012	-	4.150.000.000.000
23	SPN20120706	07 Juli 2011	06 Juli 2012	-	2.200.000.000.000
					40.800.000.000.000

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing (International Bonds)

Total penerbitan *International Bonds* dalam tahun 2011 mencapai USD2,5 miliar atau setara dengan Rp21,44 triliun. Mempertimbangkan daya serap pasar SBN domestik, pada tahun 2011 dilaksanakan 1 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan Mei 2011 yaitu seri RI0521 dengan tingkat yield 4,875%.

Penerbitan Obligasi Negara di pasar internasional pada tahun 2011 ini adalah untuk kedua kalinya sejak penerbitan pertama pada tahun 2004 lalu. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2011 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

Sehubungan dengan kinerja penerbitan *International Bonds* pada tahun 2008, telah diperoleh penghargaan internasional, yaitu The Assets Triple A Deal of The Year 2008 untuk kategori sebagai berikut:

1. *Best Issuer*;
2. *Best Sovereign Bond* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38;
3. *Best Deal in Indonesia* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38.

The Asset sebagai salah satu media keuangan internasional memberikan penghargaan tersebut karena menilai Indonesia telah berhasil dalam menerbitkan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan tenor 10 dan 30 tahun di tengah-tengah krisis keuangan global yang penuh tantangan.

D. Pelaksanaan Debt Switching/Buyback

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2011 adalah sebanyak 4 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp664 miliar.

Tabel 15
Debtswitch Tahun 2011

No	Tanggal Debtswitch	Penawaran yang Masuk	Jumlah Dimenangkan
1	31-Jan-2011	2.172.000,0	233.000.000.000
2	4-May-2011	291.000,0	50.000.000.000
3	15-Jun-2011	552.000,0	381.000.000.000
4	15-Dec-2011	65.000,0	.
	JUMLAH	3.080.000,0	664.000.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Selain itu juga telah dilakukan *cash buyback* sebanyak 13 kali yang dilakukan dengan mekanisme lelang dan pembelian langsung (*direct payment*) dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp3,4 triliun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 16

Transaksi *Buyback* Tahun 2011 (dalam miliar rupiah)

No	Tanggal	Seri	Jatuh Tempo	Volume
1	11 Jan	FR0016	15-Aug-11	5,000
		OR1003	12-Sep-11	155,000
		FR0025	15-Oct-11	10,000
	Sub total			170,000
2	18 Jan	FR0020	15-Dec-13	100,000
	Sub total			100,000
3	21 Jan	FR0020	15-Dec-13	12,200
		FR0027	15-Jun-15	85,000
	Sub total			97,200
4	29 Apr	Tidak ada yang dimenangkan		
	Sub total			-
5	14 Sep	FR0030	15-May-16	100,000
	Sub total			100,000
6	15 Sep	FR0054	15-Jul-31	393,000
	Sub total			393,000
7	16 Sep	FR0054	15-Jul-31	183,000
	Sub total			183,000
8	21 Sep	FR0023	15-Dec-12	54,000
		FR0020	15-Dec-13	13,000
		FR0051	15-May-14	25,000
		VR0019	25-Dec-14	850,000
		FR0027	15-Jun-15	283,000
		VR0021	25-Nov-15	100,000
		VR0022	25-Mar-16	400,000
	Sub total			2,082,000
9	22 Sep	FR0027	15-Jun-15	37,000
		FR0030	15-May-16	326,000
	Sub total			363,000
10	23 Sep	FR0026	15-Oct-14	11,786
	Sub total			11,786
	TOTAL 2011			3,499,986

Pada akhir tahun 2011, profil jatuh tempo SUN terkonsentrasi dengan jumlah cukup besar pada kurun waktu 2011-2014. Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2011-2014 tersebut, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri Obligasi Negara jangka pendek dan menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2011-2014, yang berada pada kisaran di atas Rp32,4 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi refinancing risk adalah dengan memberikan prioritas penerbitan Obligasi Negara jangka menengah dan panjang.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Disamping *debt switch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Dalam periode tahun anggaran 2011, *cash buyback* sebanyak 10 kali. *Buyback* dilakukan secara lelang dan pembelian langsung dengan jumlah nominal sebesar Rp3,499 triliun dari target sebesar Rp3 triliun. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar *bearish* ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2011

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan biaya hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung *underlying transaction* berupa sejumlah terentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *agat* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, pada 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disetujui oleh pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan
- Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang di delegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
- Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara *underlying asset*.
- Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara sebanyak 20 kali dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 17
Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2011

No	Seri	Tanggal Lelang	Maturity Date	Coupon	Valas USD	Jumlah
Total Zero Coupon (SPN-S)						1.320.000.000.000
1	SPNS03022012	02 Agustus 2011	03 Februari 2012	-		570.000.000.000
2	SPN-S24022012	23 Agustus 2011	24 Februari 2012	-		330.000.000.000
3	SPN-S12042012	11 Oktober 2011	12 April 2012	-		420.000.000.000
Total Fixed Rate						1.951.410.000.000
4	IFR0005	01 Maret 2011	15 Januari 2017	9.00000%		250.000.000.000
5	IFR0005	11 April 2011	15 Januari 2017	9.00000%		360.000.000.000
6	IFR0007	01 Maret 2011	15 Januari 2025	10.25000%		100.000.000.000
7	IFR0007	14 Maret 2011	15 Januari 2025	10.25000%		150.000.000.000
8	IFR0007	02 Agustus 2011	15 Januari 2025	10.25000%		40.000.000.000
9	IFR0010	01 Maret 2011	15 Februari 1936	10.00000%		1.150.000.000.000
10	IFR0010	14 Maret 2011	15 Februari 1936	10.00000%		850.000.000.000
11	IFR0010	11 April 2011	15 Februari 1936	10.00000%		140.000.000.000
12	IFR0010	26 April 2011	15 Februari 1936	10.00000%		500.000.000.000
13	IFR0010	02 Agustus 2011	15 Februari 1936	10.00000%		200.000.000.000
14	IFR0010	23 Agustus 2011	15 Februari 1936	10.00000%		500.000.000.000
15	IFR0010	11 Oktober 2011	15 Februari 1936	10.00000%		370.000.000.000
16	SR-003	20 Februari 2011	23 Februari 2014	8.15000%		7.341.410.000.000
Total Fixed Coupon Denominated US Dollar						9.035.000.000.000
17	SN118	17 Nopember 2011	21 Nopember 2018	4.00000%	1,000,000,000	9.035.000.000.000
Total Fixed Coupon Non Tradable Securities						11.000.000.000.000
18	SDHI 2014D	08 Februari 2011	11 Februari 2014	7.85000%		6.000.000.000.000
19	SDHI 2021A	05 April 2011	11 April 2021	8.00000%		2.000.000.000.000
20	SDHI 2021B	11 Oktober 2011	17 Oktober 2021	7.16000%		3.000.000.000.000
Total Penerbitan SBSN 2011						33.306.410.000.000

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2011

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

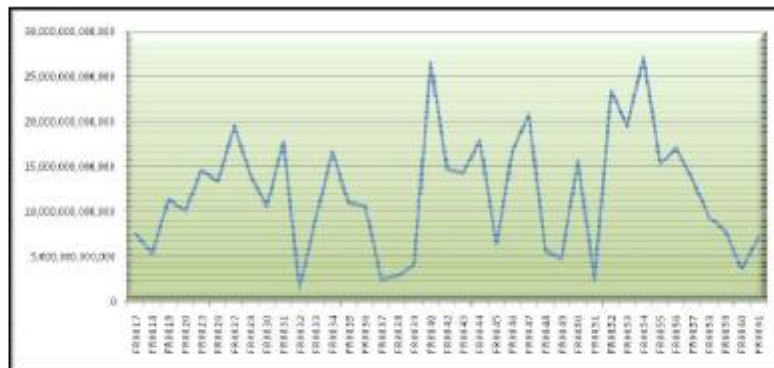
a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds - FR*)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Berdasarkan posisi akhir tahun 2011, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 6,250% sampai dengan 15% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2041. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Tabel 18

Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011

No.	Seri	Outstanding	No.	Seri	Outstanding
1	FR0017	7.531.263.000.000	21	FR0043	14.417.000.000.000
2	FR0018	5.430.062.000.000	22	FR0044	18.014.000.000.000
3	FR0019	11.456.341.000.000	23	FR0045	6.400.000.000.000
4	FR0020	10.061.751.000.000	24	FR0046	16.855.000.000.000
5	FR0023	14.722.143.000.000	25	FR0047	20.840.000.000.000
6	FR0026	13.455.749.000.000	26	FR0048	5.675.970.000.000
7	FR0027	10.554.000.000.000	27	FR0049	4.786.607.000.000
8	FR0028	14.221.766.000.000	28	FR0050	15.686.000.000.000
9	FR0030	10.657.000.000.000	29	FR0051	2.336.123.000.000
10	FR0031	17.689.000.000.000	30	FR0052	23.500.000.000.000
11	FR0032	1.434.000.000.000	31	FR0053	19.622.000.000.000
12	FR0033	9.400.474.000.000	32	FR0054	27.096.000.000.000
13	FR0034	16.756.400.000.000	33	FR0055	15.400.000.000.000
14	FR0035	11.023.750.000.000	34	FR0056	17.164.000.000.000
15	FR0036	10.735.500.000.000	35	FR0057	13.550.000.000.000
16	FR0037	2.450.000.000.000	36	FR0058	9.400.000.000.000
17	FR0038	2.920.757.000.000	37	FR0059	7.850.000.000.000
18	FR0039	4.175.000.000.000	38	FR0060	3.700.000.000.000
19	FR0040	26.474.000.000.000	39	FR0061	7.100.000.000.000
20	FR0042	14.774.100.000.000			



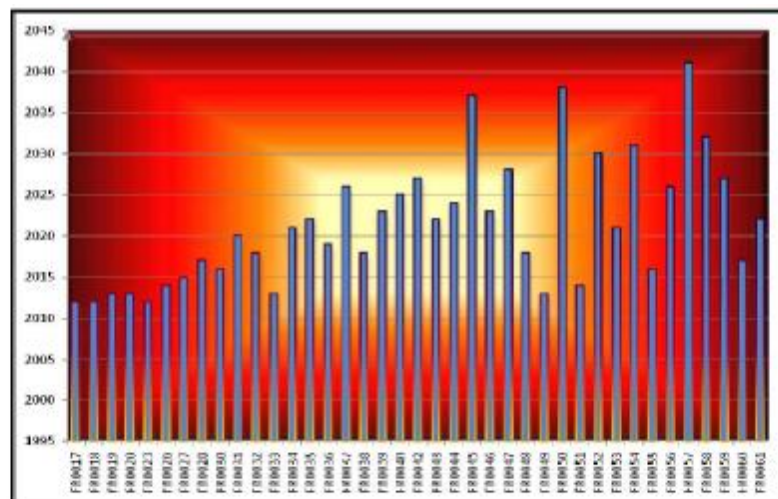
Grafik 50: Struktur Outstanding ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 19

Jatuh Tempo SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011

No	Seri	Jatuh Tempo	No	Seri	Jatuh Tempo
1	FR0015	15 Februari 2011	20	FR0037	15 September 2026
2	FR0016	15 Agustus 2011	21	FR0038	15 Agustus 2018
3	FR0017	15 Januari 2012	22	FR0039	15 Agustus 2023
4	FR0018	15 Juli 2012	23	FR0040	15 September 2025
5	FR0019	15 Juni 2013	24	FR0042	15 Juli 2027
6	FR0020	15 Desember 2013	25	FR0043	15 Juli 2022
7	FR0022	15 September 2011	26	FR0044	15 September 2024
8	FR0023	15 Desember 2012	27	FR0045	15 Mei 2037
9	FR0025	15 Oktober 2011	28	FR0046	15 Juli 2023
10	FR0028	15 Desember 2014	29	FR0047	15 Februari 2028
11	FR0027	15 Juni 2015	30	FR0048	15 September 2018
12	FR0029	15 Juli 2017	31	FR0049	15 September 2013
13	FR0030	15 Mei 2016	32	FR0050	15 Juli 2038
14	FR0031	15 November 2020	33	FR0051	15 Mei 2014
15	FR0032	15 Juli 2018	34	FR0052	15 Agustus 2030
16	FR0033	15 Maret 2013	35	FR0053	15 Juli 2021
17	FR0034	15 Juni 2021	36	FR0054	15 Juli 2031
18	FR0035	15 Juni 2022	37	FR0055	15 September 2016
19	FR0036	15 September 2019	38	FR0056	15 September 2026

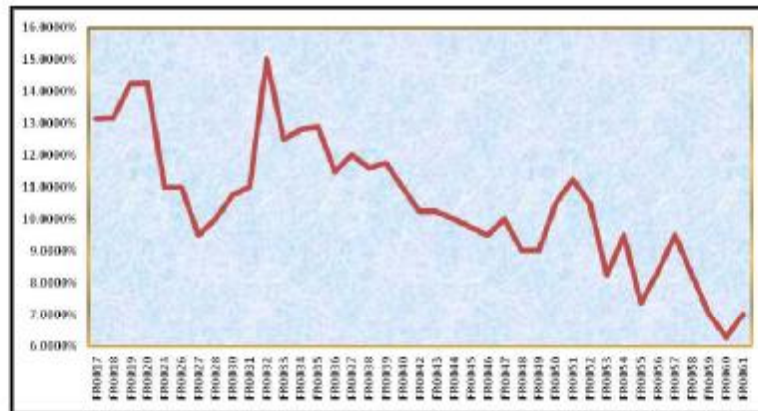


Grafik 51: Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2011

Tabel 20

Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011

No	Seri	Kupon	No	Seri	Kupon
1	FR0015	13,4000%	20	FR0037	12,0000%
2	FR0016	13,4500%	21	FR0038	11,6000%
3	FR0017	13,1500%	22	FR0039	11,7500%
4	FR0018	13,1750%	23	FR0040	11,0000%
5	FR0019	14,2500%	24	FR0042	10,2500%
6	FR0020	14,2750%	25	FR0043	10,2500%
7	FR0022	12,0000%	26	FR0044	10,0000%
8	FR0023	11,0000%	27	FR0045	9,7500%
9	FR0025	10,0000%	28	FR0046	9,5000%
10	FR0026	11,0000%	29	FR0047	10,0000%
11	FR0027	9,5000%	30	FR0048	9,0000%
12	FR0028	10,0000%	31	FR0049	8,0000%
13	FR0030	10,7500%	32	FR0050	10,5000%
14	FR0031	11,0000%	33	FR0051	11,2500%
15	FR0032	15,0000%	34	FR0052	10,5000%
16	FR0033	12,5000%	35	FR0053	8,2500%
17	FR0034	12,8000%	36	FR0054	9,5000%
18	FR0035	12,9000%	37	FR0055	7,3750%
19	FR0036	11,5000%	38	FR0056	8,3750%



Grafik 52: Tingkat Kupon Seri FR per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

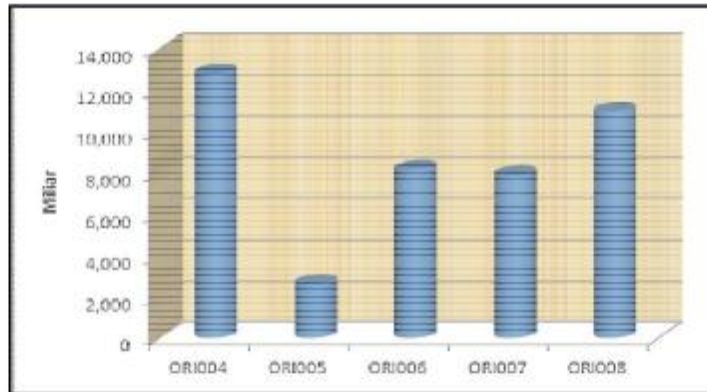
Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 – 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KMK.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito. Tahun 2011 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI008 dengan tingkat kupon 7,30% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp11 triliun sehingga posisi pada akhir 2011 menunjukkan ada 5 seri ORI yang masih outstanding dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan nilai outstanding berkisar antara Rp2,68 triliun sampai dengan Rp12,86 triliun.

Tabel 21

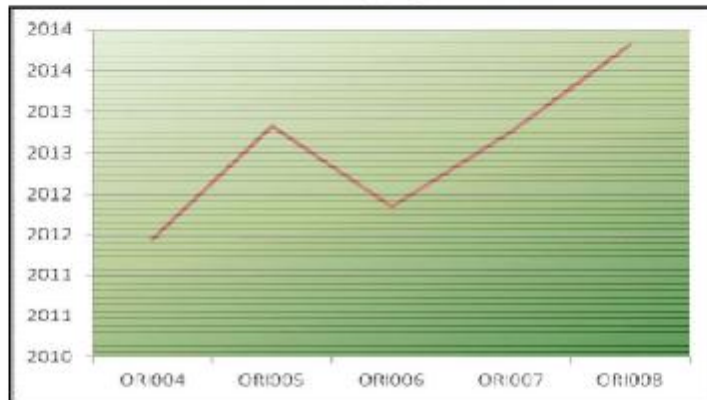
Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011

No	Seri	Outstanding	Jatuh Tempo
1	ORI004	12.839.765.000.000.00	12 Maret 2012
2	ORI005	2.666.875.000.000.00	15 September 2013
3	ORI006	8.186.730.000.000.00	15 Agustus 2012
4	ORI007	7.923.000.000.000.00	15 Agustus 2013
5	ORI008	11.000.000.000.000.00	15 Oktober 2014
	Jumlah	42.616.370.000.000.00	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 53: Struktur Outstanding ORI per 31 Desember 2011



Grafik 54: Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011

c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

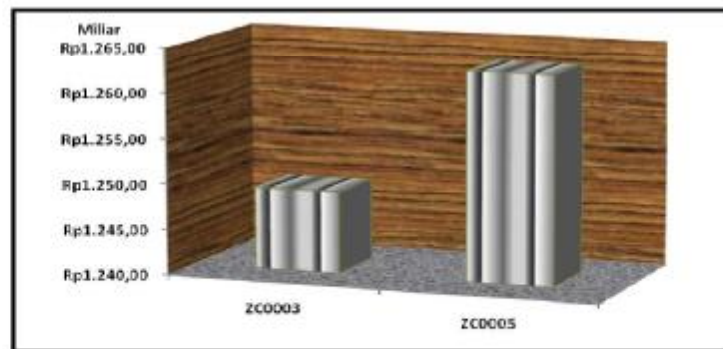
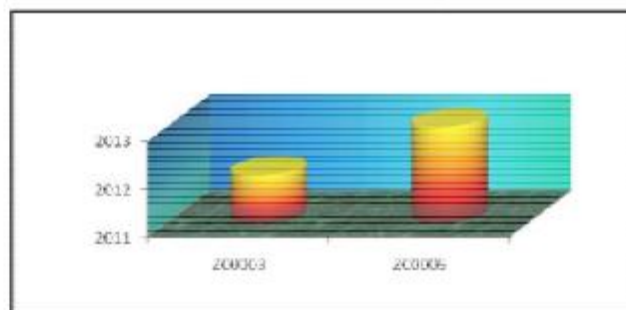
Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2011, terdapat 2 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. ZC0004 telah dilakukan pelunasan seluruhnya pada tahun 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 22

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011

No	Seri	Nilai Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
1	ZC0003	1.249.000.000.000,00	20 Nopember 2012
2	ZC0005	1.263.000.000.000,00	20 Februari 2013

Grafik 55: Struktur *Outstanding* Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011

Grafik 56: Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011

d. Obligasi berbunga mengambang (*variable rate bonds - VR*)

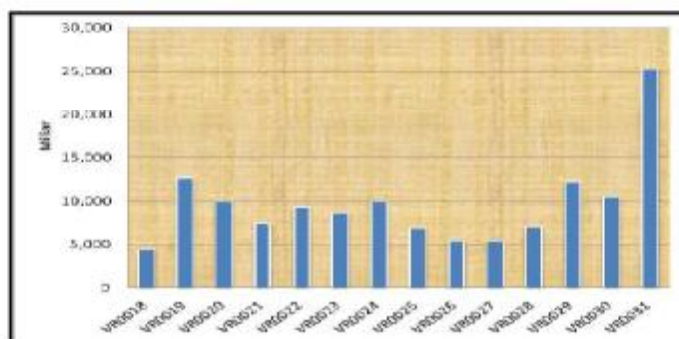
Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2011, terdapat 16 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,03 triliun sampai dengan Rp25 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2011 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 23

Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2011

No	Seri	Nilai Outstanding	Jatuh Tempo
1	VR0018	4.368.483.000.000,00	25 Oktober 2012
2	VR0019	12.656.226.000.000,00	25 Desember 2014
3	VR0020	9.899.007.000.000,00	25 April 2015
4	VR0021	7.446.328.000.000,00	25 Nopember 2015
5	VR0022	9.266.749.000.000,00	25 Maret 2016
6	VR0023	8.652.056.000.000,00	25 Oktober 2016
7	VR0024	9.909.300.000.000,00	25 Februari 2017
8	VR0025	6.909.300.000.000,00	25 September 2017
9	VR0026	5.442.142.000.000,00	25 Januari 2018
10	VR0027	5.442.142.000.000,00	25 Juli 2018
11	VR0028	7.033.994.000.000,00	25 Agustus 2018
12	VR0029	12.212.320.000.000,00	25 Agustus 2019
13	VR0030	10.503.015.000.000,00	25 Desember 2019
14	VR0031	25.322.354.000.000,00	25 Juli 2020



Grafik 57: Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2011

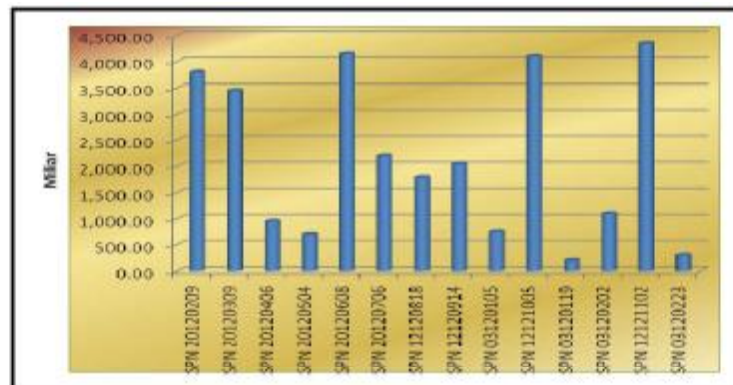
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audiited)



Grafik 58: Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2011

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penempatan secara diskonto. Sampai akhir tahun 2011, terdapat 14 seri SPN yaitu SPN 20120209, SPN 20120309, SPN 20120406, SPN 20120504, SPN 20120608, SPN 20120706, SPN 12120818, SPN 12120914, SPN 03120105, SPN 12121005, SPN 03120119, SPN 03120202, SPN 12121102, dan SPN 03120223 dengan *outstanding* berkisar Rp200 miliar dan Rp4,3 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2012. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.



Grafik 59: Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

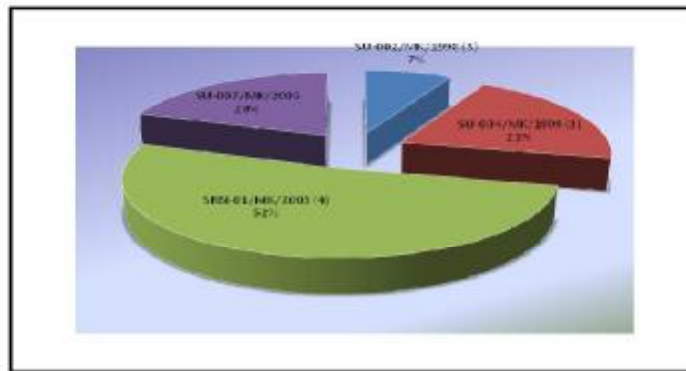
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari lima seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga.

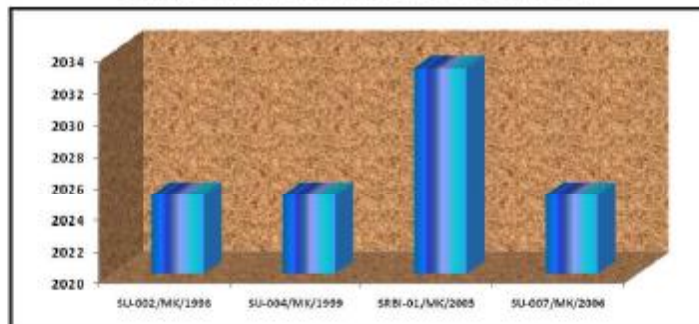
Tabel 24

Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2011

No	Nama	Outstanding	Jatuh Tempo
1	SU-002/MK/1998	18.781.775.893.847,00	01 April 2025
2	SU-004/MK/1999	50.701.147.130.899,00	01 Desember 2025
3	SRBI-01/MK/2003	126.697.947.827.429,00	01 Agustus 2033
4	SU-007/MK/2006	48.455.566.511.832,00	01 Agustus 2025
JUMLAH		244.636.437.364.007,00	



Grafik 60: Struktur Outstanding SUP per 31 Desember 2011



Grafik 61: Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

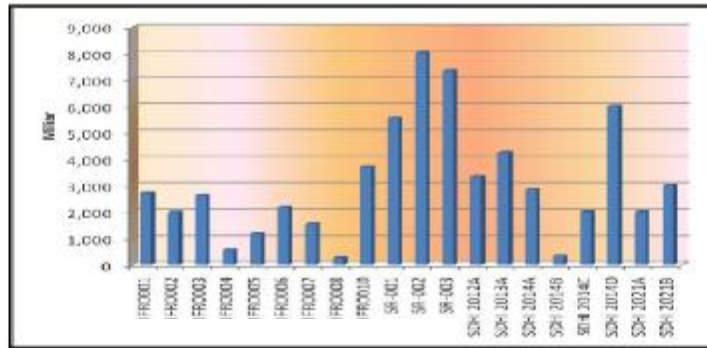
Pada akhir tahun 2011, terdapat 10 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-001, SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, SDHI 2014C, SDHI 2014D, SDHI 2021A, dan SDHI 2021B dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13% sampai dengan 8,00%.

Tabel 25

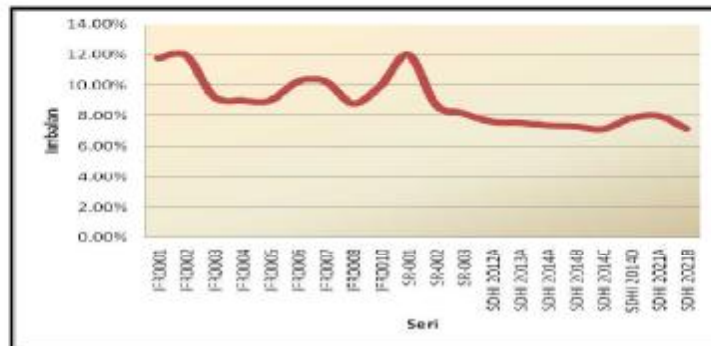
Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011

No	Seri	Jatuh Tempo	Imbalan	Outstanding
1	IFR0001	15-Aug-15	11,80%	2.714.700.000.000
2	IFR0002	15-Aug-18	11,95%	1.983.000.000.000
3	IFR0003	15-Sep-15	9,25%	2.632.000.000.000
4	IFR0004	15-Oct-13	9,00%	550.000.000.000
5	IFR0005	15-Jan-17	9,00%	1.171.000.000.000
6	IFR0006	15-Mar-30	10,25%	2.175.000.000.000
7	IFR0007	15-Jan-25	10,25%	1.547.000.000.000
8	IFR0008	15-Mar-20	8,80%	232.000.000.000
9	IFR0010	15-Feb-36	10,00%	3.710.000.000.000
10	SR-001	25-Feb-12	12,00%	3.558.290.000.000
11	SR-002	10-Feb-13	8,70%	8.033.860.000.000
12	SR-003	23-Feb-14	8,15%	7.341.410.000.000
13	SDHI 2012A	3-Mar-12	7,61%	3.342.000.000.000
14	SDHI 2013A	17-May-13	7,55%	4.250.000.000.000
15	SDHI 2014A	9-Aug-14	7,36%	2.855.000.000.000
16	SDHI 2014B	25-Aug-14	7,30%	336.000.000.000
17	SDHI 2014C	7-Oct-14	7,13%	2.000.000.000.000
18	SDHI 2014D	11-Feb-14	7,85%	6.000.000.000.000
19	SDHI 2021A	11-Apr-21	8,00%	2.000.000.000.000
20	SDHI 2021B	17-Oct-21	7,16%	3.000.000.000.000
Total				61.451.260.000.000

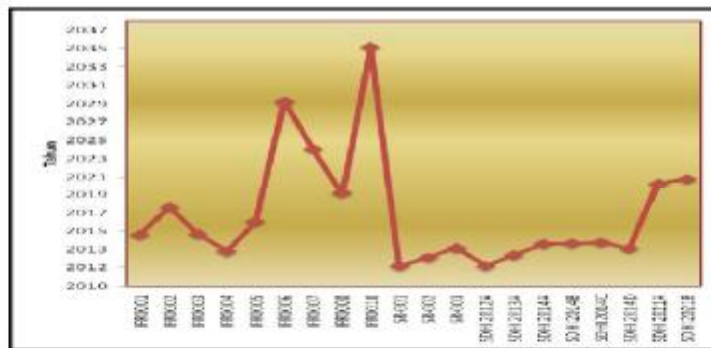
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 62: Struktur Outstanding Fixed Rate SBSN per 31 Desember 2011



Grafik 63: Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2011



Grafik 64: Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

B. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valas

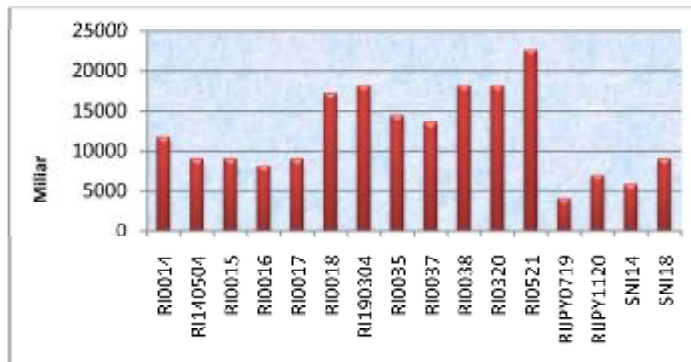
Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2011, terdapat 17 seri SBN Valas dengan 15 seri memiliki denominasi USD dan 2 seri dengan denominasi JPY yaitu seri RIJPY0719 dan RIJPY1120. SUN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 1,6% s.d. 11,63% dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2014 s.d. 2038. Selain itu terdapat 2 seri SBSN Valas yaitu seri SNI14 sebesar USD650.000.000 setara Rp5,8 triliun dan USD1.000.000.000 setara Rp9,07 triliun.

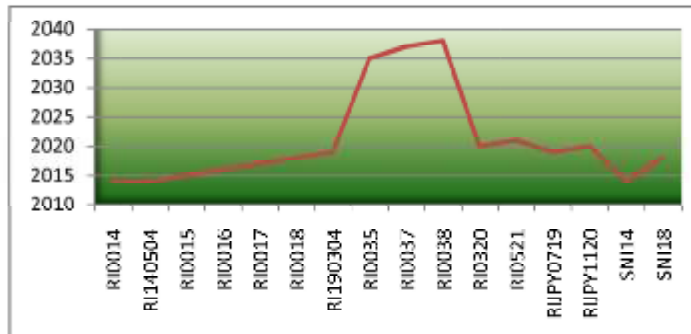
Tabel 26

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam rupiah per 31 Desember 2011

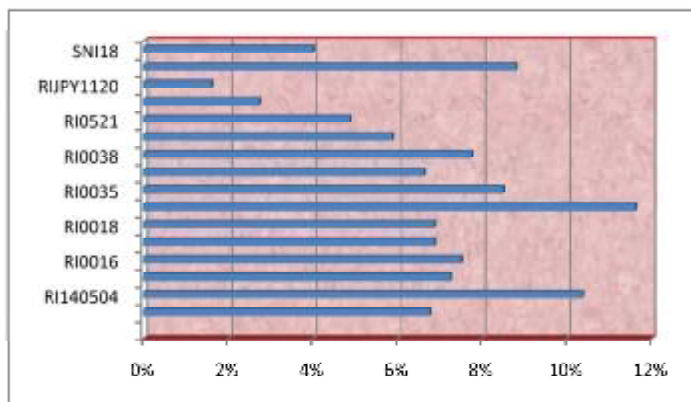
No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Outstanding	
				Valas	Rupiah
1	RI0014	10 Maret 2014	6.75%	USD 1,300,000,000	11.788.400.000.000
2	RI140504	04 Mei 2014	10.38%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000
3	RI0015	20 April 2015	7.25%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000
4	RI0016	15 Januari 2016	7.50%	USD 900,000,000	8.161.200.000.000
5	RI0017	09 Maret 2017	6.88%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000
6	RI0018	17 Januari 2018	6.88%	USD 1,900,000,000	17.229.200.000.000
7	RI190304	04 Maret 2019	11.63%	USD 2,000,000,000	18.136.000.000.000
8	RI0035	12 Oktober 2035	8.50%	USD 1,600,000,000	14.508.800.000.000
9	RI0037	17 Februari 2037	6.63%	USD 1,500,000,000	13.802.000.000.000
10	RI0038	17 Januari 2038	7.75%	USD 2,000,000,000	18.136.000.000.000
11	RI0320	13 Maret 2020	5.88%	USD 2,000,000,000	18.136.000.000.000
12	RI0521	05 Mei 2021	4.88%	USD 2,500,000,000	22.670.000.000.000
14	RIJPY0719	29 Juli 2019	2.73%	JPY 35,000,000,000	4.088.000.000.000
15	RIJPY1120	12 Nopember 2020	1.60%	JPY 60,000,000,000	7.008.000.000.000
16	SNI14	23 April 2014	6.80%	USD 650,000,000	5.894.200.000.000
17	SNI18	21 Nopember 2018	4.00%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000



Grafik 65: Struktur Outstanding SBN Valas per 31 Desember 2011 (dalam rupiah)



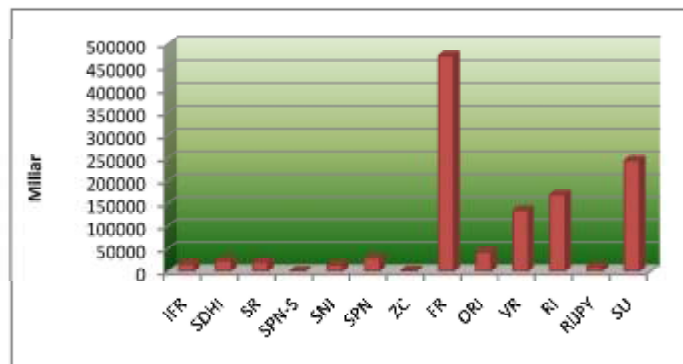
Grafik 66: Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2011



Grafik 67: Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Secara umum, struktur Surat Berharga Negara pada akhir tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 68: Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2011

V. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2011

Surat Berharga Negara dapat berubah sahnya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2011

No	Jenis SBN	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Mutasi
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3-4)
1	IFR	16.736.700.000.000,00	12.126.700.000.000,00	4.610.000.000.000,00
2	SDHI	23.783.000.000.000,00	12.783.000.000.000,00	11.000.000.000.000,00
3	SR	20.931.560.000.000,00	13.590.150.000.000,00	7.341.410.000.000,00
4	SP4-S	1.320.000.000.000,00	-	1.320.000.000.000,00
5	SNI	14.982.200.000.000,00	5.844.150.000.000,00	9.138.050.000.000,00
		\$ 1.850.000.000,00	\$ 850.000.000,00	1.000.000.000,00
6	SPN	29.900.000.000.000,00	29.795.000.000.000,00	105.000.000.000,00
7	ZC	2.512.000.000.000,00	2.512.000.000.000,00	-
8	FR	474.525.756.000.000,00	399.723.817.000.000,00	74.802.139.000.000,00
9	ORI	42.818.370.000.000,00	40.872.085.000.000,00	1.946.305.000.000,00
10	VR	135.063.416.000.000,00	142.795.082.000.000,00	(7.731.666.000.000,00)
11	RI	169.571.600.000.000,00	145.654.200.000.000,00	23.917.400.000.000,00
		\$ 18.200.000.000,00	\$ 18.200.000.000,00	2.500.000.000,00
12	RUPY	11.096.000.000.000,00	771.629.514.000.000,00	(760.533.514.000.000,00)
		\$ 85.000.000.000,00	\$ 85.000.000.000,00	-
13	SU	244.636.437.364.000,00	248.432.177.305.000,00	(3.795.739.945.085,00)
	Total	943.018.602.000.000,00	1.577.125.476.000.000,00	(634.106.876.000.000,00)

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SBN berbunga tetap (IFR) dan menurunnya porsi SBN berbunga mengambang (VR) serta menurunnya porsi Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SBN.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2011

Target APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN (SUN + SBSN) dan Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2011, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp76,160 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp65,552 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp10,608 triliun.

Pagu Bunga Utang SUN Valas ditetapkan sebesar Rp16,503 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SUN valas mencapai Rp12,789 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp3,714 triliun.

B. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah SBN Neto tidak melebihi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Untuk tahun 2011, SBN Neto dalam APBN-P ditetapkan sebesar Rp126,65 triliun, sedangkan realisasi SBN Neto mencapai Rp120,07 triliun, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp6,58 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	% realisasi terhadap target
SBN Netto (APBN)	126.653.900	120.072.948	94,80%
Kebutuhan Penerbitan 2011 (Gross)	211.179.862	204.598.910	96,88%
SUN		171.292.500	
SUN Domestik		149.890.000	
- OK		60.000.000	
- CC		.	
- EPN		49.000.000	
ORI		11.000.000	
SUN Valas		21.142.500	
SBSN		59.308.410	
SBSN Domestik		24.277.410	
IFT		4.810.000	
- SBSN FIM		7.341.410	
- SMH		11.000.000	
SFN E		1.320.000	
SBSN Valas		9.035.000	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO